LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah menunjukkan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi proses pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keadaaan keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan sehingga perlu dilakukan perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 71);

7. Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Payakumbuh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2026 adalah dokumen penyesuaian rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran.
8. Tranfer Ke Daerah selanjutnya disingkat TKD merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN dan disalurkan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah.
9. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD merupakan pendapatan yang diperoleh suatu daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disebut SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran tertentu.
11. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan selanjutnya disebut SILPA merupakan selisih antara surplus/ defisit anggaran dengan pembiayaan netto.
12. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran selanjutnya disingkat KUPA merupakan dokumen yang memuat target pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan strategi pembiayaan beserta asumsi dasarnya yang telah diperbarui atau direvisi dari APBD murni.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan I Tahun 2026 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2disusun dengan sistematika:
   a. bab I memuat pendahuluan;
   b. bab II memuat evaluasi hasil triwulan I tahun berkenaan;
   c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
   d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
   e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
   f. bab VI penutup.

(2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan:
   a. dasar penetapan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
   b. pedoman penyusunan KUPA dan PPAS.

(2) KUPA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun 2026.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 24 Juli 2026

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

ZULMAETA

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 24 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

RIDA. ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2026 NOMOR 13

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR DIAGRAM vi

BAB I PENDAHULUAN I-1
I.1 LATAR BELAKANG I-1
I.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN I-3
I.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN I-6
I.4 MAKSUD DAN TUJUAN I-7
I.4.1 MAKSUD I-7
I.4.2 TUJUAN I-7
I.5 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD I-8

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN II-1
II.1 EVALUASI INDIKATOR MAKRO DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2026 ..... II-1
II.1.1 EVALUASI INDIKATOR MAKRO II-2
II.1.2 EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA II-2
II.2 EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2026 ..... II-4
II.2.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR II-11
II.2.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR II-15
II.2.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN II-22
II.2.4 FUNGSI PENDUKUNG II-26
II.2.5 FUNGSI PENUNJANG II-27
II.2.6 FUNGSI PENGAWASAN II-29
II.2.7 URUSAN KEWILAYAHAN II-29
II.2.8 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM II-32
II.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH II-464
II.3.1 PERMASALAHAN DAERAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH II-464
II.3.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH II-466
II.4 EVALUASI CAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS II-479
II.5 EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL II-490

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1
III.1 PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH III-1
III.1.1 ASUMSI MAKRO EKONOMI APBN TAHUN 2026 ..... III-2
III.1.2 PERUBAHAN ASUMSI MAKRO EKONOMI TAHUN 2026 ..... III-4
III.2 PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH III-8
III.2.1 PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH III-17
III.2.2 SURPLUS/ DEFISIT APBD III-22
III.2.3 PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH III-23

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
IV.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN IV-1
IV.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026 ..... IV-17
IV.2.1 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2026 ..... IV-17
IV.2.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT 2026 ..... IV-18
IV.2.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH 2026 ..... IV-19
IV.2.4 SASARAN PEMBANGUNAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2026 ..... IV-26
IV.3 SINKRONISASI PRIORITAS PROGRAM NASIONAL, PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2026 ..... IV-70
IV.4 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-90
IV.4.1 INDIKATOR KINERJA MAKRO IV-90
IV.4.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA IV-90
IV.4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI IV-91

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
V.1 URUSAN WAJIB V-2
V.1.1 URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN PELAYANAN DASAR V-2
V.1.2 URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN NON PELAYANAN DASAR V-45
V.2 URUSAN PILIHAN V-80
V.2.1 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN V-80
V.2.2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA V-81
V.2.3 URUSAN PERTANIAN V-84
V.2.4 URUSAN PERDAGANGAN V-89
V.2.5 URUSAN PERINDUSTRIAN V-90
V.3 URUSAN PENDUKUNG V-92
V.3.1 SEKRETARIAT DAERAH V-92
V.3.2 SEKRETARIAT DPRD V-98
V.4 URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN V-103
V.4.1 UNSUR PERENCANAAN V-103
V.4.2 UNSUR KEUANGAN V-107
V.4.3 UNSUR KEPEGAWAIAN V-108
V.4.4 UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN V-111
V.4.5 UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN V-111
V.5 URUSAN PENGAWASAN V-112
V.6 URUSAN KEWILAYAHAN V-113
V.6.1 KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT V-113
V.6.2 KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR V-119
V.6.3 KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA V-123
V.6.4 KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN V-129
V.6.5 KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI V-133
V.7 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM V-136

BAB VI PENUTUP VI-1
V.1 KESIMPULAN VI-1
V.2 KAEDAH PELAKSANAAN VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel II 1 Capaian Indikator Kinerja Makro Kota Payakumbuh Tahun 2025 dan 2026 .II-2
Tabel II 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2025 dan 2026 II-3
Tabel II 3 Rekapitulasi Capaian Kinerja Keuangan Program Kota II-5
Tabel II 4 Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan II-34
Tabel II 5 Evaluasi Capaian Pelaksanaan SDG's Tahun 2025..... .II-473
Tabel II 6 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021-2025 ..... .II-490
Tabel III 1 Asumsi Makro Ekonomi Tahun 2026 ..... III-3
Tabel III 2 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Payakumbuh III-5
Tabel III 3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Payakumbuh..... III-9
Tabel III 4 Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh III-9
Tabel III 5 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 – 2025 dan Realisasi Tw 1 .....III-15
Tabel III 6 Capaian dan Tingkat Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 - 2025.....III-16
Tabel III 7 Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh pada Perubahan RKPD Tahun 2026 .....III-16
Tabel III 8 Realisasi dan Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024-2025 dan Realisasi Triwulan I TA 2026 .....III-20
Tabel III 9 Rencana Belanja Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 .....III-21
Tabel III 10 Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah pada APBD dan Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2026.....III-22
Tabel III 11 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 s/d 2025 ...III-24
Tabel III 12 Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan APBD dan Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2026.....III-26
Tabel III 13 Ringkasan APBD dan Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2026 ...III-26
Tabel IV 1 Arah dan Sasaran Pokok Pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 Tahap 1 ..... IV-4
Tabel IV 2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 ..... IV-9
Tabel IV 3 Keselarasan Arah Kebijakan RPJMD Kota Payakumbuh dengan Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2026..... IV-19
Tabel IV 4 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Prioritas Kota Payakumbuh Tahun 2026 .... IV-25
Tabel IV 5 Sasaran Pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2026 ..... IV-27
Tabel IV 6 Program Prioritas RKPD Tahun 2026 yang Mendukung Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh dan Keterkaitan Indikator Sasaran dengan Indikator Program..... IV-36
Tabel IV 7 Sinkronisasi Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2026 dengan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Sumatera Barat..... IV-71
Tabel IV 8 Dukungan Pemerintah Kota Payakumbuh terhadap Prioritas Nasional Tahun 2026 ..... IV-76
Tabel IV 9 Dukungan Terhadap Program Strategis Nasional (Pro-Sn) Pengentasan Kemiskinan..... IV-86

Tabel IV 10 Dukungan Terhadap Program Strategis Nasional (Pro-Sn) Ketahanan Pangan IV-87
Tabel IV 11 Dukungan Terhadap Program Strategis Nasional (Pro-Sn) Kesehatan untuk Semua IV-87
Tabel IV 12 Dukungan Terhadap Program Strategis Nasional (Pro-Sn) Perluasan Akses Pendidikan IV-88
Tabel IV 13 Dukungan Terhadap Program Strategis Nasional (Pro-Sn) Pertumbuhan Ekonomi IV-89
Tabel IV 14 Penetapan Indikator Kinerja Makro Kota Payakumbuh Tahun 2026 ..... IV-90
Tabel IV 15 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Payakumbuh Tahun 2026 ..... IV-90
Tabel IV 16 Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun 2026 ..... IV-91
Tabel V 1 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2026 .....V-141
Tabel V 2 Rekapitulasi Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Menurut Urusan pada Perubahan RKPD Tahun 2026.....V-437
Tabel V 3 Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Menurut Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026 .....V-443

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Hubungan Dokumen Perubahan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....I-7
Gambar IV 1 Keterkaitan Misi RPJMN, RPJMD Provinsi Sumbar dengan RPJMD Kota Payakumbuh IV-8
Gambar IV 2 Agenda Pembangunan RKP Tahun 2026 ..... IV-17

DAFTAR DIAGRAM

Diagram IV 1 Sistematika Keterkaitan Antara Visi, Misi dan Arah Kebijakan Tahun Pertama Pembangunan Jangka Panjang Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 ..... IV-3

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan perencanaan pembangunan merupakan sebuah siklus yang bersifat adaptif terhadap perluasan dampak permasalahan serta isu strategis yang berkembang. Adanya fluktuasi dalam indikator ekonomi makro dan penyesuaian arah kebijakan nasional menuntut konsistensi dalam dokumen perencanaan. Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang menjadi acuan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2026. Namun munculnya beberapa permasalahan, perkembangan dan dinamika situasi baik skala nasional maupun regional menyebabkan perlunya penyesuaian dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2026 melalui Perubahan RKPD Tahun 2026. Penyusunan dokumen tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Perubahan RKPD Tahun 2026 adalah dokumen penyesuaian perencanaan daerah tahun 2026 yang tetap berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sampai dengan triwulan I, yang sekaligus berfungsi sebagai pedoman perangkat daerah menyusun Perubahan Renja dan RKA PD Tahun 2026. Selain itu Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi dasar dalam penyusunan KUPA dan PPAS serta Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Perubahan RKPD memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, sasaran dan program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

Perubahan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026,

Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada Pasal 343 ayat (4) dinyatakan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Payakumbuh sampai dengan triwulan I tahun 2026 terdapat beberapa kondisi yang menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan dokumen RKPD Tahun 2026, yaitu :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah.
   Kondisi makro ekonomi hasil evaluasi triwulan I tahun 2026 tidak akan terlepas dari kemajuan dan akumulasi kondisi makro ekonomi tahun sebelumnya dimana ada target indikator makro yang sudah tercapai pada akhir tahun 2025 maupun sebaliknya sebagai berikut :
   1) Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,94% sementara realisasi di tahun 2025 adalah sebesar 3,55%,
   2) Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 4,60% sementara realisasi di tahun 2025 adalah sebesar 4,96%,
   3) Gini Rasio ditargetkan pada angka 0,310, sementara realisasi di tahun 2025 adalah sebesar 0,271,
   4) Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan pada angka 81,41 sementara realisasi di tahun 2025 adalah sebesar 81,62,
   5) Tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 4,80% sementara realisasi di tahun 2025 adalah sebesar 4,95%.

   Perkembangan beberapa asumsi di atas, memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan realisasi tahun 2025 yang tentunya tidak begitu berubah dengan hasil evaluasi triwulan I Tahun 2026.
b. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan daerah,
   Seiring berjalannya program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026, pemeritnah pusat melakukan peambahan tranfer ke daerah untuk mengurangi dampak bencana yang terjadi di Pulau Sumatera dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pendapatan transfer dari Rp.485.331.853.347,- diproyeksikan menjadi Rp.622.965.819.181,- atau bertambah sebesar Rp.137.633.965.834,- yang harus diakomodir dalam kerangka pendanaan daerah. Selain itu adanya potensi penambahan PAD menjadi Rp 171.401.910.166,- dari Rp.164.968.026.298,- atau bertambah sebesar Rp.6.433.883.868,- .
c. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2026,
   Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai triwulan I Tahun 2026, ada beberapa program kegiatan yang perlu dilakukan penyesuaian untuk efektivitas dan optimalisasi pencapaian sasaran. Terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak terdapat pada RKPD Tahun 2026 namun muncul di APBD Tahun Anggaran 2026, sehingga ada sub kegiatan yang tidak direncanakan pada RKPD Tahun 2026 namun diakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2026 yang muncul akibat kegiatan dari pusat.
d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA harus digunakan untuk tahun berjalan,
   Adanya SiLPA setelah hasil audit BPK yang harus digunakan pada tahun 2026. Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun 2026 harus “nol” rupiah, karena SiLPA dapat digunakan pada perubahan tahun 2026 setelah diaudit BPK, sehingga tercapai keseimbangan antara belanja daerah terhadap pendapatan daerah dan pembiayaan neto yang selanjutnya dirinci pada Bab III. Besaran SiLPA yang bisa dimanfaatkan pada perubahan APBD adalah sebesar Rp 85.136.180.178. Pemanfaatan SiLPA diarahkan untuk mendukung pendanaan program prioritas daerah, belanja wajib dan mengikat, serta kegiatan strategis lainnya yang belum terakomodasi pada APBD murni.
e. Kebijakan nasional atau peraturan yang lebih tinggi,
   Perubahan kebijakan nasional terkait penanganan dampak bencana alam di 3 (tiga) provinsi terdampak yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional yang menyebabkan ada penyesuaian penjabaran anggaran pada perangkat daerah sehingga perlu diakomodir pada Perubahan RKPD Tahun 2026,
f. Perubahan asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang mengubah struktur APBD Tahun Anggaran 2026, hal ini menyebabkan perlunya penyesuaian arah kebijakan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 yakni :
   1) Penyesuaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2026,

2) Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan,
3) Penyesuaian pendapatan baik dana transfer maupun PAD, pemanfaatan SiLPA berdasarkan hasil prognosis laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025.
4) Pengurangan dan realokasi anggaran sesuai kebijakan nasional
5) Evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2026.

Berdasarkan uraian di atas, untuk menjamin konsistensi, keselarasan dan kesinambungan antara perencanaan dan penganggaran, dan dalam upaya pelaksanaan dan pencapaian dengan lebih efektif dan efisien maka perlu dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2026 melalui Peraturan Walikota Payakumbuh.

I.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
19. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusatamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
30. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi

Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
38. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 79, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 225);
40. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 227);
41. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Barat;
42. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026;
43. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
44. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor…) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
45. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 55);
46. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 68);
47. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
48. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2026; (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 04);
49. Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Selain aturan di atas, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 juga mengacu pada :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai Dengan Tahun Anggaran 2024 Bagi Daerah Tertentu Di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Dan Provinsi Sumatera Barat;
3. Surat Sekretaris Presiden Nomor B-08/KSN/SP/KK.14.00/12/2025 tanggal 19 Desember 2025 hal Penyampaian Bantuan Kemasyarakatan Presiden untuk Provinsi Terdampak Bencama Alam;

4. Surat Edaran Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian transfer ke daerah tahun anggaran 2026 dalam APBD Bagi Daerah Terdampak Bencana di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat;
5. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 360-761-2025 tanggal 25 November 2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, dan Angin Kencang di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
6. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 360-803-2025 tanggal 9 Desember 2025 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Wilayah Provinsi Sumbar Tahun 2025.

I.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Perubahan RKPD Tahun 2026 merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara terpadu, berjenjang, dan berkesinambungan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan dan penganggaran pada tingkat nasional, provinsi, maupun daerah sehingga menjamin konsistensi antara arah pembangunan jangka panjang, jangka menengah, hingga perencanaan tahunan.

Secara hierarkis, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 tetap mengacu pada RPJPN Tahun 2025–2045, RPJMN Tahun 2025–2029, serta RKP Tahun 2026. Selanjutnya, pada tingkat provinsi, Perubahan RKPD Tahun 2026 memperhatikan arah kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, serta Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 sebagai bentuk sinkronisasi pembangunan antar wilayah.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 merupakan penyesuaian terhadap perencanaan tahunan dengan tetap berpedoman pada RPJMD Tahun 2025–2029 yang telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta program prioritas kepala daerah. Oleh karena itu, penyesuaian pada dokumen ini tidak mengubah arah pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2025-2029, tetapi hanya melakukan penyesuaian terhadap target, indikator, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, dan kerangka pendanaan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, perkembangan kondisi ekonomi daerah, perubahan regulasi, serta kebijakan pemerintah yang berkembang.

Perubahan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan nantinya akan menajdi pedoman dalam penysunan KUPA dan PPAS yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Tidak hanya itu, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 juga menjadi pedoman seluruh Perangkat Daerah dalam menetapkan Perubahan Renja PD Tahun 2026 yang secara simulatan dokumen Perubahan Renja PD akan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan RKA Tahun Anggara 2026. Hal tersebut mencerminkan keterkaitan yang kuat antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah sehingga setiap perubahan kebijakan tetap berada dalam satu kesatuan sistem pembangunan daerah, sehingga hubungan antar dokumen perencanaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar I-1
Hubungan Dokumen Perubahan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Keterkaitan dokumen tersebut memastikan adanya kesinambungan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan baik secara secara vertikal maupun horizontal, sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif, efisien, terukur, dan akuntabel.

I.4 MAKSUD DAN TUJUAN

I.4.1 MAKSUD

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2026 dimaksudkan untuk menyesuaikan perkembangan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 serta penyesuaian kerangka pendanaan akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan dan penganggaran yang sudah berjalan berdasarkan evaluasi triwulan I Tahun 2026.

Perubahan RKPD Tahun 2026 memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pembangunan sampai triwulan I, dan perubahan atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan tahun 2026.

I.4.2 TUJUAN

Perubahan RKPD Tahun 2026 bertujuan untuk :

1. Menjadi dasar dalam penyusunan rancangan KUPA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 antara DPRD Kota Payakumbuh dengan Wali Kota Payakumbuh yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,
2. Menjadi dasar penetapan Perubahan Renja PD sebagaimana dijelaskan pada Pasal 356 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017,

3. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2026,
4. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2026,
5. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA),
6. Melakukan perubahan kebijakan belanja terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah.

I.5 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Sistematika penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu dengan telah ditetapkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sehingga sistematika penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab I Perubahan RKPD Tahun 2026 memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen Perubahan RKPD.

BAB II Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun Berkenaan

Bab II memuat evaluasi hasil RKPD Tahun 2026 triwulan I (kondisi 31 Maret) Tahun 2026 pada kinerja pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2026 berdasarkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab III penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 mencakup perubahan asumsi makro ekonomi, arah kebijakan daerah, dan proyeksi perubahan kerangka keuangan daerah tahun 2026.

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab IV memuat tujuan dan sasaran pembangunan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, prioritas pembangunan tahun 2026 serta sinkronisasi program prioritas nasional, program prioritas Provinsi Sumatera Barat dengan prioritas pembangunan daerah Kota Payakumbuh Tahun 2026.

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab V memuat gambaran perubahan rencana program dan kegiatan tahun 2026 yang mencakup penyesuaian target kinerja program dan kegiatan, penambahan atau pengurangan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran namun tetap berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB VI Penutup

Bab VI memuat kesimpulan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 pada bab III pasal 13, Perubahan RKPD Tahun 2026 dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan/atau,
b. Keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2026.

Pada Pasal 16 peraturan di atas, menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Walikota mengenai perubahan RKPD 2026 disampaikan dengan melampirkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sampai dengan triwulan I tahun berkenaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan acuan dalam pelaksanaan evaluasi hasil RKPD, dengan memperhatikan capaian kinerja dan keuangan setiap triwulan pada tahun berkenaan dari masing-masing urusan pada setiap Perangkat Daerah pelaksana. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, mengamanatkan bahwa Kepala Bappeda melakukan pengendalian terhadap hasil pelaksanaan RKPD dengan menggunakan Formulir E.60. Formulir tersebut memuat beberapa poin penting yaitu nama program/ kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, capaian kinerja dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2026.

II.1 EVALUASI INDIKATOR MAKRO DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2026

Capaian indikator kinerja pemerintah daerah, terutama indikator makro dan indikator kinerja utama (IKU) pada tahun berjalan dievaluasi dan kemudian dikategorikan berdasarkan ketercapaiannya:

a. “Tercapai” diartikan indikator kinerja utama per 31 Maret 2026 (berpedoman pada capaian tahun 2025) sudah mencapai/ melebihi target tahun 2026,
b. “Dalam proses (*On the track*)” diartikan indikator kinerja utama per 31 Maret 2026 (berpedoman pada capaian tahun 2025) masih dalam proses atau belum melebihi target tahun 2026.
c. “Butuh perhatian khusus” diartikan indikator kinerja utama per 31 Maret 2026 (berpedoman pada capaian tahun 2025) belum mencapai target atau capaian kinerja tahun sebelumnya belum optimal.

II.1.1 EVALUASI INDIKATOR MAKRO

Indikator makro yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 terdapat 12 indikator makro. Realisasi indikator makro Kota Payakumbuh sampai dengan triwulan I Tahun 2026 dengan berpedoman pada capaian akhir tahun 2025 terlihat pada tabel berikut.

Tabel II-1
Capaian Indikator Kinerja Makro Kota Payakumbuh Tahun 2025 dan 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2025			TAHUN 2026	
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81,43	81,62	100,23	81,97	*On the track*
2	Tingkat kemiskinan	%	4,54	4,95	91,72	4,32	*On the track*
3	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,75	4,96	95,77	4,64	*On the track*
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,02	3,55	70,72	5,79	Butuh perhatian khusus
5	PDRB (ADHB) Per Kapita	Rp Juta/ orang	72,02	66,03	91,68	82,14	*On the track*
6	PDRB (ADHK) Per Kapita	Rp Juta/ orang	36,96	36,44	98,59	38,62	*On the track*
7	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Indeks	0,31	0,271	112,58	0,310	Tercapai
8	Usia harapan hidup	Tahun	75,31	75,54	100,30	75,57	*On the track*
9	Harapan lama sekolah	Tahun	14,62	14,79	101,16	14,75	Tercapai
10	Rata – Rata Lama Sekolah	Tahun	11,16	11,08	99,28	11,30	*On the track*
11	Pengeluaran per Kapita	Rp Ribu	20,900	14,536	69,55	20,930	Butuh perhatian khusus
12	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	6,74	7,37	91,45	6,5	*On the track*

Sumber: RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, BPS, 2026 (data diolah Bappeda)

Dari 12 indikator makro, 8 indikator dalam proses (*on the track*), karena target 2026 masih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, sehingga untuk program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target ini tetap dilaksanakan pada tahun berjalan. Kemudian terdapat 2 indikator yang butuh perhatian khusus, sehingga untuk program dan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian indikator ini harus ditingkatkan lagi kinerjanya. Untuk 2 indikator yang capaian tahun 2025 sudah melebihi target 2026, akan dilakukan penyesuaian target tahun 2026 pada bab IV dokumen ini.

II.1.2 EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sesuai dengan sasaran strategis yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 terdapat 5 tujuan dan 31 Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama digambarkan pada tabel II-2.

Tabel II-2

Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2025 dan 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2025			Tahun 2026	
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Tujuan I : Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing							
1	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	81.43	81.62	100.23	81.97	*On the track*
2	Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	75.31	75.54	100.30	75.57	*On the track*
3	Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	%	13.70	16.40	80.29	12.45	Butuh perhatian khusus
4	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	5.81	7.53	70.39	5.45	Butuh perhatian khusus
5	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.62	14.79	101.16	14.75	*On the track*
6	Tingkat Kemiskinan	%	4.54	4.95	91.72	4.32	*On the track*
7	Indeks Pembangunan Keluarga (*iBangga*)	Indeks	66.80	78.50	117.51%	68	Tercapai
8	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.151	0.17	83.33	0.127	*On the track*
Tujuan II : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif							
9	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.02	3.55	70.72	5.79	Butuh perhatian khusus
10	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	3.93	3.92	99.75	3.96	*On the track*
11	Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap PDRB Provinsi	%	2.89	2.78	96.19	2.97	*On the track*
12	PDRB Per-kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Rp Juta	72.02	66.03	91.68	82.14	*On the track*
13	Rasio Gini	Indeks	0.31	0.271	112,58	0.310	Tercapai
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.75	4.96	95.77	4.64	*On the track*
15	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	%	33.34	33.74	101.20	33.35	Tercapai
16	Nilai Realisasi Investasi	Milyar/Rp	660	709.66	107.52	665	Tercapai
Tujuan III : Terwujudnya tata Kelola pemerintahan dan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel							
17	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	84.00	83.28	99.14	85.00	*On the track*
18	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3.75	3.89	103.73	3.84	Tercapai
19	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	-	-	-	1.5	*On the track*
20	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4.51	4.35	96.45	4.52	*On the track*
21	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88.60	89.80	101.35	88.80	Tercapai
22	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	78.00	76.31	97.83	80.00	*On the track*
23	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100.00	WTP	*On the track*
24	Rasio PAD terhadap APBD	Rasio	0.17	0.2133	125.47	0.18	Tercapai
25	Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	%	5.00	14.80	296.00	5.00	Tercapai

NO	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2025			Tahun 2026	
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Tujuan IV : Terwujudnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK							
26	IPK berbasis ABS SBK	Indeks	72.40	72.09	99.57	73.00	*On the track*
27	Karya Budaya yang Ditetapkan	Unit	1.00	4.00	400.00	2	Tercapai
28	Cakupan Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	%	58.35	56.65	97.09	58.70	*On the track*
Tujuan V : Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan							
29	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks	68.37	70.67	103.40	68.58	Tercapai
30	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	19.68	19.05	96.80	23.54	*On the track*
31	Indeks Infrastruktur	%	64.09	64.22	100.20	64.62	*On the track*

Sumber: RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, BPS, 2026 (data diolah Bappeda)

Dari tabel II-2 di atas terdapat 10 indikator yang telah tercapai, 18 indikator yang masih dalam proses (*on the track*), dan 3 indikator butuh perhatian khusus karena kinerja rendah pada tahun sebelumnya (akhir tahun 2025). Sehingga program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini harus dioptimalkan pada tahapan perubahan RKPD Tahun 2026. Kemudian 10 indikator yang capaian tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026, pada perubahan RKPD tahun 2026 dilakukan penyesuaian target indikator yang selanjutnya akan dituangkan dalam bab IV.

II.2 EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2026

Pengendalian dan Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pada Triwulan I merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel sejak awal tahun anggaran. Penetapan batas minimal realisasi keuangan Triwulan I sebesar 15% berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900.1.15/9949/Keuda tanggal 17 Desember 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Realisasi belanja daerah hingga akhir triwulan 1 sebesar Rp. 156,938,395,273, atau mencapai 20,86% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 752.342.276.674. Capaian ini menunjukkan bahwa secara agregat Pemerintah Kota Payakumbuh telah melampaui batas minimal realisasi belanja daerah yang ditetapkan, sekaligus mencerminkan adanya komitmen yang kuat dari seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan program serta optimalisasi penyerapan anggaran sejak awal tahun.

Namun demikian, apabila dicermati lebih lanjut, capaian rata-rata tersebut masih menyisakan beberapa catatan penting. Meskipun secara keseluruhan telah berada di atas ambang batas, masih terdapat sejumlah program yang realisasi keuangannya berada di bawah 15%. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan kinerja antar program, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterlambatan proses pengadaan, belum optimalnya perencanaan teknis kegiatan, maupun kendala administratif lainnya pada tahap awal pelaksanaan. Program dengan kinerja di bawah ambang batas minimal dapat dijabarkan per-urusan sebagai berikut.

Tabel II-3

Rekapitulasi Capaian Kinerja Keuangan Program Kota

NAMA SKPD/ PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
DINAS PENDIDIKAN	**181,317,058,458**	**50,151,445,554**	**27.66**
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	147,255,333,108	48,791,613,234	33.13
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	33,963,140,700	1,359,832,320	4.00
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	98,584,650	-	-
DINAS KESEHATAN	**216,830,790,014**	**53,283,656,142**	**24.57**
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	179,919,373,772	43,075,267,568	23.94
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	33,900,923,392	10,199,733,308	30.09
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	843,784,250	-	-
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	330,580,800	6,035,000	1.83
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1,836,127,800	2,620,266	0.14
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	**43,689,412,779**	**4,259,019,152**	**9.75**
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15,581,506,275	3,112,405,565	19.97
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8,864,992,590	521,428,850	5.88
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	234,031,300	-	-
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1,143,900	-	-
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	315,300	-	-
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	6,711,944,698	202,170,167	3.01
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	204,236,538	50,311,555	24.63
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2,709,420,450	-	-
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	8,653,793,796	330,819,976	3.82
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	215,389,944	7,973,110	3.70
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	415,243,988	27,142,699	6.54
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	97,394,000	6,767,230	6.95
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**8,140,915,473**	**1,018,238,411**	**12.51**
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1,760,883,240	79,456,206	4.51
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,810,642,323	903,794,878	18.79
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	288,298,975	25,684,479	8.91
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1,211,571,675	3,481,515	0.29
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	69,519,260	5,821,333	8.37
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	**13,987,983,069**	**2,697,920,997**	**19.29**
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,069,366,049	1,472,667,912	18.25
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3,755,767,570	478,178,259	12.73
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2,162,849,450	747,074,826	34.54

NAMA SKPD/ PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	**5,043,354,531**	**891,731,600**	**17.68**
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,539,722,731	846,495,140	18.65
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	503,631,800	45,236,460	8.98
DINAS SOSIAL	**5,098,708,479**	**762,043,088**	**14.95**
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,935,488,004	746,270,192	18.96
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	210,793,575	5,367,639	2.55
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	494,672,450	4,070,000	0.82
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	316,692,050	3,434,007	1.08
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	103,468,350	985,000	0.95
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	37,594,050	1,916,250	5.10
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	**5,967,891,118**	**1,034,070,731**	**17.33**
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,238,402,090	806,232,995	19.02
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	255,299,765	3,589,842	1.41
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	93,109,550	14,079,057	15.12
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	689,941,450	163,416,082	23.69
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	632,019,638	46,752,755	7.40
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	52,342,225	-	-
3.31.-4 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	6,776,400	-	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA	**7,702,273,773**	**1,032,488,726**	**13.40**
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,201,155,023	784,757,457	15.09
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	66,141,150	919,278	1.39
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	254,889,000	9,926,680	3.89
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	434,631,800	22,917,861	5.27
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	42,271,500	-	-
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	6,517,700	760,000	11.66
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	326,095,600	-	-
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	51,000,000	-	-
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	427,242,000	66,837,450	15.64
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	892,330,000	146,370,000	16.40
DINAS KETAHANAN PANGAN	**3,218,895,255**	**610,089,113**	**18.95**
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,840,088,447	564,935,148	19.89
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	233,286,025	10,942,725	4.69
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	40,112,900	1,027,860	2.56
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	105,407,883	33,183,380	31.48
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	**16,340,705,725**	**2,241,444,835**	**13.72**
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,034,920,088	870,017,025	17.28
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	113,341,744	26,167,294	23.09

NAMA SKPD/ PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	603,820,100	57,045,733	9.45
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1,963,936,796	238,962,840	12.17
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	6,909,350	-	-
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	14,848,750	-	-
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	500,255,272	21,190,474	4.24
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	30,480,800	-	-
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	8,072,192,825	1,028,061,469	12.74
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	**4,959,570,931**	**1,107,695,465**	**22.33**
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,402,962,861	975,581,308	22.16
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	153,925,430	15,703,707	10.20
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	171,562,790	19,958,276	11.63
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	213,924,450	96,452,174	45.09
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	17,195,400	-	-
DINAS PERHUBUNGAN	**9,384,571,695**	**1,425,239,583**	**15.19**
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,784,556,045	1,207,758,279	17.80
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2,600,015,650	217,481,304	8.36
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**9,406,047,068**	**1,309,774,632**	**13.92**
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,588,525,050	1,027,911,697	22.40
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1,150,757,096	213,609,183	18.56
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3,273,259,800	58,141,593	1.78
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	62,726,350	-	-
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	330,778,772	10,112,159	3.06
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	**12,266,727,211**	**1,756,040,266**	**14.32**
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,124,129,510	1,176,665,679	19.21
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	19,999,150	2,793,315	13.97
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	14,999,250	2,089,020	13.93
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	216,374,220	36,651,258	16.94
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	19,999,850	-	-
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	19,999,475	-	-
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	99,347,000	-	-
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	19,679,200	-	-
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5,196,691,080	372,690,383	7.17

NAMA SKPD/ PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	267,012,890	70,465,276	26.39
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	66,799,156	3,489,819	5.22
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	201,696,430	91,195,516	45.21
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	**4,352,696,209**	**824,810,462**	**18.95**
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,265,492,459	806,240,162	18.90
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	87,203,750	18,570,300	21.30
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	**11,143,208,125**	**1,582,037,073**	**14.20**
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	47,247,450	-	-
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2,501,743,220	200,960,034	8.03
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	335,533,500	300,000,000	89.41
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1,363,331,050	567,000	0.04
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	46,059,800	-	-
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	12,776,750	-	-
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	7,926,800	-	-
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,919,310,115	1,008,048,748	17.03
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	489,939,440	69,915,893	14.27
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	201,051,550	-	-
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	51,025,150	-	-
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	167,263,300	2,545,398	1.52
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	**4,619,084,981**	**810,057,089**	**17.54**
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,786,149,421	713,689,298	18.85
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	604,678,000	69,367,791	11.47
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	22,599,300	-	-
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	205,658,260	27,000,000	13.13
DINAS PERTANIAN	**15,864,205,870**	**1,926,361,457**	**12.14**
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	592,976,834	42,844,404	7.23
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	98,393,930	-	-
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,515,545,004	1,715,743,583	13.71
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	906,584,637	89,490,006	9.87
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	673,617,150	-	-
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	719,711,930	74,453,964	10.34
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	43,060,735	-	-
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	314,315,650	3,829,500	1.22

NAMA SKPD/ PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
SEKRETARIAT DAERAH	**31,740,309,260**	**4,382,350,592**	**13.81**
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27,426,581,910	4,287,390,790	15.63
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4,039,763,500	60,015,033	1.49
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	273,963,850	34,944,769	12.76
SEKRETARIAT DPRD	**34,787,217,812**	**5,773,622,501**	**16.60**
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18,077,485,187	2,810,229,993	15.55
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	16,709,732,625	2,963,392,508	17.73
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**7,625,312,737**	**1,522,314,066**	**19.96**
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,512,811,587	1,424,639,939	21.87
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	382,679,325	40,772,876	10.65
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	515,547,275	51,153,804	9.92
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	145,175,850	1,631,034	1.12
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	69,098,700	4,116,413	5.96
BADAN KEUANGAN DAERAH	**19,055,966,696**	**2,584,053,843**	**13.56**
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,318,150,696	2,188,070,842	16.43
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4,155,087,150	265,978,800	6.40
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	685,372,550	51,821,620	7.56
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	897,356,300	78,182,581	8.71
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**9,557,634,013**	**1,560,093,531**	**16.32**
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,880,358,263	1,541,271,531	19.56
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1,068,605,200	14,160,000	1.33
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	608,670,550	4,662,000	0.77
INSPEKTORAT	**10,001,033,141**	**1,775,014,126**	**17.75**
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,324,339,841	1,676,159,126	17.98
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	645,078,300	94,265,000	14.61
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	31,615,000	4,590,000	14.52
KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT	**18,437,135,100**	**3,185,546,357**	**17.28**
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14,714,753,852	2,649,003,478	18.00
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	42,338,800	22,240,400	52.53
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3,479,918,823	514,102,479	14.77
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12,515,425	-	-
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	187,608,200	200,000	0.11
KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	**11,430,080,373**	**2,155,054,355**	**18.85**
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,411,184,673	1,904,082,615	20.23
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24,417,400	15,803,507	64.72

NAMA SKPD/ PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,881,053,950	233,001,259	12.39
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14,675,400	850,000	5.79
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	98,748,950	1,316,974	1.33
KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA	**10,800,670,234**	**1,898,493,667**	**17.58**
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,653,222,790	1,623,072,349	18.76
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	22,540,800	20,482,060	90.87
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,934,583,394	251,965,013	13.02
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1,307,350	-	-
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	189,015,900	2,974,245	1.57
KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN	**8,090,367,059**	**1,401,778,898**	**17.33**
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,697,846,754	1,230,834,189	18.38
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24,456,600	18,897,894	77.27
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,250,926,155	152,046,815	12.15
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4,619,700	-	-
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	112,517,850	-	-
KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI	**7,796,745,199**	**1,501,919,596**	**19.26**
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,432,072,671	1,296,120,009	20.15
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15,678,050	6,847,850	43.68
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,272,019,678	196,840,577	15.47
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3,997,800	-	-
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	72,977,000	2,111,160	2.89
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	**3,685,704,286**	**473,989,365**	**12.86**
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,858,307,573	382,565,920	20.59
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	756,277,300	1,221,000	0.16
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	787,140,463	5,473,675	0.70
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	20,951,550	1,181,250	5.64
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	58,362,800	1,575,000	2.70
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	204,664,600	81,972,520	40.05
TOTAL	**752,342,276,674**	**156,938,395,273**	**20.86**

Berdasarkan tabel II-3 maka terdapat 7 (tujuh) perangkat daerah dengan semua realisasi keuangan program kerjanya lebih dari 5%, yaitu : Satpol PP dan Damkar, BPBD, Dinas Perhubungan, DPMPTSP, Sekretariat Dewan, BKD dan Inspektorat. Sisanya membutuhkan perhatian khusus pada proses pemantauan kinerja secara berkala triwulan.

II.2.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR

II.2.1.1 URUSAN PENDIDIKAN

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.181.317.058.458,- yang terdiri dari 3 (tiga) program (11 kegiatan dan 54 sub kegiatan), dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp. 50.151.445.554,- atau 27.66%. Dari 3 (tiga) program terdapat 2 (dua) program yang belum mencapai 15%.

1. **Program Pengelolaan Pendidikan**
   Program Pengelolaan Pendidikan dengan pagu total sebesar Rp.33.963.140.700,- dan telah terealisasi Rp.1.359.832.320,- atau 4 % capaian program.

2. **Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**
   Program Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan total pagu Rp.98.584.650,- belum terealisasi atau Rp.0,- atau 0% Untuk program ini pelaksanaan kegiatannya direncanakan bulan Agustus sesuai dengan tanggal Cutt off Dapodik.

Faktor penghambat dari pencapaian kinerja adalah

a. Untuk pelaksanaan kegiatan secara fisik sudah dilaksanakan, tetapi secara keuangan belum semuanya terealisasi, hal ini terkendala karena anggaran kas terletak pada triwulan 2.
b. Untuk pembayaran honor/gaji/insentif PPPK PW yang terletak pada subkegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum dapat dibayarkan karena masih menunggu regulasi yang mendukung untuk pembayarannya.

II.2.1.2 URUSAN KESEHATAN

Dinas Kesehatan bertanggung jawab mengampu urusan wajib kesehatan. Tahun 2026, Dinas Kesehatan melaksanakan 5 program, dengan anggaran sebesar Rp.216.830.790.014,- dengan kondisi sampai dengan triwulan I tahun 2026 telah terealisasi sebanyak Rp.53.281.766.142,- atau 24,59 % dari total pagu dana. Terdapat beberapa program yang realisasinya di bawah 15% yaitu :

1. **Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan**
   Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.843.784.250,-dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp 0,- atau 0%
   Faktor Penghambat pencapaian pada program ini adalah :
   a. Skedul/ jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan pada triwulan ke dua
   b. Dalam skedul/jadwal yang disusun masih pada koordinasi dan belum melakukan realisasi belanja mengingat pelibatan pihak ketiga

2. **Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman**
   Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman dengan anggaran sebesar Rp.330.580.800,-dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.6.035.000,- atau 1,83%
   Faktor Penghambat pencapaian pada program ini adalah masih pada tahap koordinasi dan pengumpulan data dalam rangka pemantauan dan monitoring.

3. **Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan**
   Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.1.836.127.800,-dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.6.190.266,- atau 0,34%.

Faktor Penghambat pencapaian pada program ini adalah terdapat kekurangan kelengkapan administrasi untuk realisasi keuangan sehingga belum dapat realisasi anggaran/keuangan
Dalam skedul/jadwal yang disusun masih pada tahap koordinasi dan pengumpulan data dan belum melakukan realisasi belanja mengingat pelibatan pihak ketiga.

II.2.1.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan urusan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun anggaran 2026. Dinas PUPR melaksanakan 12 program 22 kegiatan dan 63 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.43.592.018.779,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I (Maret 2026) sebesar Rp.4.252.251.922,- atau 9,76% dan realisasi fisik sebesar 13,90%. Kondisi realisasi keuangan tersebut disebabkan oleh berbagai terutama bagi beberapa program yang realisasi keuangannya masih dibawah 17,5%. Namun untuk triwulan berikutnya telah disusun tindak lanjut yang akan dilakukan dalam triwulan berikutnya yaitu:

1. **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**
   Program Pengelolaan Sumber daya Air (SDA) tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp.8.864.992.590,- sampai dengan Triwulan I (Maret 2026) telah terealisasi sebesar Rp.521.428.850,- atau 5,88% dari total anggaran yang disediakan.

2. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**
   Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp.234.031.300,- dan sampai dengan triwulan I (Maret 2026) belum terealisasi atau 0%.

3. **Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan**
   Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan pada tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp.1.143.900,- dan sampai dengan triwulan I (Maret 2026) belum terealisasi atau 0%.

4. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**
   Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah tahun 2026 sebesar Rp.315.300,- sampai dengan Triwulan I (Maret 2026) belum terealisasi atau 0%.

5. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**
   Anggaran untuk Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase tahun 2026 sebesar Rp.6.711.942.698,- sampai dengan Triwulan I (Maret 2026) telah terealisasi sebesar Rp.202.170.167,- atau 3,01%.

6. **Program Penataan Bangunan Gedung**
   Anggaran untuk program Penataan Bangunan Gedung tahun 2026 sebesar Rp.204.236.538,- sampai dengan Triwulan I (Maret 2026) telah terealisasi sebesar Rp.50.311.555,- atau 24,63%.

7. **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**
   Anggaran untuk program Penataan Bangunan dan Lingkungannya tahun 2026 sebesar Rp.2.709.420.450,- sampai dengan Triwulan I (Maret 2026) belum terealisasi atau 0%.

8. **Program Penyelenggaraan Jalan**
   Anggaran untuk program Penyelenggaran Jalan tahun 2026 sebesar Rp.8.653.793.796,- sampai dengan Triwulan I (Maret 2026) telah terealisasi sebesar Rp.330.819,976,- atau 3,82%.

9. **Program Pengembangan Jasa Konstruksi**
   Anggaran untuk program Penyelenggaran Jalan tahun 2026 sebesar Rp.163.988.944,- sampai dengan Triwulan I (Maret 2026) telah terealisasi sebesar Rp.2.269.950,- atau 3,70%.

10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Anggaran untuk program Penyelenggaran Penataan Ruang tahun 2026 sebesar Rp.415.243.988,- sampai dengan Triwulan I (Maret 2026) telah terealisasi sebesar Rp.27.142.699,- atau 6,54%.

Faktor penghambat pencapaian pada program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruanga antara lain :

a. Terjadinya pergeseran anggaran pada awal Maret 2026 yang berdampak pada mundurnya jadwal pelaksanaan kegiatan.
b. Penyesuaian Spesifikasi Teknis dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) sesuai kebijkan Kementerian PUPR. Terbitnya SE Dirjen Bina Konstruksi No. 47/SE/Dk/2026 mengharuskan penyusunan HPS berdasarkan AHSP terbaru, sehingga perlu revisi dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya.
c. Penerapan kebijakan *e-purchasing* dengan metode mini kompetisi (Surat LKPP No. 18634/D.2.3/08/2025 serta kebijakan turunan melalui SE Walikota Payakumbuh) yang masih memerlukan penyesuaian oleh PPK dan pejabat pengadaan.

Kendala administrasi pada proses ganti rugi tanah batang agam akibat perubahan pihak yang berhak, sehingga perlu melengkapi ulang. Terlambatnya pengajuan dokumen pencairan realisasi kegiatan oleh pihak penyedia (konsultan).

II.2.1.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.140.915.473,- yang terdiri dari 4 (empat) program)13 kegiatan dan 36 sub kegiatan), berikut program yang belum mencapai 15% yaitu :

1. **Program Pengeloaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah** dengan anggaran sebesar Rp.1.760.88.3240,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp 79.456.206,- atau 4,51% capaian program.

   Faktor Penghambat dari capaian kinerja adalah :
   a. Adanya gaji PPPK PW, dimana gaji dianggarkan pada awal bulan tetapi dibayarkan setelah bulan berakhir sehingga terdapat kelebihan penganggaran untuk 1 bulan
   b. Adanya Pergeseran gaji selama 1 bulan untuk pembayaran THR tetapi yang dibayarkan hanya 5/12 dari total gaji.
   c. Adanya Kelebihan gaji PPPK PW sebanyak 1 orang dikarenakan meninggal dunia, sementara gaji sudah dianggarkan

2. **Program Pengembangan Perumahan** dengan anggaran sebesar Rp.288.298.975,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.25.68.4479,- atau 8,91% capaian program.

   Faktor Penghambat dari capaian kinerja adalah :
   a. Ini merupakan program pencapaian SPM kebencanaan realisasinya tergantung pada kejadian bencana dan anggaran untuk korban bencana pada TW I hanya terealisasi untuk 1 unit rumah yang bisa diberikan bantuan sesuai dengan aturan.
   b. Adanya Keterlambatan pencairan SPJ pada TW I.

3. **Program Kawasan Permukiman** dengan anggaran sebesar Rp.1.211.571.675,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.3.481.515,- atau 0,29% capaian program.

   Faktor Penghambat dari capaian kinerja adalah :
   a. Belum terlaksananya penetapan penerima bantuan stimulan PK RTLH sehingga penyaluran bantuan belum bisa dilaksanakan
   b. Pada Triwulan I masih melaksanakan verifikasi lapangan.
   c. Kegiatan ini juga ada penambahan unit bantuan stimulan PK RTLH yang berasala dari dana tambahan TKD dari semula 25 unit menjadi 100 unit.

4. **Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)** dengan anggaran sebesar Rp 69.519.260,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp 5.821.333,- atau 8,37% capaian program.

   Faktor Penghambat dari capaian kinerja yaitu adanya gaji PPPK PW, dimana gaji dianggarkan pada awal bulan tetapi dibayarkan setelah bulan berakhir sehingga terdapat kelebihan penganggaran untuk 1 bulan
   Adanya Pergeseran gaji selama 1 bulan untuk pembayaran THR tetapi yang dibayarkan hanya 5/12 dari total gaji.

II.2.1.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Pemerintah Kota Payakumbuh diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melaksanakan 3 program, 11 kegiatan, dan 30 sub kegiatan, dengan anggaran Tahun 2026 sebesar Rp.13.987.983.069,- pencapaian realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.2.697.920.997,- atau 19,29%. Pencapaian persentase realisasi di bawah target 15% ada pada **Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum** dengan anggaran Tahun 2026 sebesar Rp.3.755.767.570,- dan realisasi Rp.478.178.259,- atau 12,73%. Adapun faktor penghambat realisasi kurang dari 15% dikarenakan pelaksanaan kegiatan direncanakan pada triwulan II dan triwulan III.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 melaksanakan 2 Program 9 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.5.043.354.531, dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.891.731.600,- atau 17,68%. Dari 2 program terdapat 1 program yang belum mencapai 15% yaitu :
Program Penanggulangan Bencana dengan anggaran sebesar Rp 503.631.800,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp 45.236.460,- atau 8,98%.

Faktor Penghambat pencapaian pada program ini adalah :
a. Realisasi kegiatan tergantung kepada kejadian bencana
b. Perubahan pejabat pengelola keuangan dan keterbatasan SDM yang ada menyebabkan terganggunya proses pencairan anggaran sesuai jadwal

II.2.1.6 URUSAN SOSIAL

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh yang terdiri dari 6 program, 12 kegiatan dan 32 Sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.5.098.708.479,: untuk triwulan I terealisasi sebesar Rp.762.043.088,- atau sebesar 14,82%. Berikut justiifikasi penyebabnya, faktor pendorong keberhasilan kinerja, faktor penghambat dan tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya, sebagai berikut:

1. **Program Pemberdayaan Sosial**
   Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.210.793.575,- terealisasi sebesar Rp.5.367.639,- atau 2,55%. Faktor Penghambat adalah adanya keterlambatan administrasi penyelesaian SK untuk Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

2. **Program Rehabilitasi Sosial**
   Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.494.672.450,- terealisasi sebesar Rp.4.070.000,- atau 0,82% dengan capaian kinerja 1%. Faktor Penghambat:
   a. Penyaluran bantuan permakanan memang direncanakan di Triwulan II
   b. Beberapa kegiatan bersifat situasional

3. **Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**
   Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 316.692.050,- terealisasi sebesar Rp 3.434.007,- 1,08%. Faktor Penghambat adalah Verifikasi dan validasi dilakukan pada triwulan II karena persiapan administrasi yang cukup lama.

4. **Program Penanganan Bencana**
   Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.103.468.350,- terealisasi pada triwulan I sebesar Rp.985.000,- atau 0,67%. Faktor Penghambat adalah kegiatan pada program ini terlaksana berdasarkan situasi dan kondisi atau bersifat situasional.

5. **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**
   Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.37.594.050,- Pada triwulan I baru terealisasi sebesar Rp.1.916.250,- atau 5,10%. Faktor Penghambat Program ini dilaksanakan pada Hari Pahlawan 10 November 2026.

II.2.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

II.2.2.1 URUSAN TENAGA KERJA

Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.276.752.855,- yang terdiri dari 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan. dengan realisasi anggaran sampai triwulan I (Maret 2026) sebesar Rp. 1.218.199.272,- atau 18,71 %. Secara keseluruhan program, realisasi ini telah melampaui target 15 %. Ada 1 (satu) program yang belum mencapai 15% yaitu **Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja** dengan anggaran tahun 2026 sebesar Rp.255.299.465,- yang mana sampai dengan Triwulan I (Maret 2026) telah terealisasi sebesar Rp.3.589.842,- atau 1,41% dari total anggaran yang disediakan. Kondisi ini terjadi dikarenakan aliran kas pada program ini tersebar pada beberapa triwulan sehingga pencapaian anggaran pun dapat dicairkan sesuai aliran kas yang telah ditentukan.

Faktor penghambat dari pencapaian kinerja adalah :

a. Untuk realisasi fisik telah mencapai 30 % meliputi tahapan persiapan, rekruitmen peserta dan koordinasi telah dilaksanakan. Untuk percepatan realisasi keuangan akan dilakukan optimalisasi jadwal dan pencairan pada triwulan II.
b. Pelaksanaan pelatihan yang akan dilaksanakan pada triwulan II.

II.2.2.2 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dengan alokasi anggaran Rp.7.702.273.773,- untuk 7 Program (18 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan). Realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.819.281.276,- atau 12,94% dengan 6 program yang belum mencapai 15% yaitu :

1. **Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**
   Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan anggaran sebesar Rp.66.141.150,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.919.278,- atau 1,39%

2. **Program Perlindungan Perempuan**
   Program Perlindungan Perempuan dengan anggaran sebesar Rp.254.889.000,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.9.926.680,- atau 3,89%

3. **Program Peningkatan Kualitas Keluarga**
   Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan anggaran sebesar Rp.434.631.800,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp 22.917.861,- atau 5,27%.

4. **Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**
   Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak dengan anggaran sebesar Rp.42.271.500,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.0,- atau 0%.

5. **Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**
   Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan anggaran sebesar Rp.6.517.700,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.760.000,- atau 11,66%.

6. Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak dengan anggaran sebesar Rp 326.095.600,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp 0,00 ,- atau 0 %

Faktor Penghambat dari pencapaian Kinerja adalah:

a. Realisasi keuangan pada Triwulan I belum dapat terlaksana secara optimal karena proses pencairan Uang Persediaan (UP) baru terealisasi pada akhir Februari 2026, sehingga pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran secara efektif baru dapat dilakukan pada bulan Maret 2026.
b. Pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dijadwalkan pada Triwulan II, yaitu bulan April 2026, sehingga capaian kinerja kegiatan tersebut belum dapat direalisasikan pada periode Triwulan I.
c. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan bersifat situasional dan sangat bergantung pada jumlah laporan serta kasus yang masuk untuk ditangani, sehingga realisasi kinerja menyesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan.
d. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan Tim Penggerak PKK masih menyesuaikan dengan jadwal dan koordinasi dengan Tim Penggerak PKK Pusat maupun Tim Penggerak PKK Provinsi.
e. Realisasi kegiatan yang dilaksanakan bersama organisasi mitra, antara lain Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Dharma Wanita (DW), dan Ikatan Keluarga Dewan (IKD), masih menunggu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh masing-masing organisasi.
f. Penyusunan data gender dan profil perempuan serta anak masih dalam tahap pengumpulan dan verifikasi data dari perangkat daerah serta instansi vertikal terkait. Kegiatan penyusunan dan pemutakhiran data tersebut secara umum dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

Proses penilaian Kota Layak Anak masih berlangsung, sehingga beberapa indikator dan dokumen pendukung capaian kinerja masih dalam tahap pemenuhan dan verifikasi.

II.2.2.3 URUSAN PANGAN

Urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan merupakan urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Tahun 2026 Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan 4 program 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.3.218.895.255,- dengan realisasi anggaran triwulan I (31 Maret 2026) sebesar Rp.610.089.113,- atau 18,95%, yang merupakan realisasi keuangan telah melampaui target (15,00%). Walaupun demikian masih ada beberapa program yang realisasinya di bawah 15,00% yaitu :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Anggaran untuk program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat tahun 2026 sebesar Rp.233.286.025,- dan telah terealisasi sebesar Rp.10.942.725,- atau 4,69% dari total anggaran yanag disediakan pada program ini.

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program Penanganan Kerawanan Pangan pada tahun 2026 dianggarkan Rp.40.112.900,- dan telah terealisasi sebesar Rp.1.027.860 atau 2,56% dari total anggaran yang disediakan pada program ini.

Faktor Penghambat dari pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan lebih disebabkan pada aliran kas keuangan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersebar pada triwulan II, III dan IV Tahun 2026.

II.2.2.4 URUSAN PERTANAHAN

Urusan pemerintahan bidang Pertanahan merupakan urusan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun anggaran 2026. Dinas PUPR melaksanakan 1 program 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.97.394.000,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I (Maret 2026) sebesar Rp.6.767.230,- atau 6,95% dan realisasi fisik sebesar 0,02%. Faktor penghambat rendahnya realisasi disebabkan adanya

pergeseran anggaran pada awal Maret 2026 yang berdampak pada mundurnya jadwal pelaksanaan kegiatan. Penerapan kebijakan *e-purchasing* dengan metode mini kompetisi (Surat LKPP No. 18634/D.2.3/08/2025 serta kebijakan turunan melalui SE Walikota Payakumbuh) yang masih memerlukan penyesuaian oleh PPK dan pejabat pengadaan.

II.2.2.5 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.340.705.725,- yang terdiri dari 9 (sembilan) program (15 kegiatan dan 35 sub kegiatan) dan telah terealisasi sebesar Rp.2.241.444.835,- atau 13,72%, yang rendah dari target realisasi 15%, berikut program yang menyebabkan belum tercapainya target 15% yaitu :

1. **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** dengan anggaran sebesar Rp.185.56.7500,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.2.242.200,- atau 1,21% capaian program.

   Faktor Penghambat dari pencapaian kinerja adalah :
   Adanya keterbatasan GU pada Bidang, mengingat kegiatan Operasional sampah harus lebih diprioritaskan serta juga disebabkan karena sebagian besar anggaran memang direncanakan terealisasi pada Triwulan 2

2. **Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LimbahB3)** dengan anggaran sebesar Rp.6.909.350,- untuk realisasi sampai dengan Triwulan I masih belum ada.

   Faktor Penghambat dari capaian kinerja adalah :
   Untuk pelaksanaan kegiatan secara fisik sudah dalam proses , tetapi secara keuangan belum terealisasi, hal ini terkendala karena anggaran kas terletak pada triwulan 2

3. **Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)** dengan anggaran sebesar Rp.14.848.750,- untuk realisasi sampai dengan Triwulan I masih belum ada dikarenakan aliran Kas pada Program ini berada pada Triwulan II.

   Faktor Penghambat dari capaian kinerja adalah :
   Untuk pelaksanaan kegiatan secara fisik sudah dalam proses , tetapi secara keuangan belum terealisasi, hal ini terkendala karena anggaran kas terletak pada triwulan 2

4. **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)** dengan anggaran sebesar Rp.1.963.936.796,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.238.962.840,- atau 12,17% capaian program.

   Faktor Penghambat dari capaian kinerja adalah :
   Sekarang dalam proses survey Lokasi RTH yang akan ditambah, karena sulitnya pembebasan lahan.

5. **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat** dengan anggaran sebesar Rp.530.736.072,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.21.190.474,- atau 3,99% capaian program.

   Faktor Penghambat pencapaian pada program ini adalah :
   a. Belum terlaksananya pembinaan kelompok percontohan pengelolaan sampah di 8 kelurahan, dan penilaian serta pemberian hadiah
   b. Adanya Efisiensi biaya pemeliharaan mesin TPS3R dan becak motor.

6. **Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat** dengan anggaran sebesar Rp.30.480.800,- untuk realisasi sampai dengan Triwulan I masih belum ada dikarenakan Belum terlaksananya penilaian terhadap kelompok masyarakat yang

memiliki inovasi dalam pengelolaan lingkungan karena aliran Kas pada Program ini berada pada Triwulan II.

Faktor Penghambat dari capaian kinerja adalah :
Untuk pelaksanaan kegiatan secara fisik sudah dalam proses , tetapi secara keuangan belum terealisasi, hal ini terkendala karena anggaran kas terletak pada triwulan 2

7. **Program Pengelolaan Persampahan** dengan anggaran sebesar Rp.8.072.192.825,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.1.028.061.469,- atau 12,74% capaian prgram.

   Faktor Penghambat dari capaian kinerja adalah :
   a. Adanya keterbatasan GU pada Bidang, dan Operasional sampah harus lebih diprioritaskan.
   b. Untuk pelaksanaan kegiatan secara fisik sudah dalam proses pelaksanaan, tetapi secara keuangan belum semuanya terealisasi, hal ini terkendala karena anggaran kas terletak pada triwulan 2

8. **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** merupakan kegiatan pada UPTD Labor Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp.440.010.700,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.54.803.533,- atau 12,46% capaian program.

   Faktor Penghambat dari capaian kinerja adalah :
   Proses perizinan belanja barang impor bahan kimia dan suku cadang peralatan laboratorium baru selesai bulan Februari 2026, setelah dilaksanakan pemesanan ada beberapa bahan kimia dan peralatan yang indent dan butuh waktu untuk pengiriman.

II.2.2.6 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran pada tahun 2026 sebesar Rp. 4.959.570.931, dengan 5 program dan 13 kegiatan yang mencakup 29 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan I baru terealisasi sebanyak Rp. 1.107.695.465, atau sebesar 22.33 % dari total pagu anggaran.
Dari 5 (lima) program terdapat 3 (tiga) program yang belum mencapai 15%.

1. **Program Pendaftaran Penduduk**
   Program Pendaftaran Penduduk dengan pagu total sebesar Rp 153.925.430,- dan telah terealisasi Rp 15.703.707,- atau 10,20% capaian program.

2. **Program Pencatatan Sipil**
   Program Pencatatan Sipil dengan pagu total sebesar Rp 171.562.790,- dan telah terealisasi Rp 19.958.276,- atau 11,63% capaian program.

3. **Program Pengelolaan Profil Kependudukan**
   Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan pagu total sebesar Rp 17.195.400,- belum teralisasi sama sekali atau Rp.0,- atau 0% capaian program.

Faktor penghambat dari pencapaian kinerja tersebut disebabkan anggaran kas yang baru dialokasikan pada triwulan II menjadi kendala dalam realisasi keuangan, meskipun pelaksanaan kegiatan secara fisik telah mulai dilaksanakan.

II.2.2.7 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.370.572.000,00 yang terdiri 3 program (7 kegiatan dan 13 sub kegiatan), dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.213.207.450,- atau 15,56%. Dari 3 (tiga) terdapat 1 (satu) Program yang belum mencapai 15% yaitu

Program Pengendalian Penduduk dengan anggaran sebesar Rp.51.000.000,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.0,- atau 0 %

Faktor Penghambat dari pencapaian Kinerja adalah kegiatan pemutakhiran, pencatatan, dan pengumpulan data keluarga masih berlangsung sesuai dengan tahapan pelaksanaan yang telah ditetapkan.

II.2.2.8 URUSAN PERHUBUNGAN

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2026 didukung oleh jumlah anggaran sebesar Rp. 9.384.571.695,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.1.425.239.583,- atau 15,19 %. Dari 2 (dua) program terdapat 1 (satu) program yang belum mencapai 15 % yaitu Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan anggaran sebesar Rp.2.600.015.650,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.217.481.304,- atau 8,36%.

Faktor penghambat pencapaian pada program ini adalah :

a. PPTK sedang melakukan pemilihan penyedia dan pengajuan proses ekatalog.
b. Terjadinya pergeseran anggaran pada pemeliharaan rambu tidak bersuar.

Rencana aksi yang dilakukan untuk triwulan berikutnya adalah

a. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan langsung menyelesaikan administrasi pertanggungjawabannya.
b. Melakukan rapat evaluasi berkala untuk mengatasi kendala dalam pencapaian fisik dan keuangan program kegiatan.

II.2.2.9 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan Komunikasi dan Informatika merupakan kewenangan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh tahun 2026 dengan dukungan alokasi anggaran sebesar Rp.9.406.047.068,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.1.309.774.632 atau 13,92%.

Dari 3 (tiga) program terdapat 1 (satu) program yang belum mencapai 15% yaitu Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan anggaran sebesar Rp.3.273.259.800,- dengan capaian realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.58.141.593,- atau 1,78%.

Faktor Penghambat pencapaian pada program ini adalah :

a. Salah satu faktor rendahnya realisasi pada program ini karena anggaran penyediaan *Bandwidth* dicairkan per semester. Penyediaan *bandwidth* ini anggaran yang paling besar pada program ini yaitu 80,86% dari anggaran program.
b. Belum tersedianya data yang lengkap untuk kebutuhan pemeliharaan jaringan dari seluruh OPD dan seluruh titik area jaringan intra.

II.2.2.10 URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.514.848.455,- dengan melaksanakan 7 (tujuh) program 12 (dua belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Realisasi anggaran sampai triwulan I (Maret 2026) sebesar Rp. 1.218.199.272,- atau 18,70%. Dari 7 (tujuh) program, terdapat 5 (lima) program yang realisasinya belum 15 % yaitu:

1. **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**
   Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi tahun 2026 sebesar Rp.19.999.150,- yang mana sampai dengan Triwulan I (Maret 2026) telah terealisasi sebesar Rp.2.793.315,- atau 13,97% capaian program.

2. **Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**
   Program Penanganan Kerawanan Pangan pada tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp.14.999.250,- dan sampai dengan triwulan I (Maret 2026) telah terealisasi sebesar Rp.2.089.020,- atau 13,93% capaian program.

3. **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**
   Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi pada tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp.19.999.850,- dan sampai dengan triwulan I (Maret 2026) belum terealisasi sama sekali.

4. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Usaha Mikro (UMKM)**
   Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Usaha Mikro (UMKM) pada tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp.19.999.475,- dan sampai dengan triwulan I (Maret 2026) belum terealisasi sama sekali.

5. **Program Pengembangan UMKM**
   Program Pengembangan UMKM pada tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp.99.347.000,- dan sampai pada triwulan I (Maret 2026) belum terealisasi sama sekali. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program pengembangan UMKM ini adalah pelaksanaan kegiatan pelatihan pemasaran online dan bisnis UMKM naik kelas.

Faktor penghambat dari pencapaian kinerja adalah :

a. Aliran kas yang berada pada triwulan II dan seterusnya menyebabkan pelaksanaan administrasi belum bisa dilaksanakan.
b. Pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pada triwulan II dan seterusnya. Bila kegiatan telah dilaksanakan, penyelesaian administrasi agar dapat dilaksanakan
   Aliran kas yang tersedia pada triwulan I hanya untuk pembelian ATK dan biaya umum lainnya, sedangkan untuk pembayaran kegiatan yang utama baru dianggarkan ada triwulan II dan seterusnya.

II.2.2.11 URUSAN PENANAMAN MODAL

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.352.696.200,- yang terdiri dari 2 program 6 kegiatan dan 18 sub kegiatan, dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.824.810.462,- atau 18,95%. Kedua program yang mendukung urusan ini (program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan program pelayanan penanaman modal sudah menyelesaikan kinerjanya dengan baik dimana Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 4.265.492.459,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp 806.240.162,- atau 18,90% dan Program Pelayanan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp 87.203.750,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp 18.570.300,- atau 21,30%.

II.2.2.12 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3 program, 6 kegiatan dan 10 sub kegiatan. APBD urusan ini tahun anggaran 2026 sebesar Rp.2.884.524.170,-. Realisasi anggaran sampai triwulan I (Maret 2026) sebesar Rp.500.960.034,- atau 12,37% . Dari 3 program, terdapat 2 program yang capaiannya masih dibawah 15% yaitu:

1. **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**
   APBD untuk Program ini sebesar Rp.47.247.450,-. Sampai dengan Triwulan I program ini masih belum ada realisasinya (0%).
   Faktor penghambat dari pencapaian kinerja program ini antara lain:
   a. Kegiatan pada program ini rata – rata dilaksanakan pada TW III bulan Oktober.
   b. Kegiatannya berupa upacara Sumpah Pemuda dan fasilitasi pembinaan organisasi kepemudaan dan lomba – lomba pemuda. Selanjutnya persiapan dan pembinaan kepemudaan yang dimulai pada triwulan II.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Anggaran APBD untuk Program ini sebesar Rp.2.501.743.220,-. Sampai dengan Triwulan I (Maret 2026) terealisasi sebesar Rp.200.960.034,- atau sekitar 8,03%.

Faktor penghambat dari pencapaian kinerja disebabkan karena hampir separoh pagu program adalah untuk Hibah KONI, namun hibah belum terlaksana karena pemilihan Ketua KONI baru saja dilaksanakan dan untuk penyelenggaraan event dilaksanakan pada TW IV. Untuk percepatan realisasi akan dilaksanakan koordinasi intensif kepada pengurus KONI terpilih serta percepatan realisasi pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga.

II.2.2.13 URUSAN STATISTIK

Urusan Statistik merupakan kewenangan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh yang terdiri dari 1 program yaitu program penyelenggaraan statistik sektoral. Tahun 2026 program ini mendapat dukungan alokasi anggaran Rp.62.726.350,-. Triwulan I Tahun 2026 realisasi anggaran masih Rp.0,- adapun faktor penghambat pencapaian pada program ini karena anggaran yang tersedia hanya untuk biaya cetak Publikasi Statistik yang direncanakan pada triwulan III dan IV.

II.2.2.14 URUSAN PERSANDIAN

Urusan Persandian merupakan kewenangan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh yang terdiri dari 1 program yaitu program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan anggaran sebesar Rp 330.778.772,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp 10.112.159,- atau 3.06%. Faktor Penghambat pencapaian pada program ini adalah belum selesainya proses pengadaan alat keamanan informasi *(firewall)*.

II.2.2.15 URUSAN KEBUDAYAAN

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan melalui 4 program, 6 kegiatan dan 9 sub kegiatan dengan anggaran APBD sebesar Rp. 1.430.094.400,-. Realisasi anggaran sampai triwulan I (Maret 2026) baru sebesar Rp.567.000,- atau 0,04%. Dari 4 program yang ada, semua program capaiannya masih dibawah 15%.

1. Program Pengembangan Kebudayaan

Anggaran untuk Program ini adalah sebesar Rp.1.363.331.050,-. Sampai dengan Triwulan I (Maret 2026) baru terealisasi sebesar Rp.567.000,- atau sekitar 0,04%

Faktor penghambat dari pencapaian kinerja adalah:

a. Kegiatan pada program ini rata – rata dijadwalkan untuk dilaksanakan pada Triwulan II dan III, hanya belanja rutin yang ada pada triwulan I.
b. Bentuk kegiatannya antara lain pelaksanaan event adat nagari dan batogak penghulu yang pelaksanaannya sudah dijadwalkan oleh pihak nagari.

2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Anggaran APBD untuk Program ini adalah sebesar Rp. 46.059.800,-. Program ini berisi fasilitasi dan hibah untuk sanggar seni. Sampai dengan Triwulan I (Maret 2026) realisasi program ini masih 0%.

Faktor penghambat dari capaian kinerja adalah karena proses pembuatan NPHD Hibah oleh lembaga penerima hibah belum selesai.

3. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Anggaran APBD untuk Program ini adalah sebesar Rp12.776.750,-. Program ini hanya terdiri dari 1 subkegiatan yang berisi Biaya Jasa Tenaga Ahli Cagar Budaya Tk. Kota. Setelah data di peroleh dibahas oleh tim ahli dengan melakukan survey ke lapangan, sehingga dihasilkan rekomendasi penetapan Cagar Budaya. Sampai dengan Triwulan I (Maret 2026) realisasinya masih 0%.

Faktor penghambat capaian kinerja program ini adalah jadwal kegiatan yang memang direncakan dilaksanakan pada Triwulan III.

4. **Program Pengelolaan Permuseuman**
   Anggaran APBD Program ini adalah sebesar Rp. 7.926.800,-. Sampai dengan Triwulan I (Maret 2026) realisasinya masih 0%.
   Faktor penghambat capaian kinerja adalah kegiatan pemeliharaan koleksi museum belum dapat direalisasikan pada TW 1 ini karena direncanakan terealisasi pada saat adanya perpindahan kantor ke ruangan yang baru,
   Untuk sub kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana museum akan dihapuskan pada anggaran perubahan disebabkan sub kegiatan tersebut tidak ada dalam Renstra 2026-2030.

II.2.2.16 URUSAN PERPUSTAKAAN

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.413.426.721, terdiri dari 3 (tiga) program (9 kegiatan dan 20 sub kegiatan), dengan realisasi anggaran sampai triwulan 1 sebesar Rp.783.057.089,- atau 17,74%. Dari 3 (tiga) program terdapat 2 (dua) program yang belum mencapai 15%.

1. **Program Pembinaan Perpustakaan**
   Program Pembinaan Perpustakaan dengan pagu total Rp.604.678.000,- dan telah terealisasi sampai triwulan 1 sebesar Rp.69.367.791,- atau 11,47%.

2. **Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno**
   Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno dengan anggaran Rp.22.599.300,- dan sampai triwulan 1 belum terealisasi sama sekali/ Rp 0,- atau 0,00%.

Faktor penghambat dari pencapaian kinerja adalah perubahan pejabat pengelola keuangan menyebabkan terganggunya proses pelaksanaan pencairan anggaran yang telah dijadwalkan dan belum turunnya DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah dari pusat.

II.2.2.17 URUSAN KEARSIPAN

Urusan Kearsipan juga dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh yang terdiri dari 1 (satu) program (3 kegiatan dan 10 sub kegiatan), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.205.658.260,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan 1 sebesar Rp.27.000.000,- atau 13,13%. Dari 1 (satu) program yang terdapat pada urusan kearsipan tersebut terlihat bahwa realisasi keuangan belum mencapai 15%. Faktor penghambat dari pencapaian kinerja adalah :

a. Adanya perubahan pejabat pengelola keuangan menyebabkan terganggunya proses pelaksanaan pencairan anggaran yang telah dijadwalkan.
b. Belum turunnya DAK Non Fisik-Dana Bantuan pengembangan Program Perpustakaan Daerah dan Pusat

II.2.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

II.2.3.1 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian yang dilaksanakan melalui 2 program, 3 kegiatan dan 4 subkegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.691.370.764,-. Realisasi anggaran sampai triwulan I (Maret 2026) sebesar Rp.42.844.404,- atau 6,2% . Dari 2 program tersebut, capaiannya masih dibawah 15%.

1. **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**
   APBD untuk Program Pengelolaan Perikanan Budidaya) sebesar Rp.592.967.834,- yang dilakasanakan di bidang perikanan dan UPTD Pembenihan dan pakan ikan. Sampai dengan Triwulan I (Maret 2026) telah terealisasi sebesar Rp.42.844.404,- atau 7,23% dari total anggaran program.

2. **Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**
   APBD untuk Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebesar Rp.98.393.930,-. Pada program ini hanya terdapat 1 sub kegiatan "Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko" yang sebagian besar belanjanya adalah hibah kepada pokdakan. Sampai dengan Triwulan I (Maret 2026) realisasinya masih 0%.. Faktor penghambat kedua program diatas adalah karena pagu terbesar dari kedua program tersebut terletak pada dana hibah yang belum bisa di realisasikan karena terkendala penerbitan SK Hibah yang pada awal tahun ini belum ditandatangani Pimpinan.

II.2.3.2 URUSAN PARIWISATA

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melalui 5 program, 12 kegiatan dan 28 subkegiatan dengan anggaran sebesar Rp.6.828.589.555,-. Realisasi anggaran sampai triwulan I (Maret 2026) sebesar Rp.1.080.510.399,- atau 15,82% . Terdapat 4 program yang capaiannya dibawah 15%, yaitu:

1. **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**
   Anggaran APBD Program ini adalah sebesar Rp.489.939.440,-. Program ini terdiri dari 1 subkegiatan terkait operasional UPTD. Sampai dengan Triwulan I (Maret 2026) terealisasi sebesar Rp.69.915.893,- atau sekitar 14,27% dari pagu anggaran program.
   Faktor penghambat dari pencapaian kinerja program ini adalah karena terkendala pada akun BPP UPTD yang baru bisa aktif pada pertengahan Maret.

2. **Program Pemasaran Pariwisata**
   Anggaran APBD Program ini adalah sebesar Rp.201.051.550,-. Program ini terkait sosialisasi dengan pelaku jasa usaha, data laporan kunjungan wisata serta fasilitasi penerimaan kunjungan tamu pemko. Sampai dengan Triwulan I (Maret 2026) capaian program ini masih 0%.
   Faktor penghambat dari pencapaian kinerja adalah
   a. Sampai akhir maret tidak ada permintaan fasilitasi kegiatan dari tingkat Kota maupun pihak lain.
   b. Aliran kas pelaksanaan sosialisasi pelaku usaha di rencanakan pada pertengahan tahun.
   c. Untuk optimalisasi program kedepan perlu dilakukan penyesuaian kegaitan yang lebih berfokus pada pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata Kota Payakumbuh.

3. **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan**
   Anggaran APBD untuk Program ini adalah sebesar Rp.51.025.150,-. Program ini terkait fasilitasi Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pelaku Ekonomi Kreatif. Sampai dengan Triwulan I (Maret 2026) realisasinya masih 0%.
   Faktor penghambat dari pencapaian kinerja adalah
   a. Kegiatan dijadwalkan pelaksanaannya pada Triwulan II.
   b. Untuk optimalisasi program kedepan perlu dilakukan penyesuaian kegiatan yang lebih berfokus pada pelaksanaan pendampingan pelaku usaha ekonomi kreatif.

4. **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**
   Anggaran APBD Program ini adalah sebesar Rp.167.263.300,-. Program ini terkait Fasilitasi Event Ekonomi Kreatif dan pelaksanaan pelatihan SDM ekraf. Sampai dengan Triwulan I (Maret 2026) baru terealisasi Rp.2.545.398,- atau sekitar 1,52%. Faktor penghambat dari pencapaian kinerja program ini adalah kegiatan ini dijadwalkan pelaksanaannya pada Triwulan II, hanya belanja belanja rutin yang dianggarkan pada triwulan I.

II.2.3.3 URUSAN PERTANIAN

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. pada 6 program, 17 kegiatan dan 43 subkegiatan. untuk urusan ini dengan anggaran sebesar Rp.15.172.835.106,-. Realisasi anggaran sampai triwulan I (Maret 2026) sebesar Rp.1.883.517.053,- atau 12,41% . Dari 6 program tersebut, belum ada yang capaiannya diatas 15%.

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
   APBD Program ini sebesar Rp.12.515.545.004,-. Realisasi Triwulan I (Maret 2026) sebesar Rp.1.715.743.583,- atau sekitar 13,71% dari pagu anggaran program.
   Faktor penghambat dari pencapaian program ini adalah:
   a. Kurangnya capaian keuangan program ini antara lain disebabkan karena pada APBD 2026 awal masih dianggarkan Gaji Penyuluh Pertanian yang sudah pindah ke Kementerian Pertanian.
   b. Belanja operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas penyuluh juga masih dianggarkan pada APBD 2026, namun tidak dapat dicairkan lagi karena status penyuluh yang telah menjadi pegawai pusat (kementan).

2. **Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**
   Anggaran APBD Program ini adalah sebesar Rp.906.584.637,-. Sampai dengan Triwulan I (Maret 2026) terealisasi sebesar Rp.89.490.006,- atau sekitar 9,87% dari pagu anggaran program.
   Faktor penghambat dari pencapaian kinerja adalah karena sebagian besar anggaran di program ini sekaitan dengan pengadaan benih dan bibit. Hal ini menjadi penyebab rendahnya capaian belanja program karena Belanja Benih dan Bibit menyesuaikan dengan Jadwal Tanam dan Panen. Sesuai jadwal tanam, secara umum pelaksanaan tanam sebagian besar dimulai pada triwulan ke dua , sehingga pada saat tersebut belanja program dapat di realisasikan dengan lebih optimal.

3. **Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**
   Anggaran APBD untuk Program ini adalah sebesar Rp.673.617.150,-. Sampai dengan Triwulan I (Maret 2026) realisasinya masih 0%.
   Faktor penghambat pencapaian kinerja program ini adalah karena sebagian besar anggaran di program ini sekaitan dengan pembangunan/ rehap JUT dan irigasi yang pelaksanaannya melalui mekanisme hibah. Dana hibah tersebut belum bisa di realisasikan karna terkendala penerbitan SK Hibah belum di TTD Pimpinan sehingga pelaksanaan tertunda.

4. **Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**
   Anggaran APBD untuk Program ini tahun 2026 adalah sebesar Rp.719.711.930,-. Sampai dengan Triwulan I (Maret 2026) terealisasi sebesar Rp.74.453.964,- atau sebesar 10,34%.
   Faktor penghambat dari pencapaian kinerja program ini adalah karena pada program ini terdapat Gaji PPPK PW yang tidak dapat direalisasi karena pegawai yang bersangkutan mengundurkan diri. Maka untuk antisipasi optimalisi pencairan program ini adalah dengan melakukan penyesuaian pada perubahan APBD 2026.

5. **Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**
   Anggaran APBD untuk Program ini tahun 2026 adalah sebesar Rp.43.060.735,-. Sampai dengan Triwulan I (Maret 2026) realisasinya masih 0%.
   Faktor penghambat dari pencapaian kinerja program ini adalah karena untuk distribusi bahan kimia seperti insektisida dan fungisida dilaksanakan pada saat setelah musim tanam (sekitar bulan April/mai). Hal ini sesuai dengan aliran kas yang diletakkan di truwulan II.

6. **Program Penyuluhan Pertanian**
   Anggaran APBD untuk Program ini tahun 2026 adalah sebesar Rp.314.315.650,-. Sampai dengan Triwulan I (Maret 2026) baru terealisasi sebesar Rp.3.829.500,- atau sekitar 1,22%.

Faktor penghambat dari pencapaian kinerja program ini adalah karena Pelaksanaan kegiatan umumnya dilaksanakan di April. Hal ini sesuai dengan aliran kas yang diletakkan di triwulan II.

II.2.3.4 URUSAN PERDAGANGAN

Urusan Perdagangan juga dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.751.878.756,- melaksanakan 5 (lima) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai triwulan I (Maret 2026) sebesar Rp.537.840.994,- atau 9,35 %. Secara keseluruhan program, realisasi masih berada jauh di bawah target 15%. Dari 5 (lima) program) terdapat 3 (tiga) yang realisasinya belum 15 % yaitu :

1. **Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**

   Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan pada tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 19.679.200,- dan sampai pada akhir triwulan I (Maret 2026) masih belum terealisasi sama sekali. Kegiatan ini berupa pengambilan sampel dan uji laboratorium yang nantinya hasil pengambilan sampel dan uji laboratorium ini akan disosialisasikan pada pelaku usaha.

   Faktor penghambat dari pencapaian kinerja adalah :

   Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan pada triwulan II dan aliran kas juga berada di triwulan II.

2. **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

   Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan pada tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 5.196.691.080,- dengan realisasi sebesar Rp. 372.690.383,- atau 7,17 % dari total anggaran yang disediakan. Realisasi pada program ini baru berupa pembayaran gaji PPPK paruh waktu.

   Faktor penghambat dari pencapian kinerja adalah :

   a. Pelaksanaan kegiatan berupa penyusunan Amdal dan Andalalin untuk pasar pusat pertokoan, perencanaan pasar Ibuh dan beberapa kegiatan lainnya baru dalam proses persiapan barang dan jasa. Mengingat jumlah anggaran yang tersedia cukup besar maka pelaksanaan kegiatan ini melalui tender.
   b. Khusus untuk rehabilitasi Los Ikan Pasar Ibuh terjadi kesalahan rekening pada DPA awal, untuk itu perlu dilakukan pergeseran anggaran. Diharapkan kegiatan ini dapat dilaksanakan sesegera mungkin setelah pergeseran anggaran dilakukan.

3. **Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**

   Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen pada tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp. 201.696.430,- dengan realisasi sampai dengan triwulan I (Maret 2026) sebesar Rp. 3.489.819,- atau 5,22 % dari total anggaran yang tersedia.

   Faktor penghambat dari pencapaian kinerja adalah anggaran tersedia pada triwulan I untuk biaya umum kegiatan sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan tera/tera ulang direncanakan nantinya pada bulan Agustus 2026. Aliran kas untuk kegiatan utama baru terdapat pada triwulan II dan seterusnya.

II.2.3.5 URUSAN PERINDUSTRIAN

Urusan Perindustrian juga dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang pada tahun 2026 melaksanakan 3 (tiga) program, 3 (tiga) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.691.138.263,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I (Maret 2026) sebesar Rp.30.444.459,- atau 4,40%. Secara keseluruhan program, realisasi masih berada di bawah target 15% dengan keseluruhan program yang belum mencapai 15% yaitu :

1. **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**
   Program Perencanaan dan Pembangunan Industri pada tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp. 632.019.638,- dan sampai dengan triwulan I (Maret 2026) telah terealisasi sebesar Rp. 30.444.459,- atau 4,82 %.
   Faktor penghambat dari pencapaian kinerja adalah :
   a. Sentra / KUB belum semuanya menyampaikan laoran yang menjadi bahan evaluasi sebelum pelaksanaan pendampingan
   b. Substansi sub kegiatan ini adalah kegiatan pelatihan yang dijadwalkan dimulai di triwulan II. Pada triwulan I hanya dilaksanakan langkah-langkah persiapan yang secara fisik terlaksana, namun secara keuangan belum bisa direalisasikan.
   c. Untuk kegiatan Dekranasda di triwulan I masih relatif belum padat, sehingga berpengaruh terhadap serapan anggaran dan fisik kegiatan
   d. Kegiatan pengawasan dijadwalkan dimulai pada triwulan II karena mengingat efektivitas kegiatan yang kurang maksimal bila dilaksanakan di triwulan I yang dalam suasana ramadhan dan lebaranada
   e. Pelatihan inkubator bisnis kegiatan di bulan Mei 2026
   f. Untuk pengadaan barang, masih ada yang belum tersedia di Inaproc.

2. **Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota**
   Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota pada tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp. 52.342.225,- dan sampai dengan triwulan I (Maret 2026) belum terealisasi sama sekali.
   Faktor penghambat dari pencapaian kinerja adalah :
   a. Aliran kas untuk sub kegiatan pada program ini berada di triwulan II, III dan IV.
   b. Pada triwulan II dan selanjutnya kegiatan ini akan dilakukan percepatan pelaksanaannya.

c. **Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**
   Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional pada tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp. 6.776.400,- dan sampai dengan triwulan I (Maret 2026) belum terealisasi sama sekali.
   Faktor penghambat dari pencapaian kinerja adalah karena kegiatan ini baru akan dilaksanakan pada triwulan II sesuai dengan aliran kas yang telah disediakan.

II.2.4 FUNGSI PENDUKUNG

II.2.4.1 SEKRETARIAT DAERAH

Fungsi Urusan Pendukung dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh dan Sekretariat DPRD. Sekretariat Daerah Kota payakumbuh tahun 2026 melaksanakan 3 program 20 kegiatan dan 60 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.31.740.309.260, dengan realisasi anggaran sampai Triwulan I sebesar Rp.4.382.350.592,- atau 13,81%. Hal ini dikarenakan ada beberapa sub kegiatan yang realisasinya masih sangat rendah. Dari 3 (tiga) program terdapat 2 (dua) program yang belum mencapai 15% yaitu :

1. **Program Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat**
   Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp.4.039.763.500,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.60.015.033,- atau 1,49%.

2. **Program Perekonomian dan Pembangunan**
   Program Perekonomian dan Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp.273.963.850,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.34.944.769,- atau 12,76%.

Faktor Penghambat pencapaian pada program tersebut karena masih dalam proses persiapan administrasi kegiatan seperti SK Pengelola APBD, SK KPA, SK PPTK karena adanya mutasi terhadap pejabat Administrator (KPA) dan Fungsional (PPTK) pada awal Februari tahun 2026.

II.2.4.2 SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh melaksanakan 2 program 15 kegiatan dan 46 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.34.787.217.812,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.5.773.622.501,- atau 16,60%. Semua Program di sekretariat DPRD sudah mencapai lebih dari 15%.

II.2.5 FUNGSI PENUNJANG

II.2.5.1 URUSAN PERENCANAAN

Urusan Perencanaan dilaksanakan oleh Bappeda dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.411.038.187,- yang terdiri dari 3 (tiga) program (12 kegiatan dan 38 sub kegiatan), dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.1.516.566.619,- atau 20,46%. dari 3 (tiga) program terdapat 2 (dua) program yang belum mencapai 15%.

1. **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.**
   Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 382.679.325.- telah terealisasi sebesar Rp. 40.772.876.- atau 10.65% capaian program.

2. **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.**
   Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dari anggaran sebesar Rp. 515.547.275.- telah terealisasi sebesar Rp. 51.153.804.- atau 9.92% capaian program.

Faktor penghambat dari pencapaian kinerja program tersebut karena terkendala anggaran kas terletak pada triwulan 2 (dua) dan triwulan 3 (tiga) namun untuk pelaksanaan kegiatan secara fisik sudah dilaksanakan.

II.2.5.2 URUSAN KEUANGAN

Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2026 melaksanakan 4 program 13 kegiatan dan 65 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.19.055.966.696,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.2.584.053.843,- atau 13,56%. Berikut faktor penghambat kurang capaian target realisasi pada triwulan I sebagai berikut :

1. **Program Pengelolaan Keuangan Daerah**
   Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.4.155.087.150,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.265.978.800,- atau 6,40%. Faktor Penghambat pencapaian pada program ini adalah :
   a. Adanya perubahan pejabat pengelola keuangan menyebabkan terganggunya proses pelaksanaan pencairan anggaran yang telah dijadwalkan.
   b. Sekitar 50% dari pagu anggaran pada program pengelolaan keuangan daerah ini atau Rp.2.000.000.000,- adalah pagu Bantuan Tidak Terduga yang dipergunakan untuk menanggulangi keadaan darurat seperti bencana alam atau kejadian luar biasa serta keperluan mendesak yang tidak bisa direncanakan sebelumnya.

2. **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**
   Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp685.372.550,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp51.821.620,- atau 7,56%. Faktor Penghambat pencapaian pada program ini adalah :

3. **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**
   Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.897.356.300,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.78.182.581,00 atau 8,71%.
   Faktor Penghambat pencapaian target kurang dari 15 % pada dua program tersebut adalah :
   a. Adanya perubahan pejabat pengelola keuangan menyebabkan terganggunya proses pelaksanaan pencairan anggaran yang telah dijadwalkan.

b. Sebagian besar target rincian belanja dan kerangka acuan kinerja ada di triwulan kedua sampai dengan triwulan keempat.

II.2.5.3 URUSAN KEPEGAWAIAN

Urusan Kepegawaian, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dengan pagu anggaran Rp.8.948.963.463,- yang terdiri dari 2 (dua) program (9 kegiatan dan 31 sub kegiatan) dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.1.555.431.531,- atau 17,38%. Dari 2 (dua) program terdapat 1 (satu) program yang belum mencapai 15%. Yaitu **Program Kepegawaian Daerah** dengan anggaran Rp.1.068.605.200,- dan telah terealisasi sampai triwulan I sebesar Rp.14.160.000,- atau 1,32% capaian program. Faktor Penghambat dari pencapaian kinerja adalah:

a. Ketidakpastian regulasi Pusat dengan adanya perubahan peraturan pusat yang cepat membuat implementasi kebijakan OPD tertunda,
b. Fokus pada penyusunan dokumen awal. Pada Triwulan I lebih berfokus pada persiapan dokumen awal pelaksanaan kegiatan

II.2.5.4 URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Urusan Pendidikan Dan Pelatihan, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dengan pagu anggaran Rp.608.670.550,- yang terdiri dari 1 (satu) program (2 kegiatan dan 3 sub kegiatan) dengan realisasi anggaran Rp.4.662.000,- atau sebesar 0,07%. Faktor Penghambat dari pencapaian kinerja adalah:

a. Ketidakpastian Regulasi Pusat. Perubahan peraturan pusat yang cepat membuat implementasi kebijakan OPD tertunda,
b. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan mengikuti jadwal yang telah di susun oleh instansi pelaksana seperti LAN, BPSDM Kemendagri dan BPSDM Propinsi Sumatera Barat,
c. Fokus pada penyusunan dokumen awal. Pada Triwulan I lebih berfokus pada persiapan dokumen awal pelaksanaan kegiatan.

II.2.5.5 URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Urusan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan Bappeda dengan alokasi anggaran sebesar Rp.214.274.550,- dengan 2 program (2 kegiatan dan 2 sub kegiatan) dengan realisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp.5.747.447,-, atau sebesar 2,68%.

1. **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.**
   Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan anggaran Rp. 145.175.850.- telah terealisasi sebesar Rp.1.631.034.- atau 1,12% capaian program.

2. **Program Riset dan Inovasi Daerah.**
   Program Riset dan Inovasi Daerah dari anggaran sebesar Rp.69.098.700.- telah terealisasi sebesar Rp.4.116.413.- atau 5,96% capaian program.

Faktor penghambat dari pencapaian kinerja adalah

a. Untuk pelaksanaan kegiatan secara fisik sudah dilaksanakan, tetapi secara keuangan belum semuanya terealisasi, hal ini terkendala karena anggaran kas terletak pada triwulan 2.
b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, untuk menjadi pertimbangan alokasi anggaran untuk kegiatan kajian/penelitian dan juga untuk pemenuhan skala prioritas, kegiatan kajian tahun 2026 ditangguhkan.
   Program kegiatan ini kekurangan sumber daya yang fokus untuk urusan kelitbangan dan koordinasi meliputi banyak pihak salah satunya masyarakat, sehingga prosesnya lebih lama dibandingkan dengan prosedur internal.

II.2.6 FUNGSI PENGAWASAN

II.2.6.1 INSPEKTORAT

Inspektorat Kota Payakumbuh tahun 2026 melaksanakan 3 program 10 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.10.001.033.141, dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.1.775.014.126,- atau 17,75%. Dari 3 (tiga) program terdapat 2 (dua) program yang belum mencapai 15% sebagai berikut :

1. **Program Penyelenggaraan Pengawasan**
   Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp.645.078.300,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.94.265.000,- atau 14,61%.

2. **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**
   Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan anggaran sebesar Rp.31.615.000,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.4.590.000,- atau 14,52%.

Faktor Penghambat pencapaian pada program tersebut adalah :

a. Adanya perubahan pejabat pengelola keuangan menyebabkan terganggunya proses pelaksanaan pencairan anggaran yang telah dijadwalkan.
b. Dokumen pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh PPTK yang tidak dibuat saat kegiatan selesai dilaksanakan.

II.2.7 URUSAN KEWILAYAHAN

II.2.7.1 KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT

Kecamatan Payakumbuh Barat merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan, ekonomi pembangunan, kesejahteraan sosial, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya, dengan 5 (lima) Program, 29 (dua puluh sembilan) kegiatan, dan 58 (lima puluh delapan) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran untuk Tahun 2026 sebesar Rp.18.437.125.100,-. Realisasi keuangan sampai 31 Maret 2026 sebesar Rp.3.185.546.357,- atau sebesar 17,27%. Dari 5 (lima) Program yang ada, terdapat 2 (dua) program yang capaian realisasinya rendah atau di bawah 15%.

1. **Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**
   Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran Rp. 12.515.425,- dan sampai saat ini terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. Faktor Penghambat adalah Kegiatan ini berupa Sosialisasi, *Monitoring* dan turun lapangan ke Kelurahan diwilayah Kecamatan Payakumbuh Barat:
   a. Untuk Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan Ketika terjadinya permasalahan yang perlu musyawarah atau disepakati bersama, untuk saat ini Kegiatan belum dilaksanakan karena belum adanya permasalahan yang harus diselesaikan secara Bersama- sama.
   b. Kegiatan *monitoring* dan turun lapangan serta Belanja Alat Tulis Kantor sudah dilaksanakan namun dalam proses persiapan kelengkapan untuk pengajuan pembayaran.

2. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
   Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.148.636.600,- dan sampai saat ini terealisasi sebesar Rp.200.000,- atau 0,13 %. Faktor Penghambat adalah: Kegiatan Pondok Al-Quran baru dilaksanakan pada triwulan ke 2 sesuai dengan jadwal dan Kerangka Acuan Kerja yang telah disusun karena triwulan 1 masuk bulan Ramadhan.

II.2.7.2 KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

Urusan Kewilayahan pada Kecamatan Payakumbuh Timur dengan alokasi anggaran pada tahun 2026 sebesar Rp. 11.430.080.373, dengan 5 program dan 13 kegiatan yang mencakup 45 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan I baru terealisasi sebanyak Rp.

2.155.054.355, atau sebesar 18.85 % dari total pagu anggaran. Berikut realisasi masing-masing program yang ada pada Kecamatan Payakumbuh Timur untuk Triwulan I, yaitu :

1. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**
   Capaian realisasi triwulan I baru menyentuh angka 12,38%. Faktor Penghambat pencapaian pada program ini adalah Penundaan pelaksanaan kegiatan, beberapa kegiatan akan dijadwalkan pada triwulan II. Begitu juga penyebab Kegiatan Sosialisasi di Kelurahan tidak terlaksana dikarenakan bertepatan dengan Bulan Ramadhan sehingga ditunda pelaksanaannya setelah Bulan Ramadhan. Faktor Penghambat Kegiatan dimulai pertengahan bulan april.

2. **Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**
   Realisasi Pada Triwulan I mencapai 5,79%. Faktor Penghambat pencapaian pada program ini adalah dikarenakan aliran kas untuk pelaksanaan program tersebut baru tersedia pada triwulan II.

3. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
   Realisasi Pada Triwulan I mencapai 1,33%. Faktor Penghambat pencapaian pada program ini adalah dipengaruhi oleh aliran kas yang baru tersedia di triwulan II.

4. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
   Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal. Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.79.299.750,- dan sampai saat ini terealisasi sebesar Rp.8.134.179 atau 0,07%. Penyebabnya adalah Pejabat pengadaan belum memahami sepenuhnya belanja barang dan jasa melalui transisi Proses e Katalog Versi 6, sehingga terjadi kesalahan yang berakibat kepada perbaikan sampai ke tingkat pusat. Sedangkan Faktor Penghambat Sampai saat ini kegiatan belum dapat dilakukan dikarenakan pejabat pengadaan masih berkoordinasi dengan bagian dalminbang.

II.2.7.3 KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA

Kecamatan Payakumbuh Utara merupakan satuan organisasi perangkat daerah sebagai unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan, ekonomi pembangunan, kesejahteraan sosial, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya, dengan 5 (lima) Program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 41 (empat puluh satu) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran untuk Tahun 2026 sebesar Rp. 10.800.670.234,-. Dimana capaian realaisasi keuangan sampai kondisi 31 Maret 2026 sebesar Rp. 1.898.493.667,- atau sebesar 17,58%. Dari 5 (lima) Program yang ada, terdapat 3 (tiga) program yang capaian realisasinya rendah atau di bawah 15%,

1. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**
   Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 1.934.583.394,- dan sampai saat ini terealisasi sebesar Rp.251.965.013,- atau 13,02%.

2. **Program Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban Umum**
   Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 1.307.350,- dan sampai saat ini terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.

3. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
   Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan. Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 189.015.900,- dan sampai saat ini terealisasi sebesar Rp. 2.974.245,- atau 1,57 %.

Faktor Penghambat dari pencapaian kinerja adalah:

a. Ada beberapa belanja modal yang tidak masuk pada RKBMD Tahun 2026 dan menunggu Perubahan RKBMD.

b. Belanja Uang yang Diberikan kepada Masyarakat (RT/RW, LPM Kelurahan dan Posyandu Terintegrasi) belum dapat direalisasikan karena masih dalam tahap pembukaan rekening dengan Bank Nagari.
c. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan belum dapat dilaksanakan sebab habisnya masa bakti kepengurusan dan belum terbentuknya kepengurusan baru. Sementara Pembentukan Kepengurusan DPC LPM kecamatan belum dapat dilaksanakan karena menunggu hasil musyawarah Daerah DPD LPM kota, dan Pembentukan kepengurusan TP-PKK Kecamatan menunggu arahan dari TP-PKK kota.
d. Terjadi pergantian Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dikarenakan pejabat lama ditunjuk sebagai Pelaksanaan Tugas di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, sehingga menyebabkan terganggunya proses pelaksanaan pencairan anggaran yang telah dijadwalkan.
e. Pondok Al-Quran dilaksanakan pada triwulan ke 2 sesuai dengan jadwal dan Kerangka Acuan Kerja yang telah disusun, karena triwulan 1 masuk bulan Ramadhan.

II.2.7.4 KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN

Kecamatan Payakumbuh Selatan tahun 2026 melaksanakan 5 program 16 kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.8.090.367.059,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.1.401.778.898,- atau 17,33%.

1. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
   Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp.1.250.926.155,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.152.046.815,- atau 12,15%. Faktor Penghambat pencapaian program adalah :
   a. Adanya mutasi camat dan sekretaris camat yang menyebabkan terganggunya proses pelaksanaan pencairan anggaran yang telah dijadwalkan.
   b. Adanya beberapa kesalahan dalam pencatatan belanja modal yang tidak masuk pada RKBMD Tahun 2026 dan menunggu Perubahan RKBMD.
   c. Dokumen pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh PPTK yang tidak dibuat saat kegiatan selesai dilaksanakan.
   d. Beberapa kegiatan yang aliran kasnya diletakkan pada triwulan 2.

2. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**
   Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp.4.619.700,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.0,- atau 0%. Faktor Penghambat pencapaian pada program ini adalah Pelaksanaan kegiatan berada pada rencana aliran kas di triwulan.

3. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
   Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar Rp.112.517.850,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp 0,- atau 0%. Faktor Penghambat pencapaian pada program ini adalah PPTK tidak konsisten dalam melaksanakan kegiatan sesuai jadwal waktu dan rencana aliran kas yang telah ditetapkan sehingga tidak terlaksananya kegiatan sesuai perencanaan.

II.2.7.5 KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

Kecamatan Lamposi Tigo Nagori tahun 2026 melaksanakan 5 program 11 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.7.796.745.199,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.2.746.459.277,- atau dengan capaian 19,26% Dari 5 (lima) program yang ada, terdapat 2 program yang capaian realisasinya rendah atau di bawah 15%.

1. **Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
   Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp.3.997.800,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.0,- atau capaian 0%.
2. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
   Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar Rp.72.977.000,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.2.111.160,- atau capaian 2,89%.

Faktor Penghambat pencapaian pada program ini adalah

a. Anggaran kas kegiatan berada pada Triwulan 2 dan 3. Rencana Aksi yang dilakukan untuk triwulan berikutnya adalah Menetapkan jadwal Pelaksanaan koordinasi trantibum dengan TNI dan Polri
b. Anggaran kas kegiatan berada pada Triwulan 2 dan 3. Rencana Aksi yang dilakukan untuk triwulan berikutnya adalah melaksanakan kegiatan yang telah dijadwalkan pada Triwulan 2 yaitu Pelaksanaan Pondok Al-quran dan Forum Kecamatan Sehat

II.2.8 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

II.2.8.1 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh tahun 2026 melaksanakan 6 (enam) program (10 kegiatan dan 28 sub kegiatan) dengan anggaran sebesar Rp.3.685.704.286,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp 473.989.365,- atau 12,86%. Terdapat 4 (empat) program yang belum mencapai 15%, yaitu :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**
   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp.1.858.307.573,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.382.565.920,- atau 20,59%. Program ini merupakan kegiatan rutin dan mandatori yang sudah terlaksana sesuai aliran kas

2. **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**
   Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp.756.277.300,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.1.221.000,- atau 0,16%. Faktor Penghambat pencapaian pada program ini adalah :
   a. Juknis Pembentukan Paskibraka Tahun 2026 baru diterima pada Minggu ke-IV Februari 2026 sehingga untuk pembentukan panitia seleksi dan rapat persiapan seleksi dilaksanakan pada Maret 2026. Seleksi peserta Paskibraka baru bisa dilaksanakan pada Bulan April 2026.
   b. Administrasi pendukung untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi sudah mulai dilakukan pada Triwulan I, namun Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan pencairan keuangan dilaksanakan pada Triwulan II.

3. **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**
   Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan anggaran sebesar Rp.787.140.463,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.5.473.675,- atau 0,69%. Realisasi pelaksanaan program ini terlambat karena belum keluarnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Sumbar terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2025 sehingga belum bisa dilakukan pencairan terhadap Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2026 yaitu sebesar Rp.730.248.163,- (92,77% dari anggaran Program)

4. **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**
   Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp.20.951.550,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.1.181.250,- atau 5,64%. Faktor Penghambat pencapaian pada program ini adalah :
   a. Belum tersedianya anggaran kas untuk kegiatan Bimtek Penguatan dan Sistem Informasi Ormas.
   b. Masih dalam proses rapat persiapan kegiatan Bimtek Penguatan dan Sistem Informasi Ormas.

5. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**
   Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan anggaran sebesar Rp.58.362.800,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.1.575.000,- atau 2,69%.
   Faktor Penghambat pencapaian pada program ini adalah :

a. Belum tersedianya anggaran kas untuk kegiatan Sosialisasi P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)
b. Masih dalam proses pembuatan SK Tim P4GN.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan anggaran sebesar Rp 204.664.600,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.81.972.520,- atau 40,05%.

Dalam konteks tahun pertama RPJMD, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program perangkat daerah triwulan 1 tahun 2026 berimplikasi pada proses penajaman kebijakan dan penyempurnaan strategi implementasi. Pengendalian dan Evaluasi Triwulan I menjadi bahan penting untuk mengidentifikasi kelemahan awal dalam perencanaan operasional, kesiapan perangkat daerah, serta efektivitas mekanisme pelaksanaan program perangkat daerah. Jika tidak segera dilakukan langkah-langkah korektif segera dilakukan untuk menjamin rencana target kinerja triwulan berikutnya dapat dicapai, maka deviasi pada tahun pertama dapat berlanjut dan mempengaruhi capaian target pada tahun-tahun berikutnya.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa percepatan pelaksanaan program, penguatan pengendalian dan *monitoring* kinerja, serta penajaman kembali perencanaan pada perubahan anggaran apabila diperlukan. Selain itu, perlu dipastikan adanya keselarasan yang kuat antara target RPJMD, RKPD, dan implementasi program di tingkat perangkat daerah, sehingga seluruh program dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian, capaian Triwulan I tidak hanya dilihat sebagai indikator kinerja awal, tetapi juga sebagai *early warning system* dalam memastikan bahwa arah dan jalur pencapaian RPJMD tetap berada pada koridor yang tepat sejak tahun pertama pelaksanaannya.

Capaian realisasi belanja daerah sebesar 20.86% pada akhir Maret 2026 (triwulan 1) menggambarkan bahwa pemerintah daerah dipandang perlu melakukan percepatan pelaksanaan program Perangkat Daerah di triwulan berikutnya. Realisasi keuangan tersebut walaupun secara rerata melebihi ambang batas, tetapi ketidaksempurnaannya mengindikasikan adanya permasalahan pada proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Dari sisi Perencanaan umumnya terletak pada kelemahan kualitas perencanaan yang tidak mencerminkan kapasitas riil pelaksanaan. Ditambah lagi pada sisi anggaran, belum terpenuhinya persyaratan kesiapan (*readiness criteria*) yang menyebabkan hambatan administrasi dalam pencairan anggaran. Hal ini diperburuk pada tataran pelaksanaan, berbagai hambatan teknis-administratif turut berkontribusi secara signifikan menunda atau bahkan membatalkan peluang pelaksanaan program

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil, direspons melalui dua pendekatan kebijakan yang saling melengkapi: pertama, intervensi jangka pendek melalui mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan kedua, koreksi struktural jangka menengah melalui penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2026, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026.

Melalui dua jalur intervensi yang diuraikan, Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2026 menjadi momentum strategis untuk mengatur ulang arah pembangunan, memastikan bahwa setiap anggaran yang tersisa dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh hingga akhir tahun anggaran 2026.

Percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui Surat Edaran Wali Kota Payakumbuh Nomor 800.1.1.1/03/ED/Dalbang/2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2026 telah menetapkan acuan yang komprehensif, mulai dari tahap perencanaan hingga penatausahaan. Surat edaran tersebut juga memuat ketentuan terkait penguatan sumber daya manusia pengelola fungsi pengadaan serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pengadaan barang dan jasa.

Tabel II-4

Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan

NO	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**1.287.982.543.603**		**180.166.752.441**		**181.317.058.458**		**38.493.151.688**								**38.493.151.688**	**3.1**	**21**		**38.493.151.688**	**1.5**	**3**		
		1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**722.796.410.742**		**133.611.949.007**		**147.255.333.108**		**36.328.074.188**								**36.328.074.188**	**11**	**25**		**36.328.074.188**	**9.8**	**5**	Dinas Pendidikan	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	89,5				88.80		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.948.469.370		148.953.089		183.841.150		28.222.700								28.222.700	19.2	15.4		28.222.700	19.2	1.45		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi																		0	0			0	0		
		1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			509.366.030		40.396.549		26.350.900		13.748.700								13.748.700	16.7	52.2		13.748.700	16.7	2.7		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		6		6		1								1		16.7	0	1		16.7	0		
		1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.347.712.250		108.556.540		152.459.000		14.474.000								14.474.000	60	9.49		14.474.000	60	1.07		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		5		5		3								3		60	0	3		60	0		
		1.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			61.922.340		-		2.587.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			29.468.750		-		2.443.750		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			707.887.819.648		131.955.446.083		145.791.411.238		36.159.811.826								36.159.811.826	100	24.8		36.159.811.826	103	5.11		
			Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu																		0	0			0	0		
		1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			702.909.019.648		131.225.355.283		144.795.651.238		36.021.780.826								36.021.780.826	100	24.9		36.021.780.826	100	5.12		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	1.460		1.460		1460		1.460								1.460		100	0	1.460		100	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Tunjangan ASN (Orang/bulan)																								
		1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			4.978.800.000		730.090.800		995.760.000		138.031.000								138.031.000	100	13.9		138.031.000	107	2.77		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	72		72		77		77								77		100	0	77		107	0		
		1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			225.875.000		33.124.500		22.587.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase capaian realisasi pelaporan barang milik daerah																		0	0			0	0		
		1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			225.875.000		33.124.500		22.587.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			429.710.700		64.599.592		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah																		0	0			0	0		
		1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			349.710.700		64.599.592		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	70		70		70		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			80.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	100		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.936.467.410		551.954.458		309.440.800		18.020.598								18.020.598	0	5.82		18.020.598	0	0.46		
			Indeks layanan administrasi perangkat daerah																		0	0			0	0		
		1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			150.080.500		15.624.915		14.457.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8		8		8		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			559.942.350		93.098.649		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	16		16		16		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			60.000.000		10.699.290		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3		3		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			931.017.860		172.974.765		104.812.300		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	94		94		94		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			327.804.800		63.868.535		55.810.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9		9		9		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			220.866.400		53.886.488		23.200.000		6.600.000								6.600.000	0	28.5		6.600.000	0	2.99		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4.919		4.919		4919		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			69.977.500		-		8.625.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	15		0		15		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.579.403.000		141.801.816		99.949.000		11.420.598								11.420.598	0	11.4		11.420.598	0	0.72		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	141		141		141		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			37.375.000		-		2.587.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.580.759.912		138.005.480		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase ketersediaan BMD																		0	0			0	0		
		1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.969.307.885		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			573.266.027		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5		0		5		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			614.884.950		88.202.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	84		84		84		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			423.301.050		49.803.480		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		3		7		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.575.351.440		493.542.051		585.001.120		110.758.988								110.758.988	0	18.9		110.758.988	0	4.3		
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah																		0	0			0	0		
		1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.223.289.600		156.093.052		195.256.000		40.764.100								40.764.100	0	20.9		40.764.100	0	3.33		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	19		19		19		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.352.061.840		337.448.999		389.745.120		69.994.888								69.994.888	0	18		69.994.888	0	5.18		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10		10		10		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.211.957.262		226.323.754		363.051.300		11.260.076								11.260.076	0	3.1		11.260.076	0	0.51		
			Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik																		0	0			0	0		
		1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			210.990.000		38.948.127		39.190.000		3.750.120								3.750.120	0	9.57		3.750.120	0	1.78		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			902.240.000		143.982.923		133.600.000		7.509.956								7.509.956	0	5.62		7.509.956	0	0.83		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20		20		20		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			141.998.082		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	50		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			268.850.000		43.392.704		53.770.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	65		65		65		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-		136.491.300		-							-	-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			687.879.180		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**562.583.568.011**		**46.381.968.683**		**33.963.140.700**		**2.165.077.500**								**2.165.077.500**	**0**	**6.4**		**2.165.077.500**	**0**	**0.4**	Dinas Pendidikan	
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	100				100		0								0		0	0	0		0	0		
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	100				100		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	79,55				75.55												0	0	0		0	0		
				TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	99,3				98.00		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			267.718.104.825		21.794.994.522		17.122.681.600		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase SD terakreditasi A																		0	0			0	0		
		1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			3.200.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			4.000.000.000		122.335.825		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			4.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			3.199.979.250		129.249.930		199.999.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	17		17		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			4.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.01.02.2.01.0 009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			4.426.991.600		419.372.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		4		6		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0 010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			4.000.000.000		102.544.317		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		1		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0 011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			4.353.349.650		269.267.583		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		4		3		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0 013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			4.149.682.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5		0		2		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0 014	Pengadaan Mebel Sekolah			7.341.123.500		709.372.480		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	10		10		18		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0 016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0 019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			4.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	5		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0 025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			2.215.640.900		210.558.262		162.642.900		-								-	0	0		-	0	0		
			Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	100		100		100		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			18.558.649.250		1.392.675.100		384.792.150		-								-	0	0		-	0	0		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	150		150		245		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			704.419.000		113.034.165		220.588.350		-								-	0	0		-	0	0		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	300		300		1000		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			79.544.750		45.962.997		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	84		84		85		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			62.044.000.000		15.241.618.361		15.010.450.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	85		85		85		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			213.627.500		32.762.001		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	84		84		85		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar			40.233.720.400		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar			32.011.906.325		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		2		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah			1.600.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	10		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0034	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi (Orang)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			99.733.000		19.454.000		19.946.600		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK			1.138.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	69		0		69		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			93.758.250		28.102.493		11.060.100		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0044	Penataan Ruang/Sudut Baca			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			1.049.982.500		174.758.400		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	500		404		500		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru			4.000.000.000		200.000.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	5		1		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			6.840.738.250		1.031.268.129		518.869.000		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	7		4		3		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			11.180.891.900		755.578.417		199.333.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	20		20		3		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			1.975.000.000		355.000.000		395.000.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	790		796		790		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			28.206.866.800		442.080.062		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	100		38		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			157.988.712.186		12.000.010.713		10.203.046.450		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase SMP terakreditasi A																		0	0			0	0		
		1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			2.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			2.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			3.200.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium			4.341.673.550		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	3		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula			8.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	4		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir			4.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	5		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah			2.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			4.386.424.100		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	3		0		2		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			8.603.617.200		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	10		0		2		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			4.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			4.188.465.700		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			4.366.639.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		2		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula			4.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	5		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			952.869.750		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir			2.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah			2.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			5.129.095.506		516.743.748		232.275.750		-								-	0	0		-	0	0		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	3		2		3		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah			3.500.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	10		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			2.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.01.02.2.02.0 032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			810.000.000		169.800.000		162.000.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	270		305		270		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0 038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			1.977.047.470		208.540.298		250.022.350		-								-	0	0		-	0	0		
			Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	100		100		100		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0 039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			4.034.065.500		395.700.000		68.847.400		-								-	0	0		-	0	0		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	100		100		81		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0 040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			708.987.900		97.265.325		64.477.750		-								-	0	0		-	0	0		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	100		100		100		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0 041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			114.054.250		127.706.480		22.810.850		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	20		20		20		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0 042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			39.002.400.000		9.908.382.150		9.391.550.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	20		20		19		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0 043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			69.718.750		10.105.238		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	100		100		100		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah			2.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0047	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi (Orang)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			104.698.500		35.616.286		11.062.350		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0056	Penataan Ruang/Sudut Baca			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru			4.700.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			489.000.000		148.018.660		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	283		283		283		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			3.224.350.500		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			20.285.604.510		382.132.528		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	100		44		2		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK			200.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	12		0		12		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			69.413.991.850		8.176.535.362		4.228.190.700		1.309.040.000								1.309.040.000	0	31		1.309.040.000	0	1.89		
			Persentasi PAUD terakreditasi B																		0	0			0	0		
		1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			2.089.999.600		171.209.598		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	2		7		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD			2.000.000.000		101.591.085		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	2		1		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD			2.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			14.798.935.000		2.836.626.308		31.268.200		-								-	0	0		-	0	0		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	350		350		350		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			1.196.914.750		152.283.430		958.870.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	100		100		304		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			1.756.665.250		229.826.052		208.481.450		1.640.000								1.640.000	0	0.79		1.640.000	0	0.09		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	140		140		138		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD			11.683.200.000		2.914.511.165		2.934.300.000		1.307.400.000								1.307.400.000	0	44.6		1.307.400.000	0	11.2		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	138		138		138		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD			248.007.000		40.782.562		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	280		280		280		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terpeliharanya Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0021	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi (Orang)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru			2.000.000.000		200.000.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2		1		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0031	Penyediaan infrastruktur TIK			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0032	Penataan Ruang/Sudut Baca			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			2.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Perpustakaan Sekolah yang terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik			294.998.000		56.999.714		36.410.400		-								-	0	0		-	0	0		
			Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	200		200		200		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			2.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			151.203.750		28.470.767		18.860.650		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0038	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula			2.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			2.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			247.788.500		39.192.990		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	300		285		300		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			1.986.280.000		546.774.055		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	7		7		3		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD			150.000.000		858.267.636		30.000.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	6		18		6		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			2.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			2.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			2.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			2.010.000.000		-		10.000.000		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			67.462.759.150		4.410.428.086		2.409.221.950		856.037.500								856.037.500	0	35.5		856.037.500	0	1.27		
			Persentasi PKBM terakreditasi B																		0	0			0	0		
		1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan			117.000.000		23.400.000		23.400.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	39		45		39		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			19.249.665.000		2.529.891.549		57.600.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	555		547		6		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			174.705.000		21.519.037		25.416.200		-								-	0	0		-	0	0		
			Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	60		60		60		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			6.136.400.000		1.528.136.432		2.006.000.000		856.037.500								856.037.500	0	42.7		856.037.500	0	14		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	6		6		6		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.01.02.2.04.0 018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			59.191.250		9.282.087		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	6		6		6		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0 021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0 023	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi (Orang)	50		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0 024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	50		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0 025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	10		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0 026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	20		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0 027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	5		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			208.419.500		28.251.500		17.750.650		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0032	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi (Orang)	10		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0033	Penyediaan infrastruktur TIK			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0034	Penataan Ruang/Sudut Baca			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	30		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	30		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	100		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			2.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru			2.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			175.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	6		0		6		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			5.492.402.500		238.903.983		271.627.250		-								-	0	0		-	0	0		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1		1		2		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium			2.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			135.368.900		31.043.498		7.427.850		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	40		40		40		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium			2.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah			896.190.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	20		0		20		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal			2.418.417.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan			2.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0056	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			2.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0057	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			2.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.01.02.2.04.0060	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			2.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			2.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**			**1.029.229.700**		**65.088.308**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pendidikan	
			Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	100		100		100		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			788.901.700		65.088.308		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase tenaga pendidik yang dilatih																		0	0			0	0		
		1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar			392.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	1.000		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			396.901.700		65.088.308		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang)	100		0		100		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			240.328.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase sekolah yang dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) divalidasi																		0	0			0	0		
		1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			140.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			100.328.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)	150		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			**1.573.335.150**		**107.746.443**		**98.584.650**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pendidikan	
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Indeks pemerataan guru (%)	86		85		82.00		0								0		0	0	0		0	0		
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	68		77,01		60.00		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.573.335.150		107.746.443		98.584.650		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase pendidik yang memiliki kualifikasi sarjana (S1)																		0	0			0	0		
		1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.173.335.150		107.746.443		98.584.650		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			400.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.070.886.064.999**		**205.716.880.704**		**216.830.790.014**		**53.281.766.142**								**53.281.766.142**	**112**	**25**		**53.281.766.142**	**65**	**5**		
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**453.697.526.748**		**73.189.459.167**		**86.241.347.353**		**19.724.207.794**								**19.724.207.794**	**22**	**23**		**19.724.207.794**	**7.6**	**4.4**	Dinas Kesehatan	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	456		89.000		91		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.325.292.726		124.639.285		108.224.975		3.260.250								3.260.250	19.6	3.01		3.260.250	3.46	0.25		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi																		0	0			0	0		
		1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			815.330.775		68.501.871		61.208.225		-								-	33.3	0		-	8.7	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	23		6		6		2								2		33.3	0	2		8.7	0		
		1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			497.886.951		56.137.414		39.394.250		3.260.250								3.260.250	45	8.28		3.260.250	5.14	0.65		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	350		40		40		18								18		45	0	18		5.14	0		
		1.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			6.037.500		-		6.415.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	60		0		12		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			6.037.500		-		1.207.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	60		0		12		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			423.398.765.719		70.112.813.947		83.847.746.477		19.451.120.370								19.451.120.370	47.2	23.2		19.451.120.370	34.5	4.59		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu																		0	0			0	0		
		1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			419.831.366.469		69.538.217.297		83.183.986.977		19.392.973.870								19.392.973.870	100	23.3		19.392.973.870	95.2	4.62		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	826		786		786		786								786		100	0	786		95.2	0		
		1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			3.317.400.000		537.654.000		644.160.000		52.490.000								52.490.000	16.7	8.15		52.490.000	3.33	1.58		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		12		12		2								2		16.7	0	2		3.33	0		
		1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			249.999.250		36.942.650		19.599.500		5.656.500								5.656.500	25	28.9		5.656.500	5	2.26		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		12		12		3								3		25	0	3		5	0		
		1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.924.999.700		399.511.200		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah																		0	0			0	0		
		1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			2.924.999.700		399.511.200		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.500		409		500		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.947.410.285		309.950.723		160.076.960		8.523.200								8.523.200	2.61	5.32		8.523.200	0.52	0.22		
			Indeks layanan administrasi perangkat daerah																		0	0			0	0		
		1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			111.249.750		14.424.561		2.425.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			61.825.000		25.724.250		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			303.124.610		104.042.108		23.225.460		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			369.062.500		18.002.544		16.859.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			111.249.250		5.759.250		4.025.000		497.700								497.700	16.7	12.4		497.700	3.33	0.45		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		0		12		2								2		16.7	0	2		3.33	0		
		1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.984.861.675		141.998.010		112.334.000		8.025.500								8.025.500	1.6	7.14		8.025.500	0.32	0.27		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.500		135		500		8								8		1.6	0	8		0.32	0		
		1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			6.037.500		-		1.207.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	60		0		12		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7.598.852.875		650.461.190		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase ketersediaan BMD																		0	0			0	0		
		1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			4.058.948.750		366.318.003		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	25		10		4		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			2.369.779.125		165.499.050		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		97		70		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.170.125.000		118.644.137		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0			
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			10.961.558.881		1.219.268.188		1.714.628.941		245.898.700								245.898.700	47.2	14.3		245.898.700	11.1	2.24		
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah																		0	0			0	0		
		1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12.201.250		-		1.000.000		1.000.000								1.000.000	100	100		1.000.000	25	8.2		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4		0		1		1								1		100	0	1		25	0		
		1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.135.218.531		274.427.420		349.999.781		63.146.458								63.146.458	16.7	18		63.146.458	3.33	2.96		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	180		36		36		6								6		16.7	0	6		3.33	0		
		1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			8.814.139.100		944.840.768		1.363.629.160		181.752.242								181.752.242	25	13.3		181.752.242	5	2.06		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		25	0	3		5	0		
		1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.540.646.562		372.814.634		410.670.000		15.405.274								15.405.274	40.7	3.75		15.405.274	9.12	0.44		
			Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik																		0	0			0	0		
		1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			267.579.842		42.932.234		42.950.000		3.398.589								3.398.589	100	7.91		3.398.589	20	1.27		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		1								1		100	0	1		20	0		
		1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2.803.514.063		290.029.764		343.050.000		12.006.685								12.006.685	62.7	3.5		12.006.685	16.5	0.43		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	255		18		67		42								42		62.7	0	42		16.5	0		
		1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			198.051.094		19.893.149		14.670.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	175		10		30		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			271.501.563		19.959.487		10.000.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**165.564.524.577**		**22.888.905.616**		**26.382.651.070**		**9.856.724.452**								**9.856.724.452**	**421**	**37**		**9.856.724.452**	**119**	**6**	Dinas Kesehatan	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi Stunting berdasarkan E-PPGBM (%)	9,96		9.850		2.08		2.5								2,5		120	0	2,5		25.1	0		
				Jumlah Kematian Ibu (Jiwa)	1		2.000		2		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			31.081.002.694		1.777.824.661		1.070.098.400		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar																		0	0			0	0		
		1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	8		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			3.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	8		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			6.379.999.850		177.538.768		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	5		1		3		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			2.999.999.950		894.389.759		244.158.300		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	5		9		5		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			5.000.000.000		683.201.242		687.124.800		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	10		42		8		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi			771.003.094		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)	8		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			580.000.000		-		114.955.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	5		0		8		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			349.999.800		22.694.892		23.860.300		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	1.100		85		200		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan			133.503.478.870		21.049.281.007		25.151.841.020		9.853.872.440								9.853.872.440	551	39.2		9.853.872.440	158	7.38		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																									
			Proporsi fasyankes terakreditasi paripurna																		0	0			0	0		
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			1.530.300.993		272.517.164		44.231.800		3.643.000								3.643.000	22	8.24		3.643.000	4.41	0.24		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9.760		3.002		1952		430								430		22	0	430		4.41	0		
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			102.018.570		-		35.230.950		1.134.000								1.134.000	22.3	3.22		1.134.000	4.42	1.11		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9.524		0		1886		421								421		22.3	0	421		4.42	0		
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			1.530.300.483		158.074.472		370.416.700		12.700.800								12.700.800	22	3.43		12.700.800	4.35	0.83		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9.399		11.859		1861		409								409		22	0	409		4.35	0		
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			255.050.251		50.753.325		38.479.550		-								-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	42.008		15.727		8318		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			255.050.251		41.090.457		19.046.700		-								-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	115.407		19.791		22852		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			255.048.975		30.625.857		32.699.900		349.650								349.650	11.6	1.07		349.650	2.3	0.14		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	438.236		85.950		86775		10.096								10.096		11.6	0	10.096		2.3	0		
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			637.624.857		83.339.819		107.388.650		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	91.546		16.777		18127		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			153.028.620		20.801.057		20.095.000		-								-	13.1	0		-	2.6	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	70.117		19.190		13884		1.823								1.823		13.1	0	1.823		2.6	0		
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			153.028.620		20.639.334		20.771.000		1.443.000								1.443.000	21.2	6.95		1.443.000	4.19	0.94		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9.910		1.457		1962		415								415		21.2	0	415		4.19	0		
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			51.008.520		12.431.220		25.397.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.712		305		339		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			2.550.501.995		334.524.965		1.373.269.000		1.134.000								1.134.000	21.7	0.08		1.134.000	4.3	0.04		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	15.292		9.770		3028		658								658		21.7	0	658		4.3	0		
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			510.098.971		85.092.296		67.057.700		288.600								288.600	25.6	0.43		288.600	5.07	0.06		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	16.727		3.740		3312		848								848		25.6	0	848		5.07	0		
		1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			319.382.713		213.496.673		13.906.850		1.516.160								1.516.160	25	10.9		1.516.160	5	0.47		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	60		1		12		3								3		25	0	3		5	0		
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			3.126.562.250		427.549.476		404.189.920		2.457.000								2.457.000	25	0.61		2.457.000	5	0.08		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	60		1		12		3								3		25	0	3		5	0		
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			319.382.513		65.167.037		33.765.200		10.214.587								10.214.587	25	30.3		10.214.587	5	3.2		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	60		1		12		3								3		25	0	3		5	0		
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			638.765.825		80.075.142		591.307.150		7.097.095								7.097.095	25	1.2		7.097.095	5	1.11		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	60		1		12		3								3		25	0	3		5	0		
		1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			1.277.531.250		549.418.643		309.051.700		1.555.320								1.555.320	25	0.5		1.555.320	5	0.12		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	60		1		12		3								3		25	0	3		5	0		
		1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			73.876.363		7.979.075		11.874.200		1.516.649								1.516.649	25	12.8		1.516.649	5	2.05		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	60		1		12		3								3		25	0	3		5	0		
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			184.691.406		39.158.926		119.301.600		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	60		1		12		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			64.651.875		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	120		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			319.382.763		23.873.265		22.400.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.725		16.072		340		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1.163.749.950		264.400.505		426.483.000		5.237.843								5.237.843	15192	1.23		5.237.843	3038	0.45		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	60		1		12		1.823								1.823		15192	0	1.823		3038	0		
		1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			114.437.500.000		17.647.645.240		20.194.422.750		9.800.945.000								9.800.945.000	25	48.5		9.800.945.000	5	8.56		
			Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	60		1		12		3								3		25	0	3		5	0		
		1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah			64.651.875		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang)	200		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			127.753.125		42.585.000		133.916.000		295.926								295.926	825	0.22		295.926	165	0.23		
			Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	60		2		12		99								99		825	0	99		165	0		
		1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			191.629.488		114.020.075		44.034.800		2.343.810								2.343.810	25	5.32		2.343.810	5	1.22		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	60		1		12		3								3		25	0	3		5	0		
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			282.753.125		268.919.140		69.175.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	60		1		12		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			64.651.875		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	4		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			31.938.281		-		5.735.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	25		0		5		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			64.651.875		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	4		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			631.875.000		134.186.862		329.229.750		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			64.651.875		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	80		0		0		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			64.651.875		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	40		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			64.651.875		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	40		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok			84.651.675		-		13.442.300		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	5		0		7		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			64.651.875		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	3		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota			1.267.821.863		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			64.651.875		43.462.000		156.722.400		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	4		4		12		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			364.651.725		-		87.108.750		-								-	1267	0		-	3040	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	5		0		12		152								152		1267	0	152		3040	0		
		1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji			94.651.574		17.453.982		31.690.200		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			74.651.675		36.900.000		46.911.800		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional																		0	0			0	0		
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			74.651.675		36.900.000		46.911.800		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	5		6		12		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			905.391.338		24.899.948		113.799.850		2.852.012								2.852.012	12.5	2.51		2.852.012	2.5	0.32		
			Jumlah dokumen perizinan Rumah Sakit kelas C,D dan Fasilitas pelayanan kesehatan yang diterbitkan																		0	0			0	0		
		1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya			189.562.400		210.900		16.430.200		1.544.432								1.544.432	25	9.4		1.544.432	5	0.81		
			Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	20		1		4		1								1		25	0	1		5	0		
		1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.187.350		2.445.330		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	20		1		4		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			588.765.375		13.090.144		97.369.650		1.307.580								1.307.580	25	1.34		1.307.580	5	0.22		
			Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	40		1		8		2								2		25	0	2		5	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan			63.876.213		9.153.574		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	60		1		12		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**499.291.264**		**389.974.269**		**843.784.250**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Kesehatan	
			Meningkatnya mutu dan distribusi dinas kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	197		32.000		35		15								15		42.9	0	15		7.61	0		
		1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			64.651.876		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi																		0	0			0	0		
		1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			32.325.938		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	48		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			32.325.938		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	48		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			138.528.800		4.479.000		399.943.250		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar, Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar																		0	0			0	0		
		1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			32.325.938		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	48		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			73.876.362		4.479.000		19.999.800		-								-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	40		2		8		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			32.326.500		-		379.943.450		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	48		0		12		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			296.110.588		385.495.269		443.841.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah SDM kesehatan yang meningkat kompetensinya																		0	0			0	0		
		1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			296.110.588		385.495.269		443.841.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	125		30		185		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**439.853.613**		**451.249.661**		**330.580.800**		**6.035.000**								**6.035.000**	**42**	**1.8**		**6.035.000**	**5**	**1.4**	Dinas Kesehatan	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan makanan dan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	98		100.000		94		20								20		21.3	0	20		20.4	0		
		1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			130.814.694		5.604.390		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan																		0	0			0	0		
		1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			130.814.694		5.604.390		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	60		1		12		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			31.938.281		376.366.077		282.417.800		1.275.000								1.275.000	100	0.45		1.275.000	20	3.99		
			Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP IRT sesuai standar, Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan																		0	0			0	0		
		1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			31.938.281		376.366.077		282.417.800		1.275.000								1.275.000	100	0.45		1.275.000	20	3.99		
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	5		12		1		1								1		100	0	1		20	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			156.374.700		69.279.194		48.163.000		4.760.000								4.760.000	25	9.88		4.760.000	5	3.04		
			jumlah dokumen hasil Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara / Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		0	0			0	0		
		1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			156.374.700		69.279.194		48.163.000		4.760.000								4.760.000	25	9.88		4.760.000	5	3.04		
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	60		1		12		3								3		25	0	3		5	0		
		1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			32.325.938		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																		0	0			0	0		
		1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			32.325.938		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	48		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan			88.400.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Minuman Industri Rumah Tangga																									
			Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu																		0	0			0	0		
		1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			88.400.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	40		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**13.016.154.007**		**1.206.980.578**		**1.417.905.000**		**2.620.266**								**2.620.266**	**17**	**0.2**		**2.620.266**	**3.3**	**0**	Dinas Kesehatan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	500		100.000		100		25								25		25	0	25		5	0		
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			12.161.929.663		1.077.571.192		1.274.468.000		2.191.806								2.191.806	25	0.17		2.191.806	5	0.02		
			Jumlah dokumen kegiatan advokasi dan kemitraan masyarakt yang tersedia																		0	0			0	0		
		1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			12.161.929.663		1.077.571.192		1.274.468.000		2.191.806								2.191.806	25	0.17		2.191.806	5	0.02		
			Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	60		3		12		3								3		25	0	3		5	0		
		1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			504.074.169		58.480.910		57.262.400		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Promkes yang tersedia																		0	0			0	0		
		1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			504.074.169		58.480.910		57.262.400		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	60		2		12		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			350.150.175		70.928.476		86.174.600		428.460								428.460	25	0.5		428.460	5	0.12		
			Jumlah dokumen pelaksanaan UKBM yang tersedia																		0	0			0	0		
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			350.150.175		70.928.476		86.174.600		428.460								428.460	25	0.5		428.460	5	0.12		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	60		1		12		3								3		25	0	3		5	0		
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**417.965.569.188**		**86.161.856.133**		**84.132.406.716**		**21.450.825.480**								**21.450.825.480**	**100**	**26**		**21.450.825.480**	**20**	**5.1**	UPT RSUD dr Adnaan WD	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	92		89.000		91		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			417.965.569.188		86.161.856.133		84.132.406.716		21.450.825.480								21.450.825.480	100	25.5		21.450.825.480	20	5.13		
			jumlah BLUD yang tersedia untuk pelayan dan penunjang pelayanan																		0	0			0	0		
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			417.965.569.188		86.161.856.133		84.132.406.716		21.450.825.480								21.450.825.480	100	25.5		21.450.825.480	20	5.13		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5		1		1		1								1		100	0	1		20	0		
		1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**-**		**-**		**1.903.373.000**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	UPT RSUD dr Adnaan WD	
		1.02.02.2.01	-			-		-		1.903.373.000		-								-	0	0		-	0	0		
		1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit			-		-		1.903.373.000		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)			0		1		0								0		0	0	0		0	0				
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**-**		**1.443.454.188**		**1.445.384.848**		**293.460.562**								**293.460.562**	**100**	**20**		**293.460.562**	**20**	**0**	Puskesmas Ibuh	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	92		89.000		91		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			-		1.443.454.188		1.445.384.848		293.460.562								293.460.562	100	20.3		293.460.562	20	0		
			jumlah BLUD yang tersedia untuk pelayan dan penunjang pelayanan																		0	0			0	0		
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			-		1.443.454.188		1.445.384.848		293.460.562								293.460.562	100	20.3		293.460.562	20	0		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5		1		1		1								1		100	0	1		20	0		
		1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**-**		**-**		**402.262.550**		**15.725.000**								**15.725.000**	**15**	**3.9**		**15.725.000**	**0**	**0**	Puskesmas Ibuh	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		402.262.550		15.725.000								15.725.000	15.1	3.91		15.725.000	0	0		
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-		-		22.496.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)			0		90		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			-		-		21.250.000		6.545.000								6.545.000	91.9	30.8		6.545.000	0	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)			0		6881		6.322								6.322		91.9	0	6.322		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0 010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			-		-		3.060.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)			0		45		0								0	0	0	0	0	0	0	0		
		1.02.02.2.02.0 011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			-		-		6.460.000		1.020.000								1.020.000	1.98	15.8		1.020.000	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)			0		605		12								12		1.98	0	12		0	0		
		1.02.02.2.02.0 015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-		-		119.874.750		4.250.000								4.250.000	28.6	3.55		4.250.000	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)			0		7		2								2		28.6	0	2		0	0		
		1.02.02.2.02.0 017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-		-		10.200.000		1.105.000								1.105.000	50	10.8		1.105.000	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)			0		4		2								2		50	0	2		0	0		
		1.02.02.2.02.0 020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-		-		11.433.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)			0		12		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0 021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			-		-		7.845.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)			0		505		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0 025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-		-		36.890.000		2.805.000								2.805.000	8.33	7.6		2.805.000	0	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (0)			0		12		1								1		8.33	0	1		0	0		
		1.02.02.2.02.0 033	Operasional Pelayanan Puskesmas			-		-		136.743.800		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (0)			0		12		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			-		-		510.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)			0		5		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			-		-		25.500.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)			0		12		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**-**		**-**		**48.373.000**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Puskesmas Ibuh	
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		9.733.000		-								-	0	0		-	0	0		
		1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			-		-		9.733.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)			0		6		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		38.640.000		-								-	0	0		-	0	0		
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			-		-		38.640.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (0)			0		2		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**-**		**987.975.677**		**1.058.393.965**		**161.180.058**								**161.180.058**	**100**	**15**		**161.180.058**	**20**	**0**	Puskesmas Parit Rantang	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	456		89.000		91		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			-		987.975.677		1.058.393.965		161.180.058								161.180.058	100	15.2		161.180.058	20	0		
			Jumlah BLUD yang tersedia untuk pelayanan dan penunjang pelayanan																		0	0			0	0		
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			-		987.975.677		1.058.393.965		161.180.058								161.180.058	100	15.2		161.180.058	20	0		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5		1		1		1								1		100	0	1		20	0		
		1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**-**		**-**		**373.210.750**		**23.205.000**								**23.205.000**	**9.6**	**6.2**		**23.205.000**	**0**	**0**	Puskesmas Parit Rantang	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		373.210.750		23.205.000								23.205.000	9.63	6.22		23.205.000	0	0		
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-		-		13.687.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (0)			0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			-		-		27.455.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)			0		3140		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			-		-		6.800.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)			0		33		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			-		-		3.315.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)			0		358		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-		-		44.122.650		1.530.000								1.530.000	14.3	3.47		1.530.000	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)			0		7		1								1		14.3	0	1		0	0		
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-		-		7.140.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)			0		3		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-		-		14.178.200		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)			0		13		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			-		-		12.899.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)			0		200		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-		-		32.395.800		2.040.000								2.040.000	8.33	6.3		2.040.000	0	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)			0		12		1								1		8.33	0	1		0	0		
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			-		-		160.727.600		9.690.000								9.690.000	8.33	6.03		9.690.000	0	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)			0		12		1								1		8.33	0	1		0	0		
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			-		-		510.000		255.000								255.000	50	50		255.000	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)			0		2		1								1		50	0	1		0	0		
		1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			-		-		49.980.000		9.690.000								9.690.000	25	19.4		9.690.000	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)			0		12		3								3		25	0	3		0	0		
		1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**-**		**-**		**48.902.750**		**2.805.000**								**2.805.000**	**14**	**5.7**		**2.805.000**	**0**	**0**	Puskesmas Parit Rantang	

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		21.093.750		850.000								850.000	14.3	4.03		850.000	0	0		
		1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			-		-		21.093.750		850.000								850.000	14.3	4.03		850.000	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)			0		7		1								1		14.3	0	1		0	0		
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		27.809.000		1.955.000								1.955.000	14.3	7.03		1.955.000	0	0		
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			-		-		27.809.000		1.955.000								1.955.000	14.3	7.03		1.955.000	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)			0		7		1								1		14.3	0	1		0	0		
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**-**		**976.891.299**		**1.053.926.890**		**275.816.191**								**275.816.191**	**100**	**26**		**275.816.191**	**20**	**0**	Puskesmas Payolansek	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	456		89.000		91		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			-		976.891.299		1.053.926.890		275.816.191								275.816.191	100	26.2		275.816.191	20	0		
			Jumlah BLUD yang tersedia untuk pelayanan dan penunjang pelayanan																		0	0			0	0		
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			-		976.891.299		1.053.926.890		275.816.191								275.816.191	100	26.2		275.816.191	20	0		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5		1		1		1								1		100	0	1		20	0		
		1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**-**		**-**		**437.377.850**		**18.785.000**								**18.785.000**	**28**	**4.3**		**18.785.000**	**0**	**0**	Puskesmas Payolansek	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		437.377.850		18.785.000								18.785.000	28.3	4.29		18.785.000	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-		-		19.737.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)			0		349		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			-		-		27.540.000		3.060.000								3.060.000	105	11.1		3.060.000	0	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)			0		2917		3.058								3.058		105	0	3.058		0	0		
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			-		-		9.180.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)			0		8		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			-		-		10.370.000		1.020.000								1.020.000	14.3	9.84		1.020.000	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)			0		428		61								61		14.3	0	61		0	0		
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-		-		83.357.050		2.550.000								2.550.000	28.6	3.06		2.550.000	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)			0		7		2								2		28.6	0	2		0	0		
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-		-		8.500.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)			0		3		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-		-		14.508.800		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)			0		12		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			-		-		31.005.000		340.000								340.000	114	1.1		340.000	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)			0		44		50								50		114	0	50		0	0		
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-		-		43.945.000		6.205.000								6.205.000	25	14.1		6.205.000	0	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)			0		12		3								3		25	0	3		0	0		
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			-		-		133.900.000		-								-	25	0		-	0	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)			0		12		3								3		25	0	3		0	0		
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			-		-		1.700.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (0)			0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			-		-		53.635.000		5.610.000								5.610.000	0	10.5		5.610.000	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)			0		12		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**-**		**-**		**51.309.000**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Puskesmas Payolansek	
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		10.359.000		-								-	0	0		-	0	0		
		1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			-		-		10.359.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)			0		2		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		40.950.000		-								-	0	0		-	0	0		
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya			-		-		40.950.000		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																									
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (0)			0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**-**		**1.020.029.156**		**1.033.660.000**		**149.417.627**								**149.417.627**	**100**	**14**		**149.417.627**	**20**	**0**	Puskesmas Tiakar	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	456		89.000		91		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			-		1.020.029.156		1.033.660.000		149.417.627								149.417.627	100	14.5		149.417.627	20	0		
			jumlah BLUD yang tersedia untuk pelayan dan penunjang pelayanan																		0	0			0	0		
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			-		1.020.029.156		1.033.660.000		149.417.627								149.417.627	100	14.5		149.417.627	20	0		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5		1		1		1								1		100	0	1		20	0		
		1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**-**		**-**		**461.443.650**		**25.670.000**								**25.670.000**	**15**	**5.6**		**25.670.000**	**0**	**0**	Puskesmas Tiakar	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		461.443.650		25.670.000								25.670.000	14.8	5.56		25.670.000	0	0		
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-		-		19.568.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)			0		84		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			-		-		21.250.000		3.400.000								3.400.000	36.8	16		3.400.000	0	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)			0		5338		1.963								1.963		36.8	0	1.963		0	0		
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			-		-		6.800.000		1.700.000								1.700.000	21.3	25		1.700.000	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)			0		47		10								10		21.3	0	10		0	0		
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			-		-		8.925.000		2.210.000								2.210.000	15.8	24.8		2.210.000	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)			0		310		49								49		15.8	0	49		0	0		
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-		-		101.295.050		3.400.000								3.400.000	28.6	3.36		3.400.000	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)			0		7		2								2		28.6	0	2		0	0		
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-		-		9.180.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)			0		3		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-		-		17.850.000		2.210.000								2.210.000	25	12.4		2.210.000	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)			0		12		3								3		25	0	3		0	0		
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			-		-		27.685.600		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)			0		425		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-		-		50.320.000		2.125.000								2.125.000	25	4.22		2.125.000	0	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)			0		12		3								3		25	0	3		0	0		
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			-		-		126.575.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)			0		12		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			-		-		1.275.000		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)			0		5		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			-		-		70.720.000		10.625.000								10.625.000	25	15		10.625.000	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)			0		12		3								3		25	0	3		0	0		
		1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**-**		**-**		**62.664.700**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Puskesmas Tiakar	
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		31.995.450		-								-	0	0		-	0	0		
		1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			-		-		31.995.450		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)			0		12		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		30.669.250		-								-	0	0		-	0	0		
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			-		-		30.669.250		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)			0		2		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**-**		**1.029.447.837**		**1.154.605.000**		**173.644.280**								**173.644.280**	**100**	**15**		**173.644.280**	**20**	**0**	Puskesmas Air Tabit	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	92		89.000		91		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			-		1.029.447.837		1.154.605.000		173.644.280								173.644.280	100	15		173.644.280	20	0		
			Jumlah BLUD yang tersedia untuk pelayanan dan penunjang pelayanan																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			-		1.029.447.837	1.154.605.000		173.644.280								173.644.280	100	15		173.644.280	20	0		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5		1		1	1								1		100	0	1		20	0		
		1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**-**		**-**	**405.575.050**		**19.890.000**								**19.890.000**	**27**	**4.9**		**19.890.000**	**0**	**0**	Puskesmas Air Tabit	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-	405.575.050		19.890.000								19.890.000	27	4.9		19.890.000	0	0		
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-		-	15.663.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)			0		180	0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			-		-	31.705.000		1.785.000								1.785.000	87	5.63		1.785.000	0	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)			0		3068	2.668								2.668		87	0	2.668		0	0		
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			-		-	10.880.000		1.700.000								1.700.000	100	15.6		1.700.000	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)			0		40	40								40		100	0	40		0	0		
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			-		-	4.250.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)			0		24	0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-		-	77.865.000		1.190.000								1.190.000	20	1.53		1.190.000	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)			0		5	1								1		20	0	1		0	0		
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-		-	8.330.000		2.720.000								2.720.000	66.7	32.7		2.720.000	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)			0		3		2								2		66.7	0	2		0	0		
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-		-		17.814.050		-							-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)			0		12		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			-		-		19.322.500		-							-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)			0		3024		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-		-		30.685.000		3.995.000							3.995.000	25	13		3.995.000	0	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)			0		12		3								3		25	0	3		0	0		
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			-		-		127.775.500		-							-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)			0		12		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			-		-		1.020.000		-							-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)			0		4		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			-		-		60.265.000		8.500.000							8.500.000	25	14.1		8.500.000	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)			0		8		2								2		25	0	2		0	0		
		1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**-**		**-**		**56.467.700**		**-**							**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Puskesmas Air Tabit	
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		23.665.950		-							-	0	0		-	0	0		
		1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			-		-		23.665.950		-							-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)			0		12		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		32.801.750		-								-	0	0		-	0	0		
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			-		-		32.801.750		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (0)			0		2		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**-**		**1.497.241.127**		**1.491.027.000**		**234.555.219**								**234.555.219**	**100**	**16**		**234.555.219**	**20**	**0**	Puskesmas Tarok	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	92		89.000		91		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			-		1.497.241.127		1.491.027.000		234.555.219								234.555.219	100	15.7		234.555.219	20	0		
			jumlah BLUD yang tersedia untuk pelayan dan penunjang pelayanan																		0	0			0	0		
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			-		1.497.241.127		1.491.027.000		234.555.219								234.555.219	100	15.7		234.555.219	20	0		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5		1		1		1								1		100	0	1		20	0		
		1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**-**		**-**		**453.958.500**		**4.760.000**								**4.760.000**	**10**	**1.1**		**4.760.000**	**0**	**0**	Puskesmas Tarok	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		453.958.500		4.760.000								4.760.000	10.4	1.05		4.760.000	0	0		
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-		-		21.534.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)			0		408		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			-		-		26.265.000		1.190.000								1.190.000	100	4.53		1.190.000	0	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)			0		3410		3.410								3.410		100	0	3.410		0	0		
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			-		-		14.960.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)			0		48		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			-		-		5.440.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)			0		490		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-		-		68.129.500		3.570.000								3.570.000	25	5.24		3.570.000	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)			0		12		3								3		25	0	3		0	0		
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-		-		6.120.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)			0		12		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-		-		17.340.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)			0		12		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			-		-		28.500.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)			0		271		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-		-		47.770.000		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)			0		12		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			-		-		131.200.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)			0		12		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			-		-		1.700.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)			0		10		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			-		-		85.000.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)			0		12		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**-**		**-**		**40.309.500**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Puskesmas Tarok	
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		27.376.500		-								-	0	0		-	0	0		
		1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			-		-		27.376.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)			0		8		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		12.933.000		-								-	0	0		-	0	0		
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			-		-		12.933.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)			0		3		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-		**1.424.745.720**		**1.380.000.000**		**291.648.999**								**291.648.999**	**100**	**21**		**291.648.999**	**20**	**0**	Puskesmas Lampasi	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	92		89.000		91		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			-		1.424.745.720		1.380.000.000		291.648.999								291.648.999	100	21.1		291.648.999	20	0		
			jumlah BLUD yang tersedia untuk pelayan dan penunjang pelayanan																		0	0			0	0		
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			-		1.424.745.720		1.380.000.000		291.648.999								291.648.999	100	21.1		291.648.999	20	0		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5		1		1		1								1		100	0	1		20	0		
		1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			-		-		**425.085.750**		**15.810.000**								**15.810.000**	**121**	**3.7**		**15.810.000**	**0**	**0**	Puskesmas Lampasi	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		425.085.750		15.810.000								15.810.000	121	3.72		15.810.000	0	0		
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-		-		26.316.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)			0		270		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			-		-		24.820.000		3.060.000								3.060.000	1.16	12.3		3.060.000	0	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)			0		3091		36								36		1.16	0	36		0	0		
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			-		-		26.520.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)			0		52		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			-		-		5.610.000		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)			0		430		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-		-		40.576.100		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (0)			0		12		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-		-		12.240.000		2.550.000								2.550.000	1000	20.8		2.550.000	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)			0		3		30								30		1000	0	30		0	0		
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-		-		10.517.800		680.000								680.000	16.7	6.47		680.000	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)			0		12		2								2		16.7	0	2		0	0		
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			-		-		20.060.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)			0		376		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-		-		41.140.000		2.890.000								2.890.000	283	7.02		2.890.000	0	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)			0		12		34								34		283	0	34		0	0		
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			-		-		140.870.850		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)			0		12		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			-		-		1.275.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)			0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			-		-		75.140.000		6.630.000								6.630.000	25	8.82		6.630.000	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)			0		12		3								3		25	0	3		0	0		
		1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			-		-		**64.831.900**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Puskesmas Lampasi	
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		22.347.400		-								-	0	0		-	0	0		
		1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			-		-		22.347.400		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)			0		6		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		42.484.500		-								-	0	0		-	0	0		
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			-		-		42.484.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)			0		12		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-		**883.652.629**		**928.622.000**		**170.571.358**								**170.571.358**	**100**	**18**		**170.571.358**	**20**	**0**	Puskesmas Padang Karambia	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	92		89.000		91		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			-		883.652.629		928.622.000		170.571.358								170.571.358	100	18.4		170.571.358	20	0		
			Jumlah BLUD yang tersedia untuk pelayanan dan penunjang pelayanan																		0	0			0	0		
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			-		883.652.629		928.622.000		170.571.358								170.571.358	100	18.4		170.571.358	20	0		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5		1		1		1								1		100	0	1		20	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			-		-		**424.037.900**		**22.525.000**								**22.525.000**	**7.6**	**5.3**		**22.525.000**	**0**	**0**	Puskesmas Padang Karambia	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		424.037.900		22.525.000								22.525.000	7.58	5.31		22.525.000	0	0		
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-		-		22.245.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)			0		270		0								0	0	0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			-		-		20.740.000		170.000								170.000	9.97	0.82		170.000	0	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)			0		2768		276								276	9.97	0	276		0	0		
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			-		-		7.650.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)			0		32		0								0	0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			-		-		4.590.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)			0		310		0								0	0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-		-		93.733.050		5.440.000								5.440.000	14.3	5.8		5.440.000	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)			0		7		1								1	14.3	0	1		0	0		
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-		-		3.060.000		510.000								510.000	33.3	16.7		510.000	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)			0		3		1								1	33.3	0	1		0	0		
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-		-		10.949.600		255.000								255.000	8.33	2.33		255.000	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)			0		12		1								1		8.33	0	1		0	0		
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			-		-		6.647.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)			0		24		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-		-		15.130.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)			0		12		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			-		-		182.343.250		10.200.000								10.200.000	8.33	5.59		10.200.000	0	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)			0		12		1								1		8.33	0	1		0	0		
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			-		-		1.275.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)			0		5		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			-		-		55.675.000		5.950.000								5.950.000	16.7	10.7		5.950.000	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)			0		12		2								2		16.7	0	2		0	0		
		1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**-**		**-**		**45.364.250**		**765.000**								**765.000**	**17**	**1.7**		**765.000**	**0**	**0**	Puskesmas Padang Karambia	
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		21.065.500		765.000								765.000	33.3	3.63		765.000	0	0		
		1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			-		-		21.065.500		765.000								765.000	33.3	3.63		765.000	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)			0		3		1								1		33.3	0	1		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		24.298.750		-								-	0	0		-	0	0		
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			-		-		24.298.750		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)			0		3		0								0		0	0	0		0	0		
		1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**19.703.145.602**		**12.165.017.647**		**2.231.947.322**		**341.118.856**								**341.118.856**	**7.5**	**15**		**341.118.856**	**1.5**	**1.7**	UPTD Instalasi Farmasi	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah Kematian Ibu (Jiwa)	2		2.000		2		0								0		0	0	0		0	0		
				Prevalensi Stunting berdasarkan E-PPGBM (%)	1,9		2.590		2.08		2.5								2,5		120	0	2,5		132	0		
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			19.703.145.602		12.165.017.647		2.231.947.322		341.118.856								341.118.856	7.5	15.3		341.118.856	1.5	1.73		
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar																		0	0			0	0		
		1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			19.178.145.602		12.165.017.647		2.169.864.322		341.118.856								341.118.856	15	15.7		341.118.856	3	1.78		
			Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	10		2		2		0,3								0,3		15	0	0,3		3	0		
		1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			525.000.000		-		62.083.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	5		0		1		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**1.539.522.046.279**		**49.936.207.150**		**43.689.412.779**		**4.259.019.152**								**4.259.019.152**	**25**	**9.75**		**4.259.019.152**	**10**	**0.3**		
		1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**95.001.548.551**		**13.433.459.902**		**15.105.938.791**		**3.058.470.221**								**3.058.470.221**	**59**	**20**		**3.058.470.221**	**20**	**3.2**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	95		94,09		94.10		94.09								94,09		100	0	94,09		99	0		
		1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.848.177.938		260.550.052		250.612.325		24.614.465								24.614.465	17.1	9.82		24.614.465	26.7	1.33		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi																		0	0			0	0		
		1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			386.359.042		50.676.920		37.910.350		11.241.965								11.241.965	36.8	29.7		11.241.965	70	2.91		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		15		19		7								7		36.8	0	7		70	0		
		1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.367.001.400		209.873.132		206.059.225		13.372.500								13.372.500	31.5	6.49		13.372.500	37	0.98		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	46		46		54		17								17		31.5	0	17		37	0		
		1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			43.808.538		-		2.206.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	6		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			51.008.958		-		4.436.250		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	11		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			50.882.288.247		7.129.270.435		8.429.542.983		1.770.060.141								1.770.060.141	222	21		1.770.060.141	13.5	3.48		
			Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu																		0	0			0	0		
		1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			47.438.448.247		6.436.304.035		7.605.752.983		1.659.940.141								1.659.940.141	28.2	21.8		1.659.940.141	17.6	3.5		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.570		1.680		980		276								276		28.2	0	276		17.6	0		
		1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			3.443.840.000		692.966.400		823.790.000		110.120.000								110.120.000	417	13.4		110.120.000	9.47	3.2		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	528		493		12		50								50		417	0	50		9.47	0		
		1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			733.264.300		106.138.200		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah																		0	0			0	0		
		1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			733.264.300		106.138.200		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2		2		2		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.753.902.350		445.365.466		476.228.700		85.766.259								85.766.259	21.2	18		85.766.259	21.2	1.8		
			Indeks Layanan Administrasi Perangkat Daerah																		0	0			0	0		
		1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			707.343.450		52.739.205		74.208.450		41.326.079								41.326.079	66.7	55.7		41.326.079	66.7	5.84		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		3		2								2		66.7	0	2		66.7	0		
		1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			212.924.800		24.854.426		12.784.400		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		2		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			85.647.000		12.600.000		15.840.000		2.100.000								2.100.000	25	13.3		2.100.000	25	2.45		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4		4		4		1								1		25	0	1		25	0		
		1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			99.972.750		8.822.300		7.992.500		1.363.950								1.363.950	25	17.1		1.363.950	25	1.36		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4		4		4		1								1		25	0	1		25	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			3.595.989.000		346.349.535		358.378.000		40.976.230								40.976.230	10.7	11.4		40.976.230	10.7	1.14		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	75		86		75		8								8		10.7	0	8		10.7	0		
		1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			52.025.350		-		7.025.350		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	6		0		12		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.515.936.250		276.732.450		101.418.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Ketersediaan BMD																		0	0			0	0		
		1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			3.300.100.000		36.756.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			56.000.000		54.201.300		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10		1		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			91.836.250		180.225.150		101.418.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		2		10		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			68.000.000		5.550.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		2		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			28.338.098.466		4.590.575.451		5.049.775.283		1.094.256.400								1.094.256.400	204	21.7		1.094.256.400	15	3.86		
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		0	0			0	0		
		1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			25.767.403.210		4.149.841.916		4.531.991.447		1.044.228.996								1.044.228.996	158	23		1.044.228.996	12.2	4.05		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	156		0		12		19								19		158	0	19		12.2	0		
		1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.570.695.256		440.733.535		517.783.836		50.027.404								50.027.404	250	9.66		50.027.404	17.9	1.95		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	168		0		12		30								30		250	0	30		17.9	0		
		1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.929.881.000		624.827.848		798.361.500		83.772.956								83.772.956	49.3	10.5		83.772.956	39.4	1.7		
			Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik																		0	0			0	0		
		1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			268.920.000		227.969.875		39.190.000		5.250.000								5.250.000	100	13.4		5.250.000	100	1.95		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		1		1								1		100	0	1		100	0		
		1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			3.479.367.000		312.213.196		569.460.000		77.030.006								77.030.006	95.6	13.5		77.030.006	95.6	2.21		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	68		0		68		65								65		95.6	0	65		95.6	0		
		1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			871.874.000		43.299.600		141.751.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			269.720.000		15.213.047		47.960.000		1.492.950								1.492.950	1.59	3.11		1.492.950	1.59	0.55		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	63		0		63		1								1		1.59	0	1		1.59	0		
		1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			40.000.000		26.132.130		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		40		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			**360.087.326.642**		**11.049.145.503**		**8.864.992.590**		**521.428.850**								**521.428.850**	**9.9**	**5.9**		**521.428.850**	**8.4**	**0.1**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Kapasitas Air Baku (m3/detik) (m3/detik)	6,62				5.46		5.46								5,46		100	0	5,46		82.5	0		
				Persentase daerah irigasi berkinerja baik (%)	378,05				75.33		75.29								75,29		100	0	75,29		19.9	0		
				Persentase sungai yang berfungsi baik (%)	390		350,82		77.98		77.97								77,97		100	0	77,97		20	0		
		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			254.238.511.700		4.706.198.028		4.246.049.940		237.127.050								237.127.050	9.76	5.58		237.127.050	7.86	0.09		
			Persentase Penataan Sungai																		0	0			0	0		
		1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai			9.153.394.200		1.517.134.696		1.418.033.620		235.583.250								235.583.250	29.3	16.6		235.583.250	23.6	2.57		
			Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	25,45		29,4		20.50		6								6		29.3	0	6		23.6	0		
		1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing			244.616.471.500		3.098.427.224		2.828.016.320		1.543.800								1.543.800	0	0.05		1.543.800	0	0		
			Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	10		0,26		0.15		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.02.2.01.0130	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota			468.646.000		90.636.108		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			105.848.814.942		6.342.947.475		4.618.942.650		284.301.800								284.301.800	10	6.16		284.301.800	8.77	0.27		
			Persentase Jaringan Irigasi dengan Kondisi Baik																		0	0			0	0		
		1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			20.486.505.500		1.029.147.356		863.418.250		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	2,58		0		0.678		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			54.396.736.292		3.318.686.682		1.833.574.750		-								-	0	0		-	0	0		
			Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	10		0,03		1.181		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			10.701.084.000		1.718.305.032		1.695.523.850		284.301.800								284.301.800	40.2	16.8		284.301.800	35.1	2.66		
			Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	132,89		116,18		116		46,6								46,6		40.2	0	46,6		35.1	0		
		1.03.02.2.02.0053	Rehabilitasi Bendung Irigasi			20.264.489.150		276.808.405		226.425.800		-								-	0	0		-	0	0		
			Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)	5		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			**39.908.323.750**		**216.570.505**		**234.031.300**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Pelayanan Air Minum (%)	500				100		100								100		100	0	100		20	0		
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			39.908.323.750		216.570.505		234.031.300		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Akses rumah tangga terhadap air minum jaringan perpipaan																		0	0			0	0		
		1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																									
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			36.683.400.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			2.424.923.750		216.570.505		234.031.300		-								-	0	0		-	0	0		
			Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	300		0		50		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**			**23.351.000.000**		**2.667.546.299**		**1.143.900**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase sampah yang dikelola TPA/TPST/TPS3R (%)	161,43				17.32		17.97								17,97		104	0	17,97		11.1	0		
		1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			23.351.000.000		2.667.546.299		1.143.900		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Prasarana Pengolahan Sampah																		0	0			0	0		
		1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			4.801.000.000		601.773.609		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit)	3		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R			18.550.000.000		2.065.772.690		1.143.900		-								-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	10		30		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			**24.937.082.300**		**-**		**315.300**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	127,74				22.31		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			24.937.082.300		-		315.300		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman																		0	0			0	0		
		1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)			5.065.417.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan (MÃ³/Hari)	5		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja			2.450.105.100		-		105.100		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	400		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			600.105.100		-		105.100		-								-	0	0		-	0	0		
			Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat			16.521.455.100		-		105.100		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	1.601		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			300.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**			**112.496.169.748**		**8.615.322.697**		**6.711.944.698**		**202.170.167**								**202.170.167**	**5**	**3**		**202.170.167**	**5**	**0.2**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase sistem drainase skala kota (%)	366,92				70.99		69.49								69,49		97.9	0	69,49		18.9	0		
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			112.496.169.748		8.615.322.697		6.711.944.698		202.170.167								202.170.167	5	3.01		202.170.167	5	0.18		
			Persentase Drainase dalam kondisi baik																		0	0			0	0		
		1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan			43.073.999.303		2.775.955.700		1.786.848.174		-								-	0	0		-	0	0		
			Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	5		5		5		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan			60.442.051.645		4.528.136.000		3.577.038.464		-								-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	5		15		5		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan			1.001.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan			7.979.118.800		1.311.230.997		1.348.058.060		202.170.167								202.170.167	20	15		202.170.167	20	2.53		
			Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	5		5		5		1								1		20	0	1		20	0		
		1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**			**383.418.481.175**		**283.243.332**		**204.236.538**		**50.311.555**								**50.311.555**	**20**	**25**		**50.311.555**	**11**	**0**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	182,67				35.68		35.31								35,31		99	0	35,31		19.3	0		
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			383.418.481.175		283.243.332		204.236.538		50.311.555								50.311.555	19.7	24.6		50.311.555	10.5	0.01		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase bangunan gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik																		0	0			0	0		
		1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			380.500.532.400		54.200.000		532.400		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung			260.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya (Orang)	50		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
			Rasio Kepatuhan PBG Kabupaten/ Kota																		0	0			0	0		
		1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			2.657.948.775		229.043.332		203.704.138		50.311.555								50.311.555	39.4	24.7		50.311.555	31.5	1.89		
			Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	400		408		320		126								126		39.4	0	126		31.5	0		
		1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**			**2.016.900.000**		-		**2.709.420.450**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	48,27				48.27		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			2.016.900.000		-		2.709.420.450		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Kawasan Startegis yang ditata																		0	0			0	0		
		1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			-		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota			2.016.900.000		-		2.709.420.450		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	0		0		5		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			**430.878.693.238**		**10.142.904.720**		**8.653.793.796**		**330.819.976**								**330.819.976**	**5.5**	**3.8**		**330.819.976**	**3.7**	**0.1**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase kondisi mantap jalan (%)	422				82.80		78.65								78,65		95	0	78,65		18.6	0		
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			430.878.693.238		10.142.904.720		8.653.793.796		330.819.976								330.819.976	5.54	3.82		330.819.976	3.74	0.08		
			Persentase Jalan Kota Memenuhi Standar Fungsi dan Kelas																		0	0			0	0		
		1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan			4.982.599.700		218.658.888		587.506.750		1.752.815								1.752.815	0.09	0.3		1.752.815	20	0.04		
			Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1		119		0.215		0,2								0,2		0.09	0	0,2		20	0		
		1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan			112.413.137.700		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	3		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan			80.164.227.748		3.077.815.052		1.604.643.316		155.547.926								155.547.926	0	9.69		155.547.926	0	0.19		
			Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	2		1,31		1		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.03.10.2.01.0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar			65.054.522.600		3.257.865.985		2.457.462.450		3.187.060								3.187.060	9.35	0.13		3.187.060	2	0		
			Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)	5		3,86		1.07		0,1								0,1		9.35	0	0,1		2	0		
			Persentase Ketersediaan Jalan Kota Sesuai Kebutuhan																		0	0			0	0		
		1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			1.001.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			630.276.600		91.437.310		100.277.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	295		295,38		295.38		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan			128.518.713.700		2.083.266.956		2.050.129.000		19.114.880								19.114.880	35.7	0.93		19.114.880	1.25	0.01		
			Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	4		142		0.14		0,05								0,05		35.7	0	0,05		1.25	0		
		1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan			8.800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	0		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan			19.001.000.000		-		455.793.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	0		0		9.5		0								0		0	0	0		0	0		
			Persentase Panjang Jalan yang Dipelihara																		0	0			0	0		
		1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan			9.641.654.190		1.308.328.358		1.289.564.580		151.217.295								151.217.295	10.2	11.7		151.217.295	10.4	1.57		
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	12,5		25,89		12.7		1,3								1,3		10.2	0	1,3		10.4	0		
		1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan			671.561.000		105.532.171		108.417.200		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	4		6		4		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**			**3.858.355.025**		**270.474.962**		**215.389.944**		**7.973.110**								**7.973.110**	**19**	**3.7**		**7.973.110**	**9.4**	**0.2**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Kualitas Pengelolaan Jasa Konstruksi (%)	471,5				94.10		93.2								93,2		99	0	93,2		19.8	0		
		1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			2.811.164.525		164.136.653		163.988.550		2.269.950								2.269.950	8.33	1.38		2.269.950	6.25	0.08		
			Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi																		0	0			0	0		
		1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis			2.085.066.000		79.480.550		107.060.550		-								-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	200		0		100		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi			726.098.525		84.656.103		56.928.000		2.269.950								2.269.950	16.7	3.99		2.269.950	12.5	0.31		
			Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	40		109		30		5								5		16.7	0	5		12.5	0		
		1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			478.937.750		63.763.308		37.911.394		5.095.435								5.095.435	50	13.4		5.095.435	25	1.06		
			Persentase Ketersediaan Dokumen Standar Konstruksi																		0	0			0	0		
		1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota			478.937.750		63.763.308		37.911.394		5.095.435								5.095.435	50	13.4		5.095.435	25	1.06		
			Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	4		4		2		1								1		50	0	1		25	0		
		1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			568.252.750		42.575.001		13.490.000		607.725								607.725	11.1	4.51		607.725	0	0.11		
			Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasan Tanpa Kecelakaan Konstruksi																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota			568.252.750		42.575.001		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	50		77		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota			-		-		13.490.000		607.725								607.725	11.1	4.51		607.725	0	0		
			Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)			0		18		2								2		11.1	0	2		0	0		
		1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**			**10.773.333.760**		**371.338.731**		**415.243.988**		**27.142.699**								**27.142.699**	**10**	**6.5**		**27.142.699**	**5.1**	**0.3**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)	374,25				74.65		74.51								74,51		99.8	0	74,51		19.9	0		
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			672.216.850		113.507.003		42.525.000		3.544.452								3.544.452	25	8.33		3.544.452	16.7	0.53		
			Persentase Dokumen Regulasi Tata Ruang yang Ditetapkan																		0	0			0	0		
		1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang			-		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota			200.000.000		70.037.003		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang			400.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	4		0		0		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang			72.216.850		43.470.000		42.525.000		3.544.452								3.544.452	50	8.33		3.544.452	50	4.91		
			Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	2		2		2		1								1		50	0	1		50	0		
		1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1.925.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Dokumen Rencana Tata Ruang yang Disusun dan Dievaluasi																		0	0			0	0		
		1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar			700.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang			75.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	20		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota			1.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang			150.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawabMasyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	2		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			3.155.279.900		44.630.985		133.251.000		8.939.175								8.939.175	6.92	6.71		8.939.175	4.61	0.28		
			Persentase Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang																		0	0			0	0		
		1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			1.580.788.750		39.828.564		121.981.750		5.665.764								5.665.764	20.8	4.64		5.665.764	13.8	0.36		
			Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	600		463		400		83								83		20.8	0	83		13.8	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	2		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			774.491.150		4.802.421		11.269.250		3.273.411								3.273.411	0	29.1		3.273.411	0	0.42		
			Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			5.020.837.010		213.200.743		239.467.988		14.659.072								14.659.072	5.67	6.12		14.659.072	1.7	0.29		
			Persentase Pelanggaran Tata Ruang yang Ditangani																		0	0			0	0		
		1.03.12.2.04.0006	Pelaksanaan Audit Tata Ruang			300.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang (Kasus)	5		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR			2.004.534.610		213.200.743		131.523.588		11.660.407								11.660.407	11.3	8.87		11.660.407	6.8	0.58		
			Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)	500		429		300		34								34		11.3	0	34		6.8	0		
		1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK			716.302.400		-		107.944.400		2.998.665								2.998.665	0	2.78		2.998.665	0	0.42		
			Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	200		0		500		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR			2.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**33.172.181.780**		**2.195.274.095**		**234.262.364**		**34.279.913**								**34.279.913**	**42**	**15**		**34.279.913**	**23**	**0.1**	UPTD Alat Berat	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	95				94.10		94.09								94,09		100	0	94,09		99	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			32.000.995.550		1.980.716.690		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Alat Berat/ Alat Besar/ Alat Perbengkelan Sesuai Kebutuhan																		0	0			0	0		
		1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar			32.000.995.550		1.980.716.690		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	11		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.171.186.230		214.557.405		234.262.364		34.279.913								34.279.913	83.3	14.6		34.279.913	45.5	2.93		
			Persentase Alat Berat/ Alat Besar Kondisi Baik																		0	0			0	0		
		1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			1.171.186.230		214.557.405		234.262.364		34.279.913								34.279.913	83.3	14.6		34.279.913	45.5	2.93		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	11		11		6		5								5		83.3	0	5		45.5	0		
		1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.189.999.570**		**184.151.733**		**241.305.120**		**19.655.431**								**19.655.431**	**26**	**8.2**		**19.655.431**	**21**	**0.9**	UPTD Laboratorium Konstruksi	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	95				94.10		94.09								94,09		100	0	94,09		99	0		
		1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.074.999.850		-		61.360.000		3.750.580								3.750.580	0	6.11		3.750.580	0	0.35		
			Persentase Pemenuhan Layanan laboratorium Konstruksi yang Dilaksanakan																		0	0			0	0		
		1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.074.999.850		-		61.360.000		3.750.580								3.750.580	0	6.11		3.750.580	0	0.35		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.114.999.720		184.151.733		179.945.120		15.904.851								15.904.851	52.2	8.84		15.904.851	42.9	1.43		
			Persentase Alat Laboratorium Konstruksi Kondisi Baik																		0	0			0	0		
		1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.114.999.720		184.151.733		179.945.120		15.904.851								15.904.851	52.2	8.84		15.904.851	42.9	1.43		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	28		27		23		12								12		52.2	0	12		42.9	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			**17.432.650.740**		**506.774.671**		**1.760.883.240**		**79.456.206**								**79.456.206**	**7**	**4.5**		**79.456.206**	**7**	**0.5**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah akses aman (%)	130,99		23,14		23.57		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			17.432.650.740		506.774.671		1.760.883.240		79.456.206								79.456.206	7.03	4.51		79.456.206	7.03	0.46		
			meningkatnya rumah yang memenuhi pengolahan air limbah akses aman																		0	0			0	0		
		1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja			2.310.225.240		453.837.163		499.972.740		79.456.206								79.456.206	28.1	15.9		79.456.206	28.1	3.44		
			Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	1.000		964		1000		281								281		28.1	0	281		28.1	0		
		1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			603.910.900		52.937.508		83.910.900		-								-	0	0		-	0	0		
			Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat			14.078.514.600		-		1.176.999.600		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	100		0		100		0								0		0	0	0		0	0		
		1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			440.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**122.158.979.655**		**6.693.409.797**		**8.140.915.473**		**1.018.238.411**								**1.018.238.411**	**43**	**12.51**		**1.018.238.411**	**3.9**	**0.8**		
		1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**28.194.327.889**		**3.829.573.633**		**4.810.642.323**		**903.794.878**								**903.794.878**	**53**	**19**		**903.794.878**	**5.6**	**3.2**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM (Indeks)	435		88		87		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			276.119.723		38.801.355		32.874.350		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi																		0	0			0	0		
		1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			116.969.288		13.599.105		14.498.900		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15		3		3		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			108.391.255		17.597.250		15.396.950		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	15		3		3		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			47.780.680		7.605.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		1		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			1.489.250		-		1.489.250		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			1.489.250		-		1.489.250		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19.532.249.136		2.875.281.941		4.005.515.585		841.991.838								841.991.838	183	21		841.991.838	18.7	4.31		
			Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu																		0	0			0	0		
		1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			18.258.668.980		2.651.079.518		3.691.615.585		778.781.838								778.781.838	267	21.1		778.781.838	17.4	4.27		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	184		32		12		32								32		267	0	32		17.4	0		
		1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.273.580.156		224.202.423		313.900.000		63.210.000								63.210.000	100	20.1		63.210.000	20	4.96		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5		0		1		1								1		100	0	1		20	0		
		1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			190.350.200		33.255.600		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah																		0	0			0	0		
		1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			190.350.200		33.255.600		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	184		32		35		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.217.287.786		248.838.348		210.689.135		1.648.000								1.648.000	42.9	0.78		1.648.000	5	0.07		
			Indeks layanan administrasi perangkat daerah																		0	0			0	0		
		1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			52.037.575		8.986.560		6.746.450		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			46.601.250		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		0		0		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			210.730.885		44.038.202		29.973.385		1.000.000								1.000.000	100	3.34		1.000.000	20	0.47		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1								1		100	0	1		20	0		
		1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			139.365.088		23.269.625		16.577.150		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			22.117.525		3.888.000		4.015.000		648.000								648.000	200	16.1		648.000	20	2.93		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	10		2		1		2								2		200	0	2		20	0		
		1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			36.378.463		5.014.640		5.982.900		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.708.567.750		163.641.321		145.905.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1.489.250		-		1.489.250		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.563.806.158		79.587.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase ketersediaan BMD																		0	0			0	0		
		1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			595.806.158		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			240.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			153.000.000		79.587.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		5		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			325.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			250.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			929.564.039		140.533.340		141.153.253		29.014.264								29.014.264	100	20.6		29.014.264	20	3.12		
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah																		0	0			0	0		
		1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			334.357.126		54.542.385		54.636.937		11.805.003								11.805.003	100	21.6		11.805.003	20	3.53		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		1								1		100	0	1		20	0		
		1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			595.206.913		85.990.955		86.516.316		17.209.261								17.209.261	100	19.9		17.209.261	20	2.89		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		1								1		100	0	1		20	0		
		1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.484.950.847		413.276.049		420.410.000		31.140.776								31.140.776	50	7.41		31.140.776	8	0.89		
			Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik																		0	0			0	0		
		1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan			243.284.654		39.420.946		39.190.000		3.200.000								3.200.000	100	8.17		3.200.000	20	1.32		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																									
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		1								1		100	0	1		20	0		
		1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2.109.187.750		353.526.806		364.700.000		27.940.776								27.940.776	100	7.66		27.940.776	20	1.32		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	135		27		27		27								27		100	0	27		20	0		
		1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			125.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	40		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			114.504.443		20.328.297		16.520.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	150		30		30		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			892.974.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			**27.597.775.108**		**180.580.607**		**288.298.975**		**25.684.479**								**25.684.479**	**29**	**8.9**		**25.684.479**	**3.7**	**0.1**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kota (%)	100		100		100		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			12.961.255.806		97.621.078		90.071.650		3.540.345								3.540.345	33.3	3.93		3.540.345	5	0.03		
			Meningkatnya Ketersediaan Regulasi dan Data di Bidang Pembangunan Perumahan																		0	0			0	0		
		1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan			11.393.121.010		2.938.170		2.599.550		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	5		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			126.155.200		21.519.606		2.594.900		1.578.420								1.578.420	100	60.8		1.578.420	20	1.25		
			Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	5		1		1		1								1		100	0	1		20	0		
		1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana			166.193.666		-		5.405.650		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	5		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus			167.927.700		11.372.560		28.714.650		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			10.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			10.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			626.458.269		61.790.742		27.569.150		1.961.925								1.961.925	100	7.12		1.961.925	20	0.31		
			Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		1		1								1		100	0	1		20	0		
		1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			461.399.961		-		23.187.750		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	5		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			497.833.239		73.813.099		76.213.375		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatya Pemahaman Terhadap Regulasi Terkait Penyelenggaraan Perumahan																		0	0			0	0		
		1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana			204.993.483		37.918.590		43.339.125		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	250		50		50		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.04.02.2.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan			128.493.770		-		5.753.075		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen)	5		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan			164.345.986		35.894.509		27.121.175		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)	250		50		300		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			13.702.332.270		-		103.547.200		19.278.480								19.278.480	50	18.6		19.278.480	3.33	0.14		
			Persentase rumah korban bencana/relokasi program pemerintah yang ditingkatkan Kualitasnya																		0	0			0	0		
		1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			1.063.197.200		-		103.547.200		19.278.480								19.278.480	50	18.6		19.278.480	10	1.81		
			Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	50		0		10		5								5		50	0	5		10	0		
		1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			2.639.135.070		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	15		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota			10.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			130.393.618		-		6.840.100		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atauRelokasi Program Kabupaten/Kota																		0	0			0	0		
		1.04.02.2.04.0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			-		-		6.840.100		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)			0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			130.393.618		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			130.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		0	0			0	0		
		1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun			85.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			45.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			68.207.050		9.146.430		11.626.650		2.865.654								2.865.654	100	24.7		2.865.654	20	4.2		
			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Rumah Swadaya																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			68.207.050		9.146.430		11.626.650		2.865.654								2.865.654	100	24.7		2.865.654	20	4.2		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	5		1		1		1								1		100	0	1		20	0		
		1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)			107.753.125		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)																		0	0			0	0		
		1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)			107.753.125		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) (Laporan)	4		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			**6.624.182.925**		**2.634.674.109**		**1.211.571.675**		**3.481.515**								**3.481.515**	**0**	**0.3**		**3.481.515**	**0**	**0.1**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Peningkatan RTLH Untuk Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (sepuluh) Ha (%)	500		95		100		0								0		0	0	0		0	0		
				Persentase Rumah Layak Huni (%)	490,93		97,7		97.80		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			4.073.068.125		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase meningkatnya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha																		0	0			0	0		
		1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP			2.586.075.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	4		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			1.486.993.125		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	4		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			2.551.114.800		2.634.674.109		1.211.571.675		3.481.515								3.481.515	0	0.29		3.481.515	0	0.14		
			Persentase meningkatnya rumah layak huni dalam rangka peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha																		0	0			0	0		
		1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			2.518.540.125		2.600.159.191		1.173.617.225		3.481.515								3.481.515	0	0.3		3.481.515	0	0.14		
			Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	70		73		25		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU			32.574.675		34.514.918		37.954.450		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)			1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**			**45.231.457.973**		**-**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Meningkatnya Rumah Layak huni	Persentase Rumah Layak Huni (%)	99,76		97,7		98.04		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			45.231.457.973		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase meningkatnya rumah layak huni dalam rangka pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			44.046.173.598		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	800		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru			1.038.125.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	20		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.04.2.01.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh			83.321.250		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen)	4		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.04.2.01.0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru			31.525.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Laporan)	3		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh			32.313.125		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Orang)	3		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			**13.880.735.760**		**48.581.448**		**69.519.260**		**5.821.333**								**5.821.333**	**100**	**8.4**		**5.821.333**	**2.5**	**0**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Meningkat penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan	Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Yang Dibangun Pengembang Yang Telah Dikelola Oleh Pemerintah Kota (%)	166,67		24,71		27.59		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			13.880.735.760		48.581.448		69.519.260		5.821.333								5.821.333	100	8.37		5.821.333	2.5	0.04		
			Persentase peningkatan PSU perumahan yang telah dikelola oleh pemerintah kota																		0	0			0	0		
		1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			724.101.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	4		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan			67.884.469		48.581.448		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	4		1		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.05.2.01.0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU			90.512.625		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersosialisasikannya standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU (Kelompok)	40		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan			543.075.750		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	8		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.05.2.01.0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan			147.083.014		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan (Dokumen)	4		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang			378.514.926		-		69.519.260		5.821.333								5.821.333	100	8.37		5.821.333	20	1.54		
			Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	5		0		1		1								1		100	0	1		20	0		
		1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan			1.746.893.663		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	8		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan			10.182.670.313		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	20		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.04.06	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**630.500.000**		**-**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaaan Prasaran, Sarana dan Utilitas (PSU) tingkat kemampuan menengah	Persentase Pelayanan Sertifikasi Kualifikasi Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)	17,23																0	0	0		0	0		
		1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil			630.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase pengembag yang di fasilitasi sertifikasi kualifikasi klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman																		0	0			0	0		
		1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil			630.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan)	3		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**133.285.611.955**		**16.301.211.399**		**19.031.337.600**		**3.589.652.597**								**3.589.652.597**	**26**	**19**		**3.589.652.597**	**9.9**	**2.7**		
		1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**38.798.546.087**		**6.318.927.927**		**8.069.366.049**		**1.472.667.912**								**1.472.667.912**	**34**	**18**		**1.472.667.912**	**11**	**3.8**	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	91				91		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			389.313.000		67.910.401		80.588.200		21.474.522								21.474.522	14.6	26.7		21.474.522	2.92	5.52		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi																		0	0			0	0		
		1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			47.725.750		7.486.999		12.319.950		4.174.821								4.174.821	25	33.9		4.174.821	5	8.75		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		4		4		1								1		25	0	1		5	0		
		1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			327.499.750		60.423.402		65.450.750		17.299.701								17.299.701	33.3	26.4		17.299.701	6.67	5.28		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	30		6		6		2								2		33.3	0	2		6.67	0		
		1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			7.043.750		-		1.408.750		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			7.043.750		-		1.408.750		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1		0		100		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			33.053.387.721		4.457.107.970		7.024.922.553		1.377.784.431								1.377.784.431	37	19.6		1.377.784.431	16.5	4.17		
			Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu																		0	0			0	0		
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			31.315.074.121		4.240.633.903		6.676.968.953		1.341.572.955								1.341.572.955	73	20.1		1.341.572.955	27.7	4.28		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	195		40		74		54								54		73	0	54		27.7	0		
		1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.722.000.000		211.436.877		341.640.000		34.245.000								34.245.000	16.7	10		34.245.000	16.7	1.99		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		12		12		2								2		16.7	0	2		16.7	0		
		1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			16.313.600		5.037.190		6.313.600		1.966.476								1.966.476	21.4	31.2		1.966.476	5	12.1		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	60		14		14		3								3		21.4	0	3		5	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			462.047.840		336.630.366		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah																		0	0			0	0		
		1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			462.047.840		336.630.366		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	410		209		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			808.182.071		170.657.336		171.230.350		10.090.335								10.090.335	24.2	5.89		10.090.335	13.9	1.25		
			Indeks layanan administrasi perangkat daerah																		0	0			0	0		
		1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			10.071.065		1.787.463		1.647.650		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			35.000.000		28.860.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		2		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			159.570.900		38.116.069		29.554.150		5.524.248								5.524.248	20	18.7		5.524.248	20	3.46		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		5		5		1								1		20	0	1		20	0		
		1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			14.870.800		2.265.810		3.775.600		2.621.087								2.621.087	100	69.4		2.621.087	100	17.6		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		2		1		1								1		100	0	1		100	0		
		1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			18.679.806		4.532.006		3.058.200		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		2		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			460.172.000		95.095.988		131.786.000		1.945.000								1.945.000	25	1.48		1.945.000	5	0.42		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3								3		25	0	3		5	0		
		1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			77.817.500		-		1.408.750		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			416.719.249		732.930.222		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase ketersediaan BMD																		0	0			0	0		
		1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			138.280.000		461.008.370		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		4		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			20.000.000		130.308.366		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		25		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.000.000		141.613.486		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		15		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			234.439.249		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			762.168.337		115.853.455		256.554.946		15.559.278								15.559.278	47.2	6.06		15.559.278	27.1	2.04		
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah																		0	0			0	0		
		1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			21.062.595		2.760.000		3.450.000		2.000.000								2.000.000	100	58		2.000.000	100	9.5		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			74.993.226		14.142.876		16.914.250		3.316.140								3.316.140	25	19.6		3.316.140	5	4.42		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		25	0	3		5	0		
		1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			662.112.516		98.950.579		236.190.696		10.243.138								10.243.138	16.7	4.34		10.243.138	3.33	1.55		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		2								2		16.7	0	2		3.33	0		
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.906.727.869		437.838.177		536.070.000		47.759.346								47.759.346	64	8.91		47.759.346	7.8	1.64		
			Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik																		0	0			0	0		
		1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			239.258.869		39.135.309		39.190.000		3.000.000								3.000.000	100	7.66		3.000.000	20	1.25		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		1								1		100	0	1		20	0		
		1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan			2.471.669.000		389.013.468		486.610.000		44.759.346								44.759.346	92	9.2		44.759.346	19	1.81		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																									
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	121		20		25		23								23		92	0	23		19	0		
		1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			4.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			40.800.000		9.689.400		10.270.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60		12		10		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			151.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**21.862.555.621**		**4.149.330.160**		**3.755.767.570**		**478.178.259**								**478.178.259**	**40**	**13**		**478.178.259**	**6.9**	**2.2**	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada, Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat, Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	500				100		25								25		25	0	25		5	0		
				Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	80				80		80								80		100	0	80		100	0		
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100				100		100								100		100	0	100		100	0		
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100				100		100								100		100	0	100		100	0		
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			16.065.141.896		3.403.433.063		3.039.023.598		468.882.505								468.882.505	58.3	15.4		468.882.505	7.5	2.92		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase pelanggaran perda yang ditindaklanjuti																		0	0			0	0		
		1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			324.429.000		70.447.890		97.708.000		5.631.153								5.631.153	150	5.76		5.631.153	25	1.74		
			Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	12		2		2		3								3		150	0	3		25	0		
		1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas			378.312.250		37.789.249		19.720.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	162		57		94		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			15.342.400.646		3.295.195.924		2.921.595.598		463.251.352								463.251.352	25	15.9		463.251.352	5	3.02		
			Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	60		12		12		3								3		25	0	3		5	0		
		1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum			20.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	5		0		0		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			5.547.413.725		745.897.097		716.743.972		9.295.754								9.295.754	12.5	1.3		9.295.754	8.33	0.17		
			Persentase masyarakat yg memahami perda pekat																		0	0			0	0		
		1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)	3		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			141.300.750		12.814.665		6.481.750		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	2		3		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah			4.606.112.975		733.082.432		710.262.222		9.295.754								9.295.754	25	1.31		9.295.754	25	0.2		
			Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	12		12		12		3								3		25	0	3		25	0		
		1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			250.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase PPNS yang Mengikuti Kegiatan Pelatihan																		0	0			0	0		
		1.05.02.2.03.0002	Pembentukan Sekretariat PPNS			50.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	0		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			200.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**			**28.803.670.361**		**1.698.482.024**		**2.162.849.450**		**747.074.826**								**747.074.826**	**8.7**	**35**		**747.074.826**	**6.9**	**2.6**	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran, Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	390		100		60		15								15		25	0	15		3.85	0		
				Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100		100		100		100								100		100	0	100		100	0		
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			26.435.747.812		1.574.243.155		2.056.952.325		745.884.126								745.884.126	8.99	36.3		745.884.126	7.5	2.82		
			Persentase kasus kebakaran WMK yang tertangani dalam waktu tanggap																		0	0			0	0		
		1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			220.376.750		19.785.773		20.376.750		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1		3		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			7.456.943.618		1.216.811.337		1.339.869.375		212.804.126								212.804.126	25	15.9		212.804.126	25	2.85		
			Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12		12		12		3								3		25	0	3		25	0		
		1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran			2.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	44		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan,			16.758.427.444		337.646.045		696.706.200		533.080.000								533.080.000	1.96	76.5		533.080.000	5	3.18		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																									
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	20		53		51		1								1		1.96	0	1		5	0		
		1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran			156.059.650		6.275.601		16.059.650		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Investigasi kejadian kebakaran yang dilaksanakan																		0	0			0	0		
		1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran			156.059.650		6.275.601		16.059.650		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			1.139.781.799		60.100.294		23.754.475		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase relawan yang bersetifikat																		0	0			0	0		
		1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			1.139.781.799		60.100.294		23.754.475		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	94		94		94		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			1.072.081.100		57.862.974		66.083.000		1.190.700								1.190.700	25	1.8		1.190.700	12.5	0.11		
			Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang Dilaksanakan																		0	0			0	0		
		1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan,			372.081.100		57.862.974		66.083.000		1.190.700								1.190.700	25	1.8		1.190.700	25	0.32		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia																									
			Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	12		5		12		3								3		25	0	3		25	0		
		1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi			700.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**28.609.493.057**		**3.695.146.901**		**4.539.722.731**		**846.495.140**								**846.495.140**	**32**	**19**		**846.495.140**	**20**	**3**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	465		89.580		93		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			231.535.850		27.211.551		26.572.900		4.182.215								4.182.215	27.1	15.7		4.182.215	10.4	1.81		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi																		0	0			0	0		
		1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			102.001.750		17.709.325		21.448.300		4.182.215								4.182.215	25	19.5		4.182.215	5	4.1		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		4		4		1								1		25	0	1		5	0		
		1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			46.716.600		9.502.226		3.997.600		-								-	33.3	0		-	6.67	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	30		6		6		2								2		33.3	0	2		6.67	0		
		1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			41.408.750		-		563.500		-								-	25	0		-	5	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terselenggaranya Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	60		0		12		3								3		25	0	3		5	0		
		1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			41.408.750		-		563.500		-								-	25	0		-	25	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	100		0		100		25								25		25	0	25		25	0		
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			24.289.386.464		2.986.547.110		3.920.662.715		793.475.974								793.475.974	62.5	20.2		793.475.974	52.5	3.27		
			Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu																		0	0			0	0		
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			23.500.408.764		2.841.979.110		3.730.845.015		764.935.974								764.935.974	100	20.5		764.935.974	100	3.25		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35		33		35		35								35		100	0	35		100	0		
		1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			788.977.700		144.568.000		189.817.700		28.540.000								28.540.000	25	15		28.540.000	5	3.62		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		12		12		3								3		25	0	3		5	0		
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			240.099.900		50.283.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah																		0	0			0	0		
		1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			240.099.900		50.283.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	38		34		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.266.321.308		117.805.644		168.474.860		10.207.276								10.207.276	10.7	6.06		10.207.276	10.8	0.81		
			Indeks layanan administrasi perangkat daerah																		0	0			0	0		
		1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			23.359.050		2.137.527		3.359.050		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			144.473.960		15.393.221		18.943.110		7.760.376								7.760.376	16.7	41		7.760.376	33.3	5.37		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		2		6		1								1		16.7	0	1		33.3	0		
		1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			73.680.900		12.573.914		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		3		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			97.920.000		8.178.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		2		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			136.493.100		6.254.982		2.000.200		396.900								396.900	16.7	19.8		396.900	16.7	0.29		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	6		6		6		1								1		16.7	0	1		16.7	0		
		1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			748.985.548		73.268.000		143.609.000		2.050.000								2.050.000	20	1.43		2.050.000	25.7	0.27		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	35		25		45		9								9		20	0	9		25.7	0		
		1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			41.408.750		-		563.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12		0		12		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			234.548.725		196.225.245		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase ketersediaan BMD																		0	0			0	0		
		1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			154.348.925		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			40.099.900		91.663.800		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20		39		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			40.099.900		104.561.445		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		14		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			963.040.810		98.801.015		187.532.256		22.197.339								22.197.339	16.7	11.8		22.197.339	16.7	2.3		
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah																		0	0			0	0		
		1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			39.500.000		1.500.000		1.500.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			292.001.012		45.359.454		52.001.012		11.236.844								11.236.844	25	21.6		11.236.844	25	3.85		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3								3		25	0	3		25	0		
		1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			631.539.798		51.941.561		134.031.244		10.960.495								10.960.495	25	8.18		10.960.495	25	1.74		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3								3		25	0	3		25	0		
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.384.560.000		218.273.336		236.480.000		16.432.336								16.432.336	66.7	6.95		16.432.336	54.2	1.19		
			Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik																		0	0			0	0		
		1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			339.190.000		39.080.379		39.190.000		896.000								896.000	100	2.29		896.000	100	0.26		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		1		1								1		100	0	1		100	0		
		1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			952.980.000		167.292.893		194.530.000		15.536.336								15.536.336	100	7.99		15.536.336	117	1.63		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18		22		21		21								21		100	0	21		117	0		
		1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			44.960.000		3.799.919		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	62		62		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			47.430.000		8.100.145		2.760.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8		12		8		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			**15.211.346.829**		**439.324.387**		**503.631.800**		**45.236.460**								**45.236.460**	**9**	**9**		**45.236.460**	**2.9**	**0.3**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat, Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	500		100.000		100		25								25		25	0	25		5	0		
				Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	500		100.000		100		25								25		25	0	25		5	0		
				Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	500		100.000		100		25								25		25	0	25		5	0		
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			991.920.549		23.162.580		36.052.100		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase warga Kota Payakumbuh yang menerima Pelayanan Informasi Rawan Bencana																		0	0			0	0		
		1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			591.920.549		23.162.580		36.052.100		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	150		0		160		0								0		0	0	0		0	0			
		1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota			400.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0			
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			6.365.766.503		297.605.419		340.279.475		28.385.500								28.385.500	12.3	8.34		28.385.500	5.73	0.45		
			Persentase Warga Kota Payakumbuh yang menerima Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		0	0			0	0		
		1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota			365.778.781		22.250.479		69.799.500		7.202.500								7.202.500	50	10.3		7.202.500	33.3	1.97		
			Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	15		15		10		5								5		50	0	5		33.3	0			
		1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			660.099.900		18.614.411		20.099.800		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	44		0		33		0								0		0	0	0		0	0			
		1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			470.099.650		7.327.380		20.099.325		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	70		0		100		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			500.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	25		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			719.590.854		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			510.098.000		15.733.903		35.093.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	120		30		120		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota			540.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana			764.633.371		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			859.999.950		168.662.896		164.989.350		21.183.000								21.183.000	24	12.8		21.183.000	24	2.46		
			Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	50		12		50		12								12		24	0	12		24	0		
		1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			975.465.997		65.016.350		30.198.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1		5		5		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			4.148.659.777		100.951.949		107.300.425		15.898.400								15.898.400	6	14.8		15.898.400	3	0.38		
			Persentase Warga Kota Payakumbuh yang menerima Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																		0	0			0	0		
		1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas			660.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			352.955.150		54.119.799		62.100.925		15.898.400								15.898.400	24	25.6		15.898.400	24	4.5		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	50		50		50		12								12		24	0	12		24	0		
		1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			715.098.000		33.377.700		25.098.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	100		100		100		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota			520.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota			570.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	20		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			560.098.000		12.118.850		15.070.250		-								-	0	0		-	0	0		
			Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	100		10		100		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit			270.410.627		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			500.098.000		1.335.600		5.031.250		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			3.705.000.000		17.604.439		19.999.800		952.560								952.560	10	4.76		952.560	0.83	0.03		
			Persentase penyelesaian penanganan pasca bencana																		0	0			0	0		
		1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			390.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			285.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan			260.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			255.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			285.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	5		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota			400.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	4		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			495.000.000		17.604.439		19.999.800		952.560								952.560	10	4.76		952.560	10	0.19		
			Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	10		10		10		1								1		10	0	1		10	0		
		1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			440.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	5		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota		270.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		255.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota		230.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	10		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota		140.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**63.160.740.881**		**3.656.418.098**		**5.098.708.479**		**762.043.088**								**762.043.088**	**22**	**15**		**762.043.088**	**20**	**1.2**		
		1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**24.713.663.078**		**3.650.592.178**		**3.935.488.004**		**746.270.192**								**746.270.192**	**26**	**19**		**746.270.192**	**23**	**3**	Dinas Sosial	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	93				93		30								30		32.3	0	30		32.3	0		
		1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			287.057.200		43.361.053		44.184.550		7.353.200								7.353.200	12.5	16.6		7.353.200	3.85	2.56		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi																		0	0			0	0		
		1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			11.262.700		1.807.958		1.476.050		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9		9		9		0								0		0	0	0		0	0		
		1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			255.669.500		41.553.095		38.683.500		7.353.200								7.353.200	50	19		7.353.200	15.4	2.88		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	13		8		4		2								2		50	0	2		15.4	0		
		1.06.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			10.062.500		-		2.012.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.06.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			10.062.500		-		2.012.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18.597.758.461		2.476.551.810		3.249.815.969		693.527.654								693.527.654	100	21.3		693.527.654	100	3.73		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu																		0	0			0	0		
		1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			17.700.218.461		2.274.577.810		2.976.275.969		655.617.654								655.617.654	100	22		655.617.654	100	3.7		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21		21		21		21								21		100	0	21		100	0		
		1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			897.540.000		201.974.000		273.540.000		37.910.000								37.910.000	100	13.9		37.910.000	100	4.22		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		12		12		12								12		100	0	12		100	0		
		1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			160.329.600		28.160.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah																		0	0			0	0		
		1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			160.329.600		28.160.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	32		0		32		0								0		0	0	0		0	0		
		1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.211.432.690		288.427.147		120.056.065		9.769.562								9.769.562	18.1	8.14		9.769.562	17.7	0.81		
			Indeks layanan administrasi perangkat daerah																		0	0			0	0		
		1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			19.291.850		6.736.590		3.755.850		3.529.800								3.529.800	25	94		3.529.800	25	18.3		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8		8		8		2								2		25	0	2		25	0		
		1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			432.243.400		123.535.985		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4		4		4		0								0		0	0	0		0	0		
		1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			163.764.890		41.151.714		17.655.565		5.977.262								5.977.262	20	33.9		5.977.262	16.7	3.65		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6		5		5		1								1		20	0	1		16.7	0		
		1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			75.694.500		14.707.500		9.121.650		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		2		0								0		0	0	0		0	0		
		1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			21.717.200		2.994.100		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		2		2		0								0		0	0	0		0	0		
		1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			22.958.350		4.789.665		2.571.500		262.500								262.500	100	10.2		262.500	100	1.14		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	10		10		10		10								10		100	0	10		100	0		
		1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			465.700.000		94.511.593		84.939.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40		40		40		0								0		0	0	0		0	0		
		1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			10.062.500		-		2.012.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	10		0		10		0								0		0	0	0		0	0		
		1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.051.082.027		332.580.393		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase ketersediaan BMD																		0	0			0	0		
		1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			655.789.000		174.819.492		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3		7		4		0								0		0	0	0		0	0		
		1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			395.293.027		157.760.901		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		9		9		0								0		0	0	0		0	0		
		1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.548.731.300		274.811.542		309.977.060		19.549.776								19.549.776	25	6.31		19.549.776	25	1.26		
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah																		0	0			0	0		
		1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			18.731.300		2.726.801		3.977.060		396.444								396.444	25	9.97		396.444	25	2.12		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3								3		25	0	3		25	0		
		1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.530.000.000		272.084.741		306.000.000		19.153.332								19.153.332	25	6.26		19.153.332	25	1.25		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3								3		25	0	3		25	0		
		1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.857.271.800		206.700.233		211.454.360		16.070.000								16.070.000	40	7.6		16.070.000	30	0.87		
			Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik																		0	0			0	0		
		1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			195.950.000		39.053.004		39.190.000		3.000.000								3.000.000	100	7.66		3.000.000	100	1.53		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			795.800.000		156.106.307		159.160.000		12.620.000								12.620.000	11.8	7.93		12.620.000	11.8	1.59		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	17		17		17		2								2		11.8	0	2		11.8	0		
		1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			65.521.800		11.540.922		13.104.360		450.000								450.000	8.33	3.43		450.000	8.33	0.69		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12		12		12		1								1		8.33	0	1		8.33	0		
		1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**			**6.299.424.653**		**5.825.920**		**210.793.575**		**5.367.639**								**5.367.639**	**18**	**2.6**		**5.367.639**	**18**	**0.1**	Dinas Sosial	

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	500				100		20								20		20	0	20		4	0		
		1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			56.556.750		5.825.920		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pengumpulan Sumbangan yang berjalan sesuai aturan																		0	0			0	0		
		1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			56.556.750		5.825.920		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			6.242.867.903		-		210.793.575		5.367.639								5.367.639	22.9	2.55		5.367.639	22.9	0.09		
			Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya																		0	0			0	0		
		1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			558.543.650		-		35.530.100		1.237.067								1.237.067	45.5	3.48		1.237.067	45.5	0.22		
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	11		0		11		5								5		45.5	0	5		45.5	0		
		1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)			1.722.420.262		-		5.729.800		548.978								548.978	33.3	9.58		548.978	33.3	0.03		
			Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	6		0		6		2								2		33.3	0	2		33.3	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota			3.961.405.191		-		169.533.675		3.581.594								3.581.594	12.9	2.11		3.581.594	12.9	0.09		
			Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	155		0		155		20								20		12.9	0	20		12.9	0		
		1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi			498.800		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**11.025.431.225**		**-**		**494.672.450**		**4.070.000**								**4.070.000**	**4**	**0.8**		**4.070.000**	**2.9**	**0**	Dinas Sosial	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi (%)	100				100		15								15		15	0	15		15	0		
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			10.955.443.450		-		468.997.100		4.070.000								4.070.000	5	0.87		4.070.000	3.33	0.04		
			Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS																		0	0			0	0		
		1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan			7.158.904.825		-		393.638.675		-								-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	120		0		120		0								0		0	0	0		0	0		
		1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang			1.073.303.800		-		24.050.400		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu			600.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			563.287.425		-		51.308.025		4.070.000								4.070.000	20	7.93		4.070.000	20	0.72		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20		0		20		4								4		20	0	4		20	0		
		1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			1.274.947.400		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	130		0		130		0								0		0	0	0		0	0		
		1.06.04.2.01.0017	Penyediaan Perbekalan Kesehatan			285.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			69.987.775		-		25.675.350		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase keadaan darurat yang ditanggapi																		0	0			0	0		
		1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan			69.987.775		-		25.675.350		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			**17.654.888.750**		**-**		**316.692.050**		**3.434.007**								**3.434.007**	**3.7**	**1.1**		**3.434.007**	**0.9**	**0**	Dinas Sosial	

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	100				90		10								10		11.1	0	10		10	0		
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			17.654.888.750		-		316.692.050		3.434.007								3.434.007	3.66	1.08		3.434.007	0.91	0.02		
			Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti																		0	0			0	0		
		1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			1.034.236.250		-		200.596.200		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	40.000		0		40000		0								0		0	0	0		0	0		
		1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			8.677.948.250		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	500		0		70		0								0		0	0	0		0	0		
		1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			4.047.103.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	200		0		55		0								0		0	0	0		0	0		
		1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			3.895.601.250		-		116.095.850		3.434.007								3.434.007	14.6	2.96		3.434.007	3.66	0.09		
			Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	32.800		0		8200		1.200								1.200		14.6	0	1.200		3.66	0		
		1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**			**1.375.087.500**		**-**		**103.468.350**		**985.000**								**985.000**	**4**	**1**		**985.000**	**1**	**0.1**	Dinas Sosial	
			Meningkatnya Penanganan Bencana	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100				100		10								10		10	0	10		10	0		
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			1.274.443.200		-		83.466.850		985.000								985.000	6.67	1.18		985.000	1.67	0.08		
			Persentase PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan			737.733.750		-		47.445.750		985.000								985.000	20	2.08		985.000	5	0.13		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100		0		25		5								5		20	0	5		5	0		
		1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang			426.394.700		-		25.707.950		-								-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			110.314.750		-		10.313.150		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5		0		5		0								0		0	0	0		0	0		
		1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			100.644.300		-		20.001.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase PMKS yang mendapat Pemberdayaan Masyarakat																		0	0			0	0		
		1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana			494.800		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	2		0		2		0								0		0	0	0		0	0		
		1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			100.149.500		-		20.001.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2		0		2		0								0		0	0	0		0	0		
		1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**			**2.092.245.675**		**-**		**37.594.050**		**1.916.250**								**1.916.250**	**125**	**5.1**		**1.916.250**	**125**	**0.1**	Dinas Sosial	

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)	100				100		10								10		10	0	10		10	0		
		1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			2.092.245.675		-		37.594.050		1.916.250								1.916.250	125	5.1		1.916.250	125	0.09		
			Persentase terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan Pejuang 45																		0	0			0	0		
		1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			1.474.957.475		-		28.253.650		1.916.250								1.916.250	250	6.78		1.916.250	250	0.13		
			Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	2		0		2		5								5		250	0	5		250	0		
		1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			617.288.200		-		9.340.400		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	289		0		289		0								0		0	0	0		0	0		
		2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**46.845.532.405**		**4.515.805.427**		**5.276.752.855**		**987.317.976**								**987.317.976**	**24**	**19**		**987.317.976**	**16**	**2.1**		
		2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**31.861.499.363**		**3.677.206.173**		**4.238.402.090**		**806.232.995**								**806.232.995**	**25**	**19**		**806.232.995**	**16**	**2.5**	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	93,7		0		92.50		0								0		0	0	0		0	0		
		2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.021.906.498		86.406.981		79.219.950		10.099.550								10.099.550	12.5	12.8		10.099.550	12.5	0.99		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi																		0	0			0	0		
		2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			196.933.326		24.990.201		15.109.650		782.550								782.550	25	5.18		782.550	25	0.4		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		4		4		1								1		25	0	1		25	0		
		2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			450.118.372		61.416.780		59.255.500		8.750.000								8.750.000	25	14.8		8.750.000	25	1.94		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12		12		12		3								3		25	0	3		25	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.07.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			173.244.800		-		3.244.800		567.000								567.000	0	17.5		567.000	0	0.33		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.07.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			201.610.000		-		1.610.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	104		0		104		0								0		0	0	0		0	0		
		2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.126.093.358		2.248.551.152		3.153.760.700		679.492.282								679.492.282	50	21.6		679.492.282	48.1	3.38		
			Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu																		0	0			0	0		
		2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			18.723.228.799		2.059.179.152		2.892.702.100		643.707.282								643.707.282	100	22.3		643.707.282	96.2	3.44		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26		20		25		25								25		100	0	25		96.2	0		
		2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.402.864.559		189.372.000		261.058.600		35.785.000								35.785.000	0	13.7		35.785.000	0	2.55		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			271.476.920		30.095.511		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah																		0	0			0	0		
		2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			271.476.920		30.095.511		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	26		46		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.914.526.383		358.864.793		134.137.280		15.207.485								15.207.485	16	11.3		15.207.485	8.06	0.52		
			Indeks layanan administrasi perangkat daerah																		0	0			0	0		
		2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			32.656.176		4.794.645		5.088.500		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		5		6		0								0		0	0	0		0	0		
		2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			174.552.038		34.880.640		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7		8		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			435.731.614		180.330.600		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	38		17		9		0								0		0	0	0		0	0		
		2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			229.755.722		32.362.883		28.469.480		3.552.500								3.552.500	28.3	12.5		3.552.500	27.3	1.55		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	55		63		53		15								15		28.3	0	15		27.3	0		
		2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			134.735.075		15.684.744		14.619.600		632.700								632.700	66.7	4.33		632.700	28.6	0.47		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7		9		3		2								2		66.7	0	2		28.6	0		
		2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			50.684.813		3.000.000		5.966.300		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3		2		2		0								0		0	0	0		0	0		
		2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			77.152.898		2.758.490		2.464.400		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.637.208.047		85.052.791		75.919.000		11.022.285								11.022.285	33.3	14.5		11.022.285	16.7	0.67		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30		20		15		5								5		33.3	0	5		16.7	0		
		2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			142.050.000		-		1.610.000		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.901.360.100		392.194.499		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase ketersediaan BMD																		0	0			0	0		
		2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			10.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			785.677.000		106.920.001		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		3		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			232.050.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			773.633.100		285.274.498		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	13		23		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.07.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.757.054.030		214.937.252		683.215.000		87.947.126								87.947.126	12.5	12.9		87.947.126	12.5	2.34		
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah																		0	0			0	0		
		2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.173.803.843		103.628.469		180.903.900		25.124.524								25.124.524	0	13.9		25.124.524	0	2.14		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		3		3		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.583.250.187		111.308.783		502.311.100		62.822.602								62.822.602	25	12.5		62.822.602	25	2.43		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3								3		25	0	3		25	0		
		2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.869.082.074		346.155.985		188.069.160		13.486.552								13.486.552	50.8	7.17		13.486.552	41.6	0.72		
			Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik																		0	0			0	0		
		2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			332.754.015		38.737.966		39.190.000		4.277.952								4.277.952	100	10.9		4.277.952	100	1.29		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			522.596.560		67.284.580		85.600.000		8.920.000								8.920.000	100	10.4		8.920.000	106	1.71		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16		14		17		17								17		100	0	17		106	0		
		2.07.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			207.139.278		35.000.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	12		21		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			258.420.190		23.857.300		23.279.160		288.600								288.600	3.03	1.24		288.600	1.85	0.11		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	54		37		33		1								1		3.03	0	1		1.85	0		
		2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			548.172.031		181.276.139		40.000.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**			**450.066.920**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase dokumen rencana tenaga kerja yang tersedia (%)	75		0		25		0								0		0	0	0		0	0		
		2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			450.066.920		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang Tersusun																		0	0			0	0		
		2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			380.027.320		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	0		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			70.039.600		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	60		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			**8.003.656.556**		**730.856.801**		**255.299.765**		**3.589.842**								**3.589.842**	**0**	**1.4**		**3.589.842**	**0**	**0**	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	3,9		13.800		3.87		0								0		0	0	0		0	0		
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			7.845.484.231		710.518.871		253.229.465		3.589.842								3.589.842	0	1.42		3.589.842	0	0.05		
			Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi																		0	0			0	0		
		2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			7.845.484.231		710.518.871		253.229.465		3.589.842								3.589.842	0	1.42		3.589.842	0	0.05		
			Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	112		192		48		0								0		0	0	0		0	0		
		2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			158.172.325		20.337.930		2.070.300		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina																		0	0			0	0		
		2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			158.172.325		20.337.930		2.070.300		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	12		12		12		0								0		0	0	0		0	0		
		2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			**1.501.359.798**		**87.525.495**		**93.109.550**		**14.079.057**								**14.079.057**	**11**	**15**		**14.079.057**	**7.1**	**0.9**	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	17,53		17.460		16.73		1.56								1,56		9.32	0	1,56		8.9	0		
		2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			487.509.000		28.048.471		26.610.250		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan																		0	0			0	0		
		2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja			487.509.000		28.048.471		26.610.250		-								-	0	0		-	0	0		
			Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	200		125		125		0								0		0	0	0		0	0		
		2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			1.013.850.798		59.477.024		66.499.300		14.079.057								14.079.057	21.3	21.2		14.079.057	10.7	1.39		
			Persentase Penyebarluasan Informasi Kerja																		0	0			0	0		
		2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			302.969.525		59.477.024		66.499.300		14.079.057								14.079.057	21.3	21.2		14.079.057	21.3	4.65		
			Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	150		252		150		32								32		21.3	0	32		21.3	0		
		2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja			710.881.273		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	30		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			**5.028.949.768**		**20.216.958**		**689.941.450**		**163.416.082**								**163.416.082**	**49**	**24**		**163.416.082**	**26**	**3.3**	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	7.420		3.256.000		1444		0								0		0	0	0		0	0		
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			35.439.233		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase Perusahaaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama																		0	0			0	0		
		2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			17.719.617		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan			17.719.616		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			4.993.510.535		20.216.958		689.941.450		163.416.082								163.416.082	49.2	23.7		163.416.082	43.9	3.27		
			Persentase Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama																		0	0			0	0		
		2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			128.116.585		16.521.372		24.591.100		910.150								910.150	14.3	3.7		910.150	14.3	0.71		
			Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	7		7		7		1								1		14.3	0	1		14.3	0		
		2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			21.004.200		3.695.586		4.200.600		983.028								983.028	33.3	23.4		983.028	33.3	4.68		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	3		2		3		1								1		33.3	0	1		33.3	0		
		2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			4.844.389.750		-		661.149.750		161.522.904								161.522.904	100	24.4		161.522.904	84.2	3.33		
			Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	3.750		0		3156		3.156								3.156		100	0	3.156		84.2	0		
		2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**46.673.962.709**		**-**		**6.331.701.773**		**819.281.276**								**819.281.276**	**30**	**13**		**819.281.276**	**41**	**1.8**		
		2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**32.770.720.694**		**-**		**5.201.155.023**		**784.757.457**								**784.757.457**	**51**	**15**		**784.757.457**	**67**	**2.4**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	89				82.50		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			68.475.300		-		7.143.300		-								-	33.3	0		-	5	0		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi																		0	0			0	0		
		2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			22.666.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			35.394.300		-		4.728.300		-								-	100	0		-	20	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		0		1		1								1		100	0	1		20	0		
		2.08.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			5.207.500		-		1.207.500		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terselenggaranya Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			5.207.500		-		1.207.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			26.065.452.383		-		4.323.190.980		714.840.728								714.840.728	206	16.5		714.840.728	60	2.74		
			Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu																		0	0			0	0		
		2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			24.313.167.955		-		3.954.984.980		670.140.728								670.140.728	113	16.9		670.140.728	108	2.76		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25		0		24		27								27		113	0	27		108	0		
		2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.752.284.428		-		368.206.000		44.700.000								44.700.000	300	12.1		44.700.000	12	2.55		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	25		0		1		3								3		300	0	3		12	0		
		2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase penyelesaian administrasi Barang Milik perangkat daerah tepat waktu																		0	0			0	0		
		2.08.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			158.309.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah																		0	0			0	0		
		2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			158.309.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	35		0		24		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.216.444.620		-		128.600.230		3.838.200								3.838.200	26.5	2.98		3.838.200	167	0.17		
			Indeks layanan administrasi perangkat daerah																		0	0			0	0		
		2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			26.697.750		-		3.393.750		-								-	33.3	0		-	100	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		3		1								1		33.3	0	1		100	0		
		2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			817.091.900		-		83.900		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		3		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			171.816.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			219.099.890		-		32.287.580		500.000								500.000	40	1.55		500.000	200	0.23		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		5		2								2		40	0	2		200	0		
		2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			62.553.400		-		5.305.800		133.200								133.200	0	2.51		133.200	100	0.21		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		23040		1								1		0	0	1		100	0		
		2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12.566.400		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			21.806.280		-		1.732.200		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			844.008.000		-		84.992.000		3.205.000								3.205.000	12.1	3.77		3.205.000	1000	0.38		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		0		83		10								10		12.1	0	10		1000	0		
		2.08.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			40.805.000		-		805.000		-								-	100	0		-	100	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		1		1								1		100	0	1		100	0		
		2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.257.206.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase ketersediaan BMD																		0	0			0	0		
		2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			400.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			400.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			200.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			194.006.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			40.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			20.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.200.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.634.876.704		-		388.780.513		41.403.825								41.403.825	65	10.7		41.403.825	150	2.53		
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah																		0	0			0	0		
		2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6.520.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			316.024.784		-		153.946.720		18.579.955								18.579.955	100	12.1		18.579.955	300	5.88		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		0		3		3								3		100	0	3		300	0		
		2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			40.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.272.331.920		-		234.833.793		22.823.870								22.823.870	30	9.72		22.823.870	300	1.79		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		10		3								3		30	0	3		300	0		
		2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.249.956.687		-		353.440.000		24.674.704								24.674.704	50	6.98		24.674.704	23.5	1.97		
			Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			210.990.000		-		39.190.000		1.920.000								1.920.000	100	4.9		1.920.000	100	0.91		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		1		1								1		100	0	1		100	0		
		2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			851.868.687		-		290.300.000		22.754.704								22.754.704	100	7.84		22.754.704	64.4	2.67		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	45		0		29		29								29		100	0	29		64.4	0		
		2.08.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			40.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			67.000.000		-		23.950.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		0		8		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			40.098.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			36.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			**1.475.737.276**		**-**		**66.141.150**		**919.278**								**919.278**	**0**	**1.4**		**919.278**	**0**	**0.1**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	
			Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD (%)	8				4.09		0								0		0	0	0		0	0		
				Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) (Kategori)	1000				900												0	0	0		0	0		
		2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			1.024.910.900		-		6.843.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah lembaga yang memahami konsep gender dan Persentase pemenuhan dokumen untuk evaluasi PUG																		0	0			0	0		
		2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota			1.024.910.900		-		6.843.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	31		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			301.184.314		-		59.298.150		919.278								919.278	0	1.55		919.278	0	0.31		
			Jumlah pemberdayaan perempuan pada organisasi kemasyarakatan																		0	0			0	0		
		2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			150.592.057		-		58.297.950		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	31		0		151		0								0		0	0	0		0	0		
			Jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam kaukus perempuan politik indonesia																		0	0			0	0		
		2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			150.592.257		-		1.000.200		919.278								919.278	0	91.9		919.278	0	0.61		
			Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	40		0		31		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			149.642.062		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan																		0	0			0	0		
		2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota			149.642.062		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			**1.176.726.486**		**-**		**254.889.000**		**9.926.680**								**9.926.680**	**0**	**3.9**		**9.926.680**	**0**	**0.8**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan) (%)	11				0.016		0								0		0	0	0		0	0		
				Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100				100		100								100		100	0	100		100	0		
		2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			628.299.450		-		80.253.800		8.311.680								8.311.680	0	10.4		8.311.680	0	1.32		
			Jumlah advokasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan																		0	0			0	0		
		2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota			628.299.450		-		80.253.800		8.311.680								8.311.680	0	10.4		8.311.680	0	1.32		
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	31		0		31		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-		131.530.000		1.615.000								1.615.000	0	1.23		1.615.000	0	0		
		2.08.03.2.02.0003	&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&			-		-		4.000.000		-								-	0	0		-	0	0		
			&Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)			0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.03.2.02.0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			-		-		6.332.500		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota (Orang)			0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			-		-		22.500.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)			0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			-		-		8.785.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)			0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.03.2.02.0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota			-		-		10.500.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)			0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			-		-		74.412.500		1.615.000								1.615.000	0	2.17		1.615.000	0	0		
			Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)			0		0		1								1		0	0	1		0	0		
		2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			-		-		5.000.000		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)			0		20		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			548.427.036		-		43.105.200		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan																		0	0			0	0		
		2.08.03.2.03.0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			548.427.036		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-		43.105.200		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)			0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			**6.122.686.894**		**-**		**434.631.800**		**22.917.861**								**22.917.861**	**0**	**5.3**		**22.917.861**	**0**	**0.4**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	100				100		0								0		0	0	0		0	0		
				Jumlah organisasi perempuan aktif (Organisasi)	21				21		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.078.558.298		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak																		0	0			0	0		
		2.08.04.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.			2.078.558.298		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentinganKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	31		0		31		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			3.220.000.000		-		434.631.800		22.917.861								22.917.861	0	5.27		22.917.861	0	0.71		
			Jumlah Pengembangan lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga																		0	0			0	0		
		2.08.04.2.02.0005	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			2.570.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.04.2.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			650.000.000		-		434.631.800		22.917.861								22.917.861	0	5.27		22.917.861	0	3.53		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			824.128.596		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota																		0	0			0	0		
		2.08.04.2.03.0006	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota			824.128.596		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	5		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**			**74.237.308**		-		**42.271.500**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	100				100		0								0		0	0	0		0	0		
				Jumlah Perwako, himbauan, MoU terkait perlindungan anak (Dokumen)	1				1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			74.237.308		-		42.271.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase pemanfaatan data gender dan anak oleh satuan kerja terkait ; Jumlah updating data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI-PPA)																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota			74.237.308		-		42.271.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			**830.371.024**		**-**		**6.517.700**		**760.000**								**760.000**	**0**	**12**		**760.000**	**0**	**0.1**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	62,31				61.51		0								0		0	0	0		0	0		
				Jumlah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) (Desa/Kelurahan)	9				9		0								0		0	0	0		0	0		
				Tingkat Kategori Capaian Kota Layak Anak (KLA) (Kategori)	800				700												0	0	0		0	0		
		2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			554.247.350		-		6.517.700		760.000								760.000	0	11.7		760.000	0	0.14		
			Jumlah pelembagaan PHA																		0	0			0	0		
		2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			277.123.676		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	31		0		1		0								0	0	0	0	0		0	0		
		2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non			277.123.674		-		6.517.700		760.000								760.000	0	11.7		760.000	0	0.27		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																									
			Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	31		0		1		0								0		0	0	0		0	0			
			2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		276.123.674		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabuoaten/kota																		0	0			0	0		
			2.08.06.2.02.0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		276.123.674		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	5		0		0		0								0	0	0	0	0		0	0			
			2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		**2.223.483.027**		**-**		**326.095.600**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan , eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	84,33				83.25		0								0	0	0	0	0		0	0			

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100				100		100								100		100	0	100		100	0		
				Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten/ Kota (%)	100				100		100								100		100	0	100		100	0		
		2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			1.111.741.514		-		114.977.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan banyak pihak																		0	0			0	0		
		2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota			556.370.757		-		114.977.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	31		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.07.2.01.0010	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota			555.370.757		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	31		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			556.370.757		-		168.033.600		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah koordinasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan banyak pihak																		0	0			0	0		
		2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			556.370.757		-		80.916.100		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	17		0		10		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			-		-		52.500.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)			0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			-		-		10.500.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)			0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			-		-		6.332.500		-								-	0	0		-	0	0		
			layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)			0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			-		-		8.785.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)			0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.07.2.02.0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			-		-		4.000.000		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)			0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			-		-		5.000.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)			0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			555.370.756		-		43.085.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus																		0	0			0	0		
		2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota			555.370.756		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai			-		-		43.085.000		-								-	0	0		-	0	0		
			terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)			0		70		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			**800.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan) (%)	64				0.016												0	0	0		0	0		
				Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100				100												0	0	0		0	0		
		2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan																		0	0			0	0		
		2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			400.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	10		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			400.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	10		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			**1.200.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan , eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	84,33				83.25												0	0	0		0	0		
				Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100				100												0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten/ Kota (%)	100				100												0	0	0		0	0		
		2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.200.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah koordinasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan banyak pihak																		0	0			0	0		
		2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			400.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			400.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			400.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			**40.578.816.522**		**2.879.799.147**		**3.218.895.255**		**610.089.113**								**610.089.113**	**40**	**19**		**610.089.113**	**26**	**1.5**		
		2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**21.326.514.542**		**2.411.598.842**		**2.840.088.447**		**564.935.148**								**564.935.148**	**43**	**20**		**564.935.148**	**23**	**2.7**	Dinas Ketahanan Pangan	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	88,5				86.5		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			654.844.979		54.641.946		21.872.400		3.667.400								3.667.400	29.2	16.8		3.667.400	5.83	0.56		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi																		0	0			0	0		
		2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			186.877.250		16.728.245		10.749.650		2.798.000								2.798.000	66.7	26		2.798.000	13.3	1.5		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15		3		3		2								2		66.7	0	2		13.3	0		
		2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			199.052.050		37.913.701		10.317.750		869.400								869.400	50	8.43		869.400	10	0.44		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	30		6		6		3								3		50	0	3		10	0		
		2.09.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			133.513.179		-		402.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			135.402.500		-		402.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.344.863.202		1.765.630.306		2.468.197.707		517.698.303								517.698.303	62.5	21		517.698.303	51.1	3.37		
			Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu																		0	0			0	0		
		2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14.089.783.202		1.628.142.306		2.285.557.707		488.548.303								488.548.303	100	21.4		488.548.303	77.3	3.47		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22		17		17		17								17		100	0	17		77.3	0		
		2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.255.080.000		137.488.000		182.640.000		29.150.000								29.150.000	25	16		29.150.000	25	2.32		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		12		12		3								3		25	0	3		25	0		
		2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			469.276.600		28.169.700		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			302.226.600		26.804.400		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	44		44		22		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			167.050.000		1.365.300		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.075.072.793		119.325.329		122.198.800		14.465.190								14.465.190	16.8	11.8		14.465.190	12.5	0.7		
			Indeks layanan administrasi perangkat daerah																		0	0			0	0		
		2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			39.426.533		1.401.930		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	36		7		7		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			146.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			138.028.660		20.843.250		18.028.660		5.516.090								5.516.090	10.8	30.6		5.516.090	6.67	4		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		54		37		4								4		10.8	0	4		6.67	0		
		2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			73.271.100		8.575.531		7.579.640		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		3		5		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			48.070.000		8.020.850		8.070.000		899.100								899.100	100	11.1		899.100	100	1.87		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		8		2		2								2		100	0	2		100	0		
		2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			24.915.000		1.929.500		1.725.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5		5		5		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.224.959.000		78.554.268		84.783.000		8.050.000								8.050.000	6.67	9.49		8.050.000	6	0.66		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100		100		90		6								6		6.67	0	6		6	0		
		2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			260.402.500		-		2.012.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.327.073.472		206.649.328		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase ketersediaan BMD																		0	0			0	0		
		2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			470.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			305.000.000		102.101.130		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3		54		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			187.073.472		89.864.998		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		7		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			155.000.000		14.683.200		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		2		0		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.09.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			210.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			613.103.496		114.079.363		100.099.540		13.231.255								13.231.255	150	13.2		13.231.255	100	2.16		
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah																		0	0			0	0		
		2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			189.084.200		31.040.391		38.425.000		7.204.609								7.204.609	200	18.8		7.204.609	100	3.81		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		4		1		2								2		200	0	2		100	0		
		2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			424.019.296		83.038.972		61.674.540		6.026.646								6.026.646	100	9.77		6.026.646	100	1.42		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		4		1		1								1		100	0	1		100	0		
		2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			842.280.000		123.102.870		127.720.000		15.873.000								15.873.000	66.7	12.4		15.873.000	52.9	1.88		
			Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik																		0	0			0	0		
		2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			244.190.000		36.165.000		39.190.000		4.250.000								4.250.000	100	10.8		4.250.000	100	1.74		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		4		1		1								1		100	0	1		100	0		
		2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			508.800.000		78.048.470		78.800.000		11.623.000								11.623.000	100	14.8		11.623.000	58.8	2.28		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	17		40		10		10								10		100	0	10		58.8	0		
		2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			89.290.000		8.889.400		9.730.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12		3		10		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**			**1.248.023.283**		**7.523.405**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Ketahanan Pangan	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	95				91		90.29								90,29		99.2	0	90,29		95	0		
		2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.248.023.283		7.523.405		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Cadangan Pangan Masyarakat																		0	0			0	0		
		2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya			917.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik			331.023.283		7.523.405		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	1		3		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**			**12.664.645.445**		**386.659.077**		**233.286.025**		**10.942.725**								**10.942.725**	**50**	**4.7**		**10.942.725**	**20**	**0.1**	Dinas Ketahanan Pangan	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	88,3				87.9		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			7.114.632.950		164.164.814		128.281.000		4.218.900								4.218.900	25	3.29		4.218.900	11.1	0.06		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			1. Persentase pengembangan usaha kelembagaan distribusi pangan 2. Persentase informasi harga yang up to date																		0	0			0	0		
		2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			425.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			1.805.816.500		39.410.550		51.159.350		753.690								753.690	0	1.47		753.690	0	0.04		
			Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	450		90		40		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota			3.298.142.550		119.670.321		71.448.650		1.541.790								1.541.790	0	2.16		1.541.790	0	0.05		
			Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	1		6		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			365.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota			300.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan			220.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Informasi Stok Pangan	Informasi Stok Pangan (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota			275.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)			202.923.950		5.083.943		2.923.450		809.745								809.745	0	27.7		809.745	0	0.4		
			Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	1		3		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota			222.749.950		-		2.749.550		1.113.675								1.113.675	100	40.5		1.113.675	100	0.5		
			Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		1		1								1		100	0	1		100	0		
		2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			1.445.000.000		5.752.169		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase cadangan pangan pemerintah daerah																		0	0			0	0		
		2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			720.000.000		5.752.169		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	10		1		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota			385.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	7		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota			340.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton)	70		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			4.105.012.495		216.742.094		105.005.025		6.723.825								6.723.825	100	6.4		6.723.825	66.7	0.16		
			persentase konsumsi masyarakat sesuai AKE																		0	0			0	0		
		2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			299.255.450		3.603.263		4.255.450		538.350								538.350	100	12.7		538.350	100	0.18		
			Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1		2		1		1								1		100	0	1		100	0		
		2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman			3.480.757.045		213.138.831		100.749.575		6.185.475								6.185.475	100	6.14		6.185.475	100	0.18		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																									
			Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1		3		1		1								1		100	0	1		100	0		
		2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun			325.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**			**3.637.567.636**		**10.280.037**		**40.112.900**		**1.027.860**								**1.027.860**	**31**	**2.6**		**1.027.860**	**80**	**0**	Dinas Ketahanan Pangan	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	9				11		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			297.838.000		4.818.943		2.837.350		520.590								520.590	100	18.4		520.590	100	0.17		
			Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti																		0	0			0	0		
		2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			297.838.000		4.818.943		2.837.350		520.590								520.590	100	18.4		520.590	100	0.17		
			Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			3.339.729.636		5.461.094		37.275.550		507.270								507.270	8.33	1.36		507.270	75	0.02		
			Persentase keluarga rentan pangan yang mendapat intervensi																		0	0			0	0		
		2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			992.600.600		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			275.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi			1.738.057.986		-		33.204.950		107.115								107.115	0	0.32		107.115	0	0.01		
			Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			334.071.050		5.461.094		4.070.600		400.155								400.155	25	9.83		400.155	300	0.12		
			Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		12		3								3		25	0	3		300	0		
		2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**			**1.702.065.616**		**63.737.786**		**105.407.883**		**33.183.380**								**33.183.380**	**0**	**31**		**33.183.380**	**0**	**2**	Dinas Ketahanan Pangan	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	85,3		42.000		85.1		25								25		29.4	0	25		29.3	0		
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			1.702.065.616		63.737.786		105.407.883		33.183.380								33.183.380	0	31.5		33.183.380	0	1.95		
			1. Persentase masyarakat yang memahami zat berbahaya bagi pangan 2. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti																		0	0			0	0		
		2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			906.022.600		25.255.332		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			796.043.016		38.482.454		105.407.883		33.183.380								33.183.380	0	31.5		33.183.380	0	4.17		
			Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1		3		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			**2.186.788.000**		**39.276.465**		**97.394.000**		**6.767.230**								**6.767.230**	**0**	**7**		**6.767.230**	**0**	**0.3**		
		2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**			**200.000.000**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Tanah Sengketa, Konflik Yang Difasilitasi (%)	333,34				0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			200.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang Diinventarisasi																		0	0			0	0		
		2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			200.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.10.07	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**			**300.000.000**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Meningkatnya tata kelola tanah ulayat	Persentase Tanah Ulayat Yang Dipetakan (%)	50				0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.10.07.2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota			300.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan																		0	0			0	0		
		2.10.07.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			300.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**			**1.686.788.000**		**39.276.465**		**97.394.000**		**6.767.230**								**6.767.230**	**0**	**7**		**6.767.230**	**0**	**0.4**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (%)	500		400		100		0								0		0	0	0		0	0		
		2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			1.686.788.000		39.276.465		97.394.000		6.767.230								6.767.230	0	6.95		6.767.230	0	0.4		
			Persentase Sertifikasi Aset tanah dan Bangunan Pemerintah Kota																		0	0			0	0		
		2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah			1.686.788.000		39.276.465		97.394.000		6.767.230								6.767.230	0	6.95		6.767.230	0	0.4		
			Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**119.947.264.941**		**43.298.017.938**		**16.340.705.725**		**2.241.444.835**								**2.241.444.835**	**34**	**14**		**2.241.444.835**	**25**	**1.9**		
		2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**37.079.241.401**		**10.902.450.496**		**5.034.920.088**		**870.017.025**								**870.017.025**	**34**	**17**		**870.017.025**	**28**	**2.4**	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM (Indeks)	89				89.00		80.71								80,71		90.7	0	80,71		90.7	0		
		2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			727.684.371		49.464.313		125.577.850		2.842.530								2.842.530	50	2.26		2.842.530	50	0.39		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi																		0	0			0	0		
		2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			184.219.821		29.734.429		22.113.550		1.984.500								1.984.500	100	8.97		1.984.500	100	1.08		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		3		3		3								3		100	0	3		100	0		
		2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			497.215.050		19.729.884		97.215.500		858.030								858.030	100	0.88		858.030	100	0.17		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		5		5		5								5		100	0	5		100	0		
		2.11.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			23.249.700		-		3.249.450		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.11.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			22.999.800		-		2.999.350		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19.729.604.580		7.746.800.601		4.036.222.508		788.336.531								788.336.531	67.7	19.5		788.336.531	54.1	4		
			Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu																		0	0			0	0		
		2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			17.861.204.580		7.189.306.601		3.686.332.508		733.001.531								733.001.531	110	19.9		733.001.531	103	4.1		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	31		31		29		32								32		110	0	32		103	0		
		2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.868.400.000		557.494.000		349.890.000		55.335.000								55.335.000	25	15.8		55.335.000	5	2.96		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		12		12		3								3		25	0	3		5	0		
		2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.198.391.100		343.186.470		100.595.200		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah																		0	0			0	0		
		2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			1.198.391.100		343.186.470		100.595.200		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2		2		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.530.016.500		849.766.939		184.698.700		11.068.521								11.068.521	12.1	5.99		11.068.521	2.42	0.44		
			Indeks layanan administrasi perangkat daerah																		0	0			0	0		
		2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			87.493.900		3.151.004		3.831.050		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		5		5		0								0		0	0	0		0	0		
		2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			177.953.250		41.512.014		17.790.450		5.485.176								5.485.176	38.5	30.8		5.485.176	7.69	3.08		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	130		26		26		10								10		38.5	0	10		7.69	0		
		2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			177.928.200		294.952.710		17.247.000		3.988.345								3.988.345	36.4	23.1		3.988.345	7.27	2.24		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	55		11		11		4								4		36.4	0	4		7.27	0		
		2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			43.150.000		6.426.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		12		12		0								0		0	0	0		0	0		
		2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			65.835.800		23.289.397		5.835.850		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		12		12		0								0		0	0	0		0	0		
		2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.757.656.000		480.435.814		119.995.000		1.595.000								1.595.000	10	1.33		1.595.000	2	0.09		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	600		120		120		12								12		10	0	12		2	0		
		2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			219.999.350		-		19.999.350		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			8.662.396.450		742.571.318		32.950.450		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase ketersediaan BMD																		0	0			0	0		
		2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2.132.438.000		178.200.002		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		5		3		0								0		0	0	0		0	0		
		2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			460.847.750		243.696.890		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			743.627.050		62.584.002		32.950.450		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8		8		2		0								0		0	0	0		0	0		
		2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.325.483.650		258.090.424		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.406.704.900		694.182.987		338.895.380		39.908.747								39.908.747	40.2	11.8		39.908.747	28	1.66		
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah																		0	0			0	0		
		2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			21.040.000		2.240.000		1.540.000		300.000								300.000	100	19.5		300.000	100	1.43		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2		2		2		2								2		100	0	2		100	0		
		2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			684.471.160		218.652.430		89.981.640		16.211.034								16.211.034	20.8	18		16.211.034	4.1	2.37		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	610		122		120		25								25		20.8	0	25		4.1	0		
		2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			138.500.000		-		10.500.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.562.693.740		473.290.557		236.873.740		23.397.713								23.397.713	40	9.88		23.397.713	8	1.5		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	50		10		10		4								4		40	0	4		8	0		
		2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.824.443.500		476.477.868		215.980.000		27.860.696								27.860.696	75	12.9		27.860.696	75	1.53		
			Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik																		0	0			0	0		
		2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			279.190.000		63.349.326		39.190.000		4.130.000								4.130.000	100	10.5		4.130.000	100	1.48		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			961.450.000		328.720.963		165.300.000		21.032.696								21.032.696	100	12.7		21.032.696	100	2.19		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	17		17		17		17								17		100	0	17		100	0		
		2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			131.490.000		20.297.579		11.490.000		2.698.000								2.698.000	100	23.5		2.698.000	100	2.05		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6		6		6		6								6		100	0	6		100	0		
		2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			452.313.500		64.110.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**			**1.313.341.805**		**277.236.456**		**113.341.744**		**26.167.294**								**26.167.294**	**30**	**23**		**26.167.294**	**6.7**	**2**	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Yang Di tindak Lanjuti (Dokumen)	5		0		5		5								5		100	0	5		100	0		
		2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			713.341.805		277.236.456		113.341.744		26.167.294								26.167.294	30	23.1		26.167.294	6.67	3.67		
			Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti disusun																		0	0			0	0		
		2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota			313.341.805		277.236.456		113.341.744		26.167.294								26.167.294	30	23.1		26.167.294	20	8.35		
			Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	15		5		10		3								3		30	0	3		20	0		
		2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota			200.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.11.02.2.01.0004	Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota			200.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			600.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota"																		0	0			0	0		
		2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD			560.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	0		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.11.02.2.02.0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS			40.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	0		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			**2.581.162.300**		**250.014.863**		**163.809.400**		**2.242.200**								**2.242.200**	**100**	**1.4**		**2.242.200**	**20**	**0.1**	Dinas Lingkungan Hidup	
			Menurunnya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Nilai)	67,95				67.15		70.67								70,67		105	0	70,67		104	0		
				Indeks Kualitas Udara (Nilai)	79,65				78.45		82.97								82,97		106	0	82,97		104	0		
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			2.581.162.300		250.014.863		163.809.400		2.242.200								2.242.200	100	1.37		2.242.200	20	0.09		
			1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara																		0	0			0	0		
		2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			1.021.162.300		250.014.863		163.809.400		2.242.200								2.242.200	100	1.37		2.242.200	100	0.22		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	3		3		3		3								3		100	0	3		100	0		
		2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			60.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK			100.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			1.200.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah			200.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**			**9.862.944.530**		**3.872.384.563**		**1.963.936.796**		**238.962.840**								**238.962.840**	**100**	**12**		**238.962.840**	**57**	**2.4**	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya pengelolaan keaneka ragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	15				14.91		14.89								14,89		99.9	0	14,89		99.3	0		
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			9.862.944.530		3.872.384.563		1.963.936.796		238.962.840								238.962.840	100	12.2		238.962.840	56.7	2.42		
			Persentase RTH (Persentase)																		0	0			0	0		
		2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			320.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			9.542.944.530		3.872.384.563		1.963.936.796		238.962.840								238.962.840	100	12.2		238.962.840	113	2.5		
			Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	5		5,67		5.67		5,67								5,67		100	0	5,67		113	0		
		2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**			**312.646.300**		**-**		**6.909.350**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan limbah beracun limbah (B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	50				50		60								60		120	0	60		120	0		
		2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3			312.646.300		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)																		0	0			0	0		
		2.11.05.2.01.0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)			312.646.300		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	6		0		3		0								0		0	0	0		0	0		
		2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			-		-		6.909.350		-							-	0	0		-	0	0		
		2.11.05.2.02.0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota			-		-		6.909.350		-							-	0	0		-	0	0		
			terlaksananya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)			0		6		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**			**414.848.750**		**33.340.875**		**14.848.750**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan / atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (%)	390				76.00		75								75		98.7	0	75		19.2	0		
		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			414.848.750		33.340.875		14.848.750		-								-	0	0		-	0	0		
			Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota (%)																		0	0			0	0		
		2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			414.848.750		33.340.875		14.848.750		-								-	0	0		-	0	0		
			Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	45		45		40		0								0		0	0	0		0	0		
		2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**4.779.755.260**		**941.908.104**		**500.255.272**		**21.190.474**								**21.190.474**	**19**	**4.2**		**21.190.474**	**3**	**0.4**	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	31,91				20		31.9								31,9		160	0	31,9		100	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.779.755.260		941.908.104		500.255.272		21.190.474								21.190.474	19.2	4.24		21.190.474	3	0.44		
			Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya																		0	0			0	0		
		2.11.08.2.01.0002	1.388.610.260			1.388.610.260		242.621.941		188.610.272		16.825.659								16.825.659	33.3	8.92		16.825.659	5	1.21		
				Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	100		15		15		5								5		33.3	0	5		5	0		
		2.11.08.2.01.0003	3.391.145.000			3.391.145.000		699.286.163		311.645.000		4.364.815								4.364.815	5	1.4		4.364.815	1	0.13		
				Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	1.000		100		200		10								10		5	0	10		1	0		
		2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**651.557.250**		**-**		**30.480.800**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	95,5				95.54		95.54								95,54		100	0	95,54		100	0		
		2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			651.557.250		-		30.480.800		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)																		0	0			0	0		
		2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			651.557.250		-		30.480.800		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	95		0		3		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			**59.311.756.455**		**26.283.961.520**		**8.072.192.825**		**1.028.061.469**								**1.028.061.469**	**50**	**13**		**1.028.061.469**	**53**	**1.7**	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	38,48				23.54		19.05								19,05		80.9	0	19,05		49.5	0		
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			59.311.756.455		26.283.961.520		8.072.192.825		1.028.061.469								1.028.061.469	50	12.7		1.028.061.469	52.5	1.73		
			Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)																		0	0			0	0		
		2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			25.657.564.575		5.739.066.144		486.809.575		31.313.179								31.313.179	100	6.43		31.313.179	100	0.12		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	3		62		3		3								3		100	0	3		100	0		
		2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			33.654.191.880		20.544.895.376		7.585.383.250		996.748.290								996.748.290	0.02	13.1		996.748.290	5.07	2.96		
			Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	135		27,37		27375		6,84								6,84		0.02	0	6,84		5.07	0		
		2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			**3.640.010.890**		**736.721.061**		**440.010.700**		**54.803.533**								**54.803.533**	**25**	**12**		**54.803.533**	**5**	**1.5**	UPTD Laboratorium Lingkungan	
			Menurunnya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara (Nilai)	395,25		82.970		78.45		82.97								82,97		106	0	82,97		21	0		
				Indeks Kualitas Air (Nilai)	67,95		67.670		67.15		67.67								67,67		101	0	67,67		99.6	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			3.640.010.890		736.721.061		440.010.700		54.803.533								54.803.533	25	12.5		54.803.533	5	1.51		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan																		0	0			0	0		
		2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota			3.640.010.890		736.721.061		440.010.700		54.803.533								54.803.533	25	12.5		54.803.533	5	1.51		
			Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	300		70		60		15								15		25	0	15		5	0		
		2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**35.414.649.264**		**4.299.076.990**		**4.959.570.931**		**1.107.695.465**								**1.107.695.465**	**14**	**22**		**1.107.695.465**	**2.3**	**3.1**		
		2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**29.914.474.064**		**3.657.032.436**		**4.402.962.861**		**975.581.308**								**975.581.308**	**16**	**22**		**975.581.308**	**2**	**3.3**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	471,5		94.100		94.10		0								0		0	0	0		0	0		
		2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			964.697.753		158.841.116		98.886.800		17.522.640								17.522.640	12.5	17.7		17.522.640	2.5	1.82		
			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi																		0	0			0	0		
		2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			140.418.200		10.977.411		10.369.600		1.950.270								1.950.270	25	18.8		1.950.270	5	1.39		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		4		4		1								1		25	0	1		5	0		
		2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			583.179.553		147.863.705		82.077.200		15.572.370								15.572.370	25	19		15.572.370	5	2.67		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	60		12		12		3								3		25	0	3		5	0		
		2.12.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			118.050.000		-		3.220.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.12.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			123.050.000		-		3.220.000		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.961.157.600		2.739.253.410		3.687.601.919		845.174.920								845.174.920	62.5	22.9		845.174.920	10.9	4.03		
			Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu																		0	0			0	0		
		2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			19.571.957.600		2.545.679.410		3.431.881.919		789.404.920								789.404.920	100	23		789.404.920	16.8	4.03		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	161		24		27		27								27		100	0	27		16.8	0		
		2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.389.200.000		193.574.000		255.720.000		55.770.000								55.770.000	25	21.8		55.770.000	5	4.01		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		18		12		3								3		25	0	3		5	0		
		2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			357.484.100		49.877.850		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Penyediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		0	0			0	0		
		2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			357.484.100		49.877.850		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	47		38		40		0								0		0	0	0		0	0		
		2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.174.636.149		129.022.819		139.823.862		39.429.927								39.429.927	7.14	28.2		39.429.927	0.48	1.81		
			Indeks Layanan Administrasi Perangkat Daerah																		0	0			0	0		
		2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			96.155.800		6.021.639		6.155.800		5.319.675								5.319.675	0	86.4		5.319.675	0	5.53		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			324.736.849		39.371.034		32.972.562		27.033.272								27.033.272	50	82		27.033.272	3.33	8.32		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	30		7		2		1								1		50	0	1		3.33	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			101.535.000		5.431.556		6.535.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	15		3		3		0								0		0	0	0		0	0		
		2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			104.245.000		4.116.840		4.245.000		630.480								630.480	0	14.9		630.480	0	0.6		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		2		0								0		0	0	0		0	0		
		2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			93.461.500		3.354.750		1.368.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.336.452.000		70.727.000		85.327.000		6.446.500								6.446.500	0	7.56		6.446.500	0	0.48		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	49		12		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			118.050.000		-		3.220.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.501.500.000		165.505.500		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Ketersediaan BMD																		0	0			0	0		
		2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			540.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			450.000.000		9.546.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		1		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			511.500.000		155.959.500		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6		1		2		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.911.697.060		201.054.890		309.720.280		44.958.876								44.958.876	25	14.5		44.958.876	5	2.35		
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		0	0			0	0		
		2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			760.497.060		95.692.946		114.004.000		19.498.157								19.498.157	25	17.1		19.498.157	5	2.56		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		25	0	3		5	0		
		2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.151.200.000		105.361.944		195.716.280		25.460.719								25.460.719	25	13		25.460.719	5	2.21		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		3		12		3								3		25	0	3		5	0		
		2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.043.301.402		213.476.851		166.930.000		28.494.945								28.494.945	12.5	17.1		28.494.945	0.85	1.39		
			Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik																		0	0			0	0		
		2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			225.950.000		42.543.150		39.190.000		5.550.500								5.550.500	0	14.2		5.550.500	0	2.46		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			608.300.000		109.897.151		116.650.000		18.948.445								18.948.445	23.1	16.2		18.948.445	4.62	3.11		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	65		13		13		3								3		23.1	0	3		4.62	0		
		2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			219.051.402		21.076.550		11.090.000		3.996.000								3.996.000	14.3	36		3.996.000	0.51	1.82		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	195		7		7		1								1		14.3	0	1		0.51	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			290.000.000		39.960.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			350.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			350.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			**1.739.285.250**		**200.885.944**		**153.925.430**		**15.703.707**								**15.703.707**	**17**	**10**		**15.703.707**	**2.5**	**0.9**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	68		10.000		10		10								10		100	0	10		14.7	0		
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	338		62.500		64		68.81								68,81		108	0	68,81		20.4	0		
		2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			1.279.021.200		146.403.645		113.243.430		15.103.707								15.103.707	12.5	13.3		15.103.707	1.67	1.18		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		0	0			0	0		
		2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			240.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			868.402.900		120.379.251		102.625.130		15.103.707								15.103.707	25	14.7		15.103.707	5	1.74		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	60		12		12		3								3		25	0	3		5	0		
		2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan			170.618.300		26.024.394		10.618.300		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	15		15.000		12		0								0		0	0	0		0	0		
		2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			460.264.050		54.482.299		40.682.000		600.000								600.000	25	1.47		600.000	5	0.13		
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pelayanan																		0	0			0	0		
		2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk			460.264.050		54.482.299		40.682.000		600.000								600.000	25	1.47		600.000	5	0.13		
			Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	60		2.000		12		3								3		25	0	3		5	0		
		2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			**1.488.927.200**		**198.458.080**		**171.562.790**		**19.958.276**								**19.958.276**	**6.3**	**12**		**19.958.276**	**1.3**	**1.3**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	500		100.000		100		100								100		100	0	100		20	0		
				Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	500		100.000		100		100								100		100	0	100		20	0		
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	500		100.000		100		100								100		100	0	100		20	0		
				Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	500		100.000		100		100								100		100	0	100		20	0		
		2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			884.234.000		177.899.688		130.792.540		19.958.276								19.958.276	12.5	15.3		19.958.276	2.5	2.26		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Pencatatan Sipil																		0	0			0	0		
		2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			175.998.600		4.513.403		10.998.600		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	12		4.000		12		0								0		0	0	0		0	0		
		2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			708.235.400		173.386.285		119.793.940		19.958.276								19.958.276	25	16.7		19.958.276	5	2.82		
			Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	60		4.000		12		3								3		25	0	3		5	0		
		2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			304.693.200		20.558.392		40.770.250		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pencatatan Sipil																		0	0			0	0		
		2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil			304.693.200		20.558.392		40.770.250		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	12		500		12		0								0		0	0	0		0	0		
		2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			300.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil																		0	0			0	0		
		2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil			300.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			**1.913.438.800**		**219.177.243**		**213.924.450**		**96.452.174**								**96.452.174**	**19**	**45**		**96.452.174**	**4.9**	**5**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan (Persentase)	469		91.000		92		40								40		43.5	0	40		8.53	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			302.954.250		12.264.134		12.954.200		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Laporan Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan																		0	0			0	0		
		2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			182.954.250		12.264.134		12.954.200		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	15		3		3		0								0		0	0	0		0	0		
		2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			600.484.900		35.061.545		95.934.850		5.877.783								5.877.783	12.5	6.13		5.877.783	4.17	0.98		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan																		0	0			0	0		
		2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			145.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			228.485.300		12.577.602		13.935.250		3.330.333								3.330.333	0	23.9		3.330.333	0	1.46		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	10		2		2		0								0		0	0	0		0	0		
		2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat			226.999.600		22.483.943		81.999.600		2.547.450								2.547.450	25	3.11		2.547.450	12.5	1.12		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)	8		12		4		1								1		25	0	1		12.5	0		
		2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			1.009.999.650		171.851.564		105.035.400		90.574.391								90.574.391	50	86.2		90.574.391	16.7	8.97		
			Laporan Pengelolaan SIAK dan KTP-el																		0	0			0	0		
		2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			1.009.999.650		171.851.564		105.035.400		90.574.391								90.574.391	50	86.2		90.574.391	16.7	8.97		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	6		1		2		1								1		50	0	1		16.7	0		
		2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**			**358.523.950**		**23.523.287**		**17.195.400**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan (Laporan)	15		3.000		3		1								1		33.3	0	1		6.67	0		
		2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan			358.523.950		23.523.287		17.195.400		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Laporan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain yang Disusun																		0	0			0	0		
		2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota			100.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain			258.523.950		23.523.287		17.195.400		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	5		3		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**4.000.000.000**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**			**360.320.000**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	1				0												0	0	0		0	0		
		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			360.320.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan kelurahan																		0	0			0	0		
		2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			360.320.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			**3.639.680.000**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	
			Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	100				100												0	0	0		0	0		
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			3.639.680.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			jumlah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan pendampingan																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			900.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			900.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			400.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			139.680.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			400.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			900.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**28.797.375.455**		**-**		**1.370.572.000**		**213.207.450**								**213.207.450**	**700**	**16**		**213.207.450**	**9.8**	**0.7**		
		2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			**2.086.549.088**		**-**		**51.000.000**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	
			Terkendalinya pertambahan penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	3,2				5.5		0								0		0	0	0		0	0		
				Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2,24				2.29		0								0		0	0	0		0	0		
		2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			696.183.024		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah perumusan dan pemukhtahiran data keluarga pada aplikasi SiGA																		0	0			0	0		
		2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			347.591.512		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal			348.591.512		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	1		0		14		0								0		0	0	0		0	0		
		2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			1.390.366.064		-		51.000.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase penyusunan parameter kependudukan yang disusun sesuai pedoman ; Jumlah pemetaan sistem informasi keluarga																		0	0			0	0		
		2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			347.591.512		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga			347.591.512		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			347.591.512		-		51.000.000		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			267.591.512		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
			Persentase penyusunan parameter kependudukan yang disusun sesuai pedoman ; Jumlah pemetaan sistem informasi keluarga																		0	0			0	0		
		2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana			80.000.016		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			**14.838.046.047**		**-**		**427.242.000**		**66.837.450**								**66.837.450**	**1680**	**16**		**66.837.450**	**24**	**0.5**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	
			Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	11,4				14.1		0								0		0	0	0		0	0		
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	11				11.20		0								0		0	0	0		0	0		
				Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	64,15				63.8		0								0		0	0	0		0	0		
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian			5.188.173.135		-		75.000.000		-								-	100	0		-	4	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal																									
			Jumlah pembinnan KB sesuai dengan kearifan lokal																		0	0			0	0		
		2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana			1.037.634.627		-		75.000.000		-								-	100	0		-	20	0		
			Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	5		0		1		1								1		100	0	1		20	0		
		2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			1.037.634.627		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			1.037.634.627		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal			1.037.634.627		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			1.037.634.627		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			1.623.234.627		-		154.550.000		47.600.000								47.600.000	0	30.8		47.600.000	0	2.93		
			Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB																		0	0			0	0		
		2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			1.623.234.627		-		154.550.000		47.600.000								47.600.000	0	30.8		47.600.000	0	2.93		
			Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	285		0		280		0								0		0	0	0		0	0		
		2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			4.013.734.381		-		197.692.000		19.237.450								19.237.450	2767	9.73		19.237.450	88	0.48		
			Persentase pengadaan sarana-prasarana program KB lainnya sesuai perencanaan/ pedoman ; Jumlah Faskes KB yang mendapatkan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi																		0	0			0	0		
		2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			1.337.634.627		-		9.690.000		3.060.000								3.060.000	100	31.6		3.060.000	100	0.23		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1		0		1		1								1		100	0	1		100	0		
		2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			1.337.634.627		-		188.002.000		16.177.450								16.177.450	8200	8.6		16.177.450	164	1.21		
			Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	50		0		1		82								82		8200	0	82		164	0		
		2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			1.338.465.127		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			4.012.903.904		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Integrasi program Bangga Kencana di Kampung KB																		0	0			0	0		
		2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas			1.337.634.627		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas			1.337.634.627		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.14.03.2.04.0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			1.337.634.650		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			**11.872.780.320**		-		**892.330.000**		**146.370.000**								**146.370.000**	**0**	**16**		**146.370.000**	**0**	**1.2**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	
			Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pembinaan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	62,8				60.0		0								0		0	0	0		0	0		
				Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	93,3				90.4		0								0		0	0	0		0	0		
				Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (Persentase)	100				100		100								100		100	0	100		100	0		
				Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	76				72		0								0		0	0	0		0	0		
				Median Usia Kawin Pertama (MUKP) wanita (Angka)	23,7				23.3		0								0		0	0	0		0	0		
		2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			9.302.716.284		-		285.130.000		86.530.000								86.530.000	0	30.4		86.530.000	0	0.93		
			Persentase kader yang mendapatkan pembinaan sebagai kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga																		0	0			0	0		
		2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)			1.256.688.012		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))			1.256.688.012		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			1.256.688.012		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	495		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)			1.256.688.012		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang)	40		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan			1.761.588.012		-		261.630.000		86.530.000								86.530.000	0	33.1		86.530.000	0	4.91		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																									
			Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	495		0		513		0								0		0	0	0		0	0				
		2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			1.256.688.012		-		23.500.000		-								-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya biaya operasional bagi bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	495		0		47		0								0		0	0	0		0	0				
		2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)			1.257.688.212		-		-		-								-	0	0		-	0	0			

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	495		0		10		0								0		0	0	0		0	0		
		2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			2.570.064.036		-		607.200.000		59.840.000							59.840.000	0	9.86		59.840.000	0	2.33		
			Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga																	0	0			0	0		
		2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			656.688.012		-		276.000.000		27.200.000							27.200.000	0	9.86		27.200.000	0	4.14		
			Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			956.688.012		-		331.200.000		32.640.000							32.640.000	0	9.86		32.640.000	0	3.41		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga			956.688.012		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**90.601.338.645**		**8.007.389.338**		**9.384.571.695**		**1.425.239.583**								**1.425.239.583**	**30**	**15**		**1.425.239.583**	**7.2**	**1.6**		
		2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**44.414.047.860**		**5.223.258.444**		**6.784.556.045**		**1.207.758.279**								**1.207.758.279**	**28**	**18**		**1.207.758.279**	**7.9**	**2.7**	Dinas Perhubungan	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	445		100		85		90.14								90,14		106	0	90,14		20.3	0		
		2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.004.896.900		84.039.519		77.662.325		11.890.600								11.890.600	16.7	15.3		11.890.600	4.17	1.18		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi																		0	0			0	0		
		2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			82.499.800		9.521.681		14.625.300		3.183.600								3.183.600	33.3	21.8		3.183.600	10	3.86		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		2		3		1								1		33.3	0	1		10	0		
		2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			441.592.100		74.517.838		62.044.400		8.707.000								8.707.000	33.3	14		8.707.000	6.67	1.97		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	15		3		3		1								1		33.3	0	1		6.67	0		
		2.15.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			240.402.500		-		495.475		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.15.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			240.402.500		-		497.150		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			32.009.739.213		4.238.610.688		5.771.400.528		1.100.891.025								1.100.891.025	69.1	19.1		1.100.891.025	55.7	3.44		
			Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu																		0	0			0	0		
		2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			30.016.259.213		3.998.249.488		5.464.170.528		1.051.501.025								1.051.501.025	105	19.2		1.051.501.025	105	3.5		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	42		42		42		44								44		105	0	44		105	0		
		2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.993.480.000		240.361.200		307.230.000		49.390.000								49.390.000	33.3	16.1		49.390.000	6.67	2.48		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	15		3		3		1								1		33.3	0	1		6.67	0		
		2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			562.403.000		97.621.550		73.063.200		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah																		0	0			0	0		
		2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			562.403.000		97.621.550		73.063.200		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4		4		2		0								0		0	0	0		0	0		
		2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.888.664.700		280.976.960		130.423.125		9.004.586								9.004.586	18.9	6.9		9.004.586	2.1	0.31		
			Indeks layanan administrasi perangkat daerah																		0	0			0	0		
		2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			9.790.100		1.749.582		1.790.100		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		10		10		0								0		0	0	0		0	0		
		2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			224.830.400		83.410.950		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		5		0		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			145.324.650		27.662.532		24.850.125		3.971.136								3.971.136	14.3	16		3.971.136	4	2.73		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	25		5		7		1								1		14.3	0	1		4	0		
		2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			522.232.350		91.730.163		31.375.750		1.892.550								1.892.550	50	6.03		1.892.550	6.67	0.36		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	15		1		2		1								1		50	0	1		6.67	0		
		2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12.382.700		600.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.733.702.000		75.823.733		71.910.000		3.140.900								3.140.900	30	4.37		3.140.900	4	0.18		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	75		15		10		3								3		30	0	3		4	0		
		2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			240.402.500		-		497.150		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			398.788.100		127.896.502		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase ketersediaan BMD																		0	0			0	0		
		2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			200.050.000		30.056.500		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		1		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			198.738.100		97.840.002		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		9		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.765.219.042		68.028.825		390.326.867		55.974.788								55.974.788	27.8	14.3		55.974.788	5.71	3.17		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah																		0	0			0	0		
		2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			13.980.000		2.350.000		1.980.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			414.239.042		59.490.575		72.794.867		15.145.236								15.145.236	33.3	20.8		15.145.236	2.86	3.66		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	35		3		3		1								1		33.3	0	1		2.86	0		
		2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100.000.000		6.188.250		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3		1		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.237.000.000		-		315.552.000		40.829.552								40.829.552	50	12.9		40.829.552	20	3.3		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		0		2		1								1		50	0	1		20	0		
		2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.784.336.905		326.084.400		341.680.000		29.997.280								29.997.280	41.7	8.78		29.997.280	6.14	0.52		
			Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam kondisi baik																		0	0			0	0		
		2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			210.990.000		37.997.110		39.190.000		4.392.500								4.392.500	100	11.2		4.392.500	20	2.08		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		1								1		100	0	1		20	0		
		2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.691.610.000		288.087.290		291.610.000		25.604.780								25.604.780	25	8.78		25.604.780	4.55	1.51		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	110		20		20		5								5		25	0	5		4.55	0		
		2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			114.880.000		-		10.880.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		0		16		0								0		0	0	0		0	0		
		2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.766.856.905		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**17.326.621.585**		**2.130.145.792**		**1.919.008.550**		**160.990.271**								**160.990.271**	**40**	**8.4**		**160.990.271**	**0.9**	**0.9**	Dinas Perhubungan	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase ketersediaan infrastruktur perhubungan yang ramah lingkungan (%)	90		0		86		0								0		0	0	0		0	0		
		2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			450.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase ketersediaan infrastruktur perhubungan yang ramah lingkungan																		0	0			0	0		
		2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			450.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			10.179.808.170		1.099.806.576		1.327.677.400		38.353.845								38.353.845	10	2.89		38.353.845	2	0.38		
			Persentase perlengkapan dan fasilitas pendukung jalan dalam kondisi baik																		0	0			0	0		
		2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			7.355.803.050		615.289.293		759.653.050		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	36		342		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			2.824.005.120		484.517.283		568.024.350		38.353.845								38.353.845	20	6.75		38.353.845	4	1.36		
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	25		20		5		1								1		20	0	1		4	0		
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			6.221.797.735		1.030.339.216		591.331.150		122.636.426								122.636.426	100	20.7		122.636.426	1.33	1.97		
			Persentase penurunan titik rawan kemacetan lalu lintas																		0	0			0	0		
		2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			6.047.584.635		1.030.339.216		591.331.150		122.636.426								122.636.426	100	20.7		122.636.426	4	2.03		
			Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	25		1		1		1								1		100	0	1		4	0		
		2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			169.213.100		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	3		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.15.02.2.06.0018	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas			5.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			140.050.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase ketersediaan infrastruktur perhubungan yang ramah lingkungan																		0	0			0	0		
		2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal			140.050.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			120.050.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum																		0	0			0	0		
		2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			120.050.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			214.915.680		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum																		0	0			0	0		
		2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			214.915.680		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**800.150.000**		**-**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	UPTD Terminal	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase ketersediaan infrastruktur perhubungan yang ramah lingkungan (%)	90		0		86		0								0		0	0	0		0	0		
		2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			800.150.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C			200.050.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang			200.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C			200.050.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. (Orang)	7		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)			200.050.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**27.194.194.150**		**358.320.287**		**483.396.800**		**46.273.895**								**46.273.895**	**100**	**9.6**		**46.273.895**	**50**	**0.2**	UPTD Parkir	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase ketersediaan infrastruktur perhubungan yang ramah lingkungan (%)	90				86		0								0		0	0	0		0	0		
		2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			27.194.194.150		358.320.287		483.396.800		46.273.895								46.273.895	100	9.57		46.273.895	50	0.17		
			Persentase kenaikan pengguna jasa parkir																		0	0			0	0		
		2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			897.687.200		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0			
		2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			26.296.506.950		358.320.287		483.396.800		46.273.895								46.273.895	100	9.57		46.273.895	100	0.18		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	27		27		27		27								27		100	0	27		100	0			
		2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**866.325.050**		**295.664.815**		**197.610.300**		**10.217.138**								**10.217.138**	**4.8**	**5.2**		**10.217.138**	**4**	**1.2**	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase ketersediaan infrastruktur perhubungan yang ramah lingkungan (%)	440				86		0								0		0	0	0		0	0			
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			866.325.050		295.664.815		197.610.300		10.217.138								10.217.138	4.76	5.17		10.217.138	4	1.18		
			Persentase kenaikan kendaraan yang melaksanakan pengujian																		0	0			0	0		
		2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			92.085.050		72.252.795		63.420.300		10.217.138								10.217.138	14.3	16.1		10.217.138	20	11.1		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	5		7		7		1								1		14.3	0	1		20	0			
		2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			200.050.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	3		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			275.000.000		100.000.000		75.000.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	1.000		4.000		3000		0								0		0	0	0		0	0		
		2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			40.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			259.190.000		123.412.020		59.190.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	8		7		7		0								0		0	0	0		0	0		
		2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**77.093.548.504**		**14.647.731.248**		**9.012.541.946**		**1.299.662.473**								**1.299.662.473**	**29**	**14**		**1.299.662.473**	**17**	**1.7**		
		2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**27.854.817.051**		**8.525.676.229**		**4.588.525.050**		**1.027.911.697**								**1.027.911.697**	**25**	**22**		**1.027.911.697**	**21**	**3.7**	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	440		86.670		87		0								0		0	0	0		0	0		
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			432.933.900		127.755.444		61.192.400		21.733.798								21.733.798	9.38	35.5		21.733.798	9.38	5.02		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi																		0	0			0	0		
		2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			143.295.900		63.766.765		23.580.500		11.708.798								11.708.798	0	49.7		11.708.798	0	8.17		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		3		2		0								0		0	0	0		0	0		
		2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			279.575.500		63.988.679		35.599.400		10.025.000								10.025.000	37.5	28.2		10.025.000	37.5	3.59		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8		8		8		3								3		37.5	0	3		37.5	0		
		2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			5.031.250		-		1.006.250		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3		0		3		0								0		0	0	0		0	0		
		2.16.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			5.031.250		-		1.006.250		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	63		0		63		0								0		0	0	0		0	0		
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.570.502.620		7.517.410.167		4.040.314.676		957.464.531								957.464.531	62.5	23.7		957.464.531	64	4.65		
			Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu																		0	0			0	0		
		2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			19.180.152.620		7.315.288.167		3.762.244.676		916.039.531								916.039.531	100	24.4		916.039.531	103	4.78		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	33		28		34		34								34		100	0	34		103	0		
		2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.390.350.000		202.122.000		278.070.000		41.425.000								41.425.000	25	14.9		41.425.000	25	2.98		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		4		12		3								3		25	0	3		25	0		
		2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			190.360.500		32.967.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah																		0	0			0	0		
		2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			190.360.500		32.967.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	35		33		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.953.600.538		191.942.605		243.299.310		20.043.805								20.043.805	5.89	8.24		20.043.805	3.54	0.68		
			Indeks layanan administrasi perangkat daerah																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.16.01.2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			32.497.600		5.254.740		2.564.600		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.16.01.2.06.0 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			167.044.500		-		44.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.16.01.2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			254.537.160		29.253.475		35.259.410		1.000.000								1.000.000	16.7	2.84		1.000.000	16.7	0.39		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6		2		6		1								1		16.7	0	1		16.7	0		
		2.16.01.2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			149.478.800		19.480.100		16.762.800		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		1		2		0								0		0	0	0		0	0		
		2.16.01.2.06.0 008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			47.498.228		6.848.400		8.747.750		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4		3		4		0								0		0	0	0		0	0		
		2.16.01.2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.297.513.000		131.105.890		178.914.000		19.043.805								19.043.805	8.57	10.6		19.043.805	5.45	0.83		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	110		18		70		6								6		8.57	0	6		5.45	0		
		2.16.01.2.06.0 010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			5.031.250		-		1.006.250		-								-	16	0		-	2.67	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	300		0		50		8								8		16	0	8		2.67	0		
		2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.488.788.890		260.426.850		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase ketersediaan BMD																		0	0			0	0		
		2.16.01.2.07.0 001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			500.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.562.415.440		90.169.500		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0		3		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			100.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			326.373.450		170.257.350		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		11		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			311.480.603		61.543.615		62.288.664		12.415.163								12.415.163	25	19.9		12.415.163	15	3.99		
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah																		0	0			0	0		
		2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			7.749.000		1.359.500		1.549.800		340.500								340.500	25	22		340.500	25	4.39		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		12		3								3		25	0	3		25	0		
		2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			303.731.603		60.184.115		60.738.864		12.074.663								12.074.663	25	19.9		12.074.663	5	3.98		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		4		12		3								3		25	0	3		5	0		
		2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			907.150.000		333.630.548		181.430.000		16.254.400								16.254.400	64.6	8.96		16.254.400	64.6	1.79		
			Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik																		0	0			0	0		
		2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			195.950.000		80.944.410		39.190.000		3.000.000								3.000.000	100	7.66		3.000.000	100	1.53		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			591.000.000		239.857.388		118.200.000		13.254.400								13.254.400	93.8	11.2		13.254.400	93.8	2.24		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16		13		16		15								15		93.8	0	15		93.8	0		
		2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			120.200.000		12.828.750		24.040.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	26		13		26		0								0		0	0	0		0	0		
		2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			**18.638.933.820**		**2.202.449.908**		**1.150.757.096**		**213.609.183**								**213.609.183**	**50**	**19**		**213.609.183**	**17**	**1.2**	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	90		80.000		78		0								0		0	0	0		0	0		
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			18.638.933.820		2.202.449.908		1.150.757.096		213.609.183								213.609.183	50	18.6		213.609.183	16.7	1.15		
			Persentase Perangkat Daerah yang mempublikasikan data dan informasi publik melalui PPID dan Persentase penyaluran pengaduan masyarakat melalui LAPOR SP4N ke Perangkat Daerah																		0	0			0	0		
		2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik			3.640.893.800		109.757.485		138.768.400		25.367.345								25.367.345	0	18.3		25.367.345	0	0.7		
			Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	12		1		12		0								0		0	0	0		0	0		
			Persentase Pelayanan Penyaluran Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media																		0	0			0	0		
		2.16.02.2.01.0014	Relasi Media			6.856.000.000		841.827.000		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	120		70		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi			1.380.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	100		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			3.898.040.020		1.250.865.423		1.011.988.696		188.241.838								188.241.838	100	18.6		188.241.838	100	4.83		
			Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	5		5		5		5								5		100	0	5		100	0		
		2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten			1.664.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	36		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik			1.200.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	10		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			**30.599.797.633**		**3.919.605.111**		**3.273.259.800**		**58.141.593**								**58.141.593**	**50**	**1.8**		**58.141.593**	**9.1**	**0.2**	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	4,21		3.890		3.84		0								0		0	0	0		0	0		
		2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			950.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain																		0	0			0	0		
		2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa			950.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	100		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			29.649.797.633		3.919.605.111		3.273.259.800		58.141.593								58.141.593	50	1.78		58.141.593	10	0.2		
			Persentase Pengelolaan E-Government di Pemerintah Daerah																		0	0			0	0		
		2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional			600.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	6		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE			1.500.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			5.274.260.650		3.589.995.461		3.109.080.600		48.201.726								48.201.726	100	1.55		48.201.726	100	0.91		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	31		31		31		31								31		100	0	31		100	0		
		2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo			405.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE			1.519.000.000		329.609.650		164.179.200		9.939.867								9.939.867	0	6.05		9.939.867	0	0.65		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	7		3		3		0								0		0	0	0		0	0		
		2.16.03.2.02.0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah			7.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan			193.670.033		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	6		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet			12.050.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	175		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah			42.782.050		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	0		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas			685.084.900		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.16.03.2.02.0039	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi			380.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**54.541.835.215**		**7.101.004.822**		**6.514.848.455**		**1.218.199.272**								**1.218.199.272**	**13**	**19**		**1.218.199.272**	**4.6**	**2.2**		
		2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**41.831.553.990**		**6.639.940.589**		**6.124.129.510**		**1.176.665.679**								**1.176.665.679**	**17**	**19**		**1.176.665.679**	**7.6**	**2.8**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	443		88.000		87.6												0	0			0	0		
		2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			403.357.800		53.169.461		44.819.250		-								-	23.2	0		-	3.1	0		
			Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi																		0	0			0	0		
		2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			51.383.450		5.853.071		3.680.000		-								-	50	0		-	10	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		2		2		1								1		50	0	1		10	0		
		2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			259.949.350		47.316.390		39.529.250		-								-	42.9	0		-	8.57	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	35		7		7		3								3		42.9	0	3		8.57	0		
		2.17.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			22.012.500		-		805.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			22.012.500		-		805.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	9		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka			28.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																									
			Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0				
		2.17.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD			20.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0			
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0				
		2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			29.724.318.392		4.260.910.622		5.121.273.867		1.087.575.360								1.087.575.360	50	21.2		1.087.575.360	31	3.66		
			Persentase penyelesaaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu																		0	0			0	0			
		2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			27.863.983.392		3.985.451.284		4.753.206.867		1.027.655.360								1.027.655.360	100	21.6		1.027.655.360	93	3.69		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	43		36		40		40								40		100	0	40		93	0			
		2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.840.335.000		275.459.338		368.067.000		59.920.000								59.920.000	0	16.3		59.920.000	0	3.26		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0				
		2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			20.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0				
		2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			80.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0			
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																		0	0			0	0			

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.17.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			40.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			-		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			20.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			20.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			116.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah																		0	0			0	0		
		2.17.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah			20.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah			40.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah			28.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			28.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	12		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			262.432.600		38.961.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah																		0	0			0	0		
		2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			222.432.600		38.961.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	43		39		40		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			20.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			20.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.924.063.575		188.118.150		257.076.800		20.159.081								20.159.081	1.43	7.84		20.159.081	1.11	1.05		
			Indeks layanan administrasi perangkat daerah																		0	0			0	0		
		2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			25.329.200		4.420.020		5.329.200		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		3		3		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			60.000.000		11.877.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		2		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			40.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			111.619.575		21.655.770		16.330.700		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			146.925.850		24.262.069		23.711.400		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			34.327.900		7.147.850		4.180.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			64.945.550		12.139.055		6.724.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.418.903.000		106.616.386		199.996.000		20.159.081								20.159.081	10	10.1		20.159.081	10	1.42		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50		50		50		5								5		10	0	5		10	0		
		2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			22.012.500		-		805.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			357.598.632		95.784.400		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase ketersediaan BMD																		0	0			0	0		
		2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			100.725.154		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			109.111.788		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		2		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			30.156.000		5.083.800		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		2		15		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			117.605.690		90.700.600		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		9		2		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.554.234.741		1.499.498.234		296.672.593		54.321.438								54.321.438	0	18.3		54.321.438	0	0.72		
			Pesentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah																		0	0			0	0		
		2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			469.841.963		70.875.758		92.350.763		17.054.211								17.054.211	0	18.5		17.054.211	0	3.63		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			48.890.000		8.350.000		8.890.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			7.035.502.778		1.420.272.476		195.431.830		37.267.227								37.267.227	0	19.1		37.267.227	0	0.53		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.409.548.250		503.498.722		404.287.000		14.609.800								14.609.800	50	3.61		14.609.800	34.7	1.04		
			Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik																		0	0			0	0		
		2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			210.990.000		39.183.250		39.190.000		2.400.000								2.400.000	100	6.12		2.400.000	100	1.14		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.076.420.000		185.574.850		188.400.000		12.209.800								12.209.800	100	6.48		12.209.800	73.7	1.13		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	38		28		28		28								28		100	0	28		73.7	0		
		2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			21.280.000		1.151.070		1.280.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20		17		17		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	13		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			80.858.250		277.589.552		175.417.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**			**200.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	14,07				13.31												0	0	0		0	0		
		2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			200.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		0	0			0	0		
		2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah			200.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																									
			Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	107		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**			**471.999.150**		**19.234.409**		**19.999.150**		**2.793.315**								**2.793.315**	**0**	**14**		**2.793.315**	**0**	**0.6**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	210,53		51.720		36.84												0	0			0	0		
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			471.999.150		19.234.409		19.999.150		2.793.315								2.793.315	0	14		2.793.315	0	0.59		
			Jumlah koperasi yang diawasi kelembagaannya																		0	0			0	0		
		2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			226.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	66		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			245.999.150		19.234.409		19.999.150		2.793.315								2.793.315	0	14		2.793.315	0	1.14		
			Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	66		60		60		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**			**440.999.250**		**14.764.502**		**14.999.250**		**2.089.020**								**2.089.020**	**0**	**14**		**2.089.020**	**0**	**0.5**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	62,63		58.380		60.53												0	0			0	0		
		2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah			440.999.250		14.764.502		14.999.250		2.089.020								2.089.020	0	13.9		2.089.020	0	0.47		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																									
			Jumlah KSP/USP yang diawasi dan dinilai kinerja simpan pinjamnya																		0	0			0	0		
		2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			214.999.250		14.764.502		14.999.250		2.089.020								2.089.020	0	13.9		2.089.020	0	0.97		
			Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	66		60		52		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan			226.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	66		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**			**1.322.999.200**		**75.260.845**		**216.374.220**		**36.651.258**								**36.651.258**	**0**	**17**		**36.651.258**	**0**	**2.8**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
			Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	17,54				10.94												0	0	0		0	0		
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.322.999.200		75.260.845		216.374.220		36.651.258								36.651.258	0	16.9		36.651.258	0	2.77		
			Jumlah Koperasi yang diperkuat SDM nya																		0	0			0	0		
		2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			1.322.999.200		75.260.845		216.374.220		36.651.258								36.651.258	0	16.9		36.651.258	0	2.77		
			Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	43		50		50		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**			**2.076.599.850**		**160.444.584**		**19.999.850**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	15,91		23.270		11.54												0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.076.599.850		160.444.584		19.999.850		-								-	0	0		-	0	0		
			Pembinaan dan/ atau Pendampingan yang dilaksanakan																		0	0			0	0		
		2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi			268.599.850		-		19.999.850		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	42		0		30		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			678.000.000		160.444.584		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	52		47		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			226.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	42		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.06.2.01.0006	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			226.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya (Unit Usaha)	53		0		0		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			226.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)	42		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.06.2.01.0008	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			226.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)	42		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota			226.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	42		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**			**6.968.336.775**		**107.588.901**		**19.999.475**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	67,93				12.35												0	0	0		0	0		
				Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	25,51				4.95												0	0	0		0	0		
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			6.968.336.775		107.588.901		19.999.475		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi legalitas usahanya																		0	0			0	0		
		2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro			452.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro			545.337.300		87.867.994		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	2.067		25		25		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			471.999.475		19.720.907		19.999.475		-								-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	250		50		50		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.07.2.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil			226.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Usaha MIkro dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	15		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.07.2.01.0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil			226.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	50		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro			452.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	75		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro			1.395.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	60.000		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan			3.200.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	50		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**			**1.229.347.000**		**83.770.992**		**99.347.000**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	10,77				1.99												0	0	0		0	0		
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			1.229.347.000		83.770.992		99.347.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi perluasan jaringan pasarnya																		0	0			0	0		
		2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro			339.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	18		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan			438.347.000		83.770.992		99.347.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	165		60		60		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro			226.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	30		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi			226.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	50		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**47.721.301.651**		**4.257.893.403**		**4.352.696.209**		**824.810.462**								**824.810.462**	**17**	**19**		**824.810.462**	**13**	**1.7**		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**33.705.608.811**		**3.805.598.468**		**4.265.492.459**		**806.240.162**								**806.240.162**	**22**	**19**		**806.240.162**	**19**	**2.4**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	96,5		95.765		94.5		0								0		0	0	0		0	0		
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			706.162.000		17.914.778		14.050.800		1.134.000								1.134.000	20.8	8.07		1.134.000	20.8	0.16		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi																		0	0			0	0		
		2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			213.000.250		8.957.389		6.706.550		-								-	33.3	0		-	33.3	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		3		3		1								1		33.3	0	1		33.3	0		
		2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			210.183.250		8.957.389		6.539.250		1.134.000								1.134.000	50	17.3		1.134.000	50	0.54		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		4		4		2								2		50	0	2		50	0		
		2.18.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			81.489.250		-		402.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.18.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			201.489.250		-		402.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19.775.868.425		2.526.475.457		3.261.772.038		664.843.892								664.843.892	62.5	20.4		664.843.892	56.5	3.36		
			Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu																		0	0			0	0		
		2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			18.749.468.425		2.369.186.457		3.129.172.038		646.299.892								646.299.892	100	20.7		646.299.892	88	3.45		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25		22		22		22								22		100	0	22		88	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.026.400.000		157.289.000		132.600.000		18.544.000								18.544.000	25	14		18.544.000	25	1.81		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		12		12		3								3		25	0	3		25	0		
		2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			684.504.700		64.901.273		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah																		0	0			0	0		
		2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			329.504.700		40.337.400		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	51		0		50		0								0		0	0	0		0	0		
		2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			355.000.000		24.563.873		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	49		35		50		0								0		0	0	0		0	0		
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.917.145.006		93.726.546		84.858.845		-								-	0	0		-	0	0		
			Indeks layanan administrasi perangkat daerah																		0	0			0	0		
		2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			88.001.300		6.055.050		5.571.850		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	11		11		11		0								0		0	0	0		0	0		
		2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			337.110.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			280.000.345		28.124.481		22.551.695		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6		11		6		0								0		0	0	0		0	0		
		2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			139.999.700		8.834.183		4.686.100		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	11		11		10		0								0		0	0	0		0	0		
		2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			17.300.000		3.337.950		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		2		2		0								0		0	0	0		0	0		
		2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			174.445.650		3.418.920		3.495.700		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	15		15		10		0								0		0	0	0		0	0		
		2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.713.798.761		43.955.962		48.151.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40		15		40		0								0		0	0	0		0	0		
		2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			166.489.250		-		402.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.100.000.000		132.334.676		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Ketersediaan BMD																		0	0			0	0		
		2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			500.000.000		37.728.177		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0		1		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			450.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			700.000.000		30.894.499		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		2		0		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			450.000.000		63.712.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		2		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.776.738.680		706.317.178		688.380.776		121.090.234								121.090.234	25	17.6		121.090.234	25	3.21		
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah																		0	0			0	0		
		2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			350.458.680		49.591.682		62.614.220		10.133.736								10.133.736	25	16.2		10.133.736	25	2.89		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3								3		25	0	3		25	0		
		2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.426.280.000		656.725.496		625.766.556		110.956.498								110.956.498	25	17.7		110.956.498	25	3.24		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3								3		25	0	3		25	0		
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.745.190.000		263.928.560		216.430.000		19.172.036								19.172.036	50	8.86		19.172.036	50	0.51		
			Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik																		0	0			0	0		
		2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			195.950.000		-		39.190.000		2.556.712								2.556.712	100	6.52		2.556.712	100	1.3		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		1		1								1		100	0	1		100	0		
		2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.380.400.000		156.990.860		158.500.000		16.615.324								16.615.324	100	10.5		16.615.324	100	1.2		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18		17		18		18								18		100	0	18		100	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			768.740.000		18.237.700		18.740.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		20		20		0								0		0	0	0		0	0		
		2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			800.100.000		88.700.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			600.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			**2.553.388.500**		**54.386.575**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100		100		100												0	0			0	0		
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase peningkatan informasi peluang investasi daerah																		0	0			0	0		
		2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			400.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota			290.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	5		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko			310.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			1.553.388.500		54.386.575		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase peningkatan informasi peluang investasi daerah																		0	0			0	0		
		2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			550.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			1.003.388.500		54.386.575		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**			**2.540.707.810**		**18.753.060**		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	10		10		10												0	0			0	0		
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			2.540.707.810		18.753.060		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase peningkatan Jumlah Investor																		0	0			0	0		
		2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			2.540.707.810		18.753.060		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**			**4.660.166.030**		**325.190.080**		**87.203.750**		**18.570.300**								**18.570.300**	**9.5**	**21**		**18.570.300**	**1.9**	**0.4**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100		100		100		25								25		25	0	25		25	0		
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			4.660.166.030		325.190.080		87.203.750		18.570.300								18.570.300	9.5	21.3		18.570.300	1.9	0.4		
			Persentase penerbitan dokumen perizinan berusaha dan non perizinan																		0	0			0	0		
		2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			2.959.966.030		279.502.368		87.203.750		18.570.300								18.570.300	28.5	21.3		18.570.300	5.7	0.63		
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	5.000		2.365		1000		285								285		28.5	0	285		5.7	0		
		2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko			850.100.000		18.514.653		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	20		17		20		0								0		0	0	0		0	0		
		2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko			850.100.000		27.173.059		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	80		108		75		0								0		0	0	0		0	0		
		2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			**2.921.430.600**		**25.137.674**		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100		100		100												0	0			0	0		
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			2.921.430.600		25.137.674		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah fasilitasi kepada pelaku usaha dalam meningkatan kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan investasi																		0	0			0	0		
		2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			659.430.600		12.950.857		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	10		6		3		0								0		0	0	0		0	0		
		2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			1.600.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	200		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal			662.000.000		12.186.817		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	20		23		3		0								0		0	0	0		0	0			
		2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**			**1.339.999.900**		**28.827.546**		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100		100		100												0	0			0	0		
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.339.999.900		28.827.546		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan berusaha dan non perizinan																		0	0			0	0		
		2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			1.339.999.900		28.827.546		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0			
		2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**51.233.333.485**		**5.293.573.903**		**2.884.524.170**		**500.960.034**								**500.960.034**	**30**	**17**		**500.960.034**	**3**	**1**		
		2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			**3.924.308.896**		**86.605.663**		**47.247.450**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	
			Persentase pemuda yang berwirausaha	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	350				65		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			1.337.461.859		52.333.405		18.779.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudan dan masyarakat																		0	0			0	0		
		2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota			200.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)	4		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota			490.804.415		35.389.237		18.779.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota			646.657.444		16.944.168		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	50		5		5		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.586.847.037		34.272.258		28.468.450		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah organisasi yang difasilitasi																		0	0			0	0		
		2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota			2.586.847.037		34.272.258		28.468.450		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	154		34		34		0								0		0	0	0		0	0		
		2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			**43.177.462.301**		**4.791.068.063**		**2.501.743.220**		**200.960.034**								**200.960.034**	**33**	**8**		**200.960.034**	**2.1**	**0.5**	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	
			Jumlah medali pada event olahraga tingkat daerah	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	85				15		0								0		0	0	0		0	0		
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			11.991.767.221		1.254.800.055		794.956.795		199.173.984								199.173.984	50	25.1		199.173.984	3.33	1.66		
			Peningkatan prestasi olahraga tingkat daerah																		0	0			0	0		
		2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota			11.555.103.871		1.229.455.262		759.677.845		199.173.984								199.173.984	100	26.2		199.173.984	6.67	1.72		
			Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	30		5		2		2								2		100	0	2		6.67	0		
		2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi			436.663.350		25.344.793		35.278.950		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			oleh Satuan Pendidikan Dasar																									
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar (Dokumen)	5		6		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			27.035.735.205		3.255.048.484		1.653.663.800		1.786.050								1.786.050	33.3	0.11		1.786.050	1.96	0.01		
			Peningkatan prestasi olahraga tingkat daerah																		0	0			0	0		
		2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			23.276.071.355		2.909.158.713		1.563.831.800		1.786.050								1.786.050	100	0.11		1.786.050	5.88	0.01		
			Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	17		1		1		1								1		100	0	1		5.88	0		
		2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota			594.999.150		299.608.121		58.605.200		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota (Kegiatan)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga			3.164.664.700		46.281.650		31.226.800		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	84		54		20		0								0		0	0	0		0	0		
		2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			4.149.959.875		281.219.524		53.122.625		-								-	0	0		-	0	0		
			Tingkat partisipasi masyarakat dalam olahraga rekreasi																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional			4.149.959.875		281.219.524		53.122.625		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	8		2		2		0								0		0	0	0		0	0		
		2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**			**4.131.562.288**		**415.900.177**		**335.533.500**		**300.000.000**								**300.000.000**	**100**	**89**		**300.000.000**	**20**	**7.3**	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	
			Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	355				65		16								16		24.6	0	16		4.51	0		
		2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			4.131.562.288		415.900.177		335.533.500		300.000.000								300.000.000	100	89.4		300.000.000	20	7.26		
			Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan																		0	0			0	0		
		2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah			4.131.562.288		415.900.177		335.533.500		300.000.000								300.000.000	100	89.4		300.000.000	20	7.26		
			Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	5		4		1		1								1		100	0	1		20	0		
		2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**500.654.050**		**-**		**62.726.350**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**		
		2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**			**500.654.050**		-		**62.726.350**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Indeks Pembangunan Statistik	Indeks Pembangunan Statistik (Nilai)	2,75				2.71		0								0		0	0	0		0	0		
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			500.654.050		-		62.726.350		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah dokumen statistik yang tersedia																		0	0			0	0		
		2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral			500.654.050		-		62.726.350		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	100		0		100		0								0		0	0	0		0	0		
		2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**2.673.957.980**		**384.324.890**		**330.778.772**		**10.112.159**								**10.112.159**	**100**	**3.1**		**10.112.159**	**50**	**0.4**		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**			**2.673.957.980**		**384.324.890**		**330.778.772**		**10.112.159**								**10.112.159**	**100**	**3.1**		**10.112.159**	**50**	**0.4**	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	62,5		49.760		50		0								0		0	0	0		0	0		
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.673.957.980		384.324.890		330.778.772		10.112.159								10.112.159	100	3.06		10.112.159	50	0.38		
			Persentase Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi																		0	0			0	0		
		2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			460.000.000		192.162.445		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1		1		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			2.213.957.980		192.162.445		330.778.772		10.112.159								10.112.159	100	3.06		10.112.159	100	0.46		
			Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	31		31		31		31								31		100	0	31		100	0		
		2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**22.921.012.364**		**418.616.693**		**1.430.094.400**		**567.000**								**567.000**	**11**	**0**		**567.000**	**0.7**	**0**		
		2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			**17.965.008.038**		**306.264.249**		**1.363.331.050**		**567.000**								**567.000**	**20**	**0**		**567.000**	**1.7**	**0**	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	
			Persentase objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	395				75		0								0		0	0	0		0	0		
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.185.204.300		59.291.704		61.330.350		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Karya Kebudayaan yang di lestarikan																		0	0			0	0		
		2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			576.250.100		59.291.704		61.330.350		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	15		12		3		0								0		0	0	0		0	0		
		2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			608.954.200		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	200		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			4.771.660.068		243.000.845		367.919.350		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Kesenian Tradisional yang dilestarikan																		0	0			0	0		
		2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			3.063.419.383		206.911.196		323.689.150		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	15		12		3		0								0		0	0	0		0	0		
		2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			1.708.240.685		36.089.649		44.230.200		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	11		4		4		0								0		0	0	0		0	0		
		2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			12.008.143.670		3.971.700		934.081.350		567.000								567.000	50	0.06		567.000	5.09	0		
			Jumlah lembaga adat yang dilakukan pembinaan																		0	0			0	0		
		2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat			2.713.302.725		3.971.700		91.646.550		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	53		22		22		0								0		0	0	0		0	0		
		2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat			9.294.840.945		-		842.434.800		567.000								567.000	100	0.07		567.000	10.2	0.01		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	216		0		22		22								22		100	0	22		10.2	0		
		2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**			**2.034.748.990**		**70.842.104**		**46.059.800**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	
			Persentase Komunitas /pelaku seni yang ditingkatkan kapasitasnya	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	25				5		0								0		0	0	0		0	0		
		2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.034.748.990		70.842.104		46.059.800		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksanannya Kegiatan diplomasi seni dan budaya																		0	0			0	0		
		2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			215.506.250		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	8		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			1.819.242.740		70.842.104		46.059.800		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	10		2		2		0								0		0	0	0		0	0		
		2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**			**678.844.688**		**-**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	
			Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan dapat mengakses data dan informasi sejarah lokal	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	74				0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			678.844.688		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			persentase sejarahyangdapat di akses masyarakat																		0	0			0	0		
		2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah			678.844.688		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	3		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			**344.420.398**		**18.474.510**		**12.776.750**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	
			Persentasi cagar budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	50				10		0								0		0	0	0		0	0		
				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	50				10		0								0		0	0	0		0	0		
		2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			223.920.398		18.474.510		12.776.750		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah objek cagar budaya yang dilindungi																		0	0			0	0		
		2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya			143.903.390		18.474.510		12.776.750		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	25		12		12		0								0		0	0	0		0	0		
		2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya			80.017.008		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	20		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			120.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah objek cagar budaya yang di kelola																		0	0			0	0		
		2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya			120.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	10		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**			**1.897.990.250**		**23.035.830**		**7.926.800**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	
			Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaa kegiatan museum	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	50				10		0								0		0	0	0		0	0		
				Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	50				10		0								0		0	0	0		0	0		
		2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			1.897.990.250		23.035.830		7.926.800		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah koleksi museum yang dikelola																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu			207.108.374		23.035.830		5.127.950		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu (Unit)	240		80		80		0								0		0	0	0		0	0		
		2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum			905.126.250		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			-		-		2.798.850		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)			0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.22.06.2.01.0016	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya			785.755.626		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**36.289.812.804**		**3.030.417.001**		**4.413.426.721**		**783.057.089**								**783.057.089**	**30**	**18**		**783.057.089**	**21**	**2.2**		
		2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**24.849.661.276**		**2.536.121.664**		**3.786.149.421**		**713.689.298**								**713.689.298**	**31**	**19**		**713.689.298**	**21**	**2.9**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	88		87.830		87.00		0								0		0	0	0		0	0		
		2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			91.834.200		12.716.550		9.325.600		915.600								915.600	25	9.82		915.600	25	1		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi																		0	0			0	0		
		2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			35.048.500		8.297.400		5.956.700		915.600								915.600	0	15.4		915.600	0	2.61		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		2		0								0		0	0	0		0	0		
		2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.589.700		4.419.150		2.172.900		-								-	100	0		-	100	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6		6		6		6								6		100	0	6		100	0		
		2.23.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			12.548.000		-		598.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.23.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			18.648.000		-		598.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	23		23		23		0								0		0	0	0		0	0		
		2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.826.843.319		1.807.400.588		2.792.212.967		625.260.623								625.260.623	62.5	22.4		625.260.623	60.3	3.95		
			Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu																		0	0			0	0		
		2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14.665.503.319		1.664.694.588		2.587.492.967		593.330.623								593.330.623	100	22.9		593.330.623	95.7	4.05		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23		17		22		22								22		100	0	22		95.7	0		
		2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.161.340.000		142.706.000		204.720.000		31.930.000								31.930.000	25	15.6		31.930.000	25	2.75		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		12		12		3								3		25	0	3		25	0		
		2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			134.786.900		15.451.200		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah																		0	0			0	0		
		2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			134.786.900		15.451.200		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	23		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.031.006.850		139.148.478		150.495.600		3.169.318								3.169.318	14.2	2.11		3.169.318	12.7	0.31		
			Indeks layanan administrasi perangkat daerah																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.23.01.2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			38.359.750		6.369.624		6.529.350		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.23.01.2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.23.01.2.06.0 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			65.979.200		-		11.641.700		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.23.01.2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			98.844.850		16.079.461		23.767.600		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		10		0								0		0	0	0		0	0		
		2.23.01.2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			77.307.700		47.181.363		13.218.500		181.818								181.818	50	1.38		181.818	50	0.24		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		3		2		1								1		50	0	1		50	0		
		2.23.01.2.06.0 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			78.991.500		8.085.300		13.272.500		1.847.500								1.847.500	25	13.9		1.847.500	25	2.34		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		12		12		3								3		25	0	3		25	0		
		2.23.01.2.06.0 008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			29.458.350		3.431.140		5.012.950		-								-	25	0		-	25	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		12		12		3								3		25	0	3		25	0		
		2.23.01.2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			606.934.500		58.001.590		57.352.000		1.140.000								1.140.000	13.3	1.99		1.140.000	1.33	0.19		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	150		19		15		2								2		13.3	0	2		1.33	0		
		2.23.01.2.06.0 010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			33.131.000		-		19.701.000		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.154.165.410		123.676.200		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase ketersediaan BMD																		0	0			0	0		
		2.23.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			26.779.200		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			111.286.210		123.676.200		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		19		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.23.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			12.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.23.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.001.100.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.585.097.537		269.869.563		618.056.534		64.044.957								64.044.957	20.8	10.4		64.044.957	20.8	2.48		
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah																		0	0			0	0		
		2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			623.125.732		90.606.843		121.388.669		15.073.881								15.073.881	25	12.4		15.073.881	25	2.42		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36		36		36		9								9		25	0	9		25	0		
		2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.961.971.805		179.262.720		496.667.865		48.971.076								48.971.076	16.7	9.86		48.971.076	16.7	2.5		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	24		32		24		4								4		16.7	0	4		16.7	0		
		2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.025.927.060		167.859.085		216.058.720		20.298.800								20.298.800	68.8	9.4		20.298.800	42.8	1.98		
			Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik																		0	0			0	0		
		2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			195.950.000		24.284.960		39.190.000		3.000.000								3.000.000	100	7.66		3.000.000	100	1.53		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			614.750.000		122.014.480		146.950.000		17.098.800								17.098.800	100	11.6		17.098.800	109	2.78		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11		12		12		12								12		100	0	12		109	0		
		2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			7.300.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			165.020.860		21.559.645		29.918.720		200.000								200.000	6.45	0.67		200.000	5.13	0.12		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	39		30		31		2								2		6.45	0	2		5.13	0		
		2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			42.906.200		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**			**11.136.995.478**		**482.701.387**		**604.678.000**		**69.367.791**								**69.367.791**	**36**	**11**		**69.367.791**	**26**	**0.6**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	67,5		0		66.30		0								0		0	0	0		0	0		
		2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10.168.394.238		458.426.463		366.380.000		69.367.791								69.367.791	50.3	18.9		69.367.791	52.6	0.68		
			Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan, Meningkatnya Anggota Perpustakaan																		0	0			0	0		
		2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			886.783.540		167.615.723		105.158.650		22.137.900								22.137.900	41.7	21.1		22.137.900	8.33	2.5		
			Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	600		173		120		50								50		41.7	0	50		8.33	0		
		2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.781.141.370		188.111.700		88.417.000		37.995.892								37.995.892	100	43		37.995.892	100	2.13		
			Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan			7.317.713.478		52.023.840		55.222.400		3.729.600								3.729.600	9.85	6.75		3.729.600	1.97	0.05		
			Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	1.625		403		325		32								32		9.85	0	32		1.97	0		
		2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan			-		-		111.633.750		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Daerah Tingkat Kabupaten/Kota																									
			Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)			0		20		0								0		0	0	0		0	0		
		2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			182.755.850		50.675.200		5.948.200		5.504.399								5.504.399	100	92.5		5.504.399	100	3.01		
			Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			968.601.240		24.274.924		238.298.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Peserta Lomba Literasi, Meningkatnya Pengunjung Perpustakaan																		0	0			0	0		
		2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			20.100.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	3		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			349.696.740		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	40		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			301.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			-		-		172.195.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)			0		6		0								0		0	0	0		0	0		
		2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat			297.804.500		24.274.924		66.103.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**			**303.156.050**		**11.593.950**		**22.599.300**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	3,8		2.500		2.05		0								0		0	0	0		0	0		
		2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			-		-		10.196.250		-								-	0	0		-	0	0		
		2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			-		-		10.196.250		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)			0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			303.156.050		11.593.950		12.403.050		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan																		0	0			0	0		
		2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara			303.156.050		11.593.950		12.403.050		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	100		0		100		0								0		0	0	0		0	0		
		2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**6.275.373.719**		**65.128.866**		**205.658.260**		**27.000.000**								**27.000.000**	**33**	**13**		**27.000.000**	**6.7**	**0.4**		
		2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**			**5.475.373.719**		**65.128.866**		**205.658.260**		**27.000.000**								**27.000.000**	**33**	**13**		**27.000.000**	**10**	**0.5**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	71,3		70.970		70.30		0								0		0	0	0		0	0		
		2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			4.562.236.309		35.477.386		54.612.600		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya perangkat daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip dinamis sesuai standar kearsipan																		0	0			0	0		
		2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			48.310.500		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			91.473.800		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			383.006.800		35.477.386		54.612.600		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		2.24.02.2.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis			3.919.522.509		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit)	20		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.24.02.2.01.0005	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota			55.736.100		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)	30		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.24.02.2.01.0010	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota			64.186.600		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD, BUMD	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			492.943.660		29.651.480		64.746.010		23.976.000								23.976.000	100	37		23.976.000	50	4.86		
			Meningkatnya dokumen/arsip statis yang diterima																		0	0			0	0		
		2.24.02.2.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI			149.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI (Arsip)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			343.943.660		29.651.480		64.746.010		23.976.000								23.976.000	100	37		23.976.000	100	6.97		
			Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	500		500		500		500								500		100	0	500		100	0		
		2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			420.193.750		-		86.299.650		3.024.000								3.024.000	0	3.5		3.024.000	0	0.72		
			Meningkatnya pemahaman peserta sosialisasi dalam mengelola arsip																		0	0			0	0		
		2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			64.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			355.693.750		-		86.299.650		3.024.000								3.024.000	0	3.5		3.024.000	0	0.85		
			Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		2		0								0		0	0	0		0	0		
		2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**			**740.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	45						0								0		0	0	0		0	0		
		2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			124.411.800		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Daftar musnah arsip																		0	0			0	0		
		2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			124.411.800		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	0		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			96.930.600		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya dokumen / arsip yang diterima																		0	0			0	0		
		2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			96.930.600		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Arsip)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota			259.944.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya autentikasi Arsip Statis dan arsip alihmedia, Meningkatnya PD yang mengelola arsip berbasis IT																		0	0			0	0		
		2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			259.944.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang			258.713.600		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya arsip yang diakuisisi																		0	0			0	0		
		2.24.03.2.05.0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang			258.713.600		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang (Arsip)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.24.04	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**			**60.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	36						0								0		0	0	0		0	0		
		2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota			60.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Pelayanan dan Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.24.04.2.01.0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup			38.262.800		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlasksananya Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan (SOP)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup			21.737.200		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Arsip)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**4.581.397.308**		**963.519.344**		**691.370.764**		**42.844.404**								**42.844.404**	**0**	**6.2**		**42.844.404**	**0**	**0.9**		
		3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			**1.757.719.586**		**629.486.781**		**301.409.630**		-								-	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pertanian	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase Pembudidaya Yang Tergabung Dalam Kelompok Yang Menerapkan Anjuran KKP (%)	300		65		50		0								0		0	0	0		0	0		
				Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2.875		560,35		565		140.9								140,9		24.9	0	140,9		4.9	0		
		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			1.637.389.586		608.866.850		277.944.800		-								-	0	0		-	0	0		
			1.Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mendapat bantuan sarana dan prasarana pembudidaya ikan. 2Jumlah keompok pembudidaya ikan yan mengikuti pengembangan kapasitas. 3.Jumlah Kelompok pembudidaya ikan yang menerima pendampinan teknis budidaya ikan																		0	0			0	0		
		3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil			743.378.611		519.097.190		227.823.300		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	220		35		3		0								0		0	0	0		0	0		
		3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			894.010.975		89.769.660		50.121.500		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	40		5		10		0								0		0	0	0		0	0		
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			120.330.000		20.619.931		23.464.830		-								-	0	0		-	0	0		
			1.Jumlah Lokasi Budidaya yang Memeliki Kualitas Air yang Baik. 2. JUmlah Pembudidaya yang Mendapatkan Bantuan Obat-obatan dan Vitamin Ikan																		0	0			0	0		
		3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			120.330.000		20.619.931		23.464.830		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**			**809.760.080**		**64.713.551**		**98.393.930**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pertanian	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	36,25		7,45		7.15		1.325								1.325		18531	0	1.325		3655	0		
				Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	201,7		44,29		33.50		0								0		0	0	0		0	0		
		3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			809.760.080		64.713.551		98.393.930		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah peningkatan unit usaha pengolahan dan pemasaran perikanan																		0	0			0	0		
		3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko			809.760.080		64.713.551		98.393.930		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	16		11		5		0								0		0	0	0		0	0			
		3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			**2.013.917.642**		**269.319.012**		**291.567.204**		**42.844.404**								**42.844.404**	**0**	**15**		**42.844.404**	**0**	**2.1**	UPTD Perbenihan dan Pakan Ikan	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	585		142,2		565		140.9								140,9		24.9	0	140,9		24.1	0		
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			2.013.917.642		269.319.012		291.567.204		42.844.404								42.844.404	0	14.7		42.844.404	0	2.13		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		0	0			0	0		
		3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.013.917.642		269.319.012		291.567.204		42.844.404								42.844.404	0	14.7		42.844.404	0	2.13		
			Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	60		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**55.989.037.925**		**6.447.751.796**		**6.828.589.555**		**1.080.510.039**								**1.080.510.039**	**43**	**16**		**1.080.510.039**	**6.6**	**1.9**		
		3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**32.817.233.361**		**5.639.547.309**		**5.919.310.115**		**1.008.048.748**								**1.008.048.748**	**48**	**17**		**1.008.048.748**	**7.9**	**3.1**	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	450				90		12								12		13.3	0	12		2.67	0		
		3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			313.655.778		45.938.415		60.980.100		9.328.179								9.328.179	66.7	15.3		9.328.179	13.3	2.97		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi																		0	0			0	0		
		3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			154.199.900		28.219.145		38.041.300		8.653.449								8.653.449	100	22.8		8.653.449	20	5.61		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	35		7		7		7								7		100	0	7		20	0		
		3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			130.492.628		17.719.270		18.954.500		674.730								674.730	100	3.56		674.730	20	0.52		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	30		6		6		6								6		100	0	6		20	0		
		3.26.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			28.963.250		-		3.984.300		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			24.334.115.378		4.480.755.732		4.564.259.935		878.001.868								878.001.868	100	19.2		878.001.868	20	3.61		
			Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu																		0	0			0	0		
		3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			22.051.550.354		3.084.440.532		4.130.819.935		820.681.868								820.681.868	100	19.9		820.681.868	20	3.72		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	170		0		34		34								34		100	0	34		20	0		
		3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			2.282.565.024		1.396.315.200		433.440.000		57.320.000								57.320.000	100	13.2		57.320.000	20	2.51		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	120		0		24		24								24		100	0	24		20	0		
		3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			217.350.200		31.968.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah																		0	0			0	0		
		3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			217.350.200		31.968.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	139		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.952.528.574		138.835.552		221.769.900		1.182.705								1.182.705	20	0.53		1.182.705	4.17	0.06		
			Indeks layanan administrasi perangkat daerah																		0	0			0	0		
		3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			38.069.660		5.673.099		4.268.300		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		3.26.01.2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			36.844.560		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		3.26.01.2.06.0 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			12.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		3.26.01.2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			102.983.740		8.556.417		9.891.500		1.182.705								1.182.705	100	12		1.182.705	33.3	1.15		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		1		1		1								1		100	0	1		33.3	0		
		3.26.01.2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			100.696.680		13.645.050		15.227.800		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.26.01.2.06.0 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			16.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		3.26.01.2.06.0 008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			30.175.550		4.937.625		7.436.300		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	128		1		24		0								0		0	0	0		0	0		
		3.26.01.2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.615.758.384		106.023.361		184.946.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	680		136		136		0								0		0	0	0		0	0		
		3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			985.415.140		59.906.000		29.315.100		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase ketersediaan BMD																		0	0			0	0		
		3.26.01.2.07.0 001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			210.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			330.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			164.283.240		26.905.000		29.315.100		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	8		1		6		0								0		0	0	0		0	0		
		3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			281.131.900		33.001.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.318.357.384		502.345.702		504.678.680		88.228.496								88.228.496	100	17.5		88.228.496	17.5	3.81		
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah																		0	0			0	0		
		3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			14.310.000		3.410.000		3.750.000		1.500.000								1.500.000	100	40		1.500.000	12.5	10.5		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8		1		1		1								1		100	0	1		12.5	0		
		3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.355.551.990		238.834.542		280.888.300		51.173.174								51.173.174	100	18.2		51.173.174	20	3.78		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	240		48		48		48								48		100	0	48		20	0		
		3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			948.495.394		260.101.160		220.040.380		35.555.322								35.555.322	100	16.2		35.555.322	20	3.75		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		16		12		12								12		100	0	12		20	0		
		3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.695.810.907		379.797.908		538.306.400		31.307.500								31.307.500	40	5.82		31.307.500	8	1.16		
			Persentase Kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			410.990.000		40.236.218		39.190.000		3.200.000								3.200.000	100	8.17		3.200.000	20	0.78		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		1								1		100	0	1		20	0		
		3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.331.930.000		206.002.190		200.850.000		28.107.500								28.107.500	100	14		28.107.500	20	2.11		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	105		26		21		21								21		100	0	21		20	0		
		3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			137.580.000		-		12.380.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	84		0		21		0								0		0	0	0		0	0		
		3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			431.790.907		-		73.387.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		0		2		0								0		0	0	0		0	0		
		3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			383.520.000		133.559.500		212.499.400		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**			**1.182.000.000**		**-**		**489.939.440**		**69.915.893**								**69.915.893**	**100**	**14**		**69.915.893**	**0**	**5.9**	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	
			Persentase objek wisata unggulan dalam kondisi baik, Jumlah pengembangan destinasi pariwisata, Persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	260				50		14								14		28	0	14		5.38	0		
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			1.182.000.000		-		489.939.440		69.915.893								69.915.893	100	14.3		69.915.893	0	5.92		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata																		0	0			0	0		
		3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			1.182.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	7		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			-		-		489.939.440		69.915.893								69.915.893	100	14.3		69.915.893	0	0		
			Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)			0		3		3								3		100	0	3		0	0		
		3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**			**9.501.325.550**		**226.972.120**		**201.051.550**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	
			Jumlah kerjasama yang dilakukan dengan pelaku usaha jasa pariwisata, Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota, Jumlah media/ informasi yang disediakan dan disebarluaskan, Jumlah event yang dilaksanakan, difasilitasi dan diikuti	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	35				7		0								0		0	0	0		0	0		
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			9.501.325.550		226.972.120		201.051.550		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Meningkatnya Media Pemasaran Pariwisata																		0	0			0	0		
		3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			3.045.210.850		31.302.948		33.894.900		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	21		3		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			6.456.114.700		195.669.172		167.156.650		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	15		3		3		0								0		0	0	0		0	0		
		3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**			**2.841.722.760**		-		**51.025.150**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	
			Jumlah karya ekonomi kreatif yang difasilitasi	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	225				21		0								0		0	0	0		0	0		
		3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota			2.644.722.760		-		30.000.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Zona Kreatif																		0	0			0	0		
		3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif			2.644.722.760		-		30.000.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit)	9		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.26.04.2.02	197.000.000			197.000.000		-		21.025.150		-								-	0	0		-	0	0		
																					0	0			0	0		
		3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual			197.000.000		-		21.025.150		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	130		0		20		0								0		0	0	0		0	0		
		3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**			**4.491.000.000**		**251.568.418**		**167.263.300**		**2.545.398**								**2.545.398**	**50**	**1.5**		**2.545.398**	**7.8**	**0.1**	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	
			Jumlah Fasilitasi Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	290				30		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			4.056.000.000		251.568.418		167.263.300		2.545.398								2.545.398	50	1.52		2.545.398	11.8	0.06		
			Persentase FAsiltasiPelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																		0	0			0	0		
		3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif			3.501.000.000		233.474.661		150.097.150		2.545.398								2.545.398	100	1.7		2.545.398	23.5	0.07		
			Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	17		4		4		4								4		100	0	4		23.5	0		
		3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			555.000.000		18.093.757		17.166.150		-								-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	60		30		30		0								0		0	0	0		0	0		
		3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			435.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mengkuti Pengembangan Kapasitas																		0	0			0	0		
		3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			435.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	240		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**			**5.155.756.254**		**329.663.949**		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	UPTD Pengelola Objek Wisata dan Usaha Pariwisata	
			Persentase objek wisata unggulan dalam kondisi baik, Jumlah pengembangan destinasi pariwisata, Persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	260				50		0								0		0	0	0		0	0		
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			5.155.756.254		329.663.949		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah sarana Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan Terpelihara																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			5.155.756.254		329.663.949		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	15		3		0		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**122.382.852.652**		**16.556.046.543**		**15.172.835.106**		**1.883.517.053**								**1.883.517.053**	**20**	**12**		**1.883.517.053**	**68**	**1.5**		
		3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**75.219.698.668**		**11.745.794.392**		**11.965.545.004**		**1.669.028.033**								**1.669.028.033**	**21**	**14**		**1.669.028.033**	**18**	**2.2**	Dinas Pertanian	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	450				89												0	0	0		0	0		
		3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			634.113.784		108.821.665		135.962.200		2.340.900								2.340.900	25	1.72		2.340.900	25	0.37		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi																		0	0			0	0		
		3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			128.207.100		18.858.665		10.079.900		2.340.900								2.340.900	50	23.2		2.340.900	50	1.83		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		2		1								1		50	0	1		50	0		
		3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			465.406.684		89.963.000		122.259.800		-								-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8		8		8		4								4		50	0	4		50	0		
		3.27.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			20.250.000		-		1.610.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			20.250.000		-		2.012.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			61.089.111.925		9.713.709.878		10.109.305.910		1.479.539.415								1.479.539.415	36.5	14.6		1.479.539.415	36.5	2.42		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu																		0	0			0	0		
		3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			58.548.794.467		9.226.003.881		9.416.065.910		1.387.089.415								1.387.089.415	48	14.7		1.387.089.415	48	2.37		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100		100		100		48								48		48	0	48		48	0		
		3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			2.540.317.458		487.705.997		693.240.000		92.450.000								92.450.000	25	13.3		92.450.000	25	3.64		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		12		12		3								3		25	0	3		25	0		
		3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			579.984.500		91.741.500		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah																		0	0			0	0		
		3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			579.984.500		91.741.500		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	100		0		100		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.629.950.637		249.184.440		357.195.020		17.365.080								17.365.080	25.2	4.86		17.365.080	21.8	0.66		
			Indeks layanan administrasi perangkat daerah																		0	0			0	0		
		3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			38.169.085		6.198.795		6.251.200		3.928.290								3.928.290	25	62.8		3.928.290	25	10.3		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		0		12		3								3		25	0	3		25	0		
		3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			341.565.937		53.302.575		22.378.220		5.830.940								5.830.940	100	26.1		5.830.940	100	1.71		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		3		3								3		100	0	3		100	0		
		3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			121.673.117		18.629.960		19.929.600		2.480.850								2.480.850	1	12.5		2.480.850	1	2.04		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	100		100		100		1								1		1	0	1		1	0		
		3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			42.686.859		6.982.500		6.992.000		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	200		200		200		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.065.605.639		164.070.610		300.034.000		5.125.000								5.125.000	25	1.71		5.125.000	5	0.25		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3								3		25	0	3		5	0		
		3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			20.250.000		-		1.610.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.553.403.129		232.609.380		10.912.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase ketersediaan BMD																		0	0			0	0		
		3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2.295.517.600		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			257.885.529		232.609.380		10.912.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	55		11		11		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.597.342.007		520.247.941		673.573.014		114.481.538								114.481.538	34.4	17		114.481.538	16.9	3.18		
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah																		0	0			0	0		
		3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.483.178.220		179.385.985		224.632.698		43.904.133								43.904.133	25	19.5		43.904.133	25	2.96		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		12		3								3		25	0	3		25	0		
		3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.114.163.787		340.861.956		448.940.316		70.577.405								70.577.405	43.8	15.7		70.577.405	8.75	3.34		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	480		0		96		42								42		43.8	0	42		8.75	0		
		3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.135.792.686		829.479.588		678.596.360		55.301.100								55.301.100	12.2	8.15		55.301.100	12.2	1.34		
			Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik																		0	0			0	0		
		3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			239.258.869		38.945.199		39.190.000		4.815.000								4.815.000	0.8	12.3		4.815.000	0.8	2.01		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	125		125		125		1								1		0.8	0	1		0.8	0		
		3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			3.711.290.290		576.190.270		600.200.000		50.486.100								50.486.100	48.2	8.41		50.486.100	48.2	1.36		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	135		135		135		65								65		48.2	0	65		48.2	0		
		3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			124.910.346		26.047.350		23.334.360		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30		30		30		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			60.333.181		188.296.769		15.872.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		2		2		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**6.446.037.811**		**814.761.175**		**573.745.691**		**10.232.725**								**10.232.725**	**30**	**1.8**		**10.232.725**	**6.3**	**0.2**	Dinas Pertanian	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	3,62				0.73		0								0		0	0	0		0	0		
				Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	5,65		5,76		5.61		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	10				2		0								0		0	0	0		0	0		
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)	10		2		2		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			994.913.197		70.159.836		88.042.991		6.393.623								6.393.623	50	7.26		6.393.623	0	0.64		
			1. Persentase pupuk yang disalurkan 2. Jumlah alsintan yang di salurkan 3. Persentase pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian																		0	0			0	0		
		3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			994.913.197		70.159.836		21.156.045		-								-	0	0		-	0	0		
			Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	5		5		5		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			-		-		66.886.946		6.393.623								6.393.623	100	9.56		6.393.623	0	0		
			Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)			0		1		1								1		100	0	1		0	0		
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			4.874.144.922		699.464.169		411.478.000		3.839.102								3.839.102	20	0.93		3.839.102	12.5	0.08		
			&1. Persentase pemanfaatan SDG Padi Bersertifikat sesuai target tanam 2. Indeks Pertanaman 3. Persentase pemenuhan layanan sarana pendukung pertanian&																		0	0			0	0		
		3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			1.349.075.562		389.638.913		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1		1		0		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			3.525.069.360		309.825.256		411.478.000		3.839.102								3.839.102	20	0.93		3.839.102	25	0.11		
			Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	4		4		5		1								1		20	0	1		25	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			576.979.692		45.137.170		74.224.700		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Pengawasan/Pengendalian Peredaran Benih/Bibit/Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																		0	0			0	0		
		3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			576.979.692		45.137.170		74.224.700		-								-	0	0		-	0	0		
			Terkendalinya penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)	1		1		5		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**22.604.384.080**		**2.427.777.470**		**574.419.150**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pertanian	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase Pemenuhan Prasarana Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Ditetapkan Menjadi LP2B (RJIT) (%)	343,06				66.54		0								0		0	0	0		0	0		
				Persentase Pemenuhan Prasarana Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Ditetapkan Menjadi LP2B (JUT) (%)	256,94				49.84		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			4.606.604.939		303.864.494		155.777.100		-								-	0	0		-	0	0		
			1.Jumlah Lahan Pertanian yang Dilindungi 2.Persentase Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura																		0	0			0	0		
		3.27.03.2.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura			943.544.939		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	20		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.03.2.01.0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota			1.221.020.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	5		0		0		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota			1.221.020.000		303.864.494		155.777.100		-								-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian			1.221.020.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			17.997.779.141		2.123.912.976		418.642.050		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Prasarana Yang di Bangun																		0	0			0	0		
		3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			8.668.230.971		897.547.775		210.360.550		-								-	0	0		-	0	0		
			Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	7		7		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			9.329.548.170		1.226.365.201		208.281.500		-								-	0	0		-	0	0		
			terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	7		7		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			**4.036.146.722**		**136.935.415**		**123.110.250**		**11.946.588**								**11.946.588**	**0**	**9.7**		**11.946.588**	**0**	**0.3**	Dinas Pertanian	
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	9		16,6		9		0								0		0	0	0		0	0		
				Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (%)	450		100		90		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	5		0,5		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			152.627.499		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Wilayah yang dilakukan Pengawasan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan																		0	0			0	0		
		3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan			152.627.499		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	5		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			3.883.519.223		136.935.415		123.110.250		11.946.588								11.946.588	0	9.7		11.946.588	0	0.31		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		0	0			0	0		
		3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			158.732.600		18.297.091		20.252.900		1.139.450								1.139.450	0	5.63		1.139.450	0	0.72		
			Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	25		19		160		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.04.2.04.0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan			280.834.600		19.212.348		11.834.800		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	1		1		30		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan			3.443.952.023		99.425.976		91.022.550		10.807.138								10.807.138	0	11.9		10.807.138	0	0.31		
			Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)	60		29		90		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**			**940.185.400**		**47.409.247**		**43.060.735**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pertanian	

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	500		50		100		0								0		0	0	0		0	0		
				Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	460				60		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			940.185.400		47.409.247		43.060.735		-								-	0	0		-	0	0		
			&1. Persentase luas lahan serangan OPT yang dikendalikan (Padi) 2. Persentase luas lahan serangan OPT yang dikendalikan (Kakao) 3. Jumlah Petani yang memanfaatkan Akses Permodalan Dan Pembiayaan 4. Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan yang memanfaatkan akses Permodalan&																		0	0			0	0		
		3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			439.567.200		37.757.370		33.061.300		-								-	0	0		-	0	0		
			Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	214		214		194		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			317.465.200		9.651.877		9.999.435		-								-	0	0		-	0	0		
			Tertanggulanginya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	1		1		4		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.05.2.01.0007	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan			183.153.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**			**421.251.900**		**15.873.882**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pertanian	

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	500				100		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			421.251.900		15.873.882		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah pemasaran hasil olahan pertanian																		0	0			0	0		
		3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian			421.251.900		15.873.882		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	6		6		6		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**3.080.756.479**		**478.877.938**		**314.315.650**		**3.829.500**								**3.829.500**	**2.5**	**1.2**		**3.829.500**	**0.7**	**0.1**	Dinas Pertanian	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	455		100		90		0								0		0	0	0		0	0		
				Persentase Luas Tanam Yang Menerapkan Teknologi Pertanian (%)	270				50		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			3.080.756.479		478.877.938		314.315.650		3.829.500								3.829.500	2.5	1.22		3.829.500	0.67	0.12		
			Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna																		0	0			0	0		
		3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			302.202.450		68.491.025		27.636.550		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	5		5		5		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			293.778.329		101.884.920		165.155.650		1.374.735								1.374.735	10	0.83		1.374.735	4	0.47		
			Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	25		5		10		1								1		10	0	1		4	0		
		3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			293.044.800		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	5		0		1		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			848.608.900		112.985.184		121.523.450		2.454.765								2.454.765	0	2.02		2.454.765	0	0.29		
			Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	3		3		3		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian			1.196.599.600		195.516.809		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	45		45		0		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani			146.522.400		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.183.030.000**		**234.268.551**		**550.000.000**		**46.715.550**								**46.715.550**	**6.3**	**8.5**		**46.715.550**	**1.3**	**4**	UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah																		6.25	0			1.25	0		
		3.27.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1.183.030.000		234.268.551		550.000.000		46.715.550								46.715.550	6.25	8.49		46.715.550	1.25	3.95		
			Jumlah Populasi Sapi yang Dipelihara																		0	0			0	0		
		3.27.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1.183.030.000		234.268.551		550.000.000		46.715.550								46.715.550	6.25	8.49		46.715.550	1.25	3.95		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	400		80		80		5								5		6.25	0	5		1.25	0		
		3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			**1.282.071.000**		**166.069.359**		**180.183.980**		**15.333.477**								**15.333.477**	**243**	**8.5**		**15.333.477**	**###**	**1.2**	UPTD Puskeswan	
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	450		100		90		12								12		13.3	0	12		2.67	0		
				Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	9				9		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.282.071.000		166.069.359		180.183.980		15.333.477								15.333.477	243	8.51		15.333.477	3035	1.2		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan																		0	0			0	0		
		3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			1.282.071.000		166.069.359		180.183.980		15.333.477								15.333.477	243	8.51		15.333.477	3035	1.2		
			Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	20		4		250		607								607		243	0	607		3035	0		
		3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**3.832.083.906**		**72.567.140**		**332.838.946**		**79.257.281**								**79.257.281**	**33**	**24**		**79.257.281**	**0**	**2.1**	UPTD Perbenihan dan Pelayanan Jasa Alsintan	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	5,65				5.61		0								0		0	0	0		0	0		
				Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	3,62				0.73		0								0		0	0	0		0	0		
				Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	10				2		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			3.832.083.906		72.567.140		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian																		0	0			0	0		
		3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			1.156.916.450		72.567.140		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	10		2		0		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih			2.675.167.456		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	73		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-		332.838.946		79.257.281								79.257.281	33.3	23.8		79.257.281	0	0		
		3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			-		-		332.838.946		79.257.281								79.257.281	33.3	23.8		79.257.281	0	0		
			Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)			0		6		2								2		33.3	0	2		0	0		
		3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**576.656.097**		**10.618.800**		**99.198.000**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	UPTD RPH dan Pasar Ternak	

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) dalam kondisi baik (%)	350				60		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			576.656.097		10.618.800		99.198.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Prasarana yang Dibangun																		0	0			0	0		
		3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan			576.656.097		10.618.800		99.198.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			**2.760.550.589**		**405.093.174**		**416.417.700**		**47.173.899**								**47.173.899**	**0**	**11**		**47.173.899**	**0**	**1.7**	UPTD RPH dan Pasar Ternak	
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	5				1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			2.760.550.589		405.093.174		416.417.700		47.173.899								47.173.899	0	11.3		47.173.899	0	1.71		
			1.Persentase pelayanan ternak di pasar ternak sesuai sop 2.Persentase fasilitasi pemotongan dan pendistribusian daging tepat waktu																		0	0			0	0		
		3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)			2.760.550.589		405.093.174		416.417.700		47.173.899								47.173.899	0	11.3		47.173.899	0	1.71		
			Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	15.000,6		0		160		0								0		0	0	0		0	0		
		3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**51.745.891.967**		**5.085.582.526**		**5.751.878.756**		**537.840.994**								**537.840.994**	**8.3**	**9.4**		**537.840.994**	**4.7**	**1**		
		3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**			**139.679.200**		**18.735.142**		**19.679.200**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100				100												0	0	0		0	0		
		3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			139.679.200		18.735.142		19.679.200		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Usaha Perdagangan yang sesuai dengan izin sesuai standar																		0	0			0	0		
		3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)			139.679.200		18.735.142		19.679.200		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	30		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**			**41.232.095.482**		**4.592.280.173**		**5.196.691.080**		**372.690.383**								**372.690.383**	**0**	**7.2**		**372.690.383**	**0**	**0.9**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	90				90												0	0	0		0	0		
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			34.166.526.232		3.254.975.181		4.110.584.940		200.213.966								200.213.966	0	4.87		200.213.966	0	0.59		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang disediakan																		0	0			0	0		
		3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			27.117.573.100		2.625.600.234		3.010.773.560		48.017.000								48.017.000	0	1.59		48.017.000	0	0.18		
			Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3		2		2		0								0		0	0	0		0	0		
		3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			7.048.953.132		629.374.947		1.099.811.380		152.196.966								152.196.966	0	13.8		152.196.966	0	2.16		
			Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3		3		4		0								0		0	0	0		0	0		
		3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi			7.065.569.250		1.337.304.992		1.086.106.140		172.476.417								172.476.417	0	15.9		172.476.417	0	2.44		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya																									
			Persentase pelanggaran Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Pasar Persentase Pelanggaran Perda No.13 Tahun 2016 tentang Pasar Tradisional Persentase Pelanggaran Perda No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha , Persentase Pelanggaran Perda No. 9 Tahun 2010 tentang Perda Kaki Lima																0	0			0	0		
		3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			7.065.569.250		1.337.304.992		1.086.106.140		172.476.417								172.476.417	0	15.9		172.476.417	0	2.44		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	0		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			-		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	0		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**			**1.993.898.350**		**180.256.092**		**267.012.890**		**70.465.276**								**70.465.276**	**0**	**26**		**70.465.276**	**0**	**3.5**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	107,69				19.23												0	0	0		0	0		
		3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			200.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah barang kebutuhan pokok yang tejamin ketersediaanya tingkat agen/ distributor																		0	0			0	0		
		3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			200.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			1.539.206.000		163.055.156		129.205.500		43.959.457								43.959.457	0	34		43.959.457	0	2.86		
			Jumlah Komoditi yang harganya stabil yang diperdagangkan																		0	0			0	0		
		3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			209.840.100		15.402.788		19.839.750		1.911.642								1.911.642	0	9.64		1.911.642	0	0.91		
			Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			209.840.050		15.217.620		19.839.950		1.578.135								1.578.135	0	7.95		1.578.135	0	0.75		
			Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			1.119.525.850		132.434.748		89.525.800		40.469.680								40.469.680	0	45.2		40.469.680	0	3.61		
			Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			254.692.350		17.200.936		137.807.390		26.505.819								26.505.819	0	19.2		26.505.819	0	10.4		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah kios dan distriburor pupuk bersubsidi yang terawasi																		0	0			0	0		
		3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan			127.345.550		10.253.952		120.460.590		24.320.022								24.320.022	0	20.2		24.320.022	0	19.1		
			Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan (Dokumen)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			127.346.800		6.946.984		17.346.800		2.185.797								2.185.797	0	12.6		2.185.797	0	1.72		
			Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**			**3.000.000.000**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi dalam upaya pelaksanaan ekspor (%)	0,11				0												0	0	0		0	0		
		3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			3.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi untuk promosi dalam rangka ekspor																		0	0			0	0		
		3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional			750.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	4		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal			750.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	50		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan			750.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	4		0		0		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor			750.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	4		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**			**852.586.700**		**57.677.752**		**66.799.156**		**3.489.819**								**3.489.819**	**0**	**5.2**		**3.489.819**	**0**	**0.4**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100				100												0	0	0		0	0		
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			852.586.700		57.677.752		66.799.156		3.489.819								3.489.819	0	5.22		3.489.819	0	0.41		
			Persentase pelaku usaha yang tertib Niaga																		0	0			0	0		
		3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			652.586.700		57.677.752		66.799.156		3.489.819								3.489.819	0	5.22		3.489.819	0	0.53		
			Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	1.479		890		895		0								0		0	0	0		0	0		
		3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			200.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	149		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**			**970.779.911**		**39.642.333**		**24.357.150**		**2.117.880**								**2.117.880**	**0**	**8.7**		**2.117.880**	**0**	**0.2**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	80				80												0	0	0		0	0		
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			970.779.911		39.642.333		24.357.150		2.117.880								2.117.880	0	8.7		2.117.880	0	0.22		
			Jumalk kerjasama perdagangan																		0	0			0	0		
		3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			970.779.911		39.642.333		24.357.150		2.117.880								2.117.880	0	8.7		2.117.880	0	0.22		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	4		4		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**			**3.556.852.324**		**196.991.034**		**177.339.280**		**89.077.636**								**89.077.636**	**100**	**50**		**89.077.636**	**80**	**2.5**	UPTD Promosi Produk UMKM	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	80				80												0	0	0		0	0		
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			3.556.852.324		196.991.034		177.339.280		89.077.636								89.077.636	100	50.2		89.077.636	80	2.5		
			Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		0	0			0	0		
		3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			3.556.852.324		196.991.034		177.339.280		89.077.636								89.077.636	100	50.2		89.077.636	80	2.5		
			Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	5		5		4		4								4		100	0	4		80	0		
		3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**9.940.241.215**		**1.198.378.609**		**691.138.263**		**30.444.459**								**30.444.459**	**0**	**4.4**		**30.444.459**	**0**	**0.3**		
		3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**			**4.900.008.626**		**627.119.172**		**452.384.316**		**20.374.276**								**20.374.276**	**0**	**4.5**		**20.374.276**	**0**	**0.4**	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	30		41.160		26		15								15		57.7	0	15		50	0		
		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			4.900.008.626		627.119.172		452.384.316		20.374.276								20.374.276	0	4.5		20.374.276	0	0.42		
			Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri																		0	0			0	0		
		3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			243.883.775		19.612.225		8.581.100		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			1.550.723.386		261.249.322		122.336.867		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			3.022.258.915		338.305.459		317.134.349		20.374.276								20.374.276	0	6.42		20.374.276	0	0.67		
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota			83.142.550		7.952.166		4.332.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**			**531.972.650**		**53.814.162**		**52.342.225**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	73,52		83.450		72.57		0								0		0	0	0		0	0		
		3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			531.972.650		53.814.162		52.342.225		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		3.31.03.2.01.0 003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota			128.846.910		7.958.919		7.263.950		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.31.03.2.01.0 004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)			403.125.740		45.855.243		45.078.275		-								-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**			**213.322.100**		**14.301.072**		**6.776.400**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	73,33		60.000		61.67		15.03								15,03		24.4	0	15,03		20.5	0		
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			213.322.100		14.301.072		6.776.400		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini																		0	0			0	0		
		3.31.04.2.01.0001	81.416.745			81.416.745		5.842.818		3.183.800		-								-	0	0		-	0	0		
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.31.04.2.01.0003	131.905.355			131.905.355		8.458.254		3.592.600		-								-	0	0		-	0	0		
				Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**			**4.294.937.839**		**503.144.203**		**179.635.322**		**10.070.183**								**10.070.183**	**0**	**5.6**		**10.070.183**	**0**	**0.2**	UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R)	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	30		41.160		26		15								15		57.7	0	15		50	0		
		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			4.294.937.839		503.144.203		179.635.322		10.070.183								10.070.183	0	5.61		10.070.183	0	0.23		
			Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																		0	0			0	0		
		3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan			753.252.750		-		63.252.550		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Pembangunan Sumber Daya Industri																									
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		3.31.02.2.01.0 004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			3.541.685.089		503.144.203		116.382.772		10.070.183								10.070.183	0	8.65		10.070.183	0	0.28		
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**204.397.501.058**		**31.629.908.775**		**31.740.309.260**		**4.382.350.592**								**4.382.350.592**	**35**	**14**		**4.382.350.592**	**21**	**2.1**		
		4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**158.393.207.708**		**27.093.597.999**		**27.426.581.910**		**4.287.390.790**								**4.287.390.790**	**47**	**16**		**4.287.390.790**	**28**	**2.7**	Sekretariat Daerah	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	90,02		89.800		89.04		0								0		0	0	0		0	0		
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			865.077.850		119.721.603		120.637.150		23.965.705								23.965.705	12.5	19.9		23.965.705	12.5	2.77		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi																		0	0			0	0		
		4.01.01.2.01.0 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			663.016.350		106.266.195		97.898.550		18.916.870								18.916.870	25	19.3		18.916.870	25	2.85		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		4		4		1								1		25	0	1		25	0		
		4.01.01.2.01.0 008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			41.000.000		-		4.781.350		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		4.01.01.2.01.0 009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			41.000.000		-		4.191.750		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			IKM Sekretariat Daerah																		0	0			0	0		
		4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			120.061.500		13.455.408		13.765.500		5.048.835								5.048.835	25	36.7		5.048.835	25	4.21		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		4		4		1								1		25	0	1		25	0		
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			63.406.880.584		9.557.129.463		11.590.718.099		2.472.398.470								2.472.398.470	62.5	21.3		2.472.398.470	61.3	3.9		
			Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu																		0	0			0	0		
		4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			59.430.360.584		8.916.064.475		10.838.598.099		2.348.270.470								2.348.270.470	100	21.7		2.348.270.470	97.7	3.95		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	85		71		83		83								83		100	0	83		97.7	0		
		4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			3.976.520.000		641.064.988		752.120.000		124.128.000								124.128.000	25	16.5		124.128.000	25	3.12		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		12		12		3								3		25	0	3		25	0		
		4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			250.000.000		49.909.760		50.000.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik																		0	0			0	0		
		4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			250.000.000		49.909.760		50.000.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			449.377.500		67.150.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah																		0	0			0	0		
		4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			449.377.500		67.150.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	85		0		85		0								0		0	0	0		0	0		
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			18.864.293.528		3.129.653.629		2.548.770.300		234.676.547								234.676.547	53.3	9.21		234.676.547	32.2	1.24		
			Indeks layanan administrasi perangkat daerah																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			394.986.500		72.679.567		34.986.500		29.515.205								29.515.205	60	84.4		29.515.205	66.7	7.47		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9		14		10		6								6		60	0	6		66.7	0		
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			659.988.400		114.178.475		41.895.800		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		7		4		0								0		0	0	0		0	0		
		4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			468.734.380		77.115.954		69.742.100		28.901.070								28.901.070	18	41.4		28.901.070	45	6.17		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20		20		50		9								9		18	0	9		45	0		
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			389.959.000		62.257.856		59.959.000		19.375.883								19.375.883	27.3	32.3		19.375.883	100	4.97		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		12		11		3								3		27.3	0	3		100	0		
		4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.970.950.000		306.403.400		242.998.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3		3		6		0								0		0	0	0		0	0		
		4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			7.319.991.650		1.626.102.675		943.997.650		53.212.835								53.212.835	300	5.64		53.212.835	25	0.73		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		12		1		3								3		300	0	3		25	0		
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			7.618.683.598		870.915.702		1.145.191.000		103.671.554								103.671.554	20.8	9.05		103.671.554	20.8	1.36		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	144		142		144		30								30		20.8	0	30		20.8	0		
		4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			41.000.000		-		9.999.750		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			11.201.978.311		5.056.039.945		3.519.114.750		10.850.000								10.850.000	33.3	0.31		10.850.000	8.33	0.1		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase ketersediaan BMD																		0	0			0	0		
		4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			2.004.000.000		2.271.600.000		680.000.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		3		1		0								0		0	0	0		0	0		
		4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			627.031.861		1.266.600.000		680.000.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		3		1		0								0		0	0	0		0	0		
		4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			540.800.000		186.935.394		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3		6		6		0								0		0	0	0		0	0		
		4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.430.554.150		1.043.879.751		13.500.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6		17		1		0								0		0	0	0		0	0		
		4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.878.529.800		196.360.000		2.134.614.750		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6		0		4		0								0		0	0	0		0	0		
		4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			721.062.500		90.664.800		11.000.000		10.850.000								10.850.000	200	98.6		10.850.000	50	1.5		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		1		2								2		200	0	2		50	0		
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			19.988.827.792		2.955.644.577		3.319.844.488		704.624.140								704.624.140	225	21.2		704.624.140	25	3.53		
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah																		0	0			0	0		
		4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			5.018.068.400		876.346.357		953.905.000		212.222.320								212.222.320	75	22.3		212.222.320	25	4.23		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		4		3								3		75	0	3		25	0		
		4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.439.409.000		390.758.860		339.407.500		89.541.480								89.541.480	300	26.4		89.541.480	25	2.6		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		1		3								3		300	0	3		25	0		
		4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			11.531.350.392		1.688.539.360		2.026.531.988		402.860.340								402.860.340	300	19.9		402.860.340	25	3.49		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		1		3								3		300	0	3		25	0		
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9.915.463.020		1.376.721.240		1.539.633.800		179.659.549								179.659.549	30.1	11.7		179.659.549	32.9	1.81		
			Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik																		0	0			0	0		
		4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			3.050.120.000		600.185.912		592.470.000		89.463.475								89.463.475	100	15.1		89.463.475	100	2.93		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	15		15		15		15								15		100	0	15		100	0		
		4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			3.620.660.000		579.136.169		604.100.000		81.967.074								81.967.074	95.7	13.6		81.967.074	100	2.26		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	45		3		47		45								45		95.7	0	45		100	0		
		4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			460.000.000		23.819.923		10.000.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10		10		125		0								0		0	0	0		0	0		
		4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			171.050.000		27.591.023		22.210.000		8.229.000								8.229.000	15	37.1		8.229.000	30	4.81		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		10		20		3								3		15	0	3		30	0		
		4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.199.948.660		22.553.014		237.169.440		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		4		4		0								0		0	0	0		0	0		
		4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			368.670.000		-		28.670.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		4		0								0		0	0	0		0	0		
		4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.045.014.360		123.435.199		45.014.360		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		2		4		0								0		0	0	0		0	0		
		4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			8.525.878.345		1.482.011.540		1.600.344.241		137.045.962								137.045.962	50	8.56		137.045.962	50	1.61		
			Persentase pemenuhan kebutuhan kepada KDH dan WKDH																		0	0			0	0		
		4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			4.588.695.695		684.699.140		926.298.441		37.045.962								37.045.962	100	4		37.045.962	100	0.81		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2		2		2		2								2		100	0	2		100	0		
		4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			495.792.650		197.422.600		64.045.800		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	5		6		5		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			50.000.000		-		10.000.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	8		0		8		0								0		0	0	0		0	0		
		4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			3.391.390.000		599.889.800		600.000.000		100.000.000								100.000.000	100	16.7		100.000.000	100	2.95		
			Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2		2		2		2								2		100	0	2		100	0		
		4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			5.392.207.128		1.212.371.553		652.028.505		155.012.890								155.012.890	11.9	23.8		155.012.890	26.7	2.87		
			Persentase pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan baik																		0	0			0	0		
		4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			2.501.199.180		582.026.622		295.986.130		72.992.775								72.992.775	11.1	24.7		72.992.775	26.7	2.92		
			Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	15		15		36		4								4		11.1	0	4		26.7	0		
		4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			1.955.808.648		479.183.868		270.847.370		67.736.880								67.736.880	11.8	25		67.736.880	26.7	3.46		
			Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	15		15		34		4								4		11.8	0	4		26.7	0		
		4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			935.199.300		151.161.063		85.195.005		14.283.235								14.283.235	12.9	16.8		14.283.235	26.7	1.53		
			Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	15		15		31		4								4		12.9	0	4		26.7	0		
		4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			5.246.194.700		278.557.526		105.075.450		17.283.592								17.283.592	33.3	16.5		17.283.592	33.3	0.33		
			Indeks Kematangan Organisasi																		0	0			0	0		
		4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			1.571.503.450		67.535.218		28.213.400		2.940.530								2.940.530	0	10.4		2.940.530	0	0.19		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
			Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik																		0	0			0	0		
		4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1.321.368.750		176.805.228		39.571.750		6.262.287								6.262.287	0	15.8		6.262.287	0	0.47		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
			Indeks BerAKHLAK																		0	0			0	0		
		4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			2.353.322.500		34.217.080		37.290.300		8.080.775								8.080.775	100	21.7		8.080.775	100	0.34		
			Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	2		0		2		2								2		100	0	2		100	0		
		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			14.287.028.950		1.808.687.163		2.380.415.127		351.873.935								351.873.935	25	14.8		351.873.935	25	2.46		
			Persentase acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi dengan baik																		0	0			0	0		
		4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan			900.000.250		93.271.725		96.315.750		6.995.700								6.995.700	25	7.26		6.995.700	25	0.78		
			Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	12		12		12		3								3		25	0	3		25	0		
		4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			11.805.324.200		1.357.263.551		1.971.180.427		245.507.840								245.507.840	25	12.5		245.507.840	25	2.08		
			Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	12		12		12		3								3		25	0	3		25	0		
		4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan			1.581.704.500		358.151.887		312.918.950		99.370.395								99.370.395	25	31.8		99.370.395	25	6.28		
			Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	12		12		12		3								3		25	0	3		25	0		
		4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**40.874.601.350**		**4.156.301.126**		**4.039.763.500**		**60.015.033**								**60.015.033**	**7.6**	**1.5**		**60.015.033**	**6.7**	**0.2**	Sekretariat Daerah	
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Nilai)	3,5		3,08		3.4150		0								0		0	0	0		0	0		
				Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	88		87,6		87.40		0								0		0	0	0		0	0		
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			5.227.770.400		601.877.746		450.231.750		53.457.618								53.457.618	16.7	11.9		53.457.618	13.3	1.02		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu																		0	0			0	0		
		4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			2.036.575.700		261.410.338		147.880.600		40.199.667								40.199.667	50	27.2		40.199.667	40	1.97		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	5		5		4		2								2		50	0	2		40	0		
			Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik																		0	0			0	0		
		4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan			2.391.749.950		290.462.515		249.694.950		13.257.951								13.257.951	0	5.31		13.257.951	0	0.55		
			Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	3		3		3		0								0		0	0	0		0	0		
		4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			799.444.750		50.004.893		52.656.200		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	3		1		2		0								0		0	0	0		0	0		
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			30.588.742.300		3.053.562.263		2.986.544.900		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat																		0	0			0	0		
		4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			7.000.792.050		693.340.322		422.638.950		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	1		3		2		0								0		0	0	0		0	0		
		4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial			14.752.427.250		1.903.458.405		1.748.068.750		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	1		1		3		0								0		0	0	0		0	0			
		4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat			8.835.523.000		456.763.536		815.837.200		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	2		0		2		0								0		0	0	0		0	0			
		4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			4.993.089.850		484.181.194		587.869.500		6.557.415								6.557.415	11.1	1.12		6.557.415	11.1	0.13		
			Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi																		0	0			0	0		
		4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			1.065.456.400		50.205.783		48.266.750		4.207.415								4.207.415	33.3	8.72		4.207.415	33.3	0.39		
			Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	3		3		3		1								1		33.3	0	1		33.3	0		
			Persentase koordinasi hukum yang difasilitasi																		0	0			0	0		
		4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum			3.719.654.900		426.369.225		533.219.950		2.350.000								2.350.000	0	0.44		2.350.000	0	0.06		
			Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	1		2		3		0								0		0	0	0		0	0		
		4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			207.978.550		7.606.186		6.382.800		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	3		3		3		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			64.998.800		16.679.923		15.117.350		-								-	0	0		-	0	0		
			Jumlah dokumen Kesepakatan Bersama/ Nota Kesepahaman yang difasilitasi																		0	0			0	0		
		4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			49.999.650		14.143.617		15.117.350		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	1		5		1		0								0		0	0	0		0	0		
		4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			14.999.150		2.536.306		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**5.129.692.000**		**380.009.650**		**273.963.850**		**34.944.769**								**34.944.769**	**3.6**	**13**		**34.944.769**	**3.6**	**0.7**	Sekretariat Daerah	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Indek Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Indeks)	91,58		91,58		91.58		0								0		0	0	0		0	0		
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			1.502.035.100		88.148.903		69.388.750		5.752.554								5.752.554	0	8.29		5.752.554	0	0.38		
			Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti																		0	0			0	0		
		4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			815.967.250		30.081.051		28.315.300		2.264.400								2.264.400	0	8		2.264.400	0	0.28		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			686.067.850		58.067.852		41.073.450		3.488.154								3.488.154	0	8.49		3.488.154	0	0.51		
			Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			458.603.400		17.333.175		14.860.100		-								-	25	0		-	25	0		
			Persentase hasil monitoring evaluasi yang ditindaklanjuti																		0	0			0	0		
		4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			458.603.400		17.333.175		14.860.100		-								-	25	0		-	25	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	12		12		12		3								3		25	0	3		25	0		
		4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			2.715.690.450		264.228.791		181.941.400		27.874.895								27.874.895	0	15.3		27.874.895	0	1.03		
			Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik																		0	0			0	0		
		4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			1.154.440.950		207.138.500		140.852.700		21.999.998								21.999.998	0	15.6		21.999.998	0	1.91		
			Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
			Jumlah pembinaan dan pendampingan advokasi pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan																		0	0			0	0		
		4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			630.019.000		33.000.300		23.256.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	40		0		40		0								0		0	0	0		0	0		
			Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan secara kompetitif																		0	0			0	0		
		4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			931.230.500		24.089.991		17.832.200		5.874.897								5.874.897	0	33		5.874.897	0	0.63		
			Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			453.363.050		10.298.781		7.773.600		1.317.320								1.317.320	0	17		1.317.320	0	0.29		
			Jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang disusun																		0	0			0	0		
		4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			453.363.050		10.298.781		7.773.600		1.317.320								1.317.320	0	17		1.317.320	0	0.29		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		4.02	**SEKRETARIAT DPRD**			**188.962.515.817**		**31.737.893.189**		**34.787.217.812**		**5.773.622.501**								**5.773.622.501**	**24**	**17**		**5.773.622.501**	**22**	**3.1**		
		4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**95.525.957.012**		**18.270.021.698**		**18.077.485.187**		**2.801.048.488**								**2.801.048.488**	**31**	**15**		**2.801.048.488**	**28**	**2.9**	Sekretariat DPRD	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	86				85												0	0	0		0	0		
		4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			349.577.150		47.903.319		34.385.000		1.310.400								1.310.400	37.5	3.81		1.310.400	37.5	0.37		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi																		0	0			0	0		
		4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			47.082.750		6.252.528		5.175.000		-								-	50	0		-	50	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		3		2		1								1		50	0	1		50	0		
		4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			285.244.400		41.650.791		25.760.000		1.310.400								1.310.400	100	5.09		1.310.400	100	0.46		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		4		4		4								4		100	0	4		100	0		
		4.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			8.625.000		-		1.725.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		4.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			8.625.000		-		1.725.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16.536.604.180		2.574.550.468		3.654.737.765		670.665.465								670.665.465	68.5	18.4		670.665.465	62.5	4.06		
			Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu																		0	0			0	0		
		4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.427.684.180		2.355.734.468		3.348.737.765		626.615.465								626.615.465	112	18.7		626.615.465	100	4.06		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	28		23		25		28								28		112	0	28		100	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.108.920.000		218.816.000		306.000.000		44.050.000								44.050.000	25	14.4		44.050.000	25	3.97		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4		4		4		1								1		25	0	1		25	0		
		4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			146.493.500		23.587.500		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah																		0	0			0	0		
		4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			146.493.500		23.587.500		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			9.426.796.245		2.531.928.815		1.773.033.355		241.126.516								241.126.516	15.6	13.6		241.126.516	13.5	2.56		
			Indeks layanan administrasi perangkat daerah																		0	0			0	0		
		4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			108.336.200		20.805.840		14.915.900		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		3		0								0		0	0	0		0	0		
		4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			426.671.600		742.390.353		338.660.055		18.037.500								18.037.500	25	5.33		18.037.500	25	4.23		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		4		1								1		25	0	1		25	0		
		4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			389.765.275		81.619.470		88.385.550		5.538.075								5.538.075	25	6.27		5.538.075	25	1.42		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		4		1								1		25	0	1		25	0		
		4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			116.363.000		25.214.427		31.448.800		5.399.817								5.399.817	25	17.2		5.399.817	25	4.64		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		4		4		1								1		25	0	1		25	0		
		4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			275.392.600		32.796.400		27.300.000		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4		2		4		0								0		0	0	0		0	0		
		4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			1.190.939.550		339.387.380		321.928.050		-								-	25	0		-	8.33	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		4		4		1								1		25	0	1		8.33	0		
		4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			6.910.703.020		1.289.714.945		948.670.000		212.151.124								212.151.124	25	22.4		212.151.124	25	3.07		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		12		3								3		25	0	3		25	0		
		4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			8.625.000		-		1.725.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.017.769.250		2.128.751.500		80.322.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase ketersediaan BMD																		0	0			0	0		
		4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			4.773.984.000		2.080.300.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		3		0		0								0		0	0	0		0	0		
		4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			243.785.250		48.451.500		80.322.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		3		2		0								0		0	0	0		0	0		
		4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.827.804.452		934.517.492		1.479.462.922		147.600.164								147.600.164	25	9.98		147.600.164	25	2.53		
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah																		0	0			0	0		
		4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.227.726.852		218.405.208		255.146.320		48.799.581								48.799.581	25	19.1		48.799.581	25	3.97		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3								3		25	0	3		25	0		
		4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4.600.077.600		716.112.284		1.224.316.602		98.800.583								98.800.583	25	8.07		98.800.583	25	2.15		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3								3		25	0	3		25	0		
		4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9.311.922.020		719.583.924		1.337.097.960		61.655.170								61.655.170	50	4.61		61.655.170	45.5	0.66		
			Persentase kondisi sarana dan prasara kantor dalam kondisi baik																		0	0			0	0		
		4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.148.320.000		148.827.685		217.600.000		11.900.000								11.900.000	100	5.47		11.900.000	100	1.04		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4		4		4		4								4		100	0	4		100	0		
		4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.915.430.000		294.856.532		307.240.000		47.611.670								47.611.670	100	15.5		47.611.670	77.3	2.49		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	22		17		17		17								17		100	0	17		77.3	0		
		4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			174.790.400		4.955.040		16.000.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	62		19		19		0								0		0	0	0		0	0		
		4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			360.544.000		55.447.040		79.014.360		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	22		20		20		0								0		0	0	0		0	0		
		4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			5.712.837.620		215.497.627		717.243.600		2.143.500								2.143.500	50	0.3		2.143.500	50	0.04		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		2		2		1								1		50	0	1		50	0		
		4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			47.749.278.800		9.146.947.140		9.355.796.440		1.640.262.160								1.640.262.160	33.3	17.5		1.640.262.160	33.3	3.44		
			Persentase terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD																		0	0			0	0		
		4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			46.697.424.450		8.969.069.640		9.143.950.090		1.640.262.160								1.640.262.160	100	17.9		1.640.262.160	100	3.51		
			Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	25		25		25		25								25		100	0	25		100	0		
		4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			895.604.350		177.877.500		180.596.350		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			156.250.000		-		31.250.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	25		0		25		0								0		0	0	0		0	0		
		4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			1.159.711.415		162.251.540		362.649.745		38.428.613								38.428.613	25	10.6		38.428.613	25	3.31		
			Peresentase terlaksananya layanan administrasi DPRD																		0	0			0	0		
		4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			609.630.205		94.277.360		121.977.725		2.434.563								2.434.563	25	2		2.434.563	25	0.4		
			Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	4		4		4		1								1		25	0	1		25	0		
		4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			550.081.210		67.974.180		240.672.020		35.994.050								35.994.050	25	15		35.994.050	25	6.54		
			Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	4		4		4		1								1		25	0	1		25	0		
		4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**93.436.558.805**		**13.467.871.491**		**16.709.732.625**		**2.972.574.013**								**2.972.574.013**	**12**	**18**		**2.972.574.013**	**12**	**3.2**	Sekretariat DPRD	
			Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Ranperda Yang Ditetapkan (%)	100		60		100												0	0			0	0		
		4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			536.567.825		40.828.827		535.240.575		1.792.484								1.792.484	0	0.33		1.792.484	0	0.33		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase terlaksananya pembentukan Perda dan Peraturan DPRD																		0	0			0	0		
		4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			535.417.825		40.828.827		78.345.825		1.792.484								1.792.484	0	2.29		1.792.484	0	0.33		
			Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	5		3		5		0								0		0	0	0		0	0		
		4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah			1.150.000		-		456.894.750		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (Orang)	5.000		0		5000		0								0		0	0	0		0	0		
		4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			2.168.164.000		267.935.332		481.079.400		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran																		0	0			0	0		
		4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS			178.601.400		29.323.818		35.264.300		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			76.384.450		17.014.101		21.725.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD			945.113.200		117.981.406		197.755.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan			815.977.250		78.282.064		190.843.250		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			152.087.700		25.333.943		35.491.850		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			255.446.650		43.408.392		136.827.850		5.470.600								5.470.600	0	4		5.470.600	0	2.14		
			Persentase terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan																		0	0			0	0		
		4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			70.499.400		11.597.871		36.534.150		5.470.600								5.470.600	0	15		5.470.600	0	7.76		
			Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			57.950.200		6.780.389		32.895.100		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			76.998.750		15.731.532		35.264.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			49.998.300		9.298.600		32.134.100		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			10.638.112.000		1.160.740.684		1.868.821.000		67.126.276								67.126.276	41.7	3.59		67.126.276	41.7	0.63		
			Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas DPRD																		0	0			0	0		
		4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD			7.053.728.000		534.386.416		1.230.679.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	1		2		4		0								0		0	0	0		0	0		
		4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			1.350.000.000		294.000.000		420.000.000		49.000.000								49.000.000	100	11.7		49.000.000	100	3.63		
			Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	7		7		7		7								7		100	0	7		100	0		
		4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD			2.234.384.000		332.354.268		218.142.000		18.126.276								18.126.276	25	8.31		18.126.276	25	0.81		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	4		4		4		1								1		25	0	1		25	0		
		4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			35.261.593.000		5.283.835.564		5.383.364.800		1.585.349.575								1.585.349.575	29.2	29.5		1.585.349.575	29.2	4.5		
			Persentase terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat																		0	0			0	0		
		4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah			21.765.226.000		2.675.223.199		2.683.359.000		717.037.075								717.037.075	25	26.7		717.037.075	25	3.29		
			Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	12		4		12		3								3		25	0	3		25	0		
		4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses			13.496.367.000		2.608.612.365		2.700.005.800		868.312.500								868.312.500	33.3	32.2		868.312.500	33.3	6.43		
			Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	3		3		3		1								1		33.3	0	1		33.3	0		
		4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			44.576.675.330		6.671.122.692		8.304.399.000		1.312.835.078								1.312.835.078	25	15.8		1.312.835.078	25	2.95		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		0	0			0	0		
		4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			44.576.675.330		6.671.122.692		8.304.399.000		1.312.835.078								1.312.835.078	25	15.8		1.312.835.078	25	2.95		
			Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	12		12		12		3								3		25	0	3		25	0		
		5.01	**PERENCANAAN**			**88.498.200.554**		**7.454.945.770**		**7.411.038.187**		**1.516.566.619**								**1.516.566.619**	**7.5**	**20**		**1.516.566.619**	**5**	**1.7**		
		5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**62.171.091.954**		**6.360.753.218**		**6.512.811.587**		**1.424.639.939**								**1.424.639.939**	**5.7**	**22**		**1.424.639.939**	**3.9**	**2.3**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	461,9				91.70		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.663.377.725		100.882.130		58.628.300		3.909.321								3.909.321	10.7	6.67		3.909.321	2.42	0.15		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi																		0	0			0	0		
		5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			489.715.425		14.056.117		9.378.900		2.414.151								2.414.151	0	25.7		2.414.151	0	0.49		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	23		6		5		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			490.016.500		86.826.013		46.604.400		1.495.170								1.495.170	42.9	3.21		1.495.170	9.68	0.31		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	31		6		7		3								3		42.9	0	3		9.68	0		
		5.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			841.822.500		-		1.322.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			841.823.300		-		1.322.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	10		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			40.494.300.161		4.785.375.331		5.720.793.405		1.317.921.990								1.317.921.990	0	23		1.317.921.990	0	3.25		
			Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu																		0	0			0	0		
		5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			37.959.702.149		4.504.586.331		5.324.193.605		1.255.771.990								1.255.771.990	0	23.6		1.255.771.990	0	3.31		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	223		37		39		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			2.534.598.012		280.789.000		396.599.800		62.150.000								62.150.000	0	15.7		62.150.000	0	2.45		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			251.545.253		42.957.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah																		0	0			0	0		
		5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			251.545.253		42.957.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	46		0		46		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.452.270.553		261.821.357		230.220.950		24.669.722								24.669.722	10	10.7		24.669.722	10	0.71		
			Indeks layanan administrasi perangkat daerah																		0	0			0	0		
		5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			25.944.878		27.188.649		2.389.000		863.025								863.025	0	36.1		863.025	0	3.33		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		8		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.835.696		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			94.428.115		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			162.344.409		27.188.649		14.985.900		3.669.550								3.669.550	0	24.5		3.669.550	0	2.26		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		10		8		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			80.984.236		17.049.155		7.430.600		3.149.847								3.149.847	0	42.4		3.149.847	0	3.89		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		3		2		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			47.988.333		19.800.000		1.100.000		1.050.000								1.050.000	100	95.5		1.050.000	100	2.19		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			27.014.412		3.974.670		2.495.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.867.151.724		154.695.853		190.043.000		15.937.300								15.937.300	0	8.39		15.937.300	0	0.56		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			22.335.000		-		1.322.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			118.243.750		11.924.381		10.454.450		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10.783.677.950		619.693.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase ketersediaan BMD																		0	0			0	0		
		5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		446.000.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			420.250.000		30.056.500		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		1		0		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			428.750.700		34.521.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		1		3		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.304.302.250		109.115.500		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		13		6		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			630.375.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.916.177.200		209.927.046		238.900.932		37.154.390								37.154.390	0	15.6		37.154.390	0	1.94		
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah																		0	0			0	0		
		5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			923.497.200		96.279.391		118.247.200		17.820.663								17.820.663	0	15.1		17.820.663	0	1.93		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			992.680.000		113.647.655		120.653.732		19.333.727								19.333.727	0	16		19.333.727	0	1.95		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.609.743.112		340.097.354		264.268.000		40.984.516								40.984.516	0	15.5		40.984.516	0	1.57		
			Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik																		0	0			0	0		
		5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			212.120.774		39.052.226		39.190.000		2.647.596								2.647.596	0	6.76		2.647.596	0	1.25		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.107.964.338		201.584.664		204.700.000		38.336.920								38.336.920	0	18.7		38.336.920	0	3.46		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	135		26		27		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			647.635.000		16.180.464		8.730.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	27		13		13		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			622.023.000		-		11.648.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			20.000.000		83.280.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		1		0		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**			**10.042.953.825**		**646.854.516**		**382.679.325**		**40.772.876**								**40.772.876**	**22**	**11**		**40.772.876**	**20**	**0.4**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100				100		100								100		100	0	100		100	0		
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	500				100		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			5.201.668.375		449.101.613		271.890.875		25.657.910								25.657.910	50	9.44		25.657.910	50	0.49		
			Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada/ Perda																		0	0			0	0		
		5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik			1.290.749.775		31.067.194		19.645.475		17.984.946								17.984.946	100	91.6		17.984.946	100	1.39		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1		2		1		1								1		100	0	1		100	0		
		5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			1.332.364.975		65.963.208		53.566.225		551.115								551.115	100	1.03		551.115	100	0.04		
			Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1		2		1		1								1		100	0	1		100	0		
		5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			1.068.624.950		20.218.698		17.980.100		510.300								510.300	0	2.84		510.300	0	0.05		
			Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	25		23.520		235		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			1.509.928.675		331.852.513		180.699.075		6.611.549								6.611.549	0	3.66		6.611.549	0	0.44		
			Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	2		3		2		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			1.062.125.000		11.336.278		7.666.350		3.190.892								3.190.892	0	41.6		3.190.892	0	0.3		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti																		0	0			0	0		
		5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			420.250.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	31		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			641.875.000		11.336.278		7.666.350		3.190.892								3.190.892	0	41.6		3.190.892	0	0.5		
			Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang			1.540.090.200		96.636.350		7.999.600		921.017								921.017	0	11.5		921.017	0	0.06		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Perencanaan Pembangunan Daerah																									
			jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah																		0	0			0	0		
		5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			687.590.450		15.741.869		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			852.499.750		80.894.481		7.999.600		921.017								921.017	0	11.5		921.017	0	0.11		
			Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	1		2		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			2.239.070.250		89.780.275		95.122.500		11.003.057								11.003.057	0	11.6		11.003.057	0	0.49		
			Persentase implementasi SIPD sesuai tahapan perencanaan																		0	0			0	0		
		5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			1.348.570.500		89.780.275		71.069.550		11.003.057								11.003.057	0	15.5		11.003.057	0	0.82		
			Terlaksananya Penerapana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	2		3		2		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			890.499.750		-		24.052.950		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI**			**16.284.154.775**		**447.338.036**		**515.547.275**		**51.153.804**								**51.153.804**	**0**	**9.9**		**51.153.804**	**0**	**0.3**	Badan Perencanaan	

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																								Pembangunan Daerah	
			1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan 3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100				100		0								0		0	0	0		0	0			
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100				100		0								0		0	0	0		0	0			
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100				100		0								0		0	0	0		0	0			
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			5.331.949.825		245.416.190		239.565.425		31.130.151								31.130.151	0	13		31.130.151	0	0.58		
			Meningkatnya hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang pemerintah dan pembangunan manusia																		0	0			0	0		
		5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			420.250.000		21.049.282		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2		16		0		0								0		0	0	0		0	0			
		5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			420.250.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			420.250.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			2.521.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			549.063.150		207.764.499		58.751.350		14.599.725								14.599.725	0	24.9		14.599.725	0	2.66		
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2		0		2		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			272.126.725		-		33.539.525		8.247.134								8.247.134	0	24.6		8.247.134	0	3.03		
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	2		0		32		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			445.480.050		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	2		0		32		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			283.029.900		16.602.409		147.274.550		8.283.292								8.283.292	0	5.62		8.283.292	0	2.93		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	2		1		2		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			5.451.204.950		8.654.699		15.985.250		1.471.638								1.471.638	0	9.21		1.471.638	0	0.03		
			Meningkatnya hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang perekonomian dan SDA																		0	0			0	0		
		5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			385.724.750		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2		0		2		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			427.743.350		3.229.585		5.142.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	2		7		14		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			427.737.050		5.425.114		5.262.950		1.471.638								1.471.638	0	28		1.471.638	0	0.34		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	2		7		14		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			847.999.800		-		5.579.800		-								-	0	0		-	0	0		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	2		0		2		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			840.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			840.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			840.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			840.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			5.501.000.000		193.267.147		259.996.600		18.552.015								18.552.015	0	7.14		18.552.015	0	0.34		
			Meningkatnya hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan																		0	0			0	0		
		5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1.059.878.100		-		6.461.100		1.599.288								1.599.288	0	24.8		1.599.288	0	0.15		
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2		0		2		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			490.462.150		69.095.165		61.186.200		2.928.180								2.928.180	0	4.79		2.928.180	0	0.6		
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	2		8		16		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			457.498.650		38.500.544		30.348.100		4.912.971								4.912.971	0	16.2		4.912.971	0	1.07		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	2		8		16		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			2.190.386.100		85.671.438		162.001.200		9.111.576								9.111.576	0	5.62		9.111.576	0	0.42		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	2		8		2		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			420.250.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			420.250.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			231.137.500		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			231.137.500		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02	**KEUANGAN**			**136.017.725.899**		**14.968.739.449**		**19.055.966.696**		**2.572.912.218**								**2.572.912.218**	**64**	**14**		**2.572.912.218**	**34**	**1.9**		
		5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**63.159.894.410**		**10.312.958.995**		**11.818.150.696**		**2.059.663.976**								**2.059.663.976**	**33**	**17**		**2.059.663.976**	**26**	**3.3**	Badan Keuangan Daerah	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	435		88		85.00		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			300.452.950		39.289.530		52.739.450		1.900.500								1.900.500	25	3.6		1.900.500	25	0.63		
			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi																		0	0			0	0		
		5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			156.895.400		22.525.080		22.858.700		-								-	50	0		-	50	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		2		1								1		50	0	1		50	0		
		5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			105.556.550		16.764.450		21.542.150		1.900.500								1.900.500	50	8.82		1.900.500	50	1.8		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		0		4		2								2		50	0	2		50	0		
		5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			19.000.500		-		3.756.600		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			19.000.500		-		4.582.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			50.466.798.920		8.596.292.163		10.574.842.910		1.944.665.271								1.944.665.271	83.3	18.4		1.944.665.271	83.3	3.85		
			Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			47.579.753.770		8.183.199.548		9.989.978.610		1.870.087.271								1.870.087.271	100	18.7		1.870.087.271	100	3.93		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	62		0		62		62								62		100	0	62		100	0		
		5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			2.750.485.000		388.722.665		565.174.500		66.860.000								66.860.000	100	11.8		66.860.000	100	2.43		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1		0		1		1								1		100	0	1		100	0		
		5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			136.560.150		24.369.950		19.689.800		7.718.000								7.718.000	50	39.2		7.718.000	50	5.65		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4		0		4		2								2		50	0	2		50	0		
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.125.669.500		127.705.500		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah																		0	0			0	0		
		5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			325.669.500		127.705.500		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	65		0		65		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			400.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100		0		100		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			400.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100		0		100		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.662.110.840		382.887.135		469.741.536		74.808.353								74.808.353	22.6	15.9		74.808.353	9.03	1.12		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Indeks layanan administrasi perangkat daerah																		0	0			0	0		
		5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			18.085.800		2.719.500		2.179.100		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8		0		8		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			214.490.640		39.333.439		23.763.586		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	41		0		41		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			143.123.700		25.343.571		24.014.500		3.274.500								3.274.500	100	13.6		3.274.500	4.88	2.29		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	41		0		2		2								2		100	0	2		4.88	0		
		5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12.000.000		1.120.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			271.861.200		53.930.625		59.790.500		10.440.150								10.440.150	25	17.5		10.440.150	25	3.84		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		0		12		3								3		25	0	3		25	0		
		5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			5.983.549.000		260.440.000		356.223.000		61.093.703								61.093.703	33.3	17.2		61.093.703	33.3	1.02		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30		0		30		10								10		33.3	0	10		33.3	0		
		5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			19.000.500		-		3.770.850		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.133.062.200		617.203.350		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Ketersediaan BMD																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		240.452.001		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)			0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			318.099.000		41.896.950		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			814.963.200		334.854.399		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.545.200.000		243.817.726		304.706.800		54.114								54.114	12.5	0.02		54.114	12.5	0		
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah																		0	0			0	0		
		5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			27.600.000		2.992.000		1.510.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3		0		3		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.517.600.000		240.825.726		303.196.800		54.114								54.114	25	0.02		54.114	25	0		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		0		4		1								1		25	0	1		25	0		
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.926.600.000		305.763.591		416.120.000		38.235.738								38.235.738	66.7	9.19		38.235.738	65.7	1.98		
			Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik																		0	0			0	0		
		5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			195.950.000		33.336.719		39.190.000		3.729.044								3.729.044	100	9.52		3.729.044	100	1.9		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		1		1								1		100	0	1		100	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.561.250.000		247.564.604		343.050.000		34.506.694								34.506.694	100	10.1		34.506.694	97.2	2.21		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	36		0		35		35								35		100	0	35		97.2	0		
		5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			169.400.000		24.862.268		33.880.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		0		5		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**53.682.808.519**		**2.387.629.983**		**4.155.087.150**		**265.978.800**								**265.978.800**	**85**	**6.4**		**265.978.800**	**24**	**0.5**	Badan Keuangan Daerah	
			Meningkatnya tata kelola anggaran, Meningkatnya tata kelola perbendaharaan, Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	9				10		0								0		0	0	0		0	0		
				Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	100		100		100												0	0			0	0		
				Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	30				35.00		46.55								46,55		133	0	46,55		155	0		
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			8.160.695.478		1.411.379.515		1.537.978.000		226.213.280								226.213.280	42.6	14.7		226.213.280	42.6	2.77		
			Persentase Belanja Pegawai Terhadap Belanja Daerah Diluar Tunjangan Guru dan Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik																		0	0			0	0		
		5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			150.625.571		25.377.371		26.181.800		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2		0		2		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			153.339.256		23.182.350		25.039.700		3.130.200								3.130.200	50	12.5		3.130.200	50	2.04		
			Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2		0		2		1								1		50	0	1		50	0		
		5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			103.315.782		13.121.310		15.657.650		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			113.996.437		20.089.560		19.766.100		-								-	100	0		-	100	0		
			Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1		0		1		1								1		100	0	1		100	0		
		5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			16.693.516		2.066.490		1.643.150		815.850								815.850	0	49.7		815.850	0	4.89		
			Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			31.753.941		4.328.220		5.194.350		-								-	100	0		-	100	0		
			Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1		0		1		1								1		100	0	1		100	0		
		5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			7.022.147.776		1.234.915.667		1.357.836.950		201.500.000								201.500.000	50	14.8		201.500.000	50	2.87		
			Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2		0		2		1								1		50	0	1		50	0		
		5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			427.576.826		68.145.942		63.753.800		11.550.900								11.550.900	50	18.1		11.550.900	50	2.7		
			Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2		0		2		1								1		50	0	1		50	0		
		5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			141.246.373		20.152.605		22.904.500		9.216.330								9.216.330	33.3	40.2		9.216.330	33.3	6.53		
			Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	3		0		3		1								1		33.3	0	1		33.3	0		
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			4.515.678.961		299.155.877		279.868.550		16.607.820								16.607.820	14.1	5.93		16.607.820	14.1	0.37		
			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan dasar dan Persentase Penurunan SILPA																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			33.421.050		4.724.160		3.979.400		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	3		0		3		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			627.259.754		79.035.795		105.490.000		6.202.680								6.202.680	25	5.88		6.202.680	25	0.99		
			Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	124		0		124		31								31		25	0	31		25	0		
		5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			584.289.206		78.908.537		76.487.100		7.435.890								7.435.890	25	9.72		7.435.890	25	1.27		
			Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	60		0		60		15								15		25	0	15		25	0		
		5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			202.527.531		31.507.350		14.885.000		1.814.850								1.814.850	23.3	12.2		1.814.850	23.3	0.9		
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	750		0		750		175								175		23.3	0	175		23.3	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			285.715.928		42.210.991		29.208.900		1.154.400								1.154.400	25	3.95		1.154.400	25	0.4		
			Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	384		0		384		96								96		25	0	96		25	0		
		5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			60.277.978		-		4.458.800		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	2		0		2		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			2.722.187.514		62.769.044		45.359.350		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	80		0		80		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			8.165.569.422		279.369.250		235.780.200		21.829.000								21.829.000	208	9.26		21.829.000	13.2	0.27		
			Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu																		0	0			0	0		
		5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			27.092.850		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	4		0		4		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban			2.684.470.403		16.227.250		13.218.300		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	86		0		87		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			336.692.092		25.226.620		51.717.350		-								-	19.1	0		-	19.1	0		
			Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	21		0		21		4								4		19.1	0	4		19.1	0		
		5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			2.491.245.247		47.628.050		45.399.750		21.829.000								21.829.000	1850	48.1		21.829.000	100	0.88		
			Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	37		0		2		37								37		1850	0	37		100	0		
		5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			434.083.874		51.864.144		64.995.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	93		0		2		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			167.315.095		4.959.480		3.404.900		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	1		0		2		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			55.092.998		4.183.257		3.312.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			52.337.409		8.318.340		5.499.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			1.917.239.454		120.962.109		48.233.400		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	60		0		154		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			30.200.760.828		4.500.000		2.000.000.000		1.328.700								1.328.700	100	0.07		1.328.700	100	0		
			Persentase Pengelolaan Urusan Kewenangan Daerah dan Bantuan Yang tersalurkan																		0	0			0	0		
		5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			30.200.760.828		4.500.000		2.000.000.000		1.328.700								1.328.700	100	0.07		1.328.700	100	0		
			Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1		0		1		1								1		100	0	1		100	0		
		5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			2.640.103.830		393.225.341		101.460.400		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital																		0	0			0	0		
		5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah			70.444.511		7.332.300		7.923.300		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	44		0		45		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			1.927.941.737		324.257.969		55.558.600		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	3		0		4		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			641.717.582		61.635.072		37.978.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	31		0		32		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			**5.104.994.570**		**281.716.636**		**685.372.550**		**51.821.620**								**51.821.620**	**88**	**7.6**		**51.821.620**	**78**	**1**	Badan Keuangan Daerah	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	7				3		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			5.104.994.570		281.716.636		685.372.550		51.821.620								51.821.620	87.5	7.56		51.821.620	77.8	1.02		
			Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap																		0	0			0	0		
		5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga			296.562.050		18.083.924		51.355.850		2.862.690								2.862.690	100	5.57		2.862.690	100	0.97		
			Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1		0		1		1								1		100	0	1		100	0		
		5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			208.230.700		33.869.598		36.057.200		2.675.100								2.675.100	100	7.42		2.675.100	100	1.28		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2		0		2		2								2		100	0	2		100	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah			1.602.306.500		142.934.230		99.322.500		17.641.000								17.641.000	100	17.8		17.641.000	100	1.1		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	31		0		31		31								31		100	0	31		100	0		
		5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah			1.368.561.420		-		326.808.200		3.885.000								3.885.000	100	1.19		3.885.000	100	0.28		
			Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	31		0		31		31								31		100	0	31		100	0		
		5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah			179.989.200		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			582.861.050		24.103.140		108.753.550		4.947.660								4.947.660	100	4.55		4.947.660	100	0.85		
			Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	31		0		31		31								31		100	0	31		100	0		
		5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			391.679.550		59.275.864		53.163.150		13.847.250								13.847.250	100	26.1		13.847.250	100	3.54		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	31		0		31		31								31		100	0	31		100	0		
		5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			250.804.100		3.449.880		9.912.100		5.962.920								5.962.920	100	60.2		5.962.920	100	2.38		
			Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	31		0		31		31								31		100	0	31		100	0		
		5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			224.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	31		0		0		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**5.819.839.600**		**814.832.183**		**897.356.300**		**67.040.956**								**67.040.956**	**48**	**7.5**		**67.040.956**	**35**	**1.2**	Badan Keuangan Daerah	
			Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah, Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	23				20.00		33								33		165	0	33		143	0		
				Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	100				100		100								100		100	0	100		100	0		
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			5.819.839.600		814.832.183		897.356.300		67.040.956								67.040.956	47.7	7.47		67.040.956	35.4	1.15		
			Persentase Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Daerah																		0	0			0	0		
		5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			698.007.150		14.978.340		50.614.650		11.034.788								11.034.788	25	21.8		11.034.788	25	1.58		
			Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	12		0		12		3								3		25	0	3		25	0		
		5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			1.406.547.900		291.383.187		61.356.100		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	25		0		25		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			699.130.650		107.385.200		127.587.200		7.618.650								7.618.650	25	5.97		7.618.650	25	1.09		
			Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	12		0		12		3								3		25	0	3		25	0		
		5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			182.982.850		35.787.403		16.342.250		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			212.558.100		21.677.628		78.680.050		1.332.000								1.332.000	100	1.69		1.332.000	100	0.63		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	2		0		2		2								2		100	0	2		100	0		
		5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah			431.049.550		34.777.725		37.524.350		4.555.551								4.555.551	25	12.1		4.555.551	25	1.06		
			Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	12		0		12		3								3		25	0	3		25	0		
		5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			-		-		86.942.600		-								-	100	0		-	0	0		
			Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)			0		2		2								2		100	0	2		0	0		
		5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			146.265.400		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	12		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah			160.260.500		30.435.915		62.530.200		-								-	100	0		-	100	0		
			Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	1		0		1		1								1		100	0	1		100	0		
		5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			126.965.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	12		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			509.090.000		54.830.436		78.476.200		-								-	25	0		-	25	0		
			Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	12		0		12		3								3		25	0	3		25	0		
		5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			461.603.000		86.110.295		88.426.900		11.271.000								11.271.000	100	12.8		11.271.000	100	2.44		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1		0		1		1								1		100	0	1		100	0		
		5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			785.379.500		137.466.054		208.875.800		31.228.967								31.228.967	25	15		31.228.967	25	3.98		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	12		0		12		3								3		25	0	3		25	0		
		5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7.100.000.000**		**962.386.011**		**1.500.000.000**		**128.406.866**								**128.406.866**	**100**	**8.6**		**128.406.866**	**100**	**1.8**	UPTD Fasilitasi Pembiayaan	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	89		88		85.00		89.98								89,98		106	0	89,98		101	0		
		5.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			7.100.000.000		962.386.011		1.500.000.000		128.406.866								128.406.866	100	8.56		128.406.866	100	1.81		
			Persentase Fasilitasi Pembiayaan																		0	0			0	0		
		5.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			7.100.000.000		962.386.011		1.500.000.000		128.406.866								128.406.866	100	8.56		128.406.866	100	1.81		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		0		1		1								1		100	0	1		100	0		
		5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**1.150.188.800**		**209.215.641**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	UPTD Pajak Daerah	
			Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah, Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	23				20.00		33								33		165	0	33		143	0		
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			1.150.188.800		209.215.641		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Daerah																		0	0			0	0		
		5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			1.150.188.800		209.215.641		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		5.03	**KEPEGAWAIAN**			**145.128.840.070**		**15.606.918.378**		**8.948.963.463**		**1.555.431.531**								**1.555.431.531**	**16**	**17**		**1.555.431.531**	**3.1**	**1.1**		
		5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**126.439.002.346**		**14.543.979.951**		**7.880.358.263**		**1.541.271.531**								**1.541.271.531**	**20**	**20**		**1.541.271.531**	**4**	**1.2**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	459,5		89,43		91.30		0								0		0	0	0		0	0		
		5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.514.570.150		162.018.909		234.755.000		23.882.500								23.882.500	6.25	10.2		23.882.500	1.25	0.95		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi																		0	0			0	0		
		5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			165.246.650		5.184.299		4.205.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		4		4		0								0		0	0	0		0	0		
		5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.266.908.500		156.834.610		227.330.000		23.882.500								23.882.500	25	10.5		23.882.500	5	1.05		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		4		4		1								1		25	0	1		5	0		
		5.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			41.207.500		-		1.610.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.03.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			41.207.500		-		1.610.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			107.693.196.846		13.587.221.194		7.118.817.737		1.470.874.406								1.470.874.406	24.8	20.7		1.470.874.406	4.96	1.37		
			Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu																		0	0			0	0		
		5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			106.199.436.846		13.368.345.194		6.825.127.737		1.429.774.406								1.429.774.406	24.6	21		1.429.774.406	4.92	1.35		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.665		291		333		82								82		24.6	0	82		4.92	0		
		5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.493.760.000		218.876.000		293.690.000		41.100.000								41.100.000	25	14		41.100.000	5	2.75		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		12		12		3								3		25	0	3		5	0		
		5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			451.400.400		47.345.187		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			451.400.400		47.345.187		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	380		70		74		0								0		0	0	0		0	0		
		5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.263.640.470		174.604.004		150.348.270		23.554.000								23.554.000	0.83	15.7		23.554.000	0.17	0.72		
			Indeks layanan administrasi perangkat daerah																		0	0			0	0		
		5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			170.789.500		10.838.995		10.789.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			160.000.000		22.671.750		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			191.469.020		30.947.640		29.768.020		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			172.985.200		11.706.250		12.200.000		210.000								210.000	0	1.72		210.000	0	0.12		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			164.493.500		4.320.000		4.493.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	10		2		2		0								0		0	0	0		0	0		
		5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			162.673.750		1.317.750		1.489.250		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	25		5		3		0								0		0	0	0		0	0		
		5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.200.022.000		92.801.619		89.998.000		23.344.000								23.344.000	6.67	25.9		23.344.000	1.33	1.06		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	150		30		30		2								2		6.67	0	2		1.33	0		
		5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			41.207.500		-		1.610.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6.001.500.000		310.028.550		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase ketersediaan BMD																		0	0			0	0		
		5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2.000.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	11		0		3		0								0		0	0	0		0	0		
		5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			2.000.500.000		56.399.100		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	110		56		3		0								0		0	0	0		0	0		
		5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.000.500.000		253.629.450		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	54		16		8		0								0		0	0	0		0	0		
		5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.388.168.480		107.520.340		169.911.256		13.690.125								13.690.125	66.7	8.06		13.690.125	13.3	0.99		
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah																		0	0			0	0		
		5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			286.988.480		40.715.142		46.988.480		1.640.968								1.640.968	100	3.49		1.640.968	20	0.57		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		1								1		100	0	1		20	0		
		5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			163.980.000		6.549.000		3.980.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			937.200.000		60.256.198		118.942.776		12.049.157								12.049.157	100	10.1		12.049.157	20	1.29		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		1								1		100	0	1		20	0		
		5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.126.526.000		155.241.767		206.526.000		9.270.500								9.270.500	66.7	4.49		9.270.500	13.3	0.18		
			Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik																		0	0			0	0		
		5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			279.190.000		41.855.120		39.190.000		5.520.500								5.520.500	100	14.1		5.520.500	20	1.98		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		1								1		100	0	1		20	0		
		5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			918.200.000		113.386.647		118.200.000		3.750.000								3.750.000	100	3.17		3.750.000	20	0.41		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	70		14		14		14								14		100	0	14		20	0		
		5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			3.929.136.000		-		49.136.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**			**18.689.837.724**		**1.062.938.427**		**1.068.605.200**		**14.160.000**								**14.160.000**	**6.4**	**1.3**		**14.160.000**	**1.3**	**0.1**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Meningkatnya peningkatakan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	60		12		12.00		0								0		0	0	0		0	0		
		5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			4.418.059.000		120.186.208		109.021.700		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase penerimaan PNS sesuai dengan formasi yang dibutuhkan																		0	0			0	0		
		5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			205.059.600		4.668.021		5.059.600		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN			2.004.999.750		107.837.515		95.962.450		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (Laporan)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			202.999.700		2.895.768		2.999.700		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			2.004.999.950		4.784.904		4.999.950		-								-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			3.214.999.350		564.931.137		479.594.550		13.660.000								13.660.000	22.2	2.85		13.660.000	4.44	0.42		
			Persentase penyusunan formasi yang sesuai dengan analisis jabatan																		0	0			0	0		
		5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN			404.999.950		5.505.008		4.999.950		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	25		5		5		0								0		0	0	0		0	0		
		5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			804.999.350		5.931.203		30.197.850		5.100.000								5.100.000	16.7	16.9		5.100.000	3.33	0.63		
			Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	30		6		6		1								1		16.7	0	1		3.33	0		
		5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN			2.005.000.050		553.494.926		444.396.750		8.560.000								8.560.000	50	1.93		8.560.000	10	0.43		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	10		2		2		1								1		50	0	1		10	0		
		5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			8.441.149.374		322.264.565		292.270.450		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase PNS yang difasilitasi tugas belajar dan izin belajar untuk Pengembangan Kompetensi ASN																		0	0			0	0		
		5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			8.441.149.374		322.264.565		292.270.450		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	75		15		15		0								0		0	0	0		0	0		
		5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			2.615.630.000		55.556.517		187.718.500		500.000								500.000	2.5	0.27		500.000	0.5	0.02		
			Persentase penilaian kinerja yang sesuai ketentuan perundang-undanga																		0	0			0	0		
		5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			203.967.100		2.316.903		59.631.050		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			2.002.718.550		42.962.455		79.338.550		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	1.250		250		250		0								0		0	0	0		0	0		
		5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN			204.479.050		4.336.615		34.856.300		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	50		10		10		0								0		0	0	0		0	0		
		5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai			204.465.300		5.940.544		13.892.600		500.000								500.000	10	3.6		500.000	2	0.24		
			Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	50		25		10		1								1		10	0	1		2	0		
		5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**9.281.926.321**		**574.193.520**		**608.670.550**		**4.662.000**								**4.662.000**	**0**	**0.8**		**4.662.000**	**0**	**0.1**		
		5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			**9.281.926.321**		**574.193.520**		**608.670.550**		**4.662.000**								**4.662.000**	**0**	**0.8**		**4.662.000**	**0**	**0.1**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	60		12		12.00		0								0		0	0	0		0	0		
		5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis			4.005.081.450		184.241.705		256.347.050		4.662.000								4.662.000	0	1.82		4.662.000	0	0.12		
			Persentase ASN yang memiliki sertifikat Kompetensi Teknis																		0	0			0	0		
		5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			4.005.081.450		184.241.705		256.347.050		4.662.000								4.662.000	0	1.82		4.662.000	0	0.12		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	640		100		100		0								0		0	0	0		0	0		
		5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			5.276.844.871		389.951.815		352.323.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase ASN yang memiliki sertifikat Kompetensi Manajerial																		0	0			0	0		
		5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			1.271.844.821		222.920.235		145.570.100		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	5		2		1		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan			4.005.000.050		167.031.580		206.753.400		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama (Dokumen)	10		2		2		0								0		0	0	0		0	0		
		5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**13.349.999.500**		**199.945.512**		**214.274.550**		**5.747.447**								**5.747.447**	**0**	**2.7**		**5.747.447**	**0**	**0**		
		5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			**11.555.000.000**		**199.945.512**		**145.175.850**		**1.631.034**								**1.631.034**	**0**	**1.1**		**1.631.034**	**0**	**0**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	427				80		0								0		0	0	0		0	0		
		5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			4.352.500.000		99.972.489		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya kualitas kajian perencanaan pembangunan di bidang sosial dan kependudukan melalui data, analisis, dan informasi yang akurat																		0	0			0	0		
		5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial			2.251.250.000		99.972.489		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan			2.101.250.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata			-		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)			0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			7.202.500.000		99.973.023		145.175.850		1.631.034								1.631.034	0	1.12		1.631.034	0	0.02		
			Meningkatnya kualitas kajian perencanaan pembangunan di bidang Ekonomi dan Pembangunan melalui data, analisis, dan informasi yang akurat																		0	0			0	0		
		5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			2.251.250.000		99.973.023		145.175.850		1.631.034								1.631.034	0	1.12		1.631.034	0	0.07		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan			2.101.250.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			1.425.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		5.05.02.2.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan			1.425.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			-		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
		5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			-		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)			0		2		0								0		0	0	0		0	0		
		5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			-		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)			0		5		0								0		0	0	0		0	0		
		5.05.03	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**			**1.794.999.500**		**-**		**69.098.700**		**4.116.413**								**4.116.413**	**0**	**6**		**4.116.413**	**0**	**0.2**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	452,5				85		0								0		0	0	0		0	0		
		5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi			1.794.999.500		-		69.098.700		4.116.413								4.116.413	0	5.96		4.116.413	0	0.23		
			Meningkatnya daya saing dan kinerja daerah melalui penerapan inovasi yang berkelanjutan																		0	0			0	0		
		5.05.03.2.02.0004	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah			1.304.999.600		-		69.098.700		4.116.413								4.116.413	0	5.96		4.116.413	0	0.32		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0			
		5.05.03.2.02.0007	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi			489.999.900		-		-		-								-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi (Laporan)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0			
		6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**			**83.057.652.606**		**9.583.690.722**		**10.001.033.141**		**1.775.014.126**								**1.775.014.126**	**24**	**18**		**1.775.014.126**	**2.9**	**2.1**		
		6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**65.750.373.968**		**8.597.287.618**		**9.324.339.841**		**1.676.159.126**								**1.676.159.126**	**14**	**18**		**1.676.159.126**	**2**	**2.6**	Inspektorat	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	90				89.00		0								0		0	0	0		0	0			
		6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.244.184.000		101.289.611		43.121.300		-								-	0	0		-	0	0			
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi																		0	0			0	0			
		6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			244.846.500		8.681.379		2.995.050		-								-	0	0		-	0	0			
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	35		7		7		0								0		0	0	0		0	0			
		6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			883.112.500		92.608.232		38.113.750		-								-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	25		5		5		0								0		0	0	0		0	0			
		6.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			58.112.500		-		1.006.250		-								-	0	0		-	0	0			
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0			
		6.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			58.112.500		-		1.006.250		-								-	0	0		-	0	0			

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			45.142.744.318		6.728.379.561		8.515.275.027		1.625.654.144								1.625.654.144	54.2	19.1		1.625.654.144	9.91	3.6		
			Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu																		0	0			0	0		
		6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			43.677.944.318		6.570.407.561		8.262.315.027		1.596.049.144								1.596.049.144	100	19.3		1.596.049.144	18.2	3.65		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	303		62		55		55								55		100	0	55		18.2	0		
		6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.464.800.000		157.972.000		252.960.000		29.605.000								29.605.000	8.33	11.7		29.605.000	1.67	2.02		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		12		12		1								1		8.33	0	1		1.67	0		
		6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.654.170.500		84.123.822		197.218.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah																		0	0			0	0		
		6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			352.781.000		53.900.007		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	280		55		0		0								0		0	0	0		0	0		
		6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			3.891.201.250		-		197.218.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	98		0		12		0								0		0	0	0		0	0		
		6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			410.188.250		30.223.815		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	70		5		0		0								0		0	0	0		0	0		
		6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.472.845.050		564.642.437		153.745.060		-								-	0	0		-	0	0		
			Indeks layanan administrasi perangkat daerah																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		6.01.01.2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			59.744.500		3.873.900		2.034.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		6.01.01.2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.369.850.000		131.098.770		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		1		0		0								0		0	0	0		0	0		
		6.01.01.2.06.0 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.191.102.500		190.086.202		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	25		1		5		0								0		0	0	0		0	0		
		6.01.01.2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			469.280.800		69.747.744		27.511.460		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		6.01.01.2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			172.345.000		22.853.477		4.061.600		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		3		1		0								0		0	0	0		0	0		
		6.01.01.2.06.0 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			38.683.500		4.160.556		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		6.01.01.2.06.0 008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			132.181.250		9.415.500		4.002.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		12		12		0								0		0	0	0		0	0		
		6.01.01.2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.964.645.000		133.406.288		115.021.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	240		48		12		0								0		0	0	0		0	0		
		6.01.01.2.06.0 010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			75.012.500		-		1.115.000		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12		0		12		0								0		0	0	0		0	0		
		6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.186.869.750		754.787.790		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase ketersediaan BMD																		0	0			0	0		
		6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan ()			0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2.720.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	16		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			1.502.256.000		302.613.750		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		1		0		0								0		0	0	0		0	0		
		6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			964.613.750		452.174.040		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		1		0		0								0		0	0	0		0	0		
		6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.015.160.350		85.642.203		130.860.454		9.733.581								9.733.581	25	7.44		9.733.581	5	0.96		
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah																		0	0			0	0		
		6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.015.160.350		85.642.203		130.860.454		9.733.581								9.733.581	25	7.44		9.733.581	5	0.96		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		25	0	3		5	0		
		6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.034.400.000		278.422.194		284.120.000		40.771.401								40.771.401	41.1	14.4		40.771.401	8.22	2		
			Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			195.950.000		35.647.100		39.190.000		6.197.400								6.197.400	100	15.8		6.197.400	20	3.16		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		1								1		100	0	1		20	0		
		6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.582.000.000		227.813.106		236.400.000		34.574.001								34.574.001	23.3	14.6		34.574.001	4.67	2.19		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	150		30		30		7								7		23.3	0	7		4.67	0		
		6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			256.450.000		14.961.988		8.530.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	96		19		20		0								0		0	0	0		0	0		
		6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			**13.524.033.410**		**695.178.910**		**645.078.300**		**94.265.000**								**94.265.000**	**16**	**15**		**94.265.000**	**3.4**	**0.7**	Inspektorat	
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	4				3		0								0		0	0	0		0	0		
		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			11.120.423.160		538.370.160		498.059.550		75.735.000								75.735.000	15.9	15.2		75.735.000	3.17	0.68		
			Persentase pelaksanaan pengawasan Internal																		0	0			0	0		
		6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			3.508.086.250		126.632.980		175.006.650		7.480.000								7.480.000	9.68	4.27		7.480.000	1.94	0.21		
			Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	155		31		31		3								3		9.68	0	3		1.94	0		
		6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			6.945.274.410		373.012.930		275.002.900		57.460.000								57.460.000	12.9	20.9		57.460.000	2.58	0.83		
			Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	155		31		31		4								4		12.9	0	4		2.58	0		
		6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan			667.062.500		38.724.250		48.050.000		10.795.000								10.795.000	25	22.5		10.795.000	5	1.62		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																									
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	20		4		4		1								1		25	0	1		5	0		
		6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			2.403.610.250		156.808.750		147.018.750		18.530.000								18.530.000	15	12.6		18.530.000	3.75	0.77		
			Persentase pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu																		0	0			0	0		
		6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			401.760.000		24.821.500		26.990.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	20		4		4		0								0		0	0	0		0	0		
		6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			2.001.850.250		131.987.250		120.028.750		18.530.000								18.530.000	30	15.4		18.530.000	7.5	0.93		
			Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	40		10		10		3								3		30	0	3		7.5	0		
		6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**			**3.783.245.228**		**291.224.194**		**31.615.000**		**4.590.000**								**4.590.000**	**150**	**15**		**4.590.000**	**13**	**0.1**	Inspektorat	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	16				3		0								0		0	0	0		0	0		
		6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			3.783.245.228		291.224.194		31.615.000		4.590.000								4.590.000	150	14.5		4.590.000	12.5	0.12		
			Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan																		0	0			0	0		
		6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			1.426.815.000		50.265.500		30.005.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	31		31		31		0								0		0	0	0		0	0		
		6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			2.356.430.228		240.958.694		1.610.000		4.590.000								4.590.000	300	285		4.590.000	25	0.19		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	12		12		1		3								3		300	0	3		25	0		
		7.01	**KECAMATAN**			**345.648.622.399**		**48.915.025.330**		**56.554.997.965**		**10.142.792.873**								**10.142.792.873**	**37**	**18**		**10.142.792.873**	**48**	**2.9**		
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**65.802.998.801**		**11.373.104.811**		**14.714.753.852**		**2.649.003.478**								**2.649.003.478**	**13**	**18**		**2.649.003.478**	**6.9**	**4**	Kecamatan Payakumbuh Barat	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	459		93,52		91												0	0			0	0		
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			773.238.640		136.054.822		161.745.200		18.989.000								18.989.000	13.4	11.7		18.989.000	13.4	2.46		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi																		0	0			0	0		
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			350.042.200		38.827.550		55.147.700		3.108.000								3.108.000	25	5.64		3.108.000	25	0.89		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		1		4		1								1		25	0	1		25	0		
		7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			413.133.940		97.227.272		104.182.500		15.881.000								15.881.000	28.6	15.2		15.881.000	28.6	3.84		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7		1		7		2								2		28.6	0	2		28.6	0		
		7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			5.031.250		-		1.207.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			5.031.250		-		1.207.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			46.533.024.881		9.051.491.262		12.600.365.076		2.365.097.641								2.365.097.641	33.3	18.8		2.365.097.641	33.3	5.08		
			Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			42.480.624.881		8.342.317.262		11.797.325.076		2.178.272.641								2.178.272.641	33.3	18.5		2.178.272.641	33.3	5.13		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	90		0		90		30								30		33.3	0	30		33.3	0		
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			4.052.400.000		709.174.000		803.040.000		186.825.000								186.825.000	33.3	23.3		186.825.000	33.3	4.61		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		79		12		4								4		33.3	0	4		33.3	0		
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			360.000.000		70.310.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Penyediaan Layananan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		0	0			0	0		
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			360.000.000		70.310.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	90		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.003.732.720		217.337.963		121.445.140		-								-	0	0		-	0	0		
			Indeks layanan administrasi perangkat daerah																		0	0			0	0		
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			105.179.650		11.427.450		3.668.250		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		3		6		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			876.559.620		143.430.441		74.572.390		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7		0		7		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			110.000.200		9.776.909		8.135.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		1		3		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			48.000.000		4.145.210		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.095		2.427		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			48.000.000		2.053.500		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			690.962.000		46.504.453		33.862.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		3		12		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			5.031.250		-		1.207.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6.420.111.000		352.192.601		60.111.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase ketersediaan BMD																		0	0			0	0		
		7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			600.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			160.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			200.000.000		55.333.500		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			460.111.000		183.649.500		60.111.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		5		3		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.200.000.000		113.209.601		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.068.513.240		1.133.200.048		1.425.095.736		231.301.497								231.301.497	33.3	16.2		231.301.497	22.2	3.81		
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah																		0	0			0	0		
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			492.530.000		79.158.815		156.011.700		20.150.394								20.150.394	33.3	12.9		20.150.394	33.3	4.09		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		12		4								4		33.3	0	4		33.3	0		
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			5.455.983.240		1.054.041.233		1.269.084.036		211.151.103								211.151.103	33.3	16.6		211.151.103	33.3	3.87		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		12		4								4		33.3	0	4		33.3	0		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.644.378.320		412.518.115		345.991.700		33.615.340								33.615.340	10.9	9.72		33.615.340	4.68	0.92		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik																		0	0			0	0		
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			120.000.000		234.126.064		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.933.200.000		-		235.750.000		33.615.340								33.615.340	32.8	14.3		33.615.340	32.8	1.74		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	61		0		61		20								20		32.8	0	20		32.8	0		
		7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			200.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			199.674.360		42.368.390		30.760.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50		0		37		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			471.503.960		136.023.661		79.481.700		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		2		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			400.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana			320.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																									
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**3.624.144.406**		**34.752.012**		**42.338.800**		**22.240.400**								**22.240.400**	**50**	**53**		**22.240.400**	**50**	**0.6**	Kecamatan Payakumbuh Barat	
			Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu (%)	85		85		85												0	0			0	0		
				Persentase usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah (%)	375		75		75												0	0			0	0		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			2.723.148.592		30.594.012		37.353.550		22.240.400								22.240.400	100	59.5		22.240.400	100	0.82		
			Persentase Usulan Musrenbang yang menjadi skala prioritas																		0	0			0	0		
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			2.723.148.592		30.594.012		37.353.550		22.240.400								22.240.400	100	59.5		22.240.400	100	0.82		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1		0		1		1								1		100	0	1		100	0		
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			900.995.814		4.158.000		4.985.250		-								-	0	0		-	0	0		
			Pesentase ketersediaan dokumen pelayanan publik																		0	0			0	0		
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			900.995.814		4.158.000		4.985.250		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2		0		2		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**5.152.032.282**		**239.729.227**		**66.802.800**		**9.126.000**								**9.126.000**	**17**	**14**		**9.126.000**	**17**	**0.2**	Kecamatan Payakumbuh Barat	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	500		100		100												0	0			0	0		
				Nilai IKM (Indeks)	92		93,52		91												0	0			0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			2.632.436.566		148.739.893		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam kondisi Baik																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			2.632.436.566		148.739.893		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	3		0		3		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			2.519.595.716		90.989.334		66.802.800		9.126.000								9.126.000	33.3	13.7		9.126.000	33.3	0.36		
			Persentase Kegiatan lingkup Pemberdayaan yang difasilitasi																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			2.519.595.716		90.989.334		66.802.800		9.126.000								9.126.000	33.3	13.7		9.126.000	33.3	0.36		
			Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	3		0		3		1								1		33.3	0	1		33.3	0		
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**2.521.344.913**		**10.552.360**		**12.515.425**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Kecamatan Payakumbuh Barat	
			Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	100		100		100												0	0			0	0		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan			2.521.344.913		10.552.360		12.515.425		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Ketenteraman dan Ketertiban Umum																									
			Persentase Kegiatan lingkup Trantib yang difasilitasi																		0	0			0	0		
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			2.521.344.913		10.552.360		12.515.425		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**4.766.218.624**		**82.925.459**		**187.608.200**		**200.000**								**200.000**	**17**	**0.1**		**200.000**	**17**	**0**	Kecamatan Payakumbuh Barat	
			Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi (%)	100		100		100												0	0			0	0		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			4.766.218.624		82.925.459		187.608.200		200.000								200.000	16.7	0.11		200.000	16.7	0		
			Persentase Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Lembaga Kemasyarakatan yang terlaksana																		0	0			0	0		
		7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			4.634.425.984		65.623.649		148.636.600		200.000								200.000	33.3	0.13		200.000	33.3	0		
			Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	3		0		3		1								1		33.3	0	1		33.3	0		
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			131.792.640		17.301.810		38.971.600		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	3		0		3		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.494.837.190**		**209.417.927**		**200.027.995**		**17.591.350**								**17.591.350**	**29**	**8.8**		**17.591.350**	**27**	**1.2**	Kelurahan Bulakan Balai Kandi	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	92		93,52		91												0	0			0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100		100												0	0			0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.494.837.190		209.417.927		200.027.995		17.591.350								17.591.350	29.2	8.79		17.591.350	26.7	1.18		
			Persentase terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			669.235.421		137.491.645		65.975.160		10.992.600								10.992.600	25	16.7		10.992.600	20	1.64		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		0		4		1								1		25	0	1		20	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			825.601.769		71.926.282		134.052.835		6.598.750								6.598.750	33.3	4.92		6.598.750	33.3	0.8		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		0		3		1								1		33.3	0	1		33.3	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.494.836.305**		**214.311.095**		**200.007.980**		**63.360.400**								**63.360.400**	**29**	**32**		**63.360.400**	**27**	**4.2**	Kelurahan Ibuh	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	92		93,52		91												0	0			0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100		100												0	0			0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.494.836.305		214.311.095		200.007.980		63.360.400								63.360.400	29.2	31.7		63.360.400	26.7	4.24		
			Persentase terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			709.905.971		149.023.925		76.045.160		52.684.000								52.684.000	25	69.3		52.684.000	20	7.42		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		0		4		1								1		25	0	1		20	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			784.930.334		65.287.170		123.962.820		10.676.400								10.676.400	33.3	8.61		10.676.400	33.3	1.36		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		0		3		1								1		33.3	0	1		33.3	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.494.837.236**		**260.088.226**		**200.230.840**		**12.701.250**								**12.701.250**	**29**	**6.3**		**12.701.250**	**27**	**0.9**	Kelurahan Koto Tangah	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	92		93,52		91												0	0			0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100		100												0	0			0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.494.837.236		260.088.226		200.230.840		12.701.250								12.701.250	29.2	6.34		12.701.250	26.7	0.85		
			Persentase terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			705.030.221		214.520.977		99.460.440		4.800.000								4.800.000	25	4.83		4.800.000	20	0.68		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		0		4		1								1		25	0	1		20	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			789.807.015		45.567.249		100.770.400		7.901.250								7.901.250	33.3	7.84		7.901.250	33.3	1		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		0		3		1								1		33.3	0	1		33.3	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.494.838.370**		**217.970.704**		**200.000.365**		**29.921.950**								**29.921.950**	**29**	**15**		**29.921.950**	**27**	**2**	Kelurahan Kubu Gadang	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	92		93,52		91												0	0			0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100		100												0	0			0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.494.838.370		217.970.704		200.000.365		29.921.950								29.921.950	29.2	15		29.921.950	26.7	2		
			Persentase terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			719.550.231		190.093.891		104.823.590		24.426.990								24.426.990	25	23.3		24.426.990	20	3.39		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		0		4		1								1		25	0	1		20	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			775.288.139		27.876.813		95.176.775		5.494.960								5.494.960	33.3	5.77		5.494.960	33.3	0.71		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		0		3		1								1		33.3	0	1		33.3	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.494.837.494**		**200.012.836**		**200.000.316**		**31.523.020**								**31.523.020**	**29**	**16**		**31.523.020**	**27**	**2.1**	Kelurahan Labuah Basilang	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	92		93,52		91												0	0			0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100		100												0	0			0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.494.837.494		200.012.836		200.000.316		31.523.020								31.523.020	29.2	15.8		31.523.020	26.7	2.11		
			Persentase terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			664.822.080		142.661.205		53.232.216		13.356.000								13.356.000	25	25.1		13.356.000	20	2.01		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		0		4		1								1		25	0	1		20	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			830.015.414		57.351.631		146.768.100		18.167.020								18.167.020	33.3	12.4		18.167.020	33.3	2.19		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		0		3		1								1		33.3	0	1		33.3	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.494.836.185**		**217.621.098**		**199.998.960**		**31.071.730**								**31.071.730**	**29**	**16**		**31.071.730**	**27**	**2.1**	Kelurahan Subarang Batuang	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100		100												0	0			0	0		
				Nilai IKM (Indeks)	92		93,52		91												0	0			0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.494.836.185		217.621.098		199.998.960		31.071.730								31.071.730	29.2	15.5		31.071.730	26.7	2.08		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			677.485.521		169.043.955		51.977.810		15.748.550								15.748.550	25	30.3		15.748.550	20	2.32		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		1		4		1								1		25	0	1		20	0		
		7.01.03.2.02.0 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			817.350.664		48.577.143		148.021.150		15.323.180								15.323.180	33.3	10.4		15.323.180	33.3	1.87		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		0		3		1								1		33.3	0	1		33.3	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.494.837.475**		**250.666.833**		**200.000.060**		**21.211.725**								**21.211.725**	**29**	**11**		**21.211.725**	**27**	**1.4**	Kelurahan Nunang Daya Bangun	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100		100												0	0			0	0		
				Nilai IKM (Indeks)	92		93,52		91												0	0			0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.494.837.475		250.666.833		200.000.060		21.211.725								21.211.725	29.2	10.6		21.211.725	26.7	1.42		
			Persentase terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			686.265.911		171.238.705		76.785.510		5.799.000								5.799.000	25	7.55		5.799.000	20	0.85		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		1		4		1								1		25	0	1		20	0		
		7.01.03.2.02.0 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			808.571.564		79.428.128		123.214.550		15.412.725								15.412.725	33.3	12.5		15.412.725	33.3	1.91		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		0		3		1								1		33.3	0	1		33.3	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.494.837.441**		**213.627.652**		**200.000.365**		**21.661.065**								**21.661.065**	**29**	**11**		**21.661.065**	**27**	**1.5**	Kelurahan Padangdata Tanahmati	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	459		93,52		91												0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100		100												0	0			0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.494.837.441		213.627.652		200.000.365		21.661.065								21.661.065	29.2	10.8		21.661.065	26.7	1.45		
			Persentase terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			720.653.721		173.303.145		80.870.510		3.400.000								3.400.000	25	4.2		3.400.000	20	0.47		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		2		4		1								1		25	0	1		20	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			774.183.720		40.324.507		119.129.855		18.261.065								18.261.065	33.3	15.3		18.261.065	33.3	2.36		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		0		3		1								1		33.3	0	1		33.3	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.494.837.995**		**215.350.224**		**200.003.110**		**29.313.150**								**29.313.150**	**29**	**15**		**29.313.150**	**27**	**2**	Kelurahan Padang Tinggi Piliang	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	92		93,52		91												0	0			0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100		100												0	0			0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.494.837.995		215.350.224		200.003.110		29.313.150								29.313.150	29.2	14.7		29.313.150	26.7	1.96		
			Persentase terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			660.385.771		139.637.855		47.690.410		16.209.400								16.209.400	25	34		16.209.400	20	2.45		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		2		4		1								1		25	0	1		20	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			834.452.224		75.712.369		152.312.700		13.103.750								13.103.750	33.3	8.6		13.103.750	33.3	1.57		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		1		3		1								1		33.3	0	1		33.3	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.494.838.352**		**218.580.597**		**200.000.350**		**84.270.200**								**84.270.200**	**29**	**42**		**84.270.200**	**27**	**5.6**	Kelurahan Padangtongah Balainanduo	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	92		93,52		91												0	0			0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100		100												0	0			0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.494.838.352		218.580.597		200.000.350		84.270.200								84.270.200	29.2	42.1		84.270.200	26.7	5.64		
			Persentase terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			701.601.213		186.118.167		99.490.550		72.894.880								72.894.880	25	73.3		72.894.880	20	10.4		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		1		4		1								1		25	0	1		20	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			793.237.139		32.462.430		100.509.800		11.375.320								11.375.320	33.3	11.3		11.375.320	33.3	1.43		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		1		3		1								1		33.3	0	1		33.3	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.494.837.565**		**213.481.248**		**200.000.340**		**24.700.493**								**24.700.493**	**29**	**12**		**24.700.493**	**27**	**1.7**	Kelurahan Pakan Sinayan	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	92		93,52		91												0	0			0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100		100												0	0			0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.494.837.565		213.481.248		200.000.340		24.700.493								24.700.493	29.2	12.4		24.700.493	26.7	1.65		
			Persentase terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			677.001.221		135.975.395		57.762.810		9.594.320								9.594.320	25	16.6		9.594.320	20	1.42		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		2		4		1								1		25	0	1		20	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			817.836.344		77.505.853		142.237.530		15.106.173								15.106.173	33.3	10.6		15.106.173	33.3	1.85		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		1		3		1								1		33.3	0	1		33.3	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.494.839.080**		**196.927.924**		**200.000.055**		**31.911.450**								**31.911.450**	**29**	**16**		**31.911.450**	**27**	**2.1**	Kelurahan Parak Batuang	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	92		93,52		91												0	0			0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100		100												0	0			0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.494.839.080		196.927.924		200.000.055		31.911.450								31.911.450	29.2	16		31.911.450	26.7	2.13		
			Persentase terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			705.790.521		153.244.548		89.194.560		15.664.000								15.664.000	25	17.6		15.664.000	20	2.22		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		2		4		1								1		25	0	1		20	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			789.048.559		43.683.376		110.805.495		16.247.450								16.247.450	33.3	14.7		16.247.450	33.3	2.06		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		1		3		1								1		33.3	0	1		33.3	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.494.837.560**		**199.338.761**		**200.000.155**		**16.265.776**								**16.265.776**	**29**	**8.1**		**16.265.776**	**27**	**1.1**	Kelurahan Parit Rantang	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	92		93,52		91												0	0			0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100		100												0	0			0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.494.837.560		199.338.761		200.000.155		16.265.776								16.265.776	29.2	8.13		16.265.776	26.7	1.09		
			Persentase terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			701.022.621		122.993.744		76.494.360		4.237.850								4.237.850	25	5.54		4.237.850	20	0.6		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		2		4		1								1		25	0	1		20	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			793.814.939		76.345.017		123.505.795		12.027.926								12.027.926	33.3	9.74		12.027.926	33.3	1.52		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		1		3		1								1		33.3	0	1		33.3	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.494.865.595**		**261.871.458**		**199.957.150**		**14.254.355**								**14.254.355**	**29**	**7.1**		**14.254.355**	**27**	**1**	Kelurahan Payolansek	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	92		93,52		91												0	0			0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100		100												0	0			0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.494.865.595		261.871.458		199.957.150		14.254.355								14.254.355	29.2	7.13		14.254.355	26.7	0.95		
			Persentase terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			709.526.631		213.350.443		81.028.720		3.800.000								3.800.000	25	4.69		3.800.000	20	0.54		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		2		4		1								1		25	0	1		20	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			785.338.964		48.521.015		118.928.430		10.454.355								10.454.355	33.3	8.79		10.454.355	33.3	1.33		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		1		3		1								1		33.3	0	1		33.3	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.494.837.275**		**217.088.044**		**200.000.000**		**25.281.295**								**25.281.295**	**29**	**13**		**25.281.295**	**27**	**1.7**	Kelurahan Talang	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	92		93,52		91												0	0			0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	500		100		100												0	0			0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.494.837.275		217.088.044		200.000.000		25.281.295								25.281.295	29.2	12.6		25.281.295	26.7	1.69		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			664.977.871		157.091.128		82.393.350		15.603.895								15.603.895	25	18.9		15.603.895	20	2.35		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		2		4		1								1		25	0	1		20	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			829.859.404		59.996.916		117.606.650		9.677.400								9.677.400	33.3	8.23		9.677.400	33.3	1.17		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		1		3		1								1		33.3	0	1		33.3	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.494.841.585**		**221.988.059**		**200.000.410**		**9.297.700**								**9.297.700**	**29**	**4.7**		**9.297.700**	**27**	**0.6**	Kelurahan Tanjung Pauh	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	92		93,52		91												0	0			0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100		100												0	0			0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.494.841.585		221.988.059		200.000.410		9.297.700								9.297.700	29.2	4.65		9.297.700	26.7	0.62		
			Persentase terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			680.652.621		118.866.030		96.285.510		3.955.200								3.955.200	25	4.11		3.955.200	20	0.58		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		2		4		1								1		25	0	1		20	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			814.188.964		103.122.029		103.714.900		5.342.500								5.342.500	33.3	5.15		5.342.500	33.3	0.66		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		1		3		1								1		33.3	0	1		33.3	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.494.836.619**		**210.487.362**		**212.887.572**		**40.639.570**								**40.639.570**	**29**	**19**		**40.639.570**	**27**	**2.7**	Kelurahan Tanjunggodang Sungaipinago	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	92		93,52		91												0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100		100												0	0			0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.494.836.619		210.487.362		212.887.572		40.639.570								40.639.570	29.2	19.1		40.639.570	26.7	2.72		
			Persentase terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			675.156.285		159.927.990		71.894.452		28.994.180								28.994.180	25	40.3		28.994.180	20	4.29		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		2		4		1								1		25	0	1		20	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			819.680.334		50.559.372		140.993.120		11.645.390								11.645.390	33.3	8.26		11.645.390	33.3	1.42		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		1		3		1								1		33.3	0	1		33.3	0		
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**43.984.865.045**		**7.927.885.264**		**9.411.184.673**		**1.904.082.615**								**1.904.082.615**	**41**	**20**		**1.904.082.615**	**203**	**4.3**	Kecamatan Payakumbuh Timur	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	91				91		0								0		0	0	0		0	0			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			289.924.080		69.935.563		26.669.650		7.444.125								7.444.125	21.3	27.9		7.444.125	21.3	2.57		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi																		0	0			0	0		
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			111.839.740		25.053.482		14.694.950		2.412.000								2.412.000	60	16.4		2.412.000	60	2.16		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		5		5		3								3		60	0	3		60	0		
		7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			161.984.340		44.882.081		11.764.500		5.032.125								5.032.125	25	42.8		5.032.125	25	3.11		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		4		4		1								1		25	0	1		25	0		
		7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			8.050.000		-		105.100		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terselenggaranya Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5		0		5		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			8.050.000		-		105.100		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3		0		3		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			36.424.519.282		6.060.136.428		8.232.618.085		1.713.227.929								1.713.227.929	100	20.8		1.713.227.929	100	4.7		
			Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu																		0	0			0	0		
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			33.917.119.282		5.681.016.428		7.734.618.085		1.593.137.929								1.593.137.929	100	20.6		1.593.137.929	100	4.7		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	65		65		65		65								65		100	0	65		100	0		
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			2.507.400.000		379.120.000		498.000.000		120.090.000								120.090.000	100	24.1		120.090.000	100	4.79		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	10		10		10		10								10		100	0	10		100	0		
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			306.299.410		48.229.500		105.100		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah																		0	0			0	0		
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			306.299.410		48.229.500		105.100		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			850.175.601		55.353.313		99.135.255		20.089.757								20.089.757	35.2	20.3		20.089.757	35.2	2.36		
			Indeks layanan administrasi perangkat daerah																		0	0			0	0		
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.315.920		1.248.417		4.469.600		4.431.654								4.431.654	100	99.2		4.431.654	100	60.6		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		1								1		100	0	1		100	0		
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			188.506.361		32.339.309		31.975.355		14.268.103								14.268.103	100	44.6		14.268.103	100	7.57		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		3		3								3		100	0	3		100	0		
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			46.466.460		9.670.657		8.612.100		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		2		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			27.809.460		1.610.245		105.100		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	528		264		528		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			572.027.400		10.484.685		53.868.000		1.390.000								1.390.000	11.1	2.58		1.390.000	11.1	0.24		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	9		5		9		1								1		11.1	0	1		11.1	0		
		7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			8.050.000		-		105.100		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			673.598.680		612.666.970		131.542.000		7.868.790								7.868.790	50	5.98		7.868.790	33.3	1.17		
			Persentase ketersediaan BMD																		0	0			0	0		
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			220.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			323.860.680		61.295.501		6.750.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7		6		4		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			129.738.000		551.371.469		124.792.000		7.868.790								7.868.790	100	6.31		7.868.790	100	6.07		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.914.903.389		625.844.233		721.959.483		118.792.122								118.792.122	61.1	16.5		118.792.122	61.1	3.03		
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah																		0	0			0	0		
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			419.037.727		64.607.884		56.503.800		7.297.501								7.297.501	83.3	12.9		7.297.501	83.3	1.74		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		10								10		83.3	0	10		83.3	0		
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.396.710		240.870		258.650		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.494.468.952		560.995.479		665.197.033		111.494.621								111.494.621	100	16.8		111.494.621	100	3.19		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	19		18		19		19								19		100	0	19		100	0		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.525.444.603		455.719.257		199.155.100		36.659.892								36.659.892	30.2	18.4		36.659.892	975	2.4		
			Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik																		0	0			0	0		
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			120.000.000		186.887.508		189.550.000		36.659.892								36.659.892	90.7	19.3		36.659.892	3900	30.6		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		39		43		39								39		90.7	0	39		3900	0		
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			827.750.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	42		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			109.049.544		16.957.290		9.500.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	13		13		13		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			468.645.059		251.874.459		105.100		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**3.501.702.250**		**42.386.156**		**24.417.400**		**15.803.507**								**15.803.507**	**75**	**65**		**15.803.507**	**75**	**0.5**	Kecamatan Payakumbuh Timur	
			Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu (%)	425				85		0								0		0	0	0		0	0		
				Persentase usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah (%)	350				70		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			2.527.989.500		29.378.191		18.926.300		12.869.252								12.869.252	100	68		12.869.252	100	0.51		
			Persentase usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan																		0	0			0	0		
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			2.527.989.500		29.378.191		18.926.300		12.869.252								12.869.252	100	68		12.869.252	100	0.51		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			973.712.750		13.007.965		5.491.100		2.934.255								2.934.255	50	53.4		2.934.255	50	0.3		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase Dokumen Pelayanan yang Diproses																		0	0			0	0		
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			973.712.750		13.007.965		5.491.100		2.934.255								2.934.255	50	53.4		2.934.255	50	0.3		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2		2		2		1								1		50	0	1		50	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**8.202.338.550**		**183.253.384**		**81.053.950**		**8.585.000**								**8.585.000**	**17**	**11**		**8.585.000**	**17**	**0.1**	Kecamatan Payakumbuh Timur	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	500				100		0								0		0	0	0		0	0		
				Nilai IKM (Indeks)	450				90		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			5.681.858.700		72.025.850		105.100		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			5.681.858.700		72.025.850		105.100		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	3		3		3		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			2.520.479.850		111.227.534		80.948.850		8.585.000								8.585.000	33.3	10.6		8.585.000	33.3	0.34		
			Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			2.520.479.850		111.227.534		80.948.850		8.585.000								8.585.000	33.3	10.6		8.585.000	33.3	0.34		
			Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	3		3		3		1								1		33.3	0	1		33.3	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**904.519.300**		**15.595.081**		**14.675.400**		**850.000**								**850.000**	**100**	**5.8**		**850.000**	**100**	**0.1**	Kecamatan Payakumbuh Timur	
			Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	500				100		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			904.519.300		15.595.081		14.675.400		850.000								850.000	100	5.79		850.000	100	0.09		
			Persentase kegiatan trantibum yang difasilitasi																		0	0			0	0		
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			904.519.300		15.595.081		14.675.400		850.000								850.000	100	5.79		850.000	100	0.09		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**1.669.427.250**		**112.667.259**		**98.748.950**		**1.316.974**								**1.316.974**	**50**	**1.3**		**1.316.974**	**50**	**0.1**	Kecamatan Payakumbuh Timur	
			Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi (%)	500				100		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			1.669.427.250		112.667.259		98.748.950		1.316.974								1.316.974	50	1.33		1.316.974	50	0.08		
			Persentase peningkatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan																		0	0			0	0		
		7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			1.530.393.750		105.662.742		93.271.950		1.316.974								1.316.974	100	1.41		1.316.974	100	0.09		
			Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	3		3		3		3								3		100	0	3		100	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			139.033.500		7.004.517		5.477.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.400.000.000**		**234.818.483**		**200.000.000**		**3.830.000**								**3.830.000**	**100**	**1.9**		**3.830.000**	**100**	**0.3**	Kelurahan Balai Jariang	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	90				90		0								0		0	0	0		0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100				100		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.400.000.000		234.818.483		200.000.000		3.830.000								3.830.000	100	1.92		3.830.000	100	0.27		
			Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			700.000.000		127.583.317		96.067.600		1.500.000								1.500.000	100	1.56		1.500.000	100	0.21		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			700.000.000		107.235.166		103.932.400		2.330.000								2.330.000	100	2.24		2.330.000	100	0.33		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		3								3		100	0	3		100	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.400.000.000**		**260.388.943**		**200.000.000**		**26.013.312**								**26.013.312**	**100**	**13**		**26.013.312**	**100**	**1.9**	Kelurahan Koto Baru	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	90				90		0								0		0	0	0		0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100				100		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.400.000.000		260.388.943		200.000.000		26.013.312								26.013.312	100	13		26.013.312	100	1.86		
			Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			700.000.000		115.726.614		45.697.150		10.253.915								10.253.915	100	22.4		10.253.915	100	1.46		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			700.000.000		144.662.329		154.302.850		15.759.397								15.759.397	100	10.2		15.759.397	100	2.25		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		3								3		100	0	3		100	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.400.000.000**		**261.844.162**		**200.000.000**		**18.170.409**								**18.170.409**	**100**	**9.1**		**18.170.409**	**100**	**1.3**	Kelurahan Koto Panjang	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	90				90		0								0		0	0	0		0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100				100		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.400.000.000		261.844.162		200.000.000		18.170.409								18.170.409	100	9.09		18.170.409	100	1.3		
			Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			700.000.000		140.950.278		80.285.100		4.729.534								4.729.534	100	5.89		4.729.534	100	0.68		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			700.000.000		120.893.884		119.714.900		13.440.875								13.440.875	100	11.2		13.440.875	100	1.92		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		3								3		100	0	3		100	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.400.000.000**		**264.583.073**		**200.000.000**		**34.858.689**								**34.858.689**	**100**	**17**		**34.858.689**	**100**	**2.5**	Kelurahan Padang Alai Bodi	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	90				90		0								0		0	0	0		0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100				100		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.400.000.000		264.583.073		200.000.000		34.858.689								34.858.689	100	17.4		34.858.689	100	2.49		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			700.000.000		145.406.830		73.395.650		19.495.013								19.495.013	100	26.6		19.495.013	100	2.79		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			700.000.000		119.176.243		126.604.350		15.363.676								15.363.676	100	12.1		15.363.676	100	2.19		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		3								3		100	0	3		100	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.400.000.000**		**276.359.609**		**200.000.000**		**29.339.202**								**29.339.202**	**100**	**15**		**29.339.202**	**100**	**2.1**	Kelurahan Padang Tangah Payobadar	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	90				90		0								0		0	0	0		0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100				100		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.400.000.000		276.359.609		200.000.000		29.339.202								29.339.202	100	14.7		29.339.202	100	2.1		
			Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			700.000.000		147.199.135		60.584.750		10.080.645								10.080.645	100	16.6		10.080.645	100	1.44		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			700.000.000		129.160.474		139.415.250		19.258.557								19.258.557	100	13.8		19.258.557	100	2.75		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		3								3		100	0	3		100	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.400.000.000**		**249.626.771**		**200.000.000**		**29.112.215**								**29.112.215**	**100**	**15**		**29.112.215**	**100**	**2.1**	Kelurahan Padang Tiakar	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	90				90		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100				100		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.400.000.000		249.626.771		200.000.000		29.112.215								29.112.215	100	14.6		29.112.215	100	2.08		
			Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			700.000.000		161.505.460		54.880.460		15.669.675								15.669.675	100	28.6		15.669.675	100	2.24		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			700.000.000		88.121.311		145.119.540		13.442.540								13.442.540	100	9.26		13.442.540	100	1.92		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		3								3		100	0	3		100	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.400.000.000**		**270.922.106**		**200.000.000**		**49.956.276**								**49.956.276**	**100**	**25**		**49.956.276**	**100**	**3.6**	Kelurahan Payobasung	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	90				90		0								0		0	0	0		0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100				100		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.400.000.000		270.922.106		200.000.000		49.956.276								49.956.276	100	25		49.956.276	100	3.57		
			Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			700.000.000		145.212.816		52.607.900		31.446.799								31.446.799	100	59.8		31.446.799	100	4.49		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			700.000.000		125.709.290		147.392.100		18.509.477								18.509.477	100	12.6		18.509.477	100	2.64		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		3								3		100	0	3		100	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**			**1.400.000.000**		**237.956.370**		**200.000.000**		**11.284.866**								**11.284.866**	**100**	**5.6**		**11.284.866**	**100**	**0.8**	Kelurahan Sicincin	

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																									
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	90				90		0								0		0	0	0		0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100				100		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.400.000.000		237.956.370		200.000.000		11.284.866								11.284.866	100	5.64		11.284.866	100	0.81		
			Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			700.000.000		127.880.085		63.455.420		2.400.000								2.400.000	100	3.78		2.400.000	100	0.34		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			700.000.000		110.076.285		136.544.580		8.884.866								8.884.866	100	6.51		8.884.866	100	1.27		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		3								3		100	0	3		100	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.400.000.000**		**264.355.746**		**200.000.000**		**21.851.290**								**21.851.290**	**100**	**11**		**21.851.290**	**100**	**1.6**	Kelurahan Tiakar	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100				100		0								0		0	0	0		0	0		
				Nilai IKM (Indeks)	90				90		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.400.000.000		264.355.746		200.000.000		21.851.290								21.851.290	100	10.9		21.851.290	100	1.56		
			Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			700.000.000		120.262.491		41.143.750		5.008.380								5.008.380	100	12.2		5.008.380	100	0.72		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		0		1		1								1		100	0	1		100	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			700.000.000		144.093.255		158.856.250		16.842.910								16.842.910	100	10.6		16.842.910	100	2.41		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		3								3		100	0	3		100	0		
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**53.878.229.562**		**6.859.091.017**		**8.653.222.790**		**1.623.072.349**								**1.623.072.349**	**25**	**19**		**1.623.072.349**	**17**	**3**	Kecamatan Payakumbuh Utara	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	91		92.870		91		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			562.924.050		18.648.089		17.343.450		2.572.980								2.572.980	25	14.8		2.572.980	25	0.46		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi																		0	0			0	0		
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			202.159.850		7.436.958		11.426.000		2.572.980								2.572.980	50	22.5		2.572.980	50	1.27		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		2		1								1		50	0	1		50	0		
		7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			193.288.800		11.211.131		4.710.250		-								-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2		2		2		1								1		50	0	1		50	0		
		7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			84.948.700		-		603.600		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			82.526.700		-		603.600		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			40.427.782.681		5.743.713.565		7.334.323.385		1.446.009.034								1.446.009.034	58.3	19.7		1.446.009.034	56.7	3.58		
			Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu																		0	0			0	0		
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			37.876.582.681		5.372.057.565		6.824.683.385		1.372.304.034								1.372.304.034	100	20.1		1.372.304.034	96.8	3.62		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	62		51		60		60								60		100	0	60		96.8	0		
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			2.551.200.000		371.656.000		509.640.000		73.705.000								73.705.000	16.7	14.5		73.705.000	16.7	2.89		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		12		12		2								2		16.7	0	2		16.7	0		
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			252.080.800		49.250.700		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah																		0	0			0	0		
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			252.080.800		49.250.700		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	63		51		53		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.768.212.030		113.836.486		95.130.850		4.973.910								4.973.910	22.9	5.23		4.973.910	14.3	0.28		
			Indeks layanan administrasi perangkat daerah																		0	0			0	0		
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			65.746.000		1.697.190		1.255.250		1.066.710								1.066.710	100	85		1.066.710	100	1.62		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			180.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			220.000.000		20.590.500		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3		5		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			468.702.730		42.019.681		39.566.800		3.108.000								3.108.000	14.3	7.86		3.108.000	14.3	0.66		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7		10		7		1								1		14.3	0	1		14.3	0		
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			56.967.800		6.197.130		5.611.800		799.200								799.200	0	14.2		799.200	0	1.4		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		2		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			20.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			455.588.000		43.331.985		48.097.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3		1		3		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			301.207.500		-		600.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.480.242.400		58.617.001		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase ketersediaan BMD																		0	0			0	0		
		7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			600.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			260.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			320.080.800		58.617.001		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		7		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.400.080.800		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			300.080.800		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			600.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.343.126.001		701.551.837		1.024.115.105		157.607.225								157.607.225	38.9	15.4		157.607.225	29.2	3.63		
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah																		0	0			0	0		
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			20.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			457.612.952		3		99.595.120		9.352.828								9.352.828	100	9.39		9.352.828	100	2.04		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		49.906.987		3		3								3		100	0	3		100	0		
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			42.300.000		899.100		574.650		266.400								266.400	0	46.4		266.400	0	0.63		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.823.213.049		700.652.734		923.945.335		147.987.997								147.987.997	16.7	16		147.987.997	16.7	3.87		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		27		12		2								2		16.7	0	2		16.7	0		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.043.861.600		173.473.339		182.310.000		11.909.200								11.909.200	24.4	6.53		11.909.200	16.3	0.39		
			Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			204.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			974.060.000		165.847.340		174.150.000		11.909.200								11.909.200	97.5	6.84		11.909.200	97.5	1.22		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	40		38		40		39								39		97.5	0	39		97.5	0		
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			125.640.000		7.625.999		8.160.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15		14		12		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			500.080.800		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			540.080.800		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			700.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		0		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**1.152.676.992**		**32.642.098**		**22.540.800**		**20.482.060**								**20.482.060**	**50**	**91**		**20.482.060**	**50**	**1.8**	Kecamatan Payakumbuh Utara	
			Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu (%)	85		85.000		85		0								0		0	0	0		0	0		
				Persentase usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah (%)	375		75.000		75		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			571.817.092		28.173.904		21.112.300		20.482.060								20.482.060	100	97		20.482.060	100	3.58		
			Persentase Usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan																		0	0			0	0		
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			571.817.092		28.173.904		21.112.300		20.482.060								20.482.060	100	97		20.482.060	100	3.58		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			580.859.900		4.468.194		1.428.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Dokumen Pelayanan yang diproses																		0	0			0	0		
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			580.859.900		4.468.194		1.428.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		1		12		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**2.593.551.025**		**125.629.890**		**134.581.025**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Kecamatan Payakumbuh Utara	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	91		92.870		91		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100.000		100		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			866.865.375		83.237.966		97.662.775		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			866.865.375		83.237.966		97.662.775		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	27		27		27		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			1.726.685.650		42.391.924		36.918.250		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			944.414.250		42.391.924		36.918.250		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	2		29		2		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			782.271.400		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**411.350.000**		**15.881.550**		**1.307.350**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Kecamatan Payakumbuh Utara	
			Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	100				100		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.04.2.01	411.350.000			411.350.000		15.881.550		1.307.350		-								-	0	0		-	0	0		
																					0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			411.350.000		15.881.550		1.307.350		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**1.515.410.000**		**103.414.624**		**189.015.900**		**2.974.245**								**2.974.245**	**0**	**1.6**		**2.974.245**	**0**	**0.2**	Kecamatan Payakumbuh Utara	
			Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi (%)	100		100.000		100		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			1.515.410.000		103.414.624		189.015.900		2.974.245								2.974.245	0	1.57		2.974.245	0	0.2		
			Persentase Pembinaan dan monev lembaga kemasyarakatan yang terlaksana																		0	0			0	0		
		7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			1.197.290.000		99.832.264		186.666.800		2.974.245								2.974.245	0	1.59		2.974.245	0	0.25		
			Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	2		2		2		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			318.120.000		3.582.360		2.349.100		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.400.000.350**		**235.510.174**		**200.000.340**		**38.995.960**								**38.995.960**	**5.6**	**20**		**38.995.960**	**50**	**2.8**	Kelurahan Balai Tongah Koto	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	91		92.870		91		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100.000		100		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.400.000.350		235.510.174		200.000.340		38.995.960								38.995.960	5.56	19.5		38.995.960	50	2.79		
			Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			498.161.400		113.937.684		74.112.140		26.342.700								26.342.700	11.1	35.5		26.342.700	100	5.29		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		12		9		1								1		11.1	0	1		100	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			901.838.950		121.572.490		125.888.200		12.653.260								12.653.260	0	10.1		12.653.260	0	1.4		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.399.999.958**		**178.548.081**		**200.000.374**		**18.928.456**								**18.928.456**	**0**	**9.5**		**18.928.456**	**0**	**1.4**	Kelurahan Ikua Koto Dibalai	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	91		92.870		91		0								0		0	0	0		0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100.000		100		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.399.999.958		178.548.081		200.000.374		18.928.456								18.928.456	0	9.46		18.928.456	0	1.35		
			Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			471.979.208		46.160.275		39.746.324		2.606.556								2.606.556	0	6.56		2.606.556	0	0.55		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		5		8		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			928.020.750		132.387.806		160.254.050		16.321.900								16.321.900	0	10.2		16.321.900	0	1.76		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.400.001.980**		**243.008.683**		**200.000.180**		**30.915.074**								**30.915.074**	**10**	**15**		**30.915.074**	**100**	**2.2**	Kelurahan Kapalo Koto Dibalai	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	91		92.870		91		0								0		0	0	0		0	0			
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100.000		100		0								0		0	0	0		0	0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.400.001.980		243.008.683		200.000.180		30.915.074								30.915.074	10	15.5		30.915.074	100	2.21		
			Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan																		0	0			0	0			
		7.01.03.2.02.0 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			482.629.280		95.207.640		71.078.580		26.460.074								26.460.074	20	37.2		26.460.074	200	5.48		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		7		10		2								2		20	0	2		200	0			
		7.01.03.2.02.0 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			917.372.700		147.801.043		128.921.600		4.455.000								4.455.000	0	3.46		4.455.000	0	0.49		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		0								0		0	0	0		0	0			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.399.999.910**		**232.046.880**		**200.000.460**		**15.008.345**								**15.008.345**	**0**	**7.5**		**15.008.345**	**0**	**1.1**	Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapakrajo	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	91		92.870		91		0								0		0	0	0		0	0			
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100.000		100		0								0		0	0	0		0	0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.399.999.910		232.046.880		200.000.460		15.008.345								15.008.345	0	7.5		15.008.345	0	1.07		
			Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan																		0	0			0	0			
		7.01.03.2.02.0 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			476.645.910		86.823.910		53.024.710		4.994.470								4.994.470	0	9.42		4.994.470	0	1.05		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		6		5		0								0		0	0	0		0	0			
		7.01.03.2.02.0 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			923.354.000		145.222.970		146.975.750		10.013.875								10.013.875	0	6.81		10.013.875	0	1.08		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.400.000.100**		**202.742.410**		**200.000.390**		**19.962.770**								**19.962.770**	**7.7**	**10**		**19.962.770**	**100**	**1.4**	Kelurahan Napar	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	91		92.870		91		0								0		0	0	0		0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100.000		100		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.400.000.100		202.742.410		200.000.390		19.962.770								19.962.770	7.69	9.98		19.962.770	100	1.43		
			Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			504.784.450		111.464.347		78.583.840		13.133.610								13.133.610	15.4	16.7		13.133.610	200	2.6		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		14		13		2								2		15.4	0	2		200	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			895.215.650		91.278.063		121.416.550		6.829.160								6.829.160	0	5.62		6.829.160	0	0.76		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.400.000.060**		**199.823.164**		**200.000.160**		**70.375.473**								**70.375.473**	**30**	**35**		**70.375.473**	**150**	**5**	Kelurahan Ompang Tanah Sirah	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	91		92.870		91		0								0		0	0	0		0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100.000		100		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.400.000.060		199.823.164		200.000.160		70.375.473								70.375.473	30	35.2		70.375.473	150	5.03		
			Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			468.748.310		84.963.259		60.544.510		48.470.925								48.470.925	60	80.1		48.470.925	300	10.3		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		7		5		3								3		60	0	3		300	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			931.251.750		114.859.905		139.455.650		21.904.548								21.904.548	0	15.7		21.904.548	0	2.35		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.399.999.605**		**193.033.113**		**200.000.265**		**7.680.476**								**7.680.476**	**0**	**3.8**		**7.680.476**	**0**	**0.6**	Kelurahan Tigo Koto Diate	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	91		92.870		91		0								0		0	0	0		0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100.000		100		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.399.999.605		193.033.113		200.000.265		7.680.476								7.680.476	0	3.84		7.680.476	0	0.55		
			Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			484.499.330		68.606.414		48.526.990		3.685.476								3.685.476	0	7.59		3.685.476	0	0.76		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		8		4		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			915.500.275		124.426.699		151.473.275		3.995.000								3.995.000	0	2.64		3.995.000	0	0.44		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.400.000.025**		**113.433.449**		**200.000.000**		**23.027.459**								**23.027.459**	**5.6**	**12**		**23.027.459**	**50**	**1.6**	Kelurahan Tigo Koto Dibaruah	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100.000		100		0								0		0	0	0		0	0		
				Nilai IKM (Indeks)	91		92.870		91		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.400.000.025		113.433.449		200.000.000		23.027.459								23.027.459	5.56	11.5		23.027.459	50	1.64		
			Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			500.217.700		79.423.770		66.054.500		16.651.124								16.651.124	11.1	25.2		16.651.124	100	3.33		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		9		9		1								1		11.1	0	1		100	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			899.782.325		34.009.679		133.945.500		6.376.335								6.376.335	0	4.76		6.376.335	0	0.71		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.400.000.010**		**145.610.250**		**200.000.200**		**27.071.000**								**27.071.000**	**2.9**	**14**		**27.071.000**	**50**	**1.9**	Kelurahan Taratak Padang Kampuang	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100.000		100		0								0		0	0	0		0	0		
				Nilai IKM (Indeks)	91		92.870		91		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.400.000.010		145.610.250		200.000.200		27.071.000								27.071.000	2.94	13.5		27.071.000	50	1.93		
			Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			446.675.110		34.009.679		69.789.000		20.116.000								20.116.000	5.88	28.8		20.116.000	100	4.5		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		5		17		1								1		5.88	0	1		100	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			953.324.900		111.600.571		130.211.200		6.955.000								6.955.000	0	5.34		6.955.000	0	0.73		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**36.657.856.929**		**5.820.877.878**		**6.697.846.754**		**1.230.834.189**								**1.230.834.189**	**14**	**18**		**1.230.834.189**	**13**	**3.4**	Kecamatan Payakumbuh Selatan	

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	90		92,03		90												0	0			0	0		
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			247.130.700		18.805.761		17.921.400		3.780.000								3.780.000	6.25	21.1		3.780.000	5	1.53		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi																		0	0			0	0		
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			59.856.750		4.766.673		3.370.950		-								-	25	0		-	25	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		4		4		1								1		25	0	1		25	0		
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.000.000		481.074		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		4		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			154.663.950		13.558.014		12.940.450		3.780.000								3.780.000	0	29.2		3.780.000	0	2.44		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2		2		2		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			15.805.000		-		805.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			15.805.000		-		805.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			27.874.646.145		4.385.183.195		5.832.852.222		1.181.712.600								1.181.712.600	59.4	20.3		1.181.712.600	39.6	4.24		
			Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			25.843.574.145		4.091.584.666		5.436.272.222		1.117.112.600								1.117.112.600	102	20.6		1.117.112.600	102	4.32		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	46		38		46		47								47		102	0	47		102	0		
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			2.030.072.000		292.818.865		396.580.000		64.600.000								64.600.000	16.7	16.3		64.600.000	16.7	3.18		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		12		12		2								2		16.7	0	2		16.7	0		
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			1.000.000		779.664		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		4		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			315.401.700		35.936.250		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah																		0	0			0	0		
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			315.401.700		35.936.250		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	46		37		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.186.646.150		113.498.441		107.336.630		-								-	6.41	0		-	16.3	0		
			Indeks layanan administrasi perangkat daerah																		0	0			0	0		
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			73.881.650		5.717.055		10.407.200		-								-	30	0		-	30	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		10		10		3								3		30	0	3		30	0		
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			89.642.900		-		8.615.900		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		3		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			60.100.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			349.128.860		39.681.707		28.672.480		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		6		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			127.320.190		6.157.947		12.387.850		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		5		3		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			14.066.400		2.847.476		2.640.000		-								-	19.3	0		-	16.7	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	480		480		414		80								80		19.3	0	80		16.7	0		
		7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			6.506.250		592.740		506.250		-								-	8.33	0		-	100	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		6		12		1								1		8.33	0	1		100	0		
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			450.194.900		58.501.516		43.920.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10		9		10		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			15.805.000		-		186.950		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.797.974.600		390.166.876		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase ketersediaan BMD																		0	0			0	0		
		7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			290.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			224.100.000		63.214.500		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3		37		2		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			146.774.600		176.210.858		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		21		2		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.050.100.000		150.741.518		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			87.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.950.909.634		516.668.308		581.536.502		33.941.589								33.941.589	13.9	5.84		33.941.589	10.4	0.86		
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah																		0	0			0	0		
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			600.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			376.662.734		34.941.518		53.808.242		5.948.589								5.948.589	25	11.1		5.948.589	25	1.58		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3								3		25	0	3		25	0		
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.702.500		345.000		632.500		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.570.944.400		481.381.790		527.095.760		27.993.000								27.993.000	16.7	5.31		27.993.000	16.7	0.78		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		2								2		16.7	0	2		16.7	0		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.285.148.000		360.619.047		158.200.000		11.400.000								11.400.000	33.3	7.21		11.400.000	16.1	0.89		
			Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik																		0	0			0	0		
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			856.448.000		138.110.192		147.200.000		11.400.000								11.400.000	100	7.74		11.400.000	96.8	1.33		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	31		30		30		30								30		100	0	30		96.8	0		
		7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			28.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			72.600.000		8.672.150		11.000.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		4		4		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			180.100.000		213.836.705		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		2		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			28.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**409.831.867**		**18.267.350**		**24.456.600**		**18.897.894**								**18.897.894**	**50**	**77**		**18.897.894**	**50**	**4.6**	Kecamatan Payakumbuh Selatan	
			Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah (%)	375		75		75												0	0			0	0		
				Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu (%)	85		85		85												0	0			0	0		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			344.062.750		15.963.133		22.072.350		18.897.894								18.897.894	100	85.6		18.897.894	100	5.49		
			Persentase Usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan																		0	0			0	0		
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			344.062.750		15.963.133		22.072.350		18.897.894								18.897.894	100	85.6		18.897.894	100	5.49		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			65.769.117		2.304.217		2.384.250		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Ketersediaan Dokumen Pelayanan Publik																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			65.769.117		2.304.217		2.384.250		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2		2		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.212.216.975**		**66.623.941**		**50.923.050**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Kecamatan Payakumbuh Selatan	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100.000		100												0	0			0	0		
				Nilai IKM (Indeks)	90		92,03		90												0	0			0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			710.555.422		48.961.106		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			710.555.422		48.961.106		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	3		3		3		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			501.661.553		17.662.835		50.923.050		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.03.0001	501.661.553			501.661.553		17.662.835		50.923.050		-								-	0	0		-	0	0		
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	3		3		3		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**119.809.860**		**3.504.530**		**4.619.700**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Kecamatan Payakumbuh Selatan	

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	100		100		100												0	0			0	0		
		7.01.04.2.01	119.809.860			119.809.860		3.504.530		4.619.700		-								-	0	0		-	0	0		
																					0	0			0	0		
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			119.809.860		3.504.530		4.619.700		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**839.521.316**		**73.114.766**		**112.517.850**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Kecamatan Payakumbuh Selatan	
			Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi (%)	100		100		100												0	0			0	0		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			839.521.316		73.114.766		112.517.850		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pembinaan dan monitoring evaluasi lembaga kemasyarakatan yang terlaksana																		0	0			0	0		
		7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			778.002.216		72.869.455		112.453.150		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	2		3		3		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			61.519.100		245.311		64.700		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.400.000.275**		**203.045.358**		**200.000.270**		**19.982.690**								**19.982.690**	**150**	**10**		**19.982.690**	**150**	**1.4**	Kelurahan Balai Panjang	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	90		92,03		90												0	0			0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100.000		100												0	0			0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.400.000.275		203.045.358		200.000.270		19.982.690								19.982.690	150	9.99		19.982.690	150	1.43		
			Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			673.188.710		75.721.517		46.657.360		4.110.910								4.110.910	200	8.81		4.110.910	200	0.61		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		10		1		2								2		200	0	2		200	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			726.811.565		127.323.841		153.342.910		15.871.780								15.871.780	100	10.4		15.871.780	100	2.18		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		3								3		100	0	3		100	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.400.000.160**		**203.502.779**		**200.000.160**		**19.887.750**								**19.887.750**	**100**	**9.9**		**19.887.750**	**100**	**1.4**	Kelurahan Koto Tuo Limo Kampung	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	90		92,03		90												0	0			0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100.000		100												0	0			0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.400.000.160		203.502.779		200.000.160		19.887.750								19.887.750	100	9.94		19.887.750	100	1.42		
			Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			650.538.670		102.522.640		75.894.360		4.210.810								4.210.810	100	5.55		4.210.810	100	0.65		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		22		1		1								1		100	0	1		100	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			749.461.490		100.980.139		124.105.800		15.676.940								15.676.940	100	12.6		15.676.940	100	2.09		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		3								3		100	0	3		100	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.400.000.160**		**202.382.144**		**200.000.120**		**52.778.595**								**52.778.595**	**200**	**26**		**52.778.595**	**200**	**3.8**	Kelurahan Limbukan	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	90		92,03		90												0	0			0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100.000		100												0	0			0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.400.000.160		202.382.144		200.000.120		52.778.595								52.778.595	200	26.4		52.778.595	200	3.77		
			Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			585.748.410		118.212.925		108.549.560		43.297.795								43.297.795	300	39.9		43.297.795	300	7.39		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		37		1		3								3		300	0	3		300	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			814.251.750		84.169.219		91.450.560		9.480.800								9.480.800	100	10.4		9.480.800	100	1.16		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		3								3		100	0	3		100	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.400.000.160**		**200.162.513**		**200.001.610**		**31.343.605**								**31.343.605**	**150**	**16**		**31.343.605**	**150**	**2.2**	Kelurahan Padang Karambia	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	90		92,03		90												0	0			0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100.000		100												0	0			0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.400.000.160		200.162.513		200.001.610		31.343.605								31.343.605	150	15.7		31.343.605	150	2.24		
			Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan kelurahan																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			774.919.660		97.180.105		77.617.760		21.634.190								21.634.190	200	27.9		21.634.190	200	2.79		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		20		1		2								2		200	0	2		200	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			625.080.500		102.982.408		122.383.850		9.709.415								9.709.415	100	7.93		9.709.415	100	1.55		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		3								3		100	0	3		100	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.400.000.250**		**192.900.058**		**200.000.300**		**13.248.430**								**13.248.430**	**50**	**6.6**		**13.248.430**	**50**	**1**	Kelurahan Sawah Padang Aur Kuning	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	90		92,03		90												0	0			0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100.000		100												0	0			0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.400.000.250		192.900.058		200.000.300		13.248.430								13.248.430	50	6.62		13.248.430	50	0.95		
			Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			548.738.500		99.900.760		78.388.150		1.200.000								1.200.000	0	1.53		1.200.000	0	0.22		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		40		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			851.261.750		92.999.298		121.612.150		12.048.430								12.048.430	100	9.91		12.048.430	100	1.42		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		3								3		100	0	3		100	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.400.000.220**		**196.151.123**		**200.000.645**		**14.805.745**								**14.805.745**	**50**	**7.4**		**14.805.745**	**50**	**1.1**	Kelurahan Kapalo Koto Ampangan	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	90		92,03		90												0	0			0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100.000		100												0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.400.000.220		196.151.123		200.000.645		14.805.745								14.805.745	50	7.4		14.805.745	50	1.06		
			Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			489.005.570		102.591.110		60.959.420		3.713.530								3.713.530	0	6.09		3.713.530	0	0.76		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		28		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			910.994.650		93.560.013		139.041.225		11.092.215								11.092.215	100	7.98		11.092.215	100	1.22		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		3								3		100	0	3		100	0		
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**36.303.752.943**		**5.404.883.571**		**6.432.072.671**		**1.296.120.009**								**1.296.120.009**	**16**	**20**		**1.296.120.009**	**16**	**3.6**	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	90		91.360		90		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			332.715.750		69.860.115		40.160.000		5.287.300								5.287.300	18.8	13.2		5.287.300	13.8	1.59		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi																		0	0			0	0		
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			54.087.500		12.737.790		9.257.500		934.500								934.500	25	10.1		934.500	5	1.73		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		4		4		1								1		25	0	1		5	0		
		7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			236.615.750		57.122.325		28.890.000		4.352.800								4.352.800	50	15.1		4.352.800	50	1.84		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2		2		2		1								1		50	0	1		50	0		
		7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			21.006.250		-		1.006.250		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			21.006.250		-		1.006.250		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			28.285.472.625		4.303.076.578		5.652.975.733		1.172.535.911								1.172.535.911	62.5	20.7		1.172.535.911	43.1	4.15		
			Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu																		0	0			0	0		
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			26.179.712.625		4.015.638.578		5.273.295.733		1.078.125.911								1.078.125.911	100	20.5		1.078.125.911	81.1	4.12		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	53		40		43		43								43		100	0	43		81.1	0		
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			2.105.760.000		287.438.000		379.680.000		94.410.000								94.410.000	25	24.9		94.410.000	5	4.48		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		12		12		3								3		25	0	3		5	0		
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			220.048.500		37.878.750		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah																		0	0			0	0		
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			220.048.500		37.878.750		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	55		0		44		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			863.224.475		167.908.973		64.767.850		233.100								233.100	4.76	0.36		233.100	3.7	0.03		
			Indeks layanan administrasi perangkat daerah																		0	0			0	0		
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			30.275.000		7.541.678		2.710.950		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		5		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			62.092.000		93.262.200		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		1		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			55.604.200		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
					I		II		III		IV																	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2		0		5		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			196.642.825		37.925.648		19.532.650		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	25		5		3		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			51.329.800		7.082.562		5.830.000		233.100								233.100	33.3	4		233.100	33.3	0.45		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		3		3		1								1		33.3	0	1		33.3	0		
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			10.050.400		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		12		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			8.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			401.224.000		22.096.885		35.688.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		2		2		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			48.006.250		-		1.006.250		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.849.549.900		279.935.944		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase ketersediaan BMD																		0	0			0	0		
		7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			840.042.450		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6		0		7		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			133.676.550		21.728.250		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		7		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			275.746.000		71.333.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9		12		2		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.000.042.450		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			600.042.450		186.874.694		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		3		6		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.732.731.293		431.188.704		549.555.088		93.822.087								93.822.087	20.8	17.1		93.822.087	100	3.43		
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah																		0	0			0	0		
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			157.040.000		25.142.354		30.040.000		4.344.999								4.344.999	25	14.5		4.344.999	100	2.77		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		3		12		3								3		25	0	3		100	0		
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.575.691.293		406.046.350		519.515.088		89.477.088								89.477.088	16.7	17.2		89.477.088	100	3.47		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		2		12		2								2		16.7	0	2		100	0		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.020.010.400		115.034.507		124.614.000		24.241.611								24.241.611	33.3	19.5		24.241.611	13.8	2.38		
			Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik																		0	0			0	0		
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		0		0		0								0		0	0	0		0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			740.270.000		105.439.097		112.550.000		24.241.611								24.241.611	100	21.5		24.241.611	82.8	3.27		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	29		24		24		24								24		100	0	24		82.8	0		
		7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			38.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			73.190.000		9.595.410		6.740.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	24		10		29		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			40.050.400		-		5.324.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7		0		7		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			8.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**243.427.550**		**24.683.367**		**15.678.050**		**6.847.850**								**6.847.850**	**100**	**44**		**6.847.850**	**60**	**2.8**	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	
			Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu (%)	425		85.000		85		0								0		0	0	0		0	0		
				Persentase usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah (%)	350		100.000		70		100								100		143	0	100		28.6	0		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			159.919.400		22.488.879		14.278.750		6.220.700								6.220.700	100	43.6		6.220.700	20	3.89		
			Persentase Usulan Musrenbang yang menjadi skala prioritas Kecamatan																		0	0			0	0		
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan			159.919.400		22.488.879		14.278.750		6.220.700								6.220.700	100	43.6		6.220.700	20	3.89		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																									
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	5		1		1		1								1		100	0	1		20	0		
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			83.508.150		2.194.488		1.399.300		627.150								627.150	100	44.8		627.150	100	0.75		
			Persentase Ketersediaan Dokumen Pelayanan Publik																		0	0			0	0		
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			83.508.150		2.194.488		1.399.300		627.150								627.150	100	44.8		627.150	100	0.75		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.601.970.474**		**84.681.460**		**24.796.500**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	500		100.000		100		0								0		0	0	0		0	0		
				Nilai IKM (Indeks)	90		91.360		90		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			446.019.475		42.340.730		-		-								-	0	0		-	0	0		
			persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			446.019.475		42.340.730		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	18		3		3		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			1.155.950.999		42.340.730		24.796.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			955.950.999		42.340.730		24.796.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	2		2		2		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			200.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**210.015.750**		**7.829.076**		**3.997.800**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	
			Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	100		100.000		100		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			210.015.750		7.829.076		3.997.800		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase Kegiatan lingkup trantip yang difasilitasi																		0	0			0	0		
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			210.015.750		7.829.076		3.997.800		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		2		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**957.137.197**		**47.781.559**		**72.977.000**		**2.111.160**								**2.111.160**	**0**	**2.9**		**2.111.160**	**0**	**0.2**	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	
			Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi (%)	100		100.000		100		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			957.137.197		47.781.559		72.977.000		2.111.160								2.111.160	0	2.89		2.111.160	0	0.22		
			Persentase Pembinaan Dan Monitoring Evaluasi Lembaga Kemasyarakatan Yang Terlaksana																		0	0			0	0		
		7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak			853.912.697		45.281.559		70.192.500		2.080.080								2.080.080	0	2.96		2.080.080	0	0.24		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																									
			Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	5		3		3		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			103.224.500		2.500.000		2.784.500		31.080								31.080	0	1.12		31.080	0	0.03		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	5		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.399.999.670**		**209.059.304**		**207.723.020**		**30.438.350**								**30.438.350**	**100**	**15**		**30.438.350**	**100**	**2.2**	Kelurahan Koto Panjang Dalam	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	90		91.360		90		0								0		0	0	0		0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100.000		100		100								100		100	0	100		100	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.399.999.670		209.059.304		207.723.020		30.438.350								30.438.350	100	14.7		30.438.350	100	2.17		
			persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			466.581.420		104.806.775		83.943.470		1.895.000								1.895.000	100	2.26		1.895.000	100	0.41		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			933.418.250		104.252.529		123.779.550		28.543.350								28.543.350	100	23.1		28.543.350	100	3.06		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		3								3		100	0	3		100	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.400.000.313**		**204.951.940**		**211.500.123**		**35.166.150**								**35.166.150**	**100**	**17**		**35.166.150**	**100**	**2.5**	Kelurahan Koto Panjang Padang	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	90		91.360		90		0								0		0	0	0		0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100.000		100		100								100		100	0	100		100	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.400.000.313		204.951.940		211.500.123		35.166.150								35.166.150	100	16.6		35.166.150	100	2.51		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			457.932.963		99.928.670		55.493.673		2.648.750								2.648.750	100	4.77		2.648.750	100	0.58		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			942.067.350		105.023.270		156.006.450		32.517.400								32.517.400	100	20.8		32.517.400	100	3.45		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		3								3		100	0	3		100	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.400.000.020**		**202.506.901**		**209.000.160**		**27.493.468**								**27.493.468**	**100**	**13**		**27.493.468**	**100**	**2**	Kelurahan Padang Sikabu	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	90		91.360		90		0								0		0	0	0		0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100.000		100		0								0		0	0	0		0	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.400.000.020		202.506.901		209.000.160		27.493.468								27.493.468	100	13.2		27.493.468	100	1.96		
			persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			481.821.070		96.887.999		49.008.260		1.833.708								1.833.708	100	3.74		1.833.708	100	0.38		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			918.178.950		105.618.902		159.991.900		25.659.760								25.659.760	100	16		25.659.760	100	2.79		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		3								3		100	0	3		100	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.399.999.960**		**191.960.243**		**208.999.770**		**13.948.824**								**13.948.824**	**100**	**6.7**		**13.948.824**	**100**	**1**	Kelurahan Parambahan	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	90		91.360		90		0								0		0	0	0		0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100.000		100		100								100		100	0	100		100	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.399.999.960		191.960.243		208.999.770		13.948.824								13.948.824	100	6.67		13.948.824	100	1		
			persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			549.604.660		100.814.713		73.720.170		4.742.388								4.742.388	100	6.43		4.742.388	100	0.86		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			850.395.300		91.145.530		135.279.600		9.206.436								9.206.436	100	6.81		9.206.436	100	1.08		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		3								3		100	0	3		100	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.399.999.870**		**196.035.268**		**204.999.795**		**36.393.145**								**36.393.145**	**100**	**18**		**36.393.145**	**100**	**2.6**	Kelurahan Sungai Durian	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	90		91.360		90		0								0		0	0	0		0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100.000		100		100								100		100	0	100		100	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.399.999.870		196.035.268		204.999.795		36.393.145								36.393.145	100	17.8		36.393.145	100	2.6		
			persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan																		0	0			0	0		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			463.072.370		94.685.405		63.807.270		3.745.620								3.745.620	100	5.87		3.745.620	100	0.81		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			936.927.500		101.349.863		141.192.525		32.647.525								32.647.525	100	23.1		32.647.525	100	3.48		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		3								3		100	0	3		100	0		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.400.000.160**		**197.168.494**		**205.000.310**		**53.400.640**								**53.400.640**	**100**	**26**		**53.400.640**	**60**	**3.8**	Kelurahan Parik Muko Aia	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	90		91.360		90		0								0		0	0	0		0	0		
				Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100		100.000		100		100								100		100	0	100		100	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.400.000.160		197.168.494		205.000.310		53.400.640								53.400.640	100	26.1		53.400.640	60	3.81		
			persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan																		0	0			0	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			453.559.960		73.402.497		82.853.910		25.598.400								25.598.400	100	30.9		25.598.400	100	5.64		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			946.440.200		123.765.997		122.146.400		27.802.240								27.802.240	100	22.8		27.802.240	20	2.94		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	15		3		3		3								3		100	0	3		20	0		
		8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**50.312.103.652**		**3.946.740.776**		**3.685.704.286**		**473.989.365**								**473.989.365**	**25**	**13**		**473.989.365**	**23**	**0.9**		
		8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**12.861.366.081**		**1.500.749.149**		**1.858.307.573**		**382.565.920**								**382.565.920**	**31**	**21**		**382.565.920**	**30**	**3**	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	95		93		93		93								93		100	0	93		97.9	0		
		8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			227.523.056		47.758.972		26.934.450		8.705.645								8.705.645	12.9	32.3		8.705.645	12.9	3.83		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi																		0	0			0	0		
		8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			47.363.400		10.646.489		4.959.400		2.758.065								2.758.065	33.3	55.6		2.758.065	33.3	5.82		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9		5		9		3								3		33.3	0	3		33.3	0		
		8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			134.376.156		37.112.483		20.767.550		5.947.580								5.947.580	18.2	28.6		5.947.580	18.2	4.43		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	11		6		11		2								2		18.2	0	2		18.2	0		
		8.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			21.676.750		-		603.750		-								-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		8.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			24.106.750		-		603.750		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	10		0		10		0								0		0	0	0		0	0		
		8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.524.243.709		1.102.705.482		1.543.766.707		326.963.523								326.963.523	62.5	21.2		326.963.523	58.9	3.43		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu																		0	0			0	0		
		8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.970.837.209		1.003.051.132		1.400.362.957		291.263.523								291.263.523	100	20.8		291.263.523	92.9	3.25		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14		10		13		13								13		100	0	13		92.9	0		
		8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			553.406.500		99.654.350		143.403.750		35.700.000								35.700.000	25	24.9		35.700.000	25	6.45		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		12		12		3								3		25	0	3		25	0		
		8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			83.164.800		12.149.172		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah																		0	0			0	0		
		8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			83.164.800		12.149.172		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.344.266.877		208.956.379		121.220.330		21.028.336								21.028.336	27.4	17.4		21.028.336	25.7	1.56		
			Indeks layanan administrasi perangkat daerah																		0	0			0	0		
		8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			22.042.160		3.317.868		3.349.200		715.950								715.950	100	21.4		715.950	100	3.25		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			108.353.550		67.936.784		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		3		2		0								0		0	0	0		0	0		
		8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			105.637.060		23.586.210		17.030.380		4.630.160								4.630.160	33.3	27.2		4.630.160	33.3	4.38		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6		7		6		2								2		33.3	0	2		33.3	0		
		8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			50.119.637		8.336.598		8.713.000		1.225.222								1.225.222	33.3	14.1		1.225.222	33.3	2.44		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		3		3		1								1		33.3	0	1		33.3	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			23.851.420		5.965.750		4.092.000		946.000								946.000	21.7	23.1		946.000	16.3	3.97		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.056		1.056		792		172								172		21.7	0	172		16.3	0		
		8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			45.528.300		3.168.375		2.415.000		945.000								945.000	16.7	39.1		945.000	8.33	2.08		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		12		6		1								1		16.7	0	1		8.33	0		
		8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			944.305.000		96.644.794		85.017.000		12.566.004								12.566.004	13.9	14.8		12.566.004	13.9	1.33		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	36		36		36		5								5		13.9	0	5		13.9	0		
		8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			44.429.750		-		603.750		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		1		0								0		0	0	0		0	0		
		8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			403.837.000		7.531.350		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Persentase ketersediaan BMD																		0	0			0	0		
		8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			335.431.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0								0		0	0	0		0	0		
		8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			68.406.000		7.531.350		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6		6		6		0								0		0	0	0		0	0		
		8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			818.450.159		52.174.821		111.586.086		18.565.886								18.565.886	27.8	16.6		18.565.886	27.8	2.27		
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah																		0	0			0	0		
		8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			161.765.584		22.042.593		32.351.320		5.482.451								5.482.451	25	17		5.482.451	25	3.39		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3								3		25	0	3		25	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			22.160.000		4.582.412		3.680.000		987.900								987.900	33.3	26.9		987.900	33.3	4.46		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3		3		3		1								1		33.3	0	1		33.3	0		
		8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			634.524.575		25.549.816		75.554.766		12.095.535								12.095.535	25	16		12.095.535	25	1.91		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3								3		25	0	3		25	0		
		8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			459.880.480		69.472.973		54.800.000		7.302.530								7.302.530	66.7	13.3		7.302.530	66.7	1.59		
			Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik																		0	0			0	0		
		8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			173.760.000		23.885.460		24.000.000		2.500.000								2.500.000	100	10.4		2.500.000	100	1.44		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1								1		100	0	1		100	0		
		8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			196.240.000		30.741.490		30.800.000		4.802.530								4.802.530	100	15.6		4.802.530	100	2.45		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8		8		8		8								8		100	0	8		100	0		
		8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			89.880.480		14.846.023		-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0								0		0	0	0		0	0		
		8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**			**5.183.507.004**		**812.149.094**		**756.277.300**		**1.221.000**								**1.221.000**	**0**	**0.2**		**1.221.000**	**0**	**0**	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	94		90		90		20								20		22.2	0	20		21.3	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			5.183.507.004		812.149.094		756.277.300		1.221.000								1.221.000	0	0.16		1.221.000	0	0.02		
			Jumlah masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan																		0	0			0	0		
		8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			654.462.101		111.024.777		46.656.500		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	250		160		175		0								0	0	0	0	0		0	0	0		
		8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka			4.529.044.903		701.124.317		709.620.800		1.221.000								1.221.000	0	0.17		1.221.000	0	0.03		
			Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	54		54		54		0								0		0	0	0		0	0		
		8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			**25.850.479.377**		**872.795.705**		**787.140.463**		**5.473.675**								**5.473.675**	**11**	**0.7**		**5.473.675**	**5.6**	**0**	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	500		100		100		30								30	30	0	30	0		6	0		
		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			25.850.479.377		872.795.705		787.140.463		5.473.675								5.473.675	11.1	0.7		5.473.675	5.56	0.02		
			Jumlah kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan																		0	0			0	0		
		8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum			25.299.322.172		806.896.817		763.170.163		3.557.425								3.557.425	0	0.47		3.557.425	0	0.01		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																									
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	125		125		80		0								0		0	0	0		0	0		
		8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			495.116.075		59.500.506		19.747.800		984.375							984.375	0	4.98		984.375	0	0.2		
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	100		150		60		0								0		0	0	0		0	0		
		8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			56.041.130		6.398.382		4.222.500		931.875							931.875	33.3	22.1		931.875	16.7	1.66		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	12		12		6		2								2		33.3	0	2		16.7	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)																								
		8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			**530.551.579**		**114.154.499**		**20.951.550**		**1.181.250**								**1.181.250**	**13**	**5.6**		**1.181.250**	**13**	**0.2**	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	467		92		93		88								88		94.6	0	88		18.8	0		
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			530.551.579		114.154.499		20.951.550		1.181.250								1.181.250	12.5	5.64		1.181.250	12.5	0.22		
			Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan																		0	0			0	0		
		8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			530.551.579		114.154.499		20.951.550		1.181.250								1.181.250	12.5	5.64		1.181.250	12.5	0.22		
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	120		175		120		15								15		12.5	0	15		12.5	0		
		8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			**3.222.890.551**		**224.830.756**		**58.362.800**		**1.575.000**								**1.575.000**	**10**	**2.7**		**1.575.000**	**10**	**0.1**	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	500		100		100		25								25		25	0	25		5	0		
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang			3.222.890.551		224.830.756		58.362.800		1.575.000								1.575.000	10	2.7		1.575.000	10	0.05		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya																									
			Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya																		0	0			0	0		
		8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			3.222.890.551		224.830.756		58.362.800		1.575.000								1.575.000	10	2.7		1.575.000	10	0.05		
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	150		150		150		15								15		10	0	15		10	0		
		8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**			**2.663.309.060**		**422.061.573**		**204.664.600**		**81.972.520**								**81.972.520**	**21**	**40**		**81.972.520**	**15**	**3.1**	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan (Persentase)	500		100		100		100								100		100	0	100		20	0		
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			2.663.309.060		422.061.573		204.664.600		81.972.520								81.972.520	21	40.1		81.972.520	14.7	3.08		
			Jumlah informasi konflik sosial yang ditindaklanjuti																		0	0			0	0		
		8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			1.373.983.598		253.647.388		82.687.600		33.041.000								33.041.000	38	40		33.041.000	19	2.4		
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	200		200		100		38								38		38	0	38		19	0		

NO		KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KINERJA	INDIKATOR	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2026 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAAN RKPD TAHUN 2026)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNGJAWAB	KET
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)																								
		8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			463.025.472		52.264.375		21.825.000		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	70		120		70		0								0		0	0	0		0	0		
		8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			826.299.990		116.149.810		100.152.000		48.931.520								48.931.520	25	48.9		48.931.520	25	5.92		
			Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	12		12		12		3								3		25	0	3		25	0		
		JUMLAH				**6,440,587,054,028**		**755,578,215,959**		**752,342,276,674**		**156.079.770.201**								**156.079.770.201**				**145,250,761,486**				
		Rata-rata capaian kinerja (%)																			**44**	**20.74**			**22**	**2.3**		**SUB KEGIATAN**
		Predikat kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		Rata-rata capaian kinerja (%)																			**68**	**0**			**22**	**0**		**PROGRAM**
		Predikat kinerja																			**Sedang**				**Sangat Rendah**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	a. Arahan dan dukungan yang kuat dari pimpinan dalam mendorong percepatan penyerapan anggaran b. Regulasi pengelolaan anggaran yang jelas dan bisa dipahami dengan baik yang mempermudah proses pelaksanaan kegiatan dan pembayaran c. Aspek pengadaan barang dan jasa yang mendukung proses pelaksanaan transaksi pembelian dan pengadaan d. Tepat waktunya pelaksana teknis kegiatan dalam melakukan realisasi belanja pegawai, belanja rutin kantor/belanja operasional kantor

Faktor penghambat pencapaian kinerja	a. Skedul/ jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan pada triwulan ke dua. b. Dalam skedul/jadwal yang disusun masih pada koordinasi dan belum melakukan realisasi belanja mengingat pelibatan pihak ketiga
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	a. Percepatan penyelesaian koordinasi dan pengumpulan data dalam rangka pemantauan dan monitoring b. Percepatan realisasi belanja barang maupun jasa
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	a. menyempurnakan program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi capaian sebelumnya, b. menyesuaikan prioritas pembangunan dengan kebutuhan daerah c. memperkuat indikator kinerja d. memastikan sinkronisasi dengan RPJMD, kebijakan nasional, dan ketersediaan anggaran

II.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Kota Payakumbuh berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kota Payakumbuh.

II.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan RPJMD Tahun 2025–2029, permasalahan daerah yang dikategorikan sebagai prioritas merupakan permasalahan yang berkaitan erat dengan penyediaan layanan dasar kepada masyarakat serta pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang kemudian ditetapkan menjadi sasaran pembangunan daerah yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan. Sasaran Pembangunan tersebut meliputi:

1. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat,
2. meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan,
3. menurunkan tingkat kemiskinan,
4. meningkatnya kualitas pelayanan publik,
5. meningkatnya pembangunan infrastruktur berkualitas,
6. meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Sejalan dengan sasaran tersebut, beberapa permasalahan prioritas daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Permasalahan Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Belum optimal Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi Kota Payakumbuh hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan daerah sekitar pertumbuhan Ekonomi Kota Payakumbuh tahun 2025 sebesar 4,95%.
2. Belum optimal penanggulangan kemiskinan. Selama periode tahun 2021 hingga tahun 2025, Kota Payakumbuh menghadapi tantangan dalam penanggulangan kemiskinan, meskipun telah ada upaya dan kebijakan yang dilaksanakan namun penurunannya tidak signifikan. Upaya penurunan kemiskinan Kota Payakumbuh belum optimal dibandingkan dengan penurunan angka kemiskinan di kota lainnya di Sumatera Barat. Selama 5 (lima) tahun terakhir Kota Payakumbuh berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 5,65% tahun 2021 ke 4,53% pada tahun 2025.
3. Belum optimal penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka. Tahun 2025 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Payakumbuh masih berada pada angka 4,96%. Dalam lima tahun terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Payakumbuh menunjukkan angka fluktuatif yang relatif kecil.
4. Belum optimal Pembangunan Sumber Daya Manusia, Indeks Pembangunan Manusia Kota Payakumbuh selama rentang tahun 2021 sampai 2025 tahun terjadi peningkatan dari angka 79,33 pada tahun 2021 menjadi 81,62 pada tahun 2025 yang dapat diartikan bahwa capaian pembangunan manusia di Kota Payakumbuh sangat tinggi, namun masih di bawah IPM Kota Bukittinggi, dan di atas IPM Kota Solok dan Padang Panjang.
5. Kualitas kesehatan masyarakat yang masih rendah. Dalam 5 (lima) tahun terakhir kualitas kesehatan masyarakat di Kota Payakumbuh masih dalam kategori rendah, ditandai dengan adanya beberapa indikator pelayanan kesehatan yang belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka prevalensi stunting Kota Payakumbuh tahun 2025 sebesar 16,4%. Hal ini menggambarkan masih lemahnya pemenuhan gizi anak usia dini dan kurangnya pemahaman orang tua mengenai pola asuh anak dan makanan bergizi
6. Rata-rata Lama Sekolah yang belum optimal. Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Payakumbuh sampai dengan tahun 2025 berada pada angka 11,08 tahun. Rata-rata lama sekolah di Kota Payakumbuh sudah cukup baik dan cenderung naik setiap tahunnya.

7. Tingginya ketimpangan pendapatan Kota Payakumbuh/Distribusi pendapatan yang belum merata. Indeks Gini Kota Payakumbuh tahun 2025 masuk kategori ketimpangan sedang karena berada pada kisaran 0,3 sampai dengan 0,5. Pada tahun 2025 Indeks Gini Kota Payakumbuh sebesar 0,271 mengalami sedikit penurunan dibanding dari tahun sebelumnya, tetapi lebih tinggi dari Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat yaitu 0,313.

B. Permasalahan Berdasarkan Aspek Daya Saing Daerah

1. Masih tingginya angka ketergantungan penduduk Kota Payakumbuh. Pada tahun 2024 angka ketergantungan total Kota Payakumbuh sebesar 44,61, artinya setiap 100 orang penduduk usia kerja mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang belum produktif atau dianggap tidak produktif lagi. Perlu peningkatan dalam menunjang daya saing daerah melalui pendidikan, pelatihan dan kursus keterampilan sesuai dengan tuntutan pasar kerja, di samping pelatihan-pelatihan untuk menciptakan entrepreneur yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
2. Belum opimalnya partisipasi angkatan kerja. Pada tahun 2025, jumlah penduduk yang bekerja di Kota Payakumbuh mengalami penurunan dari 74.083 orang menjadi 76.601 orang. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya peluang kerja, pemutusan hubungan kerja, dan peningkatan jumlah usia produktif yang tidak terserap pasar kerja. Angka pengangguran juga naik dari 3.791 orang di tahun 2024 menjadi 3.791 orang pada 2025, mencerminkan ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dan kebutuhan pasar. Selain itu, jumlah angkatan kerja juga menurun tipis dari 77.907 menjadi 77.876 orang.

C. Permasalahan Terkait Kajian Lingkungan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam RPJMD adalah proses analisis sistematis yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). KLHS berfungsi sebagai alat bantu dalam perencanaan pembangunan daerah agar Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) yang disusun tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis Kota Payakumbuh dalam KLHS RPJMD 2025-2029 sebagai berikut:

Permasalahan berdasarkan hasil konsultasi Publik:

1. Belum optimalnya pengelolaan sampah
2. Penurunan kualitas air
3. Peningkatan alih fungsi lahan
4. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi
5. Belum optimalnya kualitas pendidikan
6. Belum optimalnya potensi pariwisata dan budaya
7. Ancaman ketahanan pangan
8. Lemahnya penegakan hukum
9. Masih tingginya angka stunting dan penyakit tidak menular

Permasalahan berdasarkan analisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjuan (TPB):

1. 43% luas Kota Payakumbuh mempunyai Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) air terlampaui.
2. 71% Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) air dalam kondisi kritis berat.
3. 1.537, 21 Ha berada pada resiko multi bahaya tinggi.
4. 29% luas wilayah Kota Payakumbuh mempunyai jasa lingkungan hidup kategori sangat rendah dan rendah.
5. Produksi padi Kota Payakumbuh turun 5,02% pada tahun 2023.
6. Empat nagari mempunyai kerentanan perubahan iklim kategori tinggi.
7. Belum adanya proklim yang berkelanjutan di Kota Payakumbuh.
8. Keanekaragaman hayati (flora dan fauna) di Kota Payakumbuh sudah banyak yang terdegradasi.
9. Turunnya persentase sampah yang terkelola.
10. Penurunan IKLH

Permasalahan berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Kota Payakumbuh:

1. Pengelolaan persampahan
2. Penurunan kualitas dan kuantitas air
3. Alih fungsi lahan
4. Pengelolaan sampah.
5. Sumber air baku

6. Ruang Terbuka Hijau
7. Pengelolaan limbah cair
8. Kawasan Rawan Bencana

II.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Daerah

Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah adalah proses sistematis untuk menemukan, mengenali, dan merumuskan hambatan, kekurangan, atau kesenjangan antara kondisi nyata pelaksanaan urusan pemerintahan dengan kondisi yang seharusnya, guna mengetahui akar masalah sebagai dasar penyusunan solusi dan kebijakan. Identifikasi masalah juga memberikan gambaran solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Permasalahan yang terjadi di daerah dapat diklasifikasikan berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam regulasi ini, urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah dikelompokkan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap permasalahan yang muncul di daerah dapat dianalisis dan disesuaikan dengan tingkat pemerintahan yang berwenang dalam menanganinya. Berikut ini disajikan permasalahan Kota Payakumbuh mendasarkan urusan pemerintahan yang diampu oleh perangkat daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan daerah dibagi menjadi:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan

Pendidikan memegang peran strategis dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan dalam pembangunan sektor pendidikan akan berkontribusi pada terbentuknya individu yang mandiri dan memiliki martabat, dengan landasan nilai-nilai spiritual serta semangat kebangsaan. Beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian terkait dengan urusan pendidikan di Kota Payakumbuh antara lain:

1) Masih rendahnya kualitas kompetensi guru/tenaga pendidik
2) Adanya ketimpangan jumlah peserta didik antar sekolah yang berdampak pada efektifitas pembelajaran dan pemenuhan standar rombongan belajar (rombel).
3) Belum optimalnya capaian kompetensi minimum literasi dan numerasi pada satuan pendidikan
4) Terbatasnya ketersediaan dan kualitas lembaga pendidikan keterampilan/pendidikan vokasi
5) Belum optimalnya upaya penanganan dan reintegrasi Anak Tidak Sekolah (ATS)/anak putus sekolah
6) Rendahnya penerapan transformasi digital dan pendekatan bilingual di satuan pendidikan
7) Belum optimalnya pengembangan dan implementasi kurikulum muatan lokal (Mulok) yang konstektual dan berbasis potensi daerah.
8) Belum optimalnya internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter di lingkungan satuan pendidikan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan pendidikan di Kota Payakumbuh, dapat dilakukan langkah-langkah berupa peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, penataan zonasi sekolah agar jumlah siswa seimbang, penguatan pembelajaran literasi dan numerasi, pengembangan lembaga pendidikan vokasi yang bermutu dan relevan, penanganan serta reintegrasi anak tidak sekolah secara terpadu, penerapan teknologi digital dan pembelajaran dwibahasa secara bertahap, penyusunan kurikulum muatan lokal yang berbasis potensi daerah, serta pembudayaan nilai-nilai karakter yang terintegrasi dalam seluruh kegiatan pendidikan.

b. Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan merupakan elemen strategis dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia secara menyeluruh. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan tingkat kesehatan seluruh lapisan masyarakat, mencakup setiap tahapan kehidupan mulai dari masa kehamilan hingga usia lanjut. Dalam upaya peningkatan dejarat

kesehatan masyarkat di Kota Payakumbuh masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

a. Masih belum optimal kualitas pelayanan primer.
b. Masih belum optimal pelayanan kesehatan lanjutan.
c. Masih belum optimal kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional.
d. Belum optimal pelayanan kesehatan siklus hidup dan gizi masyarakat.
e. Masih belum optimalnya ketahanan kesehatan dan pengendalian penyakit.
f. Masih rendahnya cakupan imunisasi.
g. Masih tingginya angka prevalensi stunting.

Untuk mengatasi permasalahan kesehatan di Kota Payakumbuh, perlu dilakukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer dan lanjutan melalui pemenuhan sarana prasarana serta kompetensi tenaga kesehatan, penggalakan sosialisasi dan pendataan menyeluruh guna memperluas kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, penguatan pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup dan pemenuhan gizi masyarakat, peningkatan sistem kewaspadaan serta pengendalian penyakit menular maupun tidak menular, perluasan cakupan imunisasi hingga ke tingkat wilayah paling terpencil, serta pelaksanaan intervensi terpadu dan berkelanjutan untuk menurunkan angka stunting secara signifikan.

c. Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sangat berpengaruh terhadap perkembangan sebuah daerah karena berhubungan langsung dengan penyediaan infrastruktur dasar dan pengelolaan tata ruang yang berkelanjutan untuk mendukung kehidupan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi nasional daerah. Beberapa permasalahan yang menjadi tantangan dalam pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain:

1) Belum optimalnya infrastruktur pelayanan dasar di Kota Payakumbuh disebabkan oleh belum seimbangnya peningkatan kebutuhan masyarakat dengan kapasitas dan kualitas infrastruktur yang tersedia, terutama pada aspek jalan, drainase, persampahan, dan prasarana pendukung lainnya, sehingga berdampak pada kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan.
2) Belum optimalnya kesesuaian standar dan fungsi lahan akibat masih perlunya penguatan pengendalian pemanfaatan ruang agar penggunaan lahan dapat berjalan sesuai dengan peruntukan dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
3) Belum optimalnya kapasitas sistem drainase dan pengelolaan sungai dalam menghadapi peningkatan limpasan air akibat perkembangan kawasan perkotaan. Sistem drainase skala kota tahun 2025 mencapai 69,49% dari target 69,99%, menunjukkan masih terdapat bagian infrastruktur drainase yang perlu ditingkatkan agar mampu mengendalikan genangan dan aliran air permukaan. Pengelolaan sungai juga menjadi bagian penting dalam menjaga fungsi sungai sebagai pengendali tata air.
4) Belum optimalnya pengelolaan dan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi akibat masih perlunya peningkatan pemeliharaan serta rehabilitasi infrastruktur irigasi agar mampu menjaga ketersediaan dan keandalan suplai air. Kondisi jaringan irigasi yang belum sepenuhnya optimal berpotensi menurunkan fungsi layanan irigasi dan berdampak terhadap produktivitas pertanian.
5) Masih terdapat tantangan dalam pengelolaan infrastruktur dasar Kota Payakumbuh, terutama terkait pengendalian pemanfaatan ruang, penguatan sistem drainase dan pengelolaan sungai, keberlanjutan fungsi jaringan irigasi, peningkatan kepatuhan tata ruang, serta perluasan akses sanitasi aman guna mendukung pembangunan kota yang tertata, aman, dan berkelanjutan.
6) Belum optimalnya pengelolaan persampahan akibat belum seimbangnya peningkatan timbulan sampah dengan kapasitas sistem pengelolaan yang tersedia, sehingga diperlukan penguatan sarana prasarana, peningkatan cakupan layanan, serta optimalisasi pengurangan dan pengolahan sampah secara berkelanjutan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh perlu melakukan penguatan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur dasar secara terpadu melalui peningkatan kualitas, kapasitas, dan pemerataan infrastruktur pelayanan publik, terutama pada jaringan jalan, sistem drainase, pengelolaan sungai, jaringan irigasi, sanitasi, dan persampahan. Upaya yang dilakukan meliputi percepatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan infrastruktur sesuai standar teknis; penguatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui peningkatan pengawasan, penegakan aturan tata ruang, serta memastikan pembangunan sesuai RTRW; optimalisasi pengelolaan sumber daya air melalui normalisasi

sungai, peningkatan kapasitas drainase, dan pemeliharaan jaringan irigasi secara berkelanjutan; peningkatan akses sanitasi aman dan kualitas layanan lingkungan; serta penguatan sistem pengelolaan sampah melalui peningkatan sarana prasarana persampahan, perluasan cakupan layanan, pengurangan sampah dari sumbernya, dan pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Selain itu, diperlukan perencanaan pembangunan berbasis data, sinergi antar perangkat daerah, serta dukungan pembiayaan yang berkelanjutan agar pembangunan infrastruktur mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung terwujudnya Kota Payakumbuh yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

d. Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman

Perumahan dan kawasan pemukiman menjadi salah satu urusan yang strategis dalam menjamin hak dasar masyarakat atas tempat tinggal yang layak, aman dan terjangkau. Selain itu kawasan pemukiman yang tertata dengan baik akan mendukung pemerataan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun dalam upaya pemenuhan masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

1) Masih belum optimalnya pembangunan rumah layak huni.
2) Belum optimalnya pengelolaan prasarana sarana utilitas (PSU) perumahan dan kawasan pemukiman.
3) Ketimpangan antara kebutuhan dengan ketersediaan rumah *(Backlog Rumah)* yang masih tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan di bidang perumahan dan kawasan pemukiman, dilakukan langkah peningkatan pembangunan rumah layak huni yang aman dan terjangkau, pemenuhan serta pengelolaan prasarana sarana dan utilitas secara memadai dan berkelanjutan, serta mempercepat pembangunan rumah baru dan menyediakan beragam skema bantuan perumahan guna menekan angka ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah secara signifikan

e. Urusan Pemerintah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Untuk mewujudkan kondisi wilayah yang lebih kondusif di Kota Payakumbuh, telah dilakukan berbagai langkah strategis, seperti peningkatan ketertiban umum dan pelaksanaan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana. Kendati demikian, sejumlah tantangan dan permasalahan masih memerlukan perhatian dan penanganan lebih lanjut.

1) Masih adanya kasus gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2) Masih terdapat pelanggaran Perda dan Perkada.
3) Belum optimalnya mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana.
4) Belum turunnya resiko bencana dikarenakan keterbatasan mitigasi struktural/non sruktural, sistem informasi kebencanaan, deteksi dini bencana.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan peningkatan patroli dan pengawasan guna menekan gangguan ketertiban dan ketenteraman umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah secara tegas disertai sosialisasi luas kepada masyarakat, serta penguatan sistem mitigasi, kesiapsiagaan dan adaptasi risiko bencana melalui penyusunan rencana penanggulangan serta penyediaan sarana prasarana yang memadai.

Pasca bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat pada akhir tahun 2025, Kota Payakumbuh menghadapi sejumlah permasalahan pembangunan yang tidak hanya berkaitan dengan kerusakan fisik, tetapi juga berdampak pada aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pembangunan. Meskipun tingkat kerusakan di Kota Payakumbuh tidak sebesar beberapa daerah lain di Sumatera Barat, posisinya sebagai pusat perdagangan dan jasa menyebabkan dampak tidak langsung terhadap pembangunan cukup signifikan. Bencana tersebut juga menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) untuk 13 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, termasuk Kota Payakumbuh.

Permasalahan Pasca Bencana Hidrometeorologi terhadap Pembangunan Kota Payakumbuh

a) Kerusakan Infrastruktur Dasar
   - Kerusakan jaringan jalan, jembatan, drainase, talud, serta fasilitas umum akibat banjir dan longsor.
   - Menurunnya kualitas infrastruktur permukiman sehingga mengganggu mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
   - Meningkatnya kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur.

b) Meningkatnya Risiko Banjir Perkotaan
   - Kapasitas drainase yang belum memadai menghadapi curah hujan ekstrem.
   - Sedimentasi sungai dan saluran drainase menyebabkan genangan lebih sering terjadi.
   - Perlunya pembangunan sistem drainase berbasis pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan infrastruktur hijau.

c) Terganggunya Pertumbuhan Ekonomi Daerah
   - Aktivitas perdagangan, UMKM, dan jasa mengalami perlambatan akibat terganggunya akses transportasi.
   - Penurunan produktivitas sektor pertanian dan hortikultura karena lahan terdampak banjir.
   - Menurunnya daya beli masyarakat sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

d) Beban Fiskal Daerah Meningkat
   - Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
   - Sebagian program pembangunan harus ditunda atau direalokasi untuk pemulihan pascabencana.
   - Ketergantungan terhadap dukungan APBN dan Pemerintah Provinsi meningkat.

e) Meningkatnya Kerentanan Sosial
   - Masyarakat terdampak kehilangan sumber penghasilan sementara.
   - Kerusakan rumah dan fasilitas pelayanan publik memengaruhi kualitas hidup masyarakat.
   - Kelompok rentan (lansia, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas) membutuhkan perlindungan yang lebih besar.

f) Penurunan Kualitas Lingkungan
   - Terjadi sedimentasi sungai dan saluran air.
   - Berkurangnya fungsi kawasan resapan air akibat perubahan tata guna lahan.
   - Timbulan sampah pasca bencana memperburuk kualitas lingkungan perkotaan.

g) Belum Optimalnya Ketahanan Infrastruktur terhadap Perubahan Iklim
   - Sebagian infrastruktur belum dirancang untuk menghadapi intensitas hujan ekstrem.
   - Diperlukan penerapan prinsip pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana (*climate-resilient infrastructure*).

h) Perlunya Integrasi Mitigasi Bencana dalam Perencanaan Pembangunan
   - Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan banjir dan longsor masih perlu diperkuat.
   - Kajian risiko bencana perlu menjadi dasar penyusunan RPJMD, RKPD, RTRW, dan RDTR.
   - Program rehabilitasi harus disertai upaya pengurangan risiko bencana agar kerusakan serupa tidak berulang.

Implikasi terhadap Pembangunan Kota Payakumbuh

Pasca bencana hidrometeorologi, fokus pembangunan Kota Payakumbuh perlu diarahkan pada:

a) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar;
b) peningkatan kapasitas sistem drainase dan pengendalian banjir;
c) penguatan ketahanan ekonomi masyarakat dan UMKM;
d) pembangunan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim;
e) konservasi daerah tangkapan air dan rehabilitasi lingkungan;
f) penguatan sistem peringatan dini serta kesiapsiagaan masyarakat;
g) integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dengan pendekatan tersebut, pemulihan pasca bencana tidak hanya mengembalikan kondisi sebelum bencana (*build back*), tetapi juga meningkatkan kualitas pembangunan menjadi lebih tangguh (*build back better*), sehingga Kota Payakumbuh lebih siap menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi di masa mendatang. Bentuk komitmen pemerintah pusat dengan penyaluran tambahan dana transfer yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026. Kebijakan penambahan TKD ini agar pemerintah daerah dapat optimal dalam penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, serta upaya pencegahan ke depan bisa berjalan lebih efektif.

f. Urusan Pemerintah Bidang Sosial

Upaya pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian dari strategi peningkatan kualitas hidup masyarakat guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar, serta menciptakan kehidupan yang bermartabat dan layak. Pelaksanaannya mencakup perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial bagi kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kota Payakumbuh terus menjalankan program-program tersebut secara berkelanjutan. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial, antara lain:

1) Belum optimalnya kualitas data kemiskinan yang komprehensif, valid dan terintegrasi.
2) Belum optimalnya kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan penyempurnaan sistem pendataan kemiskinan agar menjadi lebih lengkap, akurat dan terhubung antar lembaga, serta meningkatkan kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui pemberian pelatihan keterampilan, pendampingan usaha dan dukungan akses sumber daya agar mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri dan berkelanjutan.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja

Dalam menurunkan angka pengangguran berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh baik dari segi peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, namun secara umum belum mampu menghadapi tantangan kebutuhan pasar ekonomi global. Beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian kedepan antara lain:

1) Rendahnya produktivitas tenaga kerja.
2) Rendahnya daya saing pencari kerja.
3) Ketersediaan lapangan kerja yang terbatas.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja agar produktivitas meningkat, penyelenggaraan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri guna memperkuat daya saing pencari kerja, serta mendorong pertumbuhan investasi dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperluas dan menciptakan lapangan kerja baru yang lebih banyak dan beragam.

b. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pembangunan sumber daya manusia yang berperspektif gender dilaksanakan sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi dalam berbagai aspek kehidupan. Di samping itu, peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak dipandang strategis dalam memperkuat ketahanan serta kesejahteraan keluarga, melalui peran serta aktif mereka dalam proses pembangunan. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara serius oleh pemerintah diantaranya:

1) Belum optimalnya perlindungan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
2) Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan difabel.
3) Masih rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan penguatan perlindungan hukum dan peningkatan peran serta perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, pemenuhan hak-hak dasar anak dan penyandang disabilitas melalui layanan yang inklusif dan terpadu, serta penyediaan pelatihan keterampilan, akses usaha dan kesempatan kerja yang setara guna mendorong dan meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan secara signifikan.

c. Urusan Pemerintah Bidang Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem komprehensif yang meliputi empat subsistem utama, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi pangan, serta keamanan pangan. Dalam upaya pencapaian ketahanan pangan yang optimal, masih terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi tantangan dan memerlukan penanganan, di antaranya:

1) Masih rendahnya konsumsi kelompok pangan tertentu sesuai Angka Kecukupan Energi (AKE).
2) Masih belum optimalnya diversifikasi konsumsi pangan.
3) Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan.

4) Terbatasnya ketersediaan dan fluktuasi harga pangan pokok dan pangan lainnya.

Untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan tersebut, dilakukan upaya perbaikan pola konsumsi agar sesuai standar kecukupan gizi, pengembangan dan pembudayaan keberagaman jenis pangan agar tidak bergantung pada satu jenis saja, penguatan sistem pengelolaan dan penyimpanan cadangan pangan daerah yang aman dan memadai, serta peningkatan produksi lokal dan penataan sistem distribusi guna menjamin ketersediaan pangan yang stabil sekaligus menekan fluktuasi harga di pasaran.

d. Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan

Dalam proses pembangunan, kepastian terhadap status dan pemanfaatan lahan menjadi hal yang sangat penting, khususnya dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi lahan pertanian, mendukung pembangunan infrastruktur strategis, serta melindungi aset tanah. Namun demikian, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai permasalahan di bidang pertanahan yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1) Belum optimalnya penatagunaan tanah pemerintah dan tanah konsolidasi.
2) Masih rendahnya pemanfaatan tanah ulayat sebagai faktor pendorong dan menjadi modal ekonomi kota.
3) Belum optimlanya pengelolaan tanah untuk program strategis kota.

Untuk mengatasi permasalahan pertanahan tersebut, dilakukan penataan, pendataan dan pengelolaan tanah pemerintah serta tanah konsolidasi secara tertib dan akurat, pemberdayaan dan pengembangan potensi tanah ulayat agar dapat dimanfaatkan secara produktif sebagai modal penggerak ekonomi daerah, serta penyusunan rencana dan alokasi penggunaan tanah yang terencana dan terpadu guna mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh program strategis pembangunan kota.

e. Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan menjadi hal penting dalam menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan. Namun terdapat permasalahan yaitu :

1) Belum optimal pengelolaan persampahan kota.
2) Belum optimal upaya pengelolaan lingkungan.
3) Belum terpenuhi Ruang Terbuka Hijau publik.

Untuk mengatasi permasalahan pengelolaan lingkungan tersebut, dilakukan peningkatan sistem pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan kembali sampah secara terpadu dan berkelanjutan, penguatan pengawasan, penegakan aturan serta pemulihan kualitas lingkungan secara menyeluruh, serta penyediaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau publik yang memadai dan merata di seluruh kawasan kota guna menjaga keseimbangan ekosistem.

f. Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi secara nasional menjadi fondasi utama dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. data kependudukan memegang peranan strategis sebagai dasar penetapan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian sasaran pembangunan di berbagai bidang. Namun demikian, sampai saat ini masih terdapat sejumlah permasalahan yaitu:

1) Belum optimal kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2) Belum optimal pemanfaatan data kependudukan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui penyederhanaan prosedur, pemenuhan sarana prasarana serta peningkatan kompetensi petugas, sekaligus mengoptimalkan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar utama dalam penyusunan perencanaan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah yang tepat sasaran.

g. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pemberdayaan masyarakat menjadi elemen penting dalam mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan. Melalui pemberdayaan, masyarakat didorong untuk memiliki inisiatif dan tanggung jawab dalam mengelola kegiatan ekonomi maupun sosial, sebagai upaya memperbaiki kondisi kehidupannya secara mandiri dan berkelanjutan.

Namun demikian, proses pemberdayaan dan pembangunan berbasis masyarakat ini tidak lepas dari berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan.
2) Belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga kemasyarakatan, pemerintahan dan swasta dalam pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan penguatan peran serta dan kemandirian masyarakat melalui pendampingan, pelatihan dan pemberian akses sumber daya agar mampu berperan aktif dalam setiap tahapan pembangunan, serta mengoptimalkan sinergi, koordinasi dan pembagian tugas yang jelas antara lembaga kemasyarakatan, pemerintah dan pihak swasta guna menciptakan kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan dalam mendukung keberhasilan seluruh upaya pemberdayaan masyarakat.

h. Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan pengendalian penduduk dan program keluarga berencana merupakan langkah strategis dalam mengupayakan keseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung sumber daya yang tersedia. Pertambahan jumlah penduduk perlu diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan dasar guna menjamin kualitas hidup yang layak bagi masyarakat. Namun demikian, masih terdapat berbagai isu yang memerlukan perhatian, seperti :

1) Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketahanan keluarga.
2) Masih rendahnya kemauan masyarakat dalam ber KB.
3) Tingginya pertumbuhan penduduk.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ketahanan keluarga dan manfaat program keluarga berencana, disertai peningkatan kualitas pelayanan serta kemudahan akses layanan KB agar minat dan partisipasi masyarakat semakin tinggi, sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan dan seimbang dengan kemampuan daya dukung sumber daya daerah.

i. Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan

Transportasi memegang peranan yang sangat vital dan strategis dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi serta mendukung pengembangan wilayah di Kota Payakumbuh. Meskipun demikian, sektor perhubungan masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

1) Belum tersedianya tempat parkir yang representatif.
2) Belum optimalnya pengelolaan terminal penumpang dan angkutan barang.
3) Belum adanya *smart transportation* di Kota Payakumbuh.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan pembangunan dan penyediaan lokasi parkir yang memadai, aman dan sesuai standar, peningkatan tata kelola, pelayanan serta pemenuhan fasilitas pada terminal penumpang maupun angkutan barang agar berfungsi optimal, serta merencanakan dan menerapkan sistem transportasi cerdas berbasis teknologi guna meningkatkan efisiensi, keamanan dan kenyamanan pergerakan lalu lintas di Kota Payakumbuh.

j. Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi Dan Informasi

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan penggunaan website perlu terus ditingkatkan guna memperkuat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah kendala dan permasalahan yang perlu segera diatasi, antara lain:

1) Keterbatasan Infrastruktur jaringan dan Konektivitas Antar Wilayah.
2) Belum optimalnya penerapan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan pengembangan dan pemenuhan infrastruktur jaringan serta konektivitas yang merata dan andal antar seluruh wilayah, serta penguatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh melalui penyempurnaan aplikasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan integrasi layanan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan dan berkualitas.

k. Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Kota Payakumbuh, sektor mikro merupakan salah satu tulang punggung ekonomi daerah, terutama dengan tingginya jumlah pelaku usaha mikro di bidang kuliner, kerajinan, dan perdagangan. Namun demikian, pengembangan sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius. Beberapa permasalahan utama yang teridentifikasi antara lain:

a. Belum optimalnya pengembangan dan penguatan koperasi.
b. Belum optimalnya pengembangan dan daya saing Usaha Mikro.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan penguatan kelembagaan, manajemen dan permodalan koperasi agar mampu berjalan sehat dan memberikan manfaat maksimal bagi anggotanya, serta meningkatkan kualitas produk, pemasaran dan kemampuan manajerial usaha mikro melalui pelatihan, pendampingan serta akses kemudahan modal dan teknologi, sehingga daya saingnya semakin kuat dan mampu berkembang menjadi usaha yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

l. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal

Investasi memegang peranan penting sebagai salah satu motor penggerak dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Kendati demikian, dalam upaya mendorong peningkatan realisasi investasi, masih dijumpai berbagai permasalahan yaitu:

1) Masih kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam menaati aturan berusaha.
2) Belum optimalnya pengelolaan potensi investasi daerah.
3) Masih lemahnya kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan peningkatan sosialisasi serta pengawasan dan penegakan aturan agar pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku, pemetaan dan pengelolaan potensi investasi daerah secara terstruktur dan terpadu serta promosi yang gencar untuk menarik minat penanam modal, serta memperkuat kerja sama dan sinergi yang erat, saling mendukung dan berkelanjutan antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dalam setiap tahapan pengembangan investasi daerah.

m. Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pemuda dalam pembangunan masih ditemukan beberapa permasalahan antara lain:

1) Belum optimalnya peran pemuda dalam Pembangunan.
2) Belum optimalnya prestasi pemuda dan olah raga.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan pemberian ruang, dukungan dan pendampingan yang memadai agar pemuda dapat berperan aktif dan berkontribusi nyata dalam berbagai bidang pembangunan, serta meningkatkan pembinaan, fasilitas dan kompetisi guna menggali bakat, meningkatkan prestasi pemuda dan memajukan kualitas olahraga secara berkelanjutan di daerah.

n. Urusan Pemerintah Bidang Statistik

Peningkatan kualitas penyediaan data dan informasi yang dapat dipercaya, mutakhir, dan sesuai dengan kebutuhan menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara terintegrasi dan berkelanjutan. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1) Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi daerah yang valid dan terintegrasi.
2) Belum optimalnya sistem informasi satu data yang dapat diakses masyarakat dengan mudah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan penyempurnaan sistem pengumpulan, pengolahan dan pemutakhiran data serta informasi daerah agar menjadi akurat, lengkap dan saling terintegrasi antar sektor, sekaligus mengembangkan dan mengaktifkan sistem informasi satu data yang terstandar, mudah diakses dan terbuka bagi masyarakat guna mendukung perencanaan pembangunan yang tepat serta transparansi pelayanan publik.

o. Urusan Pemerintah Bidang Persandian

Penguatan sistem keamanan pada jaringan komunikasi dan sistem informasi perlu terus dilakukan sebagai langkah antisipatif terhadap pesatnya perkembangan teknologi

informasi yang terus mengalami perubahan dan tantangan yang semakin kompleks. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

1) Tingkat Kesadaran terhadap Cyber Security masih rendah.
2) Belum optimalnya keamanan informasi pemerintah daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan sosialisasi, edukasi dan pelatihan secara berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman serta kesadaran seluruh pihak akan pentingnya keamanan siber, sekaligus memperkuat sistem perlindungan, pembaruan teknologi keamanan dan penerapan standar keamanan informasi yang ketat dan menyeluruh pada seluruh layanan dan data milik pemerintah daerah agar terjamin kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaannya.

p. Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan

Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan kebudayaan antara lain:

1) Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya.
2) Belum optimalnya promosi budaya daerah.
3) Belum optimalnya peran kelembagaan adat dan budaya dalam pelestarian budaya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan upaya pendataan, dokumentasi dan pengembangan warisan budaya serta nilai-nilai luhur agar tetap terjaga dan diwariskan ke generasi mendatang, memperluas promosi dan pemasaran budaya daerah melalui berbagai kegiatan, media dan acara agar dikenal luas baik di dalam maupun luar daerah, serta memberdayakan dan memperkuat peran, fungsi dan kemitraan kelembagaan adat dan budaya agar dapat berperan aktif sebagai penggerak utama dalam menjaga, melestarikan dan memajukan kekayaan budaya daerah.

q. Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan

Urusan perpustakaan merupakan bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan budaya literasi masyarakat. Perpustakaan berperan sebagai pusat belajar yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1) Belum optimal pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan layanan perpustakaan.
2) Rendahnya minat baca/ literasi masyarakat yang berdampak pada kurang optimalnya layanan perpustakaan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal dalam pengelolaan koleksi, pelayanan dan akses informasi agar perpustakaan menjadi lebih modern, cepat dan mudah dijangkau, serta melaksanakan berbagai program sosialisasi, kampanye gemar membaca, kegiatan literasi yang menarik dan berkelanjutan guna menumbuhkan dan meningkatkan minat baca masyarakat, sehingga keberadaan dan layanan perpustakaan dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

r. Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan dukungan dari sistem penyelenggaraan kearsipan yang menyeluruh dan terintegrasi. Penyelenggaraan kearsipan harus mampu menjamin ketersediaan, keutuhan, dan keamanan arsip yang autentik dan dapat dipercaya, sehingga berfungsi sebagai alat bukti pertanggungjawaban yang sah. Selain itu, arsip tersebut harus dapat diakses dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan urusan kearsipan masih ditemui beberapa permasalahan antara lain:

1) Belum optimalnya sistem pengelolaan arsip secara tertib sesuai dengan kaidah kearsipan.
2) Masih rendahnya penelusuran dan penyelamatan arsip bernilai sejarah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan penyempurnaan dan penerapan sistem pengelolaan arsip yang tertib, terstandar dan sesuai kaidah kearsipan yang berlaku mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan hingga pemeliharaan, serta meningkatkan upaya pendataan, penelusuran, penyelamatan dan pelestarian arsip yang memiliki nilai sejarah melalui pendokumentasian yang baik, digitalisasi dan perlindungan yang memadai agar tetap terjaga keutuhannya, mudah diakses dan dapat diwariskan sebagai bukti sejarah dan pertanggungjawaban pemerintahan daerah.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Urusan Pemerintah Bidang Kelautan Dan Perikanan

Urusan bidang kelautan dan perikanan berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun memiliki potensi besar, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan antara lain:

1) Alih fungsi lahan budidaya perikanan.
2) Masih rendahnya produktifitas sektor perikanan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan pengendalian dan perlindungan lahan budidaya perikanan melalui penyusunan peraturan tata ruang yang tegas serta penegakan aturan agar alih fungsi lahan dapat dicegah dan dikendalikan, serta meningkatkan produktivitas sektor perikanan melalui pembinaan teknis, penerapan teknologi budidaya yang tepat guna, penyediaan bibit unggul dan pakan berkualitas, serta penguatan akses pasar dan permodalan, sehingga potensi kelautan dan perikanan dapat dimanfaatkan secara maksimal, berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan nyata bagi masyarakat.

b. Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata

Sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Selain memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, sektor ini juga memiliki peran penting dalam memberdayakan perempuan dan generasi muda melalui pengembangan kreativitas, serta mendukung pengentasan kemiskinan melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meskipun demikian, dalam proses pengembangannya, masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan perhatian dan penanganan lebih lanjut, antara lain:

1) Belum optimalnya pengembangan wisata daerah.
2) Belum tersedianya wisata unggulan daerah.
3) Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan pengembangan dan peningkatan kualitas fasilitas, aksesibilitas serta pelayanan di setiap destinasi wisata agar daya tariknya semakin meningkat, menetapkan dan mengembangkan lokasi serta produk wisata unggulan yang memiliki ciri khas dan keunikan daerah agar menjadi ikon yang dikenal luas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif melalui pembinaan, pelatihan, dukungan modal dan promosi bagi pelaku usaha, sehingga dapat bersinergi dengan sektor pariwisata untuk menciptakan nilai tambah, memperluas peluang usaha dan meningkatkan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan.

c. Urusan Pemerintah Bidang Pertanian

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk menjaga tingkat produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian yaitu:

1) Belum optimalnya produktifitas hasil pertanian.
2) Menurunnya daya dukung dan ketersediaan lahan pertanian.
3) Masih rendahnya tingkat pendapatan petani.

d. Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan

Pembangunan sektor perdagangan memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, menciptakan lapangan usaha, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong terbentuknya harga yang wajar dan pemerataan pendapatan. Sektor ini juga sangat penting untuk terus dikembangkan karena memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor lain, seperti pertanian, industri, pertambangan, keuangan, transportasi, dan telekomunikasi. Meski demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan perdagangan, antara lain:

1) Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar serta pedagang kaki lima.
2) Belum optimalnya pengelolaan asset pasar pertokoan.
3) Masih lemahnya Perlindungan Konsumen.
4) Masih rendahnya nilai eksport produk dan komoditas perdagangan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan peningkatan produktivitas hasil pertanian melalui pembinaan teknis, penerapan teknologi pertanian modern, penyediaan benih unggul dan sarana produksi berkualitas, sekaligus melakukan perlindungan lahan

pertanian pangan berkelanjutan serta penataan tata ruang untuk menjaga ketersediaan dan daya dukung lahan agar tidak beralih fungsi; di samping itu, diupayakan penguatan akses permodalan, penyederhanaan rantai pemasaran, peningkatan nilai tambah produk olahan dan jaminan harga yang layak, sehingga pendapatan dan kesejahteraan petani dapat meningkat secara nyata dan berkelanjutan.

e. Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian

Pembangunan sektor industri memiliki peran strategis sebagai penggerak utama perekonomian karena nilai kapitalisasi modal yang besar, daya serap tenaga kerja yang tinggi, dan kemampuannya menciptakan nilai tambah dari bahan baku. Oleh karena itu, sektor ini dapat mendorong pembangunan sektor lain dan meningkatkan daya beli masyarakat. Namun masih ada beberapa permasalahan yang menjadi perhatian yaitu :

1) Belum optimalnya pengembangan sektor-sektor strategis berbasis potensi lokal.
2) Masih rendahnya ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan.
3) Masih rendahnya penguasaan teknologi industri.
4) Belum optimalnya pengelolaan limbah industry.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan pemetaan dan pengembangan sektor-sektor strategis yang sepenuhnya berbasis pada potensi dan keunggulan sumber daya lokal agar memiliki keunggulan kompetitif, sekaligus menjamin ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pembinaan rantai pasok serta kemitraan erat dengan sektor penyedia bahan baku; di samping itu, ditingkatkan penguasaan dan penerapan teknologi industri yang tepat guna dan modern melalui pelatihan, alih teknologi dan dukungan fasilitas, serta diterapkan sistem pengelolaan limbah industri yang terpadu, ramah lingkungan dan sesuai standar peraturan agar mendukung keberlanjutan produksi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Unsur Kesekretariatan Daerah

Untuk mewujudkan *good governance* pelu diwujudkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. Namun dalam pelaksanaan terdapat permasalahan yang masih terjadi yaitu :

1) Belum optimalnya tata kelola Pemerintahan yang akuntabel.
2) Belum optimalnya penataan organisasi dan tata laksana pemerintahan
3) Belum optimalnya penguatan pembinaan lembaga keagamaan dan peningkatan kualitas mental masyarakat yang inklusif dan berkarakter.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan penyempurnaan sistem tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas di setiap tahapan pelayanan dan pengambilan keputusan; dilakukan pula penataan struktur organisasi, penyederhanaan prosedur kerja dan penyusunan standar operasional yang efisien agar kelembagaan berjalan teratur, cepat dan tepat fungsi; selain itu, diperkuat pembinaan, pemberdayaan dan sinergi dengan lembaga keagamaan, serta diselenggarakan berbagai program pembinaan karakter, nilai luhur dan toleransi, guna membentuk masyarakat yang berakhlak mulia, inklusif, rukun dan memiliki kepribadian yang kuat.

b. Unsur Kesekretariatan DPRD

Permasalahan yang ditemui pada unsur Kesekretariatan DPRD :

1) Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
2) Belum optimalnya peran DPRD dalam penataan produk hukum.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan penguatan dukungan administrasi, fasilitasi dan penyediaan data serta informasi yang lengkap dan akurat guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan secara efektif dan bertanggung jawab; serta mengoptimalkan peran DPRD dalam proses penyusunan, pembahasan dan penyempurnaan produk hukum daerah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, partisipatif dan mampu menciptakan landasan hukum yang jelas, berkeadilan dan mendukung pembangunan daerah.

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Unsur Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam proses pembangunan daerah. Kebutuhan terhadap perencanaan yang lebih partisipatif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin meningkat, seiring dengan perkembangan pembangunan yang semakin cepat, tidak dapat diprediksi. Seluruh dinamika ini harus diintegrasikan sebagai bagian dari masukan dalam penyusunan rencana pembangunan. Namun demikian, terdapat berbagai permasalahan dalam proses perencanaan yaitu:

1) Belum optimalnya kualitas perencanaan.
2) Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi dalam perumusan perencanaan pembangunan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui pendalaman analisis data, pelibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, penyelarasan dengan visi misi daerah serta penerapan metode perencanaan yang terukur, berbasis bukti dan berorientasi pada hasil; sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan sebagai bahan utama dalam mengidentifikasi keberhasilan, kekurangan dan tantangan, sehingga dapat dijadikan dasar perbaikan, penyempurnaan dan penyusunan rencana pembangunan yang lebih tepat sasaran, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

b. Unsur Keuangan

Salah satu bentuk pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan terhadap pendapatan daerah yang efektif dan akuntabel yang akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini antara lain:

1) Belum optimalnya pengelolaan asset daerah.
2) Terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan daerah.
3) Belum optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan penyempurnaan sistem pencatatan, inventarisasi, pemeliharaan dan pemanfaatan aset daerah secara teratur, akuntabel dan berbasis data agar nilai dan manfaat aset dapat terjaga serta dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pendapatan daerah; sekaligus melakukan diversifikasi dan penggalian sumber pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi kemitraan, akses skema pendanaan yang sah dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna menutupi keterbatasan dana; di samping itu, ditingkatkan efektivitas pemungutan, pengawasan dan penegakan aturan atas seluruh potensi pendapatan asli daerah, disertai penyederhanaan prosedur dan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga realisasi penerimaan dapat meningkat signifikan, terkelola baik dan menjadi sumber andalan bagi pembangunan daerah.

c. Unsur Kepegawaian

Untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, dibutuhkan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tangguh, berintegritas, profesional, netral, serta terbebas dari intervensi politik dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun, dalam upaya mewujudkan kondisi ideal tersebut, masih dijumpai sejumlah permasalahan yaitu:

1) Belum optimalnya penerapan merrit system.
2) Belum optimalnya manajemen pengelolaan ASN.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan penerapan sistem merit secara utuh, konsisten dan transparan dalam seluruh proses pengelolaan ASN mulai dari perekrutan, penempatan, pengembangan karir, penilaian kinerja hingga pemberian penghargaan dan sanksi, yang sepenuhnya didasarkan pada kompetensi, prestasi kerja dan keahlian tanpa membedakan latar belakang; serta disempurnakan manajemen pengelolaan ASN secara menyeluruh melalui penyusunan standar kompetensi yang jelas, penyederhanaan alur kerja, peningkatan kualitas pembinaan dan pelatihan berkelanjutan, serta penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas, guna menciptakan aparatur yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima, bersih dari praktik KKN dan netral dari pengaruh politik.

d. Unsur Pendidikan Dan Pelatihan

Pengembangan kompetensi, profesionalisme, dan kinerja baik pada tingkat individu maupun institusi merupakan bagian yang sangat krusial dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. Kompetensi yang memadai akan memastikan setiap aparatur

pemerintah mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Beberapa permasalahan yang dihadapi sampai saat ini antara lain:

1) Belum optimalnya pengembangan karir dan pelatihan yang terstruktur.
2) Belum optimalnya pengembangan SDM ASN.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, disusun dan dilaksanakan program pengembangan karir serta pelatihan yang terstruktur, berjenjang dan berkelanjutan, yang disesuaikan dengan kebutuhan jabatan, kompetensi dasar dan rencana pengembangan jangka panjang aparatur, sehingga setiap tahapan karir memiliki jalur yang jelas dan dukungan peningkatan kemampuan yang memadai; serta dilakukan pengembangan SDM ASN secara menyeluruh dan terpadu melalui pemetaan potensi, pendidikan dan pelatihan teknis maupun manajerial, pendampingan kerja, rotasi penempatan yang tepat serta pembinaan nilai-nilai profesionalisme dan integritas, guna membentuk aparatur yang kompeten, berkemampuan tinggi, berkarakter kuat dan mampu mendukung kelancaran serta keberhasilan seluruh program pembangunan daerah.

e. Unsur Penelitian Dan Pengembangan

Kebutuhan akan hasil-hasil penelitian dan pengembangan (litbang) semakin meningkat sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan yang tepat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta untuk mendorong peningkatan daya saing daerah. Namun, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yaitu :

1) Kebijakan kelitbangan yang belum sepenuhnya mendukung inovasi dan riset terapan.
2) Belum optimalnya peran perangkat daerah dalam pengembangan inovasi daerah.
3) Belum terintegrasinya pelaksanaan kajian pembangunan antar perangkat daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, disempurnakan kebijakan kelitbangan agar lebih fleksibel, mendukung penuh kegiatan inovasi serta riset terapan yang berorientasi pemecahan masalah nyata dan penerapan di lapangan, lengkap dengan dukungan regulasi, pendan`aan dan insentif yang memadai bagi peneliti dan penggagas inovasi; selain itu, diperkuat peran seluruh perangkat daerah dengan menetapkan tanggung jawab pengembangan inovasi sebagai bagian tugas pokok, memberikan pelatihan pembinaan dan memfasilitasi kolaborasi lintas sektor agar setiap instansi aktif melahirkan ide baru dan solusi kreatif; serta dibangun sistem integrasi, sinkronisasi dan pertukaran data serta hasil kajian antar seluruh perangkat daerah, sehingga seluruh penelitian dan analisis pembangunan dapat saling melengkapi, tidak tumpang tindih dan menjadi satu kesatuan dasar ilmiah yang utuh, akurat dan terpadu dalam perumusan kebijakan serta perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran, inovatif dan berdaya saing tinggi.

6. Unsur Pengawasan

Pelaksanaan sistem integritas serta pengawasan internal yang independen, profesional, dan terkoordinasi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di tengah meningkatnya harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih responsif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1) Belum optimalnya pengawasan APIP
2) Belum optimalnya penerapan SPIP.
3) Belum optimalnya penguatan kapasitas APIP.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan pengoptimalan peran dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan memperluas cakupan pengawasan, meningkatkan ketelitian pemeriksaan, serta memastikan rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti secara nyata dan berkelanjutan oleh seluruh perangkat daerah; selain itu, diterapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh, terstruktur dan terintegrasi di setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, lengkap dengan penyusunan standar, pedoman dan mekanisme pemantauan yang jelas; serta diperkuat kapasitas APIP melalui pendidikan dan pelatihan berjenjang, pengembangan kompetensi teknis dan manajerial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan sarana prasarana pendukung dan penerapan metode pengawasan modern, agar APIP mampu bekerja secara independen, profesional, objektif dan berwibawa dalam menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, bebas dari penyimpangan serta memenuhi harapan masyarakat.

7. Unsur Kewilayahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan unsur kewilayahan meliputi :

1) Belum optimalnya pelayanan publik di kelurahan dan kecamatan.
2) Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dan peran aktif Lembaga Kemasyarakatan.
3) Belum optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan.
4) Belum lengkapnya sarana prasarana pelayanan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan dan kecamatan melalui penyederhanaan prosedur, percepatan waktu layanan, penerapan standar pelayanan yang jelas serta peningkatan kompetensi dan sikap petugas agar lebih responsif, ramah dan profesional; sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kemasyarakatan dengan cara memberikan pelatihan, pendampingan, dukungan dana dan fasilitas, serta melibatkan mereka secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan agar peran serta masyarakat semakin nyata dan berdampak; di samping itu, dibangun sistem koordinasi yang lebih erat, teratur dan sinkron antar tingkat pemerintahan maupun antar unit kerja, dengan mekanisme komunikasi dan pertemuan rutin guna menghindari tumpang tindih tugas dan memastikan kebijakan berjalan selaras; serta dilengkapi dan diperbaiki sarana prasarana pelayanan yang memadai, mencakup gedung pelayanan, peralatan kerja, sistem teknologi informasi dan fasilitas penunjang lainnya, sehingga seluruh kebutuhan operasional terpenuhi dan pelayanan dapat berjalan lancar, cepat serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

8. Unsur Pemerintahan Umum

Dalam rangka meningkatkan suasana wilayah yang kondusif, beberapa upaya telah dilakukan antara lain peningkatan kualitas kehidupan demokrasi, ketertiban umum, pendidikan politik, menjaga kerukunan antar umat beragama, namun demikian masih ada permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1) Belum optimal upaya penanganan potensi konflik sosial.
2) Masih rendahnya pengawasan dan pendampingan organisasi masyarakat.
3) Belum optimalnya peran serta ormas dalam Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.
4) Rendahnya pengawasan terhadap izin tinggal WNA.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan pemetaan dini potensi konflik sosial, penyusunan mekanisme penanganan yang cepat, tepat dan terkoordinasi, serta melaksanakan pendekatan persuasif, dialogis dan pembinaan nilai persatuan serta toleransi guna mencegah dan meredam setiap potensi gesekan di masyarakat; sekaligus ditingkatkan pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara rutin dan berkelanjutan terhadap seluruh organisasi masyarakat agar bergerak sesuai aturan, tujuan yang benar dan tidak menyimpang; selain itu, dioptimalkan peran serta ormas dengan membuka ruang kemitraan, memberikan fasilitas, dukungan dan pelibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan program pembangunan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat, agar keberadaan ormas menjadi kekuatan positif yang nyata manfaatnya; serta diperketat dan disempurnakan sistem pengawasan, pencatatan, pemantauan dan penegakan aturan terkait izin tinggal WNA secara menyeluruh, terintegrasi dan berkoordinasi dengan instansi berwenang, agar keberadaan warga negara asing terjamin kepatuhannya terhadap hukum, aman dan tidak menimbulkan gangguan serta menjaga kondusivitas wilayah tetap terpelihara dengan baik.

II.4 Evaluasi Capaian Sustainable Development Goals

Tabel II-5
Evaluasi Capaian Pelaksanaan SDG's Tahun 2025

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN 2025	OPD PENANGGUNG JAWAB	PILAR
1	1.2.1*. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	5,44%	Dinas Sosial	Sosial
2	1.3.1.(a). Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%	100%	Dinas Kesehatan	Sosial

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN 2025	OPD PENANGGUNG JAWAB	PILAR
3	1.3.1.(b). Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	79%	Dinas Nakerperin	Sosial
4	1.3.1.(c). Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%	74%	Dinas Sosial	Sosial
5	1.3.1.(d). Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurun menjadi 2,8 juta	4.140 orang	Dinas Sosial	Sosial
6	1.4.1.(a). Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 70%	100%	Dinas Kesehatan	Sosial
7	1.4.1.(b). Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkat menjadi 63%.	80%	Dinas Kesehatan	Sosial
8	1.4.1.(c). Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	45,89%	Dinas P3AP2KB	Sosial
9	1.4.1.(d). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	100,00%	Dinas PUPR	Sosial
10	1.4.1.(e). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	100%	Dinas Perkim	Sosial
11	1.4.1.(f). Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Meningkat menjadi 18,6 juta	18,67%	Dinas Perkim	Sosial
12	1.4.1.(g). Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Meningkat menjadi 94,78%	92,22%	Dinas Pendidikan	Sosial
13	1.4.1.(h). Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Meningkat menjadi 82,2%	110,08%	Dinas Pendidikan	Sosial
14	1.4.1.(j). Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Meningkat menjadi 77,4%.	99%	Disdukcapil	Sosial
15	1.4.1.(k). Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkat menjadi 100%	100%	Dinas Sosial	Sosial
16	1.5.1*. Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	0 (tidak ada korban)	BPBD	Sosial
17	1.5.1.(a). Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat menjadi 39 daerah	5 Kec	BPBD	Sosial
18	1.5.1.(b). Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 151 ribu	20 orang	Dinas Sosial	Sosial
19	1.5.1.(c). Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 81,5 ribu	20 orang	Dinas Sosial	Sosial
20	1.5.1.(d). Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat menjadi 450	0	Dinas Pendidikan	Sosial
21	1.5.2.(a). Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	19,68 juta rupiah	BPBD	Sosial
22	1.5.3*. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	1 Dokumen KRB	BPBD	Sosial
23	1.a.1*. Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkat	14,7%	Dinas Sosial	Sosial

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN 2025	OPD PENANGGUNG JAWAB	PILAR
24	1.a.2*. Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	53%	Dinas Sosial	Sosial
25	2.1.1*. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun	3%	Dinas Ketahanan Pangan	Sosial
26	2.1.1.(a). Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurun menjadi 17%	2,35%	Dinas Kesehatan	Sosial
27	2.1.2*. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Menurun	NA	Dinas Ketahanan Pangan	Sosial
28	2.1.2.(a). Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurun menjadi 8,5 %	6,51%	Dinas Ketahanan Pangan	Sosial
29	2.2.1*. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	2%	Dinas Kesehatan	Sosial
30	2.2.1.(a). Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun menjadi 28%	1,4%	Dinas Kesehatan	Sosial
31	2.2.2*. Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun	4%	Dinas Kesehatan	Sosial
32	2.2.2.(a). Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%	3,5%	Dinas Kesehatan	Sosial
33	2.2.2.(b). Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50%	86%	Dinas Kesehatan	Sosial
34	2.2.2.(c). Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	93,3	Dinas Ketahanan Pangan	Sosial
35	2.3.1*. Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat	0,026 milyar rupiah/ orang/ tahun	Dinas Pertanian	Sosial
36	3.1.1*. Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurun menjadi 306	1,69	Dinas Kesehatan	Sosial
37	3.1.2*. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	100%	Dinas Kesehatan	Sosial
38	3.1.2.(a). Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 85 %	100%	Dinas Kesehatan	Sosial
39	3.2.1*. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	1,7	Dinas Kesehatan	Sosial
40	3.2.2*. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	2,95	Dinas Kesehatan	Sosial
41	3.2.2.(a). Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 24	5,5	Dinas Kesehatan	Sosial
42	3.2.2.(b). Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkat menjadi 95%	100%	Dinas Kesehatan	Sosial
43	3.3.1.(a). Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun menjadi <0,5%	0,04%	Dinas Kesehatan	Sosial
44	3.3.2.(a). Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurun menjadi 245	208	Dinas Kesehatan	Sosial

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN 2025	OPD PENANGGUNG JAWAB	PILAR
45	3.3.3*. Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	0,03	Dinas Kesehatan	Sosial
46	3.3.3.(a). Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkat menjadi 300	47 Kelurahan	Dinas Kesehatan	Sosial
47	3.3.4.(a). Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Meningkat	47 Kelurahan	Dinas Kesehatan	Sosial
48	3.3.5*. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	Nihil kasus	Dinas Kesehatan	Sosial
49	3.3.5.(a). Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Meningkat menjadi 34 provinsi	Nihil kasus	Dinas Kesehatan	Sosial
50	3.3.5.(b). Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis	Meningkat menjadi 35.	Nihil kasus	Dinas Kesehatan	Sosial
51	3.4.1.(a). Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun menjadi 5,4%	29,65%	Dinas Kesehatan	Sosial
52	3.4.1.(b). Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun menjadi 24,3%	19%	Dinas Kesehatan	Sosial
53	3.4.1.(c). Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun	15%	Dinas Kesehatan	Sosial
54	3.4.2*. Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Menurun	NA	Dinas Kesehatan	Sosial
55	3.4.2.(a). Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkat menjadi 280	47 Kelurahan	Dinas Kesehatan	Sosial
56	3.5.1.(e). Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Menurun menjadi angka 0,02%	0,05%	Dinas Kesehatan	Sosial
57	3.5.2*. Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Menurun	NA	Dinas Kesehatan	Sosial
58	3.7.1*. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkat menjadi 66%	46%	Dinas P3AP2KB	Sosial
59	3.7.1.(a). Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	46%	Dinas P3AP2KB	Sosial
60	3.7.1.(b). Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkat menjadi 23,5%	5,11%	Dinas P3AP2KB	Sosial
61	3.7.2*. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38	NA	Dinas Kesehatan	Sosial
62	3.7.2.(a). Total Fertility Rate (TFR).	Menurun menjadi 2,28	NA	Dinas Kesehatan	Sosial
63	3.8.1.(a). Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurun menjadi 9,91%	0% (Seluruh Kebutuhan pelayanan kesehatan terpenuhi)	Dinas Kesehatan	Sosial
64	3.8.2*. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat	98,29%	Dinas Kesehatan	Sosial
65	3.8.2.(a). Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%	98%	Dinas Kesehatan	Sosial
66	3.9.3.(a). Proporsi kematian akibat keracunan.	Menurun	0 (tidak ada	Dinas Kesehatan	Sosial

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN 2025	OPD PENANGGUNG JAWAB	PILAR
			korban keracunan)		
67	3.a.1*. Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Menurun	29,65%	Dinas Kesehatan	Sosial
68	3.b.1.(a). Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	100%	Dinas Kesehatan	Sosial
69	3.c.1*. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat	0,96%	Dinas Kesehatan	Sosial
70	4.1.1*. Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Meningkat	Literasi : SD = 82,5 SMP = 81,82 Numerasi: SD = 64,14 SMP = 60,84	Dinas Pendidikan	Sosial
71	4.1.1.(a). Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,2%	88,37%	Dinas Pendidikan	Sosial
72	4.1.1.(b). Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 81%	81%	Dinas Pendidikan	Sosial
73	4.1.1.(d). Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	102,23%	Dinas Pendidikan	Sosial
74	4.1.1.(e). Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	135,05%	Dinas Pendidikan	Sosial
75	4.1.1.(g). Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun	10,88	Dinas Pendidikan	Sosial
76	4.2.2.(a). Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat menjadi 77,2%	44,17%	Dinas Pendidikan	Sosial
77	4.4.1*. Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Meningkat	61,74%	Diskominfo	Sosial
78	4.5.1*. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Meningkat	119,55%	Dinas Pendidikan	Sosial
79	4.6.1.(a). Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 96,1%	99,72%	Dinas Pendidikan	Sosial
80	4.6.1.(b). Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkat	100%	Dinas Pendidikan	Sosial
81	4.a.1*. Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Meningkat	85,71%	Dinas Pendidikan	Sosial
82	4.c.1*. Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat	48%	Dinas Pendidikan	Sosial
83	5.1.1*. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	bertambah sebanyak 16	2 Kebijakan	Dinas P3AP2KB	Sosial
84	5.2.1*. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	Nihil kasus	Dinas P3AP2KB	Sosial

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN 2025	OPD PENANGGUNG JAWAB	PILAR
85	5.2.1.(a). Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	Nihi kasus	Dinas P3AP2KB	Sosial
86	5.2.2*. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	Nihil kasus	Dinas P3AP2KB	Sosial
87	5.2.2.(a). Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkat menjadi 70%	Nihil kasus	Dinas P3AP2KB	Sosial
88	5.3.1*. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	NA	Dinas P3AP2KB	Sosial
89	5.3.1.(a). Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkat menjadi 21 tahun	22,5	Dinas P3AP2KB	Sosial
90	5.3.1.(b). Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38 tahun	NA	Dinas P3AP2KB	Sosial
91	5.5.1*. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat	8 anggota	Dinas P3AP2KB	Sosial
92	5.5.2*. Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat	14%	BKPSDM	Sosial
93	5.6.1*. Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Meningkat	NA	Dinas P3AP2KB	Sosial
94	5.6.1.(a). Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 9,9%	NA	Dinas P3AP2KB	Sosial
95	5.6.1.(b). Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%	5,11%	Dinas P3AP2KB	Sosial
96	5.b.1*. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat	90,71%	Diskominfo	Sosial
97	6.1.1.(a). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	100,00%	Dinas PUPR	Lingkungan
98	6.1.1.(b). Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	2.742 l/dtk	Dinas PUPR	Lingkungan
99	6.1.1.(c). Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	89,26%	Dinas PUPR	Lingkungan
100	6.2.1.(a). Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat	91%	Dinas Kesehatan	Lingkungan
101	6.2.1.(b). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	100%	Dinas Perkim	Lingkungan
102	6.2.1.(c). Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	47 Kelurahan	Dinas Perkim	Lingkungan
103	6.2.1.(d). Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat	47 Kelurahan	Dinas Perkim	Lingkungan
104	6.2.1.(e). Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.	0	Dinas Perkim	Lingkungan

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN 2025	OPD PENANGGUNG JAWAB	PILAR
105	6.2.1.(f). Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	0	Dinas Perkim	Lingkungan
106	6.3.1.(a). Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota	1 IPLT	Dinas Perkim	Lingkungan
107	6.3.1.(b). Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Meningkat	3%	Dinas Perkim	Lingkungan
108	6.3.2.(b). Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat	44,21	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan
109	6.4.1.(b). Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	ada	0	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan
110	6.5.1.(a). Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	ada	1 RPDAST	Dinas PUPR	Lingkungan
111	6.5.1.(c). Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	8 WS	2 Komunitas	Dinas PUPR	Lingkungan
112	6.5.1.(f). Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	10 WS (skala nasional)	1 Komonitas	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan
113	6.5.1.(g). Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	ada	NA	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan
114	8.1.1*. Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	4,45%	Bappeda	Ekonomi
115	8.1.1.(a). PDB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	62,01 Juta Rupiah	Bappeda	Ekonomi
116	8.2.1*. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat	0,66%	Dinas Nakerperin	Ekonomi
117	8.3.1*. Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkat	59%	Dinas Nakerperin	Ekonomi
118	8.3.1.(a). Persentase tenaga kerja formal.	51%	40,83%	Dinas Nakerperin	Ekonomi
119	8.3.1.(b). Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat	15%	Dinas Nakerperin	Ekonomi
120	8.3.1.(c). Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	25%	NA	Dinas Koperasi dan UKM	Ekonomi
121	8.5.1*. Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat	70.000	Dinas Nakerperin	Ekonomi
122	8.5.2*. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	4,84%	Dinas Nakerperin	Ekonomi
123	8.5.2.(a). Tingkat setengah pengangguran.	Menurun	12,75%	Dinas Nakerperin	Ekonomi
124	8.6.1*. Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Menurun	28%	Dinas Pendidikan	Ekonomi
125	8.9.1*. Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkat menjadi 8%	NA	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Ekonomi
126	8.9.1.(a). Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	22 orang	Dinas Pariwisata	Ekonomi

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN 2025	OPD PENANGGUNG JAWAB	PILAR
				Pemuda dan Olahraga	
127	8.9.1.(b). Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	38.907 orang	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Ekonomi
128	8.9.1.(c). Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat	NA	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Ekonomi
129	8.9.2*. Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkat	0,6%	Dinas Nakerperin	Ekonomi
130	8.10.1*. Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Meningkat	17 ATM	Dinas Nakerperin	Ekonomi
131	8.10.1.(a). Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Menurun (mendekat)	1 km	Dinas Nakerperin	Ekonomi
132	8.10.1.(b). Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat	187,08 Milyar Rupiah	Dinas Koperasi dan UKM	Ekonomi
133	9.2.1*. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat	8,98%	Bappeda	Ekonomi
134	9.2.1.(a). Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	-0,07%	Dinas Nakerperin	Ekonomi
135	9.2.2*. Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat	10%	Dinas Nakerperin	Ekonomi
136	9.3.1*. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat	25%	Dinas Nakerperin	Ekonomi
137	9.3.2*. Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat	NA	Dinas Nakerperin	Ekonomi
138	9.5.1*. Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Meningkat	160.000.000	Bappeda	Ekonomi
139	9.c.1*. Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Meningkat	74,51%	Diskominfo	Ekonomi
140	9.c.1.(a). Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	91%	Diskominfo	Ekonomi
141	9.c.1.(b). Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	77,40%	Diskominfo	Ekonomi
142	10.1.1*. Koefisien Gini.	Menurun menjadi 0,36	0,271	Bappeda	Ekonomi
143	10.1.1.(a). Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	5,44%	Bappeda	Ekonomi
144	10.2.1*. Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Menurun	1095 orang (L=595, P=500)	Dinas Sosial	Ekonomi
145	10.3.1.(a). Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkat menjadi 87	72,15	Kesbangpol	Ekonomi
146	10.3.1.(d). Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	0 (Tidak ada kebijakan diskriminatif)	Bagian Hukum	Ekonomi
147	10.4.1.(b). Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	79%	Dinas Nakerperin	Ekonomi
148	11.1.1.(a). Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	3,7 juta rumah tangga	81,33%	Dinas Perkim	Lingkungan

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN 2025	OPD PENANGGUNG JAWAB	PILAR
149	11.2.1.(a). Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Meningkat menjadi 32%	< 50	Dinas Perhubungan	Lingkungan
150	11.3.2.(a). Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Meningkat	74 Institusi	Bappeda	Lingkungan
151	11.3.2.(b). Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Ada	1 Lembaga	Dinas PUPR	Lingkungan
152	11.4.1.(a). Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	ada	42 Objek	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Lingkungan
153	11.5.1*. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	0 (tidak ada korban)	BPBD	Lingkungan
154	11.5.1.(a). Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun menjadi 30%	104.80	BPBD	Lingkungan
155	11.5.1.(b). Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Meningkat	0	BPBD	Lingkungan
156	11.5.1.(c). Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	ada	0	BPBD	Lingkungan
157	11.5.2.(a). Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	19,68 juta rupiah	BPBD	Lingkungan
158	11.6.1.(a). Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	95,88%	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan
159	11.7.1.(a). Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Meningkat/ada	5 Kecamatan	Dinas Perkim	Lingkungan
160	11.b.1*. Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Meningkat/ada	1 Dokumen KRB	BPBD	Lingkungan
161	11.b.2*. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	ada	1 Dokumen KRB	BPBD	Lingkungan
162	12.4.2.(a). Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	45,31 Ton	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan
163	12.5.1.(a). Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional)	5.400,73 ton/tahun	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan
164	12.6.1.(a). Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkat	0 (tidak ada perusahaan besar)	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan
165	12.7.1.(a). Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Meningkat	0	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan
166	12.8.1.(a). Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Meningkat	0	Dinas Perkim	Lingkungan
167	13.1.1*. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	1 Dokumen KRB	BPBD	Lingkungan
168	13.1.2*. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	0 (tidak ada korban)	BPBD	Lingkungan
169	15.1.1.(a) . Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkat	8,50%	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN 2025	OPD PENANGGUNG JAWAB	PILAR
170	15.3.1.(a) . Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5,5 juta ha (skala nasional)	0	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan
171	15.6.1* . Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	ada	0	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan
172	15.9.1.(a). Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	0	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan
173	16.1.1.(a). Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun	1	Kesbangpol	Hukum & Tata Kelola
174	16.1.2.(a). Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun	0 (tidak ada korban)	Kesbangpol	Hukum & Tata Kelola
175	16.1.3.(a). Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	62 orang	Kesbangpol	Hukum & Tata Kelola
176	16.1.4*. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkat	NA	Kesbangpol	Hukum & Tata Kelola
177	16.2.1.(a). Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Menurun	NA	Dinas P3AP2KB	Hukum & Tata Kelola
178	16.2.1.(b). Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun	NA	Dinas P3AP2KB	Hukum & Tata Kelola
179	16.2.3.(a). Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun	NA	Dinas P3AP2KB	Hukum & Tata Kelola
180	16.5.1.(a). Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkat menjadi 4,0	NA	Inspektorat	Hukum & Tata Kelola
181	16.6.1*. Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	91%	BKD	Hukum & Tata Kelola
182	16.6.1.(a). Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	WTP	BKD	Hukum & Tata Kelola
183	16.6.1.(b). Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%	BB (75,25)	Bagian Organisasi	Hukum & Tata Kelola
184	16.6.1.(c). Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Menjadi menjadi 80%	30,62%	Bagian pengadaan barang dan jasa	Hukum & Tata Kelola
185	16.6.1.(d). Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatk menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%	BB (77,27)	Bagian Organisasi	Hukum & Tata Kelola
186	16.6.2.(a). Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80%	sangat Baik (4,41) (A)	Bagian Organisasi	Hukum & Tata Kelola

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN 2025	OPD PENANGGUNG JAWAB	PILAR
187	16.7.1.(a). Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat	8	Dinas P3AP2KB	Hukum & Tata Kelola
188	16.7.1.(b). Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	14%	Dinas P3AP2KB	Hukum & Tata Kelola
189	16.9.1*. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkat	100%	Disdukcapil	Hukum & Tata Kelola
190	16.9.1.(a). Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkat menjadi 77,4%	96,9	Disdukcapil	Hukum & Tata Kelola
191	16.9.1.(b). Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkat menjadi 85%	99%	Disdukcapil	Hukum & Tata Kelola
192	16.10.2.(c). Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkat	0	Diskominfo	Hukum & Tata Kelola
193	16.b.1.(a). Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	0	Bagian Hukum	Hukum & Tata Kelola
194	17.1.1*. Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat	13,1%	BKD	Ekonomi
195	17.1.1.(a). Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Di atas 12%	3%	BKD	Ekonomi
196	17.1.2*. Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	NA	BKD	Ekonomi
197	17.6.2.(b). Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	8.671 (PELANGGAN INDIHOME)	Diskominfo	Ekonomi
198	17.6.2.(c). Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	89,34%	Diskominfo	Ekonomi
199	17.8.1*. Proporsi individu yang menggunakan internet.	Meningkat	77,4%	Diskominfo	Ekonomi
200	17.17.1.(a). Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada	0	Bappeda	Ekonomi
201	17.17.1.(b). Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada	0	Bagian pengadaan barang dan jasa	Ekonomi
202	17.18.1.(a). Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Meningkat	88,6%	BPS	Ekonomi
203	17.18.1.(b). Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Meningkat	tidak tersedia dari hasil survei BPS	BPS	Ekonomi
204	17.18.1.(c). Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang	Meningkat	8	BPS	Ekonomi

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN 2025	OPD PENANGGUNG JAWAB	PILAR
	terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).				
205	17.18.1.(d). Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Meningkat	NA	Bappeda	Ekonomi
206	17.19.2.(b). Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada	ada	Disdukcapil	Ekonomi
207	17.19.2.(c). Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Meningkat	24.642 orang	BPS	Ekonomi
208	17.19.2.(d). Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Meningkat	96,67%	BPS	Ekonomi

II.5 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Ini merupakan hak seluruh individu dan pemerintah wajib menjamin pemenuhannya. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan hal tersebut, bahkan menjadikan SPM sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas anggaran daerah. Peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan penerapan SPM sudah diundangkan. Beberapa di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nmor 2 Tahun 2018 tentang SPM; Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM; sampai dengan peraturan terkait standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM dari seluruh Kementerian Pengampu SPM, seperti Permenkes Nomor 4 Tahun 2019; Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018; Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018; Permensos Nomor 9 Tahun 2018; Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 dan Nomor 121 Tahun 2018.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, SPM telah dijadikan acuan dan disinkronkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan. SPM merupakan salah satu kebijakan yang turut dievaluasi, karena ini merupakan elemen yang tidak bisa dipisahkan dalam perencanaan di tahun berikutnya. Evaluasi dilakukan terhadap capaian tahun 2021-2025.

Tabel II-6
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021 – 2025

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	REALISASI				
				2021	2022	2023	2024	2025
A	**Pendidikan**							
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Orang	3.836	3.836	4.974	4.325	4.284
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam	Orang	23.738	23.738	15.735	15.735	24.586

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	REALISASI				
				2021	2022	2023	2024	2025
		pendidikan dasar (SD, SMP, MTs)						
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warganegara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	Orang	462	462	183	183	1.395
B	**Kesehatan**							
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	87,57	87,57	100	100	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalian mendapatkan pelayanan persalinan	%	83,17	83,17	100	100	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir	%	89,12	89,12	100	100	100
4	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	%	78,44	78,44	100	100	98
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	83,62	83,62	100	100	100
6	Pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	91,39	91,39	100	100	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	%	58,22	58,22	100	100	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	80,65	80,65	100	100	100
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	105,89	105,89	100	100	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	98,31	98,31	100	100	100
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	67,69	67,69	100	100	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia HIV (*Human Immunodeficiency virus*)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	76,62	76,62	100	100	76
C	**Pekerjaan Umum**							
1	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik minimal sesuai haknya	%	97,52	97,52	98,91	100	100

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	REALISASI				
				2021	2022	2023	2024	2025
2	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	%	91,78	91,78	100	100	100
D	**PERUMAHAN**							
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana alam	unit	0	0	0	0	0
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kota/kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	orang	8	0	0	0	0
E	**Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**							
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase layanan jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase layanan jumlah negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	%	100	100	100	100	100
F	**Sosial**							
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,27	100	100	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	123,08	100	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	131,84	100	100	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	133,33	100	100	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100

Sumber: Bagian Pemerintahan, 2026 (diolah oleh Bappeda)

Capaian pelayanan SPM Kota Payakumbuh sejak tahun 2020 cukup baik, selalu menunjukkan kecenderungan meningkat, bahkan sebagian besar sudah mencapai angka maksimal 100%. Namun masih terdapat indikator yang belum mencapai 100%, seperti layanan pengolahan air limbah domestik yang baru mencapai angka 98,91%, artinya masih ada layanan air limbah domestik berupa septik tank yang belum layak sebesar 1,09%. Ini

sudah menjadi target pemerintah daerah dalam menuntaskan layanan air limbah yang layak. Sedangkan pada sisi lain, Pemerintah Kota Payakumbuh tidak hanya berupaya untuk sekedar berstatus layak saja, namun yang utama adalah status “aman” dan saat ini kondisinya baru sekitar 15% saja. Tugas berat pemerintah daerah dalam pencapaian SPM justru adalah mempertahankan kondisi capaian yang sudah ada, sehingga pengalokasian program/kegiatan serta pendanaan tetap harus diprioritaskan, karena ini berkaitan pelayanan dasar kepada masyarakat.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

III.1 PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2026 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kondisi perekonomian global, nasional, Provinsi Sumatera Barat, serta dinamika ekonomi lokal yang berkembang selama tahun berjalan. Penyesuaian ini dilakukan agar kebijakan pembangunan daerah tetap adaptif, realistis, dan mampu menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, perekonomian Kota Payakumbuh pada tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh positif, meskipun menghadapi tantangan berupa perlambatan ekonomi nasional, ketidakpastian global, fluktuasi harga pangan dan energi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Sebagai kota yang didominasi sektor perdagangan, jasa, dan UMKM, kinerja ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat, mobilitas penduduk, serta kelancaran distribusi barang dan jasa.

Berdasarkan perkembangan tersebut, target pertumbuhan ekonomi daerah perlu dilakukan penyesuaian secara moderat dengan tetap menjaga optimisme terhadap prospek ekonomi lokal. Sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan skala kecil dan menengah, transportasi, akomodasi makan minum, jasa pendidikan, jasa kesehatan, serta jasa lainnya diperkirakan tetap menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh.

Dari sisi harga, laju inflasi daerah pada tahun 2026 diperkirakan masih berada dalam rentang terkendali, namun terdapat potensi tekanan dari komoditas pangan strategis, biaya logistik, dan faktor musiman keagamaan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), peningkatan produksi pangan lokal, operasi pasar, serta kelancaran distribusi menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Pada aspek sosial ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan diproyeksikan menurun secara bertahap seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan program pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, tantangan masih terdapat pada dominasi sektor informal, produktivitas tenaga kerja, dan keterbatasan kesempatan kerja formal. Untuk itu, kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, pelatihan vokasi, kewirausahaan muda, serta digitalisasi UMKM.

Dari sisi fiskal daerah, perubahan kerangka ekonomi tahun 2026 juga mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah yang masih terbatas. Pemerintah Kota Payakumbuh perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan efisiensi belanja, serta mendorong skema pembiayaan alternatif melalui kerja sama investasi, pemanfaatan aset daerah, dan kemitraan pembangunan.

Dalam konteks daerah, penguatan kapasitas fiskal tidak hanya bertumpu pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja, tetapi juga perlu didukung oleh strategi pengembangan investasi yang lebih terarah dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan lahan yang telah berstatus *clean and clear* untuk mempercepat realisasi investasi, memperkuat kebijakan *land bank* sebagai instrumen penyediaan lahan bagi proyek-proyek prioritas, serta melakukan penyesuaian kebijakan tata ruang dan *zoning* agar lebih adaptif terhadap kebutuhan investasi tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan. Di samping itu, pemerintah daerah perlu secara proaktif menyusun dan mengusulkan proyek-proyek strategis daerah yang memiliki nilai manfaat tinggi kepada kementerian/lembaga, sehingga kebutuhan pendanaan pembangunan tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga dapat didukung melalui APBN, Dana Alokasi

Khusus, pembiayaan kreatif, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), maupun bentuk kerja sama pendanaan lainnya. Strategi tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan fiskal daerah sekaligus mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dengan demikian, arah perubahan kerangka ekonomi daerah Kota Payakumbuh Tahun 2026 difokuskan pada penguatan ekonomi lokal berbasis perdagangan dan UMKM, peningkatan investasi, pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing kota sebagai pusat perdagangan dan jasa di wilayah timur Sumatera Barat. Kebijakan ini diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu, dalam rangka mempertegas penguatan kemandirian fiskal daerah karena struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada transfer, maka kebijakan pembangunan daerah tidak cukup hanya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan dan UMKM, tetapi juga harus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, digitalisasi pendapatan, pemutakhiran basis pajak dan retribusi, peningkatan dividen BUMD, serta monetisasi aset daerah agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat dan berkelanjutan

Keberhasilan pembangunan pusat dan daerah dapat diukur dari pencapaian indikator makro seperti IPM, laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan dan pengangguran serta gini ratio. Indikator tersebut digunakan sebagai dasar bagi penyusunan perencanaan pembangunan dan proyeksi ekonomi. Hasil proyeksi ekonomi tersebut akan dijadikan acuan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupu pendapatan yang bersumber dari dana transfer pusat. Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.

Struktur ekonomi yang terbentuk dari produksi barang dan jasa pada setiap lapangan usaha akan berperan penting dalam meningkatkan aktivitas ekonomi daerah. Namun tidak bisa dipungkiri, gejolak ekonomi dunia maupun nasional sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakt secara umum.

Pada sisi yang lain, perkiraan sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial menjadi dasar dalam menentukan kebijakan anggaran untuk mengalokasikan anggaran perencanaan pembangunan sesuai dengan perioritas kepala daerah. Terdapat program kegiatan prioritas yang perlu direalisasikan di tahun 2026 . Begitu juga dengan beberapa kebijakan pusat yang perlau didukung dan dilaksanakan daerah yang harus di sesuaikan dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, sehingga perubahan RKPD 2026 perlu dilaksanakan.

III.1.1 ASUMSI MAKRO EKONOMI APBN TAHUN 2026

Asumsi makro ekonomi dalam APBN Tahun 2026 disusun sebagai landasan utama dalam perencanaan kebijakan fiskal nasional yang adaptif, kredibel, dan berkelanjutan. Penetapan asumsi ini mempertimbangkan dinamika perekonomian global dan domestik, termasuk ketidakpastian pasar keuangan internasional, fluktuasi harga komoditas, serta upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 5,4 persen. Proyeksi ini mencerminkan optimisme terhadap terjaganya konsumsi rumah tangga sebagai motor utama perekonomian, peningkatan investasi seiring keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan hilirisasi industri, serta kontribusi positif sektor ekspor yang didukung oleh permintaan global yang mulai pulih. Inflasi diperkirakan tetap terkendali dalam target 2,5 persen dengan deviasi ±1 persen. Stabilitas inflasi menjadi prioritas untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan kepastian bagi dunia usaha. Upaya pengendalian inflasi dilakukan melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, serta penguatan ketahanan pangan dan energi.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diasumsikan bergerak dalam kisaran Rp15.800 hingga Rp16.500 per USD. Pergerakan nilai tukar sangat dipengaruhi oleh dinamika eksternal seperti kebijakan suku bunga global, arus modal internasional, serta kondisi geopolitik, sehingga stabilitas nilai tukar menjadi salah satu fokus kebijakan untuk menjaga kepercayaan investor dan kestabilan sektor keuangan. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan berada pada kisaran 6,6 hingga 7,2 persen. Asumsi ini mencerminkan kondisi likuiditas global dan premi risiko investasi di pasar keuangan domestik, yang turut menentukan biaya pembiayaan utang pemerintah.

Dari sisi sektor energi, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diasumsikan kisaran USD 75 hingga 85 per barel. Sementara itu, lifting minyak ditargetkan sekitar 600 hingga 610 ribu barel per hari, dan lifting gas kisaran 1,00 hingga 1,05 juta barel. Asumsi ini sangat strategis karena berpengaruh langsung terhadap penerimaan negara dari sektor migas serta besaran belanja subsidi dan kompensasi energi.

Secara keseluruhan, asumsi makro ekonomi APBN Tahun 2026 diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan stabilitas. Kebijakan fiskal dirancang tetap ekspansif namun terukur, dengan defisit anggaran dijaga dalam batas yang aman guna mendukung kesinambungan fiskal jangka menengah. Fokus kebijakan mencakup penguatan transformasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur prioritas, serta perlindungan sosial yang adaptif terhadap berbagai risiko. Dengan kerangka asumsi makro tersebut, APBN Tahun 2026 diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam menghadapi tantangan global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat nasional maupun daerah.

Tabel III-1
Asumsi Makro Ekonomi Tahun 2026

NO	URAIAN	Outlook
1	Pertumbuhan ekonomi	5,4 %
2	Nilai Tukar Rupiah	Rp.15.800 – Rp.16.500 per USD
3	Inflasi	2,5%
4	Tingkat pengangguran terbuka	4,44–4,96%
5	Penciptaan lapangan kerja formal sebesar	37,95%.
6	Tingkat kemiskinan	6,5–7,5%
7	Rasio gini	0,377–0,380
8	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun	6,9 %
9	Indeks Modal Manusia	0,57

sumber: Kementerian keuangan 2026, Bappenas 2026

Asumsi makro ekonomi Tahun 2026 sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran nasional maupun daerah. Proyeksi kondisi ekonomi yang diharapkan mampu mendukung stabilitas ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan daya saing nasional di tengah dinamika ekonomi global yang masih berfluktuasi. Arah kebijakan ekonomi tahun 2026 difokuskan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat transformasi struktural ekonomi, meningkatkan daya saing sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta mempercepat penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Di tengah ketidakpastian global akibat perlambatan ekonomi dunia, volatilitas nilai tukar, dan tingginya risiko geopolitik, Indonesia diharapkan tetap mampu mempertahankan ketahanan ekonomi melalui penguatan konsumsi domestik, investasi, hilirisasi industri, dan penguatan sektor produktif.

Pada Tahun 2026, pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan sebesar 5,4 persen. Target ini mencerminkan optimisme pemerintah terhadap peningkatan aktivitas ekonomi yang didorong oleh konsumsi masyarakat, investasi, penguatan sektor industri, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan ekspor dan hilirisasi sumber daya alam. Pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dari sisi moneter, nilai tukar rupiah diasumsikan berada pada kisaran Rp16.500 per dolar Amerika Serikat. Asumsi ini mempertimbangkan kondisi perekonomian global, arah kebijakan suku bunga internasional, stabilitas pasar keuangan, serta ketahanan sektor eksternal nasional. Stabilitas nilai tukar menjadi penting untuk menjaga iklim investasi, perdagangan, dan stabilitas harga domestik.

Tingkat inflasi diperkirakan tetap terkendali pada level 2,5 persen. Inflasi yang stabil menunjukkan adanya pengendalian harga barang dan jasa yang cukup baik, sehingga daya beli masyarakat dapat terjaga. Pengendalian inflasi dilakukan melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, serta penguatan ketahanan pangan dan distribusi barang kebutuhan pokok.

Pada aspek ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan berada pada kisaran 4,44–4,96 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, pengembangan sektor produktif, dukungan terhadap UMKM, serta penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi. Selain itu, penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 37,95 persen sebagai bagian dari transformasi pasar kerja menuju tenaga kerja yang lebih produktif dan berdaya saing.

Kesejahteraan sosial, tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 6,5–7,5 persen. Penurunan angka kemiskinan dilakukan melalui berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi daerah. Sementara itu, rasio gini diproyeksikan berada pada kisaran 0,377–0,380 yang menunjukkan upaya pemerintah dalam menjaga pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat.

Pada sektor keuangan, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan sebesar 6,9 persen. Asumsi ini mencerminkan kondisi pasar keuangan domestik, stabilitas fiskal, serta persepsi investor terhadap perekonomian Indonesia. Stabilitas suku bunga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan pembangunan.

Indeks Modal Manusia (IMM) ditargetkan mencapai 0,57. Target ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan pendidikan, kesehatan, penurunan stunting, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja sebagai fondasi menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, asumsi makro ekonomi Tahun 2026 diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat transformasi ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mempercepat penurunan pengangguran dan kemiskinan guna mendukung pencapaian pembangunan nasional yang berkelanjutan.

III.1.2 PERUBAHAN ASUMSI MAKRO EKONOMI TAHUN 2026

Perubahan asumsi makro ekonomi tahun 2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika perekonomian global, nasional, dan regional yang berkembang sepanjang tahun berjalan. Perubahan tersebut diperlukan agar kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah tetap realistis, adaptif, dan mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi yang terjadi.

Secara global, perekonomian dunia pada tahun 2026 masih dihadapkan pada ketidak pastian akibat perlambatan ekonomi beberapa negara maju, fluktuasi harga energi dan pangan, ketegangan geopolitik internasional, serta perubahan arah kebijakan moneter global. Kondisi tersebut turut memengaruhi stabilitas perdagangan internasional, arus investasi, dan nilai tukar mata uang. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga menjadi perhatian dalam perubahan asumsi makro ekonomi, mengingat fluktuasi kurs dapat memengaruhi harga barang impor, biaya produksi, dan stabilitas harga di daerah. Perubahan tingkat suku bunga dan kondisi pasar keuangan turut berdampak terhadap investasi dan pembiayaan pembangunan.

Di tingkat nasional, pemerintah melakukan penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro dengan mempertimbangkan perkembangan inflasi, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, nilai tukar rupiah, serta kondisi fiskal nasional. Penyesuaian ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perubahan kebijakan pembangunan dan APBD Tahun 2026 agar tetap selaras dengan arah kebijakan nasional. Sementara itu, asumsi inflasi disesuaikan berdasarkan perkembangan harga kebutuhan pokok, distribusi barang dan jasa, serta kebijakan pengendalian inflasi oleh pemerintah pusat dan daerah

Bagi daerah, perubahan asumsi makro ekonomi tahun 2026 juga dipengaruhi oleh perkembangan kondisi ekonomi lokal, termasuk laju pertumbuhan ekonomi daerah, daya beli masyarakat, tingkat inflasi, investasi, serta kemampuan fiskal daerah. Aktivitas sektor perdagangan, jasa, UMKM, dan konsumsi rumah tangga masih menjadi penggerak utama perekonomian daerah, meskipun terdapat tantangan berupa kenaikan harga beberapa komoditas dan perlambatan ekonomi pada sektor tertentu.

Indikator pertumbuhan ekonomi menjadi penting karena akan memengaruhi indikator yang disusun dalam APBD 2026, termasuk di dalamnya indikator belanja dan juga indikator penerimaan daerah. Pertumbuhan ekonomi akan ditentukan oleh seberapa mampu

pemerintah menstimulasi pos-pos yang menjadi sumber pertumbuhan. Misalnya, untuk PDRB dari sisi permintaan, pemerintah perlu memastikan pertumbuhan konsumen rumah tangga di tahun depan. Masalah seperti keterbatasan insentif untuk kelas menengah akan menjadi tantangan dalam mencapai target pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Selain itu, harapan berada pada investasi yang merupakan penyumbang pertumbuhan terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga. Tren investasi yang positif dalam beberapa tahun terakhir perlu dipastikan tetap terjaga, khususnya dalam konteks mengejar target pertumbuhan ekonomi. Untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dikontribusikan bukan hanya dari pemerintah, tapi seluruh pemangku kepentingan ekonomi.

Dari uraian di atas, realisasi dan target Indikator Makro Ekonomi secara keseluruhan dirangkum dalam Tabel III-2.

Tabel III-2
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Payakumbuh

NO	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	REALISASI			TARGET	
			2024	2025	Triwulan I 2026	RKPD TAHUN 2026	PERUBAHAN RKPD 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,53	3,55	5,45	5,94	5,79
2	PDRB per kapita ADHB	Rp juta	64,21	66,03	Data belum tersedia	80,58	82,14
3	PDRB per kapita ADHK	Rp juta	35,64	36.44	Data belum tersedia	38,62	38,62
4	Nilai Indeks Gini	Nilai	0,313	0,271	Data belum tersedia	0,310	0,271
5	Tingkat Pengangguran	%	4,87	4,96	Data belum tersedia	4,60	4,64
6	Tingkat Kemiskinan	%	5,19	4,95	Data belum tersedia	4,80	4,32
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indek	80,76	81,62	Data belum tersedia	81,41	81,97
8	Pengeluaran Perkapita	Rp. Ribu	14.260	14.536	Data belum tersedia	-	20.930

Sumber: Bappeda dan BPS, 2025 (data diolah Bappeda)

Pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh pada Triwulan I Tahun 2026 tercatat sebesar 5,45 persen, meningkat signifikan dibandingkan realisasi Tahun 2025 yang sebesar 3,55 persen, meskipun masih berada di bawah target RKPD Tahun 2026 sebesar 5,94 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi mulai meningkat seiring membaiknya konsumsi masyarakat, perdagangan, jasa, serta meningkatnya mobilitas ekonomi. Capaian pertumbuhan ekonomi pada triwulan I (y-o-y) ini mengindikasikan bahwa dengan menjaga stabilitas ekonomi pada semester II, target pertumbuhan tahunan masih cukup realistis untuk dicapai. Namun mengingat kondisi perekonomian yang masih belum menantu sampai saat ini target pertumbuhan ekonomi pada RKPD 2026 disesuaikan menjadi 5,79 persen. Hal ini sesuai dengan target RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Pendapatan masyarakat yang tercermin melalui PDRB per kapita juga menunjukkan tren meningkat. PDRB per kapita ADHB naik dari Rp.64,21 juta pada tahun 2024 menjadi Rp.66,03 juta pada tahun 2025, dan ditargetkan meningkat signifikan menjadi Rp.80,58 juta dalam RKPD 2026 serta Rp.82,14 juta pada Perubahan RKPD Tahun 2026. Sementara itu, PDRB per kapita ADHK meningkat dari Rp.35,64 juta menjadi Rp36,44 juta, dan ditargetkan mencapai Rp38,62 juta pada Perubahan RKPD Tahun 2026. Kondisi ini mencerminkan adanya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Indeks Gini menunjukkan perbaikan yang cukup baik. Nilai Indeks Gini menurun dari 0,313 pada tahun 2024 menjadi 0,271 pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan distribusi pendapatan masyarakat yang semakin merata. Pada RKPD Tahun 2026 sempat ditargetkan berada di angka 0,310, namun dalam Perubahan RKPD disesuaikan menjadi 0,271 untuk mempertahankan capaian pemerataan yang telah diraih.

Tingkat pengangguran mengalami sedikit kenaikan dari 4,87 persen pada tahun 2024 menjadi 4,96% pada tahun 2025. Meski demikian, pemerintah menargetkan penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,60% dan kembali disempurnakan menjadi 4,55% pada Perubahan RKPD Tahun 2026. Upaya ini diarahkan melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, dan peningkatan kualitas tenaga kerja.

Tingkat kemiskinan menunjukkan tren positif dengan penurunan dari 5,19% pada tahun 2024 menjadi 4,95% pada tahun 2025. Target tahun 2026 ditetapkan sebesar 4,80% dan dipertajam menjadi 4,32% dalam Perubahan RKPD Tahun 2026. Penurunan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Payakumbuh terus mengalami peningkatan, dari 80,76 pada tahun 2024 menjadi 81,62 pada tahun 2025. Pada tahun 2026, IPM ditargetkan meningkat menjadi 81,97 dalam Perubahan RKPD 2026. Capaian ini mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat yang didukung oleh peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Secara umum, perkembangan indikator makro ekonomi Kota Payakumbuh menunjukkan arah pembangunan yang cukup positif, terutama dalam aspek pemerataan pendapatan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas manusia. Namun demikian, tantangan masih perlu diantisipasi terutama terkait pengendalian inflasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan penurunan tingkat pengangguran agar pembangunan daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan dan inklusif.

Analisis Faktor Eksternal, Dasar Perubahan RKPD Tahun 2026, dan Pengaruh Kebijakan terhadap Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2026

A. Faktor Eksternal yang Mendorong Perubahan RKPD Tahun 2026

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika lingkungan strategis yang berkembang selama pelaksanaan pembangunan. Berbagai faktor eksternal pada tingkat global, nasional, dan regional memengaruhi asumsi dasar ekonomi makro, sehingga diperlukan penyesuaian target pembangunan agar lebih realistis dan adaptif terhadap kondisi aktual.

Dari sisi ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi daerah. Meningkatnya konsumsi rumah tangga, membaiknya mobilitas masyarakat, pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa, serta meningkatnya aktivitas UMKM turut mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh. Kondisi tersebut tercermin dari realisasi pertumbuhan ekonomi Triwulan I Tahun 2026 sebesar 5,45 persen, meningkat dibandingkan realisasi Tahun 2025 sebesar 3,55 persen.

Faktor eksternal lainnya adalah keberhasilan pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga melalui pengendalian inflasi. Ketersediaan pasokan pangan, kelancaran distribusi barang, serta penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berdampak pada rendahnya tingkat inflasi Kota Payakumbuh yang hanya mencapai 0,35 persen pada kondisi Juni Tahun 2026 (merujuk inflasi Kota Bukittinggi). Kondisi tersebut memberikan ruang bagi peningkatan daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, arah kebijakan pemerintah pusat yang menitikberatkan pada penguatan investasi, hilirisasi ekonomi, pengembangan UMKM, pengendalian kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi pelayanan publik, serta efisiensi belanja pemerintah menjadi faktor eksternal yang turut memengaruhi penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan target pembangunan agar tetap selaras dengan kebijakan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

Di sisi lain, ketidakpastian ekonomi global akibat perlambatan ekonomi dunia, dinamika geopolitik, fluktuasi harga energi dan pangan, serta perubahan rantai pasok internasional tetap menjadi risiko eksternal yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan penyesuaian target pembangunan agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap efektif dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut.

B. Data Realisasi yang Menjadi Dasar Perubahan RKPD Tahun 2026

Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator makro Tahun 2025, serta proyeksi perkembangan ekonomi hingga akhir tahun. Data realisasi yang menjadi dasar perubahan antara lain sebagai berikut.

a. Pertumbuhan Ekonomi
   Realisasi pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 5,45 persen, meningkat signifikan dibandingkan realisasi Tahun 2025 sebesar 3,55 persen. Walaupun belum mencapai target RKPD sebesar 5,94 persen, perkembangan tersebut menunjukkan pemulihan ekonomi yang cukup kuat sehingga target disesuaikan menjadi 5,79 persen, lebih realistis dengan mempertimbangkan kondisi semester pertama.

b. PDRB per Kapita
   Data realisasi Triwulan I Tahun 2026 belum tersedia. Namun, berdasarkan proyeksi peningkatan aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat, target PDRB per kapita ADHB dinaikkan dari Rp80,58 juta menjadi Rp82,14 juta, sedangkan target PDRB per kapita ADHK tetap sebesar Rp38,62 juta.

c. Indeks Gini
   Walaupun belum tersedia data Triwulan I Tahun 2026, realisasi Tahun 2025 menunjukkan penurunan Indeks Gini dari 0,313 menjadi 0,271. Capaian tersebut menunjukkan pemerataan pendapatan yang semakin baik sehingga target Perubahan RKPD disesuaikan dari 0,310 menjadi 0,271.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka
   Data terbaru belum tersedia, namun capaian tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program penciptaan lapangan kerja menjadi dasar penetapan target TPT tahun 2026 menjadi 4,64 persen, menyesuaikan dengan target RPJMD Kota Payakumbuh untuk tahun 2026.

e. Tingkat Kemiskinan
   Realisasi tingkat kemiskinan turun dari 5,19 persen pada Tahun 2024 menjadi 4,95 persen pada Tahun 2025. Berdasarkan tren penurunan tersebut, target Perubahan RKPD 2026 disesuaikan menjadi 4,32 persen, lebih rendah dibandingkan target awal sebesar 4,80 persen.

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
   Realisasi IPM Tahun 2025 mencapai 81,62, lebih tinggi dibandingkan target RKPD Tahun 2026 sebesar 81,41. Oleh karena itu, target pada Perubahan RKPD 2026 ditingkatkan menjadi 81,98 sebagai bentuk dorongan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup masyarakat.

Dengan demikian, dasar perubahan RKPD Tahun 2026 berasal dari dua sumber utama, yaitu data realisasi Triwulan I Tahun 2026 serta hasil evaluasi realisasi Tahun 2025 dan proyeksi pembangunan daerah pada dokumen perencanaan 5 tahunan.

C. Pengaruh Kebijakan dengan Adanya Perubahan RKPD Tahun 2026

Perubahan RKPD Tahun 2026 berdampak pada penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah agar lebih efektif dalam mencapai target pembangunan sampai akhir tahun. Pada bidang ekonomi, penyesuaian target pertumbuhan ekonomi mengarahkan pemerintah daerah untuk memperkuat sektor perdagangan, jasa, industri kecil, UMKM, investasi, dan ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan utama. Di sisi lain, kebijakan pengendalian inflasi tetap difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, kelancaran distribusi barang, stabilisasi harga, dan peningkatan koordinasi TPID.

Dalam bidang sosial, penurunan target kemiskinan dan pengangguran mendorong pemerintah daerah memperluas program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta penciptaan lapangan kerja baru melalui investasi dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Peningkatan target Indeks Pembangunan Manusia menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

Sementara itu, penyesuaian target Indeks Gini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan hasil pembangunan melalui penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja, layanan pendidikan dan kesehatan, serta perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.

Secara keseluruhan, Perubahan RKPD Tahun 2026 merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan target pembangunan berdasarkan kondisi riil yang berkembang selama tahun berjalan. Penyesuaian tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas

pelaksanaan program pembangunan, menjaga konsistensi pencapaian sasaran RPJMD, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh secara berkelanjutan.

III.2 PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah. Perubahan arah kebijakan keuangan daerah dilakukan sebagai respons terhadap dinamika perkembangan ekonomi makro, kebijakan pemerintah pusat, serta realisasi kinerja keuangan daerah sampai dengan periode berjalan. Selain itu, perubahan ini juga mempertimbangkan kebutuhan pendanaan terhadap prioritas pembangunan daerah yang mengalami penyesuaian.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan yang dimulai dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cerminan efektivitas pengeloalaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Pemerintah Kota Payakumbuh dalam hal pengelolaan keuangan daerah tahun 2026 merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tetap berpedoman kepada kebijakan yang telah di susun dalam dokumen RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2025-2029.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat asas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c. Berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2025, KUPA dan PPAS;
d. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
e. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. Perubahan APBD Tahun 2025 merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Perubahan arah kebijakan keuangan daerah Tahun 2026 disusun sebagai bentuk penyesuaian perkembangan pembangunan daerah sampai dengan pertengahan tahun anggaran, yang mencakup perkembangan realisasi pendapatan, kebutuhan belanja, prioritas daerah, serta kondisi ekonomi makro dan kebijakan nasional. Penyesuaian kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah, transfer ke daerah, sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Dalam rangka menyusun prognosis terhadap target pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026, Pemerintah Kota Payakumbuh menerapkan pendekatan yang didasarkan pada perhitungan yang terukur, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prognosis pendapatan disusun dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan sampai dengan periode berjalan, tren capaian pada tahun-tahun sebelumnya, perkembangan kondisi ekonomi daerah, kebijakan fiskal nasional, serta potensi riil dari masing-masing sumber pendapatan daerah. Dengan pendekatan tersebut, target pendapatan yang ditetapkan diharapkan mencerminkan kemampuan riil daerah untuk mencapainya, memiliki tingkat kepastian yang memadai, serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, proses penyusunan prognosis juga memperhatikan hasil evaluasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi capaian pendapatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sehingga penyesuaian target pendapatan dapat dilakukan secara objektif, realistis, dan akuntabel sebagai dasar dalam menjaga kesinambungan fiskal daerah dan mendukung pembiayaan prioritas pembangunan.

Berdasarkan data realisasi pendapatan Kota Payakumbuh lima tahun yang lalu, diketahui pendapatan daerah Kota Payakumbuh masih didominasi dari pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat. Rasio Tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Rasio kemandirian keuangan daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel III-3.

Tabel III-3
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Payakumbuh

Tahun	Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Dana Transfer + Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Rp)	Rasio Kemandirian (%)
1	2	3	4
2021	90.291.310.165	587.005.623.248	15,38
2022	126.962.402.643	577.810.401.986	21,97
2023	123.216.492.558	618.193.409.345	19,93
2024	138.649.853.624	614.670.671.289	22,56
2025	166.878.567.156	615.557.713.708	27,11
Rata-rata	**129.199.725.229**	**602.647.563.915**	**21,39**

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2026 (data diolah Bappeda)

Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kota Payakumbuh pada periode tahun 2021-2025 sebesar 21,39 % menunjukan bahwa angka kemandirian keuangan daerah Kota Payakumbuh masih rendah, dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2025 sebesar 27,11% Adapun rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah Kota Payakumbuh dari Tahun 2021 s/d 2025 dapat dilihat pada tabel III-4.

Tabel III-4
Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh

Tahun	Dana Transfer + Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Rp)	Total Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Ketergantungan (%)
2021	587.005.623.248	677.296.933.413	86,67
2022	577.810.401.986	704.772.804.629	81,99
2023	618.193.409.345	741.409.901.903	83,38
2024	614.670.671.289	753.320.524.913	81,59
2025	615.557.713.708	782.436.280.864	78,67
Rata-rata	**602.647.563.915**	**731.847.289.144**	**82,35**

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2026 (data diolah Bappeda)

Tabel III-5 memperlihatkan rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Payakumbuh tertinggi berada pada tahun 2021 sebesar 86,67%, seiring berjalannya waktu terjadi penurunan ketergantungan keuangan menjadi 78,67% pada tahun 2025, namun rata-rata rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah masih diatas 80% yaitu sebesar 82,35%.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memperkuat kapasitas fiskal daerah, Pemerintah Kota Payakumbuh terus melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan daerah yang diarahkan untuk mendukung pemulihan dunia usaha sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah melalui berbagai inovasi kebijakan. Reformasi tersebut dilaksanakan dengan tetap menjaga keseimbangan antara upaya peningkatan pendapatan daerah dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, sehingga tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Berbagai langkah strategis ditempuh melalui penyederhanaan proses pelayanan, digitalisasi administrasi perpajakan dan retribusi daerah, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penguatan basis data objek dan subjek pajak, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, pemerintah daerah

juga melakukan mitigasi terhadap berbagai dampak yang berpotensi menghambat aktivitas ekonomi melalui penyesuaian kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan kondisi ekonomi, sehingga mampu mempercepat proses pemulihan ekonomi daerah. Reformasi kebijakan pendapatan tersebut diharapkan dapat mendorong transformasi struktur ekonomi daerah yang lebih produktif, meningkatkan daya saing investasi, memperluas basis penerimaan daerah secara berkelanjutan, serta mendukung terwujudnya kemandirian fiskal daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi seluruh potensi pendapatan yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan daerah dan penciptaan iklim investasi yang kondusif, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, penguatan basis data pendapatan berbasis digital, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam pengelolaan pendapatan.

Selain itu, Pemerintah Kota Payakumbuh terus mendorong inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan proses pelayanan, penguatan sistem pengawasan dan pengendalian, serta peningkatan kualitas tata kelola pendapatan yang adaptif terhadap perkembangan kondisi ekonomi. Arah kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mendukung reformasi fiskal daerah, memperluas basis penerimaan secara berkelanjutan, meningkatkan kemandirian fiskal daerah, serta memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diarahkan dalam Pemutakhiran Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026

Secara umum, perubahan arah kebijakan keuangan daerah difokuskan pada beberapa hal sebagai berikut:

a. Optimalisasi pendapatan daerah, terutama melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta pemanfaatan aset daerah secara lebih produktif. Selain itu, dilakukan penyesuaian target pendapatan berdasarkan tren realisasi hingga semester berjalan serta kebijakan transfer dari pemerintah pusat.
b. Penajaman prioritas belanja daerah, dengan mengarahkan alokasi anggaran pada program dan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, seperti pemulihan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, peningkatan layanan dasar, serta penguatan infrastruktur dan pelayanan publik. Dalam hal ini juga dilakukan rasionalisasi terhadap kegiatan yang kurang prioritas atau belum siap dilaksanakan.
c. Peningkatan kualitas belanja daerah, dengan menekankan prinsip efektif, efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil (outcome). Belanja daerah tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan serapan anggaran, tetapi juga untuk memastikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
d. Percepatan realisasi anggaran, melalui penguatan perencanaan pelaksanaan kegiatan, percepatan proses pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan koordinasi antar perangkat daerah guna menghindari penumpukan realisasi pada akhir tahun anggaran.
e. Penguatan tata kelola keuangan daerah, dengan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah secara optimal.
f. Pengelolaan pembiayaan daerah secara prudent, dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara optimal untuk mendukung kegiatan prioritas, serta menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Dengan perubahan arah kebijakan ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun 2026 menjadi lebih adaptif terhadap perubahan kondisi yang terjadi, serta mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan maka kebijakan pendapatan daerah pada Perubahan APBD tahun anggaran 2026 sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Perubahan arah kebijakan pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026 merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi realisasi pendapatan daerah, serta penyesuaian terhadap perkembangan asumsi ekonomi makro, kebijakan fiskal nasional, dan dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah serta meningkatkan akurasi target pendapatan sampai dengan akhir tahun anggaran. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa komponen pendapatan yang mengalami deviasi antara target dan realisasi, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kebijakan pendapatan daerah pada Perubahan RKPD diarahkan pada penajaman target serta optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang lebih realistis dan terukur.

Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan RKPD Tahun 2026 merupakan penyesuaian atas target PAD yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang- undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta hasil evaluasi realisasi sampai dengan semester I Tahun 2026 serta mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi daerah, kebijakan fiskal, dan potensi riil sumber-sumber pendapatan daerah.Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat dinamika capaian pada masing-masing komponen PAD, baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun lain-lain PAD yang sah. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak dan retribusi, perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat, serta efektivitas pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan penyesuaian target PAD dengan pendekatan yang lebih realistis dan terukur, dengan tetap mengedepankan upaya optimalisasi penerimaan daerah. Arah perubahan kebijakan PAD meliputi:

a. Penyesuaian Target Pajak Daerah
   Dilakukan berdasarkan capaian realisasi dan potensi penerimaan sampai dengan akhir tahun anggaran 2026, dengan memperhatikan perkembangan sektor ekonomi dan daya beli masyarakat yang menjadi basis dasar pemungutan pajak daerah.
b. Penyesuaian Target Retribusi Daerah
   Didasarkan pada evaluasi kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagai dasar pemungutan objek retribusi.
c. Optimalisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
   Dilakukan melalui peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta penguatan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
d. Peningkatan Lain-lain PAD yang Sah
   Ditempuh melalui optimalisasi pemanfaatan aset daerah, peningkatan pendapatan bunga deposito, jasa giro dan sumber pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Penguatan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah
   Melalui digitalisasi sistem pemungutan, integrasi data, serta peningkatan pengawasan dan pengendalian guna meminimalisir potensi kebocoran pendapatan.
f. Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak/Retribusi
   Dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, serta penegakan regulasi secara konsisten.

Secara keseluruhan, perubahan PAD pada P RKPD Tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pendapatan daerah, memperkuat kemandirian fiskal, serta menjaga kesinambungan penerimaan daerah guna mendukung pembiayaan program prioritas pembangunan secara optimal.

Asumsi kebijakan perencanaan pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026, masih melanjutkan dan mengoptimalkan kebijakan yang telah ditetapkan pada RKPD tahun 2026. Sampai dengan kondisi Triwulan I Tahun Anggaran 2026, Pendapatan Asli Daerah baru mencapai Rp.45.037.568.879,- atau 27,30%, dengan rincian Pajak Daerah mencapai 19,10%, retribusi daerah 25,07%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 79,49% dan Lain-lain PAD yang sah sebesar 15,48%. Kondisi ini belum bisa menggambarkan kondisi sampai akhir tahun sehingga untuk sementara proyeksi perubahan PAD pada perubahan RKPD masih kita targetkan sama dengan kondisi APBD Tahun Anggaran 2026.

a. Peningkatan basis data perpajakan
   Pemerintah daerah dapat meningkatkan basis data pajak melalui :
   1) Melakukan pendataan ulang terhadap data wajib pajak dan objek pajak.
   2) Profilling Wajib Pajak.
   3) Meningkatkan koordinasi internal Pemerintah Daerah diantaranya dengan bagian penerbitan izin.
   4) Memanfaatkan data pihak ketiga (KPP Pratama, dan BPN untuk PBB).

b. Penyesuaian dasar Pengenaan Pajak
   Cara ini dapat dilakukan melalui menilai ulang atas dasar pengenaan pajak yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.

c. Penilaian, Penetapan, Penagihan dan Pemeriksaan
   Pemerintah daerah bisa meningkatkan PAD dengan solusi ini dengan cara:
   1) Di bidang penilaian dan penagihan dapat dikerjasamakan dengan DJP dan DJKN
   2) Di bidang penetapan, menyiapkan tenaga pemeriksa yang bersertifikat keahlian
   3) Di bidang pemeriksaan dapat berkoordinasi dengen kejaksaan, Polri, BPK dan BPKP
   4) Di bidang penagihan, menyiapkan tenaga juru sita.

d. Modernisasi
   1) Penguatan dibidang teknologi informasi terkait pendataan, penagihan dan pengolahan data pajak daerah, melakukan sistem monitoring transaksi secara online dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melaporkan, memutakhirkan data, melakukan pembayaran secara online dengan menggunakan sistem informasi terintegrasi.
   2) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan basis data (*Integrated data bases*).
   3) Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan misalnya E-SPTPD dan E-Payment.
   4) Membangun organisasi perpajakan daerah berdasarkan fungsi pengelolaan data, pelayanan, penagihan, pemeriksaan dan pengawasan yang sejalan dengan tata kelola keuangan daerah.
   5) Menyusun SOP pelayanan.

e. Peningkatan SDM
   1) Menambah jumlah diklat untuk ahli penilaian, penagihan dan pemeriksaan.
   2) Menambah jumlah diklat terkait dengan praktik pemungutan perpajakan yang baik.
   3) Kerjasama kemitraan dengan pemda lain yang dinilai sukses dalam pemungutan perpajakan.

f. Dalam rangka meningkatkan penerimaan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Kota Payakumbuh akan mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
   Permasalahan:
   1) Kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.
   2) Penghindaran Pajak.
   Solusi:
   1) Melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum vertikal dan horizontal untuk melakukan tindakan penagihan dan pemberian sanksi (***law enforcement)*** kepada wajib pajak yang tidak patuh sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
   2) Menggunakan sistem teknologi informasi untuk mendetect pemenuhan kewajiban wajib pajak

g. Pembebasan BPHTB bagi Masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka mendukung program pemerintah 3 juta rumah. (gabungkan dengan kebijakan PAD) diatas

Pada Perubahan RKPD TA 2026 Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp.171.401.910.166,-.

2. Pendapatan Transfer

Perubahan Pendapatan Transfer pada Perubahan RKPD Tahun 2026 merupakan penyesuaian atas alokasi pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi, yang didasarkan pada perkembangan kebijakan fiskal nasional, hasil penetapan alokasi transfer terbaru, serta realisasi penyaluran sampai dengan semester I Tahun 2026.

Pendapatan transfer memiliki peran strategis dalam struktur pendapatan daerah, sehingga setiap perubahan kebijakan dan alokasi dari pemerintah pusat maupun provinsi berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, penyesuaian pendapatan transfer dilakukan secara cermat dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta informasi resmi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah pusat menetapkan kebijakan khusus mengenai Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026 sebagai respon atas bencana di wilayah Sumatera (Aceh, Sumatera Utara dan Suamtera Barat) dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan SE Mendagri No.900.1.3/1084/SJ tanggal 2 Maret 2026 yang mengatur pedoman pemanfaatan tambahan TKD 2026 untuk daerah yang terdampak bencana. Penambahan Dana Transfer ke Daerah pasca bencana alam Sumatera sebesar Rp.116.969.547.000,- dari Pemerintah Pusat yang menjadi fokus utama dalam penggunaan anggaran diperioritaskan untuk mitigasi bencana dan pemulihan pascabencana. Point penting dari surat edaran ini bertujuan percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dengan aksi menghimbau pemerintah daerah yang tidak terdampak untuk mengalokasikan anggaran melalui mekanisme hibah kepada daerah yang terdampak. Tambahan TKD Tahun 2026 wajib diarahkan penggunaannya untuk penyediaan anggran kegiatan untuk mitigasi dan kesiapsiagaan potensi bencana, penanaman pohon dan perbaikan lingkungan, Pemberian bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang secara langsung terdampak bencana, pengendalian inflasi, pemulihan ekonomi, pembangunan dan pemeliharaan sara prasarana seperti jalan, jembatan, moda transpotasi dan prasaran lainnya dalam rangka mendukung pelayanan dasar serta pemberian bantuan dalam rangka relokasi pembangunan rumah untuk menampung masyarakat terdampak bencana.

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026, Pemerintah Kota Payakumbuh memastikan bahwa seluruh perubahan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 telah diakomodasi dalam proyeksi pendapatan daerah. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai bentuk sinkronisasi antara kebijakan fiskal nasional dengan perencanaan pembangunan daerah, sehingga besaran pendapatan transfer yang dicantumkan dalam Perubahan RKPD mencerminkan alokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya, perubahan alokasi TKD dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, pemenuhan pelayanan publik, penguatan kualitas belanja daerah, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas nasional maupun prioritas daerah. Dengan demikian, kesinambungan perencanaan dan penganggaran daerah tetap terjaga serta selaras dengan arah kebijakan fiskal nasional.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan penyesuaian pendapatan dan belanja daerahnya pada mekanisme pergeseran anggaran dan ditampung dalam Perubahan APBD TA 2026. Adapun kebijakan tersebut antara lain :

a. Melakukan penyesuaian pendapatan yang bersumber dari Pendapatan transfer pusat.
b. Melakukan penghematan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, penggandaan dan percetakan serta publikasi.

Upaya yang dilakukan dalam pendapatan transfer pada Perubahan RKPD Tahun 2026 meliputi:

1) Penyesuaian Dana Transfer dari Pemerintah Pusat

Dilakukan berdasarkan perubahan alokasi dana perimbangan dan transfer ke daerah yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun nonfisik, serta dana transfer lainnya sesuai kebijakan pemerintah pusat.

2) Penyesuaian Transfer Antar Daerah

Dilakukan terhadap pendapatan yang bersumber dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya, termasuk bantuan keuangan, dengan memperhatikan penetapan alokasi terbaru dan realisasi penyaluran.

3) Penyesuaian Berdasarkan Realisasi Penyaluran

Mempertimbangkan capaian realisasi penyaluran dana transfer sampai dengan semester I, termasuk potensi penyaluran sampai akhir tahun anggaran.

4) Penyesuaian Kebijakan dan Ketentuan Teknis

Mengakomodasi perubahan kebijakan, mekanisme penyaluran, serta persyaratan penggunaan dana transfer sesuai regulasi yang berlaku.

5) Peningkatan Akurasi Perencanaan Pendapatan Transfer

Dilakukan melalui sinkronisasi data dan informasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, sehingga proyeksi pendapatan transfer lebih realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk pendapatan yang bersumber dari DAK Fisik, dimana pada tahun 2026 ini kita mendapatkan alokasi DAK Fisik bidang Kesehatan sebesar Rp. 1.903.373.000,- namun karena persyaratan yang kurang lengkap sehingga DAK tersebut tidak dapat disalurkan. Kondisi ini akan mengurangi pendapatan transfer sebesar anggaran tersebut.

Secara keseluruhan, perubahan pendapatan transfer pada Perubahan RKPD Tahun 2026 diarahkan untuk menjaga stabilitas pendapatan daerah, meningkatkan akurasi penganggaran, serta memastikan keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Perubahan RKPD Tahun 2026 merupakan penyesuaian atas target pendapatan yang bersumber dari komponen pendapatan selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer, yang dilakukan berdasarkan evaluasi realisasi sampai dengan semester I Tahun 2026 serta memperhatikan perkembangan kebijakan dan potensi penerimaan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi antara lain pendapatan hibah, dana darurat, pendapatan dari pengembalian, serta penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan pada komponen ini dipengaruhi oleh adanya penetapan alokasi hibah, realisasi penerimaan yang tidak bersifat tetap, serta dinamika kebijakan pemerintah yang berdampak pada penerimaan daerah.

Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2026 tidak ada alokasi pendapatannya. Namun Upaya yang dilakukan dalam kaitannya memperoleh Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu sebagai berikut:

a. **Penyesuaian Target Pendapatan Hibah**

   Dilakukan berdasarkan kepastian penerimaan hibah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, maupun pihak ketiga, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku serta kesiapan administrasi daerah.

b. **Penyesuaian Pendapatan dari Pengembalian dan Penerimaan Lainnya**

   Didasarkan pada realisasi penerimaan yang bersifat insidentil dan tidak berulang, seperti pengembalian atas belanja tahun sebelumnya atau penerimaan lain yang sah.

c. **Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Akuntabilitas**

   Dilakukan melalui penguatan pencatatan, pelaporan, dan verifikasi terhadap seluruh penerimaan yang masuk dalam kategori lain-lain pendapatan daerah yang sah.

d. **Peningkatan Akurasi Perencanaan Pendapatan**

   Dilakukan dengan mempertimbangkan sifat penerimaan yang tidak tetap dan cenderung fluktuatif, sehingga penetapan target lebih realistis dan dapat dipertanggungjawabkan melalui :

   1) Mengupayakan berbagai usulan program pembangunan yang dapat didanai melalui hibah dari pemerintah;
   2) Melakukan koordinasi dengan provinsi untuk meraih bantuan keuangan dari Provinsi.

Untuk realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu 2024-2025, rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Payakumbuh tahun 2024 dan 2025 menunjukan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 3,86%. Untuk tahun 2026, pendapatan ditargetkan sebesar Rp.650.299.879.645, sampai dengan triwulan I tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp.274.910.885.691 yang dapat dilihat pada tabel III-5.

Tabel III-5
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 – 2025 dan Realisasi Tw 1

KODE REKENING	KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI APBD 2024	REALISASI APBD 2025	SELISIH	Pertumbuhan (%)	REALISASI TRIWULAN 1 TA 2026
1	2	3	4	5	6	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**753.320.524.913**	**782.436.280.864**	**29.115.755.951**	**3,86**	**274.910.885.691**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**138.649.853.624**	**166.878.567.156**	**28.228.713.532**	**20,36**	**45.037.568.879**
4.1.01	Pajak daerah	23.691.080.250	44.752.209.670	21.061.129.420	88,90	9.368.097.341
4.1.02	Retribusi daerah	92.815.819.897	96.656.956.695	3.841.136.798	4,14	23.259.318.028
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	12.381.453.735	13.275.525.706	894.071.971	7,22	10.950.501.981
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	9.761.499.742	12.193.875.085	2.432.375.343	24,92	1.459.651.529
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**613.134.671.289**	**611.557.713.708**	**-1.576.957.581**	**-0,26**	**229.873.316.812**
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	575.781.818.001	579.808.401.303	4.026.583.302	0,70	229.873.316.812
4.2.02	Transfer Antar Daerah	37.352.853.288	31.749.312.405	-5.603.540.883	-15,00	-
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**1.536.000.000**	**4.000.000.000**	**2.464.000.000**	**160,42**	-
4.3.02	Pendapatan Hibah	1.536.000.000	4.000.000.000	2.464.000.000	160,42	
	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-

Sumber BKD Kota Payakumbuh tahun 2026

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan realisasi PAD tahun 2025 sebesar 20,36% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 160,42%, namun terjadi penurunan pada pendapatan transfer sebesar 0,26%. Pertumbuhan pendapatan daerah Kota Payakumbuh disetiap akhir tahun anggaran selalu menunjukan trend positif, namun demikian masih terdapat beberapa tantangan untuk pencapaian realisasi yang positif seperti sektor retribusi daerah capaian realisasi tahun 2025 sebesar Rp.96.656.956.695,- naik dibanding tahun sebelumnya tahun 2024 sebesar Rp.92.815.819.897,-. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, secara umum pertumbuhan target dan realisasi pendapatan daerah selalu menunjukkan trend positif sebagaimana dapat dilihat pada tabel III-6 berikut:

Tabel III-6
Capaian dan Tingkat Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2021 - 2025

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% TK. PERTUMBUHAN
1	2	3	4	5=4/3*100	6
1	2021	682.401.082.138	677.296.933.413	99,25	-
2	2022	696.617.590.928	704.772.804.629	101,17	4,06
3	2023	740.546.410.861	741.409.901.903	100,12	5,20
4	2024	733.573.159.828	753.320.524.913	102,69	1,61
5	2025	762.795.053.515	782.436.280.964	102,57	3,86
Rata- Rata		**275.803.734.614**	**276.413.947.609**	**100,22**	**3,69**

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Data Diolah Tahun 2026

Secara umum tabel diatas menunjukan capaian dan tingkat pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Payakumbuh dari tahun 2021 sampai tahun 2025 mengalami peningkatan. Hal tersebut nampak dari capaian realisasi tiap tahun melampaui dari target dengan rata-rata mendekati dan bahkan melebihi100% dengan realisasi tertinggi pada tahun 2024 sebesar 102,69%, dan rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan Kota Payakumbuh dalam kurun waktu 2021-2025 adalah 3,69%.

Kondisi pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026, mengalami penyesuaian akibat adanya pengembalian pendapatan Transfer dari pusat sebesar Rp.116.969.547.000,- sehingga sangat signifikan mendongkrak pendapatan daerah. Selain itu peningkatan pendapatan juga terjadi pada BLUD RSUD Adnan WD dan Puskesmas.

Berdasarkan kondisi realisasi pendapatan daerah triwulan 1 tahun anggaran 2026 dan penyesuaian pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, maka proyeksi perubahan pendapatan pada perubahan RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel III-7.

Tabel III-7
Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh Pada Perubahan RKPD Tahun 2026

KODE REKENING	URAIAN	RKPD TH 2026	APBD 2026 AWAL	PERUBAHAN RKPD TH 2026	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6 = 5-3	7=(6/3* 100)
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**646.303.222.687**	**650.299.879.645**	**794.367.729.347**	**144.067.849.702**	**22,15**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**151.321.588.340**	**164.968.026.298**	**171.401.910.166**	**6.433.883.868**	**3,90**
4.1.01	Pajak Daerah	41.699.161.420	49.022.124.064	49.022.124.064	**0**	**0,00**
4.1.02	Retribusi Daerah	88.568.681.585	92.745.411.288	98.659.045.004	5.913.633.716	6,38
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.381.453.375	13.775.525.706	13.775.525.706	**0**	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.672.291.600	9.424.965.240	9.945.215.392	520.250.152	5,52
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**494.981.634.347**	**485.331.853.347**	**622.965.819.181**	**137.633.965.834**	28,36
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	470.502.291.000	460.852.510.000	591.216.506.776	**130.363.996.776**	28,29
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.479.343.347	24.479.343.347	31.749.312.405	**7.269.969.058**	29,70
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
4.3.02	Dana Darurat	0	0	0	**0**	0,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2026 (data diolah Bappeda)

III.2.1 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan kebijakan belanja daerah Kota Payakumbuh dilakukan guna penyesuaian kebijakan belanja dilakukan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran lebih tepat sasaran, efisien, dan efektif dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Selain itu, perubahan ini juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

Arah Kebijakan Belanja Tahun 2026, sepenuhnya mengacu pada pasal 158 Permendari 86 Tahun 2017 yang mengatur:

Prioritas I : Belanja yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dan Earmark dapat merujuk pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah. Untuk itu dapat didefinisi belanja wajib dan belanja mengikat sebagi berikut:

1. Belanja wajib: belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target standar pelayanan minimal pada 6 bidang yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dan Sosial).
2. Belanja mengikat: belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Dalam penjabaran lebih detail belanja mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Prioritas II : Belanja Program dan Kegiatan terkait Visi dan Misi Kepala Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah. Belanja program dan kegiatan terkait dengan Visi dan Misi : yang diarahkan untuk pembiayaan program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Prioritas III : Belanja Program dan Kegiatan diluar Visi dan Misi Kepala Daerah serta fungsi pelayanan **pemerintah**. Adapun kebijakan belanja pada prioritas ini sebagai berikut:

1. Penyesuaian belanja berdasarkan KMK 59 tahun 2026.
2. Penyesuaian belanja yang bersumber dari Bantuan Presiden.
3. Penyesuaian belanja yang bersumber dari SiLPA DAU yang diarahkan.
4. Mengurangi belanja yang didanai Dana Alokasi Khusus Fisik bidang Kesehatan.

Alokasi belanja difokuskan pada program dan kegiatan prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya pada sektor pelayanan dasar, pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan, dan pemulihan ekonomi daerah. Penyesuaian Belanja Wajib dan Mengikat dilakukan untuk memastikan pemenuhan kewajiban daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk belanja pegawai, belanja pendidikan, belanja kesehatan, serta kewajiban lainnya.

Selanjutnya belanja daerah yang disusun berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis. Rencana belanja dilakukan secara cermat, rasional, terukur dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Beberapa arah kebijakan Belanja Daerah Tahun 2026 tetap mengacu pada kebijakan pemerintah pusat diantaranya sebagai berikut:

a. Kebijakan belanja untuk pemenuhan belanja wajib yang ditentukan oleh perundang-undangan meliputi:
    1) Alokasi anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari belanja APBD
    2) Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik diupayakan minimal 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.
    3) Alokasi belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD diupayakan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
    4) Alokasi belanja wajib dari penggunaan hasil penerimaan Pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, meliputi:
        - Hasil penerimaan Opsen PKB, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
        - Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum

- Hasil penerimaan Pajak Rokok bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
- Hasil penerimaan Pajak Air Tanah, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi: penanaman pohon; pembuatan lubang atau sumur resapan; pelestarian hutan atau pepohonan; dan pengelolaan limbah.

b. Alokasi anggaran yang memadai dan berkelanjutan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada setiap layanan di Perangkat Daerah terkait sesuai peraturan perundang- undangan

c. Alokasi anggaran yang memadai untuk pengawasan oleh APIP pada Inspektorat sebagaimana amanat Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPK dan Kepala BPKP Nomor 11 Tahun 2024, Nomor 700.1/3013/SJ dan Nomor Hk.01.00/SE.3/K/D3/2024 tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

d. Alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan.

Awal tahun 2026 dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 59 Tahun 2026 yang merupakan regulasi khusus untuk mengatur penyesuaian rincian alokasi dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah yang terdampak bencana. Regulasi ini mencakup skema tambahan alokasi dana dan relaksasi penyaluran dana pascabencana di berbagai provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pemerintah pusat menetapkan kebijakan khusus mengenai Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026 sebagai respon atas bencana di wilayah Sumatera (Aceh, Sumatera Utara dan Suamtera Barat) dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan SE Mendagri No.900.1.3/1084/SJ tanggal 2 Maret 2026 yang mengatur pedoman pemanfaatan tambahan TKD 2026 untuk daerah yang terdampak bencana. Penambahan Dana Transfer ke Daerah pasca bencana alam Sumatera sebesar Rp.116.969.547.000,- dari Pemerintah Pusat yang menjadi fokus utama dalam penggunaan anggaran diperioritaskan untuk mitigasi bencana dan pemulihan pascabencana. Point penting dari surat edaran ini bertujuan percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dengan aksi menghimbau pemerintah daerah yang tidak terdampak untuk mengalokasikan anggaran melalui mekanisme hibah kepada daerah yang terdampak. Tambahan TKD Tahun 2026 wajib diarahkan penggunaannya untuk penyediaan anggran kegiatan untuk mitigasi dan kesiapsiagaan potensi bencana, penanaman pohon dan perbaikan lingkungan, Pemberian bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang secara langsung terdampak bencana, pengendalian inflasi, pemulihan ekonomi, pembangunan dan pemeliharaan sara prasarana seperti jalan, jembatan, moda transpotasi dan prasaran lainnya dalam rangka mendukung pelayanan dasar serta pemberian bantuan dalam rangka relokasi pembangunan rumah untuk menampung masyarakat terdampak bencana.

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 59 Tahun 2026 merupakan regulasi khusus yang mengatur penyesuaian rincian alokasi dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah yang terdampak bencana. Regulasi ini mencakup skema tambahan alokasi dana dan relaksasi penyaluran dana pascabencana di berbagai provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Berikut adalah rincian utama dan poin penting dari kebijakan tersebut:

- **Tujuan Utama:** Menyesuaikan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta memberikan dukungan fiskal tambahan (mencapai Rp10,65 triliun untuk wilayah terdampak bencana di 3 provinsi Sumatra) agar pemulihan pascabencana berjalan lancar tanpa mengorbankan layanan publik.

- **Mekanisme Penyaluran:** Pencairan dana dilakukan dalam tiga tahap secara bertahap. Tahap pertama sebesar 40% disalurkan pada bulan Februari, tahap kedua 30% pada bulan Maret, dan tahap ketiga 30% pada bulan April.
- **Dukungan Relaksasi Tambahan:** Disertai dengan kebijakan relaksasi seperti penyaluran tanpa syarat salur, penggunaan dana *earmarked* khusus penanganan bencana, serta pelonggaran kewajiban pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pemanfaatan bantuan tambahan TKD tersebut diarahkan untuk mendukung Pemda dalam pemulihan pasca bencana, selain dengan memanfaatkan pendanaan dari pemerintah pusat melalui tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Total besaran alokasi tambahan TKD yang ditetapkan Menteri Keuangan adalah sebesar Rp10,65 triliun. Penambahan TKD pada masing-masing daerah dilakukan secara bertahap hingga memenuhi selisih penurunan total alokasi TKD APBN 2026 terhadap alokasi TKD 2025 pasca inpres, melalui tambahan DBH, DAU, dan dana Otsus. Penyaluran Tambahan TKD ini direncanakan Kementerian Keuangan dalam 3 tahap, yaitu pada bulan Februari sebesar 40 persen nya, pada bulan Maret sebesar 30 persen nya, dan pada bulan April 30 persen nya. Di akhir Februari 2026, Kementerian Keuangan telah menyalurkan tambahan TKD sebesar Rp4,39T.

Sebagai langkah awal dalam mendukung penanganan dan pemulihan bencana, Menteri Keuangan juga telah mengatur relaksasi penyaluran dan penggunaan TKD pada daerah terdampak bencana melalui PMK 102 Tahun 2025. Relaksasi ini diantaranya berupa penyaluran tanpa syarat salur dan penggunaan TKD earmarked untuk penanganan bencana alam dan pemulihan pascabencana alam, serta relaksasi atas kewajiban pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada daerah yang terdampak bencana.

Bentuk relaksasi kewajiban pinjaman PEN Daerah yang dapat diberikan bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meliputi: (1) penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga selama masa pascabencana, (2) perpanjangan jangka waktu pinjaman hingga 15 tahun, serta (3) penghapusan sisa kewajiban pinjaman secara kondisional bagi infrastruktur yang mengalami kerusakan total atau berat akibat banjir, banjir bandang, maupun tanah longsor dengan tingkat kerusakan melebihi 70 persen dari nilai aset yang dibiayai. Fasilitas relaksasi tersebut tidak bersifat otomatis, melainkan diberikan sesuai Pinjaman PEN yang berlaku. Sampai dengan saat ini, relaksasi pinjaman PEN tersebut telah dimanfaatkan oleh 4 Pemda yang terdampak bencana di Sumatera.

Dari kebijakan dukungan fiskal yang ditetapkan diatas, Per Februari 2026, realisasi penyaluran TKD TA 2026 pada 3 Provinsi terdampak bencana sudah mencapai Rp23,18T, lebih tinggi 54,07% dibanding 2025, termasuk penyaluran tambahan TKD di 3 Provinsi di Sumatera sebesar Rp4,39T. Tambahan TKD dan kebijakan relaksasi ini sebagai salah satu dukungan nyata dari Pemerintah Pusat dalam mendukung pemulihan daerah terdampak bencana. Dukungan fiskal melalui tambahan TKD melengkapi berbagai program tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pasca bencana Sumatera. Seluruh kebijakan ini ditujukan agar pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi serta menjaga keberlanjutan layanan publik dan membantu pemulihan ekonomi masyarakat.

Dalam situasi tidak terjadi bencana dapat digunakan untuk perencanaan penggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana, maka dapat digunakan untuk kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana.

Bagi pemerintah daerah yang berada di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang tidak secara langsung terdampak bencana, tambahan TKD TA 2026 wajib diarahkan juga penggunaannya untuk penyediaan anggaran kegiatan seperti:

1. Mitigasi dan kesiapsiagaan potensi bencana
2. Penanaman pohon dan perbaikan lingkungan
3. Pemberian bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang secara langsung terdampak bencana
4. Pengendalian inflasi
5. Pemulihan ekonomi
6. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasaran seperti jalan, jembatan, moda transportasi, dan prasarana lainnya dalam rangka mendukung pelayanan dasar masyarakat

7. Pemberian bantuan dalam rangka realokasi dan pembangunan rumah untuk menampung masyarakat terdampak bencana

Pemerintah Kota Payakumbuh menyiapkan langkah optimalisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp116,96 miliar yang diberikan pemerintah pusat untuk memperkuat mitigasi bencana, pengendalian inflasi, pemulihan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat.

Penyesuaian terhadap Perubahan Kebijakan dan Regulasi mengakomodasi perubahan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang berdampak pada struktur dan alokasi belanja daerah. Perubahan belanja daerah tahun 2026 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta realisasi tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi belanja daerah dapat dilihat pada tabel III-8.

Tabel III-8
Realisasi dan Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024-2025 dan Realisasi Triwulan I TA 2026

KODE REKENING	URAIAN	Realisasi APBD Tahun 2024	Realisasi APBD Tahun 2025	Selisih	Pertumbuhan (%)	Realisasi Triwulan I TA 2026
1	2	3	4	5=4-3	6=(5/3) x100	7
5	BELANJA DAERAH	742.725.057.279	765.450.084.970	22.725.027.691	3,06	156.079.770.201
5.1	BELANJA OPERASI	668.220.386.847	671.418.452.358	3.198.065.511	0,48	154.145.549.514
5.1.01	Belanja Pegawai	376.394.619.531	381.919.511.232	5.524.891.701	1,47	94.580.495.108
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.363.190.982	266.704.269.431	5.341.078.449	2,04	53.342.129.906
5.1.05	Belanja Hibah	27.373.461.334	21.829.971.695	-5.543.489.639	-20,25	6.222.924.500
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.089.115.000	964.700.000	-2.124.415.000	-68,77	-
5.2	BELANJA MODAL	73.985.819.648	94.027.132.612	20.041.312.964	27,09	1.932.891.987
5.2.01	Belanja Modal Tanah	834.832.535	1.598.164.430	763.331.895	91,44	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.973.427.518	38.662.905.255	16.689.477.737	75,95	1.312.291.617
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.929.842.688	26.140.617.432	8.210.774.744	45,79	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.784.644.322	25.423.870.469	-5.360.773.853	-17,41	38.613.570
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.459.672.585	2.178.598.026	-281.074.559	-11,43	576.991.800
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	23.000.000	22.977.000	-23.000	-0,1	4.995.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.726.011.484	4.500.000	-6.721.511.484	-99,93	1.328.700
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.726.011.484	4.500.000	-6.721.511.484	-99,93	1.328.700
5.4	BELANJA TRANSFER	2.190.000.000	0	-2.190.000.000	-100	-
5.4.01	Belanja Transfer	2.190.000.000	0	-2.190.000.000	-100	-

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Data Diolah Tahun 2026

Berdasarkan kondisi pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah pada perubahan RKPD tahun 2026 maka belanja daerah pada perubahan RKPD Tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp.879.503.909.525,- bertambah sebesar Rp.127.161.632.851,- dari APBD Tahun 2026 sebesar Rp.752.342.276.674,-

Tabel III-9
Rencana Belanja Daerah Pada Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2026

KODE REKENING	URAIAN	RKDP 2026	APBD AWAL 2026	PERUBAHAN RKPD 2026	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6=5-4	7=(6/4) x100
5.	**BELANJA DAERAH**	**667.302.622.687**	**752.342.276.674**	**879.503.909.525**	**127.161.632.851**	**16,9**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**622.243.361.094**	**707.509.349.668**	**722.795.883.566**	**15.286.533.898**	**2,2**
5.1.01	Belanja Pegawai	381.869.086.283	397.281.850.187	390.427.378.099	-6.854.472.088	-1,7
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.376.626.649	292.543.851.318	314.704.857.304	22.161.005.986	7,6
5.1.05	Belanja Hibah	1.972.248.163	17.103.248.163	17.083.248.163	-20.000.000	-0,1
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.025.400.000	580.400.000	580.400.000	0	0,0
5.2	**BELANJA MODAL**	**44.768.852.328**	**42.832.927.006**	**151.708.025.959**	**108.875.098.953**	**254,2**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	220.450.000	2.170.248.320	4.684.910.816	2.514.662.496	115,9
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.293.939.445	13.890.533.798	53.449.752.898	39.559.219.100	284,8
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.322.398.975	6.785.949.300	25.745.037.287	18.959.087.987	279,4
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.796.192.048	17.884.955.338	65.508.984.708	47.624.029.370	266,3
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	130.871.860	2.096.240.250	2.314.340.250	218.100.000	10,4
5.2.03	Belanja Modal Aset Lainnya	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0,0
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**290.409.265**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**0**	**0,0**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	290.409.265	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0,0
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**0**	**0**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0	0	3.000.000.000	3.000.000.000	

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2026 (data diolah Bappeda)

Dalam rangka mencapai mandatory belanja pegawai 30%, pada Perubahan RKPD tahun 2026 telah dilakukan pengurangan belanja pegawai dari rasionalisasi perhitungan kebutuhan perencanaan dan penganggaran belanja pegawai, antara lain adanya pegawai yang pensiun dan pindah. Sebagian besar pengurangan belanja pegawai tersebut berasal dari kebijakan status penyuluh pertanian menjadi pegawai Kementan.

Dalam rangka memenuhi mandatory belanja pegawai 30% tersebut, beberapa upaya dan stategi yang dilakukan antara lain:

a. Optimalisasi dan peningkatan penerimaan pendapatan daerah dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b. Moratorium/pembatasan pindah masuk per 1 Juli 2026

c. Peningkatan kualitas SDM ASN dan

d. Menghemat komponen belanja pegawai dengan melakukan penyesuaian kebijakan kepegawaian antara lain melalui penyusunan formasi PNS berdasarkan analisis jabatan dan atau analisis kebutuhan pegawai, penerapan kebijakan pengurangan jumlah pegawai secara bertahap (*minus growth*).

III.2.2 Surplus/ Defisit APBD

Perubahan RKPD tahun 2026 Kota Payakumbuh berdasarkan uraian rencana pendapatan daerah dan belanja daerah di target dengan pendapatan daerah sebesar Rp. 794.367.729.347.- dan belanja daerah di targetkan sebesar Rp. 879.503.909.525-. kondisi tersebut menggambarkan terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 85.136.180.178,- penyebab terjadinya defisit karena belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah. Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026 serta defisit anggarannya dapat dilihat secara rinci sebagai berikut.

Tabel III-10
Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah pada APBD dan Perubahan RKPD
Kota Payakumbuh Tahun 2026

KODE REKENING	URAIAN	APBD 2026 AWAL	PERUBAHAN RKPD TA 2026	SELISIH	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6=(5/3)*100
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**650.299.879.645**	**794.367.729.347**	**144.067.849.702**	22,15
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**164.968.026.298**	**171.401.910.166**	**6.433.883.868**	3,90
4.1.01	Pajak Daerah	49.022.124.064	49.022.124.064	**0**	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	92.745.411.288	98.659.045.004	**5.913.633.716**	6,38
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.775.525.706	13.775.525.706	**0**	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.424.965.240	9.945.215.392	**520.250.152**	5,52
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**485.331.853.347**	**622.965.819.181**	**137.633.965.834**	28,36
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	460.852.510.000	591.216.506.776	**130.363.996.776**	28,29
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.479.343.347	31.749.312.405	**7.269.969.058**	29,70
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0**	**0**	**0**	0,00
4.3.02	Dana Darurat	0	0	**0**	0,00
5.	**BELANJA DAERAH**	**752.342.276.674**	**879.503.909.525**	**127.161.632.851**	**16,90**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**707.509.349.668**	**722.795.883.566**	**15.286.533.898**	**2,16**
5.1.01	Belanja Pegawai	397.281.850.187	390.427.378.099	-6.854.472.088	-1,73
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.543.851.318	314.704.857.304	22.161.005.986	7,58

KODE REKENING	URAIAN	APBD 2026 AWAL	PERUBAHAN RKPD TA 2026	SELISIH	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6=(5/3)*100
5.1.05	Belanja Hibah	17.103.248.163	17.083.248.163	-20.000.000	-0,12
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	580.400.000	580.400.000	0	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**42.832.927.006**	**151.708.025.959**	**108.875.098.953**	**254,19**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.170.248.320	4.684.910.816	2.514.662.496	115,87
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.890.533.798	53.449.752.898	39.559.219.100	284,79
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.785.949.300	25.745.037.287	18.959.087.987	279,39
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.884.955.338	65.508.984.708	47.624.029.370	266,28
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.096.240.250	2.314.340.250	218.100.000	10,40
5.2.03	Belanja Modal Aset Lainnya	5.000.000	5.000.000	0	0,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**0**	**0,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**0**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**0,00**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0	3.000.000.000	3.000.000.000	0,00
	Surplus/ Defisit	**-102.042.397.029**	**-85.136.180.178**		

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2026 (data diolah Bappeda)

Tabel III-10 memperlihatkan adanya defisit APBD Tahun 2026 yaitu Rp.85.136.180.178,- untuk mengatasi defisit ini pada perubahan RKPD Tahun 2026 akan dilakukan penyesuaian kebijakan pembiayaan daerah.

III.2.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah memiliki fungsi strategis sebagai instrumen untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran, sehingga kebijakan pembiayaan harus dikelola secara cermat, hati-hati (prudent), dan berkelanjutan dengan memperhatikan risiko fiskal yang mungkin timbul. Pembiayaan daerah dilakukan pada setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun periode tahun berikutnya. Pembiayaan dilakukan untuk transaksi keuangan daerah guna menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Sumber pembiayaan dapat berasal Dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Komposisi pembiayaan daerah terdiri dari atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan komponen penerimaan pembiayaannya yang mempunyai porsi paling besar adalah SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan secara umum penyertaan modal (investasi) daerah memiliki porsi besar dibandingkan dengan lainnya, kemudian transfer dari dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan. Pembiayaan daerah dalam hal ini meliputi penerimaan pembiayaan yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA) serta pengeluaraan pembiayaan terdiri dari penyertaan modal kepada BUMD, dan pada Bank Nagari.

Adapun langkah arah kebijakan pembiayaan daerah adalah: Mengakomodir penerimaan pembiayaan terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (Tahun 2025) terhadap penyertaan modal kepada BUMD dilaksanakan seefektif mungkin tergantung kebutuhan sedangkan penyertaan modal kepada Bank Nagari adalah dalam rangka memenuhi car ratio perbankan yang harus dipenuhi setiap tahunnya.

Asumsi dan arah kebijakan yang digunakan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.
2. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari pengeluaran pembiayaan daerah yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kebijakan pembiayaan dilakukan dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah, kesinambungan fiskal jangka menengah, serta mitigasi risiko keuangan daerah. Menjaga Keseimbangan Anggaran Daerah. Pembiayaan diarahkan untuk memastikan keseimbangan antara pendapatan daerah dan belanja daerah, sehingga APBD tetap dalam kondisi sehat dan terkendali. Peningkatan Akurasi Perencanaan Pembiayaan dilakukan melalui penyempurnaan data dan informasi terkait komponen pembiayaan daerah, sehingga proyeksi yang ditetapkan lebih realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk melihat realisasi pembiayaan daerah Tahun 2024 s/d 2025 sebagai perbandingan dapat dilihat pada Tabel III-11.

Tabel III-11
Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 s/d 2025

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2024	Realisasi APBD 2025	Selisih	%
1	2	3	4	5=4-3	6
	SURPLUS /(DEFISIT)	10.595.467.634	16.986.195.893	6.390.728.259	60,32
6	PEMBIAYAAN DAERAH	77.618.589.941	88.214.057.575	10.595.467.634	13,65
6.1	PENERIMAAN PEMBIYAAN DAERAH	85.118.589.941	88.214.057.575	3.095.467.634	3,64
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	85.118.589.941	88.214.057.575	3.095.467.634	3,64
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7.500.000.000	0	-7.500.000.000	-100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	77.618.589.941	88.214.057.575	10.595.467.634	13,65
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	88.214.057.575	105.200.253.468	16.986.195.893	19,26

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2026 (data diolah Bappeda)

Tabel III-11 memperlihatkan adanya peningkatan SiLPA dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp.16.986.195.893,- yang bersumber dari pelampauan pendapatan dan penghematan belanja. Silpa yang besar memperlihatkan kemampuan Kota Payakumbuh dalam menghasilkan ouput dan outcome kegiatan dengan anggaran yang minimalis tapi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya SiLPA, baik di tingkat pusat maupun daerah, seperti perencanaan anggaran yang kurang akurat, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai target, anggaran yang sudah dialokasikan namun tidak terealisasi hingga akhir tahun, terjadi perubahan kondisi ekonomi atau politik yang tidak terduga, hingga pembiayaan yang tidak dicairkan atau pinjaman yang tidak ditarik seluruhnya.

SiLPA memang tampak seperti hal yang positif karena adanya sisa uang, namun keberadaan SiLPA yang terlalu besar justru dapat menimbulkan masalah seperti in-efisiensi anggaran, peluang korupsi, hingga kemungkinan terdapat kendala untuk perencanaan anggaran tahun berikutnya karena sulit memprediksi jumlah SiLPA yang sebenarnya akan digunakan. Menyadari potensi masalah tersebut, menekan SiLPA merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memastikan anggaran yang telah disusun dapat terealisasi secara efektif dan efisien.

Arah Kebijakan umum Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) diarahkan pada :

1. SILPA merupakan perhitungan antara surplus/defisit dengan pembiayaan neto. Pembiayaan neto merupakan perhitungan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
2. Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh menganggarkan SILPA TA 2026 dalam RKPD, KUA PPAS dan APBD bersaldo nihil.
3. Dalam hal perhitungan penyusunan Perubahan RKPD menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, Pemerintah Kota Payakumbuh harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, subkegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
4. Dalam hal perhitungan penyusunan Perubahan RKPD menghasilkan SILPA tahun berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan subkegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan subkegiatan.

Kebijakan umum Penerimaan Pembiayaan khususnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), yakni:

a. Penganggaran SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang akan dianggarkan di Tahun 2026 memperhatikan/mempedomani hasil audit BPK-RI atas LKPD TA. 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Untuk SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya. Pemerintah Daerah menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya. Misalnya SiLPA BLUD Rumah Sakit dan Puskesmas digunakan untuk belanja BLUD itu sendiri, dan SiLPA Umum diginakan untuk pelaksanaan prioritas daerah.
c. Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukkan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi
d. Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Daerah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dan pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat.

Sehubungan dengan kebijakan umum diatas, maka SiLPA Pertanggungjawaban APBD 2025 Kota Payakumbuh setelah hasil audit BPK adalah sebesar Rp.105.200.253.468,93 dan digunakan untuk menutup defisit anggaran pada Perubahan RKPD 2027 sebesar Rp. 85.136.180.178,-. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp.20.064.073.290,93 yang merupakan SiLPA pendapatan earmark seperti sisa kas BOS, kas BOK puskesmas dan BOK kesetaraan tahun 2024 serta SiLPA DAK Fisik dan Non Fisik, DAU *spesifik grand* DBH sawit, insentif fiskal tahun 2025, yang menuggu lebih lanjut arah kebijakan penggunaannya dari pemerintah pusat. Penggunaan selisih kurang SiLPA Rp. 20.064.073.290,93 tersebut akan digunakan pada penyusunan RAPBD Perubahan Tahun

2026 setelah jelas arah kebijakan penggunaannya oleh pemerintah pusat, apakah akan menjadi kebijakan *carry over* dengan mengurangi alokasi pendapatan trasfer tahun berkenaan atau akan menjadi mekanisme penyetoran ke kas negara sesuai ketentuan perundangan berlaku.

Berdasarkan kondisi diatas maka target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Perubahan APBD tahun anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel III-12.

Tabel III-12
Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan APBD dan Perubahan RKPD
Kota Payakumbuh Tahun 2026

KODE REKENING	URAIAN	APBD 2026	P- RKPD 2026	SELISIH	%
1	2	3	4	5=4-3	6
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**101.642.397.029**	**85.136.180.178**	**-16.506.216.851**	-16,24
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**101.642.397.029**	**85.136.180.178**	**-16.506.216.851**	-16,24
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Daerah Tahun Sebelumnya	101.642.397.029	85.136.180.178	-16.506.216.851	-16,24
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0**	**0**	**0**	0,00
6.2.1	Penyertaan Modal	0	0	**0**	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**101.642.397.029**	**85.136.180.178**	**-16.506.216.851**	-16,24
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Daerah Tahun Berkenan		**-400.000.000**	**0**	**0**	0

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2026 (data diolah Bappeda)

Memperhatikan kondisi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah diatas, maka secara lengkap ringkasan APBD Kota Payakumbuh tahun 2026 dan Perubahan RKPD tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel III-13.

Tabel III-13
Ringkasan APBD dan Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2026

KODE REKENING	URAIAN	APBD 2026 AWAL	PERUBAHAN RKPD TA 2026	SELISIH	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6=(5/3)* 100
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**650.299.879.645**	**794.367.729.347**	**144.067.849.702**	22,15
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**164.968.026.298**	**171.401.910.166**	**0**	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	49.022.124.064	49.022.124.064	**0**	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	92.745.411.288	98.659.045.004	**5.913.633.716**	6,38
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.775.525.706	13.775.525.706	**0**	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.424.965.240	9.945.215.392	**520.250.152**	5,52
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**485.331.853.347**	**622.965.819.181**	**137.633.965.834**	28,36

KODE REKENING	URAIAN	APBD 2026 AWAL	PERUBAHAN RKPD TA 2026	SELISIH	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6=(5/3)* 100
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	460.852.510.000	591.216.506.776	**130.363.996.776**	28,29
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.479.343.347	31.749.312.405	**7.269.969.058**	29,70
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0**	**0**	**0**	0,00
4.3.02	Dana Darurat	0	0	**0**	0,00
5.	**BELANJA DAERAH**	**752.342.276.674**	**879.503.909.525**	**127.161.632.851**	**16,90**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**707.509.349.668**	**722.795.883.566**	**15.286.533.898**	**2,16**
5.1.01	Belanja Pegawai	397.281.850.187	390.427.378.099	-6.854.472.088	-1,73
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.543.851.318	314.704.857.304	22.161.005.986	7,58
5.1.05	Belanja Hibah	17.103.248.163	17.083.248.163	-20.000.000	-0,12
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	580.400.000	580.400.000	0	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**42.832.927.006**	**151.708.025.959**	**108.875.098.953**	**254,19**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.170.248.320	4.684.910.816	2.514.662.496	115,87
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.890.533.798	53.449.752.898	39.559.219.100	284,79
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.785.949.300	25.745.037.287	18.959.087.987	279,39
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.884.955.338	65.508.984.708	47.624.029.370	266,28
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.096.240.250	2.314.340.250	218.100.000	10,40
5.2.03	Belanja Modal Aset Lainnya	5.000.000	5.000.000	0	0,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**0**	**0,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**0**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**0,00**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0	3.000.000.000	3.000.000.000	0,00
	Defisit	**-102.042.397.029**	**-85.136.180.178**		

KODE REKENING	URAIAN	APBD 2026 AWAL	PERUBAHAN RKPD TA 2026	SELISIH	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6=(5/3)* 100
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**101.642.397.029**	**85.136.180.178**	**-16.506.216.851**	-16,24
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**101.642.397.029**	**85.136.180.178**	**-16.506.216.851**	-16,24
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Daerah Tahun Sebelumnya	101.642.397.029	85.136.180.178	-16.506.216.851	-16,24
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0**	**0**	**0**	0,00
6.2.1	Penyertaan Modal	0	0	**0**	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**101.642.397.029**	**85.136.180.178**	**-16.506.216.851**	-16,24
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Daerah Tahun Berkenan		**-400.000.000**	**0**	**0**	0

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2026 (data diolah Bappeda)

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

IV.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045 merupakan dasar utama bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh tahun 2025-2029. Tahun 2026 merupakan tahun kedua dari penyelenggaraan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045 ditujukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan dalam RPJPD. Visi pembangunan Kota Payakumbuh, sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2025–2045, adalah "**Payakumbuh Bermartabat, Maju Dan Berkelanjutan Sebagai Perwujudan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".**

Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2025–2045, dirumuskan 8 (delapan) misi pembangunan daerah dengan uraian sebagai berikut :

a. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas dan berdaya saing melalui transformasi sosial, baik dari sisi kesehatan, pendidikan yang memicu kreativitas, handal dan inovatif. Mewujudkan manusia yang unggul, berkualitas dan berdaya saing adalah untuk mencetak SDM yang kreatif, inovatif, handal, agamis dan berakhlak mulia dalam proses pembangunan melalui pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, perbaikan sistem kesehatan, kesetaraan gender, peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dan budaya serta adat istiadat di Kota Payakumbuh.

   Pendidikan memegang peranan yang sangat penting di dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan adalah serangkaian proses belajar yang harus dilalui oleh setiap orang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hasil yang nantinya dicapai adalah terciptanya sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan tuntutan pembangunan. Di mana dirinya memiliki *soft skill dan hard skill* yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lapangan pekerjaan.

   Selain itu Pembangunan bidang kesehatan tidak boleh diabaikan, karena kesehatan merupakan sarana mutlak untuk meningkatkan produktivitas dan merupakan prasyarat utama dalam pembentukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

b. Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah suatu proses perkembangan ekonomi yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan tetapi juga mengakomodasi dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat secara adil serta menjaga keberlanjutan sumber daya dan lingkungan. Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang bertujuan menciptakan masyarakat yang seimbang, adil dan berkelanjutan.

   Selain itu mewujudkan sektor perekonomian yang kompetitif, berdaya saing merupakan unsur penting untuk mendorong kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi di Kota Payakumbuh dapat diwujudkan dengan peningkatan inovasi, ekonomi produktif di sektor perdagangan, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif, menciptakan kondisi persaingan yang sehat dalam dunia usaha, pengembangan kewirausahaan, peningkatan prasarana dan sarana ekonomi. Di samping itu juga perlu mewujudkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.

   Mewujudkan penataan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya lokal yang potensial yang terdapat di kota Payakumbuh seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menumbuhkan usaha ekonomi produktif yang ditujukan untuk meningkatkan diversifikasi produk, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi lokal, pemerataan akses sumber daya ekonomi, integrasi antar usaha, kemitraan antar pelaku ekonomi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Kondisi ini dapat terwujud dengan penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.

Untuk periode yang akan datang 2025-2045, sektor unggulan primer, sekunder maupun tersier dan inovasi dalam produk yang dihasilkan perlu dikembangkan dengan memperkuat daya saing, sehingga menekan angka kemiskinan dan mengurangi permasalahan sosial lainnya di Kota Payakumbuh.

c. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif. Pemerintahan yang adaptif dan inovatif adalah pemerintahan yang responsive terhadap perubahan dan mampu mengimplementasikan inovasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan. Mewujudkan pemerintahan yang adaptif dan inovatif merupakan upaya untuk memastikan bahwa pemerintahan dapat berfungsi secara efektif di dalam lingkungan yang dinamis termasuk upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

   Selain itu tata pemerintahan yang baik dan bersih dapat mendorong proses pembangunan Kota Payakumbuh menjadi kota sentra perdagangan industri, pariwisata dan ekonomi kreatif. Tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih diwujudkan melalui reformasi birokrasi dengan tujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, berintegritas tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu memberikan pelayanan publik yang baik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu bersinergi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

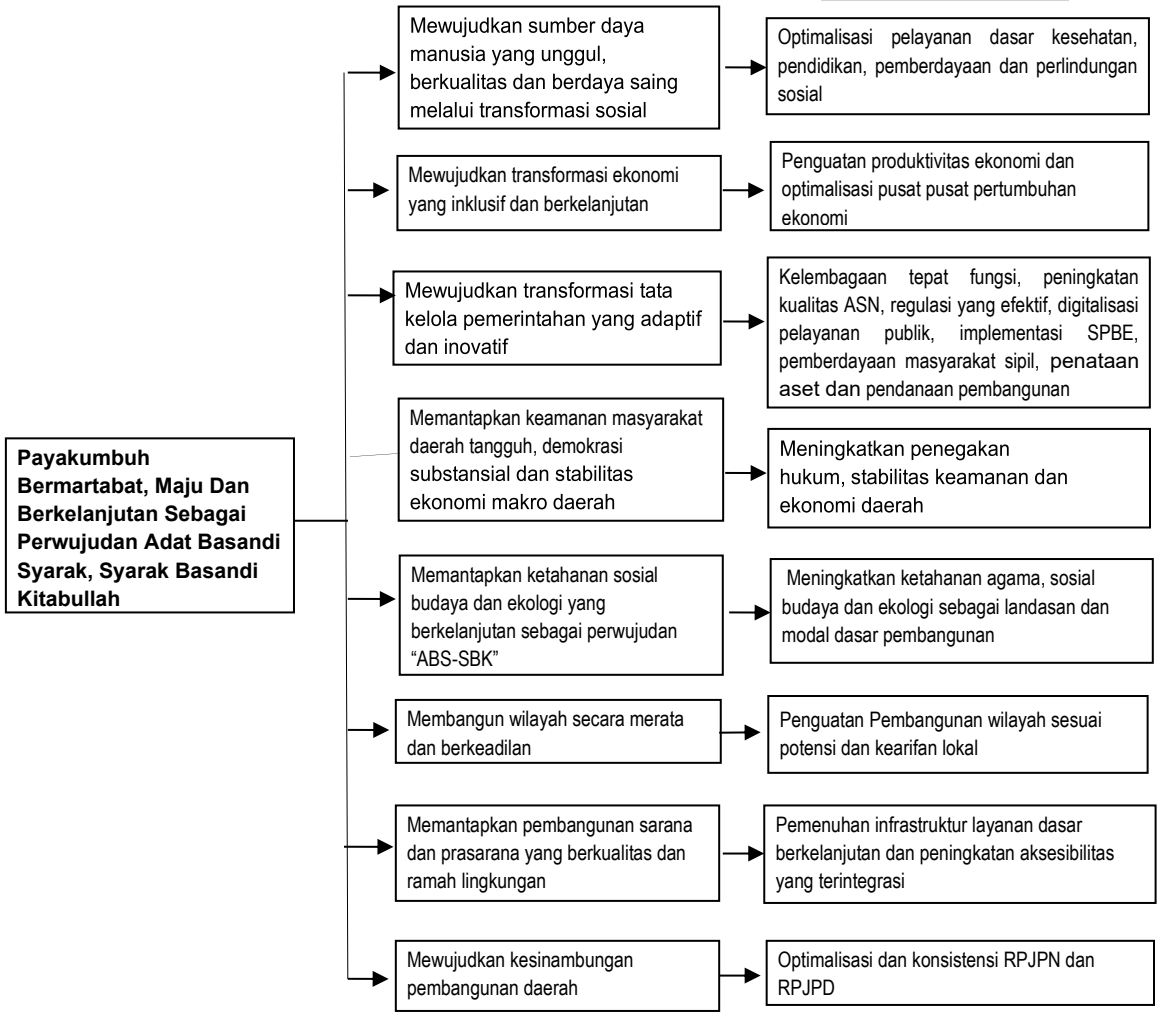
   Beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya reformasi birokrasi, diantaranya politik dan kooptasi birokrasi; penegakan dan kepastian hukum; administrasi dan kelembagaan; budaya birokrasi; serta globalisasi dan transformasi digital, membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi serta penguatan masyarakat sipil.

d. Memantapkan keamanan masyarakat daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotime (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan;

e. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan sebagai perwujudan "ABS-SBK", yang dijadikan sebagai persyaratan utama untuk dapat mewujudkan masyarakat yang agamis dan berbudaya. Landasan filosofis ini sudah dimiliki sejak lama, sehingga kedepan perlu terus dipelihara dan diterapkan dalam tata kehidupan masyarakat. Terlepas dari pendidikan formal, SDM yang handal akan tercipta dari penanaman nilai Adat istiadat yang ada di Kota Payakumbuh "**Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"** sehingga tercipta SDM bukan hanya berkualitas tetapi religius dan berbudaya. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai agama ke dalam kehidupan masyarakat dilakukan melalui peningkatan kesadaran beragama, peningkatan iman dan taqwa bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Payakumbuh. Sejalan dengan itu jumlah dan kualitas sarana peribadatan ditingkatkan seperti masjid, musholla dan tempat pendidikan agama. Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana peribadatan. Fungsi prasarana dan sarana peribadatan tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan ekonomi syariah berbasis masjid. Melestarikan adat istiadat dan budaya dengan memperkuat peran pemangku adat, serta meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana adat dan budaya. Kota Payakumbuh juga berfokus untuk memantapkan ketangguhan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan yang mampu mengoptimalkan modal sosial budaya, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan.

f. Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, dilengkapi dengan transformasi supremasi hukum, stabilitas ekonomi dan kepemimpinan, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Kota Payakumbuh fokus untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan melalui pengembangan kebijakan pembangunan daerah secara umum dan penerjemahan agenda transformasi dan landasan transformasi.
g. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi. Pembangunan yang tidak hanya berfokus pada satu sudut pandang saja, tetapi juga memperhatikan semua aspek dari hulu ke hilir yang terdampak dari pembangunan sarana dan prasarana tersebut, termasuk aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Daya dukung kota yang berwawasan lingkungan harus selalu ditingkatkan sebagai upaya untuk melakukan penguatan terhadap sistem penggunaan fungsi ruang kota dalam menunjang kegiatan perekonomian dan sosial budaya.
h. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah melalui kaidah pelaksanaan yang efektif, manajemen risiko, dan pembiayaan pembangunan yang integratif dan inovatif.

Diagram IV-1
Sistematika Keterkaitan Antara Visi, Misi dan Arah Kebijakan Tahun Pertama Pembangunan Jangka Panjang Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045



Sumber : RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Diagram IV-1 memberikan sistematika dan alur pikir tentang kaitan antara visi, misi dan arah pembangunan tahun pertama jangka panjang dalam RPJPD Kota Payakumbuh 2025-2025.

Dari visi dan misi RPJPD diagram IV-1, selanjutnya dijabarkan dalam arah dan sasaran Pembangunan 5 (lima) tahunan pertama sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV-1
Arah dan Sasaran Pokok Pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 Tahap 1

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Tahap I
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Kesehatan untuk Semua	Usia Harapan Hidup (tahun)	77,53
			Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	25
			Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	12,6
			Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*) (%)	100
			Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*) (%)	96
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	100
`2	Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk: - Literasi membaca - Numerasi	 60,84 48,25
			Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	11,63
			Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,91
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	20,26
			Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	81,98
3	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Tingkat Kemiskinan (%)	3,28 – 3,84
			Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	43,39
			Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	34,17
4	Berkembangnya IPTEK dan inovasi dalam meningkatkan produktivitas ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	5,55
			Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum (%)	3,98
			Jumlah Tamu wisatawan mancanegara (hotel berbintang) (ribu orang)	2,3
			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi (%)	3,963

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Tahap I
			Proporsi jumlah UKM non pertanian (%)	13,636
			Proporsi jumlah IKM (%)	3,82
			Rasio Kewirausahaan (%)	9,78
			Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (%)	2,82
			ROA BUMD (%)	6,22
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,51
			Proporsi penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	61,66
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	65,21
			Indeks Inovasi Daerah	56,05
5	Meningkatnya penerapan ekonomi hijau	Penerapan Ekonomi Hijau	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,43
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (juta rupiah/orang)	36,03
6	Meningkatnya transformasi digital	Transformasi Digital	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	59
7	Menguatnya integrasi ekonomi domestik dan regional	Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional	Ketersediaan Pangan Utama (ton)	19.805
			Stabilisasi Harga Beras, Cabe dan Bawang (%)	0 - 10 0 - 25 0 - 25
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	24
			Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	20
8	Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.	Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Proporsi kontribusi PDRB Kota Payakumbuh terhadap PDRB Provinsi (%)	3,24
			Persentase RT yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau	95,93
9	Terwujudnya regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Indeks Reformasi Hukum	85,55
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,63
			Indeks Pelayanan Publik	4,47
			Survey penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai)	80,00
10	Meningkatnya keadilan hukum, keamanan dan demokrasi yang berkualitas	Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, Dan Demokrasi Substansial	Persentase Penegakan Perda	100
			Angka Kriminalitas (per 1000 penduduk)	3,80
			Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang Aktif	91
11	Meningkatnya	Stabilitas Ekonomi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,4

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Tahap I
	stabilitas ekonomi makro daerah	Makro	(%)	
			Tingkat inflasi	-
			Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)	17,75
			Nilai Transaksi Saham Per Kapita (rupiah)	7.642.640
			Total Kredit/PDRB (%)	31,08
			Rasio PDRB sektor Jasa Keuangan (%)	6,86
12	Meningkatnya kerja sama dan keamanan daerah	Penguatan Kerja Sama dan Keamanan Daerah	Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan	100
			Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	5
13	Meningkatnya Penerapan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah sebagai wujud masyarakat yang religius dan berketahanan budaya	Berkebudayaan maju sebagai perwujudan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah	Karya Budaya yang Ditetapkan	5
			IPK berbasis ABS SBK	75,71
			Persentase Penanganan Konflik Sosial yang Terjadi di Tengah Masyarakat	100
14	Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender, dan inklusivitas masyarakat	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga	64,70
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,26-0,24
			Indeks Perlindungan Khusus Anak	84,33
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Tutupan Lahan	53,1
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,43
			RT dengan Akses Sanitasi Aman (%)	30
			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	34,54
			Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	49,98
16	Meningkatnya ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Konsumsi listrik per kapita (kWh/kapita)	1.885
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	4,42
			Kapasitas Air Baku (m^3/detik)	0,36
			Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	88,75
17	Meningkatnya	Resiliensi terhadap	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	113,88 – 107,57

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target Tahap I
	resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,43

Sumber : RPJPD Kota Payakumbuh 2025-2045

Dari visi RPJPD diatas kemudian diturunkan dan diperkuat di dalam RPJMD 2025-2029 dengan penambahan penekanan pada fokus di pemberdayaan dan pengembangan, kualitas pendidikan dan Sentra UMKM, atas dasar ketiga ide tersebut, maka visi RPJMD 2025-2029 dirangkum dalam susunan kata dan kalimat **"Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, dan Sentra UMKM yang Kompetitif".** Kemudian dapat dijabarkan keterkaitan misi antara RPJPD dan RPJMD sebagai berikut :

Misi 1 jangka *panjang "Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas dan berdaya saing melalui transformasi sosial"* diwujudkan melalui misi 1 jangka menengah *"Mewujudkan SDM yang berkualitas".*
Misi 2 jangka panjang *"Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan"* diwujudkan melalui misi 2 jangka menengah *"Mewujudkan iklim ekonomi yang kompetitif".*
Misi 3 jangka panjang *"Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif"* diwujudkan melalui misi 3 jangka menengah *"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Kondusif".*
Misi 4 jangka panjang *"Memantapkan keamanan masyarakat daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro dan daerah"* diwujudkan melalui misi 3 jangka menengah *"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Kondusif".*
Misi 5 jangka panjang *"Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Berkelanjutan sebagai perwujudan ABS-SBK"* diwujudkan melalui misi 4 jangka menengah *"Mewujudkan nuansa imani melalui pendekatan budaya dan adat".*
Misi 6 jangka panjang *"Membangun Wilayah secara Merata dan Berkeadilan"* diwujudkan melalui misi 2 jangka menengah *"Mewujudkan iklim ekonomi yang kompetitif".*
Misi 7 jangka panjang *"Memantapkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan"* diwujudkan melalui misi 5 jangka menengah *"Mewujudkan sarana perkotaan yang humanis ramah lingkungan dan berkelanjutan".*
Misi 8 jangka panjang *"Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Daerah"* diwujudkan melalui misi 3 jangka menengah *"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Kondusif".*

Gambar IV-1
Keterkaitan Misi RPJMN, RPJMD Provinsi Sumbar dengan RPJMD Kota Payakumbuh



sumber : Bappeda, 2026

Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2026 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daera, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, berpedoman pada RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029. Penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada Visi, Misi, dan program kepala daerah terpilih yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam RPJMD 2025-2029.

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada Bab IV ini sepenuhnya mengacu pada substansi yang disusun pada RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, selanjutnya Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Payakumbuh untuk Tahun 2026 menjadi acuan Perangkat Daerah dalam merumuskan strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta indikator kinerja Perangkat Daerah dalam RKPD Tahun 2026.

Tujuan dan sasaran serta target pembangunan pada RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 periode tahun kedua ini dapat dilihat pada tabel IV-2

Tabel IV-2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
VISI **Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, dan Sentra UMKM Yang Kompetitif**											
MISI-1:											
Mewujudkan SDM yang berkualitas	Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	80,76	81,43	81,97	82,50	83,09	83,72	84,23	IKU
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (tahun)	75,08	75,31	75,57	75,83	76,10	76,36	76,62	IKU/IUP
			Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	16,40	13,70	12,45	11,20	9,95	8,70	7,45	IKU/IUP
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	8,17	5,81	5,45	5,09	4,73	4,01	3,65	IKU/IUP
			Jumlah Kematian Ibu (jiwa) *****	2	2	2	2	2	1	1	IUP
			Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) (%)	70,14	80,00	84,00	88,00	92,00	96,00	100,00	IUP
			Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) (%)	88,90	94,00	94,00	95,00	95,00	96,00	96,00	IUP
		Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,57	14,62	14,75	14,91	15,02	15,16	15,29	IKU/IUP
			Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk: Literasi (%)	87,50	87,50	87,90	88,20	88,80	89,25	89,50	IUP
			Persentase Satuan	84,40	84,40	85,65	86,50	87,75	89,00	90,25	IUP

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk: Numerasi (%)								
			Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10,89	11,16	11,30	11,38	11,48	11,62	11,79	IUP
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	21,65	21,70	21,90	22,00	22,20	22,40	22,50	IUP
			Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	76,17	79,09	79,67	80,85	80,82	81,40	81,98	IUP
		Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	5,19	4,54	4,32	4,17	3,99	3,84	3,63	IKU/IUP
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IUP
			Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	19,96	31,38	33,78	36,18	38,58	40,98	43,39	IUP
			Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan dan/atau dari dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan (orang) ******	3	5	15	25	35	37	40	IUP
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat,	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (indeks)	65,6	66,8	68,0	69,10	70,10	71,10	72,10	IKU/IUP
			Indeks Ketimpangan Gender	0,175	0,151	0,127	0,103	0,079	0,055	0,031	IKU/IUP

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Perempuan, dan Perlindungan Anak	(IKG)								
			Indeks Perlindungan Khusus Anak	81,51	82,92	83,25	83,62	83,85	84,01	84,33	IUP
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	60,51	63,89	64,00	64,20	64,60	64,90	65,21	IUP
MISI-2 Mewujudkan Iklim Ekonomi yang kompetitif	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan inklusif		Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,53	5,02	5,79	7,12	7,36	7,65	6,22	IKU/ Indikator sasaran visi RPJPD
			Indek Daya Saing Daerah (IDSD)	3,89	3,93	3,96	4,00	4,04	4,09	4,14	IKU
			Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap PDRB Provinsi (%)	2,84	2,89	2,97	3,00	3,04	3,07	3,10	IKU
			PDRB Per-kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta)	64,21	72,02	82,14	92,57	103,84	116,29	129,51	IKU/Indikator sasaran visi RPJPD
		Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Rasio Gini (indeks)	0,313	0,311	0,310	0,309	0,308	0,306	0,305	IKU/ indikator sasaran Visi RPJPD
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,87	4,75	4,64	4,52	4,43	4,33	4,26	IKU/IUP
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rp/ tenaga kerja)	70,58	70,80	71,50	72,02	73,3	74,03	75	Indikator sasaran visi RPJPD
			Proporsi penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	53,73	53,81	54,38	55,58	56,78	57,98	61,66	IUP
			Rasio Kewirausahaan (%)	7,52	9,30	9,34	9,38	9,41	9,45	9,78	IUP
		Meningkatnya sektor strategis berbasis	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	33,33	33,34	33,35	33,36	33,37	33,38	33,39	IKU
			Proporsi jumlah UKM non pertanian (%)	1,88	4,69	4,71	4,73	4,75	4,77	13,636	IUP

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		potensi lokal	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (%)	1,59	2,365	2,407	2,449	2,491	2,533	2,820	IUP
			Proporsi jumlah IKM (%)	1,85	3,43	3,51	3,59	3,66	3,74	3,82	IUP
			Ketersediaan Pangan Utama (ton)	19.780	19.785	19.790	19.795	19.800	19.805	19.810	IUP
			Stabilisasi Harga Beras (%)	1.63	≤10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤10	IUP
			Stabilisasi Harga Cabe (%)	20,69	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	IUP
			Stabilisasi Harga Bawang (%)	13,40	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	IUP
			Tingkat Inflasi *	-	-	-	-	-	-	-	IUP
			Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	19,65	19,70	19,75	19,80	19,85	19,90	20,00	IUP
			Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	4,82	4,95	5,06	5,17	5,31	5,43	5,55	IUP
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum (%)	3,49	3,60	3,62	3,64	3,66	3,68	3,98	IUP
			Jumlah Tamu wisatawan mancanegara (ribu orang)	0,01	0,02	0,025	0,03	0,035	0,04	2,30	IUP
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (juta rupiah/orang)	30,97	35,27	35,52	35,68	35,83	35,98	36,03	IUP
			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi (%)	1,938	3,595	3,585	3,575	3,555	3,545	3,963	IUP
			Return Of Asset (ROA) BUMD (%)	6,17	6,18	6,19	6,20	6,20	6,21	6,22	IUP
		Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rp)	658,63	660	665	670	675	680	685	IKU
			Total Dana Pihak Ketiga /	5,98	6,00	6,95	9,65	12,35	15,05	17,75	IUP

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			PDRB (%)								
			Nilai Transaksi Saham Per Kapita (rupiah)	3.800.000	3.891.998	4.562.126	5.332.255	5.332.254,8	6.102.383,2	7.642.640	IUP
			Total Kredit/PDRB (%)	nA	24,40	25,73	27,07	28,40	29,74	31,08	IUP
			Rasio PDRB sektor Jasa Keuangan (%)	6,00	6,05	6,08	6,18	6,41	6,63	6,86	IUP
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	25,48	24,86	24,52	24,19	23,85	23,51	23,18	IUP
MISI-3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan kondusif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi (indeks)	83,28	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	IKU
			Survey penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai)	75,51	78,50	78,88	79,18	79,48	79,78	80,00	IUP
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (indeks)	3,75	3,75	3,84	3,93	4,03	4,12	4,21	IKU/IUP
			Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	-	-	1,5	1,5	2	2	2,5	IKU
			Indeks Pelayanan Publik	4,50	4,51	4,52	4,53	4,54	4,55	4,56	IKU/IUP
			Indeks Kepuasan Masyarakat	88,37	88,60	88,80	88,85	88,90	88,95	89,00	IKU
		Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP	76,01	78,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	IKU
			Opini BPK atas laporan keuangan (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU
			Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah	3,0788	3,4000	3,4150	3,4400	3,4630	3,4824	3,5000	Indikator Sasaran visi
			Indeks Masyarakat Digital Indonesia (indeks)	44,39	52	54	56	57	58	59	IUP

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Indeks Reformasi Hukum (nilai)	87,00	87,20	87,40	87,60	87,80	87,90	88,00	IUP
			Indeks Inovasi Daerah (indeks)	54,62	54,85	55,15	55,25	55,50	55,95	56,05	Indikator Sasaran visi
		Meningkatnya Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	0,165	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	IKU
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,25	0,35	0,37	0,39	0,41	0,43	0,45	IUP
		Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum (%)	28,49	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	IKU/IUP
			Persentase penegakan Perda (%)	100	100	100	100	100	100	100	IUP
			Angka Kriminalitas (per 1000 penduduk)	3,06	3,84	3,83	3,82	3,81	3,80	3,80	IUP
			Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang Aktif (%)	91,78	91,95	92,58	93,21	93,84	94,47	95,10	IUP
			Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan (%)	100	100	100	100	100	100	100	IUP
			Persentase Penanganan Konflik Sosial yang Terjadi di Tengah Masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100	100	IUP
			Indeks Risiko Bencana (IRBI)	104,80	103,52	103,51	102,23	100,95	99,67	98,39	IUP

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
MISI-4: Mewujudkan nuansa imani melalui pendekatan budaya dan adat	Terwujudnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK		IPK berbasis ABS SBK (indeks)	72,09	72,40	73,00	73,80	74,86	75,05	75,71	IKU/IUP
		Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Karya Budaya yang Ditetapkan	2,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,00	IKU
			Cakupan Penguatan idiologi Pancasila dan Karakter kebangsaan (%)	57,65	58,35	58,70	58,90	59,10	59,30	60,00	IKU
MISI-5: Mewujudkan sarana perkotaan yang humanis ramah lingkungan dan berkelanjutan	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (indeks)	58,52	68,37	68,58	68,80	69,01	69,22	69,43	IKU/IUP
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	15,90	19,68	23,54	27,42	30,90	34,79	38,48	IKU/IUP
			Indeks Kualitas Lahan (indeks) ****	27,50	52,73	52,80	52,87	52,94	53,01	53,10	IUP
			RT dengan Akses Sanitasi Aman (%)	19,48	20,48	22,31	24,19	25,08	26,16	30,00	IUP
			Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	nA	33,13	39,68	46,05	52,26	58,37	64,82	IUP
		Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Indeks Infrastruktur	63,19	64,09	64,62	65,76	66,91	67,51	68,13	IKU
			Persentase RT yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau (%)	81,04	82,73	85,37	88,01	90,65	94,93	95,93	IUP

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Konsumsi listrik per kapita (kWh/kapita)	1.138	1.273	1.407	1.513	1.652	1.749	1.885	IUP
			Kapasitas Air Baku (m3/detik)	5,21	5,21	5,46	6,60	6,61	6,62	6,62	IUP
			Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	89,97	90,41	90,61	90,81	91,52	92,23	92,94	IUP

Sumber : RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Catatan:
IUP: Indikator Utama Pembangunan, merupakan indikator yang terdapat dalam RPJPD
IKU: Indikator Kinerja Utama
*Perhitungan inflasi tidak dilakukan untuk Kota Payakumbuh.
** Proyeksi menggunakan formula sesuai RPJPD
**** Indikator Indeks Kualitas Lahan merupakan indikator pengganti indeks tutupan lahan, sesuai dengan formula baru dalam penghitungan IKLH
***** Indikator Jumlah kematian Ibu merupakan indikator pengganti Angka kematian Ibu sesuai surat Kemenkes nomor PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK 2025-2029 dalam RPJMD Renstra-PD 2025-2029
****** "Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan dan/atau dari dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan " merupakan indikator proxy pengganti indikator IUP " Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal" sesuai surat Keputusan Gubernur Sumbar nomor 050-459-2025 tentang Evaluasi Ranperda Kota Payakumbuh tentang RPJMD 2025-2029.

IV.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026

IV.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa RPJMN merupakan penjabaran visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN. Perencanaan Nasional tahun 2026 yang dituangkan dalam RKP tahun 2026 menjadi perencanaan tahun kedua RPJPN, sehingga dalam perencanaan tahun 2026 tersebut harus dipastikan adanya kesinambungan pembangunan nasional dan daerah serta keberlangsungan pelayanan dasar (*baseline planning*) dan dapat menyediakan ruang fleksibilitas untuk mengintegrasikan program prioritas pemerintahan baru.

Di samping itu, RKP 2026 juga menjadi kerangka pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Di mana Tahun 2026 merupakan tahun kedua perjalanan panjang transformasi sosial-ekonomi-tata kelola Bangsa Indonesia dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas RPJPN Tahun 2025-2045 dan menjadi titik tolak tahapan penguatan pondasi transformasi dalam jangka menengah RPJMN Tahun 2025-2029.

Dengan melihat pentingnya dasar-dasar transformasi untuk mencapai Indonesia Emas, hasil evaluasi multidimensi dan infrastruktur dan capaikan kinerja sebelumnya serta perlunya pertumbuhan yang lebih inklusif karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi dipandang tidak serta merta mampu mengatasi tantangan sosial, untuk itu dibutuhkan pembangunan yang menyasar pada pertumbuhan inklusif melalui transformasi sosial dan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut maka tema RKP tahun 2026 adalah **"Kedaulatan Pangan dan Energi, Serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"**. Penekanan Tema RKP Tahun 2026 difokuskan pada:

1. Sumber Daya Manusia Berkualitas, yaitu SDM yang berdaya saing dan produktif yang akan dicapai melalui upaya:
   a. Transformasi sosial melalui (a) penetapan Wajib Belajar 13 Tahun; (b) restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan; (c) penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting; (d) penetapan Penggunaan Registrasi Sosial Ekonomi dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif; (e) peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics berkualitas; (f) pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system;
   b. Ketahanan sosial budaya dan ekologi melalui (g) penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (pendidikan budi pekerti).
2. Infrastruktur Berkualitas, yaitu infrastruktur untuk peningkatan produktivitas yang akan dicapai melalui upaya
   a. Transformasi ekonomi, melalui (a) penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi, (b) penguatan infrastruktur digital, (c) pengembangan infrastruktur transisi energi, (d) Percepatan infrastruktur Ibu Kota Nusantara,
   b. Ketahanan sosial budaya dan ekologi, melalui (e) penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yaitu Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan, yang akan dicapai melalui (a) penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional; (b) pengembangan skema graduasi bantuan sosial; (c) peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya; (d) peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat; (e) peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja; (f) percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan; (g) peningkatan produksi industri pengolahan; (h) dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif; serta (i) penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi.

Gambar IV-2
Agenda Pembangunan RKP Tahun 2026



sumber : Bappenas, 2026

Selanjutnya kebijakan pembangunan nasional tahun 2026 berbasis kewilayahan di titik beratkan pada :

1. Kebijakan Umum, Arah kebijakan umum untuk setiap wilayah berfokus pada:
   a. Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah;
      1) Penuntasan rencana tata ruang;
      2) Optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris;
      3) Pengendalian pemanfaatan ruang;
      4) Penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik;
      5) Penguatan fondasi keuangan daerah; dan
      6) Percepatan reforma agrarian),
   b. Pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan Pembangunan
      1) Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun;
      2) Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat;
      3) Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan;
      4) Menuntaskan pemerataan pelayanan ketenagalistrikan;
      5) Pengembangan konektivitas dasar;
      6) Peningkatan ketahanan sumber daya air berbasis alam;
      7) Memperkuat sarana dan prasarana publik dan hunian berketahanan bencana;
      8) Penuntasan konektivitas digital;
      9) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir menuju ekonomi sirkular; dan
      10) Pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim
2. Kebijakan Kewilayahan.
   a. Pembangunan pedesaan and daerah afirmasi
   b. Pengelolaan pusat pertumbuhan.
      1) Pengelolaan urbanisasi, perkotaan, dan Wilayah Metropolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang didukung dengan konektivitas yang memadai dan kelembagaan yang adaptif;
      2) Pengembangan pusat pertumbuhan baru sesuai dengan potensi keunggulan daerah (industri pengolahan SDA, agropolitan, wisata alam dan budaya) serta penguatan dan optimalisasi pusat pertumbuhan eksisting;
      3) Penuntasan dan pemanfaatan PSN yang bersifat kawasan melalui percepatan pelaksanaan PSN, evaluasi dan penyiapan *carry over* PSN serta penguatan kerjasama pengelolaan PSN.

Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2026 diterjemahkan ke dalam 8 (delapan) Prioritas sebagai berikut :

Prioritas 1	:	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia;
Prioritas 2	:	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong Kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
Prioritas 3	:	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
Prioritas 4	:	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penyandang disabilitas;
Prioritas 5	:	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
Prioritas 6	:	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
Prioritas 7	:	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
Prioritas 8	:	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

IV.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat 2026

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan dampak dari kontraksi ekonomi serta pelambatan pertumbuhan ekonomi Nasional dan Sumatera Barat sejak tahun 2020 hingga 2022, serta upaya yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menggerakan ekonomi yang sehat dan merata dengan disertai dengan sikap kebijakan

dan strategi yang waspada terhadap isu resesi ekonomi yang sebagian besar diakibatkan pada krisis energi dan krisis pangan dan bertumpu pada kemampuan ekonomi di Sumatera Barat dan dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2026, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 yakni:**"Transformasi Sektor Strategis Menuju Sumatera Barat yang Maju dan Berkeadilan Berlandaskan Agama dan Budaya"".**

Pemilihan tema Pembangunan Tahun 2026 merupakan pemilihan terhadap fokus prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2026, dengan tetap tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanat pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 merupakan tahun pertama dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas.
2. Menjadi lumbung pangan nasional dan pusat ekonomi hijau.
3. Penguatan nagari dan desa sebagai motor kemajuan daerah.
4. Pusat perdagangan dan bisnis strategis Indonesia barat.
5. Infrastruktur tanggap bencana dan berkeadilan.
6. Pelestarian budaya berbasis agama dan kearifan lokal.
7. Penguatan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk UMKM.
8. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik efektif

IV.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh 2026

Penetapan prioritas Pembangunan tahun 2026 dilakukan dengan memperhatikan tema RKP Tahun 2026, tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026**,** saran dan masukan pada musrenbang mulai dari tingkat mufakat RW sampai dengan musrenbang tingkat Kota, mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, memperhatikan kebijakan Kota Payakumbuh serta permasalahan dan isu strategis yang ada di Kota Payakumbuh saat ini.

Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh juga mengacu pada misi, tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dan juga diselaraskan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan pada Bab II.

Selanjutnya prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2026 tersebut dapat dijabarkan kedalam 5 (lima) Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2026 yaitu :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing;
2. Peningkatan Perekonomian Yang Berkualitas, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Produk Unggulan Dan Inovasi ;
3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**;**
4. Peningkatan Tata Kehidupan Sosial Dan Budaya Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah.
5. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan, Dan Berkelanjutan.

Keterkaitan prioritas pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2026 dengan kebijakan yang ada di dokumen RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dan RKPD Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

Tabel IV-3
Keselarasan Arah Kebijakan RPJMD Kota Payakumbuh dengan Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2026

Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2026
Pemerataan dan peningkatan akses dan sarana prasarana Pendidikan PAUD, dasar dan menengah.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA, SEHAT, BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING
Penguatan digitalisasi sekolah	
Penyediaan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi	
Peningkatan kualitas kurikulum yang adaptif serta asesmen kompetensi minimum	
Peningkatan Kompetensi guru dan pengembangan guru berkarakter	
Penguatan Pendidikan inklusif yang responsif untuk anak-anak disabilitas atau berkebutuhan khusus	
Meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik	

Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2026
Menyiapkan kebijakan yang mengatur tentang pendidikan sekolah negeri dan swasta	
Meningkatkan kualitas dan perijinan sekolah non formal, sehingga siswa dari sekolah non formal berbasis agama/sekolah tahfiz/home schooling yang belum memiliki izin dari Dinas Pendidikan, tetap mendapatkan fasilitasi pendampingan dan dukungan untuk peningkatan kualitas pendidikannya.	
Mengembangkan masing-masing sekolah dengan keunggulan (mata pelajaran) tertentu	
Meningkatkan pendidikan karakter, sehingga tercipta budaya yang berkarakter dan berakhlak	
Pemberian insentif untuk Guru TPA, guru PAUD dan Guru Non ASN	
Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.	
Pemetaan kebutuhan satuan pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan	
Pengembangan budaya literasi berbasis masyarakat	
Mendorong layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT	
Peningkatan pembibitan atlit dan pembinaan olahraga prestasi	
Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga	
Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	
Pemberian beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu dan/atau bagi yang memiliki berprestasi.	
Peningkatan dan pemerataan kualitas dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	
Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat	
Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan.	
Peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan	
Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.	
Pengoptimalan upaya promotif dan preventif kesehatan melalui kampanye pola hidup bersih dan sehat	
Pengoptimalan Sistem pengawasan obat dan makanan	
Penanggulangan permasalahan gizi mikro dan gizi makro dan penuntasan masalah stunting.	
Pengembangan kemitraan dengan organisasi non-pemerintah dan swasta dalam mendukung kampanye imunisasi.	
Dukungan Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan anak Balita.	
Perluasan cakupan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi masyarakat miskin, kelompok marjinal dan rentan	
Meningkatkan kualitas dan tata kelola data kemiskinan yang komprehensif, valid dan terintegrasi sebagai dasar dalam rancangan program yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan	
Meningkatkan pengentasan kemiskinan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).	
Meningkatkan perlindungan sosial adaptif terintegrasi untuk memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis fakta	
Pemberian fasilitasi bantuan modal usaha dalam peningkatan pendapatan masyarakat miskin	
Percepatan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan graduasi yang terintegrasi	
Pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemiskinan	
Pemberian insentif untuk tenaga relawan sosial	
Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan	

Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2026
Peningkatan sarana dan prasarana penggulangan masalah sosial dan pengembangan sumber daya tenaga kesejahteraan sosial	
Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan	
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	
Mendorong peningkatan kapasitas masyarakat antara lain melalui pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan,	
Penyedian insentif bagi petugas RT, RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Tarunan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.	
Penguatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pendidikan keluarga dan kelompok masyarakat pada aspek sosial, ekonomi serta politik	
Peningkatan sistem perlindungan perempuan dan anak	
Meningkatkan peran keluarga dalam melindungi hak-hak anak.	
Meningkatkan peran serta perempuan dalam ketahanan keluarga	
Meningkatkan peran serta Perempuan dan anak dalam pembangunan	
Fasilitasi pembimbingan, pengembangan dan penguatan penyiapan pengasuhan 1.000 hari pertama kelahiran.	
Pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan.	
Penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat & kesejahteraan keluarga	
Meningkatkan pembangunan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat	
Pemantapan model kebijakan dan implementasi membangun ketahanan keluarga dan lingkungan berbasis kearifan local	
Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar	PENINGKATAN PEREKONOMIAN YANG BERKUALITAS, UNGGUL, BERDAYA SAING BERBASIS PRODUK UNGGULAN DAN INOVASI
Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi bagi masyarakat.	
Menyiapkan program magang, pelatihan industri dan sertifikat keahlian bagi tamatan sekolah kejuruan.	
Memperkuat kerjasama, kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap dan/atau menciptakan lapangan kerja baru	
Mengembangkan kluster industry dan inkubasi bisnis dalam penciptaan pengusaha baru	
Meningkatkan kualitas SDM entrepreneur melalui pemberdayaan, pendampingan serta pendidikan formal dan informal	
Mendorong peningkatan skala usaha mikro melalui penguatan modal Usaha mikro	
Penguatan proses bisnis dan kapasitas layanan Usaha mikro melalui perluasan peran ekosistem digital	
Perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis	
Peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumber daya lokal.	
Peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro.	
Penataan basis data dan penyederhanaan regulasi pemberdayaan usaha mikro, pengembangan kewirausahaan, dan koperasi	
Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar)	
Penguatan kelembagaan Koperasi	
Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi.	
Pemberdayaan ekonomi lokal melalui pembentukan koperasi merah putih	
Meningkatkan upaya pengendalian harga pangan strategis (inflasi daerah).	

Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2026
Revitalisasi dan penataan pasar tradisional, pertokoan Payakumbuh dan Pedagang Kaki Lima	
Penerapan kebijakan perlindungan konsumen dan tertib niaga.	
Mendorong pertumbuhan dan menciptakan iklim yg kondusif serta perluasan pangsa pasar yang potensial.	
Peningkatan kualitas, inovasi dan promosi perdagangan secara berkelanjutan.	
Pemanfaatan peluang terhadap Pembangunan Tol Trans Sumatera: Bukittinggi - Payakumbuh - Bangkinang – Pekanbaru	
Mendorong bertumbuhnya industri dari hulu ke hilir.	
Penguatan kelembagaan sentra-sentra industri	
Meningkatnya industri halal dan standarisasi produk sebagai bagian dari pengembangan ekonomi syariah	
Penguatan infrastruktur pendukung industri.	
Mendorong pengembangan layanan usaha, pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) dan kemudahan akses pembiayaan usaha	
Peningkatan kualitas pendataan dan pengawasan industri	
Inovasi pariwisata berkelanjutan (Sustainability Tourism) berbasis komunitas (Community Based Tourism), budaya dan kearifan lokal	
Peningkatan promosi pariwisata Kota Payakumbuh antara lain melalui pelaksanaan event-event pariwisata, budaya dan olah raga	
Penguatan integrasi Pengembangan Pariwisata Halal dengan industry pariwisata yang adaptif.	
Diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	
Meningkatkan dukungan terhadap pendidikan tinggi dan vokasi menjadi kampus dan sekolah unggulan	
Meningkatkan layanan spesifik/khusus rumah sakit.	
Meningkatkan fungsi pelayanan perdagangan dan jasa di Kota Payakumbuh dengan menata kembali pusat-pusat kegiatan	
Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal	
Meningkatkan kapasitas sebagai kota layak huni dengan peningkatan sarana prasarana perkotaan untuk semua lapisan masyarakat	
Meningkatkan ketersediaan ruang usaha bagi pengusaha informal, mikro dan kecil di Kota Payakumbuh	
Penerapan teknologi untuk peningkatan produksi dan pengolahan hasil pertanian	
Penyediaan bantuan sarana dan prasarana Pertanian untuk petani/kelompok tani	
Penguatan infrastruktur pertanian	
Penyediaan bibit dan varietas unggul	
Menerapkan insentif dan disinsentif untuk implementasi LP2B	
Penguatan lumbung pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian	
Peningkatan kualitas SDM petani	
Meningkatkan kesejahteraan petani antara lain terkait pemasaran hasil pertanian	
Pembinaan dan pengembangan komoditi pertanian (padi, jagung, cabe, bawang, jamur)	
Optimalisasi upaya sirkular ekonomi (pengurangan sampah, produksi dan konsumsi berkelanjutan)	
Meningkatkan pelatihan dan sertifikasi pekerjaan sektor energi terbarukan, pertanian organik, dan usaha/industri ramah lingkungan	
Pemanfaatan transportasi ramah lingkungan	
Penerapan insentif ekonomi hijau melalui green procurement.	

Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2026
Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan akibat kegiatan ekonomi	
Penataan kota yang rendah emisi dan ramah lingkungan	
Peningkatan Data Potensi dan Peluang Investasi	
Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
Peningkatan Upaya Promosi Investasi	
Meningkatkan kualitas layanan PTSP kepada masyarakat dan dunia usaha.	
Penataan regulasi daerah dalam mendukung kemudahan berusaha.	
Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan mitra pembangunan dalam pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.	
Pengoptimalan layanan publik masyarakat	PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH, AKUNTABEL SERTA BERKUALITAS
Peningkatan Kerjasama Daerah	
Optimalisasi pengelolaan arsip daerah	
Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat	
Penguatan aspek pemerintahan digital melalui implementasi SPBE	
Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik	
Meningkatkan penerapan Smartcity	
Penguatan dan penataan fungsi kelembagaan yang mencakup penyusunan dan penyesuaian struktur organisasi pemerintah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas	
Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat	
Regulasi yang efektif mencakup penyusunan peraturan yang jelas dan relevan serta pemantauan yang ketat terhadap kepatuhan peraturan.	
Peningkatan kualitas ASN yang professional dan bebas korupsi.	
Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward dan punishment.	
Peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	
Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.	
Mengoptimalkan pengembangan dan penelitian serta inovasi daerah dalam layanan publik	
Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.	
Optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional	
Optimalisasi pengelolaan asset- aset daerah, terutama aset sekolah, sarana kesehatan, aset pasar, perkantoran dan infrastruktur.	
Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten Lima Puluh Kota, terkait dengan pengelolaan aset	
Peningkatan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	
Peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	
Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD).	
Penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, pembayaran retribusi non tunai, dsb)	
Meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMD	
Peningkatan kualitas layanan BUMD	

Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2026
Kerjasama BUMD dengan pihak lain	
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BUMD	
Pembentukan BUMD potensial	
Peningkatan fasilitas dalam menunjang keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat	
Peningkatan kemampuan personal pelayanan ketertiban dan penanganan situasi darurat	
Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan penegak hukum, masyarakat dan stake holders.	
Meningkatkan pengamalan pancasila, demokrasi dan HAM dalam kehidupan bermasyarakat	
Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	
Penguatan peran serta koordinasi dengan lembaga dan organisasi budaya	
Penguatan mitigasi bencana, yang meliputi sebelum, saat bencana dan pasca bencana.	
Meningkatkan penguatan pendidikan karakter berbasis agama kepada tenaga pendidik dan siswa	PENINGKATAN TATA KEHIDUPAN SOSIAL DAN BUDAYA KEMASAYARAKATAN BERDASARKAN FALSAFAH ADAT BASANDI SYARA' – SYARA' BASANDI KITABULLAH
Pembangunan Mesjid Agung	
Pemberian insentif kepada guru TPA dan Garin masjid	
Pemberian bantuan operasional sarana ibadah di Kota Payakumbuh	
Pengembangan kelurahan madani	
Mendorong munculnya kader ulama pembina umat dari mesjid	
Mengoptimalkan pemberdayaan lembaga adat dalam mendukung kebudayaan	
Pelestarian adat dan budaya dengan pendekatan ABS SBK melalui edukasi dan digitalisasi	
Meningkatnya upaya penggalian dan penyelamatan literasi Sejarah, budaya dan cagar budaya	
Peningkatan dan penguatan peran dan potensi budaya lokal dalam aktivitas sosial dan ekonomi kemasyarakatan melalui pengembangan kegiatankegiatan bernuansa kebudayaan.	
Peningkatan infrastruktur perkotaan	PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN,
Meningkatkan konektivitas antar wilayah	
Ketersediaan prasarana dan sarana perkantoran pemerintahan yang memadai	
Pengembangan moda transportasi umum yang aman dan nyaman serta jalur pejalan kaki dan sepeda (pedestrian)	
Penataan Parkir	
Peningkatan kesesuaian penataan dan pemanfaatan ruang	
Meningkatkan usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup	
Menigkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau	
Meningkatkan akses sanitasi aman	
Pencegahan kawasan kumuh perkotaan	
Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah	
Meningkatkan pemenuhan prasarana, sarana, utilitas umum permukiman	
Meningkatkan akses kepemilikan rumah	
Bantuan sanitasi dan RTLH bagi masyarakat tidak mampu	
Revitalisasi Kawasan kumuh	
Pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkn khususnya masyarakat berpenghasilan rendah	

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh, 2026

Selanjutnya Prioritas Pembangunan kota Payakumbuh diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi, dan Prioritas Pembangunan Nasional yaitu :

Tabel IV-4
Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Prioritas Kota Payakumbuh Tahun 2026

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2026	Keterangan
1.	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas dan berdaya saing	Prioritas 1 dan 4
		Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	Peningkatan Tata Kehidupan Sosial dan Budaya Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah	
2.	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Menjadi lumbung pangan nasional dan pusat ekonomi hijau.	Peningkatan perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Prioritas 2
		Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM		
3.	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Peningkatan perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Prioritas 2, dan 5
		Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana	Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	
4.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas dan berdaya saing	Prioritas 1 dan 4
		Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	Peningkatan Tata Kehidupan Sosial dan Budaya Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah	
5.	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Peningkatan Perekonomian Yang Berkualitas, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Produk Unggulan Dan Inovasi	Prioritas 2
6.	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan	Peningkatan Perekonomian Yang Berkualitas, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Produk Unggulan Dan Inovasi	Prioritas 2 dan 5
			Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	
7.	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Prioritas 3
8.	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta	Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan	Peningkatan Tata Kehidupan Sosial Dan Budaya Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adat	Prioritas 4

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2026	Keterangan
	Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana	Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	
		Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas		

Sumber : Bappeda, 2026 (data diolah)

IV.2.4 Sasaran Pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2026

Sasaran pembangunan Kota Payakumbuh tahun 2026 mempedomani sepenuhnya pada sasaran pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2026. Berdasarkan evaluasi keberhasilan program tahun 2025, dan evaluasi triwulan I tahun 2026 ada beberapa target sasaran pembangunan tahun 2026 yang perlu di revisi pada saat perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2026 karena adanya ketidaksesuaian antara perencanaan awal dengan perkembangan situasi di lapangan. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan program dan kegiatan dengan kondisi riil, kemampuan keuangan, serta memastikan capaian target kinerja tahunan dapat tercapai secara efektif.

Sasaran dan target pembangunan Kota Payakumbuh tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel IV-5
Sasaran Pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2026

No	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026				Keterangan
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Tujuan 1.** Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	81,97	**Tujuan 1.** Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	81,97	
	Sasaran 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	tahun	75,57	**Sasaran 1.** Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	tahun	75,57	
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	%	12,45		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	%	12,45	
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	5,45		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	5,45	
		Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	2		Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	2	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	%	84,00		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	%	88,00	Realisasi kinerja tahun 2025 sudah mencapai 87,00
		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	%	94,00		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	%	94,00	
	Sasaran 2. Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah	tahun	14,75	**Sasaran 2.** Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah	tahun	14,91	Realisasi kinerja tahun 2025 sudah mencapai 14,79
		Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk: Literasi	%	87,90		Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk: Literasi	%	87,90	
		Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen	%	85,65		Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum	%	85,65	

No	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026				Keterangan
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tingkat Nasional untuk: Numerasi				Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk: Numerasi			
		Rata-rata Lama Sekolah	tahun	11,30		Rata-rata Lama Sekolah	tahun	11,30	
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	21,90		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	21,90	
		Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	79,67		Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	79,67	
	Sasaran 3. Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	%	4,32	**Sasaran 3.** Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	%	4,32	
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	100,00		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	100,00	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	33,78		Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	33,78	
		Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan dan/atau dari dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	orang	15		Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan dan/atau dari dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	orang	15	
	Sasaran 4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	68,0	**Sasaran 4.** Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	79,00	Realisasi kinerja tahun 2025 sudah mencapai 78,50

No	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026				Keterangan
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,127		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,127	
		Indeks Perlindungan Khusus Anak	Indeks	83,25		Indeks Perlindungan Khusus Anak	Indeks	83,25	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	64,00		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	64,00	
2	**Tujuan 2.** Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,79	**Tujuan 2.** Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,79	
		Indek Daya Saing Daerah (IDSD)	indeks	3,96		Indek Daya Saing Daerah (IDSD)	indeks	3,96	
		Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap PDRB Provinsi	%	2,97		Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap PDRB Provinsi	%	2,97	
		PDRB Per-kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Rp Juta	82,14		PDRB Per-kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Rp Juta	82,14	
	Sasaran 1. Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Rasio Gini	indeks	0,310	**Sasaran 1.** Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Rasio Gini	indeks	0,270	Realisasi kinerja tahun 2025 sudah mencapai 0,271
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,64		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,64	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rp/tenaga kerja	71,50		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rp/tenaga kerja	71,50	
		Proporsi penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	54,38		Proporsi penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	54,38	
		Rasio Kewirausahaan	%	9,34		Rasio Kewirausahaan	%	9,34	
	Sasaran 2. Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	%	33,35	**Sasaran 2.** Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	%	33,76	Realisasi kinerja tahun 2025 sudah mencapai 33,74
		Proporsi jumlah UKM non	%	4,71		Proporsi jumlah UKM	%	4,71	

No	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026				Keterangan
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pertanian				non pertanian			
		Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	%	2,407		Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	%	2,407	
		Proporsi jumlah IKM	%	3,51		Proporsi jumlah IKM	%	3,51	
		Ketersediaan Pangan Utama (	ton	19.79		Ketersediaan Pangan Utama (	ton	19.79	
		Stabilisasi Harga Beras	%	≤ 10		Stabilisasi Harga Beras	%	≤ 10	
		Stabilisasi Harga Cabe	%	≤ 25		Stabilisasi Harga Cabe	%	≤ 25	
		Stabilisasi Harga Bawang	%	≤ 25		Stabilisasi Harga Bawang	%	≤ 25	
		Tingkat Inflasi	%	-		Tingkat Inflasi	%	-	
		Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	19,75		Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	19,75	
		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	5,06		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	5,06	
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	%	3,62		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	%	3,62	
		Jumlah Tamu wisatawan mancanegara	Ribu orang	0,025		Jumlah Tamu wisatawan mancanegara	Ribu orang	0,025	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Juta rupiah/orang	35,52		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Juta rupiah/orang	35,52	
		Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi	%	3,585		Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi	%	5,71	Realisasi kinerja tahun 2025 sudah mencapai 5,70
		Return Of Asset (ROA) BUMD	%	6,19		Return Of Asset (ROA) BUMD	%	6,19	
	Sasaran 3. Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	Milyar Rp	665	**Sasaran 3.** Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	Milyar Rp	712	Realisasi kinerja tahun 2025 sudah mencapai 709,66

No	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026				Keterangan
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	%	6,95		Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	%	28,45	Realisasi kinerja tahun 2025 sudah mencapai 28,43
		Nilai Transaksi Saham Per Kapita	rupiah	4.562.126		Nilai Transaksi Saham Per Kapita	rupiah	4.562.126	
		Total Kredit/PDRB	%	25,73		Total Kredit/PDRB	%	33,50	Realisasi kinerja tahun 2025 sudah mencapai 33.48
		Rasio PDRB sektor Jasa Keuangan	%	6,08		Rasio PDRB sektor Jasa Keuangan	%	6,17	Realisasi kinerja tahun 2025 sudah mencapai 6,15
		Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	24,52		Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	24,52	
3	**Tujuan 3.** Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	85,00	**Tujuan 3.** Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	85,00	
		Survey penilaian integritas (SPI) KPK	nilai	78,88		Survey penilaian integritas (SPI) KPK	nilai	78,88	
	Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	indeks	3,84	**Sasaran 1.** Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	indeks	3,91	Realisasi kinerja tahun 2025 sudah mencapai 3,89
		Indeks Pemerintahan Digital	indeks	1,5		Indeks Pemerintahan Digital	indeks	1,5	
		Indeks Pelayanan Publik	indeks	4,52		Indeks Pelayanan Publik	indeks	4,52	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	88,80		Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	90,00	Realisasi kinerja tahun 2025 sudah mencapai 89,80
	Sasaran 2. Meningkatnya birokrasi yang bersih	Nilai Evaluasi AKIP	nilai	80,00	**Sasaran 2.** Meningkatnya birokrasi yang bersih	Nilai Evaluasi AKIP	nilai	80,00	
		Opini BPK atas laporan keuangan	opini	WTP		Opini BPK atas laporan keuangan	opini	WTP	

No	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026				Keterangan
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan akuntabel	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah	nilai	3,4150	dan akuntabel	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah	nilai	3,4150	
		Indeks Masyarakat Digital Indonesia	indeks	54		Indeks Masyarakat Digital Indonesia	indeks	54	
		Indeks Reformasi Hukum	nilai	87,40		Indeks Reformasi Hukum	nilai	87,40	
		Indeks Inovasi Daerah	indeks	55,15		Indeks Inovasi Daerah	indeks	55,15	
	Sasaran 3. Meningkatnya Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	%	0,18	**Sasaran 3.** Meningkatnya Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	%	21,37	Realisasi kinerja tahun 2025 sudah mencapai 21,33
		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,37		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,46	Realisasi kinerja tahun 2025 sudah mencapai 0,45
	Sasaran 4. Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	%	5,00	**Sasaran 4.** Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	%	14,80	Realisasi kinerja tahun 2025 sudah mencapai 14,80
		Persentase penegakan Perda	%	100		Persentase penegakan Perda	%	100	
		Angka Kriminalitas	Per 1000 penduduk	3,83		Angka Kriminalitas	Per 1000 penduduk	3,83	
		Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang Aktif	%	92,58		Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang Aktif	%	92,58	
		Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan	%	100		Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan	%	100	
		Persentase Penanganan Konflik Sosial yang Terjadi di Tengah Masyarakat	%	100		Persentase Penanganan Konflik Sosial yang Terjadi di Tengah Masyarakat	%	100	
		Indeks Risiko Bencana (IRBI)	indeks	103,51		Indeks Risiko Bencana (IRBI)	indeks	103,51	

No	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026				Keterangan
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**Tujuan 4.** Terwujudnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	IPK berbasis ABS SBK	indeks	73,00	**Tujuan 4.** Terwujudnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	IPK berbasis ABS SBK	indeks	73,00	
	Sasaran 1. Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Karya Budaya yang Ditetapkan	karya	2,00	**Sasaran 1.** Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Karya Budaya yang Ditetapkan	karya	4,00	Realisasi kinerja tahun 2025 sudah mencapai 4
		Cakupan Penguatan idiologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	%	58,70		Cakupan Penguatan idiologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	%	58,70	
5	**Tujuan 5.** Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	indeks	68,58	**Tujuan 5.** Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	indeks	70,67	Realisasi kinerja tahun 2025 sudah mencapai 70,67
	Sasaran 1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	23,54	**Sasaran 1.** Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	23,54	
		Indeks Kualitas Lahan	indeks	52,80		Indeks Kualitas Lahan	indeks	53,09	Realisasi kinerja tahun 2025 sudah mencapai 53,08
		RT dengan Akses Sanitasi Aman	%	22,31		RT dengan Akses Sanitasi Aman	%	22,31	
		Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	39,68		Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	90,00	Realisasi kinerja tahun 2025 sudah mencapai 90,00
	Sasaran 2. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Indeks Infrastruktur	indeks	64,62	**Sasaran 2.** Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Indeks Infrastruktur	indeks	64,62	
		Persentase RT yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau	%	85,37		Persentase RT yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau	%	85,37	
		Konsumsi listrik per kapita	Kwh/kapita	1.407		Konsumsi listrik per kapita	Kwh/kapita	1.407	

No	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026				Keterangan
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kapasitas Air Baku	M3/detik	5,46		Kapasitas Air Baku	M3/detik	6,67	Realisasi kinerja tahun 2025 sudah mencapai 6,66
		Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	%	90,61		Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	%	90,61	

Sumber : RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, Data Diolah 2026

Kota Payakumbuh tahun 2026, berada pada tahap II pembangunan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 yaitu tahap pengembangan ekonomi masyarakat dan pembangunan sosial melalui :

a. Keberlanjutan pembangunan sumber daya pendidikan, Kesehatan dan peningkatan keterampilan kerja bagi Masyarakat;
b. Melanjutkan pembangunan infrastruktur daerah yang diharapkan telah berdampak nyata terhadap perkembangan ekonomi masyarakat khususnya sektor UMKM;
c. Pemantapan kinerja layanan birokrasi dan layanan publik sudah pada tahap pemenuhan SDM berkualitas dengan cakupan sistem layanan berbasis elektronik hingga tingkat Kelurahan;
d. Upaya penanggulangan kemiskinan melalui sinergitas program diharapkan telah berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

Selain itu, dalam program prioritas Kota Payakumbuh terdapat fokus utama pembangunan yang mendukung agenda prioritas utama nasional tahun 2026 yaitu:

a. Swasembada pangan, khususnya beras dan jagung untuk menjamin stabilitas harga dan kesejahteraan petani dan nelayan;
b. Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk generasi unggul;
c. Pendidikan bermutu untuk SDM berdaya saing global peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, dan kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja;
d. Kesehatan berkualitas yang adil dan merata.

   Untuk memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional, merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penurunan stunting, memberikan bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan tuberkulosis, Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta meningkatkan fasilitas kesehatan;
e. Penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih (KMDP), untuk mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, pupuk, dan layanan keuangan di pedesaan. Pemerintah telah menyiapkan pendanaan murah melalui Bank Himbara agar KMDP dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga rendah
f. Percepatan investasi dan perdagangan global. Program 3 juta rumah rakyat terus didorong melalui berbagai skema antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, dukungan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di desa, kota, dan pesisir, serta dukungan PPN DTP untuk rumah komersil dalam mendukung pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau.

Program prioritas RKPD Tahun 2026 yang Mendukung Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh dan Keterkaitan Indikator Sasaran dengan Indikator Program dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV-6
Program Prioritas RKPD Tahun 2026 yang Mendukung Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh dan Keterkaitan Indikator Sasaran dengan Indikator Program

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas 1 : Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas dan berdaya saing											
1	Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan	1 Harapan Lama Sekolah	14,91 tahun	1 Meningkatkan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, merata dan berkeadilan	1 Pemerataan dan peningkatan akses dan sarana prasarana Pendidikan PAUD, dasar dan menengah (Pembangunan PAUD di setiap kelurahan)	1 Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama; Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100; 100 75,55 98,30 % % %	33.963.140.700,00	41.740.587.895,00	Dinas Pendidikan
		2 Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk: Literasi membaca	87,90%								
		3 Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk: Numerasi	85,65%								
		4 Rata-rata Lama Sekolah	11,30 tahun								
		5 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	21,90%		2 Penguatan digitalisasi sekolah	2 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik Indeks pemerataan guru	62,00 82,00 % %	98.584.650,00	131.088.050,00	Dinas Pendidikan
		6 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	79,67%		3 Penyediaan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatanrendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi (Beasiswa utk anak						

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					masyarakat miskin dan anak berprestasi)						
					4 Peningkatan kualitas kurikulum yang adaptif serta asesmen kompetensi minimum(Menunjang mulok, Pendidikan karakter dan inovasi)						
					5 Peningkatan Kompetensi guru dan pengembangan guru berkarakter (Pelatihan dan kunjungan ke daerah yang lebih maju)						
					6 Penguatan Pendidikan inklusif yang responsif untuk anak-anak disabilitas atau berkebutuhan khusus						
					7 Meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik						
					8 Menyiapkan kebijakan yang mengatur tentang pendidikan sekolah negeri dan swasta						
					9 Meningkatkan kualitas dan perijinan sekolah non formal, sehingga siswa dari sekolah non formal berbasis agama/sekolah tahfiz/*home schooling* yang belum memiliki izin dari Dinas Pendidikan, tetap mendapatkan						

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					fasilitasi pendampingan dan dukungan untuk peningkatan kualitas pendidikannya.						
					10 Mengembangkan masing-masing sekolah dengan keunggulan (mata pelajaran) tertentu						
					11 Meningkatkan pendidikan karakter, sehingga tercipta budaya yang berkarakter dan berakhlak						
					12 Pemberian insentif untuk Guru TPA, guru PAUD dan Guru Non ASN						
					13 Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.						
					14 Pemetaan kebutuhan satuan pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan						
				2 Meningkatkan literasi dan budaya baca masyarakat	1 Pengembangan budaya literasi berbasis masyarakat	1 Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	66,30 Nilai	604.678.000,00	604.678.000,00	Dinas Pustaka Arsip
					2 Mendorong layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT	2 Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki	2,05 %	22.599.300,00	22.599.300,00	Dinas Pustaka Arsip
				3 Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Olah Raga	1 Peningkatan pembibitan atlit dan pembinaan olahraga prestasi	1 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas Peningkatan prestasi olahraga (tingkat daerah	15 55 % medali	2.501.743.220,00	3.829.103.290,00	Dinas Parpora
					2 Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga	2 Program Pengembangan Kapasitas Daya	Rasio Wirausaha Pemuda	65 %	47.247.450,00	47.247.450,00	Dinas Parpora

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					3 Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	Saing Kepemudaan					
				4 Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	1 Pemberian beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu dan/atau bagi yang memiliki berprestasi	1 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD indeks reformasi hukum	3,4150 87,60 Nilai Indeks	4.039.763.500,00	4.077.457.400,00	Setdako
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1 Usia Harapan Hidup	75,57 tahun	1 Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat	1 Peningkatan dan pemerataan kualitas dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan (Pemenuhan sarpras puskesmas)	1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting berdasarkan E PPGBM Jumlah Kematian Ibu	2.08 2 Persentase Orang	33.900.923.392,00	48.121.931.892,00	Dinas Kesehatan
		2 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	12,45%		2 Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat						
		3 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	5,45%		3 Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan (Sekolahkan dokter umum yang ada menjadi spesialis dan tenaga kesehatan lainnya)	2 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Diberdayakan	100 %	1.836.127.800,00	1.836.127.800,00	Dinas Kesehatan
		4 Jumlah Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	2		4 Peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan	3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	35 %	843.784.250,00	843.784.250,00	Dinas Kesehatan
		5 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	88,00%		5 Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.	4 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sedian Farmasi,Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	94 %	330.580.800,00	330.580.800,00	Dinas Kesehatan
		6 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment	94,00%		6 Pengoptimalan upaya promotif dan preventif kesehatan melalui kampanye pola hidup bersih	5 Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Persentase	13.00 43,60 % %	427.242.000,00	427.242.000,00	DP3AP2KB

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
		Success Rate)			dan sehat		pemakaian kontrasepsi Modren (Modren Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)				
					7 Pengoptimalan Sistem pengawasan obat dan makanan						
					8 Penanggulangan permasalahan gizi mikro dan gizi makro dan penuntasan masalah stunting.	6 Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (AgrSpesific Fertility Rate / ASFR 15-19 Indeks Pembangunan berwawasan Kependudukan (IPBK)	5,5 85,0 Angka indeks	51.000.000,00	51.000.000,00	DP3AP2KB
					9 Pengembangan kemitraan dengan organisasi non-pemerintah dan swasta dalam mendukung kampanye imunisasi.						
					10 Dukungan Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan anak Balita.	7 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	87.9 Nilai	233.286.025,00	626.564.475,00	Dinas Ketahanan Pangan
					11 Pemenuhan konsumsi pangan masyarakat						
3	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	1 Tingkat Kemiskinan	4,32%	1 Meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial masyarakat	1 Perluasan cakupan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi masyarakat miskin, kelompok marjinal dan rentan	1 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	90 %	316.692.050,00	321.174.100,00	Dinas Sosial
		2 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	100%		2 Meningkatkan kualitas dan tata kelola data kemiskinan yang komprehensif, valid dan terintegrasi sebagai dasar dalam rancangan program yang lebih						

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					efektif dalam mengurangi kemiskinan						
		3 Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	33,78%	2 Meningkatkan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan terintegrasi	1 Meningkatkan pengentasan kemiskinan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).						
		4 Jumlah penyandang disbalitas yang mendapatkan fasilitas dari unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan	15 orang		2 Meningkatkan perlindungan sosial adaptif terintegrasi untuk memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis fakta	1 Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	100 %	210.793.575,00	210.793.200,00	Dinas Sosial
					3 Pemberian fasilitasi bantuan modal usaha dalam peningkatan pendapatan masyarakat miskin	2 Program Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi (%)	100 %	494.672.450,00	491.251.200,00	Dinas Sosial
					4 Percepatan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan graduasi yang terintegrasi						
					5 Pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemiskinan						
					6 Pemberian insentif untuk tenaga relawan sosial						
					7 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan						
					8 Peningkatan sarana dan prasarana penggulangan masalah sosial dan pengembangan						

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					sumber daya tenaga kesejahteraan sosial						
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak	1 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	79,00	1 Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat	1 Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Pembentukan dan penataan kelembagaan LKK, dan Penyusunan pedoman pengelolaan administrasi tata kelola kelembagaan)	1 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM	100 91 % Indeks	3.479.918.823,00	3.650.910.253,00	Seluruh kecamatan
		2 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,127		2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan (Meningkatkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat)						
		3 Indeks Perlindungan Khusus Anak	83,25		3 Mendorong peningkatan kapasitas masyarakat antara lain melalui pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan,	2 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	87.9 Nilai	233.286.025,00	626.564.475,00	Dinas Ketahanan Pangan
		4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	64,00%		3 Penguatan dukungan anggaran operasional dan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK: RT, RW, LPM, Karang Taruna, PKK, Posyandu)	3 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Nilai LPPD indeks reformasi hukum	3,4150 87,60 Nilai Indeks	4.039.763.500,00	4.077.457.400,00	Setdako

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					4 Penyediaan insentif bagi petugas RT, RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya.						
					5 Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan dengan LKK dalam mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam pembangunan						
					6 Penguatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pendidikan keluarga dan kelompok masyarakat pada aspek sosial, ekonomi serta politik						
				2 Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	1 Peningkatan sistem perlindungan perempuan dan anak	1 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran renponsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	4.09 60.71 %	66.141.150,00	66.141.150,00	DP3AP2KB
					2 Meningkatkan peran keluarga dalam melindungi hak-hak anak.			%			
					3 Meningkatkan peran serta perempuan dalam ketahanan keluarga	2 Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	0.0250 100 %	254.889.000,00	254.889.000,00	DP3AP2KB
					4 Meningkatkan peran serta Perempuan dan anak dalam pembangunan			%			

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
						3 Program Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak Jumlah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	61,51 9 Indeks Jumlah	6.517.700,00	6.517.700,00	DP3AP2KB
						4 Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprensif Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	100 85.67 % Indeks	326.095.600,00	326.095.600,00	DP3AP2KB
				1 Meningkatkan Pengendalian penduduk Ketahanan Keluarga	1 Fasilitasi pembimbingan, pengembangan dan penguatan penyiapan pengasuhan 1.000 hari pertama kelahiran.	1 Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Persentase pemakaian kontrasepsi Modren (Modren Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	13.00 43,60 % %	427.242.000,00	427.242.000,00	DP3AP2KB
					2 Pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan						
					3 Penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat & kesejahteraan keluarga	2 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	87.9 Nilai	233.286.025,00	626.564.475,00	Dinas Ketahanan Pangan
					4 Meningkatkan pembangunan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat	3 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	11 %	40.112.900,00	109.538.650,00	Dinas Ketahanan Pangan
					5 Pemantapan model kebijakan dan implementasi membangun ketahanan keluarga dan lingkungan berbasis kearifan						

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					local						
Prioritas 2 : Peningkatan Perekonomian Yang Berkualitas, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Produk Unggulan Dan Inovasi											
5	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	1 Rasio Gini	0,270	1 Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	1 Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar	1 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	47,92 %	255.299.765,00	255.299.765,00	Dinas Nakerin
					2 Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi bagi masyarakat	2 Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan di Dalam Negeri	16,73 %	93.109.550,00	89.971.600,00	Dinas Nakerin
		2 Tingkat Pengangguran Terbuka	4,64 %		3 Menyiapkan program magang, pelatihan industri dan sertifikat keahlian bagi tamatan sekolah kejuruan						
		3 Proporsi penciptaan Lapangan Kerja Formal	54,38%	2 Meningkatkan kesempatan kerja	1 Memperkuat kerjasama, kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap dan/atau menciptakan lapangan kerja baru	1 Program Hubungan Industrial	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	1444 Orang	689.941.450,00	686.491.450,00	Dinas Nakerin
		4 Rasio Kewirausahaan	9,34%		2 Mengembangkan kluster industry dan inkubasi bisnis dalam penciptaan pengusaha baru						
		5 Tingkat produktivitas	71,50		3 Meningkatkan kualitas SDM						

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
		tenaga kerja			*entrepreneur* melalui pemberdayaan, pendampingan serta pendidikan formal dan informal						
6	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	1 Kontribusi UMKM terhadap PDRB	33,76%	3 Meningkatkan kualitas Usaha mikro dan koperasi	1 Mendorong peningkatan skala usaha mikro melalui penguatan modal Usaha mikro	1 Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM menjalin Kemitraan dan Ekspor	1.99 %	99.347.000,00	246.262.658,00	Dinas Koperasi & UKM
		2 Proporsi jumlah UKM non pertanian	4,71%		2 Penguatan proses bisnis dan kapasitas layanan Usaha mikro melalui perluasan peran ekosistem digital	2 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	40.56 %	19.999.150,00	19.999.150,00	Dinas Koperasi dan UKM
		3 Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	2,407%		3 Perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis	3 Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	60,53 %	14.999.250,00	14.999.250,00	Dinas Koperasi dan UKM
		3. Proporsi jumlah IKM	3,51%		4 Penataan basis data dan penyederhanaan regulasi pemberdayaan usaha mikro, pengembangan kewirausahaan, dan koperasi						
		5 Ketersediaan Pangan Utama (ton)	19.790		5 Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar (baik dalam pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha,						

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					pengembangan kapasitas kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)						
		6 Stabilisasi Harga Beras (%)	≤ 10		6 Penguatan kelembagaan koperasi (Pengawasan, pembinaan koperasi)						
		7 Stabilisasi Harga Cabe (%)	≤ 25		7 Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi (mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, pendampingan kelompok untuk berkoperasi, pengembangan jangkauan dan cakupan usaha koperasi, serta pengembangan inovasi koperasi)						
		8 Stabilisasi Harga Bawang (%)	≤ 25		8 Pemberdayaan ekonomi lokal melalui pembentukan koperasi merah putih						
		9 Tingkat Inflasi (Indeks Perkembangan Harga)**	-		9 Peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro.						
		10 Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	19,75	4 Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan	1 Meningkatkan upaya pengendalian harga pangan strategis (inflasi daerah, terkait upaya pengendalian inflasi/ stabilitas	1 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	19,23 %	267.012.890,00	665.247.470,00	Dinas Koperasi UKM

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					harga.).						
		11 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	7,88		2 Revitalisasi dan penataan pasar tradisional, pertokoan Payakumbuh dan Pedagang Kaki Lima	2 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan Kualitasnya	90 %	5.196.691.080,00	9.385.325.814,00	Dinas Koperasi UKM
		12 Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum (%)	3,62		3 Penerapan kebijakan perlindungan konsumen dan tertib niaga.	3 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100 %	66.799.156,00	66.799.156,00	Dinas Koperasi UKM
		13 Jumlah Tamu wisatawan mancanegara (hotel berbintang) (ribu orang)	0,025		4 Mendorong pertumbuhan dan menciptakan iklim yg kondusif serta perluasan pangsa pasar yang potensial.	4 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan	80 %	201.696.430,00	207.872.740,00	Dinas Koperasi UKM
		14 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (juta rupiah/orang)	35,52		5 Peningkatan kualitas, inovasi dan promosi perdagangan secara berkelanjutan.						
		15 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi (%)	5,71		6 Pemanfaatan peluang terhadap Pembangunan Tol Trans Sumatera: Bukittinggi - Payakumbuh - Bangkinang – Pekanbaru						
		16 ROA BUMD (%)	6,19	5 Meningkatkan pertumbuhan sektor industri	1 Mendorong bertumbuhnya industri dari hulu ke hilir.	1 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	26.00 %	632.019.638,00	545.906.238,00	Dinas Nakerin
				6 Menumbuh kembangkan	2 Penguatan kelembagaan sentra-sentra industri	2 Program Pengelolaan Sistem Informasi	Jumlah data perusahaan IKM yang masuk ke dalam SIINAS	1 61,67 75 perusah	6.776.400,00	6.776.400,00	Dinas Nakerin

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
				pariwisata dan ekonomi kreatif		Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase) Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	aan Nilai %			
					3 Meningkatnya industri halal dan standarisasi produk sebagai bagian dari pengembangan ekonomi syariah	3 Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	100 %	52.342.225,00	52.342.225,00	Dinas Nakerin
					4 Penguatan infrastruktur pendukung industri.						
					5 Mendorong pengembangan layanan usaha, pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) dan kemudahan akses pembiayaan usaha						
					6 Peningkatan kualitas pendataan dan pengawasan industri						
					7 Mendorong tumbuhnya industri manufaktur						
					1 Inovasi pariwisata berkelanjutan (Sustainability Tourism) berbasis komunitas (Community Based Tourism), budaya dan kearifan lokal	1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	50 %	489.939.440,00	501.011.320,00	Dinas Parpora

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					2 Peningkatan promosi pariwisata Kota Payakumbuh antara lain melalui pelaksanaan event-event pariwisata, budaya dan olah raga	2 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	30 %	167.263.300,00	171.359.200,00	Dinas Parpora
					3 Penguatan integrasi Pengembangan Pariwisata Halal dengan industry pariwisata yang adaptif.						
					4 Diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara						
					5 Pengembangan Ekonomi Kreatif dan UMKM dengan Mendorong tumbuhnya sektor ekonomi kreatif dan UMKM melalui penyediaan akses pelatihan, pembiayaan, serta pemasaran produk produk lokal, terutama yang dapat diekspor ke negara negara Global South serta memberikan insentif bagi pelaku usaha yang berinovasi dalam produk						

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					dan						
				7 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor jasa Pendidikan dan Kesehatan	1 Meningkatkan dukungan terhadap pendidikan tinggi dan vokasi menjadi kampus dan sekolah unggulan	1 Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama; Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100; 100 75,55 98,30 % % %	33.963.140.700,00	41.740.587.895,00	Dinas Pendidikan
					2 Meningkatkan layanan spesifik/khusus rumah sakit.	2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting berdasarkan E PPGBM Jumlah Kematian Ibu	2.08 2 Persentase Orang	33.900.923.392,00	48.121.931.892,00	Dinas Kesehatan
				8 Mengoptimalkan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi	1 Meningkatkan fungsi pelayanan perdagangan dan jasa di Kota Payakumbuh dengan menata kembali pusat-pusat kegiatan ekonomi	1 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan Kualitasnya	90 %	5.196.691.080,00	9.385.325.814,00	Dinas Koperasi & UKM
					2 Meningkatkan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri	2 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	26.00 %	632.019.638,00	545.906.238,00	Dinas Nakerin

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					yang memadai (Baik oleh pemerintah maupun swasta)						
					3 Meningkatkan ketersediaan ruang usaha bagi pengusaha informal, mikro dan kecil di Kota Payakumbuh	3 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	74,65 %	415.243.988,00	415.243.988,00	Dinas PUPR
						4 Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM menjalin Kemitraan dan Ekspor	1.99 %	99.347.000,00	246.262.658,00	Dinas Koperasi & UKM
				9 Meningkatkan produksi, nilai tambah dan daya saing pertanian, peternakan, perikanan dan Ketahanan Pangan	1 Penerapan teknologi untuk peningkatan produtivitas hasil pertanian, peternakan dan perikanan.	1 Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Luas Tanam Yang Menerapkan Teknologi Pertanian Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	50 90 % Persentase	314.315.650,00	269.798.000,00	Dinas Pertanian
					2 Penyediaan bantuan sarana dan prasarana Pertanian, peternakan dan perikanan (Termasuk pemberian subsidi sarana pertanian untuk menekan biaya produksi, serta Penyediaan bibit dan benih varietas unggul)						
					3 Penguatan infrastruktur pertanian, peternakan dan perikanan	2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Peningkatan Produksi Hortikultura Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana peternakan	0,73 2 5.61 90 % % % %	906.584.637,00	2.373.705.491,00	Dinas Pertanian
					4 Meningkatkan pengawasan penerapan LP2B dengan penerapan insentif dan disinsentif penggunaan lahan						

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					5 Fasilitasi pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani						
					6 Peningkatan kualitas SDM petani, peternak dan pembudidaya ikan	3 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis	1 9 90 Persentase % %	719.711.930,00	719.649.700,00	Dinas Pertanian
					7 Pembinaan dan pengembangan komoditi pertanian (padi, jagung, cabe, bawang, jamur, florikultura, dll)	4 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase kelompok pembudidaya yang menerapkan tekhnologi anjuran Jumlah total produksi perikanan	50 560 % ton	592.976.834,00	1.642.334.779,00	Dinas Pertanian
					8 Penguatan lumbung pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian						

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					9 Meningkatkan ketersediaan pangan	5 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Prasarana Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Ditetapkan Menjadi LP2B (JUT) Persentase Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) dalam kondisi baik Persentase Pemenuhan Prasarana Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Ditetapkan Menjadi LP2B (RJIT)	49,84 60 66,54 % % %	673.617.150,00	673.617.150,00	Dinas Pertanian
				10 Meningkatkan Penerapan ekonomi hijau dalam pembangunan	1 Optimalisasi upaya sirkular ekonomi (pengelolaan sampah, produksi dan konsumsi berkelanjutan)	1 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota (%)	76 %	14.848.750,00	14.848.750,00	Dinas Lingkungan Hidup
					2 Meningkatkan pelatihan dan sertifikasi pekerjaan sektor energi terbarukan, pertanian organik, dan usaha/industri ramah lingkungan	2 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH (Persentase)	14,91 %	1.963.936.796,00	2.565.132.916,00	Dinas Lingkungan Hidup
					3 Pemanfaatan transportasi ramah lingkungan	3 Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan jasa	91,74 Indeks	273.963.850,00	288.963.650,00	Setdako
					4 Penerapan insentif ekonomi hijau melalui						

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					green procurement.						
					5 Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan akibat kegiatan ekonomi						
					6 Penataan kota yang rendah emisi dan ramah lingkungan						
					7 Mengoptimalkan potensi kredit karbon dan pengelolaan sampah dengan prinsip zero waste untuk menghasilkan pendapatan baru dan mengurangi biaya operasional daerah dalam pengelolaan lingkungan						
					8 Menerapkan kebijakan ramah lingkungan di setiap proyek pembangunan dan memprioritaskan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam						
7	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	1 Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rp)	712	1 Meningkatkan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi	1 Peningkatan Data Potensi dan Peluang Investasi	1 Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100 Persentase	87.203.750,00	87.203.750,00	DPMPTSP
		2 Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)	28,45		2 Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	2 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD indeks reformasi hukum	3,4150 87,60 Nilai Indeks	15.117.350,00	15.117.350,00	Setdako
		3 Nilai Transaksi Saham Per Kapita (rupiah)	4.562.126		3 Peningkatan Upaya Promosi Investasi						

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
		4 Total Kredit/PDRB (%)	33,50		4 Meningkatkan kualitas layanan PTSP kepada masyarakat dan dunia usaha.						
		5 Rasio PDRB sektor Jasa Keuangan (%)	6,17		5 Penataan regulasi daerah dalam mendukung kemudahan berusaha.						
		6 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	24,52		6 Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan mitra pembangunan dalam pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.						
Prioritas 3 : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas;											
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE/ Pemdi)	3,91	1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1 Pengoptimalan layanan publik masyarakat	1 Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100 Persentase	87.203.750,00	87.203.750,00	DPMDPTSP
		2 Indeks Pelayanan Publik	4,52			2 Program Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan; Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan; Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan; Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100; 100; 100; 100 %; %; %; %	171.562.790,00	180.318.030,00	Disdukcapil
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	90,00								
		4 Indeks Pemerintahan Digital	1,5			3 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3 Level	645.078.300,00	665.625.800,00	Inspektorat

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					2 Peningkatan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah pengawasan	4 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	persentase ranperda yang ditetapkan	100 %	16.709.732.625,00	16.703.440.625,00	Sekwan
					3 Peningkatan fasilitasi dan koordinasi kerjasama daerah	5 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Hukum)	Nilai LPPD indeks reformasi hukum	3,4150 87,60 Nilai Indeks	48.266.750,00	62.048.150,00	Setdako
					4 Optimalisasi pengelolaan arsip daerah	6 Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip	70,30 %	205.658.260,00	205.658.710,00	Dinas Pustaka Arsip
				2 Mengembangkan pemerintahan berbasis digital	1 Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat	1 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	78 %	1.150.757.096,00	1.941.684.100,00	Dinas Kominfo
					2 Penguatan aspek pemerintahan digital melalui implementasi SPBE	2 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.84 Indeks	3.273.259.800,00	3.915.971.400,00	Dinas Kominfo
					3 Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik						
					4 Meningkatkan penerapan Smartcity						
					5 Peningkatan dan pengembangan Infrastruktur Digital untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efisien, termasuk penerapan sistem berbasis cloud untuk administrasi pemerintahan dan						

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					sistem pembayaran pajak online yang lebih luas dan mudah diakses oleh masyarakat.						
9	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Nilai Evaluasi AKIP	80,00	1 Mewujudkan kelembagaan yang tepat fungsi	1 Penataan organisasi dan kelembagaan yang tepat fungsi dan adaptif	1 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, 2. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, 3. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100.100.10 0 %,%,%	515.547.275,00	527.322.725,00	Bappeda
		2 Opini BPK atas laporan keuangan	WTP		2 Penguatan kelembagaan berbasis kinerja						
		3 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah	3,4150		3 Penguatan fungsi koordinasi dan sinergi antar lembaga						
		4 Indeks Masyarakat Digital Indonesia	54			2 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD, Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100 100, 100 % %, %	382.679.325,00	355.322.425,00	Bappeda
		5 Indeks Reformasi Hukum	87,40								
		6 Indeks Inovasi Daerah	55,15			3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi)	Nilai IKM	89,80 Indeks	105.075.450,00	105.075.450,00	Setdako
				2 Mewujudkan SDM Aparatur yang berkualitas	1 Peningkatan kualitas ASN yang professional dan bebas korupsi.	1 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	12 Persentase	608.670.550,00	608.670.550,00	BKPSDM

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					2 Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward dan punishment.	2 Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	12 Persentase	1.068.605.200,00	854.227.200,00	BKPSDM
					3 Peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.						
					4 Optimalisasi pemenuhan sumber daya aparatur berbasis kebutuhan						
10	Meningkatnya Pendapatan Daerah	1 Rasio PAD terhadap APBD	21,37	1 Meningkatkan transparansi dalam perencanaan, pengelolaan keuangaan dan aset daerah	1 Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah	1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penurunan SILPA Persentase Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah diluar Tunjangan Guru Opini BPK atas Laporan Keuangan	11 51.54 WTP %	4.155.087.150,00	7.085.182.100,00	BKD
		2 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,46		2 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.			% Nilai			
					3 Mengoptimalkan pengembangan dan penelitian serta inovasi daerah dalam layanan publik						
					4 Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.	2 Program Pengelolaan BMD	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	5,00 %	685.372.550,00	685.372.550,00	BKD
					5 Optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional	3 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100 20 %	897.356.300,00	901.554.700,00	BKD

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					6 Optimalisasi pengelolaan asset-aset daerah, terutama aset sekolah, sarana kesehatan, aset pasar, perkantoran dan infrastruktur.						
					7 Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten Lima Puluh Kota, terkait dengan pengelolaan aset	4 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3 Level	645.078.300,00	665.625.800,00	Inspektorat
					8 Peningkatan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	5 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3 Level	31.615.000,00	31.615.000,00	Inspektorat
					9 Peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	6 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	80,00 %	145.175.850,00	10.175.850,00	Bappeda
					10 Optimalisasi kualitas pengadaan barang dan jasa						
					11 Peningkatan fasilitasi dan koordinasi bidang hukum						
					12 Peningkatan kebijakan bidang perekonomian						
					13 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum						
				2 Optimalisasi Sumber Pendapatan	1 Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan						

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
				Daerah	retribusi daerah (PDRD).						
					2 Penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, pembayaran retribusi non tunai, dsb)						
					3 Transformasi sumber pendapatan, ekspansi objek pajak dan reribusi, monetisasi asset daerah, digitalisasi sistem penerimaan serta kontribusi fiskal dari investasi dan perdagangan karbon.						
				3 Pengembangan BUMD	1 Meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMD						
					2 Peningkatan kualitas layanan BUMD						
					3 Kerjasama BUMD dengan pihak lain						
					4 Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BUMD						
					5 Pembentukan BUMD potensial						
11	Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1 Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	14,80	1 Meningkatkan ketertiban Umum dan pelayanan perlindungan masyarakat	1 Peningkatan fasilitas dalam menunjang keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat	1 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan, Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas Persentase	100,100 80,100 % %	3.755.767.570,00	3.778.755.490,00	Satpol PP & Damkar

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
		2 Persentase penegakan Perda	100		2 Peningkatan kemampuan personal pelayanan ketertiban dan penanganan situasi darurat		Cakupan Perlindungan Masyarakat, Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetisinya				
		3 Angka Kriminalitas (per 1000 penduduk)	3,83		3 Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan penegak hukum, masyarakat dan *stakeholders*						
		4 Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang Aktif	92,58		4 Meningkatkan pengamalan pancasila, demokrasi dan HAM dalam kehidupan bermasyarakat						
		5 Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan	100		5 Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	2 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	100 60 % %	2.162.849.450,00	6.584.529.440,00	Pol PP Damkar
		6 Persentase Penanganan Konflik Sosial yang Terjadi di Tengah Masyarakat	100		6 Penguatan peran serta dan koordinasi dengan lembaga dan organisasi budaya						
		7 Indeks Resiko Bencana (IRBI)	103,51	1 Meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana	1 Mengembangkan sistem informasi kebencanaan yang valid secara terbuka ke masyarakat	1 Program Penanganan Bencana	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100 %	103.468.350,00	146.407.450,00	Dinas Sosial
					2 Optimalisasi dan pengembangan infrastruktur pengendalian bencana	2 Program Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana, Persentase Penanganan Pasca Bencana, Persentase penanganan tanggap bencana darurat	100,100,100 Persentase	503.631.800,00	1.455.370.070,00	BPBD
					3 Mengembangkan sistem deteksi dini kebencanaan						
					4 Memperkuat masyarakat Tangguh bencana						
					5 Meningkatkan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan	3 Program Pemberdayaan Dan	Persentase organisasi kemasyarakatan	93 %	20.951.550,00	20.951.550,00	Kesbangpol

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					iklim dengan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	yang aktif				
					6 Penguatan mitigasi bencana pada saat bencana dan pasca bencana.	4 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga pendidikan Melalui Etika Serta Budaya Politik, pendidikan Politik Dan pengembangan	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	100 %	787.140.463,00	787.140.463,00	Kesbangpol
						5 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100 %	204.664.600,00	212.914.600,00	Kesbangpol
Prioritas 4 : Peningkatan Tata Kehidupan Sosial Dan Budaya Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah											
12	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	1 Karya Budaya yang Ditetapkan	4,00	1 Meningkatkan pengembangan kebudayaan	1 Mengoptimalkan pemberdayaan lembaga adat dalam mendukung kebudayaan	1 Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	75 %	1.363.331.050,00	1.374.557.850,00	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga
		2 Cakupan Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan (%)	58,70		2 Pelestarian adat dan budaya dengan pendekatan ABS SBK melalui edukasi dan digitalisasi	2 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	90 %	756.277.300,00	756.277.300,00	Kesbangpol
					3 Pelestarian warisan budaya melalui edukasi dan digitalisasi	3 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat	100 %	58.362.800,00	58.362.800,00	Kesbangpol
					4 Meningkatnya upaya penggalian dan penyelamatan literasi Sejarah, budaya dan cagar budaya						

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					5 Peningkatan dan penguatan peran dan potensi budaya lokal dalam aktivitas sosial dan ekonomi kemasyarakatan melalui pengembangan kegiatan bernuansa kebudayaan		beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan				
				2 Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan	1 Meningkatkan penguatan pendidikan karakter berbasis agama kepada tenaga pendidik dan siswa	1 Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama; Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100; 100 75,55 98,30 % % %	33.963.140.700,00	41.740.587.895,00	Dinas Pendidikan
					2 Pembangunan Mesjid Agung						
					3 Pemberian insentif kepada guru TPA dan Garin masjid						
					4 Pemberian bantuan operasional sarana ibadah di Kota Payakumbuh						
					5 Pengembangan kelurahan madani	2 Program Pemerintahan Dan Kesra (Bagian Kesra)	Nilai LPPD indeks reformasi hukum	3,4150 87,60 Nilai Indeks	2.986.544.900,00	2.986.544.900,00	Setdako
					6 Peningkatan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat						

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas 5 : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan, Dan Berkelanjutan											
13	Meningkatnya dan kualitas lingkungan hidup	1 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	23,54	1 Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan	1 Menigkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH), taman kota dan Tempat Pemakaman Umum (TPU).	1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum	Persentase Pelayanan Air Minum	100 %	234.031.300,00	234.031.300,00	Dinas PUPR
		2 Indeks Kualitas Lahan	53,09		2 Meningkatnya pengelolaan limbah domestik dan non domestik	2 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem drainase	Persentase Sistem Drainase Skala Kota	70,99 %	6.711.944.698,00	13.882.801.608,00	Dinas PUPR
		3 RT dengan Akses Sanitasi Aman (%)	22,31		3 Meningkatnya pengawasan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan	3 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Pengolahan Air Limbah Akses Aman	23,57 %	1.760.883.240,00	1.764.580.760,00	Dinas PKP dan PUPR
		4 Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	90		4 Meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim melalui program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup						
					5 Revitalisasi kearifan lokal dalam pengendalian alih fungsi lahan, dan perlindungan hutan dan lahan (Termasuk terkait pemberdayaan/ peran serta masyarakat dalam rehabilitasi lahan/hutan)						
				2 Meningkatkan pengelolaan persampahan secara terpadu dan komprehensif.	1 Intensifikasi Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pengurangan sampah (Terkait Sumber daya manusia)	4 Program Kawasan Permukiman	Persentase Peningkatan RTLH Untuk Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (sepuluh) Ha	100 %	1.211.571.675,00	5.019.687.975,00	Dinas PKP

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					2 Meningkatkan kualitas sarana prasarana pengelolaan persampahan kota						
					3 Penyediaan infrastruktur TPA/TPST/TPS3R yang respresentatif.	5 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Presentase sampah yang dikelola TPA/TPST/TPS3R	17,97 %	1.143.900,00	361.933.300,00	Dinas PUPR
					4 Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan inovasi pengelolaan sampah kota, ditingkat sumber dan Kawasan (Terkait sarana prasarana)	6 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	20 %	500.255.272,00	1.082.851.442,00	Dinas Lingkungan Hidup
					5 Memperkuat kelembagaan dan regulasi pengelolaan persampahan kota, termasuk tingkat local dan non formal (Terkait kelembagaan dan regulasi)	7 Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	96,65 %	8.072.192.825,00	16.491.275.396,00	Dinas Lingkungan Hidup
					6 Optimalisasi penyediaan anggaran pengelolaan sampah						
					7 Meningkatkan upaya desentralisasi pengelolaan sampah						
				3 Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	1 Meningkatkan pemenuhan prasarana, sarana, utilitas (PSU) permukiman.	1 Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kota	100 %	288.298.975,00	278.044.175,00	Dinas PKP
					2 Meningkatkan akses kepemilikan rumah dan hunian yang layak.	2 Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	82,80 %	8.653.793.796,00	36.216.716.355,00	Dinas PUPR

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					3 Bantuan sanitasi dan peningkatan RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	3 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Kapasitas Air Baku Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik Persentase Sungai yang Berfungsi Baik	6,67 75,33 77,98 m3/detik % %	8.864.992.590,00	18.149.364.200,00	Dinas PUPR
					4 Pencegahan dan revitalisasi kawasan kumuh						
					5 Ikut memsukseskan program strategis nasional 3 juta rumah						
14	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas	1 Indeks Infrastruktur	64,62	1 Meningkatkan infrastruktur perkotaan yang inklusif dan ramah lingkungan	1 Pengembangan kawasan strategis perkotaan (7 kawasan strategis)	1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ketersediaan infrastruktur perhubungan yang ramah lingkungan	86 %	2.600.015.650,00	14.931.702.450,00	Dinas Perhubungan
		2 Persentase RT yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau	85,37		2 Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pembangunan Smart Transportation (termasuk konektivitas dengan destinasi wisata luak nan bungsu, berupa jalan, jembatan, moda transpotasi, dan kerjasama dengan kab 50 kota/ daerah hinterland).	2 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan Yang Dibagun Pengembang Yang Telah Dikelola Oleh Pemerintah Kota	27,59 %	69.519.260,00	61.747.320,00	Dinas PKP
		3 Konsumsi listrik per kapita (kWh/kapita)	1.407		3 Ketersediaan prasarana dan sarana perkantoran pemerintahan yang memadai	3 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem drainase	Persentase Sistem Drainase Skala Kota	70,99 %	6.711.944.698,00	13.882.801.608,00	Dinas PUPR
		4 Kapasitas Air Baku (m3/detik)	6,67		4 Meningkatkan kualitas infrastruktur layanan dasar (PADM, Listrik, Drainase, Persampahan, limbah domestik/ sanitasi (PHBS dan						

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					STBM), dll)						
		5 Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	90,61		5 Penataan parkir yang representatif						
					6 Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan (Sarana Perkotaan meliputi berbagai fasilitas publik yang langsung dimanfaat oleh masyarakat seperti taman rekrasi, pasar, pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan peribadatan) dll. Sedangkan prasarana perkotaan merupakan penunjang berfungsinya sarana perkotaan seperti jalan, air limbah, persampahan, drainase dll)						
					7 Mengembangkan upaya untuk menjamin ketersediaan air minum dan memperluas jangkauannya	4 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Pelayanan Air Minum	100 %	234.031.300,00	234.031.300,00	Dinas PUPR
				2 Meningkatkan kualitas penataan kota	1 Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan penataan ruang	1 Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung dalam Kondisi Baik	35,68 %	204.236.538,00	6.421.434.728,00	Dinas PUPR
					2 Optimalisasi penataan kota dan pedestrian	2 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Kualitas Pengelolaan Jasa Konstruksi	94,20 %	215.389.944,00	215.389.944,00	Dinas PUPR
						3 Program Penyelenggaraan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan	74,65 %	415.243.988,00	415.243.988,00	Dinas PUPR

No	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU APBD 2026 (RP)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
						Penataan Ruang	Ruang				

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh, 2026

IV.3 SINKRONISASI PRIORITAS PROGRAM NASIONAL, PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2026

Dalam menjalankan program pembangunan, Kota Payakumbuh melalui serangkaian kegiatan dan sub kegiatan telah seiring dengan pemenuhan atau dukungan terhadap prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sumatera Barat dan Prioritas Kota Payakumbuh. Indikator-indikator dari program tersebut memiliki keterkaitan dengan indikator sasaran pada masing-masing prioritas pembangunan.

Tabel IV-7
Sinkronisasi Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2026 dengan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Sumatera Barat

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT	PRIORITAS KOTA PAYAKUMBUH
1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia 1) Program Konsolidasi Demokrasi;	**Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas** ✓ Program Pengelolaan Pendidikan **Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas** ✓ Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan; ✓ Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; ✓ Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;	**Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berakhlak Mulia, sehat, berkualitas dan berdaya saing** Program Pengelolaan Pendidikan **Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah** Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru 1) Program Pembangunan Wilayah Sumatera;	**Menjadi lumbung pangan nasional dan pusat ekonomi hijau** ✓ Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian; ✓ Program Penyuluhan Pertanian; ✓ Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; ✓ Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; ✓ Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; ✓ Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; ✓ Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan; ✓ Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS); ✓ Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; ✓ Program Penanganan Kerawanan Pangan; ✓ Program Pengawasan Keamanan Pangan. ✓ Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) ✓ Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup; **Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM** ✓ Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; ✓ Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata ✓ Program Pengembangan Ekonomi Kreatif ✓ Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.	**Peningkatan perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan berbasis produk unggulan dan inovasi** Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif **Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan, Dan Berkelanjutan** Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT	PRIORITAS KOTA PAYAKUMBUH
		Hidup Untuk Masyarakat
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Pengelolaan Persampahan
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi 1) Program Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi; 2) Program Peningkatan Ketersediaan, Akses Dan Kualitas Konsumsi Pangan; 3) Program Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dan Koperasi;	**Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat** ✓ Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; ✓ Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; ✓ Program pengembangan ekspor; ✓ Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri; ✓ Program standardisasi dan perlindungan konsumen; ✓ Program perencanaan dan pembangunan industri; ✓ Program Pengelolan sistem informasi industri nasional; ✓ Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; ✓ Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; ✓ Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian; ✓ Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; ✓ Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); ✓ Program Pengembangan Program Pengembangan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM; ✓ Program pengembangan iklim penanaman modal; ✓ Program promosi penanaman Modal ✓ Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal; ✓ Program Pelayanan Penanaman Modal; **Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana** ✓ Program pengelolaan sumber daya air (SDA) ✓ Program Penataan Bangunan Gedung ✓ Program Pengembangan Perumahan ✓ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang ✓ Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) ✓ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) ✓ Program Penyelenggaraan Jalan; ✓ Program Kawasan Permukiman; ✓ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; ✓ Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ✓ Program pengembangan jasa Konstruksi ✓ Program Penanggulangan Bencana;	**Peningkatan perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan berbasis produk unggulan dan inovasi** Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperas Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) Program Pengembangan Umkm Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Program Pengembangan Ekspor Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal **Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan, Dan Berkelanjutan** Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Program Penataan Bangunan Gedung Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Penanggulangan Bencana Program Penanganan Bencana
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya	**Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas**	**Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia, sehat,**

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT	PRIORITAS KOTA PAYAKUMBUH
Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas 1) Program Pengendalian Penduduk Dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan; 2) Program Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial; 3) Program Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan; 4) Peningkatan Pemerataan Program Layanan Pendidikan Berkualitas; 5) Program Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan Dan Pemuda; 6) Program Pengentasan Kemiskinan; 7) Program Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing;	✓ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; ✓ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; ✓ Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman; ✓ Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; ✓ Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan; ✓ Program Pengelolaan Pendidikan; ✓ Program Pengembangan Kurikulum; ✓ Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan; ✓ Program Pengembangan Bahasa dan Sastra; ✓ Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; ✓ Program Penempatan Tenaga Kerja; ✓ Program Hubungan Industrial; ✓ Program Pengawasan Ketenagakerjaan; ✓ Program Penelitian dan Pengembangan Daerah **Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas** ✓ Program Pengendalian Penduduk; ✓ Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); ✓ Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS); ✓ Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan; ✓ Program Perlindungan Perempuan; ✓ Program peningkatan kualitas keluarga; ✓ Program pengelolaan sistem data gender dan anak; ✓ Program pemenuhan hak anak (PHA) ✓ Program perlindungan khusus anak.	**berkualitas dan berdaya saing** Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Perlindungan Khusus Anak Program Pengendalian Penduduk Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Perencanaan Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Pengendalian Izin Usaha Industri Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Program Pembinaan Perpustakaan Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Program Pengelolaan Arsip Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Program Perizinan Penggunaan Arsip Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pengelolaan Permuseuman **Peningkatan kualitas tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas** Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT	PRIORITAS KOTA PAYAKUMBUH
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Riset Dan Inovasi Daerah
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri 1) Program Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil Dan Industrialisasi; 2) Program Penguatan Pilar Pertumbuhan Dan Daya Saing Ekonomi.	**Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat** ✓ Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; ✓ Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; ✓ Program pengembangan ekspor; ✓ Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri; ✓ Program standardisasi dan perlindungan konsumen; ✓ Program perencanaan dan pembangunan industri; ✓ Program Pengelolan sistem informasi industri nasional	**Peningkatan perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan berbasis produk unggulan dan inovasi**
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
		Program Pengembangan Ekspor
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan 1) Program Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial; 2) Program pengentasan Kemiskinan	**Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan** ✓ Program Rehabilitasi Sosial ✓ Program Kesejahteraan rakyat	**Peningkatan Perekonomian Yang Berkualitas, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Produk Unggulan Dan Inovasi**
		Program Pemberdayaan Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan 1) Program Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;	**Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif** ✓ Program Penataan Organisasi ✓ Program Penyelenggaraan Pengawasan; ✓ Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi; ✓ Program pengeloaan Keuangan Daerah; ✓ Program Pengelolaan barang milik Daerah; ✓ Program Pengelolaan Pendapatan; ✓ Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Program Kepegawaian Daerah; ✓ Program Pengembangan Sumber Daya Manusia; ✓ Program pelayanan penanaman modal	**Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas**
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
		Program Kepegawaian Daerah
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Program pelayanan penanaman modal
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur 1) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian	**Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas** ✓ Program pengembangan Kebudayaan; ✓ Program pengembangan kesenian tradisional; ✓ Program pembinaan sejarah;	**Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah**
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
		Program Pengembangan Kebudayaan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT	PRIORITAS KOTA PAYAKUMBUH
Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan rakyat dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia; 2) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.	✓ Program pelestarian dan pengelolaan warisan budaya (cagarbudaya); ✓ Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH; ✓ Program Pembinaan Perpustakaan.	Program Pengelolaan Pendidikan

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh,2026

Dalam rangka menjamin sinergisitas pembangunan pusat dan daerah, Dukungan Pemerintah Kota Payakumbuh terhadap Prioritas Nasional /Asta Cita dalam dokumen Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV-8
Dukungan Pemerintah Kota Payakumbuh terhadap Prioritas Nasional Tahun 2026

NO	PRIORITAS		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU APBD Tahun 2026	PAGU PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026
	NASIONAL	KOTA PAYAKUMBUH					
1,	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama; Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100; 100 75,55 98,30 % % %	33.963.140.700,00	41.740.587.895,00
		2. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	90 %	756.277.300,00	756.277.300,00
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	100 %	787.140.463,00	787.140.463,00
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100 %	204.664.600,00	212.914.600,00
2,	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	2. Peningkatan perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	87.9 Nilai	233.286.025,00	626.564.475,00
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	11 %	40.112.900,00	109.538.650,00
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Pembudidaya Yang Tergabung Dalam Kelompok Yang Menerapkan Anjuran KKP (%) Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	50 565 % Ton	592.976.834,00	1.642.334.779,00
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Peningkatan Produksi Hortikultura Produktivitas pertanian per hektar per tahun	0,73 2 5,61 % % %	906.584.637,00	2.373.705.491,00

NO	PRIORITAS		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU APBD Tahun 2026	PAGU PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026
	NASIONAL	KOTA PAYAKUMBUH					
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Prasarana Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Ditetapkan Menjadi LP2B (JUT) Persentase Pemenuhan Prasarana Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Ditetapkan Menjadi LP2B (RJIT)	49,84 66,54 % %	673.617.150,00	673.617.150,00
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis	1 90 Persentase Persentase	719.711.930,00	719.649.700,00
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian Persentase Penanganan Bencana Pertanian	100 60 Persentase Persentase	43.060.735,00	43.060.735,00
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Luas Tanam Yang Menerapkan Teknologi Pertanian Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	50 90 % Persentase	314.315.650,00	269.798.000,00
		5. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara	68,58 Indeks	603.820.100,00	758.420.100,00
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH (Persentase)	14,87 %	1.963.936.796,00	2.565.132.916,00
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	96,65 %	8.072.192.825,00	16.491.275.396,00
3,	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan berbasis produk unggulan dan inovasi	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	47,92 %	255.299.765,00	255.299.765,00
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan di Dalam Negeri	16,73 %	93.109.550,00	89.971.600,00
			Program Hubungan Industrial	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	1444 Orang	689.941.450,00	686.491.450,00
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	26.00 %	632.019.638,00	545.906.238,00
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah data perusahaan IKM yang masuk ke dalam SIINAS Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase) Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan	1 61,67 75 perusahaan Nilai %	6.776.400,00	6.776.400,00

NO	PRIORITAS		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU APBD Tahun 2026	PAGU PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026
	NASIONAL	KOTA PAYAKUMBUH					
				terkini			
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	40.56 %	19.999.150,00	19.999.150,00
			Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	50 %	14.999.250,00	14.999.250,00
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang yang diberikan dukungan Fasilitasi Pelatihan	42 %	216.374.220,00	230.785.610,00
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	23,78 %	19.999.850,00	51.339.050,00
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pertumbuhan Wirausaha Persentase Usaha Kecil yang Bertansformasi dari Informal ke Formal	12.35 23.78 % %	19.999.475,00	19.999.475,00
			Program Pengembangan Umkm	Proporsi UKM menjalin Kemitraan dan Ekspor	1.99 %	99.347.000,00	246.262.658,00
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	23.75 %	19.679.200,00	19.679.200,00
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan Kualitasnya	90 %	5.196.691.080,00	9.385.325.814,00
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	4.17 %	267.012.890,00	665.247.470,00
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	56.15 %	66.799.156,00	66.799.156,00
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan	4 %	201.696.430,00	207.872.740,00
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	50 %	489.939.440,00	501.011.320,00
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	7 %	201.051.550,00	201.051.450,00
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	50 %	51.025.150,00	46.929.250,00
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	50 %	167.263.300,00	171.359.200,00
		5. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan, Dan Berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Kapasitas Air Baku Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik Persentase Sungai yang Berfungsi Baik	6,67 75,33 77,98 m3/detik % %	8.864.992.590,00	18.149.364.200,00

NO	PRIORITAS		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU APBD Tahun 2026	PAGU PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026
	NASIONAL	KOTA PAYAKUMBUH					
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Pelayanan Air Minum	100 %	234.031.300,00	234.031.300,00
			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Presentase sampah yang dikelola TPA/TPST/TPS3R	17,97 %	1.143.900,00	361.933.300,00
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	82,80 %	8.653.793.796,00	36.216.716.355,00
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Pengolahan Air Limbah Akses Aman	23,57 %	1.760.883.240,00	1.764.580.760,00
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kota	100 %	288.298.975,00	278.044.175,00
			Program Kawasan Permukiman	Persentase Peningkatan RTLH Untuk Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (sepuluh) Ha	100 %	1.211.571.675,00	5.019.687.975,00
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase ketersediaan infrastruktur perhubungan yang ramah lingkungan	86 %	2.600.015.650,00	14.931.702.450,00
4,	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama; Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100; 100 75,55 98,30 % % %	33.963.140.700,00	41.740.587.895,00
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik Indeks pemerataan guru	62,00 82,00 % %	98.584.650,00	131.088.050,00
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting berdasarkan E PPGBM Jumlah Kematian Ibu	2.08 2 Persenta se Orang	33.900.923.392,00	48.121.931.892,00
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	35 %	843.784.250,00	843.784.250,00

NO	PRIORITAS		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU APBD Tahun 2026	PAGU PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026
	NASIONAL	KOTA PAYAKUMBUH					
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sedian Farmasi,Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	94 %	330.580.800,00	330.580.800,00
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Diberdayakan	100 %	1.836.127.800,00	1.836.127.800,00
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran renponsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	4.09 60.71 % %	66.141.150,00	66.141.150,00
			Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	0.0250 100 % %	254.889.000,00	254.889.000,00
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar Jumlah organisasi perempuan yang aktif	1 21 Dokumen organisasi	434.631.800,00	434.631.800,00
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprensif Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	100 85.67 % Indeks	326.095.600,00	326.095.600,00
			Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (AgrSpesific Fertility Rate / ASFR 15-19 Indeks Pembangunan berwawasan Kependudukan (IPBK)	5,5 85,0 Angka indeks	51.000.000,00	51.000.000,00
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Persentase pemakaian kontrasepsi Modren (Modren Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	13.00 43,60 % %	427.242.000,00	427.242.000,00
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) wanita Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	23.3 72 Median %	892.330.000,00	892.330.000,00
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	65 %	47.247.450,00	47.247.450,00
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas Peningkatan prestasi olahraga (tingkat daerah	15 55 % medali	2.501.743.220,00	3.829.103.290,00
			Program Pengembangan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam	65 %	335.533.500,00	335.533.500,00

NO	PRIORITAS		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU APBD Tahun 2026	PAGU PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026
	NASIONAL	KOTA PAYAKUMBUH					
			Kapasitas Kepramukaan	Kepramukaan			
5,	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Peningkatan perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan berbasis produk unggulan dan inovasi	Program Hubungan Industrial	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	1444 Orang	689.941.450,00	686.491.450,00
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pertumbuhan Wirausaha Persentase Usaha Kecil yang Bertansformasi dari Informal ke Formal	12.35 23.78 % %	19.999.475,00	19.999.475,00
			Program Pengembangan Umkm	Proporsi UKM menjalin Kemitraan dan Ekspor	1.99 %	99.347.000,00	246.262.658,00
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan	4 %	201.696.430,00	207.872.740,00
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka konsumsi ikan JUmlah produksi olahan hasil perikanan	33,50 7,15 kg/kapita/th ton	98.393.930,00	98.393.930,00
6.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	2. Peningkatan Perekonomian Yang Berkualitas, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Produk Unggulan Dan Inovasi	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi (%)	100 %	494.672.450,00	491.251.200,00
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	90 %	316.692.050,00	321.174.100,00
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kota	100 %	288.298.975,00	278.044.175,00
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	47,92 %	255.299.765,00	255.299.765,00
			Program Hubungan Industrial	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	1444 Orang	689.941.450,00	686.491.450,00
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	11 %	40.112.900,00	109.538.650,00
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	23,78 %	19.999.850,00	51.339.050,00
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pertumbuhan Wirausaha Persentase Usaha Kecil yang Bertansformasi dari Informal ke Formal	12.35 23.78 % %	19.999.475,00	19.999.475,00
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	19,23 %	267.012.890,00	665.247.470,00
			Program Standardisasi Dan Perlindungan	Persentase Penanganan Pengaduan	100 %	66.799.156,00	66.799.156,00

NO	PRIORITAS		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU APBD Tahun 2026	PAGU PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026
	NASIONAL	KOTA PAYAKUMBUH					
			Konsumen	Konsumen			
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	21 %	51.025.150,00	46.929.250,00
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	30 %	167.263.300,00	171.359.200,00
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Pembudidaya Yang Tergabung Dalam Kelompok Yang Menerapkan Anjuran KKP (%) Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	50 565 % Ton	592.976.834,00	1.642.334.779,00
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Peningkatan Produksi Hortikultura Produktivitas pertanian per hektar per tahun	0,73 2 5,61 % % %	906.584.637,00	2.373.705.491,00
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD indeks reformasi hukum	3,4150 87,60 Nilai Indeks	4.039.763.500,00	4.077.457.400,00
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan jasa	91,74 Indeks	273.963.850,00	288.963.650,00
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM	100 91 % Indeks	3.479.918.823,00	3.650.910.253,00
7.	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan, Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat, Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetisinya	100,100 80,100 % %	3.755.767.570,00	3.778.755.490,00
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	100 60 % %	2.162.849.450,00	6.584.529.440,00
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana, Persentase Penanganan Pasca Bencana, Persentase penanganan tanggap bencana darurat	100,100,10 0 Persenta se	503.631.800,00	1.455.370.070,00
			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	10 64 % %	153.925.430,00	160.518.809,00

NO	PRIORITAS		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU APBD Tahun 2026	PAGU PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026
	NASIONAL	KOTA PAYAKUMBUH					
			Program Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan; Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan; Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan; Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100; 100; 100; 100 %; %; %; %	171.562.790,00	180.318.030,00
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	78 %	1.150.757.096,00	1.941.684.100,00
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.84 Indeks	3.273.259.800,00	3.915.971.400,00
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100 Persentase	87.203.750,00	87.203.750,00
			Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip	70,30 %	205.658.260,00	205.658.710,00
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	persentase ranperda yang ditetapkan	100 %	16.709.732.625,00	16.703.440.625,00
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD, Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100 100, 100 %, %	382.679.325,00	355.322.425,00
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, 2. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, 3. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100.100.100 %,%,%	515.547.275,00	527.322.725,00
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	80,00 %	145.175.850,00	10.175.850,00
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penurunan SILPAPersentase Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah diluar Tunjangan GuruOpini BPK atas Laporan Keuangan	11 51.54 WTP % % Nilai	4.155.087.150,00	7.085.182.100,00

NO	PRIORITAS		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU APBD Tahun 2026	PAGU PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026
	NASIONAL	KOTA PAYAKUMBUH					
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	5.00 %	685.372.550,00	685.372.550,00
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100 20 % %	897.356.300,00	901.554.700,00
			Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	12 Persent ase	1.068.605.200,00	854.227.200,00
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	12 Persent ase	608.670.550,00	608.670.550,00
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3 Level	645.078.300,00	665.625.800,00
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3 Level	31.615.000,00	31.615.000,00
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu	75 85 % %	42.338.800,00	40.408.550,00
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	12.515.425,00	14.475.425,00
8.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	4. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama; Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100; 100 75,55 98,30 % % %	33.963.140.700,00	41.740.587.895,00
			Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	66,30 Nilai	604.678.000,00	604.678.000,00
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD indeks reformasi hukum	3,4150 87,60 Nilai Indeks	4.039.763.500,00	4.077.457.400,00
			Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	75 %	1.363.331.050,00	1.374.557.850,00
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan	5 %	46.059.800,00	42.759.800,00

NO	PRIORITAS		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU APBD Tahun 2026	PAGU PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026
	NASIONAL	KOTA PAYAKUMBUH					
				Dikembangkan			
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	10 10 % Persentas e	12.776.750,00	12.776.750,00
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	100 %	58.362.800,00	58.362.800,00

Sumber : Bappeda, 2026 (data diolah)

Program Strategis Nasional menjadi acuan dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan. Dukungan Program/Kegiatan/SubKegiatan terhadap Program Strategis Nasional (Pro-Sn) tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. Program Strategis Nasional (Pro-Sn) 1. Pengentasan Kemiskinan

Tabel IV. 9

Dukungan Terhadap Program Strategis Nasional (Pro-Sn) Pengentasan Kemiskinan

NO	PRO SN	PROYEK/ KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT				
				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR
1	[PRO SN] Pengentasan Kemiskinan	Pembangunan 3 Juta Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
4		Pembangunan 3 Juta Rumah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki
		Pembangunan 3 Juta Rumah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Terpenuhinya Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
6		Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Sosial	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
7		Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Sosial	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan

NO	PRO SN	PROYEK/ KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT				
				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR
								Kabupaten/Kota
8		Sekolah Rakyat	Dinas Sosial	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh, Data diolah, 2026

2. Program Strategis Nasional (Pro-Sn) 2. Ketahanan Pangan

Tabel IV.10
Dukungan Terhadap Program Strategis Nasional (Pro-Sn) Ketahanan Pangan

NO	PRO SN	PROYEK/ KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT				
				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR
1	[PRO SN] Ketahanan Pangan	Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0127 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh, Data diolah, 2026

3. Program Strategis Nasional (Pro-Sn) 3. Kesehatan untuk Semua

Tabel IV.11
Dukungan Terhadap Program Strategis Nasional (Pro-Sn) Kesehatan untuk Semua

NO	PRO SN	PROYEK/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT				
				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR
1		Penuntasan TBC	Dinas Sosial	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh, Data diolah, 2026

4. Program Strategis Nasional (Pro-Sn) 4. Perluasan Akses Pendidikan

Tabel IV. 12
Dukungan Terhadap Program Strategis Nasional (Pro-Sn) Perluasan Akses Pendidikan

NO	PRO SN	PROYEK/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT				
				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR
1	[PRO SN] Perluasan Akses Pendidikan	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	Dinas Pendidikan	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
2		Makan Bergizi Gratis	Dinas Kesehatan	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
3		Makan Bergizi Gratis	Dinas Pertanian	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh, Data diolah, 2026

5. Program Strategis Nasional (Pro-Sn) 5. Pertumbuhan Ekonomi

Tabel IV. 13
Dukungan Terhadap Program Strategis Nasional (Pro-Sn) Pertumbuhan Ekonomi

NO	PRO SN	PROYEK/ KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT				
				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR
1	[PRO SN] Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi	Dinas Ketahanan Pangan	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
2		Pengendalian Inflasi	Dinas Ketahanan Pangan	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0020 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
3		Pengendalian Inflasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh,Data diolah, 2026

IV.4 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Perubahan target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan proses penyesuaian tolak ukur keberhasilan pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan RPJMD. Analisis ini dilakukan melalui langkah-langkah strategis berbasis evaluasi untuk merespons dinamika fiskal, regulasi, maupun kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Perubahan target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2026 dilakukan karena adanya ketidaksesuaian antara target yang direncanakan pada dokumen RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dan pada dokumen RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2026 dengan dinamika realisasi di lapangan. Target ini dapat diturunkan maupun dinaikkan berdasarkan hasil evaluasi capaian tahun 2025, capaian triwulan I tahun 2026, target RKPD Kota Payakumbuh tahun 2026, serta target RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, dan juga didasari oleh kondisi spesifik di lapangan antara lain:

a. Dinamika Keuangan dan Anggaran;
   Penyesuaian akibat perubahan kapasitas fiskal (Pendapatan Asli Daerah/PAD naik/turun) atau adanya kebijakan efisiensi anggaran dan transfer dari pemerintah pusat.
b. Kondisi Makro Ekonomi;
   Perubahan asumsi dasar ekonomi seperti laju inflasi, tingkat pengangguran, dan kemiskinan yang tidak sesuai dengan proyeksi awal.
c. Bencana atau Kedaruratan;
   Adanya kejadian luar biasa (seperti pandemi atau bencana alam) yang menuntut pengalihan prioritas pembangunan secara mendesak.

IV.4.1 Indikator Kinerja Makro

Perubahan target kinerja Makro Tahun 2026 disajikan dalam Tabel dibawah ini

Tabel IV-14
Penetapan Indikator Kinerja Makro Kota Payakumbuh Tahun 2026

NO	INDIKATOR	Satuan	Realisasi 2025	Target	
				RKPD Tahun 2026	Perubahan RKPD Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	81.62	81.41	81.97
2	Tingkat Kemiskinan	%	4.95	4,80	4.32
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.96	4.60	4.64
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	3.55	5.94	5.79
5	PDRB Per-kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Rp Juta	66.03	80.58	82.14
6	PDRB Per-Kapita atas dasar Harga Konstan (ADHK) Perkapita	Rp Juta	36.44	80.56	38,62
7	Indeks Gini	Indeks	0.271	0.310	0.270
8	Usia Harapan Hidup	Tahun	75.54	75.48	75.57
9	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.79	14.62	14.91
10	Rata – Rata Lama Sekolah	Tahun	11.08	11.30	11.30
11	Pengeluaran Perkapita	Rp. Ribu	14.536	14.378	20.930
12	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	7.370	5.522	6.500
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab/Kota	Indeks	70.67	68.56	70.67

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2026, data diolah

IV.4.2 Indikator Kinerja Utama

Perubahan target Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel IV-15
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Payakumbuh Tahun 2026

NO	INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target	
				RKPD Tahun 2026	Perubahan RKPD Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
Tujuan I : Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing					
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,62	81,41	81,97

NO	INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target	
				RKPD Tahun 2026	Perubahan RKPD Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
2	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,54	75,48	75,57
3	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	%	16,40	15,70	12,45
4	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	7,53	5,54	5,45
5	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,79	14,62	14,91
6	Tingkat Kemiskinan	%	4,95	4,80	4,32
7	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	78,50	63,79	78,50
8	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,17	0,28	0,13
Tujuan II : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan inklusif					
9	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,55	5,94	5,79
10	Indek Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	3,92	3,96	3,96
11	Proporsi kontribusi PDRB Kota Payakumbuh terhadap PDRB Provinsi	%	2,78	3,01	2,97
12	PDRB Per-kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	(Rp Juta)	66,03	80,58	82,14
13	Indeks Gini	Indeks	0,271	0,310	0,270
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,96	4,60	4,64
15	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	%	33,74	33,35	33,76
16	Nilai Realisasi Investasi	Milyar/Rp	709,66	665	712
Tujuan III : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel					
17	Indeks RB	Indeks	83,28	85,00	85,00
18	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,89	3,84	3,91
19	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	-	1,5	1,5
20	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,35	4,46	4,52
21	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,80	88,60	90,00
22	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	76,31	80,00	80,00
23	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	5,28	5,27	5,28
24	Rasio PAD terhadap APBD	%	21,33	0,17	21,37
25	Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	%	14,80	5,00	14,80
Tujuan IV : Terwujudnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK					
26	IPK berbasis ABS SBK	Nilai	72,09	73,00	73,00
27	Karya Budaya yang Ditetapkan	Unit	4,00	2,00	4,00
28	Cakupan Penguatan idiologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	%	56,65	60	58,70
Tujuan V : Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan					
29	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	70,67	68,56	70,67
30	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	19,05	18,97	23,54
31	Indeks Infrastruktur	Indeks	64,22	64,62	64,62

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2026, data diolah

IV.4.3 Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci

Perubahan target Kinerja Daerah (IKD) dan Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV-16
Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi Tahun 2025	Target	
				RKPD Tahun 2026	Perubahan RKPD Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)					
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**				
1	Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh/ kapita	1156,26	1407	1407
2	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	86,74	89,65	89,65
3	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	7,53	5,54	5,45

NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi Tahun 2025	Target	
				RKPD Tahun 2026	Perubahan RKPD Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	70,67	68,56	70,67
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	19,19	20,23	22,31
6	Rumah Tangga yang memiliki Pengolahan Air Limbah Akses Aman	%	23,15	-	23,57
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	19,05	18,97	23,54
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	90,00	26,34	90,00
9	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	104,80	104,80	103,51
10	Jumlah Penduduk	Jiwa	148,600	150,450	150,450
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,33	1,38	1,38
12	Rasio Penduduk	%	101,56	101,09	101,56
13	Kepadatan Penduduk	Org/km2	1876	1904	1904
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,55	5,94	5,79
2	Tingkat Kemiskinan	%	4,95	4,80	4,32
3	PDRB Per-kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB))	Rp Juta	66,03	80,58	80,56
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,96	4,60	4,64
5	Rasio Gini	Angka	0,271	0,310	0,270
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	81,62	81,62	81,97
7	Usia Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,54	75,48	75,57
8	Indek Keluarga Sehat	Nilai	0,70	0,7	0,70
9	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	%	16,40	15,70*	12,45
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,79	14,62	14,80
11	Rata – Rata Lama Sekolah	Tahun	11,08	11,31	11,30
12	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	16,32	71,00	71,00
13	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	31,90	99,25	99,25
14	IPK berbasis ABS SBK	Indeks	72,09	73,00	73,00
15	Karya Budaya yang Ditetapkan	Unit	4,00	2,00	4,00
16	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Angka	81,51	83,25	83,25
17	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	78,50	63,79	78,50
18	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,17	0,28	0,13
19	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	98,52	-	98,56
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
1	Angka ketergantungan	%	48,07	48,08	48,08
2	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	5,04	-	5,06
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	3,57	3,67	3,62
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi	%	5,70	3,66	5,70
5	Rasio Kewirausahaan	%	5,83	9,16	9,34
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	61,74	64,12	64,00
7	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	51,50	56,15	56,15
8	Ekspor Barang dan Jasa	(% PDRB)	19,52	17,56	19,75
9	Indeks Infrastruktur	Indeks	64,22	64,62	64,62
10	Persentase RT yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan terjangkau	%	79,19	85,98	85,37
11	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Tahun	0,25	0,36	0,37
12	Tingkat Inflasi	%	4,99	4,65	-
13	Pembentukan modal tetap bruto	%PDRB	24,34	24,90	24,19
14	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	%	5,98	8,43	8,43
15	Nilai Transaksi Saham Per Kapita	Rupiah	3,800,000	4,525,924	4,562,126

NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi Tahun 2025	Target	
				RKPD Tahun 2026	Perubahan RKPD Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
16	Total Kredit/PDRB	%	33,48	26,3	33,50
17	Rasio PDRB sektor Jasa Keuangan	%	6,15	5,96	6,17
18	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	5,50	-	5,50
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
I	**Layanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar**				
1	Urusan Pendidikan				
1.1	Rata – rata Lama Sekolah	Tahun	11,08	11,30	11,30
1.2	Angka Partisipasi Kasar				
1.2.1	APK PAUD	%	67,08	71,00	71,00
1.2.2	APK SD/MI/Paket A	%	114	109	114
1.2.3	APK SMP/MTs/Paket B	%	135	100	135
1.3	Angka Partisipasi Murni				
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A)	%	97,52	100	100
1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	80,55	84	84
1.3.3	Cakupan Penguatan idiologi Pancasila dan Karakter kebangsaan (%)	%	56,65	58,70	58,70
1.3.4	Persentase satuan pendidikan (SD/SMP) yang terakreditasi A	%	76,24	76,5	76,5
1.4	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi membaca	%	87,50	87,90	87,90
1.5	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi	%	84,40	85,65	85,65
1.5	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	20,60	21,90	21,90
1.6	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	-	79,85	-
2	**Urusan Kesehatan**				
2.1	Angka Kematian Ibu (per 100,000 Kelahiran Hidup)	Angka	2	2	2
2.2	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage))	%	87	84,00	87
2.3	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	%	87	94,00	94,00
2.4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,97	100	100
2.5	Indek Keluarga Sehat	Nilai	0,7	0,4	0,7
2.6	Prevalensi Stunting berdasarkan E-PPGBM	%	2,04	2,04	2,04
3	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
3.1	Kapasitas Air Baku	(m3/detik	6,66	5,46	6,66
3.2	Persentase Infrastruktur daerah yang dibangun sesuai dengan rencana tata ruang	%	79,61	80,12	80,12
3.3	Indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan tata ruang	Indeks	86,47	87,38	87,38
3.4	Akses Rumah tangga terhadap sumber air minum jaringan perpipaan	%	89,97	90,61	90,61
4	**Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**				
4.1	Persentase rumah layak huni	%	97,70	98,04	98,04
4.2	Persentase RT yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau	%	79,19	85,37	85,37
4.3	Persentase PSU Perumahan yang dibangun pengembang yang telah dikelola oleh Pemerintah Kota	%	24,71	27,59	27,59
5	**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**				
5.1	Persentase penegakan Perda	%	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi Tahun 2025	Target	
				RKPD Tahun 2026	Perubahan RKPD Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
5.2	Angka Kriminalitas (per 1000 penduduk)	%	3,77	3,83	3,83
5.3	Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	%	14,80	5,00	14,80
5.4	Persentase penyelesaian gangguan Trantibum	%	100	100	100
6	**Penanggulangan Bencana Daerah**				
6.1	Persentase warga Kota Payakumbuh yang menerima pelayanan penanggulangan bencana	%	100	100	100
7	**Urusan Sosial**				
7.1	Tingkat Kemiskinan	%	4,95	4,32	4,32
7.2	Persentase PPKS yang terlayani	%	100	86	86
7.3	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	-	86	86
II	**Layanan Urusan Wajib Terkait Non Pelayanan Dasar**				
1	**Urusan Ketenagakerjaan**				
1.1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rp/ Tenaga Kerja	68,75	557,689,026	71,50
1.2	Proporsi penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	36,60	55,91	54,38
1.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	61,74	64,12	64,00
1.4	Tingkat Pengangguran terbuka	%	4,96	4,60	4,64
1.5	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	95,04	95,70	95,26
1.6	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	55,49	79,85	79,67
1.7	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	31,90	-	33,78
1.8	Jumlah Penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau Dari Dinas yang menangani bidang ketengakerjaan	orang	6	-	15
1.9	Jumlah unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan di Tingkat Kab/Kota	Unit layanan	1	-	1
2	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				
2.1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,17	0,25	0,127
2.2	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Indeks	81,51	83,25	83,25
2.3	Indeks Pembangunan gender (IPG	Nilai	98,52	98,56	98,56
2.4	Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Nindya	Nindya	Utama
2.5	Tingkat Kategori Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Kategori	Madya	Madya	Madya
2.6	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	7,47	6,84	7,47
2.7	Persentase anak korban kekeransan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100	100	100
3	**Urusan Pangan**				
3.1	Ketersediaan pangan utama	Ton	19,787	19,765	19,790
3.2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	7,53	5,54	5,45
3.3	Skor PPH Konsumsi	skor	88,49	88,20	88,49
3.4	Tingkat Keamanan Pangan	Level	tinggi	tinggi	tinggi
3.5	Stabilisasi harga				
	Beras	%	1,50	1,99	≤ 10
	Cabe	%	24,98	22,00	≤ 25
	Bawang	%	13,80	16,50	≤ 25
3.6	Indek Ketahanan Pangan	indeks	86,74	89,65	89,50

NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi Tahun 2025	Target	
				RKPD Tahun 2026	Perubahan RKPD Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
4	**Urusan Pertanahan**				
4.1	Indek Tertib Adminiastrasi Pertanahan	%	49,63	49,63	89,50
5	**Urusan Lingkungan Hidup**				
5.1	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	19,09	18,97	23,54
5.2	Persentase RTH	%	14,89	14,91	14,91
5.3	Indeks Kualitas Air	Nilai	67,67	45,38	67,75
5.4	Indeks Kualitas udara	Nilai	82,97	92	92
5.5	Indeks Kualitas lahan	Nilai	53,08	27,65	53,10
5.6	Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	94,43	96,65	96,65
6	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
6.1	Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	95,01	96,45	96,45
6.2	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	100,96	78	100,96
6.3	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	83,76	82	85
7	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat**				
7.1	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	100	-	100
8	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				
8.1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	78,50	-	78,50
8.2	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per wanita usia subur (15-49 tahun)	Rata-rata anak per Wanita	2,33	-	2,29
8.3	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	81,80	-	85,00
8.4	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	80,80	-	88,8
8.5	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	16,10	-	14,1
8.6	Angka Kelahiran Rema Umur 15-19 tahun/Age Spesific Fertility Rate (ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	10,8	-	5,5
8.7	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	74,90	-	74,90
8.8	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	87,80	-	100
8.9	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	100	-	100
9	**Perhubungan**				
9.1	Nilai survey IKM Pelayanan transportasi	angka	89,03	90,80	91
9.2	Persentase ketersediaan Infrastruktur Perhubungan yang ramah Lingkungan	%	89,31	82,00	90
10	**Urusan Komunikasi dan Informatika**				
10.1	Indeks SPBE	nilai	3,89	1,5	3,91
10.2	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	nilai	45,90	54	54
10.3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	66,00	78	78
10.4	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks			1,5
11	**Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**				
11.1	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	%	33,74	-	33,74
11.2	Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian	%	4,62	-	4,71
11.3	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	%	1,51	-	2,207
11.4	Rasio Kewirausahaan	%	5,83	-	9,34
12	**Urusan Penanaman Modal**				
12.1	Nilai Realisasi Investasi	Milyar/Rupiah	709,6	240000000000	712
13	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**				
13.1	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional	Org	21	51	70

NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi Tahun 2025	Target	
				RKPD Tahun 2026	Perubahan RKPD Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
13.2	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	%	0,74	-	15
14	**Urusan Statistik**				
14.1	Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	2,69	2,80	2,80
15	**Urusan Persandian**				
15.1	Indeks Keamanan Informasi	%	49,76	50	50
16	**Urusan Kebudayaan**				
16.1	Karya Budaya yang Ditetapkan	unit	1,00	2,00	2,00
16.2	Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai nilai budaya	%	98	100	100
16.3	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%	4	4	4
16.4	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	4	-	10
17	**Urusan Perpustakaan**				
17.1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	%	16,32	72,30	72,25
17.2	Rasio Kunjungan Perpustakaan Perkapita	%	0,1163	-	0,067
18	**Urusan Kearsipan**				
18.1	Indek Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	38,61	-	73,94
18.2	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan sistem kearsipan sesuai standar	%	38,71	-	41,25
II	**Layanan Urusan Pilihan**				
1	**Urusan Kelautan dan Perikanan**				
1.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya	Ton	560,35	575	565
2	**Urusan Pariwisata**				
2.1	Jumlah Tamu wisatawan mancanegara (hotel berbintang)	ribu orang	7	2,41	0,025
2.2	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	orang	7	-	7
2.3	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	15	-	21
2.4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi	%	5,70	3,66	5,70
2.6	Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum	%	3,48	3,67	3,62
3	**Urusan Pertanian**				
3.1	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan (ADHB)	%	0,89	-	0,89
3.2	Produksi padi	Ton	37453	41275	39604
3.3	Populasi sapi	Ekor	2955	3200	3154
3.4	Indeks Pertanaman	indeks	2,38	-	2,69
3.5	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Juta/Orang	35,27	35,52	35,52
4	**Urusan Perdagangan**				
4.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	-	25,50	25,50
4.2	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	19,52	-	19,75
4.3	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan		25,13	-	4,32
5	**Urusan Perindustrian**				
5.1	Persentase peningkatan nilai produksi	%	6,70	3,40	6,9
5.2	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	5,20	-	7,88
5.3	Proporsi jumlah IKM	%	0,26	-	3,51
III	**Fungsi Pendukung**				
1	**Kesekretariatan Daerah**				
1.1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,26	4,46	4,52
1.2	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	83,28	-	85,00
1.3	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	87,00	83,15	87,40

NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi Tahun 2025	Target	
				RKPD Tahun 2026	Perubahan RKPD Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
1.4	Indeks BerAKHLAK	Nilai	72,94	-	73,50
1.5	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	indeks	5,23	-	5,27
1.6	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	50,49	-	66
1.7	Indeks Zakat Nasional		0,32	-	0,42
1.8	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	-	-	3,4150
1.9	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	89,80	-	89,80
1.10	Nilai Evaluasi AKIP	nilai	76,31		80,00
1.11	Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan	%	100		100
1.12	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	91,58	91,58	91,58
1.13	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	39,09	40,03	40,03
1.14	ROA BUMD	%	6,17	-	6,19
1.15	Opini Ombudsman RI : Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks	-	-	78,00
2	**Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**				
2.1	Nikai IKM DPRD	Nilai	85,22	86	86
2.2	Persentase Ranperda Yang Ditetapkan	%	30,76	100	100
IV	**Fungsi Penunjang**				
1	**Perencanaan**				
1.1	Indek Perencanaan Pembangunan Daerah	%	89,30	88,2	90,50
1.2	Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	25,04	-	26,01
2	**Keuangan**				
2.1	IPKD	scor	74,76	72,75	74,76
2.2	Opini laporan keuangan pemerintah daerah dari BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
2.3	Persentase belanja pegawai terhadap belanja daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	%	29,84	-	35
2.4	Persentase penurunan SILPA	%	1,08		10
2.5	Persentase laporan keuangan tepat waktu	%	100		100
2.6	Persentase penambahan nilai aset tetap	%	0,00		3
2.7	Persentase penerimaan PAD terhadap total penerimaan pendapatan	%	21,33	-	20
2.8	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	%	100		100
3	**Kepegawaian**				
3.1	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	%	75,60	-	75,80
3.2	Indeks Profesionalitas ASN	%	80,11		80,50
4	**Pendidikan dan Pelatihan**				
4.1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	indeks	28,36	28	29,00
5	**Penelitian dan Pengembangan**				
5.1	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	51,50	56,15	56,05
5.2	Persentase kebijakan berbasis bukti	%	100	-	100
6	**Inspektorat**				
6.1	Persentase Pemenuhan Indikator MSCP	%	75,40	-	82
6.2	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level	3,00	-	3,00
6.3	Survey penilaian integritas (SPI) KPK	Nilai	76,52	3	78,88
6.4	Nilai Evaluasi Akuntabel Kinerja Internal	Nilai	18,31		18,32
6	**Kewilayahan**				
6.1	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yg aktif	%	100	100	100
6.2	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang	%	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi Tahun 2025	Target	
				RKPD Tahun 2026	Perubahan RKPD Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
7	**Kesatuan Bangsa dan Politik**				
7.1	Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang Aktif	%	93,00	90,76	93,21
7.2	Persentase penanganan konflik sosial yg terjadi di tengah masyarakat	%	100	100	100
7.3	Indeks Harmoni Indonesia	indeks	6,97		7
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)					
I	**Layanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar**				
1	**Pendidikan**				
1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	82,91	98,00	98,00
1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	103,35	100	100
1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	119,90	100	100
1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	59,23	75,55	75,55
2	**Kesehatan**				
2.1	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Angka	0,22	0,35	0,35
2.2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang terakreditasi	%	100	100	100
2.3	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100
2.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100
2.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100
2.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	86,00	90	90
2.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
2.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
2.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
2.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	99,87	100	100
2.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
2.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100
2.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100
2.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	76,41	100	100
3	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
3.1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	86,08	83,50	86,08
3.2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	90,69	100	100
3.3	Persentase jumlah rumah tangga memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	-	97,55	-
3.4	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	35,53	100	35,68

NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi Tahun 2025	Target	
				RKPD Tahun 2026	Perubahan RKPD Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
3.5	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	%	78,65	87,52	82,80
3.6	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	0,75	100
3.7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100
4	**Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**				
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	-	100
4.2	Persentase Kawasan pemukiman Kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani,	%	0	0	0
4.3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni	%	2,30	5,00	2,19
4.4	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	15,90	165	16,06
5	**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**				
5.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100
5.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100
5.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100
5.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100
5.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100
5.7	Waktu tanggap (response time) pananganan kebakaran	mnt	6,20	5,25	5,25
6	**Urusan Sosial**				
6.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	100	100	100
6.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten / Kota	%	100	100	100
II	**Layanan Urusan Wajib Terkait Non Pelayanan Dasar**				
1	**Urusan Ketenagakerjaan**				
1.1	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	%	100	100	100
1.2	Persentase Tenaga Kerja Bersetifikat Kompetensi	%	13,80	3,87	3,87
1.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rp/Tenaga Kerja	68,75	557,689,026	71,50
1.4	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	48,44	77	50,79
1.5	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	%	16,65	46,35	16,73
2	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				
2.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	7,47	-	7,50
2.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100	-	100
2.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan)	%	0,006	-	0,016
3	**Urusan Pangan**				
3.1	Persentase cadangan pangan	%	143,05	-	145,66

NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi Tahun 2025	Target	
				RKPD Tahun 2026	Perubahan RKPD Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
4	**Urusan Pertanahan**				
4.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100
4.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	100
4.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	100	100	100
4.4	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	-	10	100
5	**Urusan Lingkungan Hidup**				
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten/Kota	Nilai	70,67	58,72	70,67
5.2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	94,57	98,50	98,50
5.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	75	76	76
6	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
6.1	Perekaman KTP elektronik	%	99,49	99,60	99,60
6.2	Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	68,26	63,5	68,26
6.3	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	99,51	99,35	99,51
6.4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	100	100	100
7	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				
7.1	TFR (Angka Kelahiran Tortal)	%	2,33	2,65	2,29
7.2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	62,30	57,00	63,80
7.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	13,20	17,00	11,20
8	**Perhubungan**				
8.1	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	%	0,56	0,38	0,56
8.2	Kinerja Lalu Lintas Kaupaten/ Kota	%	0,37	0,37	0,36
9	**Urusan Komunikasi dan Informatika**				
9.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100
9.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	93,45	94	94
9.3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	80,00	100	86
10	**Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**				
10.1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	21,55	-	30,09
10.2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	18,35	-	65,20
11	**Urusan Penanaman Modal**				
11.1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	%	7,74	34,00	34,00
12	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**				
12.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	15,22	150	17,50
12.2	Peningkatan prestasi olahraga	%	30,00	69	69
12.3	Tingkat partisipasi pemuda dalam dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,33	0,65	0,65
13	**Urusan Statistik**				
13.1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100
13.2	Persentase OPD yang menggunakan data	%	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi Tahun 2025	Target	
				RKPD Tahun 2026	Perubahan RKPD Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
	statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah				
14	**Urusan Persandian**				
14.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	49,76	50	50
15	**Urusan Kebudayaan**				
15.1	Terlestarikan cagar Budaya	%	100	100	100
16	**Urusan Perpustakaan**				
16.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	58,43	75	66,30
16.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	16,32	71,00	72,25
17	**Urusan Kearsipan**				
17.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	%	70,97	81,2	81,2
17.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	0	94,16	30
III	**Layanan Urusan Pilihan**				
1	**Urusan Kelautan dan Perikanan**				
1.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	572,35	590	575
2	**Urusan Pariwisata**				
2.1	persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-96,00	80,25	80,25
2.2	persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten / kota	%	-64,00	13	5,5
2.3	Tingkat Hunian Akomodasi	%	5,85	30	13
2.4	kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,60	1	1
2.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	17,99	-	30
3	**Urusan Pertanian**				
3.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (Produktivitas padi)	ton/Ha	5,76	5,8	5,8
3.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	16,60	70	70
4	**Urusan Perdagangan**				
4.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	46,15	100	63,22
4.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	63,35	60	63,35
4.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan erlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	63,37	52	63,37
5	**Urusan Perindustrian**				
5.1	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	%	54,60	3	54,60
5.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	123,00	70	123,00
5.3	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	%	13,68	10	13,7
5.4	Persentase Jumalah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	%	0	5	5
5.5	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini	%	60,00	ada	61,67

NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi Tahun 2025	Target	
				RKPD Tahun 2026	Perubahan RKPD Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
	Fungsi Pendukung				
1	**Kesekretariatan Daerah**				
1.1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan secara kompetitif	%	89,24	70	89,40
1.2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	17,31	15	17,40
1.3	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	-7,08	70	7
	Fungsi Penunjang				
1	**Keuangan**				
1.1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	28,81	30	30
1.2	Rasio PAD (thdp PAD non migas)	%	18,40	12	18,40
1.3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	84,73	80	80
1.4	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-10,05	-9,00	-9,00
1.5	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	5,62	600	600
1.6	Manajemen Aset	ada/tidak	ada	ada	ada
1.7	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	12,36	10	10
2	**Kepegawaian**				
2.1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasarl (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	84,35	81,1	84,35
2.2	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	31,08	29,40	31,08
2.3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	27,36	27,55	27,55
3	**Inspektorat**				
3.1	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	level	3,00	3	3,00
3.2	Maruritas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	indeks	2,917	3	3,00

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh, Tahun 2026 data diolah

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah memberikan pedoman dalam penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan daerah, yang salah satunya yaitu penyusunan dokumen perubahan RKPD. Merujuk Pasal 343 ayat (1), perubahan RKPD dan Renja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/ atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Selain itu pada ayat (4) juga dinyatakan bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Berpedoman pada aturan di atas, maka penyusunan dokumen perubahan RKPD Tahun 2026 perlu dilakukan dikarenakan :

1. Tambahan TKD dan Bantuan Presiden sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024 bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Tambahan TKD dan bantuan Presiden ditujukan untuk percepatan penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat pascabencana yang terjadi pada akhir November 2025. Dana tersebut masuk pada tahun 2026, yang diarahkan untuk pelaksanaan program penanggulangan bencana, mitigasi bencana maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Kebakaran pasar pusat blok barat Kota Payakumbuh yang terjadi pada 26 Agustus 2025 yang memerlukan perhatian lanjutan untuk tahun 2026 yang sekaligus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk pasar lainnya yang ada di Kota Payakumbuh demi mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam berbelanja maupun bertransaksi ekonomi di wilayah Kota Payakumbuh;
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional telah mengatur standar harga satuan terbaru yang menyebabkan perlunya penyesuaian harga pada perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026;
4. Pergeseran anggaran antar program, kegiatan dan sub kegiatan untuk dapat memenuhi kebutuhan terhadap program prioritas daerah dan nasional;

5. Perubahan regulasi baik pusat dan daerah yang perlu penyesuaian dalam pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026.

Oleh karenanya dengan adanya kondisi tersebut, perubahan RKPD Tahun 2026 dilakukan pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

V.1 URUSAN WAJIB

V.1.1 URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN PELAYANAN DASAR

V.1.1.1 URUSAN PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan memperoleh alokasi anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.129.626.947.265,00 yang terdiri dari 4 program, 14 kegiatan dan 88 sub kegiatan, pagu APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.181.317.058.458,- terdiri dari 3 program, 11 kegiatan dan 54 sub kegiatan, dan pada pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026 mengalami penambahan sebesar Rp.51.690.111.193,- sehingga APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.181.317.058.458,-. Untuk Perubahan RKPD Tahun 2026 diajukan menjadi Rp.184.045.778.632,- terdiri dari 3 program, 12 kegiatan dan 61 sub kegiatan yang bersumber dari tambahan TKD dan Bantuan Presiden. Selisih anggaran RKPD Tahun 2026 dengan Perubahan RKPD Tahun 2026 adalah sebesar Rp.54.418.831.367,-.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan dijelaskan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.98.707.550,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.72.356.650,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi 26.350.900,-. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.116.350.900,- atau bertambah Rp.17.643.350,- dari RKPD Tahun 2026 untuk Jasa Konsultansi Survey Sarana dan Prasarana SD dan SMP Negeri Kota Payakumbuh.

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.269.542.450,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.117.083.450,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.152.459.000,- Dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.124.509.000,- atau berkurang Rp.145.033.450,- dari RKPD Tahun 2026 untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana.

c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.7.475.000,- namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.4.887.500,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.2.587.500,- atau berkurang Rp.3.450.000,- dari RKPD Tahun 2026.

d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah, dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.5.893.750,- namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran dalam rangka kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp.3.450.000,- sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.2.443.750,- atau berkurang sebesar Rp.3.450.000,- dari RKPD Tahun 2026.

2. Kegiatan Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. dengan pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.101.684.487.310,-, namun mengalami penambahan anggaran pada tahapan pembahasan sebesar Rp.43.111.163.928,-, sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.144.795.651.238,- dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.139.594.174.477,- atau adanya penambahan

Rp.37.909.687.167,- yang bersumber dari penyesuaian DAU Kelurahan (Rp.812.691.581,-), Dana Banpres (Rp.2.500.000.000,-) ,Gaji P3K Paruh Waktu (Rp.1.888.785.180,-) dan pergeseran selama pembahasan APBD sampai dengan Perubahan RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.32.708.210.406.

3. **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
   Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.45.175.000,-, namun pada pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.22.587.500,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.22.587.500,-
4. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
   Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.69.710.700,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.69.710.700,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,- .
5. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.30.008.500,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.15.551.500,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.14.457.000,-
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.106.534.350,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.106.534.350,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-
   c. Sub Kegiatan Bahan logistik Kantor, dengan pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.186.197.660,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.81.385.560,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.104.812.300,-
   d. Sub Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.65.580.800,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.9.750.800,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.55.810.000,-
   e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.44.172.000,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.20.972.000,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.23.200.000,-
   f. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.13.995.500,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.5.370.500,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.8.625.000,-
   g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.315.535.000,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.215.586.000,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.99.949.000,-.

h. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.7.475.000,-, namun pada tahapan pembahasan KUA- PPAS pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.2.587.500,- atau mengalami mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.4.887.500,- akibat kebijakan efisiensi anggaran. Sementara pada Perubahan RKPD Tahun 2026 anggaran menjadi Rp.8.037.500,- untuk memenuhi kegiatan penertiban penataan arsip.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.96.657.000,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.96.657.000,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-

b. Sub Kegiatan Pengadaan Meubel, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.120.804.950,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.120.804.950,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-.

c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.81.861.050,-, namun pada tahapan pembahasan pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.0,- akibat kebijakan efisiensi anggaran. Dan pada Perubahan RKPD menjadi Rp.32.367.500,- Penambahan anggaran diperuntukkan untuk pembelian 1)Mesin finger Kantor Bersama Padang Kaduduak; 2)Alat-alat untuk koneksi jaringan internet Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dengan Jaringan Kominfo..

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.244.544.000,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.49.258.000,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.195.256.000,- Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 anggaran menjadi Rp.201.257.000,- atau terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.6.001.000,- untuk pembayaran hutang pembayaran listrik Dinas Pendidikan bulan Desember Tahun 2026.

b. Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.270.525.120,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.119.220.000,-, sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.389.745.120,-. Namun pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.406.930.960,- yang digunakan untuk pembayaran gaji THR untuk PPPK Paruh Waktu.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.137.406.060,-namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.914.760,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.136.491.300,- dan pada anggaran Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.2.808.000,- perubahan terjadi karena adanya pergeseran nomor rekening sesuai HSPK.

B. Program Pengelolaan Pendidikan

1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.639.995.850,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.439.996.850,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.199.999.000,- Dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.1.322.578.650,- yang digunakan untuk : 1)Pembangunan Pagar dan Gerbang SDN 60 Payakumbuh; 2)Pembangunan Dam Pagar SDN 56 Payakumbuh; 3)Pembangunan Gerbang SDN 01 Payakumbuh; 4)Pembangunan sarana dan prasarana (Halaman) SDN 58 Payakumbuh; 5)Pembangunan Pagar SDN 40 Payakumbuh.

b. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.426.991.600,- namun pada tahapan pembahasan pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.0,- akibat kebijakan efisiensi anggaran. Dan pada pagu Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.88.217.250,- yang difokuskan untuk Rehab Ruang Guru SDN 57 Payakumbuh.

c. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.353.349.650,- namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 353.349.650,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan anggaran Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-

d. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.149.682.000,- namun pada tahapan pembahasan pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.0,- akibat kebijakan efisiensi anggaran. Dan pada anggaran Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.250.664.000,- yang difokuskan pada Rehab Rumah Dinas SDN 13 Payakumbuh.

e. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.1.468.224.700,- namun pada tahapan pembahasan pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.0,- akibat kebijakan efisiensi anggaran. Dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.105.326.600,- yang digunakan untuk SDN 40 Payakumbuh dan SDN 20 Payakumbuh.

f. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.215.640.900,- namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.52.998.000,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.162.642.900,- Dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.281.702.900,- untuk hadiah lomba, honor juri dan perjalanan dinas peserta lomba (dimana mulai tahun ini tidak lagi ditanggung oleh Kemendikdasmen).

g. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.2.031.729.850,- namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.1.646.937.700,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.384.792.150,-. Dan pada anggaran Perubahan RKPD Tahun 2026 diajukan menjadi Rp.1.523.845.000,- atau berkurang Rp.507.884.415,- dengan memastikan ketersediaan Gaji PPPK Paruh Waktu (Operator Layanan Operasional dan Guru).

h. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.140.883.800,- namun pada tahapan pembahasan mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.79.704.550,- untuk kegiatan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.220.588.350,-.
i. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.15.908.950,-, namun pada tahapan pembahasan pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.0,- akibat kebijakan efisiensi anggaran. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.42.750.000,- atau terjadi penambahan anggaran untuk hadiah lomba sekolah.
j. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.0,- namun pada tahapan pembahasan mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.15.010.450.000,- yang bersumber dari DAK Non Fisik BOS Reguler dan Bos Kinerja, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.15.010.450.000,-.
k. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.42.725.500,-namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.42.725.500,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-.
l. Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.233.720.400,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.233.720.400,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-
m. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.411.906.325,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.411.906.325,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-
n. Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur TIK, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.227.700.000,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.227.700.000,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-
o. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.18.751.650,- namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.7.691.550,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.11.060.100,-.
p. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.209.996.500,- namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.209.996.500,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-
q. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.1.368.147.650,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran sebesar

Rp.849.278.650,-, sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.518.869.000,- Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.950.864.100,- yang difokuskan untuk : 1); Pengecatan dan Perbaikan Dinding SDN 21 Payakumbuh; 2)Rehab Sarana dan Prasarana SDN 24 Payakumbuh; 3)Rehab Toilet SDN 59 Payakumbuh.

r. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.1.180.891.900,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp.981.558.400,- sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.199.333.500,- Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.1.010.891.500,- yang difokuskan untuk : 1)Rehab Sedang Ruang Kelas SDN 35 Payakumbuh; 2)Rehab Sedang Ruang Kelas SDN 38 Payakumbuh; 3)Rehab Sedang Ruang Kelas SDN 39 Payakumbuh; 4)Rehab Sedang Ruang Kelas SDN 65 Payakumbuh; 5)Rehab Sedang Ruang Kelas SDN 20 Payakumbuh.

2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

a. Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.341.673.550,- namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.341.673.550,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-

b. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.338.424.100,-, namun pada tahapan pembahasan pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.0,- akibat kebijakan efisiensi anggaran. Dan pada tahap Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.2.251.358.000,- atau terdapat penambahan anggaran untuk : 1)Pembangunan Dam Pagar SMPN 3 Payakumbuh 2)Pembangunan Kanopi SMPN 1 Payakumbuh.

c. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.603.617.200,-, namun mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.603.617.200,- akibat kebijakan efisiensi pada pembahasan , sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-.

d. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.188.465.700,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.188.465.700,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-.

e. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.366.639.000,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.366.639.000,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-.

f. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.190.573.950,-, namun pada tahapan pembahasan pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.0,- akibat kebijakan efisiensi anggaran. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.151.974.000,- yang difokuskan pada Rehab Rumah Dinas SMPN 7 Payakumbuh.

g. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.513.108.000,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp.280.832.250,- sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.232.276.760,- Pada perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.683.588.000,-yang difokuskan pada 1)Rehab Pagar SMPN 5 Payakumbuh; 2)Rehab Pagar SMPN 7 Payakumbuh

h. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, dengan dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.261.200.350,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar

Rp.31.178.000,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.250.022.350,-. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.388.344.350,-

i. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.808.813.100,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.737.965.700,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.68.847.400,- Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.431.519.110,- yang difokuskan untuk Gaji PPPK Paruh Waktu (Operator Layanan Operasional dan Guru).
j. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.54.493.950,-, namun pada tahapan pembahasan KUA- PPAS mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.9.983.800,- akibat penyesuaian dengan SSH, sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.64.477.750,- dan anggaran Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.65.977.750,-
k. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.22.810.850,-. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.75.205.350,- atau terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.52.394.500,- untuk makan dan minum pelaksanaan SPMB dan untuk hadiah lomba sekolah.
l. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.0,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami penambahan anggaran yang bersumber dari DAK Non Fisik (BOS Reguler dan BOS Kinerja), sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.9.391.550.000,- .
m. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.13.943.750,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.13.943.750,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-.
n. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.20.939.700,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.9.877.350,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.11.062.350,-
o. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.97.800.000,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.97.800.000,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-.
p. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah /TU, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.112.175.250,- namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.112.175.250,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-.
q. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.285.604.510,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.285.604.510,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-.
r. Sub Kegiatan Penyediaan infrastruktur TIK, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.40.000.000,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.40.000.000,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-.

3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan PAUD

a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.89.999.600,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-

b. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.2.959.787.000,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.2.928.518.800,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.31.268.200,- Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 disesuaikan untuk Gaji PPPK Paruh Waktu (Operator Layanan Operasional) menjadi Rp.44.276.665,-.

c. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.239.352.950,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.719.487.050,- untuk penyesuaian SSH, sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.958.870.000,- Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.964.745.900,- karena penyesuaian SSH.

d. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.351.333.050,- namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.142.851.800,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.208.481.450,- Dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.255.581.450,-

e. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.0,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.2.934.300.000,- dengan sumber dana dari DAK Non Fisik (Dana BOSP-BOP PAUD Reguler dan BOSP-BOP PAUD Kinerja), sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.2.934.300.000,-.

f. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.49.601.400,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp.49.601.400,-, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-.

g. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.58.999.600,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp.22.589.200,-, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.36.410.400,-.

h. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.30.240.750,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran sebesar sebesar Rp.11.380.100,-, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.18.860.650,-.

i. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.49.557.700,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp.49.557.700,-, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-.

j. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.397.256.000,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp.397.256.000,-, sehingga anggaran

pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-.

4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non-Formal/ Kesetaraan

a. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.3.849.933.000,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp.3.792.333.000,-, sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.57.600.000,- Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.98.753.085,- yang difokuskan untuk Gaji PPPK Paruh Waktu (Operator Layanan Operasional) dan penyesuaian dengan SSH.

k. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.34.941.000,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp.9.524.800,-, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.25.416.200,-.

l. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.0,-, namun pada tahapan KUA- PPAS mengalami penambahan anggaran yang bersumber dari DAK Non Fisik (Dana BOSP-BOP Kesestaraan Reguler dan BOSP-BOP Ksetaraan Kinerja) sebesar Rp.2.006.000.000,-, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.2.006.000.000,- .

m. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.11.838.250,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp.11.838.250,-, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-.

n. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.41.683.900,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp.23.933.250,-, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.17.750.650,-.

o. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.35.000.000,-, namun pada tahapan pembahasan KUA- PPAS mengalami pengurangan anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp.35.000.000,-, sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-.

p. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.1.098.480.500,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp.826.853.250,-, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.271.627.250,-.

b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.27.073.780,-, namun pada tahap KUA- PPAS mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.19.645.930,-, sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.7.427.850,- Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 anggaran menjadi Rp.8.277.850,-.

q. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.179.238.000,-, namun mengalami pengurangan anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran pada tahap sebesar Rp.179.238.000,-, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-

r. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.483.683.400,-, namun mengalami pengurangan anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran pada tahap sebesar Rp.483.683.400,-, sehingga anggaran

pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-.

C. **Program Pengembangan Kurikulum yang terjadi pada Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan lokal Pendidikan Dasar** dengan Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.29.229.700,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp.29.229.700,-, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-.

D. **Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terjadi pada Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** pada Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.173.335.150,-, namun pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp.74.750.500,-, sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.98.584.650,- pada Perubahan RKPD Tahun 2026 diusulkan menjadi Rp.131.088.050,-

V.1.1.2 URUSAN KESEHATAN

Dalam melaksanakan urusan kesehatan, dalam dokumen RKPD tahun 2026 dianggarkan Rp.210.388.048.641,- yang terdiri dari 5 Program, 19 Kegiatan dan 85 Sub Kegiatan, selanjutnya dalam dinamika pembahasan APBD di DPRD menjadi Rp.216.830.790.014,- pada APBD Anggaran 2026 yang terdiri dari 5 Program, 19 Kegiatan dan 202 Sub Kegiatan. Namun dalam pelaksanaannya dibutuhkan penambahan anggaran untuk melaksanakan urusan kesehatan, sehingga pada perubahan RKPD tahun 2026 diusulkan menjadi Rp.231.051.798.514,- atau naik sebesar Rp.20.663.749.873,- yang dirincikan pada 5 program, 19 kegiatan dan 203 sub kegiatan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan dijelaskan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp.115.018.275,- dengan terjadinya dinamika pembahasan APBD dengan DPRD berkurang sebesar Rp.53.810.050,- sehingga menjadi Rp.61.208.225,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026.

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp.77.567.700,- dengan terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD berkurang sebesar Rp.38.173.450,- sehingga menjadi Rp.39.394.250,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD tahun 2026.

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah pada RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp.8.100.000,- dengan terjadinya dinamika pembahasan APBD dengan DPRD berkurang sebesar Rp.6.892.500,- sehingga menjadi Rp.1.207.500,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD tahun 2026.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN memiliki pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.83.966.273.294,- dengan terjadinya dinamika pembahasan APBD dengan DPRD berkurang sebesar

Rp.782.286.317,- sehingga menjadi Rp.83.183.986.977,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD tahun 2026.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada RKPD tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp.663.480.000,- dengan terjadinya dinamika pembahasan APBD dengan DPRD berkurang sebesar Rp.19.320.000,- sehingga menjadi Rp.644.160.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD tahun 2026.

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pada RKPD tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp.49.999.850,- dengan terjadinya dinamika pembahasan APBD dengan DPRD berkurang sebesar Rp.30.400.350,- sehingga menjadi Rp.19.599.500,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD tahun 2026.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya pada RKPD tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 399.999.700,- dengan terjadinya dinamika pembahasan APBD dengan DPRD berkurang sebesar Rp.399.999.700,- sehingga menjadi Rp.0,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD tahun 2026.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor pada RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp.9.999.750,- dengan terjadinya dinamika pembahasan APBD dengan DPRD berkurang sebesar Rp7.574.250 sehingga menjadi Rp. 2.425.500,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD tahun 2026.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga pada RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 11.200.000,- dengan terjadinya dinamika pembahasan APBD dengan DPRD berkurang sebesar 11.200.000,- sehingga menjadi Rp.0,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD tahun 2026.

c. Sub Kegiatan Penyediaan logistik kantor pada RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 49.999.610,- dengan terjadinya dinamika pembahasan APBD dengan DPRD berkurang sebesar Rp.26.774.150,- sehingga menjadi Rp.23.225.460,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD tahun 2026.

d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- dengan terjadinya dinamika pembahasan APBD dengan DPRD berkurang sebesar Rp.23.140.500,- sehingga menjadi Rp.16.859.500,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD tahun 2026.

e. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu pada RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp.9.999.250,- dengan terjadinya dinamika pembahasan APBD dengan DPRD berkurang sebesar Rp.5.974.250,- sehingga menjadi Rp.4.025.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD tahun 2026.

f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD memiliki pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.399.999.800,- dengan terjadinya dinamika pembahasan APBD dengan DPRD berkurang sebesar Rp.287.665.800,- sehingga menjadi Rp.112.334.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD tahun 2026.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan memiliki pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.723.140.000,- dengan terjadinya dinamika pembahasan APBD dengan DPRD berkurang sebesar Rp.723.140.000,- sehingga menjadi Rp.0,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD tahun 2026.

b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel memiliki pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.392.510.000,- dengan terjadinya dinamika pembahasan APBD dengan DPRD berkurang sebesar Rp.392.510.000,- sehingga menjadi Rp.0,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD tahun 2026.

c. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya memiliki pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.150.000.000,- dengan terjadinya dinamika pembahasan APBD dengan DPRD berkurang sebesar Rp.150.000.000,- sehingga menjadi Rp.0,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD tahun 2026.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat memiliki anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.2.000.000,- dengan terjadinya dinamika pembahasan APBD dengan DPRD berkurang sebesar Rp.1.000.000,- hingga menjadi Rp.1.000.000 pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD tahun 2026.

b. Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor memiliki pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 1.163.201.600,- dengan terjadinya dinamika pembahasan APBD dengan DPRD bertambah sebesar Rp.200.427.560,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 sehingga menjadi Rp1.363.629.160,-. pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD tahun 2026.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan memiliki pagu sebesar Rp.450.000.000,- dengan terjadinya dinamika pembahasan APBD dengan DPRD berkurang Rp.106.950.000,- sehingga menjadi Rp.343.050.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD tahun 2026.

b. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya memiliki pagu sebesar Rp.15.000.000,- dengan terjadinya dinamika pembahasan APBD dengan DPRD berkurang sebesar Rp.330.000,- sehingga menjadi Rp.14.670.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD tahun 2026.

8. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

a. Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD) memiliki pagu Rp.76.000.000.000,- kemudian terjadi penambahan pada APBD dan Perubahan RKPD 2026 sebesar Rp.8.132.406.716 sehingga menjadi Rp.84.132.406.716,- disebabkan penambahan pendapatan BLUD dan penggunaan silpa 2025.

b. Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Ibuh) memiliki pagu Rp.1.395.384.848,- kemudian terjadi penambahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan perubahan RPKD 2026 sebesar Rp.50.000.000,- sehingga menjadi Rp.1.445.384.848,- disebabkan penambahan pendapatan BLUD dan penggunaan silpa 2025.

c. Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Parit Rantang) memiliki pagu Rp.1.003.051.463,- kemudian terjadi penambahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD 2026 sebesar Rp.55.342.502,- sehingga menjadi Rp.1.058.393.965,- disebabkan penambahan pendapatan BLUD dan penggunaan silpa 2025

d. Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Payolansek) memiliki pagu Rp.991.607.995,- kemudian terjadi penambahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD 2026 sebesar Rp.62.318.895,,- sehingga menjadi Rp.1.053.926.890,- disebabkan penambahan pendapatan BLUD dan penggunaan silpa 2025

e. Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Tiakar) memiliki pagu Rp.1.005.107.000,- kemudian terjadi penambahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD 2026 sebesar Rp.28.553.000,- sehingga menjadi Rp.1.033.660.000,- disebabkan penambahan pendapatan BLUD dan penggunaan silpa 2025

f. Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Air Tabit) memiliki pagu Rp.1.140.605.000,- kemudian terjadi penambahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD 2026 sebesar Rp.14.000.000,- sehingga menjadi Rp.1.154.605.000,- disebabkan penambahan pendapatan BLUD dan penggunaan silpa 2025

g. Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Tarok) memiliki pagu Rp.1.432.027.000,- kemudian terjadi penambahan pada APBD

Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD 2026 sebesar Rp.59.000.000,- sehingga menjadi Rp.1.491.027.000,- disebabkan penambahan pendapatan BLUD dan penggunaan silpa 2025

h. Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas lampasi) memiliki pagu Rp. 1.310.000.000,,- kemudian terjadi penambahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD 2026 sebesar Rp.70.000.000,- sehingga menjadi Rp.1.380.000.000,- disebabkan penambahan pendapatan BLUD dan penggunaan silpa 2025
i. Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Padang Karambia) memiliki pagu Rp.893.622.000,- kemudian terjadi penambahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD 2026 sebesar Rp.35.000.000,- sehingga menjadi Rp.928.622.000,- disebabkan penambahan pendapatan BLUD dan penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2025.

B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota

a. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas memiliki pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.3.179.999.850,- dengan terjadinya dinamika pembahasan APBD dengan DPRD berkurang sebesar Rp.3.179.999.850,- sehingga menjadi Rp.0,- pada APBD Tahun Anggaran 2026, kemudian menjadi Rp.463.255.750,- pada Perubahan RKPD 2026 yang disesuaikan untuk fokus pada rehab puskesmas .
b. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan lainnya memiliki pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.999.999.950,- dengan terjadinya dinamika pembahasan APBD dengan DPRD menjadi Rp.244.158.300,- pada APBD Tahun Anggaran 2026, kemudian menambah sebesar Rp. 1.013.367.100,- sehingga menjadi sebesar Rp.2.013.367.050,- pada Perubahan RKPD tahun 2026, dikarenakan adanya biaya untuk merehab pustu.
c. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan memiliki pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan terjadinya dinamika pembahasan APBD dengan DPRD berkurang sebesar Rp. 1.312.875.200,- sehingga menjadi Rp.687.124.800,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026.
d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan memiliki pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.100.000.000,- dengan terjadinya dinamika pembahasan APBD dengan DPRD bertambah sebesar Rp.14.955.000,- sehingga menjadi Rp. 114.955.000,,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026.
e. Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit pada RKPD Tahun 2026 mempunyai pagu sebesar Rp. 0.- dengan terjadinya dinamika pembahasan APBD dengan DPRD bertambah sebesar Rp.1.903.373.000,- kemudian bertambah Rp.11.988.544.000,- sehingga menjadi Rp.13.891.917.000,- pada Perubahan RKPD Tahun 2026 dikarenakan adanya biaya untuk Pengembangan Rumah Sakit dengan sumber dana TKD
f. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga memiliki pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.99.999.800,- dengan terjadinya dinamika pembahasan APBD dengan DPRD berkurang sebesar Rp.76.139.500,- sehingga menjadi Rp.23.860.300,- pada APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2026
g. Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (UPTD Farmasi) memiliki pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 5.000.108.750,- dengan terjadinya dinamika pembahasan APBD dengan DPRD berkurang sebesar Rp. 2.830.244.428,- sehingga menjadi Rp.2.169.864.322,- pada APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2026

h. Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan (UPTD Farmasi) memiliki pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.100.000.000,- dengan terjadinya dinamika pembahasan APBD dengan DPRD berkurang sebesar Rp.37.917.000,- sehingga menjadi Rp. 62.083.000,,- pada APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2026 karena adanya efesiensi anggaran

2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota

1) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil (Dinkes) memiliki pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 299.999.900,- kemudian berkurang sebesar Rp. 255.768.100,- sehingga menjadi Rp. 44.231.800,- pada APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2026 karena penyesuaian anggaran DAK
2) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil (Puskesmas Ibuh) mempunyai anggaran Rp.0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.22.496.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD Untuk perubahan RKPD Tahun 2026 masih memiliki anggaran yang sama dengan APBD Tahun Anggaran 2026 yang mana anggaran ini merupakan penyesuaian DAK
3) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil (Puskesmas Parit Rantang) mempunyai anggaran Rp.0,- pada RKPD 2026 dan menjadi Rp.13.687.500,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Untuk Perubahan RKPD Tahun 2026, masih memiliki anggaran Rp.13.687.500,- yang merupakan penyesuaian anggaran DAK
4) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil (Puskesmas Payolansek) mempunyai anggaran Rp.0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.19.737.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.19.737.000,- sehingga menjadi Rp.19.737.000,- pada APBD dan Perubahan RKPD 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK
5) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil (Puskesmas Tiakar) mempunyai anggaran Rp.0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.19.568.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.19.568.000,- Sehingga menjadi Rp.19.568.000,- pada APBD dan Perubahan RKPD 206 disebabkan penyesuaian anggaran DAK
6) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil (Puskesmas Air Tabit) mempunyai anggaran Rp.0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.15.663.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.15.663.000,- dan menjadi Rp.15.663.000,- pada APBD dan Perubahan RKPD 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK
7) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil (Puskesmas Tarok) mempunyai anggaran Rp.0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.21.534.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.21.534.000,- dan menjadi Rp.21.534.000,- pada APBD dan Perubahan RKPD 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK
8) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil (Puskesmas Lampasi) mempunyai anggaran Rp.0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.26.316.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.26.316.000,- dan menjadi Rp.26.316.000,- pada APBD dan Perubahan RKPD 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK
9) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil (Puskesmas Padang Karambia) mempunyai anggaran Rp.0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi

Rp.22.245.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.22.245.000,- dan menjadi Rp.22.245.000,- pada APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Dinkes) memiliki pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.19.999.700,- kemudian bertambah sebesar Rp.15.231.250,- sehingga menjadi Rp. 35.230.950,- pada APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2026 karena penyesuaian anggaran DAK
11) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Dinkes) mempunyai anggaran Rp.299.999.800,- kemudian bertambah sebesar Rp.70.416.900,- sehingga menjadi Rp.370.416.700,- pada APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2026 karena penyesuaian anggaran DAK
12) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita mempunyai anggaran Rp.50.000.000,- kemudian berkurang sebesar Rp.11.520.450,- sehingga menjadi Rp.38.479.550,- pada APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2026 karena penyesuaian anggaran DAK
13) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Dinkes) mempunyai anggaran Rp.50.000.000,- kemudian berkurang sebesar Rp.30.953.300,- sehingga menjadi Rp.19.046.700,- pada APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2026 karena penyesuaian anggaran DAK
14) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Ibuh) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.21.250.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.21.250.000,- dan menjadi Rp.21.250.000,- pada pada APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2026 karena penyesuaian anggaran DAK
15) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Parit Rantang) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.27.455.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.27.455.000,- dan menjadi Rp.27.455.000,- pada APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2026 karena penyesuaian anggaran DAK
16) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Payolansek) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.27.540.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.27.540.000,- dan menjadi Rp.27.540.000,- pada Perubahan RKPD 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK
17) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Tiakar) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.21.250.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.21.250.000,- sehingga menjadi Rp.21.250.000,- pada APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2026 karena disebabkan penyesuaian anggaran DAK
18) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Air Tabit) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.31.705.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.31.705.000,- sehingga menjadi Rp.31.705.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK
19) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Tarok) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.26.265.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran

2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.26.265.000,- dan menjadi Rp.26.265.000,- pada APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2026 karena penyesuaian anggaran DAK

20) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Lampasi) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.24.820.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.24.820.000,- dan menjadi Rp.24.820.000,- pada APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK
21) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Padang Karambia) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.20.740.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.20.740.000,- dan menjadi Rp.20.740.000,- pada APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK
22) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Dinkes) mempunyai anggaran Rp.49.999.750,- kemudian berkurang sebesar Rp.17.299.850,- sehingga menjadi Rp.32.699.900,- pada APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2026 karena penyesuaian anggaran DAK
23) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Dinkes) mempunyai anggaran Rp.124.999.850,- kemudian berkurang sebesar Rp.17.611.200,- sehingga menjadi Rp.107.388.650,- pada APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2026 karena penyesuaian anggaran DAK
24) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Dinkes) mempunyai anggaran Rp.29.999.700,- kemudian berkurang sebesar Rp.9.904.700,- sehingga menjadi Rp.20.095.000,- pada APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2026 karena penyesuaian anggaran DAK
25) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (Dinkes) mempunyai anggaran Rp.29.999.700,- kemudian berkurang sebesar Rp.9.228.700,- sehingga menjadi Rp. 20.771.000,- pada APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2026 karena penyesuaian anggaran DAK
26) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Dinkes) mempunyai anggaran Rp.9.999.700,- kemudian bertambah sebesar Rp.15.397.800,- sehingga menjadi Rp.25.397.500,- pada APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2026 karena penyesuaian anggaran DAK
27) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Ibuh) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.3.060.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.3.060.000,- dan menjadi Rp.3.060.000,- pada APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK
28) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Parit Rantang) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.6.800.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.6.800.000,- dan menjadi Rp.6.800.000,- pada APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK
29) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Payolansek) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.9.180.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.9.180.000,- dan menjadi Rp.9.180.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK
30) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Tiakar) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD

Tahun 2026 dan menjadi Rp.6.800.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.6.800.000,- dan menjadi Rp.6.800.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

31) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Air Tabit) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.10.880.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.10.880.000,,- dan menjadi Rp.10.880.000,,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK
32) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Tarok) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.14.960.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.14.960.000,- dan menjadi Rp.14.960.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK
33) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Lampasi) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.26.520.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.26.520.000,- dan menjadi Rp.26.520.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK
34) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Padang Karambia) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.7.650.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.7.650.000,- dan menjadi Rp.7.650.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK
35) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Dinkes) mempunyai anggaran Rp.499.999.900,- kemudian bertambah sebesar Rp.873.269.100,- sehingga menjadi Rp.1.373.269.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 karena penyesuaian anggaran DAK
36) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Ibuh) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp6.460.000,- pada APBD 20256 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp6.460.000,- dan menjadi Rp6.460.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK
37) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Parit Rantang) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.3.315.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.3.315.000,- sehingga menjadi Rp.3.315.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026disebabkan penyesuaian anggaran DAK
38) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Payolansek) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.10.370.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.10.370.000,- sehingga menjadi Rp.10.370.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026disebabkan penyesuaian anggaran DAK

39) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Tiakar) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.8.925.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.8.925.000,- dan menjadi Rp.8.925.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK
40) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Air Tabit) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.4.250.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.4.250.000,- dan menjadi Rp.4.250.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK
41) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Tarok) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.5.440.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.5.440.000,- dan menjadi Rp.5.440.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK
42) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Lampasi) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.5.610.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.5.610.000,- dan menjadi Rp.5.610.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK
43) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Padang Karambia) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.4.590.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.4.590.000,- dan menjadi Rp.4.590.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK
44) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Dinkes) mempunyai anggaran Rp.99.999.700,- kemudian berkurang sebesar Rp.32.942.000,- sehingga menjadi Rp.67.057.700,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026karena penyesuaian anggaran DAK
45) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (Dinkes) mempunyai anggaran Rp.49.999.900,- kemudian berkurang sebesar Rp.36.093.050,- sehingga menjadi Rp.13.906.850,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 karena penyesuaian anggaran DAK
46) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dinkes) mempunyai anggaran Rp.499.999.750,- kemudian berkurang sebesar Rp.95.809.830,- sehingga menjadi Rp.404.189.920,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 karena penyesuaian anggaran DAK
47) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Ibuh) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.119.874.750,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.119.874.750,- dan menjadi Rp.119.874.750,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK
48) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Parit Rantang) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan

menjadi Rp.44.122.650,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.44.122.650,- dan menjadi Rp.44.122.650,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

49) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Payolansek) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.83.357.050,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.83.357.050,- sehingga menjadi Rp.83.357.050,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

50) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tiakar) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.101.295.050,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.101.295.050,- dan menjadi Rp.101.295.050,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026disebabkan penyesuaian anggaran DAK

51) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Air Tabit) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.77.865.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.77.865.000,- dan menjadi Rp.77.865.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

52) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tarok) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.68.129.500,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.68.129.500,- dan menjadi Rp.68.129.500,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

53) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Lampasi) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.40.576.100,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.40.576.100,- dan menjadi Rp.40.576.100,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

54) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Padang Karambia) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.93.733.050,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.93.733.050,- dan menjadi Rp.93.733.050,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026disebabkan penyesuaian anggaran DAK

55) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dinkes) mempunyai anggaran Rp.49.999.700,- kemudian berkurang sebesar Rp.16.234.500,- sehingga menjadi Rp.33.765.200,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 karena penyesuaian anggaran DAK

56) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dinkes) mempunyai anggaran Rp.100.000.200,- kemudian bertambah sebesar Rp.491.306.950,- sehingga menjadi Rp.591.307.150,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026karena penyesuaian anggaran DAK

57) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Ibuh) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.10.200.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika

pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar. Rp.10.200.000,- dan menjadi Rp.10.200.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

58) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Parit Rantang) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.7.140.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.7.140.000,- dan menjadi Rp.7.140.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

59) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Payolansek) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.8.500.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.8.500.000,- dan menjadi Rp.8.500.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

60) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Tiakar) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.9.180.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.9.180.000,- dan menjadi Rp.9.180.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

61) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Air Tabit) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.8.330.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.8.330.000,- dan menjadi Rp.8.330.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

62) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Tarok) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.6.120.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.6.120.000,- dan menjadi Rp.6.120.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

63) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Lampasi) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.12.240.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.12.240.000,- dan menjadi Rp.12.240.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 isebabkan penyesuaian anggaran DAK

64) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Padang Karambia) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.3.060.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.3.060.000,- dan menjadi Rp.3.060.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026disebabkan penyesuaian anggaran DAK

65) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dinkes) mempunyai anggaran Rp.200.000.000,- kemudian bertambah sebesar Rp.109.051.700,- sehingga menjadi Rp.309.051.700,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026karena penyesuaian anggaran DAK

66) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya (Dinkes) mempunyai anggaran Rp.19.999.800,- kemudian berkurang sebesar Rp.8.125.600,- sehingga

menjadi Rp.11.874.200,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 20266 karena penyesuaian anggaran DAK

67) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dinkes) mempunyai anggaran Rp.50.000.000,- kemudian bertambah sebesar Rp.69.301.600,- sehingga menjadi Rp.119.301.600,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 karena penyesuaian anggaran DAK

68) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Ibuh) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.11.433.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.11.433.000,- dan menjadi Rp.11.433.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026disebabkan penyesuaian anggaran DAK

69) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Parit Rantang) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.14.178.200,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.14.178.200,- dan menjadi Rp.14.178.200,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

70) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Payolansek) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.14.508.800,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.14.508.800,- dan menjadi Rp.14.508.800,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

71) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Tiakar) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.17.850.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.17.850.000,- dan menjadi Rp.17.850.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

72) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Air Tabit) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.17.814.050,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.17.814.050,- dan menjadi Rp.17.814.050,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

73) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Tarok) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.17.340.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.17.340.000,- dan menjadi Rp.17.340.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

74) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Lampasi) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.10.517.800,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.10.517.800,- dan menjadi Rp.10.517.800,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

75) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Padang Karambia) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.10.949.600,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.10.949.600,- dan menjadi

Rp.10.949.600,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

76) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Ibuh) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.7.845.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.7.845.000,- dan menjadi Rp.7.845.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

77) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Parit Rantang) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.12.899.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.12.899.000,- dan menjadi Rp.12.899.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026disebabkan penyesuaian anggaran DAK

78) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Payolansek) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.31.005.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD 206 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.31.005.000,- dan menjadi Rp.31.005.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026disebabkan penyesuaian anggaran DAK

79) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Tiakar) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp. Rp,27.685.600,-pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp,27.685.600,- dan menjadi Rp,27.685.600,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026disebabkan penyesuaian anggaran DAK

80) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Air Tabit) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.19.322.500,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.19.322.500,- dan menjadi Rp.19.322.500,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026disebabkan penyesuaian anggaran DAK

81) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Tarok) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.28.500.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.28.500.000,- dan menjadi Rp.28.500.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

82) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Lampasi) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.20.060.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.20.060.000,- dan menjadi Rp.20.060.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026disebabkan penyesuaian anggaran DAK

83) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Padang Karambia) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.6.647.000,- pada

APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.6.647.000,- dan menjadi Rp.6.647.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026disebabkan penyesuaian anggaran DAK

84) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Dinkes) mempunyai anggaran Rp.49.999.950,- kemudian bertambah sebesar Rp.27.599.950,- sehingga menjadi Rp.22.400.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026karena penyesuaian anggaran DAK

85) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dinkes) mempunyai anggaran Rp.99.999.950,- kemudian bertambah sebesar Rp.326.483.050,- sehingga menjadi Rp.426.483.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 karena penyesuaian anggaran DAK

86) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Ibuh) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.36.890.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar 36.890.000,- sehingga menjadi 36.890.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

87) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Parit Rantang) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.32.395.800,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.32.395.800,- sehingga menjadi Rp.32.395.800,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026disebabkan penyesuaian anggaran DAK

88) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Payolansek) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.43.945.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.43.945.000,- sehingga menjadi Rp.43.945.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

89) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Tiakar) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.50.320.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.50.320.000,- dan menjadi Rp.50.320.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

90) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Air Tabit) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.30.685.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.30.685.000,- dan menjadi Rp.30.685.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

91) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Tarok) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.47.770.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.47.770.000,- dan menjadi Rp.47.770.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

92) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Lampasi) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.41.140.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena

adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD 206 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.41.140.000,- dan menjadi Rp.41.140.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026disebabkan penyesuaian anggaran DAK

93) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Padang Karambia) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.15.130.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.15.130.000,- dan menjadi Rp.15.130.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

94) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Ibuh) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.136.743.800,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.136.743.800,- menjadi Rp.136.743.800,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

95) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Parit Rantang) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026dan menjadi Rp.160.727.600,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.160.727.600,- sehingga menjadi Rp.160.727.600,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

96) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Payolansek) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.133.900.000,,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.133.900.000,- sehingga menjadi Rp.133.900.000,,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

97) ub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Tiakar) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.126.575.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.126.575.000,- dan menjadi Rp.126.575.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

98) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Air Tabit) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.127.775.500,,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.127.775.500,- sehingga menjadi Rp.127.775.500,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

99) SSub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Tarok) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.131.200.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.131.200.000,- dan menjadi Rp.131.200.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

100) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Lampasi) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.140.870.850,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.140.870.850,- dan menjadi Rp.140.870.850,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

101) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Padang Karambia) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.182.343.250,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.182.343.250,- dan menjadi Rp.182.343.250,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK
102) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dinkes) mempunyai anggaran Rp. 17.700.000.000,- kemudian bertambah sebesar Rp. 2.494.422.750,- sehingga menjadi Rp. 20.194.422.750,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 karena penambahan peserta Jaminan Kesehatan
103) Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (Dinkes) mempunyai anggaran Rp.20.000.000,- kemudian bertambah sebesar Rp.113.916.000,- sehingga menjadi Rp.133.916.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 karena penyesuaian satuan
104) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dinkes) mempunyai anggaran Rp.29.999.800,- kemudian bertambah sebesar Rp.14.035.000,,- sehingga menjadi Rp.44.034.800,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 karena penyesuaian satuan
105) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinkes) mempunyai anggaran Rp.175.000.000,- kemudian berkurang sebesar Rp.105.825.000,- sehingga menjadi Rp.69.175.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 karena penyesuaian satuan
106) Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Dinkes) mempunyai anggaran Rp.5.000.000,- kemudian bertambah sebesar Rp.735.000,- sehingga menjadi Rp.5.735.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 karena penyesuaian satuan
107) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Dinkes) mempunyai anggaran Rp.100.000.000,- kemudian bertambah sebesar Rp.229.229.750,- sehingga menjadi Rp.329.229.750,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 karena penyesuaian satuan
108) Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan tanpa rokok (Dinkes) mempunyai anggaran Rp.19.999.800,- kemudian bertkurang sebesar Rp.6.557.500,- sehingga menjadi Rp.13.442.300,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 karena penyesuaian satuan
109) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dinkes) mempunyai anggaran Rp.198.479.850,- kemudian berkurang sebesar Rp.198.479.850,- sehingga menjadi Rp.0,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026karena efisiensi
110) Sub Kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Dinkes) mempunyai anggaran Rp.0,- kemudian bertambah sebesar Rp.156.722.400,- sehingga menjadi Rp.156.722.400,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 karena penyesuaian satuan
111) Sub Kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Ibuh) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.510.000.,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD, kemudian terjadi penambahan pada Perubahan RKPD 2026 sebesar Rp.510.000,- sehingga menjadi Rp.510.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK
112) Sub Kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas parit Rantang) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.510.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD, kemudian terjadi penambahan pada Perubahan RKPD 2026 sebesar Rp.510.000,- sehingga menjadi Rp.510.000,- pada APBD

Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

113) Sub Kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Payolansek) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.1.700.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD, kemudian terjadi penambahan pada Perubahan RKPD 2026 sebesar Rp.1.700.000,- sehingga menjadi Rp.1.700.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026disebabkan penyesuaian anggaran DAK
114) Sub Kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Tiakar) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.1.275.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD, kemudian terjadi penambahan pada Perubahan RKPD 2026 sebesar Rp.1.275.000,- sehingga menjadi Rp.1.275.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026disebabkan penyesuaian anggaran DAK
115) Sub Kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Air Tabit) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.1.020.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD, kemudian terjadi penambahan pada Perubahan RKPD 2026 sebesar Rp.1.020.000,- sehingga menjadi Rp.1.020.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026disebabkan penyesuaian anggaran DAK
116) Sub Kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Tarok) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.1.700.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD, kemudian terjadi penambahan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.1.700.000,- sehingga menjadi Rp.1.700.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026disebabkan penyesuaian anggaran DAK
117) Sub Kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Lampasi) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.1.275.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026 di DPRD, kemudian terjadi penambahan pada Perubahan RKPD 2026 sebesar Rp.1.275.000,- sehingga menjadi Rp.1.275.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026disebabkan penyesuaian anggaran DAK
118) Sub Kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Padang Karambia) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.1.275.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD, kemudian terjadi penambahan pada Perubahan RKPD 2026 sebesar Rp.1.275.000,- sehingga menjadi Rp.1.275.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK
119) Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dinkes) mempunyai anggaran Rp.299.999.850,- kemudian berkurang sebesar Rp.212.891.100,- sehingga menjadi Rp.87.108.750,- pada APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 karena karena efisiensi
120) Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Imunisasi (Puskesmas Ibuh) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.25.500.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD, kemudian terjadi penambahan pada Perubahan RKPD 2026 sebesar Rp.25.500.000,- sehingga menjadi Rp.25.500.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026disebabkan penyesuaian anggaran DAK
121) Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Imunisasi (Puskesmas Parit Rantang) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.49.980.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD, kemudian terjadi penambahan pada Perubahan RKPD 2026 sebesar Rp.49.980.000,- sehingga menjadi

Rp.49.980.000,- disebabkan pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 penyesuaian anggaran DAK

122) Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Imunisasi (Puskesmas Payolansek) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD 2025 dan menjadi Rp.53.635.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD, kemudian terjadi penambahan pada Perubahan RKPD 2026 sebesar Rp.53.635.000,- sehingga menjadi Rp.53.635.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

123) Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Imunisasi (Puskesmas Tiakar) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.70.720.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD, kemudian terjadi penambahan pada Perubahan RKPD 2026 sebesar Rp.70.720.000,- sehingga menjadi Rp.70.720.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

124) Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Imunisasi (Puskesmas Air Tabit) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.60.265.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD, kemudian terjadi penambahan pada Perubahan RKPD 2026 sebesar Rp.60.265.000,- sehingga menjadi Rp.60.265.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

125) Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Imunisasi (Puskesmas Tarok) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.85.000.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD, kemudian terjadi penambahan pada Perubahan RKPD 2026 sebesar Rp.85.000.000,- sehingga menjadi Rp.85.000.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

126) Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Imunisasi (Puskesmas Lampasi) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.75.140.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026 di DPRD, kemudian terjadi penambahan pada Perubahan RKPD 2026 sebesar Rp.75.140.000,- sehingga menjadi Rp.75.140.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

127) Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Imunisasi (Puskesmas Padang Karambia) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.55.675.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD, kemudian terjadi penambahan pada Perubahan RKPD 2026 sebesar Rp.55.675.000,- sehingga menjadi Rp.55.675.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

128) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dinkes) mempunyai anggaran Rp.29.999.700,- kemudian bertambah sebesar Rp.1.690.500,- sehingga menjadi Rp.31.690.200,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026karena penyesuaian satuan.

3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan mempunyai anggaran Rp.9.999.800,- pada RKPD Tahun 2026 dan bertambah sebesar Rp. 36.912.000,- sehingga menjadi Rp. 46.911.800,- pada APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

4. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya mempunyai anggaran Rp.29.999.900,- pada RKPD Tahun 2026 dan terjadi Pengurangan sebesar Rp.13.569.700,- sehingga menjadi Rp.16.430.200,- pada APBD dan Perubahan RKPD 2026 disebabkan penyesuaian satuan.

b. Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai anggaran Rp.9.999.850,- pada RKPD Tahun 2026 dan terjadi Pengurangan sebesar Rp.9.999.850,- sehingga menjadi Rp. 0,- pada APBD dan Perubahan RKPD 2026 disebabkan efisiensi
c. Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan mempunyai anggaran Rp. 49.999.750,,- pada RKPD Tahun 2026 dan terjadi Penambahan sebesar Rp. 47.369.900,- sehingga menjadi Rp. 97.369.650,- pada APBD dan Perubahan RKPD 2026 disebabkan penyesuaian satuan
d. Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukanmempunyai anggaran Rp.9.999.850,- pada RKPD Tahun 2026 dan terjadi Pengurangan sebesar Rp.9.999.850,- sehingga menjadi Rp. 0,- pada APBD dan Perubahan RKPD 2026 disebabkan efisiensi

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. **Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**
   Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai anggaran Rp.0,- pada RKPD Tahun 2026 dan gterjadi penambahan sebesar Rp.379.943.450,- sehingga menjadi Rp.379.943.450,- pada APBD dan Perubahan RKPD 2026 disebabkan efisiensi anggaran penyesuaian anggaran DAK
2. **Kegiatan Pengembangan mutu dan peningkatan kompentensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten / kota**
   Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai anggaran Rp.99.999.900,- pada RKPD Tahun 2026, kemudian terjadi penambahan sebesar Rp.343.841.100,- dan menjadi Rp.443.841.000,- pada APBD dan Perubahan RKPD 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

D. Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minumam

1. **Kegiatan Pemberian Izin Apotek, TokoObat, Toko Alat Kesehatandan Optikal, Usaha MikroObat Tradisional (UMOT)**
   Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) mempunyai anggaran Rp. 49.999.850,- pada RKPD Tahun 2026 kemudian terjadi pengurangan sebesar Rp. 49.999.850,- sehingga menjadi Rp. 0,- pada APBD dan Perubahan RKPD 2026 disebabkan efisiensi anggaran disebabkan efisiensi
2. **Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**
   Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga mempunyai anggaran Rp.5.000.000,- pada RKPD Tahun 2026 dan terjadi penambahan sebesar Rp.277.417.800,- dan menjadi Rp.282.417.800,- pada APBD dan Perubahan RKPD 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK
3. **Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara / Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**
   Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai anggaran Rp. 49.999.700,- pada RKPD Tahun 2026 kemudian terjadi pengurangan sebesar Rp.1.836.700,- sehingga menjadi Rp. 48.163.000,- pada APBD dan Perubahan RKPD 2026 disebabkan efisiensi anggaran disebabkan penyesuaian anggaran DAK

E. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinkes) mempunyai anggaran Rp.2.829.999.975,- pada RKPD Tahun 2026 kemudian terjadi pengurangan sebesar Rp.1.555.531.975,- sehingga menjadi Rp.1.274.468.000,- pada APBD dan Perubahan RKPD 2026 disebabkan efisiensi anggaran

b. Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Puskesmas Ibuh) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.9.733.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.9.733.000,- menjadi Rp.9.733.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026disebabkan penyesuaian anggaran DAK

c. Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Puskesmas Parit Rantang) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.21.093.750,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.21.093.750,- menjadi Rp.21.093.750,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

d. Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Puskesmas Payolansek) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.10.359.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.10.359.000.- sehingga menjadi Rp.10.359.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

e. Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Puskesmas Tiakar) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.31.995.450,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.31.995.450,- menjadi Rp.31.995.450,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026disebabkan penyesuaian anggaran DAK

f. Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Puskesmas Air Tabit) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.23.665.950,,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.23.665.950,- menjadi Rp.23.665.950,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026disebabkan penyesuaian anggaran DAK

g. Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Puskesmas Tarok) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.27.376.500,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.27.376.500,- menjadi Rp.27.376.500,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

h. Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Puskesmas Lampasi) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.22.347.400,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.22.347.400,- menjadi Rp.22.347.400,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026disebabkan penyesuaian anggaran DAK

i. Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Puskesmas Padang Karambia) mempunyai

anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.21.065.500,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.21.065.500,- menjadi Rp.21.065.500,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

2. **Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

   Hidup Bersih dan Sehat (Dinkes) mempunyai anggaran Rp.99.999.950,- pada RKPD Tahun 2026 kemudian terjadi pengurangan sebesar Rp.42.737.550,- sehingga menjadi Rp.57.262.400,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan efisiensi anggaran

3. **Kegiatan Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyrakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten / kota.**

   a. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dinkes) mempunyai anggaran Rp.99.999.800,- pada RKPD Tahun 2026 kemudian terjadi pengurangan sebesar Rp.13.825.200,- sehingga menjadi Rp.86.174.600,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan efisiensi anggaran.

   b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Ibuh) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.38.640.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.38.640.000,- sehingga menjadi Rp.38.640.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

   c. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Parit Rantang) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.27.809.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasanAPBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.27.809.000,- sehingga menjadi Rp.27.809.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

   d. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Payolansek) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.40.950.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.40.950.000,- sehingga menjadi Rp.40.950.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

   e. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Tiakar) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.30.669.250,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.30.669.250,- sehingga menjadi Rp.30.669.250,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

   f. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Air Tabit) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.32.801.750,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.32.801.750,- sehingga menjadi Rp.32.801.750,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

g. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Tarok) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.12.933.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.12.933.000,- sehingga menjadi Rp.12.933.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK
h. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Lampasi) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.42.484.500,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.42.484.500,- menjadi Rp.42.484.500,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK
i. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Padang Karambia) mempunyai anggaran Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp.24.298.750,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026 kemudian terjadi Penambahan sebesar Rp.24.298.750,- menjadi Rp.24.298.750,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan penyesuaian anggaran DAK

V.1.1.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2026 melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum yang terdiri atas 11 program, 22 Kegiatan dan 63 sub kegiatan dengan alokasi pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.35.579.031.263,-, APBD Tahun 2026 sebesar Rp. 43.592.016.779,-, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.97.777.255.164,- dengan uraian perubahan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mengalami perubahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dianggarakan Rp.517.868.256,- ,APBD Tahun 2026 sebesar Rp. 517.783.836, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 521.117.156,- karena adanya penyesuaian standar biaya (SB).

B. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

1. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

a. Sub kegiatan Peningkatan Perkuatan Tebing, dengan alokasi pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.719.375.500,- APBD Tahun 2026 sebesar Rp. 2.828.016.320,-, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 5.908.583.620,- karena adanya tambahan TKD untuk pemulihan bencana dan percepatan ekonomi.
b. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai, dengan alokasi pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.1.461.513.200,- APBD Tahun 2026 sebesar Rp.1.418.033.620,,-, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 1.653.039.835,- karena adanya tambahan TKD untuk pemulihan bencana dan percepatan ekonomi.

2. **Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
   a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, dengan alokasi pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 1.429.837.750,- ,APBD Tahun 2026 sebesar Rp. 1.833.574.750,-, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 7.098.825.070,- karena adanya tambahan TKD untuk pemulihan bencana dan percepatan ekonomi.
   b. Sub Kegiatan Rehabilitasi Bendung Irigasi, dengan alokasi pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 264.489.150,- ,APBD Tahun 2026 sebesar Rp. 226.425.800,-, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 789.556.800,- karena adanya tambahan TKD untuk pemulihan bencana dan percepatan ekonomi.
   c. Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, dengan alokasi pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 1.736.431.000,- ,APBD Tahun 2026 sebesar Rp. 1.695.523.850,-, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 1.835.940.425,- karena adanya tambahan TKD untuk pemulihan bencana dan percepatan ekonomi.

C. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di daerah Kabupaten/Kota
a. Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS, dengan alokasi pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 550.000.000,- ,APBD Tahun 2026 sebesar Rp. 1.143.900,-, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.361.933.300,- karena adanya pembangunan TPST melalui DAK Fisik PUPR.
b. Sub kegiatan optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS, dengan alokasi pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 1.000.000,,- ,APBD Tahun 2026 sebesar Rp. 0,-, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 0,,- karena efisiensi anggaran.

D. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan, dengan alokasi pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 1.073.999.303,- ,APBD Tahun 2026 sebesar Rp. 1.786.848.174,-, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 5.513.452.714,- karena adanya tambahan TKD untuk pemulihan bencana dan percepatan ekonomi.
b. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan, dengan alokasi pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 2.442.051.645,- ,APBD Tahun 2026 sebesar Rp. 3.577.038.464,-, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 7.021.290.774,- karena adanya tambahan TKD untuk pemulihan bencana dan percepatan ekonomi.

E. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan yang mengalami perubahan pada Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan lingkungan di daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 2.016.900.000,- , APBD Tahun 2026 sebesar Rp. 2.709.420.450,-, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.6.195.290.850,- karena adanya tambahan TKD untuk pemulihan bencana dan percepatan ekonomi.

F. Program Penataan Bangunan Gedung
Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG),

Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG, dengan alokasi pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 257.948.775,- ,APBD Tahun 2026 sebesar Rp.203.704.138,-, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.306.819.108,- karena adanya tambahan TKD untuk pemulihan bencana dan percepatan ekonomi.

b. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 500.532.400,- ,APBD Tahun 2026 sebesar Rp. 532.400,-, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.6.114.615.620,- karena adanya tambahan TKD untuk pemulihan bencana dan percepatan ekonomi.

G. Program Penyelenggaran Jalan

Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pembangunan jalan, dengan alokasi pada RK PD Tahun 2026 sebesar Rp. 1.382.721.490,- ,APBD Tahun 2026 sebesar Rp. 1.289.564.580,-, sedangkan pada Perubahan Tahun RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 1.296.696.619,- karena adanya tambahan TKD untuk pemulihan bencana dan percepatan ekonomi.
b. Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin jalan, dengan alokasi pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ,APBD Tahun 2026 sebesar Rp. 2.050.129.000,-, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 6.928.108.000,- karena adanya tambahan TKDuntuk pemulihan bencana dan percepatan ekonomi.
c. Sub kegiatan Rekonstruksi jalan, dengan alokasi pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 1.360.742.648,- ,APBD Tahun 2026 sebesar Rp. 1.604.643.316,-, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 6.195.412.876,- karena adanya tambahan TKD untuk pemulihan bencana dan percepatan ekonomi.
d. Sub kegiatan pelebaran jalan menuju standar, dengan alokasi pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 1.262.654.600,,- ,APBD Tahun 2026 sebesar Rp. 2.457.462.450,-, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 12.834.250.770,- karena adanya tambahan TKD untuk pemulihan bencana dan percepatan ekonomi.
e. Sub kegiatan pembangunan jembatan, dengan alokasi pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 1.000.000,- ,APBD Tahun 2026 sebesar Rp. 455.793.500,,-, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 604.667.500,- karena adanya tambahan TKD untuk pemulihan bencana dan percepatan ekonomi.

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Pemerintah Kota Payakumbuh juga dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Air Limbah merupakan dengan Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kab/Kota, kegiatan ini mulai dari RKPD Tahun 2026, APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2026 tidak mengalami perubahan dengan anggaran sebesar Rp.1.760.883.240,- dengan 1 Program 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan.

V.1.1.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Melaksanakan Dua Urusan yakni Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan juga ada Urusan Pekerjaan umum dan Kawasan Permukiman. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan yang sebelumnya berada di Dinas Pekerjaan Umum, Sesuai dengan Perda No. 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah, dengan jumlah

anggaran pada RKPD Tahun 2026 adalah Rp. 9.618.304.015,00 APBD Tahun Anggaran 2026. Rp.8.140.915.473, dan pada Perubahan RKPD sebesar Rp. 11.956.526.611,- atau ada penambahan sebesar Rp. 2.338.222.596,- dari RKPD Tahun 2026 dikarenakan adanya penambahan alokasi Dana TKD untuk Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari 4 program, 13 Kegiatan serta 36 sub kegiatan Kemudian perubahan tetap 4 program, 13 Kegiatan serta 36 sub kegiatan dengan yang ada perubahan rincian perubahan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada RKPD Tahun 2026 anggarannya sama dengan anggaran APBD sebesar Rp. 15.396.950,00 pada perubahan RKPD 2026 bertambah menjadi Rp. 19.138.950,00 Karena adanya penyesuaian untuk penyusunan Dokumen perencaan Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada RKPD Tahun 2026 anggaran sebesar Rp. 3.459.214.688,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 bertambah menjadi Rp. 3.691.615.585 sama dengan Perubahan RKPD 2026 atau tidak mengalami perubahan

b. Sub kegitan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN angaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 313.880.800,00 anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 bertambah menjadi Rp. 313.900.000,00 pada perubahan RKPD Tahun 2026 berkurang menjadi Rp. 274.140.000,00 karena adanya penyesuaian honorarium pengelola keuangan.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto pada RKPD Tahun 2026 dengan anggaran sebesar Rp.6.746.450,00 pada APBD Tahun Anggaran 2026 sama dengan RKPD dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 bertambah menjadi Rp. 9.113.300,00 karena adanya penyesuaian belanja sesuai dengan kebutuhan dan harga.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada RKPD Tahun 2026 dengan anggaran sebesar Rp.27.825.885,00 pada APBD Tahun Anggaran 2026 dengan adanya dinamika pembahasan bertambah menjadi Rp. 29.973.385,00 pada Perubahan RKPD Tahun 2026 bertambah menjadi Rp. 36.792.835,00 karena adanya penyesuaian belanja sesuai dengan kebutuhan dan harga

c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada RKPD Tahun 2026 dengan anggaran sebesar Rp.16.577.150,00 sama dengan APBD Tahun Anggaran 2026 pada Perubahan RKPD Tahun 2026 bertambah menjadi Rp. 16.593.950,00 karena adanya penyesuaian belanja sesuai dengan kebutuhan dan harga

d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 200.024.000,00 dengan adanya pembahasan dan perintah efesiensi untuk perjalanan dinas anggaran pada APBD berkurang menjadi Rp. 145.905.000,00,- . Pada perubahan RKPD Tahun 2026 sama dengan APBD Tahun Anggaran 2026

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor anggaran pada RKPD Tahun 2026 dengan anggaran sebesar Rp.86.516.280,00 pada APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 86.516.316 dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 anggarannya bertambah menjadi Rp. 93.965.496,00 karena adanya penyesuian harga .

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada RKPD Tahun 2026 dengan anggaran Rp. 364.700.000,00 sama dengan angaran APBD dan

Perubahan RKPD Tahun 2026 mengalami kenaikan menjadi Rp. 401.810.000,00 karena adanya penyesuian harga satuan pemeliharaan kendaraan dinas operasional.

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada RKPD Tahun 2026 Anggarannya sebesar Rp. 46.324.000,00 , seiring dengan pembahasan dan prioritas Perangkat Daerah pada APBD dan Perubahan RKPD kegiatan sub kegiatan ini di efesiensikan menjadi 0

B. Program Pengembangan Perumahan

1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota pada RKPD Tahun 2026 anggaranya Rp. 153.783.100,00 dan dengan adanya dinamika pembahasan kua dan APBD di DPRD pada anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 anggarannya berkurang menjadi sebesar Rp. 90.071.650,00 pada perubahan RKPD Tahun 2026 anggarannya berkurang dari APBD dengan anggaran Rp. 67.950.400,00 sub kegiatan ini merupakan kegiatan untuk pemenuhan SPM Perumahan terjadi pengurangan karena dipengaruhi oleh kejadian bencana

b. Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan pada RKPD Tahun 2026 anggaranya Rp. 7.101.200,00 dan dengan adanya dinamika pembahasan kua dan APBD di DPRD pada anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 anggarannya berkurang menjadi sebesar Rp. 2.599.550,00, pada perubahan RKPD Tahun 2026 anggarannya sama dengan APBD sub kegiatan ini merupakan kegiatan untuk pemenuhan SPM Perumahan terjadi pengurangan karena dipengaruhi oleh kejadian bencana

c. Sub kegiatan pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani pada RKPD Tahun 2026 anggaranya Rp. 21.692.950,00 dan dengan adanya dinamika pembahasan kua dan APBD di DPRD pada Anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 berkurang menjadi sebesar Rp. 2.594.900,00 pada perubahan RKPD tetap sama dengan APBD

d. Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana pada RKPD Tahun 2026 anggaranya Rp. 19.110.650,00 dan dengan adanya dinamika pembahasan kua dan APBD di DPRD pada Anggaran APBD berkurang menjadi Rp. 5.405.650,00 pada Perubahan RKPD Tahun 2026 anggarannya berkurang menjadi Rp. 4.399.400,00 sub kegiatan ini merupakan kegiatan untuk pemenuhan SPM Perumahan terjadi pengurangan karena dipengaruhi oleh kejadian bencana.

e. Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus pada RKPD Tahun 2026 anggaranya Rp. 28.715.200,00 dan dengan adanya dinamika pembahasan kua dan APBD di DPRD pada anggran APBD sebesar Rp. 28.714.650,00 pada perubahan RKPD Tahun 2026 bertambah menajdi Rp. 34.887.150,00 karena adanya penyesuaian

f. Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota pada RKPD Tahun 2026 anggaranya Rp. 19.110.650,00 anggaran pada APBD berkurang menjadi Rp. 5.405.650,00 pada Perubahan RKPD Tahun 2026 tidak mengalami perubahan sama dengan APBD

g. Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 36.382.300,00, kemudian pada APBD Tahun Anggaran 2026 mengalami pengurangan menjadi Rp. 23.187.750,00 pada Perubahan RKPD Tahun 2026 berkurang menjadi Rp. 12.675.250,00 , dimana kegiatan ini merupakan kegiatan pemenuhan SPM Perumahan dan ini tergantung tingkat bencana di

Kota Payakumbuh, apabila tidak ada bencan maka kegiatan ini tidak bisa adirealisasikan

2. **Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**
   a. Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana pada RKPD Tahun 2026 sub kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 28.527.875,00 pada APBD mengalami penambahan menjadi Rp.43.339.125,00 pada Perubahan RKPD Tahun 2026 berkurang menajdi Rp. 3.279.975,00 karena adanya penyesuaian kebutuhan belanja dan harga.
   b. Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP pada RKPD Tahun 2026 dan APBD Rp. 21.477.825,00 pada perubahan RKPD Tahun 2026 bertmabah menjadi Rp. 42.139.525,00 karean adanay penambahan volume untuk kegiatan sosialisasi.
   c. Sub Kegiatan Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan pada RKPD Tahun 2026 anggarannya sebesar Rp. 18.653.075,00 karena adanay dinamika pembahasan Kupa dan dengan DPRD anggaran APBD berkurang menjadi Rp. 5.753.075,00 pada perubahan RKPD Tahun 2026 berkurang menajdi Rp. 4.746.825,00 karena adanya penyesuaian kebutuhan.
3. **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** dengan Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana pada RKPD Tahun 2026 anggarannya sebesar Rp. 203.197.200,00 Pada APBD Tahun Anggaran 2026 berkurang menjadi Rp. 103.547.200,00 sama Perubahan RKPD Tahun 2026
4. **Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** dengan Sub Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota pada RKPD Tahun 2026 anggarannya sebesar Rp. 35.355.600,00 Pada APBD Tahun Anggaran 2026 berkurang menjadi Rp. 6.840.100,00 sama Perubahan RKPD Tahun 2026

C. Program Kawasan Permukiman

1. **Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**
   a. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada RKPD Tahun 2026 anggaran sebesar Rp. 2.518.540.125,00 pada APBD . Rp. 1.173.617.225,00 pada perubahan RKPD Tahun 2026 mengalami penambahan menjadi Rp. 4.981.733.525,00, ada penambahan sebesar Rp. 2.459.423.400,00 dari RKPD Awal karena adanya penambahan TKD pada pergeseran anggaran untuk pembangunan Rumah Layak Huni menjadi 100 unit dan pembangunan baru 5 unit.
   b. Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU pada RKPD Tahun 2026 anggarannya sebesar Rp. 32.574.675,00 dengan adanya dinamika pembahasan Pada APBD Tahun Anggaran 2026 bertambah menjadi Rp. 37.954.450,00 sama dengan Perubahan RKPD Tahun 2026

D. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang mengalami perubahan pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dengan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 122.816.760,00 anggaran APBD sebesar Rp 69.519.260,- pada perubahan RKPD Tahun 2026 berkurang menajdi Rp. 61.747.320,00 karena adanya penyesuaian harga dan belanja.

V.1.1.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Pemerintah Kota Payakumbuh merupakan kewenangan 2 perangkat daerah yaitu Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

SATPOL PP DAN DAMKAR

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memperoleh Anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.13.701.264.452,- pada APBD alokasi anggaran sebesar Rp.13.987.983.069,- anggaran Perubahan RKPD Rp.18.438.945.779,- penambahan sebesar Rp.4.737.681.327,- akan direalisasikan ke dalam 3 program dan 11 kegiatan dengan 30 Sub Kegiatan. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.18.438.945.779,- dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. **Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah pagu anggaran RKPD Tahun 2026 Rp.9.545.150,- Pagu APBD Tahun Anggaran 2026 Rp.12.319.950 dan pagu Perubahan RKPD Tahun 2026 Rp.12.319.950,- bertambah sebesar Rp.2.774.800,- penambahan anggaran digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja yang belum terakomodir sebelumnya.
2. **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** pada Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pagu Perubahan RKPD Tahun 2026 berkurang menjadi Rp.59.938.950,- dari Pagu APBD Rp.65.450.750,- akibat adanya efisiensi dan penyesuaian kebutuhan belanja lembur dan ATK.
3. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN anggaran Awal RKPD Tahun 2026 Rp.5.408.599.929,- Pagu APBD Tahun Anggaran 2026 Rp.6.676.953,- dan pagu Perubahan RKPD Tahun 2026 Rp.6.676.968.9530,- bertambah sebesar Rp.1.268.369.024,- penambahan anggaran digunakan untuk kekurangan gaji P3K penuh waktu.
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pagu anggaran Awal RKPD Rp.344.400.000,- RKPD perubahan Tahun 2026 berkurang menjadi sebesar Rp.186.950.000,-, dari pagu APBD Rp.341.640.000,- pengurangan sebesar Rp.157.450.000,- terjadi akibat adanya efesiensi dan penyesuaian kebutuhan kegiatan
3. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor pagu Awal RKPD Tahun 2026 Rp.1.647.650,- Perubahan Tahun 2026 bertambah menjadi Rp.8.247.650,- dari pagu APBD sebesar Rp.1.647.650,- penambahan anggaran sebesar Rp.6.600.000,-terjadi adanya penyesuaian belanja dengan standar satauan harga.
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor anggaran pada Awal RKPD Tahun 2026 Rp.29.579.500,- Perubahan RKPD Tahun 2026 bertambah menjadi Rp.185.378.750,- dari pagu APBD sebesar Rp.29.554.150,- penambahan sebesar Rp.155.799.250,- disebabkan karena adanya penyesuaian belanja dengan standar satuan harga.
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan anggaran pada Awal RKPD Tahun 2026 Rp.2.081.150,- pagu Perubahan RKPD Tahun 2026 dan pagu APBD sama besar Rp.3.775.600,- penambahan sebesar Rp.1.694.450,- disebabkan karena adanya penyesuaian belanja dengan standar satuan harga.
   d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD anggaran pada Awal RKPD sebesar Rp.80.082.000,- pagu APBD Tahun Anggaran 2026 Rp.131.786.000,- dan pagu Perubahan RKPD Tahun 2026 Rp.131.786.000,-

penambahan sebesar Rp.51.704.000,- untuk pemenuhan pelaksanaan kegiatan yang belum terakomodir sebelumnya.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.14.996.613,- anggaran APBD Rp.16.914.250,- dan pagu perubahan bertambah sebesar Rp.1.917.637,- menjadi Rp.16.914.250,- penambahan anggaran terjadi karena adanya penyesuaian anggaran belanja dengan volume pekerjaan, harga barang/jasa.

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pagu RKPD Tahun 2026 Rp.86.100.000,- pagu APBD Rp.236.190.696,- berkurang menjadi Rp.240.262.696,- penambahan sebesar Rp.154.162.696,- terjadi karena adanya penyesuaian anggaran belanja dengan volume pekerjaan, harga barang/jasa.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan anggaran RKPD Rp.413.670.000,- anggaran APBD Rp.486.610.000,- bertambah sebesar Rp.72.940.000,- sehingga pagu anggaran Perubahan RKPD menjadi Rp.486.610.000,-penambahan anggaran terjadi karena adanya penyesuaian anggaran belanja dengan volume pekerjaan, harga barang/jasa.

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Pagu anggaran Awal RKPD Tahun 2026 Rp.8.160.000,- pagu APBD Tahun Anggaran 2026 Rp.10.270.000,- pagu Perubahan RKPD Tahun 2026 Rp.10.270.000,- penambahan sebesar Rp.2.110.000,- penambahan anggaran terjadi karena adanya penyesuaian anggaran belanja dengan volume pekerjaan, harga barang/jasa.

B. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penaganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum anggaran Awal RKPD Tahun 2026 Rp.36.003.000 anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 Rp.97.708.000,- anggaran Perubahan RKPD bertambah sebesar Rp.61.705.000,- menjadi Rp.97.708.000,- penambahan anggaran terjadi karena adanya penyesuaian anggaran belanja dengan volume pekerjaan, harga barang/jasa.

b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas anggaran RKPD Tahun 2026 Rp.38.312.250 anggran APBD Tahun Anggaran 2026 Rp.19.720.000,- berkurang sebesar Rp.18.592.250,- menjadi Rp.19.720.000,- pada anggaran Perubahan RKPD Tahun 2026, pengurangan ini terjadi karena adanya efesiensi anggaran daerah dari pusat.

c. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan pagu pada Perubahan RKPD Tahun 2026 bertambah menjadi Rp.2.942.435.598,- dari pagu APBD Tahun Anggaran 2026 Rp.2.921.595.598,- penambahan pagu bersumber dari anggaran TKD.

2. Kegitan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

a. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Perda dan Perkada pagu RKPD Tahun 2026 Rp.21.246.750,- pagu APBD Tahun Anggaran 2026 Rp.6.481.750,- dan pagu anggaran Perubahn RKPD Tahun 2026 Rp.6.481.750,- berkurang sebesar Rp.14.765.000,-pengurangan ini terjadi karena adanya efesiensi anggaran daerah dari pusat.

b. Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Perda dan Perkada pagu pada Perubahan RKPD Tahun 2026 bertambah menjadi Rp.712.410.142,- dari pagu APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.710.262.222,- penambahan dikarenakan adanya penyesuaian harga dengan memakai standar satuan harga.

C. **Program Pencegahan, Penaggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran pada Kegiatan Pencegahan, Penanggulagnan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota** dengan subkegiatan yang mengalami perubahan :

a. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota anggaran anggaran bertambah menjadi Rp.1.393.296.265,- dari pagu APBD Rp.1.339.869.375,- penambahan dikarenakan adanya penyesuaian harga dengan memakai standar satuan harga.
b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri anggaran bertambah menjadi Rp.5.064.959.300,- dari pagu anggaran APBD Rp.696.706.200,- penambahan bersumber dari anggaran TKD.

BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2026 ini mendapat alokasi anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 4.893.272.180,- yang terdiri dari 2 program, 11 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Dalam proses penganggaran terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 5.043.354.531,-. yang terdiri dari 2 program, 9 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Kondisi bencana yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, menyebabkan penambahaan transfer keuangan daerah dan bantuan presiden, dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi salah satu perangkat daerah yang memperoleh tambahan anggaran sehingga pada rencana perubahan RKPD Tahun 2026 diusulkan penganggaran sebesar Rp. 5.995.375.495,-. terdiri dari 2 program dan 9 kegiatan dengan 27 Sub kegiatan, dengan rincian penambahan dan pengurangan sebagai berikut :

A. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. **Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mempunyai anggaran Rp 22.001.750,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 553.450,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 21.448.300,- dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 22.574.300,- atau bertambah sebesar Rp. 1.126.000,- karena adanya penyesuaian belanja sesuai kebutuhan.
b. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai anggaran Rp 6.716.600,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 2.719.000,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 3.997.600,- dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 3.997.300,-. Berkurang sebesar Rp. 300,- .
c. Sub kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah mempunyai anggaran Rp 1.408.750,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 845.250,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 563.500,- dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 anggaran dihilangkan ,-sehingga anggaran menjadi Rp. 0,-.
d. Sub kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah mempunyai anggaran Rp 1.408.750,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp. 845.250,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp, 563.500,- dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 anggaran dihilangkan atau menjadi Rp. 0,-.

2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mempunyai anggaran Rp 3.721.096.448,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika

pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp 9.748.567,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 3.730.845.015,-,

b. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN mempunyai anggaran Rp 188.977.700,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp 840.000,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 189.817.700,-.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya mempunyai anggaran Rp 99.900,,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu dihilangkan sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 0,-.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor mempunyai anggaran Rp 19.473.960,,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 530.850,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 18.943.110,-.

b. Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan memiliki anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp 13.680.900,-, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu dihilangkan sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 0,-.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan pada RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan..Karena adanya evaluasi anggaran, pada Perubahan RKPD tahun 2026 diusulakan sebesar Rp.2.817.400,-.

d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan memiliki anggaran sebesar Rp 7.920.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu dihilangkan, begitu juga pada Perubahan RKPD Tahun 2026

e. Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu memiliki anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp 6.493.100,- karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 4.492.900,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 2.000.200,- dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 4.771.750,- atau bertambah sebesar Rp. 2.771.550,- karena adanya penyesuaian anggaran.

f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD memiliki anggaran sebesar Rp 184.184.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 40.575.000,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 143.609.000,-.

g. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD memiliki anggaran sebesar Rp 1.408.750,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 845.250,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 563.500,- dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 tidak dianggarkan.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel memiliki anggaran sebesar Rp 99.900,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu dihilangkan sehingga pada penetapan APBD Tahun

Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 0,-.

b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya memiliki anggaran sebesar Rp 99.900,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu dihilangkan sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 0,-

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memiliki anggaran sebesar Rp 153.139.160,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 19.107.916,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 134.031.244,- dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 128.069.788,- atau berkurang sebesar Rp. 5.961.456,- karena adanya penyesuaian gaji PPPK paruh waktu dan outsourching.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan memiliki anggaran sebesar Rp 182.980.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp 11.550.000,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 194.530.000,-.

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel memiliki anggaran sebesar Rp 4.960.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu dihilangkan sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 0,-.

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya memiliki anggaran sebesar Rp 7.430.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 4.670.000,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 2.760.000,- dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 3.980.000,- atau bertambah sebesar Rp. 1.220.000,- karena adanya penyesuaian belanja sesuai kebutuhan.

B. Program Penanggulangan Bencana

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana memiliki anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 16.052.300,- karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 36.052.100,-. Pada RKPD perubahan 2026 menjadi Rp. 135.051.925,- sehingga bertambah sebesar Rp. 98.999.825,- hal ini disebabkan karena adanya penambahan Dana TKD untuk belanja rambu rambu kebencanaan.

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

a. Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota memiliki anggaran sebesar Rp 9.999.800,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp 59.799.700,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 69.799.500,-.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota memiliki anggaran sebesar Rp 99.900,- pada RKPD

Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp 19.999.900,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 20.099.800,-.

c. Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota memiliki anggaran sebesar Rp 99.650,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp 19.999.675,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 20.099.325,-.
d. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota memiliki anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 98.000,- Karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 35.093.000,-. Pada RKPD perubahan 2026 menjadi Rp. 85.098.250,- bertambah sebesar Rp. 50.005.250,- hal ini disebabkan karena adanya penambahan belanja TKD untuk pelatihan yang dilaksanakan bagi personil TRC.
e. Sub Kegiatan Pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana kab/kota anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 164.999.950,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 164.989.350,-. Pada RKPD perubahan 2026 menjadi Rp. 381.768.070,- bertambah sebesar Rp. 216.778.720,- hal ini disebabkan karena adanya penambahan belanja Banpres dan TKD yang terdiri dari belanja Perahu, mesin perahu, Light tower portable, mesin pompa air dan pemeliharaan sarana/alat kebencanaan.
f. Sub Kegiatan Pelatihan pencegahan mitigasi bencana kabupaten/kota anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 24.999.800,- Karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 30.198.500,-. Pada RKPD perubahan 2026 menjadi Rp. 231.152.975,- bertambah sebesar Rp. 200.954.475,- adanya penambahan Dana TKD untuk kegiatan pelatihan mitigasi bencana.

3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

a. Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota memiliki anggaran sebesar Rp 41.999.150,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp 20.101.775,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 62.100.925,-.
b. Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota memiliki anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 98.000,- Karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 25.098.000,-. Pada RKPD perubahan 2026 menjadi Rp. 410.098.000,- bertambah sebesar Rp. 385.000.000,- hal ini disebabkan karena adanya penambahan belanja Banpres untuk pembelian perahu karet dan mesin perahu.
c. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota memiliki anggaran sebesar Rp 98.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp 14.972.250,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 15.070.250,-.
d. Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana memiliki anggaran sebesar Rp 98.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp 4.933.250,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 5.031.250,-.

4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Sub Kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota memiliki anggaran sebesar Rp 15.000.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya

dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp 4.999.800,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 19.999.800,-.

V.1.1.6 . URUSAN SOSIAL

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh, Jumlah anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.5.833.303.794 yang terdiri dari 6 program, 12 kegiatan dan 33 Sub kegiatan dan mengalami penyesuaian pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.5.098.708.479, dengan jumlah program/kegiatan dan sub kegiatan yang sama dengan RKPD sedangkan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.5.157.233.178. dengan 3 program, 12 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan dijelaskan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah mempunyai anggaran RKPD Tahun 2026 Rp.2.434.700 dan karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah, pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.1.476.050 dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.1.513.250,
b. Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah mempunyai anggaran RKPD Tahun 2026 Rp.51.133.900 dan karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah, pada APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.38.683.500.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah

a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mempunyai anggaran Rp.2.756.165.909 pada RKPD Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.2.976.275.969,
b. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN mempunyai anggaran Rp.273.540.000 pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.273.540.000 dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 Rp.281.940.000 dikarenakan untuk penyesuaian dengan kebutuhan.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistic Kantor pada anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.29.422.890 dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.17.655.565 dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.19.190.815 dikarenakan penyesuaian dengan kebutuhan,
b. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.15.334.500 dan pada APBD dan perubahan RKPD menjadi sebesar Rp.9.121.650 dikarenakan efisiensi anggaran,
c. Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.4.343.200 dan pada APBD dan perubahan RKPD menjadi sebesar 0 dikarenakan efisiensi anggaran,
d. Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu pada anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.4.553.950 dan pada APBD menjadi Rp.2.571.500 dan perubahan RKPD menjadi sebesar Rp.4.331.500 dikarenakan efisiensi anggaran,
e. Sub kegiatan penyelenggaraan raoat koordinasu dan konsultasi SKPD mempunyai anggaran RKPD Tahun 2026 Rp.93.140.000 dan karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah, pada APBD Rp.84.939.000 dan perubahan RKPD menjadi Rp.72.684.000.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.3.977.060 dan pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan perubahan RKPD menjadi Rp.3.956.060,
b. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor mempunyai anggaran RKPD Tahun 2026 Rp.306.000.000 dan karena dinamika dan pembahasan di

DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah dan penyesuaian kebutuhan, pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan perubahan RKPD menjadi Rp.321.068.724.

B. Program Rehabilitasi Sosial

1. **Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**
   a. Sub kegiatan Penyediaan Permakanan dilakukan perubahan target sub kegiatan dari 120 orang pada RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi 85 orang pada Perubahan RKPD Tahun 2026,
   b. Sub Kegiatan sandang dilakukan perubahan target dari 1 orang pada RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi 22 orang pada perubahan RKPD tahun 2026.
2. **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial**
   Sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan, sub kegiatan ini perubahan target dari 1 orang menjadi 20 orang dimana pagu RKPD Tahun 2026 Rp.29.987.775, APBD Rp.29.987.775 dan perubahan RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.24.266.600.

C. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Kegiatan Pengelolaan Data Fakri Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota dengan Sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.139.120.250 karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah dan penyesuaian kebutuhan, pada APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.116.095.850 dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.93.734.100.

D. Program Penanganan Bencana

1. **Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dilakukan perubahan pada**
   a. Sub kegiatan Penyediaan Permakanan terjadi penambahan Rp.44.000.000 dengan pagu RKPD sebesar Rp 34.945.750,00, pagu APBD Rp 47.445.750,00 dan perubahan RKPD sebesar Rp 90.384.850,00 untuk bantuan bencana banjir di Koto Panjang,
   b. Sub kegiatan Penyediaan Sandang yaitu target keluaran dari 1 orang pada RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi 25 orang pada perubahan RKPD Tahun 2026.
2. **Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota** berubah pada target sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dari 2 orang pada RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi 15 orang pada perubahan RKPD Tahun 2026.

V.1.2 URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN NON PELAYANAN DASAR

V.1.2.1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja pada RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran Rp. 5.933.963.446,- yang terdiri dari 5 (lima) program, 13 (tiga belas) dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan, dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 5.362.865.955,- yang terdiri dari 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Pagu APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 5.276.752.855,- yang terdiri dari 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan.

Anggaran RKPD Tahun 2026 pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan sebesar Rp. 657.210.591,-. Pada tahapan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 terjadi penambahan anggaran Rp. 83.113.100,-. yang berasal dari pergeseran anggaran dari sub kegiatan lain. Terdapat beberapa kegiatan/sub kegiatan yang berubah anggarannya sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran Rp. 24.822.800,-. Dalam proses penganggaran terjadi dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2026 anggaran menjadi Rp. 15.109.650,- . Pada perubahan RKPD tahun 2027 anggaran mengalami perubahan menjadi Rp. 15.372.600,- yang merupakan penyesuaian harga.

b. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran Rp. 67.966.800,-. Dalam proses penganggaran terjadi dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2026 anggaran menjadi Rp. 59.255.500,- . Pada perubahan RKPD anggaran ini tidak mengalami perubahan.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Penyediaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada RKPD Tahun 2026 mempunyai anggaran Rp. 3.054.681.487,- yang selanjutnya dalam proses penganggaran terjadi dinamika pembahasan pada APBD sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp. 2.892.702.100,- Pada perubahan RKPD Tahun 2026 anggarannya sama dengan APBD Tahun Anggaran 2026.

b. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada RKPD Tahun 2026 mempunyai anggaran Rp.263.578.600,-. Dalam proses penganggaran terjadi dinamika pembahasan pada APBD sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp. 261.058.600,- Pada perubahan RKPD Tahun 2026 tidak terjadi pengurangan anggaran sehingga menjadi Rp. 246.298.600,- yang merupakan pagu penyesuaian honor pejabat pengelola keuangan.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya pada RKPD Tahun 2026 mempunyai anggaran Rp. 53.567.800,-. Dalam proses penganggaran terjadi dinamika pembahasan pada APBD sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2026 sub kegiatan ini tidak digunakan. Pada perubahan RKPD sub kegiatan ini tetap tidak digunakan.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran sebesar Rp. 13.849.300,- namun tidak terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2026. Pada perubahan RKPD tahun 2026 untuk sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.970.000,- untuk pembelian mesin penghancur kertas dan mesin absen.

b. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran sebesar Rp. 37.802.300,-. Terjadinya dinamika pembahasan APBD dengan DPRD sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2026 anggaran tersebut dihilangkan. Pada perubahan RKPD tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp. 8.680.050,- untuk pembelian kursi kerja kepala dinas dan dispenser sesuai standar pelayanan.

c. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran Rp. 43.632.000,--. Dalam proses penganggaran terjadi dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2026 anggaran menjadi Rp. 28.469.480,- . Pada perubahan RKPD anggaran ini tidak mengalami perubahan.

d. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran Rp. 14.605.600,-. Dalam proses penganggaran terjadi dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga pada APBD

Tahun Anggaran 2026 anggaran menjadi Rp. 14.619.600,- . Pada perubahan RKPD anggaran ini mengalami pengurangan menjadi Rp. 13.632.000,- yang merupakan pengurangan biaya fotocopy.

e. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran Rp. 6.159.050,-. Dalam proses penganggaran terjadi dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2026 anggaran menjadi Rp. 2.464.400,- . Pada perubahan RKPD anggaran bertambah menjadi Rp. 4.332.750,- untuk pembelian bahan-bahan kebutuhan tamu.
f. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran Rp. 134.831.000,-. Dalam proses penganggaran terjadi dinamika pembahasan APBD dengan DPRD sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2026 anggaran menjadi Rp.75.919.000,- Pada perubahan RKPD anggaran ini tidak mengalami perubahan.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional dan lapangan pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran sebesar Rp. 64.438.000,- namun tidak diakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2026. Pada perubahan RKPD tahun 2026 dianggarkan Rp. 96.657.000,- yang direncanakan untuk pembelian 3 (tiga) buah kendaraan roda 2.
b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada RKPD Tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp. 53.241.950,- namun setelah pembahasan APBD dengan DPRD, sub kegiatan ini dihilangkan pada APBD Tahun Anggaran 2026. Pada perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp. 95.370.600,- yang rencananya digunakan untuk pengadaan laptop, printer dan lain-lain.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran sebesar Rp. 18.903.900,- sama dengan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 dilakukan penyesuaian anggaran sehingga berkurang menjadi Rp. 138.013.600,- yang merupakan pengurangan pada biaya listrik.
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran pada pagu awal pada RKPD Tahun 2026 Rp 501.933.580-, karena adanya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 502.311.100,-. Pada perubahan RKPD tahun 2026 dilakukan pengurangan sehingga menjadi Rp. 423.911.100,- yang merupakan pembayaran tenaga outsourcing yang tidak bisa direalisasikan.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel pada RKPD Tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp. 400.000,- namun setelah pembahasan APBD dengan DPRD, sub kegiatan ini dihilangkan pada APBD Tahun Anggaran 2026. Pada perubahan RKPD tahun 2026 tetap belum digunakan.
b. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran Rp. 27.159.160,-. Dalam proses penganggaran terjadi dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2026 anggaran menjadi Rp. 23.279.160,- Pada perubahan RKPD sub kegiatan mengalami penambahan anggaran menjadi Rp. 33.469.160,- yang digunakan untuk penambahan BBM genset .
c. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran Rp.70.060.000,-. Dalam proses penganggaran terjadi dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2026 anggaran menjadi Rp. 40.000.000,- Pada perubahan RKPD sub kegiatan ini tidak mengalami perubahan anggaran.

B. Program Perencanaan Tenaga Kerja

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

Sub kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro pada RKPD Tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- namun setelah pembahasan APBD dengan DPRD, sub kegiatan ini dihilangkan pada APBD Tahun Anggaran 2026. Pada perubahan RKPD tahun 2026 tetap belum digunakan.

C. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

Sub kegiatan Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran sebesar Rp. 507.350.299,-. Dalam proses penganggaran terjadi dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2026 anggaran menjadi Rp. 253.229.465,- Pada perubahan RKPD sub kegiatan ini tidak mengalami perubahan anggaran.

2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Sub kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran sebesar Rp. 31.633.525,-. Dalam proses penganggaran terjadi dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2026 anggaran menjadi Rp. 2.070.300,- sama dengan pada perubahan RKPD.

D. Program Penempatan Tenaga Kerja

1. Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran sebesar Rp. 95.866.475,-. Dalam proses penganggaran terjadi dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2026 anggaran menjadi Rp. 26.610.250,- sama dengan pada perubahan RKPD.

2. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online dengan anggaran pada RKPD tahun 2026 Rp. 60.228.770,- dan dengan terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD menjadi Rp. 66.499.300,- pada APBD tahun 2027. Pada perubahan RKPD tahun 2026 anggarannya mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 63.361.350,- yang merupakan penyesuaian gaji PPPK paruh waktu.

E. Program Hubungan Industrial pada Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan yang mengalami perubahan :

a. Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran Rp. 24.591.100,- sama dengan APBD Tahun Anggaran 2026. Pada perubahan RKPD tahun 2026 anggarannya menjadi Rp. 27.811.100,- yang akan digunakan untuk biaya makan dan minum.

b. Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran Rp 354.149.750,-. Dengan adanya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD maka anggaran sub kegiatan ini menjadi Rp. 661.149.750,- Pada perubahan RKPD terjadi pengurangan menjadi Rp. 654.479.750,- yang merupakan pengurangan biaya makan minum.

V.1.2.2 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengampu 2 urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Secara total, pagu anggaran Dinas P3AP2KB pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp6.385.764.449,- dan dalam proses penganggaran mengalami dinamika pembahasan pada APBD bersama DPRD sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp7.702.273.773,-. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 pagu anggaran berkurang menjadi Rp7.698.273.773,- karena adanya penyesuaian kebutuhan belanja pada beberapa program dan kegiatan yang akan dirinci lebih lanjut sesuai urusan.

Untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pada RKPD tahun 2026 sebesar Rp. 5.592.433.749,00 dan dalam proses penganggaran mengalami dinamika pembahasan pada APBD bersama DPRD sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 6.331.701.773,00 yang dianggarkan pada 6 program 18 kegiatan dan 45 subkegiatan. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 pagu anggaran berkurang menjadi Rp 6.327.701.773,00 yang terdapat pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mempunyai anggaran Rp. 215.357.520,00 pada RKPD Tahun 2026, terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 234.833.793-. Kemudian terjadi pengurangan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.4.000.000,- sehingga menjadi Rp. 230.833.793,- disebabkan karena adanya pengurangan belanja jasa pelayanan umum kantor

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana pada RKPD tahun 2026 sebesar Rp. 793.330.700,00 dan dalam proses penganggaran mengalami dinamika pembahasan pada APBD bersama DPRD sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.1.370.572.000,00 yang dianggarkan pada 3 program 7 kegiatan dan 13 subkegiatan. Untuk optimalisasi kegiatan terjadi pergeseran anggaran pada subkegiatan berikut:

1) Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Kota saat pembahasan pada APBD dengan DPRD terjadi penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan anggaran sebesar Rp 51.000.000-. Terjadi pengurangan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. Rp. 22.800.000 menjadi Rp. 28.200.000 disebabkan karena adanya penyesuaian nomenklatur BOKB TA 2026
2) Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Kota saat pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak diberikan anggaran (Rp. 0,00-.). Terjadi penambahan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 22.800.000 disebabkan karena kurang penginputan pagu DAK non-fisik

V.1.2.3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan di Pemerintah Kota Payakumbuh dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Pada RKPD Tahun 2026 telah dianggarkan Rp.3.157.251.426,-. untuk melaksanakan 4 program, 11 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Sesuai dengan regulasi, pembahasan dengan DPRD ditetapkan anggaran Dinas Ketahanan Pangan menjadi Rp.3.218.895.255,- untuk APBD Tahun Anggaran 2026 yang dialokasikan pada 4 program dan 11 kegiatan dengan 27 sub kegiatan. Seiring berjalannya waktu, terjadi berbagai dinamika situasi seperti yang telah dijelaskan pada pengantar bab di atas. Dinas Ketahanan Pangan menjadi salah satu perangkat daerah yang memperoleh tambahan anggaran sehingga pada perubahan RKPD Tahun 2026 diusulkan rencana anggaran Rp.3.695.788.193,- atau bertambah sebesar Rp.538.536.767,- dari RKPD Tahun 2026 untuk 4 program, 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan dijelaskan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada RKPD Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp.21.877.250,- dan berkurang menjadi Rp.10.749.650,- pada APBD Tahun Anggaran 2026. Dengan melihat kondisi realisasi dan kebutuhan anggaran maka pada perubahan RKPD Tahun 2026 dikurangi menjadi Rp.4.661.950,- atau berkurang sebesar Rp.17.215.300,- dari RKPD Tahun 2026 yang ditujukan untuk penyusunan dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan sebanyak 3 dokumen,

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.37.052.050,- dan menjadi Rp.10.317.750,- pada APBD Tahun Anggaran 2026. Dengan kebutuhan anggaran untuk pelaporan baik secara bulanan, triwulanan dan semesteran tahun 2026 sebanyak 6 laporan maka pada Perubahan RKPD Tahun 2026 diajukan penambahan menjadi Rp.20.263.750,- pada perubahan RKPD Tahun 2026 atau berkurang Rp.16.788.300,-dari RKPD Tahun 2026.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada RKPD Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp.2.034.632.950,- dan bertambah menjadi Rp.2.285.557.707,- pada APBD Tahun Anggaran 2026. Merujuk kondisi realisasi dan kebutuhan anggaran, pada perubahan RKPD Tahun 2026 ditambahkan anggaran menjadi Rp.2.285.557.875,- atau bertambah sebesar Rp.250.924.925,- dari RKPD Tahun 2026 untuk membayar sebanyak 20 orang pegawai dari yang sebelumnya sebanyak 17 pegawai pada RKPD Tahun 2026,

b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.205.080.000,- dan menjadi Rp.182.640.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026. Dengan penyesuaian kebutuhan anggaran, maka pada perubahan RKPD Tahun 2026 diajukan rencana anggaran sebesar Rp.187.040.000,- atau berkurang sebesar Rp.18.040.000,- dari RKPD Tahun 2026 yang digunakan untuk pemenuhan laporan setiap bulan dengan total 12 dokumen untuk tahun 2026.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya pada RKPD Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp. 22.226.600,-, untuk 22 paket pengadaan pakaian dinas, namun dengan pembahasan anggaran dan penyesuaian anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan lainnya sub kegiatan ini tidak dilaksanakan pada APBD Anggaran Tahun 2026 dan perubahan RKPD Tahun 2026,

b. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.1.050.000,- untuk penyusunan 1 dokumen namun dengan pembahasan anggaran dan penyesuaian anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan lainnya sub kegiatan ini tidak dilaksanakan pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan perubahan RKPD Tahun 2026.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor pada RKPD Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp.1.649.000,-, untuk 7 paket pengadaan komponen instalasi listrik, namun dengan pembahasan anggaran dan penyesuaian anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan lainnya sub kegiatan ini tidak dilaksanakan pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan perubahan RKPD Tahun 2026,

b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.8.271.100,- untuk pengadaan 5 paket cetakan dan penggandaan namun dengan pembahasan anggaran dan penyesuaian anggaran

untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan lainnya sub kegiatan ini menjadi Rp.7.579.640,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan kemudian menjadi Rp.7.588.840,- atau berkurang Rp.682.260,- pada perubahan RKPD Tahun 2026 untuk 4 paket,

c. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.2.415.000,- namun dengan pembahasan anggaran dan penyesuaian anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan lainnya sub kegiatan ini menjadi Rp.1.725.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan perubahan RKPD Tahun 2026 untuk fasilitas tamu di Bappeda dengan 5 laporan,
d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.134.959.000,- untuk sebanyak 90 laporan namun dengan pembahasan anggaran dan penyesuaian anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan lainnya sub kegiatan ini menjadi Rp.84.783.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan perubahan RKPD Tahun 2026 untuk rapat koordinasi dan konsultasi sebanyak 40 laporan,
e. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada RKPD Tahun 2026 diperuntukan untuk penyusunan dokumen penataan arsip dinamis sebanyak 1 laporan dengan anggaran Rp.402.500,- dengan kebutuhan anggaran untuk sub kegiatan tersebut ditambahkan anggaran sebesar Rp.1.610.000,- sehingga menjadi Rp.2.012.500,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan perubahan RKPD Tahun 2026.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada RKPD Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp.28.084.200,-, untuk pembayaran listrik, dan air sebanyak 1 laporan, namun dengan pembahasan anggaran dan penyesuaian kebutuhan anggaran maka pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan perubahan RKPD Tahun 2026 bertambah menjadi Rp.38.425.000,-,
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.39.019.296,- untuk 1 laporan menjadi Rp.61.674.540,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan diajukan penambahan anggaran menjadi Rp.64.409.816,- atau bertambahRp.25.390.520,- dari RKPD Tahun 2026.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk 10 unit peralatan dan mesin dengan anggaran sebesar Rp.7.290.000,- pada RKPD Tahun 2026, namun dengan pembahasan anggaran dan penyesuaian kebutuhan anggaran maka pada APBD Tahun Anggaran 2026 bertambah menjadi Rp.9.730.000,- dan di perubahan RKPD Tahun 2026 ditambah menjadi Rp.9.460.000,- untuk 14 unit peralatan dan mesin.

B. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

1. Kegiatan Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

a. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga pada RKPD Tahun 2026 telah direncanakan sebesar Rp.50.816.500,- untuk 40 keluarga dan bertambah pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan perubahan RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.342.850, sehingga menjadi Rp.51.159.350,-,
b. Sub kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/ Kota pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.98.142.550,- dan menjadi mengalami Rp.71.448.650,- pada APBD Tahun Anggaran 2026. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 mengalami penambahan sebesar Rp.55.671.100,- dari anggaran RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.153.813.650,- pada Perubahan RKPD Tahun 2026 yang bersumber dari

tambahan TKD (Transfer Keuangan Daerah). Penambahan anggaran ini akan diperuntukan untuk penambahan pelaksanaan GPM (Gerakan Pangan Murah) beserta pendukungnya seperti makan minum lapangan dan sewa tenda.

c. Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) memiliki anggaran sebesar Rp.2.923.950,- pada RKPD Tahun 2026 terjadi penyesuaian karena rincian belanja sebesar Rp.500, menjadi Rp.2.923.450,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan perubahan RKPD Tahun 2026,
d. Sub Kegiatan Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota memiliki anggaran sebesar Rp.2.749.950,- pada RKPD Tahun 2026 terjadi penyesuaian karena rincian belanja menjadi Rp.2.749.550,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan menjadi Rp.2.749.500,- pada perubahan RKPD Tahun 2026.

2. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

a. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun untuk 1 dokumen telah dianggarkan sebesar Rp.4.255.450,- pada RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2026, kemudian disesuaikan dengan mengurangi sebesar Rp.805.000,- sehingga menjadi Rp.3.450.450,- pada perubahan RKPD Tahun 2026,
b. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.205.757.045,- berkurang menjadi Rp.100.749.575,- pada APBD Tahun Anggaran 2026. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 ditambahkan menjadi Rp.412.468.075,- atau mengalami penambahan sebesar Rp.206.711.030,- dari RKPD Tahun 2026 yang bersumber dari tambahan transfer keuangan daerah yang ditujukan untuk belanja bibit tanaman dan sarana prasarana pemanfaatan pekarangan. Direncanakan bibit tanaman yang diberikan yaitu bibit buah mangga, alpukat, bawang merah, cabai, buncis, kangkung, mentimun, pare, sawi, seledri, terong, selada, sedangkan prasarana yang dianggarkan meliputi pupuk organik dan pupuk NPK, *polybag*. Selain itu juga dianggarkan bimbingan teknis budidaya, dan biaya lomba KWT Tingkat Kota serta adanya perpindahan penganggaran untuk mendukung pengadaan tersebut yang diambil dari pengurangan jumlah makan dan minum (snack) pada acara Gelar Pangan Lokal.

C. Program Penanganan Kerawanan Pangan

1. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Kota

Perubahan anggaran dilakukan pada sub kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.2.838.000,- dan berkurang sebesar Rp.650,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.2.837.350,- karena penyesuaian pada rincian belanja,

2. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota telah direncanakan sebesar Rp.12.600.600,- untuk 1 dokumen, namun karena adanya penyesuaian untuk kebutuhan kegiatan lainnya maka pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 tidak dianggarkan.
b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.33.205.250,- dan disesuaikan menjadi Rp.33.204.950,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan diusulkan penambahan menjadi Rp.102.630.700,- pada Perubahan RKPD Tahun 2026 yang bersumber dari transfer keuangan daerah untuk pemberian bantuan pangan/sembako kepada masyarakat miskin dari 100 KK menjadi 250 KK dengan bantuan sembako berupa beras, gula pasir, minyak goreng, susu dan telur. Selain itu penambahan anggaran ini juga diarahkan pada penambahan makan minum kegiatan lapangan,

c. Sub Kegiatan Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota ditujukan untuk penyusunan 12 dokumen peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi dengan anggaran Rp.4.071.050,- , namun berkurang menjadi Rp.450,- dengan adanya penyesuaian pada rincian belanja sehingga menjadi Rp.4.070.600,- pada APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

D. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Pada program pengawasan keamanan pangan terjadi perubahan pada Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota yang tersebar pad 2 sub kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota telah direncanakan sebesar Rp.21.022.600,- untuk 1 dokumen, namun karena adanya penyesuaian untuk kebutuhan kegiatan lainnya maka pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 tidak dianggarkan,
b. Sub Kegiatan Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.29.965.875,- dan disesuaikan menjadi Rp.105.407.883,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan diusulkan penambahan menjadi Rp.108.863.677,- pada perubahan RKPD Tahun 2026 yang bersumber dari transfer keuangan daerah atau bertambah sebesar Rp.78.897.802,- dari RKPD Tahun 2026.

V.1.2.4 URUSAN PERTANAHAN

Urusan Pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2026 terdiri dari 1 program, 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan rincian perubahan pada Program Penatagunaan Tanah, Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah kabupaten/Kota dan pada Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Dala Satu Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah, tidak mengalami perubahan dengan alokasi sebesar Rp. 97.394.000,- .

V.1.2.5 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Urusan Wajib Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan jumlah anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 19.986.211.470,00 pada APBD Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp.16.340.705.725,00 sedang pada RKPD 2026 menjadi Rp.26.117.013.646,00 , Penambahan anggaran Dinas Lingkungan Hidup pada Perubahan RKPD karena Adanya alokasi Penambahan TKD untuk Urusan Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh tahun 2026 melaksanakan 9 program 15 kegiatan dan 35 sub kegiatan, kegiatan dan sub kegiatan yang ada berubah dengan rincian sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Pengaanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada RKPD Tahun 2026 Rp. 26.166.350,00 dengan adanya pembahasan pada APBD Tahun Anggaran 2026 berkurang dengan anggaran Rp. 22.113.550,00 pada perubahan RKPD Tahun 2026 sama dengan APBD Tahun Anggaran 2026 .

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 3.461.204.580,00 kemudian di APBD bertambah dengan anggaran Rp.3.686.332.508,00 Kemudian pada perubahan RKPD Tahun 2026 tetap sama dengan APBD Tahun Anggaran 2026.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 368.400.000,00 pada APBD berkurang menjadi 349.890.000,00 sama dengan Perubahan RKPD Tahun 2026

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 198.391.100,00 dengan adanya pembahasan pada APBD berkurang menjadi 100.595.200,00 sama dengan Perubahan RKPD Tahun 2026

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pada RKPD Tahun 2026 dengan anggaran Rp. 7.493.900,00 dan APBD anggarannya menjadi Rp. 3.831.050,00 sama dengan perubahan RKPD Tahun 2026
b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pada RKPD Tahun 2026 dengan anggaran Rp. 17.928.200,00 dan APBD anggarannya menjadi Rp. 17.247.000,00 sama dengan perubahan RKPD Tahun 2026
c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 17.953.250,00 dan APBD Tahun Anggaran 2026 sama Perubahan RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.117.790.450,00
d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan di RKPD Tahun 2026 dengan anggran sebesar Rp. 3.150.000,00 pada APBD dan Perubahan RKPD Sub kegiatan ini di hilangkan
e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 257.656.000,00 pada APBD karena adanya rasionalisasi berkurang menjadi Rp. 119.995.000,00 sama dengan Perubahan RKPD Tahun 2026

3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pada RKPD Tahun 2026 dengan anggaran Rp. 113.627.050,00 , pada APBD berkurang menjadi Rp. 32.950.450,00 Sama dengan perubahan RKPD Tahun 2026

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyura Pada RKPD Tahun 2026 dengan anggaran sebesar Rp. 1.040.000,00 dan APBD bertambah menajadi sebesar Rp.1.540.000,00 pada perubahan RKPD Tahun 2026 sama dengan APBD Tahun Anggaran 2026
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran Pada RKPD Tahun 2026 dengan anggaran sebesar Rp. 84.471.160,00 dan APBD bertambah menajadi sebesar Rp.89.981.640,00 pada perubahan RKPD Tahun 2026 sama dengan APBD Tahun Anggaran 2026
c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Anggaran Pada RKPD Tahun 2026 dengan anggaran sebesar Rp. 227.693.740,00 dan APBD bertambah menajadi sebesar Rp.236.873.740,00 pada perubahan RKPD Tahun 2026 bertambah menjadi Rp. 245.163.420,00 karena adanya penyesuian gaji P3K Paruh Waktu dan *outsourcing*.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pada RKPD Tahun 2026 sama dengan APBD Tahun Anggaran 2026 dan perubahan RKPD Tahun 2026 sama yakni Rp. 39.190.000,00
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan anggran pada RKPD

Tahun 2026 sebesar Rp.161.450.000,00 pada APBD dalam dinamika pembahasan pada APBD bertambaha menjadi Rp. 165.300.000,00 dan untuk Perubahan RKPD Tahun 2026 sama dengan APBD

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran Pada RKPD Tahun 2026 sama dengan APBD Tahun Anggaran 2026 dan perubahan RKPD Tahun 2026 sama yakni Rp. 11.490.000,00,

B. Program Pengendalian Pencemaran Dan /atau Perusakan Lingkungan Hidup pada Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan yang mengalami perubahan :

a. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota pada RKPD sebesar Rp. 640.010.890,00 dan APBD 2026 dengan anggaran sebesar Rp. 440.010.700,00 kemudian pada Perubahan RKPD Tahun 2026 bertambah menjadi Rp. 594.610.700,00 karena adanya penambahan TKD untuk penyesuaian pada biaya operasional pengelolaan laboratorium berupa Alat Laboratorium untuk melakukan pengujian parameter Mikrobiologi, TSS dan Minyak Lemak yaitu Desikator Auto Dry, Micro Pipette, Pipette Controller dan Echo sounder yang merupakan alat mengukur kedalaman sungai yang dipakai saat sampling air sungai serta sound level meter untuk mengukur tingkat kebisingan, Pembelian bahan kimia (Pengujian kualitas lingkungan)

b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut pada RKPD sebesar Rp. 381.162.300,00 dan APBD 2026 berkurang menajdi anggaran sebesar Rp. 163.809.400,00 kemudian pada Perubahan RKPD Tahun 2026 anggaran tidak brubah dari APBD

C. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati(yang berubah pada Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pada RKPD dengan anggaran sebesar Rp. 1.862.944.530,00 seiring dengan dinamika pembahasan dengan DPRD pada APBD bertambah menjadi Rp. 1.963.936.796,00 pada perubahan RKPD Tahun 2026 bertambah lagi dengan anggaran TKD dan menjadi Rp. 2.565.132.916,00 karena karena adanya Perbaikan Taman Kota, taman Median Jalan dan Taman Talawi yang terbengkalai atau kuran terawat sebagai daerah resapan air sekaligus penambah indeks tutupan lahan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Payakumbuh yang masih kurang, Pengadaan bibit tanaman untuk lokasi rawan bencana, bibit pohon yang diadakan cemara norfolk dan pulai

D. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang berubah pada Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota anggaran RKPD sebesar Rp. 12.646.300,00 pada APBD Tahun Anggaran 2026 berkurang menajdi Rp. 6.909.350,00 kemudian pada Perubahan RKPD Tahun 2026 anggarannya tidak ada perubahan dari APBD .

E. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat yang berubah pada Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan yang berubah yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup, anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 591.145.000,00,00 dengan adanya dinamika pembahasan dengan DPRD pada APBD menjadi Rp. 311.645.000 kemudian mengalami penambahan anggaran pada perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.798.036.000 mengalami penambahan pada dari TKD sebesar Rp. 486.391.000 Penambahan karean adanya belanja Pengadaan alat pemilah sampah

Gibrik, Tenaga kerja TPS 3R, Penambahan daya listrik peralatan, Pemeliharaan TPS 3R, Pengadaan BIOPOND MAGGOT,

b. Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup pada RKPD Tahun 2026 dengan anggaran sebesar Rp. 188.610.260,00, pada APBD menjadi Rp. 188.610.272 , pada perubahan RKPD Tahun 2026 mengalami penambahan menjadi Rp. 284.815.442,00 Penambahan karena adanya kebijakan penambahan TKD untuk Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Persampahan (RIPS).

F. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat yagn berubah pada Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup anggaran RKPD sebesar Rp. 51.557.250,00 pada APBD Tahun Anggaran 2026 berkurang menajdi Rp. 30.480.800,00 kemudian pada Perubahan RKPD Tahun 2026 anggarannya tidak ada perubahan dari APBD.

G. Program Pengelolaan Persampahan yang berubah pada Kegiatan Pengelolaan Sampah dengan sub kegiatan sebagai berikut **:**

a. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota anggaran pada RKPD Tahun 2026 anggaran sebesar Rp. 3.657.564.575,00 seiring dengan dinamika pembahasan dengan DPRD pada APBD berkurang menjadi Rp. 486.809.575, pada perubahan RKPD Tahun 2026 bertambah lagi dan menjadi Rp. 8.215.592.721 penambahan ini penyesuaian TKD untuk belanja Pengadaan dump truck 1 unit, Pengadaan Armroll truck + container 2 unit, Pengadaan Tong Sampah Beton 50 unit, Pengadaan Incenerator 1 unit, BBM Dump Truck dan Armroll truck, Pengadaan Tanah Perluasan Tanah TPST, Pemeliharaan TD Nunang, Pengadaan sarana dan prasarana waste station, Pengecoran Jalan Kawasan TPST Ampangan, DAM TPST Ampangan, Penggantian Atap TPST, FS Perluasan TPST

b. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 6.654.191.880,00 seiring dengan dinamika dan pembahasan dengan DPRD APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 7.585.383.250 pada perubahan RKPD Tahun 2026 bertambah lagi menjadi Rp. 8.275.682.675,00 penambahan karena penyesuaian gaji untuk tenaga Tenaga Kerja TPST.

V.1.2.6 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan kewenangan yang diemban oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk menjalankan urusan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh alokasi anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 4.617.745.532,- yang terdiri dari 5 program, 15 kegiatan dan 31 sub kegiatan, pagu APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 4.959.570.931,- terdiri dari 5 program, 13 kegiatan dan 29 sub kegiatan, dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 5.017.636.080,- terdiri dari 5 program, 15 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Anggaran RKPD Tahun 2026 pada tahapan pembahasan mengalami penambahan sebesar Rp. 341.825.399,-. Dan pada tahapan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 399.890.548,-.

Perubahan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD Tahun 2026 dengan Perubahan RKPD Tahun 2026 sesuai dengan matrik 5.1 dijelaskan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mempunyai anggaran Rp.10.418.200 pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp.48.600 sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp.10.369.600,

b. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai anggaran Rp.101.116.100 pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp.19.038.900 sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 82.077.200,

c. Sub kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah mempunyai anggaran Rp.8.050.000 pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp,4.830.000 sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp.3.220.000,

d. Sub kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah mempunyai anggaran Rp.8.050.000 pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp.4.830.000 sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp.3.220.000.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN mempunyai anggaran Rp.3.207.660.760 pada RKPD Tahun 2026, kemudian karena adanya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp.224.221.159 sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp.3.431.881.919,00,

b. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada RKPD Tahun 2026 mempunyai anggaran Rp.259.200.000. Selanjutnya karena adanya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp.3.480.000 sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki anggaran sebesar Rp.255.720.000. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 terjadi pengurangan sebesar Rp.1.020.000 dari pagu RKPD Tahun 2026 karena adanya penyesuaian honor pengelola keuangan, sehingga pagu pada perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.258.180.000.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya mempunyai anggaran Rp.47.484.100 pada RKPD tahun 2026, kemudian karena adanya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 pagu dihilangkan sehingga menjadi Rp.0. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 terjadi pengurangan sebesar Rp.31.484.100 dari pagu RKPD Tahun 2026 karena pada awalnya direncanakan untuk seragam dinas PDH, namun diganti menjadi seragam batik pelayanan untuk 40 orang pegawai, sehingga pagu pada perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.16.000.000.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor mempunyai anggaran Rp.41.064.812 pada RKPD Tahun 2026 dan kemudian berkurang sebesar Rp.8.092.250 karena adanya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga anggaran menjadi Rp.32.972.562 pada APBD Tahun Anggaran 2026. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 terjadi pengurangan sebesar Rp.9.407.150 dari pagu RKPD Tahun 2026 karena adanya Penyesuaian kebutuhan dan Standar harga, sehingga pagu pada perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.31.657.662,

b. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu mempunyai anggaran Rp.3.461.500 pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp.2.093.000 sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp.1.368.500,

c. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mempunyai anggaran Rp.86.452.000 pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp.1.125.000 sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp.85.327.000,
d. Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD mempunyai anggaran Rp.8.050.000 pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp.4.830.000 sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp.3.220.000.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel merupakan sub kegiatan yang baru dimunculkan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.20.298.450 untuk pengadaan kursi kerja dan pelayanan sebanyak 13 unit serta kursi panjang untuk pelayanan sebanyak 2 unit,
b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya mempunyai anggaran Rp.6.500.000 pada RKPD Tahun 2026, kemudian karena adanya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 pagu dihilangkan sehingga menjadi Rp.0. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 terjadi penambahan sebesar Rp.3.800.000 dari pagu RKPD Tahun 2026 untuk pengadaan mesin penghancur kertas 1 unit dan printer 1 unit, sehingga pagu pada perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.10.300.000.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mempunyai anggaran Rp.100.497.060 pada RKPD Tahun 2026 dan bertambah sebesar Rp.13.506.940 sehingga menjadi Rp.114.004.000 pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 terjadi pengurangan sebesar Rp.4.221.800 dari pagu RKPD Tahun 2026 karena adanya Penyesuaian kebutuhan dan Standar harga, sehingga pagu pada perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.96.275.260,
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran pada pagu RKPD Tahun 2026 Rp.151.200.000, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp.44.516.280 sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki anggaran sebesar Rp.195.716.280. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 terjadi penambahan sebesar Rp.44.668.000 dari pagu RKPD Tahun 2026 untuk penyesuaian standar harga, BPJS, JKK dan JKM PPPK Paruh Waktu, sehingga pagu pada perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.195.868.000.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada RKPD Tahun 2026 mempunyai anggaran Rp.20.590.000, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp.9.500.000 sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki anggaran sebesar Rp.11.090.000. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 terjadi penambahan sebesar Rp.3.050.000 dari pagu RKPD Tahun 2026 karena adanya Penambahan pemeliharaan peralatan kantor sesuai dengan kebutuhan, sehingga pagu pada perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.23.640.000.

B. Program Pendaftaran Penduduk

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada RKPD Tahun 2026 mempunyai anggaran Rp.68.402.900, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp.34.222.230 sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki anggaran sebesar Rp.102.625.130. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 terjadi penambahan sebesar Rp.40.815.609 dari pagu RKPD Tahun 2026. Penambahan tersebut dikarenakan

penambahan gaji PPPK Paruh Waktu dan penyesuaian BPJS, JKK dan JKM, sehingga pagu pada perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.109.218.509.

2. **Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**
   Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk pada RKPD Tahun 2026 mempunyai anggaran Rp.60.264.050. karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp.19.582.050 sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp.40.682.000.

C. Program Pencatatan Sipil

1. **Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**
   Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil pada RKPD Tahun 2026 mempunyai anggaran Rp.58.235.400. Terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp.61.558.540 sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki anggaran sebesar Rp.119.793.940. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 terjadi penambahan sebesar Rp.70.313.780,00 dari pagu RKPD Tahun 2026 karena adanya penambahan gaji PPPK Paruh Waktu dan penyesuaian BPJS, JKK dan JKM, sehingga pagu pada perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.128.549.180.
2. **Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** dengan Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil pada RKPD Tahun 2026 mempunyai anggaran Rp.19.693.200. Terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp.21.077.050 sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp.40.770.250.

D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. **Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**
   Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dengan anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.12.954.250. Terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp.50 sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp.12.954.200.
2. **Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**
   a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan pada RKPD Tahun 2026 mempunyai anggaran Rp.13.485.300. Terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp.449.950 sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp.13.935.250,
   b. Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat pada RKPD Tahun 2026 mempunyai anggaran Rp.11.999.600. Terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp.70.000.000 sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 81.999.600,
3. **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** dengan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan anggaran awal pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.99.999.650. Terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp.5.035.750 sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp.105.035.400.

E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan yang berubah pada Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain dengan anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.18.523.950. Terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp.1.328.550,00 sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp.17.195.400.

V.1.2.7 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Pada tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) melaksanakan 2 (dua) Urusan Wajib hingga triwulan I bulan Maret Tahun Anggaran 2026 telah mencapai realisasi keuangan belanja daerah sebesar 13,40%, dengan rincian dari terealisasi Rp.1.032.488.726,- dari total pagu Rp.7.702.273.773,-. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 mengalami perubahan pada **Program Pengendalian Penduduk yang berubah pada Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Kota saat pembahasan pada APBD dengan DPRD terjadi penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan anggaran sebesar Rp 51.000.000-. Terjadi pengurangan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. Rp. 22.800.000 menjadi Rp. 28.200.000 disebabkan karena adanya penyesuaian nomenklatur BOKB TA 2026
b. Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Kota saat pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak diberikan anggaran (Rp. 0,00-.). Terjadi penambahan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 22.800.000 disebabkan karena kurang penginputan pagu DAK non-fisik

V.1.2.8 URUSAN PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan memperoleh alokasi anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp 9.298.390.128,-, yang terdiri dari 2 program, 16 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Pada APBD Tahun anggaran 2026 pagu anggaran sebesr Rp 9.384.571.695,- terdiri dari 2 program, 10 kegiatan dan 26 sub kegiatan. Sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 anggarannya menjadi Rp 23.125.809.745,- dengan 2 program, 11 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan dijelaskan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mempunyai anggaran Rp 16.499.800,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 14.625.300,- dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 5.770.300,-. pagu berkurang sebesar Rp 10.729.500,- karena terjadinya penyesuaian belanja sesuai dengan kebutuhan.
b. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai anggaran Rp 81.592.100,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 62.044.400,- dan Perubahan RKPD Tahun 2026 pagu menjadi Rp. 72.806.000,- berkurang sebesar Rp 8.786.100,- karena terjadinya penyesuaian belanja sesuai dengan kebutuhan.

c. Sub kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah mempunyai anggaran Rp 402.500,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp 92.975,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 495.475,-.
d. Sub kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah mempunyai anggaran Rp 402.500,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp. 94.650,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 497.150,-.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mempunyai anggaran Rp 5.144.076.345,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp 320.094.183,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 5.464.170.528,-.
b. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN mempunyai anggaran Rp 393.480.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 86.250.000,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 307.230.000,-.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya mempunyai anggaran Rp 122.403.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 49.339.800,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 73.063.200,-.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 24.830.400,-, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu dihilangkan sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 0,-.
b. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor mempunyai anggaran Rp 29.040.650,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 4.190.525,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 24.850.125,-.
c. Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan memiliki anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp 31.375.750,-, pada pembahasan APBD dengan DPRD, pagu pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 tetap sama dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 35.934.950,- terjadi penambahan sebesar Rp 4.559.200,-.
d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan memiliki anggaran sebesar Rp 2.601.500,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu dihilangkan sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 0,-.
e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD memiliki anggaran sebesar Rp 169.038.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 71.910.000,- dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 88.499.000,-. berkurang sebesar Rp 80.539.000,- karena terjadinya penyesuaian belanja sesuai dengan kebutuhan.

f. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD memiliki anggaran sebesar Rp 402.500,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp 94.650,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 497.150,-.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan memiliki anggaran sebesar Rp 50.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu dihilangkan sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 0,-.

b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya memiliki anggaran sebesar Rp 18.738.100,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu dihilangkan pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 dimunculkan kembali dengan anggaran sebesar Rp 557.136.750,-.

c. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya merupakan sub kegiatan yang muncul di tahapan Perubahan RKPD Tahun 2026 dengan anggaran sebesar Rp 462.754.000,-.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik memiliki anggaran sebesar Rp 82.842.098,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 72.794.867,-. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 417.793.767,- sehingga bertambah sebesar Rp. 334.951.669,

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memiliki anggaran sebesar Rp 117.000.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 anggaran menjadi Rp. 315.552.000,- dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 333.308.800,-. Sehingga pagu bertambah sebesar Rp 216.308.800,-.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada RKPD Tahun 2026 dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 291.610.000,-. dan Perubahan RKPD Tahun 2026 anggarannya menjadi Rp. 295.460.000,- sehingga pagu bertambah sebesar Rp. 3.850.000,-.

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya memiliki anggaran sebesar Rp 50.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu dihilangkan sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 0,-.

B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ

Sub kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota memiliki anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 90.000.000,- karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu dihilangkan sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 0,-.

2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota memiliki anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp 555.803.050,-. Karena

terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 759.653.050,-. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.1.978.667.050,- bertambah sebesar Rp. 1.422.864.000,- karena adanya tambahan TKD untuk pemulihan bencana dan percepatan ekonomi.

b. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan memiliki anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp 330.448.000,-. Karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 568.024.350,-. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 1.253.712.350,- bertambah sebesar Rp. 923.264.350,- karena adanya tambahan TKD (TKD) untuk pemulihan bencana dan percepatan ekonomi.

3. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota memiliki anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp 1.027.607.635,-, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, sehingga APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 591.331.150,-. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 1.122.437.550,- bertambah sebesar Rp. 94.829.915,- karena adanya tambahan TKD (TKD) untuk pemulihan bencana dan percepatan ekonomi.

b. Sub kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota memiliki anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 29.213.100,- karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu dihilangkan sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 0,-.

4. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Sub kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal memiliki anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 50.000,- karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu dihilangkan sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 0,-.

5. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah

a. Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota memiliki anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 50.000,- karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu dihilangkan sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 0,-.

b. Sub kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota merupakan sub kegiatan yang baru muncul pada Perubahan RKPD dengan anggaran sebesar Rp 9.887.000.000,- karena adanya tambahan TKD (TKD) untuk pemulihan bencana dan percepatan ekonomi.

6. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota memiliki anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 90.000,- karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu dihilangkan sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 0,-.

7. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

a. Sub kegiatan Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C memiliki anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 50.000,- karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu dihilangkan sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 0,-.

b. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C memiliki anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 50.000,- karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu dihilangkan sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 0,-.
c. Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) memiliki anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 50.000,- karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu dihilangkan sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 0,-.

8. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota memiliki anggaran sebesar Rp 448.467.950,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD pagu pada penetapan APBD menjadi Rp. 483.396.800,- dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 487.836.000,-. pagu bertambah sebesar Rp 39.368.050,- karena adanya tambahan TKD (TKD) untuk pemulihan bencana dan percepatan ekonomi.

9. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor memiliki anggaran sebesar Rp 12.085.050,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, anggaran pada penetapan APBD menjadi Rp. 63.420.300,- dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 anggaran menjadi Rp. 67.859.500,- terjadi penambahan sebesar Rp. 55.774.450,- karena adanya tambahan TKD (TKD) untuk pemulihan bencana dan percepatan ekonomi.
b. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor memiliki anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 50.000,- karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu dihilangkan sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 0,-.

V.1.2.9 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika memperoleh alokasi anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 10.210.472.296,-, terdiri dari 3 program, 9 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Pada APBD Tahun Anggaran 2026, alokasi anggaran sebesar Rp. 9.406.047.068,- terdiri dari 3 program, 7 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 alokasi anggran menjadi Rp. 10.891.523.379,- dengan 3 program, 8 kegiatan dan 21 sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan dijelaskan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mempunyai anggaran Rp 39.278.500,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 15.698.000,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 23.580.500,- .
b. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai anggaran Rp 58.557.100,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 pagu menjadi Rp. 35.599.400,- dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 pagu

berkurang sebesar Rp 15.918.450,- sehingga pada dan memiliki anggaran sebesar Rp. 42.638.650,-

c. Sub kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah anggaran pada RKPD Tahun 2026, dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki anggaran yang sama sebesar Rp. 1.006.250,- kemudian pada Perubahan RKPD Tahun 2026 sub kegiatan ini dihilangkan.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mempunyai anggaran Rp 3.840.220.476,,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 pagu menjadi Rp. 3.762.244.676,- dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 3.762.285.087,-. berkurang sebesar Rp 77.935.389,- karena penyesuaian belanja sesuai dengan kebutuhan.

b. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada RKPD Tahun 2026, APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki anggaran yang sama sebesar Rp. 278.070.000,-.dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 277.800.000,- berkurang sebesar Rp. 270.000,- karena penyesuaian belanja sesuai dengan kebutuhan.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya mempunyai anggaran Rp 35.360.500,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu dihilangkan sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 0,-.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga pada RKPD Tahun 2026, APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki anggaran yang sama sebesar Rp 44.500,-. dan Perubahan RKPD Tahun 2026 anggarannya menjadi Rp. 8.918.500,- bertambah sebesar Rp. 8.874.000,-

b. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor mempunyai anggaran Rp 50.362.660,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 15.103.250,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 35.259.410,-.

c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD memiliki anggaran sebesar Rp 356.075.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 177.161.000,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 178.914.000,-.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan memiliki anggaran sebesar Rp 115.440,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu dihilangkan sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 0,-.

b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya memiliki anggaran sebesar Rp 42.903.450,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu dihilangkan pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar sub kegiatan ini kembali muncul dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-

6. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memiliki anggaran sebesar Rp. 60.737.520,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 anggaran menjadi Rp. 60.738.864,- dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggarannya menjadi Rp. 65.503.864,- bertambah sebesar Rp. 4.766.344,-

B. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah kabupaten/Kota

a. Sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik memiliki anggaran sebesar Rp 159.893.800,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 pagu anggaran menjadi Rp. 138.768.400,- dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 anggaran menjadi Rp. 146.351.260,- pagu berkurang sebesar Rp 13.542.540,- karena penyesuaian belanja sesuai dengan kebutuhan.

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik memiliki anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp 929.040.020,-. Karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 1.011.988.696,-. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 1.795.332.840,- bertambah sebesar Rp. 866.292.820,- karena penyesuaian anggaran untuk kebutuhan publikasi pemerintah daerah melalui media komunikasi pemerintah daerah maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria teknis.

C. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

1. Kegiatan Pengelolaan *e-Government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota memiliki anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp 3.364.260.650,-. Karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp 3.109.080.600,-. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp 3.500.590.600,- bertambah sebesar Rp 136.329.950,- karena penyesuaian anggaran untuk pengelolaan e-government di lingkup pemerintahan kota.

b. Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE memiliki anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp 219.000.000,-. Karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp 164.179.200,-. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp 415.380.800,- bertambah sebesar Rp 196.380.800,- karena penyesuaian kebutuhan anggaran.

c. Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah memiliki anggaran sebesar Rp 42.782.050,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu dihilangkan sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 0,-.

d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas memiliki anggaran sebesar Rp 84.900,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu dihilangkan sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 0,-.

V.1.2.10 URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memperoleh alokasi anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 7.904.377.539,- yang terdiri dari 7 (tujuh) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Pagu APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 8.514.848.455,- yang terdiri dari 7 (tujuh) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan.

Anggaran RKPD Tahun 2026 pada tahapan pembahasan mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 610.470.916,- dan pada tahapan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.473.432.326,- yang dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran sebesar Rp. 11.383.450,-. Setelah pembahasan dengan DPRD mengenai APBD, maka pada APBD Tahun Anggaran 2026 anggarannya menjadi Rp. 3.680.000,-. Pada perubahan RKPD tahun 2026 anggarannya sama,

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran sebesar Rp. 59.949.350,-. Setelah pembahasan dengan DPRD mengenai APBD, maka pada APBD Tahun Anggaran 2026 anggarannya menjadi Rp. 39.529.250,-. Pada perubahan RKPD tahun 2026 anggarannya sama,

c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran sebesar Rp. 2.012.500,-. Melalui pembahasan dengan DPRD mengenai APBD, maka anggarannya menjadi Rp. 805.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026. Tidak terjadi perubahan anggaran pada perubahan RKPD tahun 2026,

d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran sebesar Rp. 2.012.500,-. Setelah pembahasan dengan DPRD mengenai APBD, maka pada APBD Tahun Anggaran 2026 anggarannya menjadi Rp. 3.680.000,-. Pada perubahan RKPD tahun 2026 anggarannya sama.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran sebesar Rp. 4.749.953.936,-. Setelah pembahasan dengan DPRD mengenai APBD, maka pada APBD Tahun Anggaran 2026 anggarannya menjadi Rp. 4.753.203.867,-. Pada perubahan RKPD tahun 2026 anggarannya sama,

b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada tahun 2026 mempunyai anggaran sebesar Rp. 368.067.000,- sama dengan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026. Pada perubahan RKPD tahun 2026 anggarannya bertambah Rp. 23.020.000,- menjadi Rp. 391.087.000,- yang merupakan penyesuaian honor pejabat penatausahan keuangan akibat adanya penambahan anggaran TKD.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran sebesar Rp. 42.432.600,-. Setelah pembahasan dengan DPRD mengenai APBD, maka pada APBD Tahun Anggaran 2026 anggaran untuk sub kegiatan ini dihilangkan. Pada perubahan RKPD tahun 2026, sub kegiatan ini tetap tidak digunakan.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran sebesar Rp. 22.323.575,-. Setelah pembahasan dengan DPRD mengenai APBD, maka pada APBD Tahun Anggaran 2026 anggarannya

menjadi Rp. 16.330.700,- Pada perubahan RKPD tahun 2026, tidak terjadi penambahan ataupun pengurangan pada anggarannya.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran sebesar Rp. 29.381.650,-. Setelah pembahasan dengan DPRD mengenai APBD, maka pada APBD Tahun Anggaran 2026 anggarannya menjadi Rp. 23.711.400,- Pada perubahan RKPD tahun 2026, tidak terjadi penambahan ataupun pengurangan pada anggarannya.
c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran sebesar Rp. 5.736.500,-. Setelah pembahasan dengan DPRD mengenai APBD, maka pada APBD Tahun Anggaran 2026 anggarannya menjadi Rp. 4.180.000,-. Pada perubahan RKPD tahun 2026, anggarannya tetap sama.
d. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran sebesar Rp. 12.959.550,-. Setelah pembahasan dengan DPRD mengenai APBD, maka pada APBD Tahun Anggaran 2026 anggarannya menjadi Rp. 6.724.500,- Pada perubahan RKPD tahun 2026, tidak terjadi penambahan ataupun pengurangan pada anggarannya.
e. Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran sebesar Rp. 218.903.000,-. Setelah pembahasan dengan DPRD mengenai APBD, maka pada APBD Tahun Anggaran 2026 anggarannya menjadi Rp. 199.996.000,- Pada perubahan RKPD tahun 2026, tidak terjadi penambahan ataupun pengurangan pada anggarannya.
f. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran sebesar Rp. 2.012.500,-. Setelah pembahasan dengan DPRD mengenai APBD, maka pada APBD Tahun Anggaran 2026 anggarannya menjadi Rp. 805.000,- Begitu juga pada perubahan RKPD tahun 2026, anggarannya tetap Rp. 805.000,-.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran sebesar Rp. 64.438,000,-. Setelah pembahasan dengan DPRD mengenai APBD, maka pada APBD Tahun Anggaran 2026 sub kegiatan ini tidak digunakan. Namun pada perubahan RKPD tahun 2026 sub kegiatan ini kembali digunakan dengan anggaran sebesar Rp. 32.219.000,- yang direncanakan untuk pembelian 1 (satu) buah kendaraan bermotor roda dua.
b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran sebesar Rp. 30.156.000,-. Setelah pembahasan dengan DPRD mengenai APBD, maka pada APBD Tahun Anggaran 2026 sub kegiatan ini tidak digunakan. Pada perubahan RKPD tahun 2026 sub kegiatan ini kembali digunakan dengan anggaran sebesar Rp. 33.983.800,- yang direncanakan untuk pembelian mebel kantor berupa lemari arsip, meja dan kursi staf.
c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran sebesar Rp. 45.045.650,-. Setelah pembahasan dengan DPRD mengenai APBD, maka pada APBD Tahun Anggaran 2026 sub kegiatan ini tidak digunakan. Pada perubahan RKPD tahun 2026 sub kegiatan ini kembali digunakan dengan anggaran sebesar Rp. 176.349.350,- yang direncanakan untuk pembelian peralatan kantor berupa komputer, laptop dll.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mempunyai anggaran Rp. 89.841.963,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi 92.350.763,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD. Pada perubahan RKPD tahun 2026 sub kegiatan ini kembali digunakan dengan anggaran sebesar Rp. 176.349.350,- yang direncanakan untuk pembelian peralatan kantor berupa komputer, laptop dll
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran pagu awal pada RKPD Tahun 2026 Rp 1.418.439.140-, karena adanya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 195.431.830,- Pada perubahan

RKPD tahun 2026 anggaran sub kegiatan bertambah menjadi Rp. 214.903.008,- yang merupakan penambahan gaji THR PPPK paruh waktu dan pembayaran hutang BPJS Kesehatan tahun 2025.

7. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran pagu awal pada RKPD Tahun 2026 Rp 196.100.000-, karena adanya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 188.400.000,- pada perubahan RKPD tahun 2026 anggaran sub kegiatan ini tidak mengalami perubahan.
   b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran pagu awal pada RKPD Tahun 2026 Rp 80.858.250-, karena adanya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 175.417.000,- Pada perubahan RKPD tahun 2026 anggaran sub kegiatan ini tidak mengalami perubahan.

B. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang berubah pada Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pelatihan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dengan anggaran pada RKPD tahun 2026 Rp. 129.999.200,- dan dengan terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD menjadi Rp. 216.374.550,-. Pada RKPD perubahan terjadi penambahan sehingga menjadi Rp. 230.785.610,- yang dikarenakan penambahan THR PPPK paruh waktu.

C. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang berubah pada Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota dengan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran Rp 19.999.850,- sama dengan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026. Kemudian terjadi penambahan pada sehingga menjadi Rp. 51.339.050,- yang akan mengakomodir pelatihan koperasi merah putih yang berasal dari dana TKD.

D. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro yang berubah pada Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro pada RKPD Tahun 2026 mempunyai anggaran Rp 93.337.300,- dan pada APBD Tahun Anggaran 2026 sub kegiatan ini tidak digunakan. Pada perubahan RKPD juga belum digunakan.

E. Program Pengembangan UMKM yang berubah pada Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil dengan Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan pada RKPD Tahun 2026 mempunyai anggaran Rp 99.347.000,- dan pada APBD Tahun Anggaran 2026 sama. Pada perubahan RKPD terjadi penambahan sebesar Rp. 146.915.658,- sehingga menjadi Rp. 246.262.658,-. Penambahan tersebut berasal dari dana TKD yang direncanakan untuk pemenuhan kerjasama dengan The Sak, Bali.

V.1.2.11 URUSAN PENANAMAN MODAL

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperoleh alokasi anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.4.700.143.926,- yang terdiri dari 6 program, 11 kegiatan dan 29 sub kegiatan, pagu APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.4.352.696.209,- terdiri dari 2 program, 6 kegiatan dan 18 sub kegiatan, dan pada

Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.4.407.206.105,- terdiri dari 2 program, 6 kegiatan dan 18 sub kegiatan.

Anggaran RKPD Tahun 2026 pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan sebesar Rp.347.447.717,-. Dan pada tahapan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.292.937.821,- .

Perubahan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD Tahun 2026 dengan Perubahan RKPD Tahun 2026 sesuai dengan matrik 5.1 dijelaskan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.684.800,- dimana anggaran pada RKPD Rp.13.000.250,-, sedangkan pada APBD menjadi Rp.6.706.550,-. Untuk Perubahan RKPD menjadi Rp. 10.315.450.

b. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.644.000,- dari Rp. 10.183.250,- pada RKPD, sedangkan pada APBD dan Perubahan RKPD menjadi Rp. 6.539.250,-.

c. Sub kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.086.750,- dari Rp. 1.489.250,- pada RKPD, sedangkan pada APBD dan Perubahan RKPD menjadi Rp. 402.500,-.

d. Sub kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.086.750,- dari Rp. 1.489.250,- pada RKPD, sedangkan pada APBD dan Perubahan RKPD menjadi Rp. 402.500,-.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 154.733.117,- dari Rp. 2.974.438.921,- pada RKPD, sedangkan pada APBD dan Perubahan RKPD menjadi Rp. 3.129.172.038,- dikarenakan oleh penyesuaian pada pajak penghasilan (PPh) Tunjangan Prestasi Kerja (TPP) dan Gaji Pegawai.

b. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 43.800.000,- dari Rp. 176.400.000,- pada RKPD, sedangkan pada APBD dan Perubahan RKPD menjadi Rp 132.600.000,-.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 49.504.700,- dari Rp. 49.504.700,- pada RKPD, sedangkan pada APBD dan Perubahan RKPD menjadi Rp. 0,-.

b. Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dari Rp. 25.000.000,- pada RKPD, sedangkan pada APBD dan Perubahan RKPD menjadi Rp. 0,-.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.429.450,- dari Rp. 8.001.300,- pada RKPD, sedangkan pada APBD dan Perubahan RKPD menjadi Rp 5.571.850,-.

b. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 4.267.670,- dari Rp. 30.000.345,- pada RKPD, sedangkan pada APBD anggaran sebesar Rp. 22.551.695,- dan Perubahan RKPD menjadi Rp 34.268.015,- dikarenakan penambahan alat tulis kantor.

c. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 437.900,- dari Rp. 9.999.700,- pada RKPD, sedangkan pada APBD anggaran sebesar Rp. 4.686.100,- dan Perubahan RKPD menjadi Rp 10.437.600,- dikarenakan penambahan penggandaan.

d. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.300.000,- dari Rp. 3.300.000,- pada RKPD, sedangkan pada APBD dan Perubahan RKPD menjadi Rp 0,-.
e. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 125.950,- dari Rp. 4.445.650,- pada RKPD, sedangkan pada APBD APBD anggaran sebesar Rp. 3.495.700,- dan Perubahan RKPD menjadi Rp 4.571.600,- dikarenakan penambahan snack tamu.
f. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 90.434.000,- dari Rp. 138.585.000,- pada RKPD, sedangkan pada APBD dan Perubahan RKPD menjadi Rp 48.151.000,-.
g. Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.086.750,- dari Rp. 1.489.250,- pada RKPD, sedangkan pada APBD dan Perubahan RKPD menjadi Rp 402.500,-.

5. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 31.843.832,- dari Rp. 626.280.000,- pada RKPD, sedangkan pada APBD anggaran sebesar Rp.625.766.556,- dan Perubahan RKPD menjadi Rp 658.123.832,- dikarenakan penambahan iuran jaminan kesehatan, kematian, kecelakaan kerja dan gaji PPPK paruh waktu.

6. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 31.700.000,- dari Rp. 190.200.000,- pada RKPD, sedangkan pada APBD dan Perubahan RKPD menjadi Rp 158.500.000,-.
b. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 100.000,- dari Rp. 100.000,- pada RKPD, sedangkan pada APBD dan Perubahan RKPD menjadi Rp 0,-.

B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang berubah pada Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan Sub kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 53.388.500,- dari Rp. 53.388.500,- pada RKPD, sedangkan pada APBD dan Perubahan RKPD menjadi Rp 0,-.

C. Program Promosi Penanaman Modal yang berubah pada Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 40.707.810,- dari Rp. 40.707.810,- pada RKPD, sedangkan pada APBD dan Perubahan RKPD menjadi Rp 0,-.

D. Program Pelayanan Penanaman Modal yang berubah pada Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan berikut :
a. Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 72.762.280,- dari Rp. 159.966.030,- pada RKPD, sedangkan pada APBD dan Perubahan RKPD menjadi Rp 87.203.750,-.
b. Sub kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 100.000,- dari Rp. 100.000,- pada RKPD, sedangkan pada APBD dan Perubahan RKPD menjadi Rp 0,-.

c. Sub kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 100.000,- dari Rp. 100.000,- pada RKPD, sedangkan pada APBD dan Perubahan RKPD menjadi Rp 0,-.

E. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang berubah pada Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan berikut :

a. Sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 9.430.600,- dari Rp. 9.430.600,- pada RKPD, sedangkan pada APBD dan Perubahan RKPD menjadi Rp 0,-.
b. Sub kegiatan Pengawasan Penanaman Modal mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- dari Rp. 12.000.000,- pada RKPD, sedangkan pada APBD dan Perubahan RKPD menjadi Rp 0,-.

F. Program Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang berubah pada Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 39.999.900,- dari Rp. 39.999.900,- pada RKPD, sedangkan pada APBD dan Perubahan RKPD menjadi Rp 0,-.

V.1.2.12 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mengampu 3 urusan, yaitu urusan Pemuda dan olah raga, urusan kebudayaan dan urusan pariwisata. Secara total, pagu anggaran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga pada RKPD Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 13.364.997.893,- dan mengalami pengurangan menjadi Rp. 11.143.208.125,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan pada APBD berupa pelaksanaan efisiensi anggaran menyesuaikan anggaran belanja Perangkat daerah sesuai kemampuan keuangan daerah. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 anggarannya bertambah menjadi Rp. 12.490.733.894,- karena adanya penyesuaian belanja kekurangan gaji P3K PW dan outsorching, tambahan untuk Porprov serta beberapa penyesuaian belanja lainnya yang akan dirinci lebih lanjut sesuai urusan.

Untuk Urusan Pemuda dan Olahraga, pada RKPD Tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp. 4.848.809.221,- yang terdiri dari 3 program, 6 kegiatan dan 10 subkegiatan. Dalam proses penganggaran terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 untuk urusan pemuda dan Olahraga pada Dinas Parpora disesuaikan menjadi Rp.2.884.524.170,- yang dianggarkan pada 3 program dan 6 kegiatan dengan 9 sub kegiatan. Untuk optimalisasi kegiatan dan layanan terdapat usulan penambahan anggaran Perubahan RKPD Tahun 2026 pada urusan ini menjadi Rp. 4.211.884.240,-. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan dijelaskan sebagai berikut.

A. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

1. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

a. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 31.815.900,- mengalami efisiensi anggaran pada pembahasan APBD dan pembahasan APBD sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026

menjadi Rp. 18.779.000,-. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 diusulkan penambahan pagu menjadi Rp.26.802.750,- untuk penambahan makan minum dan kebutuhan lain menyesuaikan dengan kebutuhan.

b. Subkeg Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota dengan anggaran Rp. 28.260.350,- pada RKPD Tahun 2026, mengalami penyesuaian dan efisiensi anggaran sehingga subkegiatan ini tidak dilaksanakan pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026.

2. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota dengan pagu RKPD Tahun 2026 Rp. 58.514.975,- dan mengalami efisiensi anggaran pada pembahasan APBD sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 30.046.525,-. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 pagunya kembali berkurang menjadi Rp. 20.444.700,- karna ada penyesuaian dan efisiensi pada beberapa item belanja.

B. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota dengan anggaran Rp. 805.103.871,- pada RKPD Tahun 2026 dan mengalami efisiensi pada pembahasan APBD sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 759.677.845,-. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 diusulkan penambahan anggaran untuk pemeliharaan prasarana olahraga sehingga pagunya menjadi Rp. 1.278.422.915,-

b. Subkeg Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar dengan anggaran RKPD Tahun 2026 Rp. 61.663.350,- mengalami efisiensi pada pembahasan APBD dan APBD sehingga pagunya menjadi Rp. 35.278.950,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota dengan anggaran RKPD Tahun 2026 Rp. 3.213.049.450,- mengalami efisiensi pada pembahasan APBD sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 1.563.831.800,-. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 diusulkan penambahan pagu menjadi Rp. 2.354.855.800,- untuk tambahan kebutuhan porprov yang dilaksanakan tahun 2026 ini.

b. Subkeg Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota dengan pagu RKPD Tahun 2026 Rp. 94.999.150,- mengalami efisiensi pada pembahasan APBD sehingga pagu APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 58.605.200,-

c. Subkeg Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga dengan anggaran Rp. 62.977.200,- pada RKPD Tahun 2026, dan mengalami efisiensi pada pembahasan APBD, sehingga pagu APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 31.226.800,-

3. **Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**
Kegiatan ini hanya terdiri dari subkeg Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. Pada RKPD Tahun 2026 anggaran subkeg ini sebesar Rp. 49.959.875,- dan mengalami penambahan saat pembahasan APBD dan APBD sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 53.122.625,- Pada perubahan RKPD Tahun 2026 kembali diusulkan penambahan pagu menjadi Rp. 70.713.625,-karena adanya penambahan kegiatan pemassalan olahraga.

C. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan. Kegiatan ini hanya terdiri dari Subkeg Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah, dengan pagu Rp. 442.465.100,- pada RKPD Tahun 2026 dan mengalami efisiensi pada saat pembahasan APBD dan APBD sehingga pagunya menjadi Rp. 335.533.500,- pada APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2026.

V.1.2.13 URUSAN STATISTIK

Urusan ini merupakan salah satu urusan yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang terdiri 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu P**rogram Penyelenggaraan Statistik Sektoral demgan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah kabupaten/Kota** dan mengalami perubahan pada Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral memiliki anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp 100.654.050,-, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 37.927.700,,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 62.726.350,-.

V.1.2.14 URUSAN PERSANDIAN

Urusan Persandian merupakan salah satu urusan yang juga diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Terdiri dari 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang mengalami perubahan yaitu **Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamaman Informasi dengan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah memiliki anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp 418.957.980,-, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 anggarannya menjadi Rp. 330.778.772,- dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 333.174.068,-. pagu berkurang sebesar Rp 85.783.912,-.

V.1.2.15 URUSAN KEBUDAYAAN

Urusan kebudayaan diampu oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Untuk menjalankan urusan tersebut Dinas Parpora pada RKPD Tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp. 1.794.897.250,00,- pada 4 Program, 6 kegiatan dan 9 Sub kegiatan. Dalam proses penganggaran terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD serta efisiensi, sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 disesuaikan menjadi Rp.1.430.094.400,-. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026, pagu anggaran urusan kebudayaan ini tetap Rp.1.430.094.400,- yang dianggarkan pada 3 program dan 5 kegiatan dengan 7 sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan dijelaskan sebagai berikut :

A. Program Pengembangan Kebudayaan

1. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini hanya terdiri dari Subkeg Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 67.550.100,- dan mengalami efisiensi saat pembahasan anggaran sehingga pagu APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 61.330.350,-

2. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Subkeg Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya dengan pagu RKPD Tahun 2026 Rp. 235.159.150,- dan mengalami penambahan sebesar Rp. 88.530.000,- pada saat pembahasan APBD sehingga pagu APBD menjadi Rp. 323.689.150,-. Pada perubahan RKPD tahun 2026 diusulkan penambahan pagu menjadi Rp. 332.699.150,- untuk tambahan belanja kegiatan (makan minum, piagam, sewa tenda dan orgen dll)

b. Subkeg Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional, dengan pagu RKPD Tahun 2026 Rp. 60.000.200,- dan mengalami efisiensi pada pembahasan APBD sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 44.230.200,-. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 diusulkan penambahan pagu menjadi Rp. 49.598.250,- untuk penyesuaian belanja makan minum dan beberapa belanja lainnya.

3. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Subkeg Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 125.000.200,- mengalami efisiensi pada saat pembahasan APBD sehingga pagu APBD dan RKPD perubahan 2026 menjadi Rp. 91.646.550,-

b. Sub kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat dengan pagu RKPD Tahun 2026 Rp. 1.057.198.600,- namun mengalami efisiensi anggaran pada saat pembahasan APBD sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. Rp. 842.434.800,-. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 kembali dilakukan pengurangan menjadi Rp. 839.283.550,- karena adanya penyesuaian penerima hibah lembaga adat tahun 2026 serta penyesuaian beberapa belanja lainnya.

B. Program Pengembangan Kesenian Tradisional yang berubah pada Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
Dengan Subkeg Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional yang pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 103.249.800,- dan mengalami efisiensi saat pembahasan APBD sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 46.059.800,-. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 kembali dilakukan efisiensi sehingga pagunya menjadi Rp. 42.759.800,- karena ada pengurangan sewa orgen dan beberapa belanja lainnya.

C. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya yang berubah pada Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 21.542.750,- namun harus dilakukan effisiensi pada pembahasan APBD sehingga pagu APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 12.776.750,-.

D. Program Pengelolaan Permuseuman pada Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

a) Subkeg Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu, dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 25.196.100,- dan mengalami efisiensi pada saat pembahasan APBD sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 5.127.950,- Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 subkeg ini di nol-kan karena belum dapat direalisasikan.

b) Sub kegiatan Penyedian dan Pemeliharaan sarana dan prasarana museum dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 100.000.350,- namun mengalami efisiensi pada pembahasan APBD, sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp. 2.798.850,-. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 subkeg ini di nol-kan karena tidak dapat direalisasikan, subkeg ini terindikasi tidak ada pada renstra Dinas Parpora tahun 2025-2029,-.

V.1.2.16 URUSAN PERPUSTAKAAN

Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.3.651.792.209,- yang terdiri dari 3 program, 10 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Pembahasan APBD dengan DPRD sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.4.413.426.721,- yang terdiri dari 3 program, 9 kegiatan dan 28 sub kegiatan; dan pada Perubahan RKPD tahun 2026 dengan anggaran Rp. 4.421.616.220,- terdiri dari 3 program, 10 kegiatan dan 29 sub kegiatan sub kegiatan.

Selisih anggaran RKPD Tahun 2026 dengan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 adalah sebesar Rp.761.634.512,- atau terjadi penambahan anggaran dan selisih anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan Perubahan RKPD Tahun 2026 adalah sebesar Rp.8.189.499,- atau terjadi penambahan anggaran.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan dijelaskan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang berubah pada

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, dengan pagu pada RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.598.000,- dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 sub kegiatan ini dihapuskan rekening belanjanya berupa belanja makanan dan minunan rapat.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.2.301.649.155,-, namun pada tahapan pembahasan APBD mengalami penambahan sebesar Rp.285.843.812,- sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.2.587.492.967,- berupa penambahan komponen belanja gaji PPPK, penambahan tambahan tunjangan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN dan penyesuaian pagu anggaran Dinas,

b. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.200.280.000,-, namun pada tahapan pembahasan APBD mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.4.440.000,- atau akibat penyesuaian honorarium pejabat pengelolaan keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Perpustakaan, PPTK Perpustakaan, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Perpustakaan sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.204.720.000,- dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 mengalami pengurangan Rp.3.720.000,- menjadi Rp.201.000.000,- berupa penyesuaian honorarium Pengguna Anggaran dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.23.236.900,-, namun pada tahapan pembahasan APBD mengalami pengurangan anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp.23.236.900,-, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-

4. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
   a. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.17.516.600,- namun pada pembahasan APBD mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.6.521.000,- berupa pembelian refill isi ulang APAR dan penambahan volume herbisida roundup, sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.23.767.600,- Dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 225.800,- menjadi Rp.23.993.400,- berupa penyesuaian anggaran penghapusan belanja refil alat pemadam dan pengadaan marawa, bendera merah putih dan gerobak barang artco.
   b. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.101.426.000,-, namun pada tahapan pembahasan APBD mengalami pengurangan anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp.44.074.000,-, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.57.352.000,-.
   c. Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.1.424.000,-, namun pada tahapan pembahasan APBD mengalami penambahan anggaran untuk pengadaan rak arsip sebesar Rp.18.277.000,-, sehingga anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.19.701.000,-.

5. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pamerintahan Daerah**
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.100.000,- namun pada tahapan pembahasan APBD mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.100.000,- sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.0,- dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 terjadi penambahan anggaran berupa pengadaan laptop dan printer sebesar Rp. 49.237.050,-.
   b. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.100.000,-, namun pada tahapan pembahasan APBD mengalami pengurangan anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp.100.000,-, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-.

6. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan pagu pada RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.121.388.669,-, namun pada Perubahan RKPD Tahun 2026 mengalamai pengurangan anggaran sebesar Rp.46.901.586,- menjadi Rp.74.487.083,- akibat pengurangan pembayaran tagihan listrik dan tagihan air kantor yang berlokasi di Jalan Sukarno Hatta No. 175 Kota Payakumbuh dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh yang melakukan pinjam pakai kantor tersebut.
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.391.067.865,-, namun pada tahapan pembahasan APBD mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.105.600.000,- untuk gaji 2 orang tenaga outsourcing kebersihan dan 1 orang tenaga outsourcing sopir Perpustakaan Keliling.sehingga anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.496.667.865,-. Dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 terjadi penambahan sebesar Rp.8.946.235,- untuk Gaji PPPK Paruh Waktu sebanyak 1 bulan dan penyesuaian Belanja Iuran/Jaminan Asuransi Non ASN Tahun 2026 untuk PPPK PW. sehingga pagu Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.505.614.100,-.

7. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan pagu anggaran

pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 122.950.000,-, namun pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.24.000.000,- untuk 1 unit belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional pejabat eselon III, sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 dan PPerubahan RKPD menjadi Rp.146.950.000,-.

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.29.918.720,-, namun pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.30.918.720,- atau terjadi penambahan anggaran untuk belanja pemeliharaan 1 unit CCTV sebesar Rp.1.000.000,-

B. Program Pembinaan Perpustakaan

1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

a. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota, dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.113.978.650,-, namun pada tahapan pembahasan APBD mengalami pengurangan anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp.8.820.000,-, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.105.158.650,-.

b. Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah di Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.100.000,- dan pada tahapan pembahasan APBD terjadi penambahan anggaran berupa pengadaan sarana prasarana perpustakaan daerah : belanja modal LCD proyektor, infocus, matras, meja aula, dan kursi roda yang dibiayai oleh dana DAU Diarahkan sebesar Rp.50.000.000,- dan belanja untuk kebutuhan sosialisasi akreditasi perpustakaan yang dibiayai oleh dana DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah sebesar Rp.38.317.000,- sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.88.417.000,-.

c. Sub Kegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, dengan pagu RKPD Tahun 2026 Rp.0,-, namun pada tahapan pembahasan APBD terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.111.633.750,- atau munculnya sub kegiatan baru untuk mendukung kegiatan bimtek kepenulisan, lomba pembuatan resensi buku, lomba video konten literasi dan bimtek kepenulisan yang dibiayai oleh dana DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.111.633.750,-.

2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial, dengan pagu RKPD Tahun 2026 Rp.29.513.700,-, namun pada tahapan pembahasan APBD terjadi pengurangan anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp.29.513.700,- sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-.

b. Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca, dengan pagu RKPD Tahun 2026 Rp.0,- namun pada tahapan pembahasan APBD terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.172.195.000,- atau munculnya sub kegiatan baru untuk mendukung kegiatan Lomba Perpustakaan Desa Terbaik dan Festival Literasi yang dibiayai oleh dana DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.172.195.000,-.

c. Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat, dengan pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.25.377.700,- namun pada pembahasan APBD mengalami penambahan anggaran untuk untuk kegiatan lomba bertutur dan lomba literasi yang dibiayai dengan dana DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah sebesar Rp.40.725.300,-, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.66.103.000,-.

C. **Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang berubah pada Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota** dengan Sub Kegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan, dengan pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.0,- namun pada pembahasan APBD mengalami penambahan anggaran untuk mendukung kegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang dibiayai oleh dana DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah sebesar Rp.10.196.250,-, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.10.196.250,-.

V.1.2.17 URUSAN KEARSIPAN

Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan dengan jumlah anggaran Belanja Langsung pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.174.105.210,- terdiri dari 1 program, 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan, namun pada tahapan pembahasan APBD terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.31.553.050,-, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.205.658.260,- dan Perubahan RKPD Tahun 2026 bertambah sebesar Rp.450,- akibat penyesuaian anggaran menjadi Rp.205.658.710,- terdiri dari 1 program, 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan dijelaskan sebagai berikut :

A. **Program Pengelolaan Arsip**

1. **Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota.**
   a. Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan pagu pada RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 54.612.600,- namun pada Perubahan RKPD Tahun 2026 mengalami pengurangan anggaran berupa penyesuaian belanja fotocopy, makanan dan minuman rapat, dan satuan biaya transportasi darat dalam kota sebesar Rp.6.810.050,- menjadi Rp.47.802.550,-.
   b. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis tidak ada pada RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2026, sub kegiatan ini baru dimunculkan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 dengan anggaran sebesar Rp.18.000.000,- berupa pengadaan memory eksternal untuk penyimpanan dokumen arsip statis.
2. **Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota.**
   Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis, dengan pagu pada RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 64.746.010,- dan Perubahan RKPD mengalami pengurangan belanja makanan dan minuman rapat, dan makanan dan minuman aktifitas lapangan sebesar Rp.11.189.500 menjadi Rp.53.556.510,-.

3. **Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**
   Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 54.746.600,- namun pada tahapan pembahasan APBD mengalami penambahan anggaran untuk kegiatan sosialisasi/ bimtek/pembinaan kearsipan kepada Perangkat Daerah di Kota Payakumbuh sebesar Rp.31.553.050,-, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.86.299.650,-
   .

V.2 URUSAN PILIHAN

V.2.1 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dinas Pertanian mengampu dua urusan yaitu urusan kelautan dan perikanan serta urusan pertanian. Untuk menjalankan dua urusan tersebut pada RKPD Tahun 2026 dianggarkan pagu Rp. 21.738.040.565,- untuk Dinas Pertanian, namun di APBD TA 2026 berkurang menjadi Rp. 15.864.205.870,- karena adanya proses efisiensi pada tahapan pembahasan APBD. Selanjutnya dengan adanya program bantuan presiden (banpres) serta tambahan TKD untuk daerah terdampak bencana di Sumatera Barat, pada Perubahan RKPD Tahun 2026 Dinas pertanian mendapatkan tambahan dana sehingga pagunya menjadi Rp.16.758.161.393,-. Uraian perubahan penganggaran pada dinas pertanian selanjutnya dapat dilihat pada uraian per urusan.

Untuk menjalankan urusan Kelautan dan Perikanan, Dinas pertanian pada RKPD Tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp. 1.049.470.362,- pada 2 program, 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan. Dalam proses penganggaran terjadi dinamika pembahasan pada pembahasan APBD dengan DPRD, sehingga pagu APBD tahun anggaran 2026 untuk urusan Kelautan dan perikanan pada Dinas Pertanian disesuaikan menjadi Rp.691.370.764,- yang dianggarkan pada 2 program dan 3 kegiatan dengan 5 sub kegiatan.

Kondisi bencana yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, menyebabkan penambahaan transfer keuangan daerah, dimana Dinas pertanian menjadi salah satu perangkat daerah yang memperoleh tambahan anggaran sehingga pada rencana perubahan RKPD Tahun 2026 untuk urusan kelautan dan perikanan diusulkan penganggaran sebesar menjadi Rp. 1.740.728.709,-. Selanjutnya Program, kegiatan dan subkegiatan yang berubah dapat dilihat pada uraian berikut:

A. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil

a. Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil, dengan pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 477.825.000, namun mengalami pengurangan anggaran pada APBD sebesar Rp. -250.001.700,- akibat kebijakan efisiensi pada pembahasan APBD, sehingga pagu APBD dan Perubahan RKPD menjadi Rp. 227.823.300,-

b. Subkeg Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dengan pagu RKPD Tahun 2026 Rp. 74.268.950,-, namun mengalami pengurangan anggaran pada APBD sebesar Rp. 24.147.450,- akibat kebijakan efisiensi pada pembahasan APBD, sehingga pagu APBD dan Perubahan RKPD menjadi Rp. 50.121.500,-

2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

a. Subkeg Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 23.414.100,-. Dan mengalami penambahan pagu sebesar Rp. 50.730,- pada tahapan pembahasan APBD akibat penyesuaian harga satuan sehingga pagu APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 23.464.830,-

b. Sub kegiatan Penjaminan ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam satu daerah Kota/Kabupaten dilaksanakan oleh **UPTD PERBENIHAN DAN PAKAN IKAN** dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 297.888.632,-. Pada pembahasan APBD pagunya berkurang menjadi Rp. 291.567.204,- karena efisiensi anggaran. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 pagu subkeg ini kembali bertambah menjadi Rp. 1.340.925.149,- untuk perbaikan kolam pada UPTD Perbenihan dan Pakan Ikan, dengan sumber pembiayaan dari penambahan

anggaran TKD 2026. Disamping itu juga ada penambahan untuk gaji P3K-PW menjadi 13 bulan.

B. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan yang berubah pada Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil. Kegiatan ini hanya terdiri dari Subkeg Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko dengan pagu RKPD Tahun 2026 Rp. 176.073.680,-, namun mengalami pengurangan anggaran pada APBD sebesar Rp. 77.679.750,- akibat kebijakan efisiensi pada pembahasan APBD, sehingga pagu APBD dan Perubahan RKPD menjadi Rp. 98.393.930,-

V.2.2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Urusan pariwisata diampu oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Untuk menjalankan urusan tersebut Dinas Parpora pada RKPD Tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp. 6.721.291.422,00,- yang terdiri dari 5 program, 12 kegiatan dan 28 subkegiatan. Dalam proses penganggaran terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 untuk urusan Pariwisata pada Dinas Parpora disesuaikan menjadi Rp.6.828.589.555,- yang dianggarkan pada 5 program, 11 kegiatan dan 26 subkegiatan. Untuk optimalisasi kegiatan dan layanan pada urusan ini, maka untuk perubahan RKPD tahun 2026 diusulkan anggarannya menjadi Rp. 6.848.755.254,- yang terdiri dari 5 program, 11 kegiatan dan 24 sub kegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan yang mengalami perubahan selanjutnya diuraikan sebagai berikut.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Subkeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 38.041.300,-. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 dilakukan penyesuaian item belanja fotokopi sehingga pagunya menjadi Rp. 38.041.700,-

b. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 18.954.100,- mengalami penambahan Rp. 400,- akibat adanya penyesuaian harga satuan sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 18.954.500,-. Pada perubahan RKPD diusulkan penambahan pagu menjadi Rp. 22.130.300,- karna ada penambahan belanja makan dan minum rapat.

c. Subkeg Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah, dengan pagu RKPD Tahun 2026 Rp. 1.328.250,- dan mengalami penambahan anggaran pada saat pembahasan APBD sehingga pagu APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 3.984.300,-

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Subkeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 4.162.368.632,-, dilakukan pengurangan sebesar Rp. 31.548.697,- pada APBD karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi ASN Dinas Parpora sehingga pagu APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 4.130.819.935.

b. Subkeg Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 406.920.000,- dan dilakukan penambahan anggaran saat pembahasan APBD untuk mencukupi kebutuhan honor pengelola keuangan sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 433.440.000,-. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 kembali dilakukan penyesuaian pagu anggaran menjadi Rp. 431.240.000,- karena ada penyesuaian honor pengurus barang.

3. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

   Kegiatan ini hanya terdiri dari subkeg Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan pagu awal Rp. 34.350.200,-namun sesuai dengan kebijakan efisiensi daerah subkeg ini di nolkan pada APBD Tahun Anggaran 2026.

4. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

   a. Subkeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan pagu RKPD Tahun 2026 Rp. 9.875.300,-, mengalami penambahan di APBD sebesar Rp. 16.200,- karena penyesuaian harga satuan rekening belanja sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 9.891.500,-. Pada perubahan RKPD diusulkan penambahan anggaran menjadi Rp. 14.450.900,- untuk penambahan belanja ATK kantor.

   b. Subkeg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan pagu RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 15.227.800,-. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 diusulkan penambahan pagu menjadi Rp. 18.257.400,- untuk tambahan cetak spanduk dan blanko SP2D.

   c. Subkeg Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 6.027.550,-, mengalami penambahan Rp. 1.408.750,- pada pembahasasn APBD sesuai kebutuhan, sehingga pagu APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 7.436.300,-

   d. Subkeg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 210.573.000,-, sesuai kebijakan daerah dilakukan efisiensi pada pembahasan APBD sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 184.946.000,-. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 kembali dilakukan efisiensi sesuai hasil evaluasi Tw 1 menjadi Rp. 139.356.000,

5. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

   a. Subkeg Pengadaan Mebel, dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 9.432.300,- dan mengalami penambahan pada saat pembahasan APBD sesuai kebutuhan dinas, sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 29.315.100,-. Pada perubahan RKPD diusulkan penambahan pagu menjadi Rp. 39.865.800,- untuk pembelian filling kabinet, dan lemari arsip

   b. Subkeg Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 23.131.900,-, namun subkeg ini di nol-kan pada APBD Tahun Anggaran 2026 dalan rangka memenuhi kebijakan efisiensi anggaran. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 kembali diusulkan sebesar Rp. 29.214.950,- untuk pembelian tablet dan laptop.

6. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

   a. Subkeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 280.910.540,-, dan dilakukan pengurangan sebesar Rp. 22.240 pada APBD karena penyesuian harga satuan sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 280.888.300,-. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 pagunya kembali di efisiensi menjadi Rp. 257.286.369,- menyesuaikan dengan hasil dan realisasi TW 1.

   b. Subkeg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan pagu RKPD Tahun 2026 Rp. 220.056.570,- dan dilakukan pengurangan anggaran Rp. 16.190,- karena adanya penyesuaian harga satuan belanja sehingga pagu APBD menjadi Rp. 220.040.380,-. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 diusulkan penambahan pagu menjadi Rp. 232.805.380,- karena penyesuaian gaji P3K-PW dan outsourching menjadi 13 bulan.

7. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

   a. Subkeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan; dengan pagu RKPD Tahun 2026 Rp. 248.850.000,- namun dilakukan pengurangan Rp.48.000.000,-

karena efisiensi anggaran, sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 200.850.000,-. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 kembali diusulkan penambahan anggaran menjadi Rp. 210.850.000,- menyesuaikan dengan kebutuhan.

b. Subkeg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 12.380.000,-. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 diusulkan penambahan menjadi Rp. 19.570.000,- untuk tambahan pemeliharaan PC/notebook dan pemeliharaan jaringan.
c. Subkeg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,- dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 38.230.000,-, dilakukan penambahan Rp. 35.157.000,- pada pembahasan APBD sesuai hasil perhitungan dan kebutuhan rehap kantor sehingga pagu APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 73.387.000,-
d. Subkeg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pagu RKPD Tahun 2026 adalah Rp. 7.500.000,- dan dilakukan penambahan Rp. 204.999.400,- pada pembahasan APBD sesuai hasil perhitungan kebutuhan rehap sarana kantor lainnya sehingga pagu APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 212.499.400,-.

B. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang berubah pada Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Kegiatan ini hanya terdiri dari Subkeg Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Pada RKPD Tahun 2026 pagu subkeg ini adalah Rp. 498.600.130,- namun mengalami efisiensi pada pembahasan APBD sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 489.939.440,-. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 diusulkan penambahan menjadi Rp. 501.011.320,- karena ada penambahan gaji P3K-PW menjadi 13 bulan.

C. Program Pemasaran Pariwisata

1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

a. Subkeg Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, dengan pagu RKPD Tahun 2026 Rp. 45.210.850,-, namun mengalami pengurangan pada pembahasan efisiensi sehingga pagu APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 33.894.900,-
b. Sub kegiatan Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/ kota; dengan pagu RKPD Tahun 2026 Rp. 156.114.700,- dan mengalami penambahan pada pembahasan APBD dalam rangka optimalisasi pelaksanaan event pariwisata sehingga pagu APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 167.156.650,-

D. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Pada Program ini yang mengalami perubahan adalah **Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif,** Subkeg Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual dengan pagu RKPD Tahun 2026 Rp. 25.000.000,- namun mengalami pengurangan karena adanya efisiensi anggaran sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 21.025.150,-. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 kembali dilakukan efisiensi anggaran subkeg sehingga pagunya menjadi Rp. 16.929.250,-

E. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif pada Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

a. Sub kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif, dengan pagu RKPD Tahun 2026 Rp. 150.000.000,-, dilakukan penambahan Rp. 97.150,- pada pembahasan APBD untuk penyesuaian harga satuan belanja sehingga pagu APBD menjadi Rp. 150.097.150,-. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 diusulkan penambahan menjadi Rp. 153.842.250,- untuk juri dan hadiah lomba.

b. Subkeg Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dengan pagu RKPD Tahun 2026 Rp. 25.000.000,- namun pagunya dikurangi dalam rangka memenuhi kebijakan efisiensi anggaran sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 17.166.150,-. Pada perubahan RKPD kembali diusulkan penambahan menjadi Rp. 17.516.950,- untuk narasumber,-

V.2.3 URUSAN PERTANIAN

Urusan pertanian diampu oleh Dinas Pertanian. Untuk menjalankan urusan tersebut Dinas pertanian pada RKPD Tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp. 20.688.570.203,- yang terdiri dari 6 program, 18 kegiatan dan 44 subkegiatan. Dalam proses penganggaran terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 untuk urusan pertanian disesuaikan menjadi Rp.15.172.835.106,- yang dianggarkan pada 5 program, 16 kegiatan dan 40 subkegiatan.

Untuk perubahan RKPD Tahun 2026 ini ada beberapa kondisi yang mempengaruhi pengangganggaran urusan pertanian ini, antara lain adanya penambahan Transfer Keuangan Daerah dan banpres untuk daerah terdampak bencana; pemindahan status penyuluh menjadi pegawai pusat yang berakibat adanya pengurangan belanja gaji dan pegawai serta adanya penyesuaian pendapatan BLUD di pertanian, sehingga pagu perubahan RKPD Tahun 2026 ururan pertanian berubah menjadi Rp. 15.017.432.684,-. yang terdiri dari 5 program, 16 kegiatan dan 39 subkegiatan. Selanjutnya Program, Kegiatan dan subkegiatan yang mengalami perubahan dapat dilihat pada uraian berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Subkeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 23.363.500,- namun mengalami pengurangan pada pembahasan APBD dalam rangka efisiensi anggaran sehingga pagu APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 10.079.900,-

b. Subkeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 136.760.000,- namun mengalami pengurangan pada pembahasan APBD dalam rangka efisiensi anggaran sehingga pagu APBD menjadi Rp. 122.259.800,-. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 diusulkan pengurangan pagu menjadi Rp. 71.004.000,- karena adanya pengurangan/penyesuaian belanja lembur dan makan minum rapat.

c. Subkeg Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 4.025.000,- namun mengalami pengurangan pada pembahasan APBD dalam rangka efisiensi anggaran sehingga pagu APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 1.610.000,-

d. Subkeg Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah, dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 5.031.250,- namun mengalami pengurangan pada pembahasan APBD dalam rangka efisiensi anggaran sehingga pagu APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 2.012.500,-

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 11.051.197.285,-. Pada APBD Tahun Anggaran 2026

anggarannya dikurangi menjadi Rp. 9.416.065.910,- karena penyesuaian dengan kebutuhan dan kondisi ASN di Dinas Pertanian saat itu. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 anggarannya dikurangi kembali sebagai akibat adanya pengurangan Gaji Penyuluh yang statusnya pindah menjadi pegawai Kementerian pertanian, sehingga pagu subkeg ini menjadi Rp. 7.754.570.714,-

b. Subkeg Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan pagu RKPD Tahun 2026 Rp. 697.920.000,00,-, dan dilaksanakan penyesuaian dan efisiensi pada tahap pembahasan APBD sehingga pagunya menjadi Rp. 693.240.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 kembali dilakukan penyesuaian pada honor pengelola keuangan sehingga pagunya menjadi Rp. 668.900.000,-.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini hanya terdiri dari subkeg Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 95.978.500,-. Namun subkeg ini sesuai dengan kebijakan kemampuan keuangan daerah tahun 2026 pagunya di APBD menjadi nol.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Subkeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan pagu RKPD Tahun 2026 dan APBD TA 2026 sebesar Rp. 6.251.200,-, diusulkan pengurangan pada perubahan RKPD 2026 menjadi Rp. 4.837.900,- menyesuaikan dengan realisasi dan kebutuhan belanja dinas.

b. Subkeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan pagu RKPD Tahun 2026 Rp. 55.946.450,-, namun mengalami pengurangan pada pembahasan APBD dalam rangka efisiensi anggaran sehingga pagu APBD menjadi Rp. 22.378.220,-. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 pagunya diusulkan bertambah untuk pembelian slinger sehingga pagu perubahan menjadi Rp. 34.878.220,-

c. Subkeg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 19.929.600,-. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 diusulkan penambahan untuk cetak banner, spanduk dan poster sehingga pagu subkeg menjadi Rp. 23.704.400,-

d. Subkeg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan pagu RKPD Tahun 2026 Rp. 567.412.000,-, namun mengalami pengurangan pada pembahasan APBD dalam rangka efisiensi anggaran sehingga pagu APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 300.034.000,-.

e. Subkeg Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan pagu RKPD Tahun 2026 Rp. 4.025.000,-, namun mengalami pengurangan pada pembahasan APBD dalam rangka efisiensi anggaran sehingga pagu APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 24.684.000 ,-.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Subkeg Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada RKPD Tahun 2026 terdapat cantolan anggaran Rp. 1.000.000,-, Namun subkeg ini sesuai dengan kebijakan kemampuan keuangan daerah tahun 2026 pagunya di APBD menjadi nol.

b. Subkeg Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan pagu RKPD Tahun 2026 Rp. 59.428.300,-, namun mengalami pengurangan pada pembahasan APBD dalam rangka efisiensi anggaran sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 10.912.500,-. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 diusulkan penambahan untuk pembelian laptop, komputer, dan printer sehingga usulan pagu perubahan menjadi Rp. 78.971.450

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Subkeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 224.632.698,-. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 diusulkan pengurangan sebesar Rp.8.500.000,- karena adanya penyesuaian belanja tagihan listrik, sehingga pagu perubahan RKPD menjadi Rp. 216.132.698.

b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 449.273.800,-, namun mengalami penyesuaian dan efisiensi pada tahapan pembahasan APBD sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 448.940.316,-. Pada perubahan RKPD Tahun 2026

pagunya diusulkan bertambah menjadi Rp. 478.241.466,- karena penambahan gaji P3K-PW dan outsouching menjadi 13 bulan.

7. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
   a. Subkeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2026 Rp. 600.200.000,-. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 diusulkan pengurangan anggaran menjadi Rp. 457.750.000,- karena ada pengurangan biaya pemeliharaan kendaraan roda 2 penyuluh pertanian yang statusnya pindah ke kementerian.
   b. Subkeg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 23.334.360,-. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 bertambah menjadi Rp. 25.082.360,- untuk pembelian refill racun api.
   c. Sub kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 199.888.000. Namun pagunya menjadi Rp.15.872.000,- untuk belanja pemeliharaan gedung pada APBD Tahun Anggaran 2026 akibat efisiensi pada pembahasan APBD. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 diusulkan penambahan belanja modal rehabilitasi dan pemeliharaan gedung Kantor sehingga pagunya menjadi Rp. 188.926.000 ,-.

B. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

1. **Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**
   a. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi dengan RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 252.656.045,-, namun mengalami pengurangan sehingga pagunya menjadi Rp. 21.156.045,- pada APBD karena adanya efisiensi pada tahap pembahasan APBD. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 pagunya Kembali bertambah menjadi Rp. 86.156.045,00,- karena adanya penambahan TKD untuk pembelian Alsintan.
   b. Subkeg Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 73.020.060,- namun mengalami pengurangan sehingga pagunya menjadi Rp. 66.886.946,- pada APBD karena adanya efisiensi pada tahap pembahasan APBD. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 pagunya bertambah menjadi Rp. 89.124.750,- untuk perbaikan mesin colt storage, penambahan ini dari penambahan TKD 2026.
2. **Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**
   Subkeg Pemanfaatan SDG Hewan / Tanaman dengan pagu RKPD Tahun 2026 Rp. 380.572.400,- dan bertambah menjadi Rp.411.478.000 pada APBD Tahun Anggaran 2026 saat pembahasan anggaran APBD. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 kembali terjadi penambahan pagu menjadi Rp. 1.270.150.450,-. Penambahan ini dari Banpres bencana sebesar 113 juta, dan tambakan TKD 2026 untuk Inovasi Granila Jarwo dan Petani Berdasi.
3. **Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**
   Subkeg Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 91.292.500,00,- namun mengalami pengurangan sehingga pagunya menjadi Rp. 74.224.700,- pada APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 karena adanya efisiensi pada tahap pembahasan APBD.

C. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang berubah pada Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian dengan sub kegiatan berikut :

a. Subkeg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 1.608.098.500,- namun mengalami pengurangan dan efisiensi pada pembahasan APBD, sehingga pagu APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 210.360.550,-
b. Subkeg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani, dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 1.786.518.500,- namun mengalami pengurangan

dan efisiensi pada pembahasan APBD, sehingga pagu APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 208.281.500,-

D. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang berubah pada Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan sub kegiatan berikut :

a. Subkeg Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan, dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 20.884.250,- dan mengalami penyesuaian harga satuan pada pembahasan APBD, sehingga pagu APBD menjadi Rp. 20.252.900,-. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 diusulkan penambahan Rp. 6.000.000,- untuk pembelian spanduk sehingga pagu perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 26.252.900,-
b. Subkeg Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan, dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 19.937.400,00,- namun mengalami pengurangan dan efisiensi pada pembahasan APBD, sehingga pagu APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 11.834.800,00,-
c. Subkeg Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan, dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 81.065.760,00,- dan bertambah saat pembahasan APBD, sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 91.022.550,-. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 kembali diajukan penambahan pagu menjadi Rp. 95.443.750,- karena ada penambahan untuk gaji P3K-PW menjadi 13 bulan/orang/ tahun. Pada Subkeg ini terdapat 2 orang P3K-PW.

E. **Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang berubah pada Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota** dengan Subkeg Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, dengan pagu RKPD Tahun 2026 Rp. 39.999.950,- namun mengalami pengurangan dan efisiensi pada pembahasan APBD, sehingga pagu APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 33.061.300,-

F. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini hanya terdiri dari kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota adn subkeg Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian. Pada RKPD Tahun 2026 subkeg ini hanya berupa cantolan kegiatan sebesar Rp. 1.000.100,-. Namun pada saat pembahasan APBD kegiatan ini di hilangkan sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi nol.

G. Program Penyuluhan Pertanian yang berubah pada Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan sub kegiatan berikut :

a. Subkeg Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, dengan pagu RKPD Tahun 2026 Rp 69.198.000,- namun mengalami pengurangan dan efisiensi pada pembahasan APBD, sehingga pagu APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 27.636.550,-.
b. Subkeg Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa, dengan pagu RKPD Tahun 2026 Rp 222.522.300,- namun mengalami pengurangan dan efisiensi pada pembahasan APBD, sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 165.155.650,-. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 kembali diusulkan pengurangan pagu menjadi Rp. 120.638.000,- karena ada penyesuaian belanja perjalanan dinas untuk Penas Tani serta penambahan untuk pembelian seragam Penas tani untuk pimpinan dan peserta Penas tani.
c. Subkeg Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, dengan pagu RKPD Tahun 2026 Rp 91.000.000,- namun saat pembahasan APBD mengalami pengurangan dan efisiensi, sehingga pagu APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi nol.
d. Subkeg Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota, dengan pagu RKPD Tahun 2026 Rp 302.260.550,- namun mengalami pengurangan dan efisiensi pada pembahasan APBD, sehingga pagu APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 121.523.450,-

Dalam pelaksanaan tupoksinya, Dinas Pertanian juga mempunyai beberapa unit pelaksana teknis (UPTD). Untuk Urusan Pertanian terdapat 5 UPTD/ BLUD. 1 UPTD pada urusan perikanan dan kelautan, 4 UPTD pada urusan pertanian. Berikut disajikan usulan perubahan program kegiatan UPTD di urusan pertanian:

UPTD / BLUD PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK

BLUD Pembibitan dan Pakan Ternak mengalami perubahan pada **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD** dan Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD. Pagu RKPD Tahun 2026 subkeg ini sebesar Rp. 236.606.000,-. Selanjutnya dilakukan penyesuaian pendapatan saat pembahasan APBD sehingga pagu APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi rp. 550.000.000.-.

UPTD PUSKESWAN

UPTD Puskeswan mengalami perubahan pada **Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota.** UPTD Puskeswan hanya melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner. Dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 186.365.200,- namun mengalami pengurangan dan efisiensi pada pembahasan APBD, sehingga pagu APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 180.183.980,-. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 kembali diusulkan pengurangan pagu menjadi Rp. 178.496.350,- karena adanya penyesuaian belanja obat-obatan dan ATK serta penambahan gaji P3K-PW menjadi 13 bulan.

UPTD PERBENIHAN DAN PELAYANAN JASA ALSINTAN

UPTD Perbenihan dan Pelayana Jasa Alsintan **mengalami perubahan pada Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota.** UPTD Perbenihan Dan Pelayanan Jasa Alsintan menggunakan Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman. Subkeg ini digunakan dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 334.847.410,- namun mengalami pengurangan dan efisiensi saat pembahasan APBD sehingga pagunya menjadi Rp. 332.838.946,- di APBD Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya pagunya bertambah menjadi Rp. 854.049.546,- pada perubahan RKPD Tahun 2026 karena adanya penambahan TKD untuk pembelian tractor roda 4 serta penambahan gaji P3K-PW menjadi 13 bulan.

UPTD RPH DAN PASAR TERNAK

A. **Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang mengalami perubahan pada Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian** dengan sub kegiattan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan. Pada RKPD Tahun 2026 pagu subkeg ini hanya berupa cantolan sebesar Rp. 998.900,-. Saat pembahasan APBD pagu bertambah, sehingga pagu APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 99.198.000,-

B. **Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang mengalami perubahan pada Kegiatan Pengawasan pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kab/ Kota** dengan Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan atau Pengeluaran Hewan Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM). Pagu RKPD Tahun 2026 subkeg ini sebesar Rp. 452.170.900,-. Namun terjadi pengurangan saat efisiensi pada pembahasan APBD sehingga anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 mejadi Rp.416.417.700,- . Pada perubahan RKPD Tahun 2026 kembali diusulkan pengurangan anggaran menjadi Rp. 407.621.900,- karena ada pengurangan belanja gaji P3K-PW yang mengundurkan diri,- .

V.2.4 URUSAN PERDAGANGAN

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 3.176.501.150,- terdiri dari 5 (lima) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan, dan pada APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki anggaran Rp. 5.751.878.750,- yang terdiri dari 5 (lima) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 anggaran menjadi 10.344.924.380,- dengan 5 (lima) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan.

Anggaran RKPD Tahun 2006 pada tahapan pembahasan mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 2.575.377.600,-. Pada tahapan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 4.593.045.630,- yang berasal dari tambahan TKD untuk daerah terdampak bencana di Sumatera Barat. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan dijelaskan sebagai berikut :

A. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan yang terdiri atas 2 sub kegiatan yaitu :

a. Sub kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggaran pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran Rp. 1.437.573.100,- terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 3.010.773.560,-. Kemudian terjadi penambahan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 sehingga menjadi Rp. 6.503.635.560,- yang berasal dari penambahan TKD yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan Pasar Ibuh Blok Barat, pembuatan Amdal dan Andalalin serta beberapa beberapa paket pekerjaan lainnya.

b. Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdangan mempunyai anggaran Rp 234.184.750,- pada RKPD Tahun 2026, kemudian karena adanya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 1.099.811.380,- kemudian terjadi penambahan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 sehingga menjadi Rp. 1.704.822684,- yang berasal dari dana TKD. Penambahan ini digunakan untuk beberapa pengadaan dan penambahan THR untuk PPPK paruh waktu.

2. Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana distribusi Perdagangan Masyaralat di wilayah kerjanya

Sub kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya mempunyai anggaran sebesar . Rp. 1.065.569.250,- pada RKPD tahun 2026. Pada APBD Tahun Anggaran 2026 dengan adanya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD menjadi sebesar Rp.1.086.106.140,-. Pada perubahan RKPD anggaran bertambah menjadi Rp. 1.176.867.570,- yang rencananya digunakan untuk sosialisasi relokasi pedagang los ikan dan pasar Ibuh Barat. Juga adanya penambahan anggaran THR untuk PPPK paruh waktu .

B. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

1. Kegiatan Pengendalian Harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

a. Sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Pasar Kabupaten/Kota yang pada RKPD tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 9.840.100,-. Karena adanya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, menjadi Rp. 19.839.750,- pada APBD Tahun Anggaran 2026. Pada perubahan RKPD tahun 2026 anggarannya tetap sama.

b. Sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan yang pada

RKPD tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 9.840.100,-. Karena adanya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, menjadi Rp. 19.839.750,- pada APBD Tahun Anggaran 2026. Pada perubahan RKPD tahun 2026 anggarannya tetap sama.

c. Sub kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang pada RKPD tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 79.525.850,-. Karena adanya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, menjadi Rp. 89.525.800,- pada APBD Tahun Anggaran 2026. Pada perubahan RKPD tahun 2026 anggarannya menjadi Rp. 479.525.300,- yang berasal dari penambahan TKD yang rencananya digunakan untuk pengendalian inflasi berupa kegiatan pasar murah.

2. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan pada RKPD Tahun 2026 mempunyai anggaran Rp 7.345.550,- Terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 120.460.590,-. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 anggarannya berubah menjadi sebesar Rp. 128.695.670,- yang merupakan penambahan THR PPPK paruh waktu.

b. Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi pada RKPD Tahun 2026 mempunyai anggaran Rp 7.346.800,- Terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 17.346.800,- sama dengan pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

C. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yang berubah pada Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang pada RKPD Tahun 2026 mempunyai anggaran Rp 52.586.700,- Terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 66.799.156,-. Pada Perubahan RKPD tahun 2026 tidak terjadi perubahan anggaran.

D. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang berubah pada Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota pada RKPD Tahun 2026 mempunyai anggaran Rp 88.728.150,- Terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 24.357,150,-. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 tidak terjadi perubahan anggaran.

UPTD PROMOSI PRODUK UMKM

UPTD Provmosi Produk UMKM pada Perubahan RKPD Tahun 2026 mengalmai perubahan pada **Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri** dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota pada RKPD Tahun 2026 mempunyai anggaran Rp 164.281.650,- Terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 177.339,280,-. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 terjadi penambahan anggaran sehingga menjadi Rp. 183.515.590,- yang merupakan penambahan THR PPPK paruh waktu.

V.2.5 URUSAN PERINDUSTRIAN

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk Urusan Perindustrian pada RKPD tahun 2026 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 797.227.815,- terdiri dari 3 (tiga) program, 3 (tiga) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan. Pagu Anggaran pada APBD Tahun

Anggaran 2026 sebesar Rp. 691.138.263,- terdiri dari 3 (tiga) program, 3 (tiga) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 605.024.863,- terdiri ini tersebar dalam 3 (tiga) program, 3 (tiga) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan.

Anggaran RKPD Tahun 2026 pada tahapan pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 106.089.552,-. Pada tahapan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 terjadi lagi pengurangan anggaran sebesar Rp. 86.113.400,-.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan dijelasakan sebagai berikut :

A. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran Rp 25.647.025,-. Dengan adanya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD maka anggaran sub kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 8.581.100,- Pada perubahan RKPD tidak terjadi penambahan ataupun pengurangan pada sub kegiatan ini **.**

b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri pada RKPD Tahun 2026 mempunyai anggaran Rp 164.534.826,- dan pada APBD Tahun Anggaran 2026 melalui pembahasan APBD dengan DPRD menjadi Rp.122.336.867,-. Pada Perubahan RKPD tahun 2026 terjadi pengurangan sehingga berjumlah Rp. 116.086.867,- karena efisiensi.

c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat pada RKPD Tahun 2026 mempunyai anggaran Rp 309.963,639,- dan pada APBD Tahun Anggaran 2026 melalui pembahasan APBD dengan DPRD menjadi Rp. 317.134.349,-. Pada Perubahan RKPD tahun 2026 dikurangi menjadi Rp. 267.382.399,- karena kebutuhan biaya untuk mengikuti even telah mencukupi.

d. Sub kegiatan Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota pada RKPD Tahun 2026 mempunyai anggaran Rp 10.830.150,- dan pada APBD Tahun Anggaran 2026 melalui pembahasan APBD dengan DPRD menjadi Rp. 4.332.000,-. Pada Perubahan RKPD tahun 2026 tidak terjadi perubahan.

B. Program Pengendalian Uzin Usaha Industri yang mengalami perubahan pada Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan berikut :

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran sebesar Rp. 11.725.950,-. Setelah pembahasan dengan DPRD mengenai APBD, maka pada APBD Tahun Anggaran 2026 anggarannya menjadi Rp. 7.263.950,-. Pada perubahan RKPD tahun 2026 tidak terjadi penambahan ataupun pengurangan.

b. Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran sebesar Rp. 48.931.375,-. Setelah pembahasan dengan DPRD mengenai APBD, maka pada APBD Tahun Anggaran 2026 anggarannya menjadi Rp. 45.078.275,-. Pada perubahan RKPD tahun 2026 tidak terjadi penambahan ataupun pengurangan.

C. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional mengalami perubahan pada Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan berikut :

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran sebesar Rp. 7.958.850,-. Setelah pembahasan dengan DPRD mengenai APBD, maka pada APBD Tahun Anggaran 2026 anggarannya menjadi Rp. 3.183.800,-. Pada perubahan RKPD tahun 2026 anggarannya sama.
b. Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran sebesar Rp. 8.981.450,-. Setelah pembahasan dengan DPRD mengenai APBD, maka pada APBD Tahun Anggaran 2026 anggarannya menjadi Rp. 3.592.600,-. Pada perubahan RKPD tahun 2026 anggarannya sama.

UPTD PUSAT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN RENDANG (P3R)

UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R), pada Perubahan RKPD Tahun 2026 mengalami perubahan pada **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** dan sub kegiatan berikut :

a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran sebesar Rp. 63.252.550,- dan menjadi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026. Pada perubahan RKPD tahun 2026 sub kegiatan ini tidak jadi digunakan dalam rangka penyesuaian prioritas kegiatan serta mendukung proses pengelolaan keuangan secara BLUD pada UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R)
b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri pada RKPD tahun 2026 mempunyai anggaran sebesar Rp. 145.571.800,- Setelah pembahasan dengan DPRD mengenai APBD, maka pada APBD Tahun Anggaran 2026 anggarannya menjadi Rp. 116.382.772,-. Pada perubahan RKPD tahun 2026 anggaran pada sub kegiatan ini bertambah menjadi Rp. 149.523.872,- yang direncanakan untuk pemenuhan sertifikasi tenaga operator pesawat uap sebagai bagian dari standar keselamatan dan operasional industri rendang.

V.3 URUSAN PENDUKUNG

V.3.1.1 SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah tahun 2026 dengan jumlah anggaran RKPD Rp. 32.913.423.435,-, yang terdiri dari 3 (tiga) program, 20 kegiatan dan 63 sub kegiatan. Dalam proses penganggaran terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga pada penetapan APBD anggaran tahun 2026 sebesar 31.740.309.260,- yang terdiri dari 3 program, 19 kegiatan dan 60 sub kegiatan. Kondisi bencana yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, menyebabkan penambahaan transfer keuangan daerah, dimana Sekretariat Daerah menjadi salah satu perangkat daerah yang memperoleh tambahan anggaran sehingga pada rencana anggaran Perubahan RKPD tahun 2026 diusulkan sebesar Rp. 33.465.502.675,-. Pagu anggaran tersebut mendukung 3 program, 20 kegiatan dan 61 sub kegiatan, dengan rincian perubahan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mempunyai anggaran Rp 16.812.300,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang

sebesar Rp 3.046.800,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 13.765.500,- .

b. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai anggaran Rp 103.016.350,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 5.117.800,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi 97.898.550,- Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 89.920.350,- atau berkurang sebesar Rp. 7.978.200,- karena adanya penyesuaian belanja sesuai dengan kebutuhan
c. Sub kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah mempunyai anggaran Rp 1.000.000,,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp 3.781.350,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 4.781.350,- dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 anggaran menjadi Rp 2.648.100 atau berkurang sebesar Rp. 2.133.250,- karena adanya penyesuaian belanja sesuai dengan kebutuhan.
d. Sub kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah mempunyai anggaran Rp 1.000.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp 3.191.750,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 4.191.750,- dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 2.179.250,- karena adanya penyesuaian belanja sesuai dengan kebutuhan.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mempunyai anggaran Rp 11.123.583.972,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 284.985.873,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 10.838.598.099,-
b. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN mempunyai anggaran Rp 776.520.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp 24.400.000,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 752.120.000,-.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya mempunyai anggaran Rp 85.875.500,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu dihilangkan sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 0,- dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 12.123.600,-. Untuk pembelian pakaian dinas.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor memiliki anggaran pada RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 34.986.500,- Pada perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 140.959.500,- atau bertambah sebesar Rp 105.973.000,- untuk penambahan pembelian charger mobil listrik, charger portable dan lampu untuk kantor.
b. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor memiliki anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp 59.988.400,- karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 41.895.800,-. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 149.916.400,- atau bertambah sebesar Rp. 108.020.600,- untuk penambahan belanja kursi sebanyak 100bh dan lemari arsip.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan memiliki anggaran sebesar Rp 273.750.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 30.751.500,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 242.998.500,-.
d. Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu memiliki anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp 543.991.650,- karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp 400.006.000,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 943.997.650,-.
e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD memiliki anggaran sebesar Rp 699.958.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp 445.233.000,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 1.145.191.000,-.
f. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD memiliki anggaran sebesar Rp 1.000.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp 8.999.750,,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 9.999.750,-.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan memiliki anggaran sebesar Rp 1.000.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp 679.000.000,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 680.000.000,-.
b. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan memiliki anggaran sebesar Rp 1.000.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp 679.000.000,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 680.000.000,-.
c. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel memiliki anggaran sebesar Rp 40.800.000,0,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu dihilangkan sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 0,-.
d. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya memiliki anggaran sebesar Rp 30.554.150,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 17.054.150,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 13.500.000,-.
e. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya memiliki anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp 3.728.529.800,- karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 2.134.614.750,- Pada RKPD perubahan 2026 menjadi Rp. 2.108.016.782,- berkurang sebesar Rp. 26.597.968,- hal ini dikarenakan Penyesuaian volume rehab gedung kantor dengan kantor pasca bencana termasuk pengadaan lift dan kanopi membran
f. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya memiliki anggaran sebesar Rp 21.062.500,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 10.062.500,- sehingga pada penetapan

APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 11.000.000,-.

6. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik memiliki anggaran pada RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 953.905.000,-, pada perubahan RKPD Tahun 2026 anggaran berkurang sebesar Rp. 31.766.200,- sehingga menjadi Rp 922.138.800,- karena adanya penyesuaian belanja sesuai kebutuhan.
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor memiliki anggaran sebesar Rp 339.409.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 1.500,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 339.407.500,-.
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memiliki anggaran sebesar Rp 2.199.750.392,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 173.218.404,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 2.026.531.988.-. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 2.092.416.988,-. Atau bertambah sebesar Rp. 65.885.000,- karena adanya penyesuaian gaji PPPK Paruh waktu.

7. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan memiliki anggaran sebesar Rp 601.400.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 8.930.000,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 592.470.000,-.
   b. Sub kegiatan Pemeliharaan mebel memiliki anggaran RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 10.000.000,-. Pada RKPD perubahan 2026 menjadi Rp. 20.000.000,- sehingga anggaran bertambah sebesar Rp. 10.000.000,- untuk penambahan volume pemeliharaan mebel sesuai kebutuhan.
   c. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya anggaran RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 22.210.000,-. Pada RKPD perubahan 2026 menjadi Rp. 26.260.000,- sehingga anggaran bertambah sebesar Rp. 4.050.000,- untuk penambahan anggaran pemeliharaan alat-alat studio dan kamera.
   d. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp 79.948.660,- , karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga pagu penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 237.169.440,-. Pada RKPD perubahan 2026 menjadi Rp. 1.674.104.781,- atau bertambah sebesar Rp. 1.436.935.341,- karena adanya penambahan dana TKD untuk perbaikan kantor (atap dan plafond kantor) yang rusak akibat bencana angin puting beliung.

8. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki anggaran sebesar Rp 808.224.623,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp 118.073.818,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 926.298.441,- dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 926.298.733,-.
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki anggaran sebesar Rp 65.792.650,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 1.746.850,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 64.045.800,-.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki anggaran sebesar Rp 591.390.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp 8.610.000,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 600.000.000,-.

9. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah memiliki anggaran sebesar Rp 295.997.180,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 11.050,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 295.986.130,-.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah memiliki anggaran sebesar Rp 270.840.648,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp 6.722,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 270.847.370,-.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah memiliki anggaran sebesar Rp 85.199.300,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 4.295,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 85.195.005,-.

10. Kegiatan Penataan Organisasi

a. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan memiliki anggaran sebesar Rp 74.300.650,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 46.087.250,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 28.213.400,-.

b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana memiliki anggaran sebesar Rp 56.273.750,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 16.702.000,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 39.571.750,-.

c. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi memiliki anggaran sebesar Rp 70.664.500,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 33.374.200,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 37.290.300,-.

11. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan memiliki anggaran sebesar Rp 100.000.250,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 3.684.500,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 96.315.750,-.

b. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan memiliki anggaran sebesar Rp 1.601.064.600,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp 370.115.827,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 1.971.180.427,-.

c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan memiliki anggaran sebesar Rp 283.836.500,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp 29.082.450,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 312.918.950,-.

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan

a. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan memiliki anggaran sebesar Rp 262.349.950,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp

12.655.000,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 249.694.950,-.

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan memiliki anggaran sebesar Rp 63.888.950,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 11.232.750,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 52.656.200,-.

c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah memiliki anggaran sebesar Rp 187.308.700,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 39.428.100,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 147.880.600,-.

2. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual memiliki anggaran sebesar Rp 400.158.250,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp 22.480.700,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 422.638.950,-.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial memiliki anggaran sebesar Rp 2.887.525.450,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 1.139.456.700,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 1.748.068.750,-.

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat memiliki anggaran sebesar Rp 1.367.104.600,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 551.267.400,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 815.837.200,-

3. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah memiliki anggaran sebesar Rp 89.091.200,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp 48.266.750,- atau berkurang sebesar Rp. 40.824.450,-. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 anggaran menjadi Rp 62.048.150,- atau bertambah sebesar Rp 13.781.400,- karena belanja penggandaan untuk harmonisasi produk hukum daerah ke kanwil kemenkum ham dan penyesuaian makan minum rapat

b. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum memiliki anggaran sebesar Rp 375.930.900,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp 533.219.950,- atau bertambah sebesar Rp. 157,289.050,-. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 anggaran menjadi Rp 535.019.950,- atau bertambah sebesar 1.800.000,- karena Penyesuaian belanja penggandaan dan makan minum rapat serta penyesuaian rekening belanja advokasi

c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum memiliki anggaran sebesar Rp 7.978.550,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 berkurang sebesar Rp. 1.595.750,- atau menjadi Rp 6.382.800,-. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 anggaran menjadi Rp 28.495.300,- atau bertambah sebesar RP 22.112.500,- karena Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang2an yang mengundang seluruh opd dan dan kelurahan

4. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri memiliki anggaran sebesar Rp 9.999.850,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu bertambah sebesar Rp 5.117.500,- sehingga

pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 15.117.350,-

b. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama memiliki anggaran sebesar Rp 2.999.550,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu dihilangkan sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 0,-

C. Program Perekonomian dan Pembangunan

1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD memiliki anggaran sebesar Rp 37.273.250,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 8.957.950,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 28.315.300,-

b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian memiliki anggaran sebesar Rp 60.573.450,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 19.500.000,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 41.073.450,-

2. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan memiliki anggaran sebesar Rp 18.603.400,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 3.743.300,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 14.860.100,-

3. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa memiliki anggaran sebesar Rp 26.245.900,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 8.413.700,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 17.832.200,-

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik memiliki anggaran sebesar Rp 150.887.150,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 10.034.450,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 140.852.700,-

c. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa memiliki anggaran sebesar Rp 30.019.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berkurang sebesar Rp 6.762.500,- sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 23.256.500,-

4. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air memiliki anggaran sebesar Rp 13.363.050,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp 7.773.600,- atau berkurang sebesar Rp. 5.589.450,-. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 anggaran menjadi Rp 22.773.400,- atau bertambah sebesar Rp 14.999.800,- karena Penambahan belanja makan minum rapat evaluasi pelaksanaan monev distribusi minyak dan gas elpiji.

V.3.2 SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD tahun 2026 dengan jumlah anggaran RKPD Tahun 2026 adalah Rp. 23.797.097.151,-, Dalam proses penganggaran terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 34.787.217.812,-. dan Perubahan RKPD tahun 2026 diusulkan anggaran sebesar Rp.

34.828.797.494,-. Pagu anggaran tersebut mendukung 2 program, 15 kegiatan dan 46 sub kegiatan, dengan rincian perubahan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai anggaran Rp. 68.778.750,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berubah sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 34.385.000,-.atau berkurang sebesar Rp. 34.393.750,-

b. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mempunyai anggaran Rp 9.412.750,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berubah sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 5.175.000,- atau berkurang sebesar Rp. 4.237.750,-

c. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai anggaran Rp 55.916.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berubah sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 25.760.000,- atau berkurang sebesar Rp. 30.156.000,-

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mempunyai anggaran Rp 3.085.536.836,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berubah sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp. 3.348.737.765,- atau bertambah sebesar Rp. 263.200.929,-

b. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN mempunyai anggaran Rp 328.440.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berubah sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 306.000.000,-. atau berkurang sebesar Rp. 22.440.000,-

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya mempunyai anggaran Rp 29.298.700,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu dihilangkan sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 0,-.atau berkurang sebesar Rp. 29.298.700,-

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor memiliki anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp 24.360.200,- karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD pagu berubah sehingga pagu penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan RKPD perubahan 2026 menjadi Rp. 14.915.900,- atau berkurang sebesar Rp. 9.444.300,-

b. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor memiliki anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp 82.343.600,- karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD pagu berubah sehingga pagu penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan RKPD perubahan 2026 menjadi Rp. 338.660.055,- atau bertambah sebesar Rp. 256.316.455,-

c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor memiliki anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp 79.089.275,- karena terjadinya dinamika pembahasan

pada APBD dengan DPRD pagu berubah sehingga pagu penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan RKPD perubahan 2026 menjadi Rp. 88.385.550,- atau bertambah sebesar Rp. 9.296.275,-

d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan memiliki anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp 30.948.200,- karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD pagu berubah,- sehingga pagu penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 31.448.800,- dan RKPD perubahan 2026 menjadi Rp. 31.45.800,- atau bertambah sebesar Rp. 504.600,-
e. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan memiliki anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp 54.600.000,- karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD pagu berubah sehingga pagu penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan RKPD perubahan 2026 menjadi Rp. 27.300.000,- atau berkurang sebesar Rp. 27.300.000,-
f. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu memiliki anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp 129.514.550,- karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD pagu berubah, sehingga pagu penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan RKPD perubahan 2026 menjadi Rp. 321.928.050,- atau bertambah sebesar Rp. 192.413.500,-
g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD memiliki anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp 999.386.000,- karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD pagu berubah sehingga pagu penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan RKPD perubahan 2026 menjadi Rp. 948.670.000,- atau berkurang sebesar Rp. 50716.000,-

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunanan Lainnya memiliki anggaran sebesar Rp 48.785.250,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berubah sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 80.322.000,-. atau bertambah sebesar Rp. 31.536.750,-

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik memiliki anggaran sebesar Rp 245.544.900,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berubah sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 255.146.320,-.atau bertambah sebesar Rp. 9.601.420,-
b. Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memiliki anggaran sebesar Rp 981.528.840,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berubah sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 anggaran sebesar Rp 1.224.316.602,- dan dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran 1.267.118.784 atau bertambah sebesar Rp. 285.589.944,- karena disesuaikan dengan kebutuhan.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub kegiatan Pemeliharaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan memiliki anggaran sebesar Rp 375.390.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berubah sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 307.240.000,- atau berkurang sebesar Rp. 68.150.000,-
b. Sub kegiatan Pemeliharaan mebel memiliki anggaran sebesar Rp 34.950.400,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD

dengan DPRD, pagu berubah sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 16.000.000,-.atau berkurang sebesar Rp. 18.950.400,-

c. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya memiliki anggaran sebesar Rp 66.716.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berubah sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 79.014.360,-.atau bertambah sebesar Rp. 12.298.360,-

d. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya memiliki anggaran sebesar Rp 606.904.600,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berubah sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 717.243.600,-. atau bertambah sebesar Rp. 110.339.000,-

8. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat koordinasi dan Konsultasi DPRD memiliki anggaran sebesar Rp 121.977.725,- pada RKPD Tahun 2026, dan APBD Tahun Anggaran 2026 sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi 128.266.925,- atau bertambah sebesar Rp. 6.289.200,- karena kesesuaian dengan kebutuhan.

b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD memiliki anggaran sebesar Rp 293.049.210,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berubah sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 240.672.020,- dan dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi 239.448.320,- atau berkurang sebesar Rp. 53.600.890,- karena kesesuaian dengan kebutuhan.

B. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

a. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah memiliki anggaran sebesar Rp 180.786.425,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berubah sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 78.345.825,-. Dan dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran Rp. 70.695.825,- atau berkurang sebesar Rp. 110.090.600,- karena penyesuaian dengan kebutuhan.

b. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah daerah memiliki anggaran sebesar Rp 230.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berubah sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 456.664.750,-.atau bertambah sebesar Rp. 456.664.750,-

2. Kegiatan Pembahasan kebijakan Anggaran

a. Sub Kegiatan Pembahasan APBD memiliki anggaran sebesar Rp 35.720.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berubah sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 35.264.300,-.atau berkurang sebesar Rp. 455.700,-

b. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS memiliki anggaran sebesar Rp 15.276.850,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berubah sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 21.725.000,-. atau bertambah sebesar Rp. 6.448.150,-

c. Sub Kegiatan Pembahasan APBD memiliki anggaran sebesar Rp 189.022.200,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD

dengan DPRD, pagu berubah sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 197.755.000,- atau bertambah sebesar Rp. 8.732.800,-

d. Sub Kegiatan Pembahasan APBD perubahan memiliki anggaran sebesar Rp 163.195.250,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berubah sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 190.843.250,- atau bertambah sebesar Rp. 27.648.000,-
e. Sub Kegiatan Pembahasan pertanggungjawabab APBD memiliki anggaran sebesar Rp 30.417.500,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berubah sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 35.491.850,- atau bertambah sebesar Rp. 5.074.350,-

3. Kegiatan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan

a. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan pemerintahan Bidang pemerintahan dan Hukum memiliki anggaran sebesar Rp 14.099.600,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berubah sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 36.534.150,- atau bertambah sebesar Rp. 22.434.550,-
b. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan pemerintahan Bidang Infrastruktur memiliki anggaran sebesar Rp 11.590.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berubah sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 32.895.100,- atau bertambah sebesar Rp. 21.305.100,-
c. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat memiliki anggaran sebesar Rp 15.399.750,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berubah sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 35.264.500,-, atau bertambah sebesar Rp. 19.864.750,-
d. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan pemerintahan Bidang Perekonomian memiliki anggaran sebesar Rp 9.999.500,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berubah sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 32.134.100,- atau bertambah sebesar Rp. 22.134.600,-

4. Kegiatan Peningkatan kapasitas DPRD

a. Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD memiliki anggaran sebesar Rp 31.000.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berubah sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 1.230.679.000,- dan dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran Rp. 1.231.787.000,- atau bertambah Rp. 1.200.787.000,- karena penyesuaian dengan kebutuhan.
b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Tenaga ahli Fraksi memiliki anggaran sebesar Rp 294.000.000,- karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berubah sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 420.000.000,- dan dan Perubahan RKPD Tahun 2026 tetap sebesar Rp. 294.000.000,-
c. Sub Kegiatan Publikasi dan Dokuentasi DPRD memiliki anggaran sebesar Rp 431.440.000,- karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berubah sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 218.142.000,- dan dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 344.392.000,- atau berkurang sebesar Rp. 0,-

5. Kegiatan Penyerapan dan penghimpuan Aspirasi masyarakat

a. Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah memiliki anggaran sebesar Rp 299.730.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika

pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berubah sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 2.683.359.000,- atau bertambah sebesar Rp. 2.383.629.000,-

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses memiliki anggaran sebesar Rp 2.767.539.800,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berubah sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 2.700.005.800,- atau berkurang sebesar Rp. 67.534.000,-

6. Kegiatan fasilitasi Tugas DPRD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD memiliki anggaran sebesar Rp 1.849.851.000,- pada RKPD Tahun 2026, karena terjadinya dinamika pembahasan pada APBD dengan DPRD, pagu berubah sehingga pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp 8.304.399.000,- atau bertambah sebesar Rp. 6.454.548.000,-

V.4 URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

V.4.1 UNSUR PERENCANAAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Payakumbuh memperoleh alokasi anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 7.986.571.099.-, dengan 3 program, 14 kegiatan dan 45 sub kegiatan. Pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp. 7.411.038.187,-, dengan 3 program, 12 kegiatan dan 38 sub kegiatan, kemudian pada perubahan RKPD tahun 2026 menjadi Rp. 7.427.603.493,- dengan jumlah program sebanyak 3 program, 13 kegiatan dan 40 sub kegiatan.

Anggaran RKPD Tahun 2026 pada tahapan pembahasan karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah, anggaran untuk urusan perencanaan menjadi turun sebesar Rp. 575.532.912.-. Dan pada tahapan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.16.565.306.-.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan dijelaskan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah mempunyai anggaran awal Rp. 14.069.050.- dan pada APBD menjadi Rp. 9.378.900.-, kemudian pada perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 12.043.500.- atau menambah Rp. 2.664.600.- dari APBD disebabkan penambahan sesuai kebutuhan.

b. Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah mempunyai anggaran RKPD Tahun 2026 Rp. 69.766.500,- dan karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah, pada APBD dan perubahan RKPD menjadi Rp. 46.604.400,-.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah

a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mempunyai anggaran Rp. 5.418.150.393,- pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi Rp. 5.324.193.605,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 5.324.201.103.- disebabkan penyesuaian satuan gaji ASN.

b. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN mempunyai anggaran Rp. 396.239.800,- pada RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 396.599.800.-, kemudian terjadi pengurangan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 1.799.800,- sehingga menjadi Rp. 394.800.000,- dikarenakan untuk penyesuaian dengan kebutuhan.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya pada anggaran RKPD sebesar Rp. 46.473.800.-, namun pada APBD dan perubahan RKPD menjado Rp. 0.- dikarenakan efisiensi anggaran.

4. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
   a. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor mempunyai anggaran RKPD Tahun 2026 Rp. 4.793.400,- dan karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah, pada APBD dan perubahan RKPD menjadi Rp. 2.389.000,-.
   b. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga pada anggran awal pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 17.445.900.-, namun pada APBD Tahun Anggaran 2026 dihilangkan, namun karena kebutuhan pada Perubahan RKPD TAhun 2026 muncul dengan anggaran Rp. 9.283.350.- yang akan digunakan untuk mpengadaan gorden kantor.
   c. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistic Kantor pada anggaran RKPD sebesar Rp. 29.993.656.- dan pada APBD dan perubahan RKPD menjadi berubah menjadi Rp. 14.985.900.- dikarenakan efisiensi anggaran dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.18.555.650.- dikarenakan penambahan untuk belanja racun rumput, tisu dan belanja natura.
   d. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 14.962.100.- dan pada APBD menjadi sebesar Rp. 7.430.600.-, kemudian pada perubahan RKPD Tahun 2026 bertambah menjadi Rp. 11.241.000.-. penambahan ini karena untuk penyesuaian dengan kebutuhan pada fotocopy.
   e. Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 8.866.000.- dan pada APBD dan perubahan RKPD menjadi sebesar Rp. 1.100.000.-, dikarenakan efisiensi anggaran.
   f. Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu pada anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 4.991.000.- dan pada APBD dan perubahan RKPD menjadi sebesar Rp. 2.495.500.-, dikarenakan efisiensi anggaran.
   g. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD mempunyai anggaran RKPD Tahun 2026 Rp. 397.609.000,- dan karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah, pada APBD dan perubahan RKPD menjadi Rp. 190.043.000,-.
   h. Sub kegiatan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD mempunyai anggaran RKPD Tahun 2026 Rp. 13.181.250,- dan karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah, pada APBD dan perubahan RKPD menjadi Rp. 10.454.450,-.

5. **Kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**
   a. Pada sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan pada anggaran RKPD Tahun 2026 dan APBD tidak ada kemudian pada perubahan RKPD Tahun 2026 muncul sebesar Rp. 1.000.000.- dikarenakan untuk pembelian kendaraan dinas operasional.
   b. Sub kegiatan pengadaan mebel mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.500.700,- dari Rp. 8.500.700,- pada RKPD, sedangkan pada APBD dan Perubahan RKPD menjadi Rp. 0,-.
   c. Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 43.552.250,- dari Rp. 43.552.250,- pada RKPD, sedangkan pada APBD dan Perubahan RKPD menjadi Rp. 0,-.

6. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
   a. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik mempunyai anggaran RKPD Tahun 2026 Rp. 82.997.200,- dan karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah dan penyesuaian kebutuhan, pada APBD dan perubahan RKPD menjadi Rp. 118.247.200,-.

b. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor mempunyai anggaran RKPD Tahun 2026 Rp. 152.180.000,- dan karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah dan penyesuaian kebutuhan, pada APBD menjadi Rp. 120.653.732,-. pada perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi 134.264.690.- untuk penyesuaian kebutuhan gaji tenaga jasa perorangan atau outsourcing.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya mempunyai anggaran RKPD Tahun 2026 Rp. 17.260.000,- dan karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah dan penyesuaian kebutuhan, pada APBD dan perubahan RKPD menjadi Rp. 8.730.000,-.

B. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Kagiatan Perencanaan dan Pendanaan

a. Sub Kegiatan pelaksanaan konsultasi publik mempunyai anggaran RKPD Tahun 2026 Rp. 29.999.775,- dan karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah dan penyesuaian kebutuhan, pada APBD dan perubahan RKPD menjadi Rp. 19.645.475,-.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota dari pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 71.614.975.- dan karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah dan penyesuaian kebutuhan, pada APBD menjadi Rp. 53.566.225.-. pada perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 29.183.725.-, pengurangan ini terjadi efisiensi belanja makan dan minuman, honorarium, perjadin narasumber, sewa gedung, dan item lainnya yang bisa di efisiensi.

c. Sub Kegiatan Penyiapan bahan koordinasi Musrenbang kecamatan dari pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 17.999.950.- dan karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah dan penyesuaian kebutuhan, pada APBD dan perubahan RKPD menjadi Rp. 17.980.100.-.

d. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dari anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 249.178.675.- dan karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah dan penyesuaian kebutuhan, pada APBD menjadi Rp. 180.699.075.-. pada perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi 168.049.075.-, pengurangan ini terjadi terutama karena banyak item yang bisa dilakukan tuak efisiensi dalam pelaksanaanya

2. Kegiatan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah.

Sub Kegiatan penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten/kota dari anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 11.500.000.- dan karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah dan penyesuaian kebutuhan, pada APBD dan perubahan RKPD menjadi Rp. 7.666.350.-.

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah.

a. Sub kegiatan koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten/ kota mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 15.190.450,- dari Rp. 15.190.450,- pada RKPD, sedangkan pada APBD dan Perubahan RKPD menjadi Rp. 0,-.

b. Sub kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah pada anggaran RKPD adalah sebesar Rp. 11.999.750.- dan karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah dan penyesuaian kebutuhan, pada APBD menjadi Rp. 7.999.600.-. pada anggaran Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 13.473.600.- yang diperuntukan untuk penambahan belanja makan minum rapat.

4. **Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**
   a. Sub Kegiatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah dari anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 87.820.500.- dan karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah dan penyesuaian kebutuhan, pada APBD menjadi Rp. 71.069.550.-. pada perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 75.271.150.- untuk penambahan pada beberapa item belanja untuk penyesuaian dengan kebutuhan kegiatan pada belanja jasa tenaga informatika (PPPK PW).
   b. Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dari anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 49.999.750.- dan karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah dan penyesuaian kebutuhan, pada APBD dan perubahan RKPD menjadi Rp. 24.052.950.-.

C. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1. **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**
   a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dari anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 86.788.150.- dan karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah dan penyesuaian kebutuhan, pada APBD menjadi Rp. 58.751.350.-. pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 40.207.650.-. hal ini diakibatkan karena efisiensi belanja pada item belanja pengadaan dan makan minum rapat.
   b. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dari dari anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 40.989.225.- dan karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah dan penyesuaian kebutuhan, pada APBD menjadi Rp. 33.539.525.-. pada perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 32.434.525.-, hal ini diakibatkan karena efisiensi belanja pada item belanja pengadaan dan makan minum rapat.
   c. Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 25.230.050,- dari Rp. 25.230.050,- pada RKPD, sedangkan pada APBD dan Perubahan RKPD menjadi Rp. 0,-.
   d. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia dari dari anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 51.892.400.- dan karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah dan penyesuaian kebutuhan, pada APBD menjadi Rp. 147.274.550.-. pada perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 166.874.550.-, dikarenakan adanya penambahan belanja di bebera[a item dan pengurangan pada belanja pada beberapa item.

2. **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**
   a. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 7.499.750,- dari Rp. 7.499.750,- pada RKPD, sedangkan pada APBD dan Perubahan RKPD menjadi Rp. 0,-
   b. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dari anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 7.493.350.- dan karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah dan penyesuaian kebutuhan, pada APBD dan perubahan RKPD menjadi Rp. 5.142.500.-.
   c. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dari anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 7.499.800.- dan karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah dan penyesuaian kebutuhan,

pada APBD menjadi Rp. 5.579.800.-. pada perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 16.818.300.- dikarenakan adanya penambahan anggaran pada ATK, makan dan minum rapat.

d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dari anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 7.487.050.- dan karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah dan penyesuaian kebutuhan, pada APBD menjadi Rp. 5.262.950.-. pada perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 5.848.650.- atau bertambah sebesar Rp. 585.700.- dari APBD dikarenakan adanya penambahan anggaran pada makan dan minum rapat.

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilyahan

a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dari anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 9.253.100..- dan karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah dan penyesuaian kebutuhan, pada APBD dan perubahan RKPD menjadi Rp. 6.461.100.-.

b. Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dari anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 70.212.150.- dan karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah dan penyesuaian kebutuhan, pada APBD menjadi Rp. 61.186.200.-. pada perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 17.936.200.- dikarenakan adanya penyesuaian dan efisiensi anggaran.

c. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dari anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 89.136.100.- dan karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya penyesuaian kebutuhan, pada APBD menjadi Rp. 162.001.200.- pada perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 205.250.950.- dikarenakan adanya penyesuaian dan penambahan pada beberapa item belanja.

d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dari anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 37.248.650.- dan karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah dan penyesuaian kebutuhan, pada APBD dan perubahan RKPD menjadi Rp. 30.348.100.-.

V.4.2 UNSUR KEUANGAN

Anggaran Badan Keuangan Daerah dalam APBD Tahun 2026 mendapat alokasi pagu sebesar Rp.19.055.966.696,- yang terdiri dari 2 program dan 10 kegiatan dengan 27 sub kegiatan dengan alokasi pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.17.927.219.274,- sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.22.060.165.096,- dengan uraian perubahan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya tidak dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2026 maka dianggarkan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.65.669.500,-

b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan tidak dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2026 maka dianggarkan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.48.655.050,- penambahan pagu anggaran kegiatan diperlukan untuk mengakomodasi peningkatan kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan sehingga target dan kualitas output kegiatan tercapai sesuai rencana.

2. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak anggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2026 maka pada Perubahan RKPD Tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp.21.250.000,- karena banyaknya peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi tidak layak digunakan.

B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1. **Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**

Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD anggaran Perubahan RKPD Tahun 2026 berkurang menjadi Rp.35.584.950,- dari pagu anggaran ABPD sebesar Rp.105.490.000,- pengurangan tersebut dilakukan dalam upaya efesiensi terhadap kemampuan keuangan daerah yang tersedia tanpa mengurangi pencapaian target serta kualitas pelaksanaan anggaran.

2. **Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan tidak dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2026 baru di anggarkan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.3.000.000.000,- bersumber dari anggaran TKD.

C. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah anggaran bertambah menjadi Rp.213.074.200,- pada Perubahan RKPD Tahun 2026 dari pagu APBD Tahun Anggaran 2026 Rp.208.875.800,- peningkatan kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan sehingga target dan kualitas output kegiatan tercapai sesuai rencana.

V.4.3 UNSUR KEPEGAWAIAN

Urusan Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari dari 2 (dua) program, 9 kegiatan, 31 subkegiatan. Jumlah anggaran RKPD Tahun 2026 Rp. 18.679.947.398,- dan mengalami penyesuaian anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 Rp.8.948.963.463,- berkurang karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan adanya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah, dan anggaran pada Perubahan RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 8.944.443.751,- .

Program, kegiatan, subkegiatan yang mengalami perubahan dijelaskan sebagai berikut:

A. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, anggaran pada RKPD Tahun 2026 Rp.5.246.650,- karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah, pada APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 4.205.000,-

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran pada RKPD Tahun 2026 Rp. 266.908.500,- karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah, pada APBD Tahun Anggaran 2026 Rp.227.330.000 dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 194.045.000,-

c. Sub Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, anggaran pada RKPD Tahun 2026 Rp. 1.207.500,- karena penyesuaian dengan standar harga, pada APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 1.610.000,-

d. Sub Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah, anggaran pada RKPD Tahun 2026 Rp. 1.207.500,- karena penyesuaian dengan standar harga, pada APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 1.610.000,-

2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, anggaran pada RKPD Tahun 2026 Rp. 17.131.693.498,- karena pembayaran gaji dan tunjangan P3K formasi tahun 2024 dibayarkan oleh masing-masing perangkat daerah penempatan P3K, maka anggaran pada APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 6.825.127.737,-
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, anggaran RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2026 Rp.293.760.000,- dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.273.000.000,-
3. **Kegiatan Administrasi Umum Pemerintah Daerah**
   Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, anggaran pada RKPD Tahun 2026 Rp. 51.400.400,- karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah, pada APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-
4. **Kegiatan Administrasi Umum Pemerintah Daerah**
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran pada RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2026 Rp. 10.789.500,- karena penyesuaian kebutuhan, pada perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.13.253.700,-
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran pada RKPD Tahun 2026 Rp. 31.469.020,- karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah, pada APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 29.768.020,-
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran pada RKPD Tahun 2026 Rp. 12.985.200,- karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah, pada APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 12.200.000,-
   d. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, anggaran pada RKPD Tahun 2026 Rp. 2.673.750,- karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah, pada APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 1.489.250,-
   e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, anggaran pada RKPD Tahun 2026 Rp. 200.022.000,- karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah, pada APBD Tahun Anggaran 2026 Rp. 89.998.000,- dan peda Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 108.498.000
   f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, anggaran pada RKPD Tahun 2026 Rp. 1.207.500,- karena penyesuaian dengan standar harga, pada APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 1.610.000,-
5. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pamerintahan Daerah**
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, anggaran RKPD Tahun 2026 Rp.500.000, karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah, pada APBD Tahun Anggaran 2026 Rp.0,- dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.332.438.000,-
   b. Sub Kegiatan Pengadaan mebel, anggaran RKPD Tahun 2026 Rp.500.000, karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah, pada APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-
   c. Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya, anggaran RKPD Tahun 2026 Rp.500.000, karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya

efisiensi anggaran dari pusat ke daerah, pada APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-

d. Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya, anggaran RKPD Tahun 2026 Rp.500.000, karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah, pada APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2026 Rp.46.988.480,- karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah, perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 35.988.480,-

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2026 Rp. 3.980.000,- karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah, perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 7.960.000,-

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, anggaran RKPD Tahun 2026 Rp. 137.200.000 karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah dan anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 Rp. 118.942.776,- dan pada perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 85.529.864,-

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahah Daerah

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, anggaran RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2026 Rp. 49.136.000,- karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah, perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.0,-

B. Program Kepegawaian Daerah

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Sub Kegiatan Sub Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN da Pengadaan ASN, anggaran RKPD Tahun 2026 Rp. 4.999.750,- karena penyesuaian kebutuhan untuk evaluasi pengadaan PNS, pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 95.962.450,- dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 63.562.450,-

2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

a. Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, anggaran RKPD Tahun 2026 Rp. 4.999.350,- karena penyesuaian kebutuhan untuk pengelolaan kenaikan pangakat ASN, pada APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 30.197.850,-

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN, anggaran RKPD Tahun 2026 Rp. 5.000.050,- karena penyesuaian pengelolaan promosi ASN, pada APBD Tahun Anggaran 2026 Rp. 444.396.750,- dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 284.808.750,-

3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, anggaran RKPD Tahun 2026 Rp. 220.000.050,- karena penyesuaian kebutuhan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN, pada APBD Tahun Anggaran 2026 Rp. 292.270.450,- dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 Rp. 268.270.450,-

4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, anggaran RKPD Tahun 2026 Rp.3.967.100,- karena penyesuaian kebutuhan pelaksanaan penilaian ASN, pada APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 59.631.050,-

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai, anggaran RKPD Tahun 2026 Rp. 2.718.550,- karena penyesuaian kebutuhan pengelolaan

pemberian penghargaan bagi pegawai, pada APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 79.338.550,-

c. Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN, anggaran RKPD Tahun 2026 Rp. 4.479.050,- karena penyesuaian kebutuhan pembinaan displin ASN, pada APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp 34.856.300,-

d. Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai, anggaran RKPD Tahun 2026 Rp. 4.465.300,- karena penyesuaian kebutuhan pelayanan proses izin perceraian pegawai, pada APBD Tahun Anggaran 2026 Rp 13.892.600,- dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 15.502.600,-

V.4.4 UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Urusan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari 1 program 2 kegiatan dan 3 subkegitan dengan jumlah anggaran RKPD Tahun 2026 Rp. 15.081.550,- dan mengalami penyesuaian anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.608.670.550,-

Program, kegiatan dan subkegiatan yang mengalami perubahan dijelaskan sebagai berikut:

A. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, anggaran RKPD Tahun 2026 Rp. 5.081.450,- pada APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.256.347.050,-

2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan, anggaran RKPD Tahun 2026 Rp. 5.000.050,- anggaran pada APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 145.570.100,-

b. Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan TenagaPengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,Kepemimpinan, dan Prajabatan, anggaran RKPD Tahun 2026 Rp. 5.000.050,- anggaran pada APBD dan perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 206.753.400,-

V.4.5 UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Urusan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan Bappeda dengan jumlah anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 399.999.500.- dan pada APBD Tahun 2026 menjadi Rp. 214.274.550.-, dengan 2 program, 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, hal diakibatkan karena dinamika dan pembahasan dengan DPRD dan adanya efisiensi anggaran dari pusat. pada anggaran perubahan RKPD Tahun 2026 pagu anggaran pada urusan penelitian dan pengembangan tidak mengalami perubahan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan dijelaskan sebagai berikut :

A. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

1. **Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**
   Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan bidang aspek aspek sosial mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dari Rp. 150.000.000,- pada RKPD, sedangkan pada APBD dan Perubahan RKPD menjadi Rp. 0,-.
2. **Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan.**
   Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dari anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 150.000.000.- dan karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah dan penyesuaian kebutuhan, pada APBD menjadi Rp. 145.175.850.-. pada perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 10.175.850.- dikarenakan adanya pengurangan pada belanja pada beberapa item.

B. Program Riset dan Inovasi Daerah pada Kegiatan Invensi dan Inovasi dengan sub kegiatan yang mengalami perubahan :

a. Sub kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah dari anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 79.999.500.- dan karena dinamika dan pembahasan di DPRD dan terjadinya efisiensi anggaran dari pusat ke daerah dan penyesuaian kebutuhan, pada APBD menjadi Rp. 69.098.700.-. pada perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 204.098.500.- dikarenakan adanya penambahan belanja di beberapa item dan pengurangan pada belanja pada beberapa item untuk penyesuaian dengan kebutuhan.

b. Sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Untuk Peningkatan Difusi Inovasi mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 19.999.900,- dari Rp. 19.999.900,- pada RKPD, sedangkan pada APBD dan Perubahan RKPD menjadi Rp. 0,-.

V.5 URUSAN PENGAWASAN

Unsur pengawasan telah menjadi kewenangan Inspektorat Kota Payakumbuh, Tahun 2026 jumlah anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.10.534.402.272 terdiri dari 3 (tiga) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan dan APBD Tahun 2026 sebesar Rp.10.001.033.141 dengan jumlah Program/Kegiatan/sub kegiatan yang sama dengan RKPD, karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD kemudian pada perubahan RKPD Tahun 2026 sebesar Rp 9.998.119.071,00 memiliki 3 (tiga) program dengan 9 (sembilan) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan dijelaskan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
   a. Sub Kegiatan Evaluasi Perangkat Daerah pada RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran Rp.96.622.500 dan menjadi Rp.38.113.750 pada APBD Tahun Anggaran 2026. Pada perubahan RKPD Tahun 2026 Rp.46.968.750 untuk penambahan makan minum, rapat, lembur dalam menunjang pelaksanaan tugas di Inspektorat,
   b. b. Sub kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, Pagu RKPD Rp 3.622.500, pagu APBD sebesar Rp 1.006.250, pada perubahan RKPD sub kegiatan ini dihapus karena efisiensi anggaran.
2. **Kegiatan Keuangan Perangkat Daerah**
   Penyesuaian anggaran dilakukan pada sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN melalui pengurangan anggaran sebesar Rp.22.230.000 dari pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.252.960.000 dan APBD Tahun Anggaran

2026 sebesar Rp.252.960.000 pada perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.183.860.000 dikarenakan penyesuaian standard biaya.

3. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
   a. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada RKPD Tahun 2026 memiliki pagu Rp.69.856.160 dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.27.511.460, untuk perubahan RKPD Tahun 2026 diajukan penambahan anggaran sebesar menjadi Rp.39.752.460 untuk penambahan belanja alat tulis kantor yang mendukung pelaksanaan tugas.
   b. Sub kegiatan Barang cetak dan penggandaan pada anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.10.469.000 terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.4.061.600 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 sebesar Rp 13.013.100,
   c. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan tamu, pada RKPD Tahun 2026 Rp.10.436.250,00 kemudian terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.4.002.000 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.7.886.000.
   d. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.1.006.250, pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.1.207.500 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD dan tidak terjadi perubahan di Perubahan RKPD Tahun 2026.

4. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
   Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.123.032.070 terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.123.032.070 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 128.785.234,00 karena penyesuaian dengan kebutuhan

5. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   Sub kegiatan mesin lainnya pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.141.617.250 terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.8.530.000 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD dan di Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.13.640.000, penyesuaian dengan kebutuhan

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan yang mengalami perubahan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan Sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.53.412.500 terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.53.412.500 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD dan di Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.68.597.500 penyesuaian dengan kebutuhan.

V.6 URUSAN KEWILAYAHAN

V.6.1 KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT

Urusan Kewilayahan Kecamatan Payakumbuh Barat memiliki anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 17.719.058.575,- terjadi perbedaan anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 18.437.135.100,- hal ini karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD, dan anggaran Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 18.710.826.335,- yang meliputi 5 (lima) program dengan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dan 58 (lima puluh delapan) sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan dijelaskan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota Sub Kegiatan yang mengalami perubahan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada RKPD Rp. 55.147.700, tidak terjadi perubahan pada APBD, pada perubahan RKPD berkurang menjadi Rp. 32.315.800,- karena efisiensi anggaran.

b. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah RKPD Rp. 74.001.500,- pada APBD menjadi Rp.104.182.500,- karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Terjadi perubahan menjadi sebesar Rp. 77.734.950,- pada anggaran perubahan RKPD karena efisiensi anggaran

c. Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, RKPD Awal Rp. 1.006.250,-, pada APBD menjadi 1.207.500,- karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD dan menjadi 0.- di Perubahan RKPD, karena efisiensi anggaran

d. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah RKPD Awal Rp. 1.006.250,-, pada APBD menjadi 1.207.500,- karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD dan tidak terjadi perubahan di Perubahan RKPD.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada RKPD Rp. 11.314.659.485,- menjadi Rp. 11.797.325.076,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Tidak terjadi perubahan di Perubahan RKPD.

b. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada RKPD Rp. 810.480.000,- menjadi Rp.803.040.000,- APBD Tahun Anggaran 2026 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD dan tidak terjadi perubahan pada Perubahan RKPD.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada RKPD Rp. 5.179.650,- berubah pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi 3.668.250,- karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD dan tidak terjadi perubahan pada Perubahan RKPD.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, pada Anggaran RKPD Awal Rp. 136.559.620,-, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 74.572.390 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD dan tidak terjadi penambahan menjadi Rp. 79.927.670,- pada Perubahan RKPD dikarenakan penyesuaian kebutuhan hingga akhir tahun.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, pada anggaran RKPD Rp. 10.000.200,-, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 8.135.000 karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD dan tidak terjadi perubahan pada Perubahan RKPD.

d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, pada Anggaran RKP Awal sebesar Rp. 34.987.000,- , kemudian terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 33.862.000,- karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD dan pada perubahan RKPD bertambah menjadi Rp. 56.637.000.-, dikarenakan penyesuaian kebutuhan hingga akhir tahun.

e. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada RKPD Awal Rp. 1.006.250,-, pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi 1.207.500,- karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD dan di Perubahan RKPD berubah menjadi Rp. 0.- dikarenakan efisiensi anggaran

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran pada RKPD sebesar Rp. 60.111.000.-, tidak ada perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026, dan anggaran pada Perubahan RKPD bertambah menjadi Rp. 217.006.750.- disebabkan penambahan belanja pengadaan peralatan perlengkapan dan mesin yang sudah harus diperbaharui untuk menunjang kelancaran tugas Kantor.

5. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, pada Anggaran Awal Rp. 102.530.000,- terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 156.011.700,-, karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD dan di Perubahan RKPD menjadi Rp.123.311.700,- karena efisiensi anggaran
   b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor anggaran pada RKPD Rp. 903.067.400,- terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 1.269.084.036,- karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD dan terjadi perubahan di Perubahan RKPD menjadi Rp.1.228.908.836,- karena efisiensi anggaran.
6. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada RKPD Rp. 255.000.000,- terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 235.750.000,- karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD dan tidak terjadi perubahan di Perubahan RKPD.
   b. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada RKPD Rp. 39.674.360,- terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 30.760.000,- karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD dan tidak terjadi perubahan di Perubahan RKPD.
   c. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada RKPD Rp. 50.865.200,- terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 79.481.700,- karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD dan tidak terjadi perubahan di Perubahan RKPD.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. **Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
   Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, pada RKPD Rp. 35.116.900,- terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 37.353.550,- karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD dan terjadi perubahan di Perubahan RKPD menjadi Rp. 26.103.550,- karena efisiensi anggaran.
2. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**
   Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada RKPD Rp. 4.985.250,-, tidak terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 namun di perubahan RKPD bertambah menjadi Rp. 14.305.000,- dikarenakan penyesuaian kebutuhan hingga akhir tahun.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**
   Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan pada RKPD Rp. 208.499.950,- terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 0,- karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD dan tidak terjadi penambahan di Perubahan RKPD.
2. **Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**
   Sub kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dengan anggaran awal sebesar Rp. 95.659.100,- terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 66.802.800,- karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD dan terjadi perubahan di Perubahan RKPD menjadi Rp. 72.102.800,- karena penyesuaian kebutuhan hingga akhir tahun.
3. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Bulakan Balai Kandi)**
   Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan anggaran awal Rp. 134.024.805, tidak terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026. Pada

Perubahan RKPD menjadi Rp. 148.140.335,-, Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian kebutuhan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sampai akhir tahun.

4. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Ibuh)**
   a. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan anggaran awal Rp. 106.645.710, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 76.045.160,- hal ini terjadi karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD tidak terjadi perubahan.
   b. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan anggaran awal Rp. 93.353.370,- terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi 123.962.820,- hal ini terjadi karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD tidak terjadi perubahan.
5. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Koto Tangah)**
   a. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan anggaran awal Rp. 101.769.960, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 99.460.440,- hal ini terjadi karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD naik menjadi Rp. 200.669.870,-, Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian kebutuhan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sampai akhir tahun.
   b. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan anggaran awal Rp. 98.230.050, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi 100.770.400,- hal ini terjadi karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD menjadi Rp. 101.450.400,-, Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian kebutuhan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sampai akhir tahun.
6. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Kubu Gadang)**
   a. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan anggaran awal Rp. 116.289.970, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 104.823.590,- hal ini terjadi karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD tidak terjadi perubahan.
   b. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan anggaran awal Rp. 83.711.175, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 95.176.775,- hal ini terjadi karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD tidak terjadi perubahan.
7. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Labuah Basilang)**
   a. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan anggaran awal Rp. 61.561.819, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 53.232.216,- hal ini terjadi karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD tidak terjadi perubahan.
   b. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan anggaran awal Rp. 138.438.450, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 146.768.100,00,- hal ini terjadi karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD tidak terjadi perubahan.
8. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Subarang Batuang)**
   a. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan anggaran awal Rp. 74.225.260,-, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 51.977.810,- hal ini terjadi karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD tidak terjadi perubahan.
   b. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan anggaran awal Rp. 125.773.700, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi 148.021.150,- hal ini terjadi karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD menjadi Rp. 169.420.750,-, Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian kebutuhan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sampai akhir tahun.
9. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Nunang Daya Bangun)**
   a. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan anggaran awal Rp. 83.005.650,-, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 76.785.510,- hal ini terjadi karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD tidak terjadi perubahan.

b. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan anggaran awal Rp. 116.994.600, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi 123.214.550,- hal ini terjadi karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD tidak terjadi perubahan.

10. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Padangdata Tanahmati)

a. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan anggaran awal Rp. 117.393.460,-, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 80.870.510,- hal ini terjadi karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD tidak terjadi perubahan.

b. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan anggaran awal Rp. 82.606.755,-, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi 119.129.855,- hal ini terjadi karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD menjadi Rp. 124.754.855,-, Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian kebutuhan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sampai akhir tahun.

11. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Padang Tinggi Piliang)

a. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan anggaran awal Rp. 57.125.510,-, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 47.690.410,- hal ini terjadi karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD tidak terjadi perubahan.

b. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan anggaran awal Rp. 142.875.250,-, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi 152.312.700,- hal ini terjadi karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD menjadi Rp. 171.403.750,-, Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian kebutuhan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sampai akhir tahun.

12. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Padangtongah Balainanduo)

a. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan anggaran awal Rp. 98.340.952,-, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 99.490.550,- hal ini terjadi karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD tidak terjadi perubahan.

b. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan anggaran awal Rp. 101.660.175,-, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi 100.509.800,- hal ini terjadi karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD tidak terjadi perubahan.

13. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Pakan Sinayan)

a. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan anggaran awal Rp. 73.740.960,-, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 57.762.810,- hal ini terjadi karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD tidak terjadi perubahan.

b. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan anggaran awal Rp. 126.259.380,-, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi 142.237.530,- hal ini terjadi karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD tidak terjadi perubahan.

14. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Parak Batuang)

a. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan anggaran awal Rp. 102.530.260,-, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 89.194.560,- hal ini terjadi karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD tidak terjadi perubahan.

b. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan anggaran awal Rp. 97.471.595,-, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi 110.805.495,- hal ini terjadi karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD tidak terjadi perubahan.

15. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Parit Rantang)

a. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan anggaran awal Rp. 97.762.360,-, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 76.494.360,- hal ini terjadi karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD tidak terjadi perubahan.

b. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan anggaran awal Rp. 102.237.975,-, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026

menjadi 123.505.795,- hal ini terjadi karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD tidak terjadi perubahan.

16. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Payolansek)

a. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan anggaran awal Rp. 106.266.370,-, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 81.028.720,00,- hal ini terjadi karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD tidak terjadi perubahan.
b. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan anggaran awal Rp. 93.762.000,-, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi 118.928.430,- hal ini terjadi karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD tidak terjadi perubahan.

17. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Talang)

a. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan anggaran awal Rp. 61.717.610,-, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 82.393.350,- hal ini terjadi karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD tidak terjadi perubahan.
b. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan anggaran awal Rp. 138.282.440,-, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi 117.606.650,- hal ini terjadi karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD tidak terjadi perubahan.

18. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Tanjung Pauh)

a. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan anggaran awal Rp. 77.392.360,-, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 96.285.510,- hal ini terjadi karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD terjadi perubahan menjadi Rp. 98.084.360,- karena penyesuaian kebutuhan hingga akhir tahun
b. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan anggaran awal Rp. 122.612.000,-, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi 103.714.900,- hal ini terjadi karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD menjadi Rp. 105.514.900,-, Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian kebutuhan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sampai akhir tahun.

19. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Tanjunggodang Sungaipinago)

a. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan anggaran awal Rp. 71.896.024,-, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 71.894.452,- hal ini terjadi karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD tidak terjadi perubahan.
b. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan anggaran awal Rp. 128.103.370,-, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi 140.993.120,- hal ini terjadi karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD. Pada Perubahan RKPD tidak terjadi perubahan.

D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Sub kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal pada anggaran RKPD Rp. 67.992.000 -, terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 148.636.600,- karena adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD dan terjadi perubahan di Perubahan RKPD menjadi Rp. 200.344.750,-, karena penyesuaian kebutuhan hingga akhir tahun.
b. Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan pada anggaran RKPD Rp. 38.971.600,-, tidak terjadi perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan terjadi perubahan di Perubahan RKPD menjadi Rp.29.477.125,-, karena efisiensi anggaran.

V.6.2 KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

Urusan Kewilayahan Kecamatan Payakumbuh Timur memiliki anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.11.508.003.483,- terdiri dari 5 (Lima) Program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 45 (Empat Puluh Tujuh) Sub Kegiatan. APBD Tahun Anggaran 2026 mengalami perubahan sebesar Rp.11.430.080.373,- yang disebabkan dinamika pembahasan KUA, PPAS dan APBD di DPRD. Sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 11.663.656.078,-. Terjadi penambahan sebesar Rp.155.652.595,-,rincian penambahan dan pengurangan pada beberapa program/kegiatan/sub kegiatan dengan rincian perubahan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.20.710.900,-dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.14.694.950,-, pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp.14.694.950,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.6.015.950,- akibat penyesuaian efesiensi anggaran.

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.29.997.100,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.11.764.500,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp.11.764.500,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.18.232.600,- akibat penyesuaian efesiensi anggaran.

c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.1.610.000,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.105.100,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp.105.100,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.1.504.900,- akibat penyesuaian efesiensi anggaran.

d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.1.610.000,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.105.100,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp.105.100,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.1.504.900,- akibat penyesuaian efesiensi anggaran.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunnjangan ASN, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.7.268.190.374,-, APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.7.734.618.085,- dan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 7.734.618.085,-. Terjadi penambahan sebesar Rp.466.427.711,- dikarenakan perhitungan gaji dan tunjangan menyesuaikan dengan kondisi jumlah ASN PPPK pada tahun 2026.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.510.480.000,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.498.000.000,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp. 498.000.000,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.3.480.000,- akibat penyesuaian jumlah pejabat pengelola keuangan pada tahun 2026.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.66.299.410,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.105.100,- dimana anggaran hanya bersifat cantolan.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.1.354.800,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.4.469.600,-, pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp. 4.469.600,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.3.114.800,- penambahan sesuai kebutuhan.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.34.908.585,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar

Rp.31.975.355,-, pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp.26.773.244,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.8.135.361,- akibat penyesuaian efesiensi anggaran.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.8.604.900,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.8.612.100,-, pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp. 8.612.100,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.7.200,- penambahan sesuai kebutuhan.
d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.5.149.900,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.105.000,-, pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp. 105.000,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.5.044.800,- akibat penyesuaian efesiensi anggaran.
e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.105.931.000.- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 53.868.000,-. pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 bertambah sebesar Rp. 53.868.000,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.52.063.000,- pengurangan anggaran akibat penyesuaian efisiensi anggaran.
f. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.1.610.000.- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.105.100,-. pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 bertambah sebesar Rp. 105.100,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.1.504.900,- akibat penyesuaian efesiensi anggaran.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.59.974.200,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.6.750.000,- . Perubahan RKPD sebesar Rp.69.563.500,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.9.589.300,- dimana anggaran yang bersumber dari transfer keuangan daerah untuk penangganan/penanggulangan bencana.
b. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.125.738.000,-, APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD sebesar Rp.124.792.000,- Terjadi penggurangan anggaran sebesar Rp. 946.000, Pengurangan akibat penyesuaian efesiensi anggaran.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.77.599.579,-, APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.56.503.800,- Perubahan RKPD sebesar Rp. 56.503.800,-, Terjadi pengurangan sebesar Rp.21.095.779,-. Pengurangan akibat penyesuaian efesiensi anggaran.
b. Sub Kegiatan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 258.650.- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 258.650,-, pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp. 258.650,-. Tidak terjadi pengurangan anggaran.
c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.647.123.880,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.665.197.033,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.700.426.668,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.53.302.700,-. Penambahan anggaran sudah sesuai kebutuhan.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 189.550.000 dan APBD Tahun Angagran 2026 dan Perubahan APBD sebesar Rp. 189.550.000. Tidak terjadi pengurangan anggaran.
b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.20.194.360,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.9.500.000,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp.

9.500.000,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.10.694.360,- akibat penyesuaian efesiensi anggaran.

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.162.120.495,-, APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD sebesar Rp.105.100,- Pada perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar RP. 105.100,- Terjadi penggurangan anggaran sebesar Rp.162.015.395,- akibat penyesuaian efesiensi anggaran.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

1. **Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** dengan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.39.989.500,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.18.926.300,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 18.926.300,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.21.063.200,- akibat penyesuaian efesiensi anggaran.
2. **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**
   Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.13.712.750.- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.5.491.750,-, pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 bertambah sebesar Rp. 5.491.750,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.8.221.650,- akibat penyesuaian efesiensi anggaran.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

1. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**
   Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 81.858.700,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.105.100,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.105.100,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.81.753.600,- akibat penyesuaian efesiensi anggaran.
2. **Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**
   Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.120.479.850,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.80.948.850,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp. 80.948.850,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.39.531.000,- akibat penyesuaian efesiensi anggaran.
3. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Balai Jariang)**
   a. Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.72.224.300,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.96.067.600,-. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp. 96.067.600,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.21.843.300,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD.
   b. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.125.775.700,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 103.932.400,-. Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp.103.932.400,-. Terjadi pegurangan anggaran sebesar Rp.21.843.000,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD.
4. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Koto Baru)**
   a. Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.50.457.650,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.45.697.150,-. Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp.45.697.150,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.4.760.500,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD dan penambahan SILPA Dau Diarahkan Tahun 2025.

b. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.149.542.350,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.154.302.850,-. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp.154.302.850,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.4.760.500,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD.

5. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Koto Panjang)

a. Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.91.748.350,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.80.285.100,-. Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp.80.285.100,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.11.463.250,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD.

b. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 108.251.650,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.119.714.900,-. Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp. 119.714.900,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.11.463.250,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD.

6. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Padang Alai Bodi)

a. Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.103.069.250,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.73.395.650,-. Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp.84.313.650,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.18.755.600,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD dan penambahan SILPA Dau Diarahkan Tahun 2025.

b. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.96.930.750,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.126.604.350,-. Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp.145.686.350,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.48.755.600,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD dan penambahan SILPA Dau Diarahkan Tahun 2025.

7. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Padang Tangah Payobadar)

a. Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.74.354.450,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.60.584.750,-. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.120.734.750,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.46.380.300,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD dan penambahan SILPA Dau Diarahkan Kelurahan Tahun 2025.

b. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.125.645.550,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.139.415.250,-. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.139.849.951,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.14.204.401,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD dan penambahan SILPA Dau Diarahkan Kelurahan Tahun 2025.

8. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Padang Tiakar)

a. Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.80.491.960,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.54.880.460,-. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 54.880.460,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.25.611.500,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD.

b. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.119.508.040,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.145.119.540,-. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 145.119.540,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.25.611.500,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD.

8. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Payobasung)

a. Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.89.091.700,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.52.607.900,-. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.52.607.900,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.36.483.800,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD serta penambahan SILPA Dau Diarahkan Kelurahan Tahun 2025.

b. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.110.908.300,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.147.392.100,-. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 147.392.100,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.36.483.800,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD.

9. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Sicincin)

a. Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.90.464.200,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.63.455.420,-. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 63.455.420,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.27.008.780,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD.

b. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.109.535.800,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.136.544.580,-. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.136.544.580,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.27.008.780,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD.

10. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Tiakar)

a. Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.49.521.150,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.41.143.750,-. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.91.293.750,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.41.772.600,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD serta penambahan SILPA Dau Diarahkan Kelurahan Tahun 2025.

b. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.150.478.850,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.158.856.250,-. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.158.856.250,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.8.377.400,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD.

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mengalami perubahan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.24.519.300,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.14.675.400.-. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 14.675.400,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.9.843.900,- akibat penyesuaian efesiensi anggaran.

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.90.393.750,-. dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.93.271.850,-. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 93.271.850,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.2.878.200,- Penambahan akibat penyesuaian kebutuhan persiapan dan pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Payakumbuh.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.7.033.500,-. dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 5.477.000,-. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp. 5.477.000,-. Terjadi penguranganan anggaran sebesar Rp.1.556.500,- akibat penyesuaian efesiensi anggaran.

V.6.3 KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA

Urusan Kewilayahan Kecamatan Payakumbuh Utara memiliki anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.11.186.600.777,- terdiri dari 5 Program, 13 kegiatan, dan 47 Sub Kegiatan. APBD Tahun Anggaran 2026 mengalami perubahan sebesar Rp.10.800.670.234,- yang disebabkan dinamika pembahasan KUA, PPAS dan APBD di DPRD. Sedangkan pada

Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 11.083.578.104,-. dengan 5 Program, 12 kegiatan, dan 38 Sub Kegiatan Terjadi pengurangan sebesar Rp.103.022.673,-

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengalami perubahan dijelaskan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.14.418.650,-dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.11.426.000,-, pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp.11.426.000,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.2.992.650,- akibat penyesuaian efesiensi anggaran.

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.7.969.600,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.4.710.250,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp.4.710.250,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.3.259.350,- akibat penyesuaian efesiensi anggaran.

c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.1.207.500,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.603.600,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp.603.600,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.603.900,- akibat penyesuaian efesiensi anggaran.

d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.1.207.500,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.603.600,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp.603.600,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.603.900,- akibat penyesuaian efesiensi anggaran.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.7.611.963.881,-, APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.6.824.683.385,- dan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 6.824.683.385,-. Terjadi pengurangan sebesar Rp.787.280.496,- dikarenakan perhitungan gaji dan tunjangan menyesuaikan dengan kondisi jumlah ASN pada tahun 2026.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.510.240.000,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.509.640.000,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp.509.640.000,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.600.000,- akibat penyesuaian jumlah pejabat pengelola keuangan pada tahun 2026.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.80.800,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.0,- dimana anggaran hanya bersifat cantolan.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.2.854.000,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.1.255.250,-, pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp.1.255.250,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.1.598.750,- akibat penyesuaian efesiensi anggaran.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.47.430.730,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.39.566.800,-, pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp.39.566.800,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.7.863.930,- akibat penyesuaian efesiensi anggaran.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.5.989.800,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.5.611.800,-, pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar

Rp.5.611.800,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.378.000,- akibat penyesuaian efesiensi anggaran.

d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.50.052.000.- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 48.097.000,-. pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 bertambah sebesar Rp.63.793.000,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.13.741.000,- penambahan anggaran sesuai penyesuaian kebutuhan.
e. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.1.207.500.- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.600.000,-. pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 bertambah sebesar Rp.22.956.000,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.21.748.500,- akibat penyesuaian kebutuhan anggaran.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.80.800,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.0,- . Perubahan RKPD sebesar Rp.79.109.100,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.79.109.100,- dimana anggaran yang bersumber dari transfer keuangan daerah untuk penangganan/penanggulangan bencana.
b. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.80.800,-, APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD sebesar Rp.0,- Terjadi penggurangan anggaran sebesar Rp.80.800, dimana anggaran hanya bersifat cantolan.
c. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.80.800,-, APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD sebesar Rp.0,- Terjadi penggurangan anggaran sebesar Rp.80.800, dimana anggaran hanya bersifat cantolan.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.91.522.400,-, APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.99.595.120,- Perubahan RKPD sebesar Rp. 50.007.080,-, Terjadi pengurangan sebesar Rp.41.515.320,-. Pengurangan akibat penyesuaian efesiensi anggaran.
b. Sub Kegiatan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.1.400.000.- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.574.650,-, pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp.574.650,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.825.350,- akibat penyesuaian efesiensi anggaran.
c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.566.991.193,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.923.945.335,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.936.159.920,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.369.168.727,-. Penambahan ini akibat penyesuaian kebutuhan berdasarkan jumlah Tenaga Outsourcing Kebersihan sebanyak 16 orang, Tenaga Outsourcing Keamanan sebanyak 2 orang dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 5 (lima) orang.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 170.300.000 dan APBD Tahun Angagran 2026 dan Perubahan APBD sebesar Rp. 174.150.000. Terjadi penambahan anggaran sebanyak Rp.3.850.000,- akibat penyesuaian kebutuhan kendaraan dinas/operasional roda 2 sebanyak 39 unit.
b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.13.520.000,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.8.160.000,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp.8.160.000,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.5.360.000,- akibat penyesuaian efesiensi anggaran.

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.80.800,-, APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD sebesar Rp.0,- Terjadi penggurangan anggaran sebesar Rp.80.800, dimana anggaran hanya bersifat cantolan.
d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.80.800,-, APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD sebesar Rp.0,- Terjadi penggurangan anggaran sebesar Rp.80.800, dimana anggaran hanya bersifat cantolan.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.28.105.900,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.21.112.300,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.21.087.300,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.7.018.600,- akibat penyesuaian efesiensi anggaran.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.3.571.900.- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.1.428.500,-, pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 bertambah sebesar Rp.6.428.500,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.2.856.400,- penambahan akibat kebutuhan anggaran.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.1.920.128.373,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.1.897.665.144,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 2.010.701.469,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.90.573.096,- Penambahan untuk pembelian mesin sinso yang diperuntukkan untuk 1 Kecamatan dan 9 Kelurahan.

2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.48.882.850,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.36.918.250,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp.46.917.900,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.1.964.600,- akibat penyesuaian efesiensi anggaran.

3. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Balai Tangah Koto)

a. Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.98.161.400,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.74.112.140,-. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp.74.112.140,-. Terjadi penggurangan anggaran sebesar Rp.24.049.260,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD.
b. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.101.838.950,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 125.888.200,-. Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp.125.888.200,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.24.049.260,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD.

4. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Ikua Koto Dibalai)

a. Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.71.979.208,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.59.776.574,-. Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar

Rp.59.776.574,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.12.202.634,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD dan penambahan SILPA Dau Diarahkan Tahun 2025.

b. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 128.020.750,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.160.254.050,-. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp.160.254.050,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.32.233.300,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD.

5. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kapalo Koto Dibalai)

a. Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.82.629.280,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.71.078.580,-. Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp.71.078.580,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.11.550.700,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD.

b. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 117.372.700,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.128.921.600,-. Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp.128.921.600,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.11.548.900,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD.

6. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Koto Kociak Kubu Tapak Rajo)

a. Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.76.645.910,0,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.53.024.710,-. Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp.73.054.960,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.3.590.950,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD dan penambahan SILPA Dau Diarahkan Tahun 2025.

b. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.123.354.000,0,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.146.975.750,-. Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp.73.054.960,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.23.621.750,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD.

7. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Napar)

a. Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.104.784.450,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.78.583.840,-. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.98.614.090,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.6.170.360,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD dan penambahan SILPA Dau Diarahkan Kelurahan Tahun 2025.

b. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.95.215.650,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.121.416.550,-. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.121.573.750,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.26.358.100,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD dan penambahan SILPA Dau Diarahkan Kelurahan Tahun 2025.

8. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Ompang Tanah Sirah)

a. Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.68.748.310,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.60.544.510,-. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.60.544.510,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.8.203.800,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD.

b. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.131.251.750,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.139.455.650,-. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.139.455.650,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.8.203.900,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD.

9. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Tigo Koto Diateh)

a. Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.84.499.330,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.48.526.990,-. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.98.676.990,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.14.177.660,-. Hal

ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD serta penambahan SILPA Dau Diarahkan Kelurahan Tahun 2025.

b. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.115.500.275,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.151.473.275,-. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.151.473.275,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.35.973.000,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD.

10. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Tigo Koto Dibaruah)

a. Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.100.217.700,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.66.054.500,-. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.116.205.650,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.15.987.950,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD serta penambahan SILPA Dau Diarahkan Kelurahan Tahun 2025.

b. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.99.782.325,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.133.945.500,-. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.116.204.650,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.34.163.175,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD.

11. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Taratak Padang Kampuang)

a. Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.46.675.110,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.69.789.000,-. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.119.939.000,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.73.263.890,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD serta penambahan SILPA Dau Diarahkan Kelurahan Tahun 2025.

b. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.153.324.900,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.130.211.200,-. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.130.211.200,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.23.113.700,-. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika pembahasan APBD di DPRD.

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.3.270.000,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.1.307.350.-. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.11.786.150,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.8.516.150,- Penambahan untuk mengakomodir kegiatan

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.80.258.200,-. dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.186.666.800,-. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.253.916.450,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.173.658.250,- Penambahan akibat penyesuaian kebutuhan persiapan dan pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Payakumbuh, dimana Kec.Payakumbuh Utara menjadi tuan rumah pada tahun 2026.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.3.624.000,-. dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 2.349.100,-. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 tetap sebesar Rp.7.349.100,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.3.725.100,- Penambahan untuk mengakomodir kegiatan

V.6.4 KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN

Kecamatan Payakumbuh Selatan memiliki anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 9.860.470.788,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp. 8.090.367.059,- Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 8.198.264.079,- terdapat penambahan sebesar Rp. 566.625.158,- rincian penambahan dan pengurangan pada beberapa program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar RP. 4.073.200,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 3.370.950,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 3.370.950,- Berkurang sebesar Rp.702.250,- Pengurangan ini terjadi adanya efisiensi anggaran.

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 22.439.950,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 12.940.450,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 12.940.450,-. Berkurang sebesar Rp. 9.499.500,- Pengurangan ini terjadi adanya efisiensi anggaran

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 5.150.222.809,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 5.436.272.222.- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 5.436.272.222,-. Bertambah sebesar Rp. 286.049.413,- Penambahan ini menyesuaikan dengan kebutuhan gaji sesuai jumlah pegawai pada Kecamatan Payakumbuh Selatan.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, anggaranp RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 233.116.000,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 396.580.000,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 396.580.000,- Bertambah sebesar Rp. 163.464.000,- Penambahan ini untuk penyesuaian perubahan honor untuk pejabat pengelola keuangan.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 39.100.000,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.0,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.0,-. Berkurang sebesar Rp. 39.100.000,- Pengurangan ini karena ketiadaan anggaran

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 10.695.250,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 Rp. 10.407.200,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 10.407.200,- Berkurang sebesar Rp. 288.050,- dikarenakan adanya efisiensi anggaran

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 12.937.500,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 Rp. 8.615.900,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 8.615.900,- Berkurang sebesar Rp. 4.321.600,- dikarenakan adanya efisiensi anggaran

c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga pada RKPD Tahun 2026 Rp. 100.000,- namun pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 anggaran menjadi Rp.0,-. Berkurang sebesar Rp. 100.000,- karena ketiadaan anggaran

d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 43.880.000,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 28.672.480,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 28.672.480,- Berkurang sebesar Rp. 15.207.520,- Pengurangan ini dikarenakan efisiensi anggaran.

e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 12.321.800,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 12.387.850,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 12.387.850,-. Bertambah sebesar Rp. 66.050,- Penambahan ini untuk

kebutuhan jilid.

f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, anggaran RKPD Tahun 2026 Rp. 2.856.000,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 2.640.000.- pada Perubahan RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 2.640.000,- Berkurang sebesar Rp. 216.000,- Pengurangan ini dikarenakan efisiensi anggaran.
g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 65.091.650,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 43.920.000,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 43.920.000,- Berkurang sebesar Rp. 21.171.650,- Pengurangan ini terjadi karena adanya efesiensi anggaran.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel di RKPD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan Rp. 100.000,- Pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan RKPD perubahan 2026 dianggarkan Rp.0,- dikarenakan ketiadaan anggaran
b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 21.841.000,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.0,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 42.000.000,- Bertambah sebesar Rp. 20.159.000,- Penambahan ini untuk pengadaan mesin chainsaw dari anggaran TKD.
c. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 100.000,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.0,- dikarenakan ketiadaan anggaran

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 53.809.082,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 53.808.242,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 53.808.242,- Bertambah sebesar Rp. 840,- Penambahan ini untuk penyesuaian kebutuhan air.
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 345.000,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 632.500,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 632.500,- Bertambah sebesar Rp. 287.500,- Penambahan ini untuk penyesuaian kebutuhan sewa tenda.
c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 433.608.120,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 Rp. 527.095.760,- dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 543.180.430,- Bertambah sebesar Rp. 109.572.310,- Penambahan ini menyesuaikan dengan kebutuhan gaji tenaga outsourching dengan standar harga terbaru.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 148.080.000.- dan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 147.200.000,- Berkurang sebesar Rp. 880.000,- Pengurangan ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran
b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.11.000.000.- dan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 11.000.000.-anggaran ini tidak adanya penguranagan.
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 100.000.- dan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 0.- dikarenakan ketiadaan anggaran.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal ,anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 40.140.000,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 22.063.350,- Berkurang sebesar Rp. 18.076.650,- Pengurangan ini karena karena adanya efesiensi anggaran dan penyesuaian kebutuhan kegiatan.

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 2.384.850,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 2.384.250,- Berkurang sebesar Rp. 600,- Pengurangan ini karena karena adanya efesiensi anggaran.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 90.586.250,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 20256 menjadi Rp.0,- dikarenakan kegiatan musrembang kelurahan dialihkan ke masing-masing kelurahan.

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Balai Panjang

a. Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 60.284.000,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 46.657.360 Bertambah sebesar Rp.40.624.800,-. berkurang sebesar Rp. 13.626.640,- pengurangan anggaran ini untuk penyesuaian kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan di Kelurahan.

b. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 139.716.000,- Pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 153.342.910,- Bertambah sebesar Rp. 13.626.640,- Penambahan karena penyesuaian kebutuhan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan.

3. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kototuo Limokampuang

a. Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 58.276.860,- Pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 75.894.360,- Berkurang sebesar Rp. 17.617.500,- penambahan anggaran ini untuk penyesuaian kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan di Kelurahan.

b. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 141.722.900,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 124.105.800,- Berkurang sebesar Rp. 17.617.500,-,- pengurangan ini karena penyesuaian kebutuhan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan

4. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Limbukan

a. Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 116524150,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 108.549.560 ,- Berkurang anggaran sebesar Rp. 7.974.590,- pengurangan anggaran ini untuk penyesuaian kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan di Kelurahan.

b. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 83.475.800,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 91.450.560,- Bertambah sebesar Rp. 7.974.590,- Penambahan karena penyesuaian kebutuhan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan.

c.

5. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Padang Karambia**
   a. Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 93.312.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 77.617.760 ,- berkurang sebesar Rp. 15.694.240,- pengurangan anggaran ini untuk penyesuaian kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan di Kelurahan.
   b. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 106.687.850,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 122.383.850,- bertambah sebesar Rp. 15.694.240,- Penambahan karena penyesuaian kebutuhan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan.
6. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang**
   a. Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 107.858.500,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 78.388.150,- dan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 98.577.700,- Berkurang sebesar Rp. 9.280.800,- pengurangan anggaran ini untuk penyesuaian kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan di Kelurahan dan penambahan anggaran dari anggaran silpa.
   b. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 92.141.300,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 121.612.150,- dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 151.234.900,- bertambah sebesar Rp. 59.093.600,- Penambahan karena penyesuaian kebutuhan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan dan penambahan anggaran dari anggaran silpa.
7. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kapalo Koto Ampangan**
   a. Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 77.572.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 60.959.420,- berkurang sebesar Rp. 16.612.580,- pengurangan anggaran ini untuk penyesuaian kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan di Kelurahan.
   b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 122.428.900,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 139.041.225,- bertambah sebesar Rp. 16.612.580,- Penambahan karena penyesuaian kebutuhan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan.
8. **Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**
   Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 61.358.500,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 50.923.050,- Berkurang sebesar Rp. 10.435.450,- Pengurangan ini karena karena adanya efesiensi anggaran.

D. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mengalami perubahan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 4.619.900,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 4.619.700,-. Berkurang sebesar Rp. 200,- Pengurangan ini karena adanya efesiensi anggaran

E. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang mengalami perubahan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahaann Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** dengan sub kegiatan berikut :
   a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 56.216.650,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 112.462.200,- Bertambah sebesar Rp. 56.245.550,-Penambahan ini untuk anggaran pelaksanaan MTQ dan penyesuaian kebutuhan kegiatan.
   b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 20.242.400,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan

Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 64.700,-. Berkurang sebesar Rp. 20.177.700,-. disebabkan karena adanya efisiensi anggaran.

V.6.5 KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

Kecamatan Lamposi Tigo Nagori memiliki anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.7.748.705.459, yang terdiri dari 5 Program,11 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan. untuk pagu APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp.7.796.745.199 , .Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.8.086.649.849,- dengan 5 Program 11 Kegiatran dan 34 Sub Kegiatan. terdapat penambahan sebesar Rp.347.795.030,-

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan dijelaskan sebagai berikut

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar 14.087.500 dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.9.257.500 pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.9.257.500,-. Berkurang sebesar Rp.4.830.000,-. Pengurangan ini terjadi adanya efisiensi anggaran.

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 56.615.750 dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 28.890.000,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 28.890.000,-. Berkurang sebesar Rp.27.725.750,- . Pengurangan ini terjadi adanya efisiensi anggaran

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 5.312.114.177 dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.5.273.295.733.- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 5.273.295.733,-. Berkurang sebesar Rp.38.818.444,- Pengurangan ini menyesuaikan dengan kebutuhan gaji sesuai jumlah pegawai pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 376.800.000,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.379.680.000,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.379.680.000,-. Bertambah sebesar Rp.2.880.000,- Penambahan ini untuk menambah kekurangan honor untuk pejabat pengadaan.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.48.500,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.0,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.0,-. Berkurang sebesar Rp.48.500,- Pengurangan ini karena ketiadaan anggaran

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.6.775.000,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 Rp.2.710.950 pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.2.710.950 Berkurang sebesar Rp.4.064.050 dikarenakan adanya efisiensi anggaran

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran RKPD Tahun 2026 Rp.54.600,- namun pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 anggaran menjadi Rp.0,-. Berkurang sebesar Rp.56.400 karena ketiadaan anggaran

c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 36.642.825,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.19.532.650,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.19.532.650,-. Berkurang sebesar Rp.17.110.175,- Pengurangan ini dikarenakan efisiensi anggaran.

d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 11.329.800,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.5.830.000,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi

Rp.5.830.000,-. Berkurang sebesar Rp.5.499.800,- Pengurangan ini dikarenakan efisiensi anggaran.

e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, anggaran RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.50.400.- pada Perubahan RKPD tidak dianggarkan sehingga berkurang Rp.50.400,- karena ketiadaan anggaran.
f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.61.224.000,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.35.688.000,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.35.688.000,-. Berkurang sebesar Rp.25.536.000,- Pengurangan ini terjadi karena adanya efesiensi anggaran.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di RKPD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan Rp.42.450,- Pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan RKPD perubahan 2026 dianggarkan Rp.0,- dikarenakan ketiadaan anggaran.
b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel di RKPD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan Rp.52.550,- Pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan RKPD perubahan 2026 dianggarkan Rp.0,- dikarenakan ketiadaan anggaran
c. Sub Kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.6.666.000,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.0,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.42.000.000,-. Bertambah sebesar Rp.35.334.000,- Penambahan ini untuk pengadaan mesin chainsaw
d. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.42.450,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.0,- dikarenakan ketiadaan anggaran
e. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.42.450,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.0,- dikarenakan ketiadaan anggaran

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 358.600.689,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.519.515.088,- Bertambah sebesar Rp.170.769.039,- Penambahan ini menyesuaikan dengan kebutuhan gaji tenaga outsourching dengan standar harga terbaru.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.13.190.000.- dan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.6.740.000,- Berkurang sebesar Rp. 6.450.000,- , Pengurangan ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran
b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.50.400.- dan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.5.324.000.-. Bertambah sebesar Rp. 5.273.600.- Penambahan ini untuk pemeliharaan gedung pada Kecamatan lamposi Tigo Nagori.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal ,anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 19.919.400,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 14.278.750,- Berkurang sebesar Rp.5.640.650,- Pengurangan ini karena karena adanya efesiensi anggaran.

2. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**
   Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 3.508.150,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 1.399.300,- Berkurang sebesar Rp. 2.108.850,- Pengurangan ini karena karena adanya efesiensi anggaran.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**
   Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 46.019.475,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 20256 menjadi Rp.0,-, berkurang sebesar Rp. 46.019.475,-. Pengurangan ini karena adanya efesiensi anggaran
2. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Koto Panjang Dalam**
   a. Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 66.581.420,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 83.943.470,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.107.206.220,00,-. Bertambah sebesar Rp.40.624.800,-. Penambahan anggaran ini untuk pengadaan sarana dan prasarana pelayanan di Kelurahan Koto Panjang Dalam
   b. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 133.418.250,- Pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.123.779.550,- Berkurang sebesar Rp. 9.638.700,-. Pengurangan karena pengalihan anggaran ke Sub kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Koto Panjang Dalam untuk sarana dan prasarana pelayanan publik.
3. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Koto Panjang Padang**
   a. Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 57.932.963,- Pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 55.493.673,- Berkurang sebesar Rp. 2.439.290,-. Untuk dialihkan ke Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Koto Panjang Padang memenuhi kebutuhan anggaran pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.
   b. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 142.067.350,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 156.006.450,- dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.169.927.550,- Bertambah sebesar Rp.27.860.200,- untuk memenuhi anggaran pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
4. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Padang Sikabu**
   a. Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 81.821.070,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.49.008.260,- dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.148.206.260,- Bertambah anggaran sebesar Rp.66.385.190,00,- untuk pembangunan sarana prasarana pelayanan posyandu di Kelurahan.
   b. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 118.178.950 ,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 159.991.900,- Bertambah sebesar Rp.41.812.950,- untuk belanja uang diserahkan ke masyarakat (operasional posyandu, RT/RW dan LPM Kelurahan)
5. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Parambahan**
   a. Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 149.604.660,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.73.720.170,- Pengurangan anggaran sebesar Rp.75.884.490,- untuk dialihkan ke Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
   b. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 50.395.300,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.135.279.600,- dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi

Rp.150.302.900,- Penambahan anggaran sebesar Rp.99.907.600,- untuk belanja uang diserahkan ke masyarakat (operasional posyandu, RT/RW dan LPM Kelurahan) dan pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat.

6. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sungai Durian**
   a. Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 63.072.370,- dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 63.807.270,- pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.141.087.770,- Bertambah sebesar Rp.78.015.400,- Penambahan anggaran ini untuk pengadaan sarana dan prasarana pelayanan di Kelurahan Sungai Durian.
   b. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.136.927.500,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.141.192.525,- Penambahan anggaran sebesar Rp.4.265.025,- untuk penambahan kekurangan belanja uang diserahkan ke masyarakat (operasional RT/RW).
7. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Parik Muko Aia**
   a. Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.53.559.960,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.82.853.910,- Penambahan anggaran sebesar Rp.29.293.950,- untuk pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik di Kelurahan Parik Muko Aia.
   b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.146.440.200,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.122.146.400,- dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.141.365.400,- Pengurangan anggaran sebesar Rp.5.074.800,- dialihkan ke Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Parik Muko Aia untuk pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik .
8. **Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**
   Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.30.980.050,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 24.796.500,- Berkurang sebesar Rp. 6.183.550,- Pengurangan ini karena karena adanya efesiensi anggaran

D. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mengalami perubahan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.10.015.750,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 3.997.800,-. Berkurang sebesar Rp.6.017.950,- Pengurangan ini karena adanya efesiensi anggaran

E. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang mengalami perubahan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahaann Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** dengan sub kegiatan berikut :
   a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 34.999.850,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.70.192.500,-. Bertambah sebesar Rp.35.192.650,-. Penambahan ini untuk anggaran pelaksanaan MTQ
   b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, anggaran RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.3.224.500,- pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp.2.784.500,-. Berkurang sebesar Rp. 440.000,-. disebabkan karena adanya efisiensi anggaran.

V.7 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada RKPD Tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp.4.045.472.162,00 untuk 6 program dan 10 kegiatan dengan 28 Sub Kegiatan. Namun pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 alokasi anggaran Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik berkurang menjadi Rp 3.685.704.286,-untuk 6 program dan 10 kegiatan dengan 24 Sub Kegiatan. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian terhadap hasil pembahasan anggaran tahun 2026. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 ini berkurang menjadi Rp. 3.683.557.120,- untuk 6 program dan 10 kegiatan dengan 24 Sub Kegiatan dengan rincian perubahan pada beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran pada RKPD Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 8.337.700,- namun pada pembahasan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.3.378.300,- akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Rp.4.959.400,-

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah didukung anggaran sebesar Rp. 23.219.550,- pada RKPD Tahun 2026, kemudian pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 berkurang menjadi Rp. 20.767.550. Pengurangan dilakukan karena adanya penyesuaian harga alat tulis kantor dan cetak/penggandaan.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada RKPD Tahun 2026 dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 1.267.225.749,-. Kemudian pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 mengalami penambahan sebesar Rp. 133.137.208,- sehingga anggarannya bertambah menjadi Rp. 1.400.362.957,- disebabkan karena adanya penyesuaian gaji dan tunjangan ASN

b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran pada RKPD Tahun 2026 senilai Rp. 151.087.500,- dan berkurang menjadi Rp. 143.403.750,- pada APBD Tahun Anggaran 2026. Kemudian pada Perubahan RKPD Tahun 2026 bertambah menjadi Rp. 146.803.750,- yang disebabkan oleh penyesuaian honor pengelola keuangan.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan anggaran sebesar Rp.16.164.800,- pada RKPD Tahun 2026. Namun pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 sub kegiatan ini ditiadakan karena adanya efisiensi anggaran

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran senilai Rp. 20.353.550,- pada RKPD Tahun 2026. Pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 sub kegiatan ini batal dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan memiliki anggaran senilai Rp. 8.746.800,- pada RKPD Tahun 2026 dan pada APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 8.713.000. Kemudian pada Perubahan RKPD Tahun 2026 bertambah menjadi Rp. 9.367.000,- karena adanya penyesuaian standar biaya.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang didukung oleh anggaran sebesar Rp. 5.544.000,- pada RKPD Tahun 2026. dan pada APBD Tahun Anggaran 2026 berkurang menjadi Rp.4.092.000,-. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 mengalami penambahan sebesar Rp. 653.000,- sehingga anggaran untuyk sub kegiatan ini bertambah menjadi Rp. 4.745.000,- karena adanya penambahan pembelian surat kabar.

d. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran senilai Rp. 8.797.500,- pada RKPD Tahun 2026. Pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 mengalami pengurangan sebesar Rp. 6.382.500,- sehingga anggaranya berkurang menjadi Rp. 2.415.000,-. Pengurangan ini dilakukan karena adanya penyesuaian volume pengadaan makan minum untuk tamu.

e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran yang tersedia pada RKPD Tahun 2026 adalah Rp. 152.308.000,-.

Anggaran sub kegiatan ini pada ABPD 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 mengalami pengurangan sebesar Rp. 67.291.000,-. Hal ini menyebabkan anggaran untuk sub kegiatan ini menjadi Rp. 85.017.000,- karena adanya penyesuaian volume perjalanan dinas Kantor Kesbangpol.

5. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

   Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dianggarkan senilai Rp. 8.406.000,- pada RKPD Tahun 2026, namun pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 sub kegiatan ini dibatalkan karena adanya efisiensi anggaran.

6. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran senilai Rp. 32.351.320,- pada RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2026. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 mengalami pengurangan sebesar Rp. 12.847.000,-. akibatnya anggarn sub kegiatan ini berkurang menjadi Rp. 19.504.320,- karena adanya penyesuaian anggaran.

   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 75.600.000,- pada RKPD Tahun 2026. Kemudian pada APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 75.554.766,- dan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 mengalami sedikit pengurangan menjadi Rp. 73.297.600,- karena adanya penyesuain gaji serta penyesuaian pembayaran Iuran JKK dan JKM PPPK Paruh Waktu.

7. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

   Sub Kegiatan Pemeliharan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran senilai Rp. 14.880.000,- pada RKPD Tahun 2026. Pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 sub kegiatan ini ditiadakan karena adanya efisiensi anggaran.

B. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 59.647.975,- pada RKPD Tahun 2026. Pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 berkurang sebesar Rp. 12.991.475,- sehingga anggaran sub kegiatan ini berkurang menjadi Rp. 46.656.500,-. Perubahan terjadi karena adanya penyesuaian makan minum untuk kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan.

b. Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka dengan anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 624.549.250,-. Pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 bertambah sebesar Rp. 85.071.550,-. hal ini menyebabkan penambahan sub kegiatan Pembentukan Paskibraka menjadi Rp. 709.620.800,- untuk penyesuaian biaya operasional pembentukan Tim Paskibraka Kota Payakumbuh.

C. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan dukungan anggaran senilai Rp. 809.405.838,- pada RKPD Tahun 2026. Pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 anggaran untuk sub kegiatan ini berkurang sebesar Rp. 46.235.675,- sehingga anggarannya berkurang menjadi Rp. 763.170.163,- karena adanya penyesuaian anggaran pada beberapa sub belanja.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan dukungan anggaran senilai Rp. 64.784.775,- pada RKPD Tahun 2026. Pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 anggaran untuk sub kegiatan ini berkurang sebesar Rp. 45.036.975,-. Akibatnya anggaran sub kegiatan ini berkurang menjadi Rp. 19.747.800,- karena adanya efisiensi anggaran.
c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 6.855.850,-. Anggaran sub kegiatan ini mengalami pengurangan pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 anggarannya berkurang sebesar Rp. 2.633.350,- sehingga anggarannya berkurang menjadi Rp. 4.222.500,- karena adanya efisiensi anggaran.

D. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan anggaran senilai Rp. 74.496.325,-. Kemudian pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 53.544.775,- sehingga anggarannya berkurang menjadi Rp. 20.951.550,- untuk mendukung pelaksanaan efisiensi anggaran.

E. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dimana Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 103.024.850,- pada RKPD Tahun 2026. Kemudian pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 berkurang sebesar Rp. 44.662.050,-. Akibatnya anngaran pada sub kegiatan ini berkurang menjadi Rp. 58.362.800,- karena adanya efisiensi anggaran.

F. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan sub kegiatan yang berubah :

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan anggaran pada RKPD Tahun 2026 senilai Rp. 265.952.150,-. Pada APBD Tahun Anggaran 2026 terjadi pengurangan anggaran menjadi Rp. 82.687.600,- yang disebabkan karena adanya efisiensi anggaran. Kemudian dalam tahun berjalan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 anggaran untuk sub kegiatan ini bertambah lagi menjadi Rp. 85.687.600,- karena adanya penambahan jumlah peserta sosialisasi dari 40 orang menjadi 100 orang.
b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Sosial memiliki anggaran sebesar Rp. 37.918.900,- pada RKPD Tahun 2026. Pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 anggaran berkurang sebesar Rp. 16.093.900,- yang menyebabkan pengurangan anggaran menjadi Rp. 21.825.000,- karena adanya efisiensi anggaran.
c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota memiliki anggaran senilai Rp. 125.142.950,-. Namun pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 anggaran untuk kegiatan ini berkurang menjadi Rp. 100.152.000,-

dan kemudian bertambah sebesar Rp. 5.250.000,- pada Perubahan RKPD Tahun 2026. Anggaran sub kegiatan ini bertambah menjadi Rp. 105.402.000.- karena adanya penyesuaian beberapa item belanja.

Rincian untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dapat dilihat pada matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026 Pemerintah Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Tabel V-1.

Tabel V-1.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN							**129.626.947.265,00**	**181.317.058.458,00**	**184.045.778.632,00**	**54.418.831.367,00**							**168.712.317.927,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**129.626.947.265,00**	**181.317.058.458,00**	**184.045.778.632,00**	**54.418.831.367,00**							**168.712.317.927,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**129.626.947.265,00**	**181.317.058.458,00**	**184.045.778.632,00**	**54.418.831.367,00**							**168.712.317.927,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM Dinas Pendidikan Nilai evaluasi AKIP Dinas Pendidikan oleh Inspektorat**				**88,80 indeks**	**88,50 A indeks kategori**	**105.126.608.950,00**	**147.255.333.108,00**	**142.174.102.687,00**	**45.211.831.722,00**							**150.338.440.672,00**	
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**105.126.608.950,00**	**147.255.333.108,00**	**142.174.102.687,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**150.338.440.672,00**	-
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase konsistensi program kegiatan renstra denga nrenja*				100 %	100 Persen	381.618.750,00	183.841.150,00	245.891.150,00	-135.727.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh		352.097.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	98.707.550,00	26.350.900,00	116.350.900,00	17.643.350,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			147.953.550,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	269.542.450,00	152.459.000,00	124.509.000,00	-145.033.450,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			189.194.050,00	DINAS PENDIDIKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**105.126.608.950,00**	**147.255.333.108,00**	**142.174.102.687,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**150.338.440.672,00**	-
	1.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	7.475.000,00	2.587.500,00	2.587.500,00	-4.887.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			7.475.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	5.893.750,00	2.443.750,00	2.443.750,00	-3.450.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			7.475.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**105.126.608.950,00**	**147.255.333.108,00**	**142.174.102.687,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**150.338.440.672,00**	-
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan*				100 %	94 Persen	102.680.247.310,00	145.791.411.238,00	140.589.934.477,00	37.909.687.167,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh		148.025.677.612,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1460 Orang /bulan	1118 Orang /bulan	101.684.487.310,00	144.795.651.238,00	139.594.174.477,00	37.909.687.167,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			147.301.981.612,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				77 Dokumen	77 Dokumen	995.760.000,00	995.760.000,00	995.760.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			723.696.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase capaian realisasi pelaporan barang milik daerah*				92 Persen	92 Persen	45.175.000,00	22.587.500,00	22.587.500,00	-22.587.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh		40.835.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	45.175.000,00	22.587.500,00	22.587.500,00	-22.587.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			40.835.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	0 Persen	69.710.700,00	0,00	0,00	-69.710.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh		70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	0 Paket	69.710.700,00	0,00	0,00	-69.710.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan umum Dinas Pendidikan sesuai standar*				75 %	100 Persen	771.479.010,00	309.440.800,00	314.890.800,00	-456.588.210,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh		755.061.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	30.008.500,00	14.457.000,00	14.457.000,00	-15.551.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			30.018.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				16 Paket	0 Paket	108.534.350,00	0,00	0,00	-108.534.350,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			112.492.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				94 Paket	94 Paket	186.197.860,00	104.812.300,00	104.812.300,00	-81.385.560,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			178.955.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	65.560.800,00	55.810.000,00	55.810.000,00	-9.750.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			51.985.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4919 Dokumen	4919 Dokumen	44.172.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00	-20.972.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			44.173.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				15 Laporan	15 Laporan	13.995.500,00	8.625.000,00	8.625.000,00	-5.370.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			13.995.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				141 Laporan	141 Laporan	315.535.000,00	99.949.000,00	99.949.000,00	-215.586.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			315.967.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**105.126.608.950,00**	**147.255.333.108,00**	**142.174.102.687,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**150.338.440.672,00**	-
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.475.000,00	2.587.500,00	8.037.500,00	562.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			7.475.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**105.126.608.950,00**	**147.255.333.108,00**	**142.174.102.687,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**150.338.440.672,00**	-
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*				80 %	89 Persen	299.343.000,00	0,00	32.367.500,00	-266.975.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh		177.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	96.657.000,00	0,00	0,00	-96.657.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			89.060.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				84 Unit	0 Unit	120.804.950,00	0,00	0,00	-120.804.950,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			81.285.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	81.881.050,00	0,00	32.367.500,00	-49.513.550,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			6.855.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*				80 %	89 Persen	515.069.120,00	585.001.120,00	608.187.960,00	93.118.840,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh		515.070.580,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				19 Laporan	19 Laporan	244.544.000,00	195.256.000,00	201.257.000,00	-43.287.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			244.686.400,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	270.525.120,00	389.745.120,00	406.930.960,00	136.405.840,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			270.384.180,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah*				80 %	100 Persen	363.966.060,00	363.051.300,00	360.243.300,00	-3.722.760,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh		402.498.280,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			42.950.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	133.600.000,00	133.600.000,00	133.600.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			168.160.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				65 Unit	65 Unit	53.770.000,00	53.770.000,00	53.770.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			53.770.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**105.126.608.950,00**	**147.255.333.108,00**	**142.174.102.687,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**150.338.440.672,00**	-
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	137.406.060,00	136.491.300,00	133.683.300,00	-3.722.760,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			137.618.280,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama; Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD**				**98,30 100; 100 75,55 % % %**	**100; 100 75,55 98,30 % % %**	**24.297.773.465,00**	**33.963.140.700,00**	**41.740.587.895,00**	**-6.127.137.410,00**							**18.170.636.055,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase SD/SMP terakreditasi A*				76,24 Persen	76,24 Persen	9.758.060.625,00	17.122.681.600,00	21.313.761.485,00	11.555.700.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh		6.951.254.090,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	3 Unit	639.995.850,00	199.999.000,00	1.322.578.650,00	682.582.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN SISA DAU	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			332.039.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	1 Ruang	426.991.600,00	0,00	88.217.250,00	-338.774.350,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			426.991.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	0 Ruang	353.349.650,00	0,00	0,00	-353.349.650,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			353.350.020,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	149.682.000,00	0,00	250.664.000,00	100.982.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			158.296.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				18 Paket	3 Paket	1.468.224.700,00	0,00	105.326.600,00	-1.362.898.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			294.725.050,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	750 Peserta Didik	215.640.900,00	162.642.900,00	281.702.900,00	66.062.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			215.641.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				245 Orang	99 Orang	2.031.729.850,00	384.792.150,00	1.523.845.435,00	-507.884.415,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			1.724.530.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				300 Orang	800 Orang	140.883.800,00	220.588.350,00	300.464.350,00	159.580.550,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			148.933.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				85 Satuan Pendidikan	85 Satuan Pendidikan	15.908.950,00	0,00	42.750.000,00	26.841.050,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			16.720.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	85 Satuan Pendidikan	0,00	15.010.450.000,00	15.010.450.000,00	15.010.450.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				85 Orang	0 Orang	42.725.500,00	0,00	0,00	-42.725.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			43.626.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				1 Ruang	0 Ruang	233.720.400,00	0,00	0,00	-233.720.400,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	0 Ruang	411.906.325,00	0,00	0,00	-411.906.325,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			411.906.700,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	19.946.600,00	19.946.600,00	19.946.600,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			19.944.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK																		
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				69 Paket	0 Paket	227.700.000,00	0,00	0,00	-227.700.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	18.751.650,00	11.060.100,00	11.060.100,00	-7.691.550,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			18.754.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				500 Paket	0 Paket	209.996.500,00	0,00	0,00	-209.996.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				7 Unit	9 Unit	1.368.147.650,00	518.869.000,00	950.864.100,00	-417.283.550,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			986.544.680,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				9 Ruang	10 Ruang	1.180.891.900,00	199.333.500,00	1.010.891.500,00	-170.000.400,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			983.325.340,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				790 Peserta Didik	790 Peserta Didik	395.000.000,00	395.000.000,00	395.000.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			398.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	0 Paket	206.866.800,00	0,00	0,00	-206.866.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			207.926.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase SD/SMP terakreeditasi A*				76,24 Persen	76,24 Persen	4.488.282.960,00	10.203.046.450,00	13.681.426.310,00	9.193.143.350,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh		2.592.213.250,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	0 Ruang	341.673.550,00	0,00	0,00	-341.673.550,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	386.424.100,00	0,00	2.251.358.000,00	1.864.933.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			238.408.100,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	0 Ruang	603.617.200,00	0,00	0,00	-603.617.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			188.466.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	0 Ruang	188.465.700,00	0,00	0,00	-188.465.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	0 Ruang	366.639.000,00	0,00	0,00	-366.639.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			188.466.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	190.573.950,00	0,00	151.974.000,00	-38.599.950,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			190.574.050,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	3 Unit	513.108.000,00	232.275.750,00	683.588.000,00	170.480.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			194.839.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				270 Peserta Didik	270 Peserta Didik	162.000.000,00	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			183.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	500 Peserta Didik	281.200.350,00	250.022.350,00	388.344.350,00	107.144.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			271.609.650,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				81 Orang	43 Orang	806.813.100,00	68.847.400,00	500.366.510,00	-306.446.590,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			590.813.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	100 Orang	54.493.950,00	64.477.750,00	65.977.750,00	11.483.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			56.909.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				20 Satuan Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	22.810.850,00	22.810.850,00	75.205.350,00	52.394.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			23.022.350,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				-	19 Satuan Pendidikan	0,00	9.391.550.000,00	9.391.550.000,00	9.391.550.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				100 Orang	0 Orang	13.943.750,00	0,00	0,00	-13.943.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			14.065.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.939.700,00	11.062.350,00	11.062.350,00	-9.877.350,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			21.139.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				283 Paket	0 Paket	97.800.000,00	0,00	0,00	-97.800.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			102.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	0 Ruang	112.175.250,00	0,00	0,00	-112.175.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	0 Paket	285.604.510,00	0,00	0,00	-285.604.510,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			328.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK																		
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				12 Paket	0 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Persentasi PAUD terakreditasi A*				9,28 Persen	9,28 Persen	4.266.158.050,00	4.228.190.700,00	4.294.175.065,00	28.017.015,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh		4.525.807.150,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	0 Unit	89.999.600,00	0,00	0,00	-89.999.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				350 Orang	3 Orang	2.959.787.000,00	31.268.200,00	44.276.665,00	-2.915.510.335,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			2.945.711.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	304 Orang	239.382.950,00	958.870.000,00	964.745.900,00	725.362.950,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			180.466.300,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				138 Satuan Pendidikan	138 Satuan Pendidikan	351.333.050,00	208.481.450,00	255.581.450,00	-95.751.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			351.333.200,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				-	138 Satuan Pendidikan	0,00	2.934.300.000,00	2.934.300.000,00	2.934.300.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				280 Orang	0 Orang	49.601.400,00	0,00	0,00	-49.601.400,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			49.601.700,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				200 Peserta didik	200 Peserta didik	58.999.600,00	36.410.400,00	36.410.400,00	-22.589.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			58.999.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	30.240.750,00	18.860.650,00	18.860.650,00	-11.380.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			30.240.950,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				300 Paket	0 Paket	49.557.700,00	0,00	0,00	-49.557.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			49.520.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	0 Unit	397.256.000,00	0,00	0,00	-397.256.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				6 Paket	6 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			759.934.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase Dikmas terakreditasi B*				60 Persen	60 Persen	5.785.271.830,00	2.409.221.950,00	2.451.225.035,00	-3.334.046.795,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh		4.101.361.565,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				39 Peserta Didik	39 Peserta Didik	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			553.680.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				555 Orang	7 Orang	3.849.933.000,00	57.600.000,00	98.753.085,00	-3.751.179.915,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			2.722.117.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				60 Orang	60 Orang	34.941.000,00	25.416.200,00	25.416.200,00	-9.524.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			31.058.850,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				-	6 Satuan Pendidikan	0,00	2.006.000.000,00	2.006.000.000,00	2.006.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				6 Orang	0 Orang	11.838.250,00	0,00	0,00	-11.838.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			11.299.250,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	41.683.900,00	17.750.650,00	17.750.650,00	-23.933.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			37.453.450,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				6 Paket	0 Paket	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	1.098.480.500,00	271.627.250,00	271.627.250,00	-826.853.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			395.607.240,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				40 Peserta Didik	40 Peserta Didik	27.073.780,00	7.427.850,00	8.277.850,00	-18.795.930,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			27.319.050,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				20 Paket	0 Paket	179.238.000,00	0,00	0,00	-179.238.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			127.920.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun				1 unit	0 unit	483.683.400,00	0,00	0,00	-483.683.400,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			194.906.725,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal**				**100 %**	**0 %**	**29.229.700,00**	**0,00**	**0,00**	**11.300,00**							**29.241.000,00**	
		[Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**29.229.700,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**29.241.000,00**	-
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Persentaes tenaga pendidik yang dilatih; Persentase sekolah yang dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang divalidasi*				52; 73 Persen	0 Persen	29.229.700,00	0,00	0,00	-29.229.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh		29.241.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				100 Orang	0 Orang	29.229.700,00	0,00	0,00	-29.229.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			29.241.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik Indeks pemerataan guru**				**62,00 82,00 % %**	**62,00 82,00 % %**	**173.335.150,00**	**98.584.650,00**	**131.088.050,00**	**665.050,00**							**174.000.200,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**173.335.150,00**	**98.584.650,00**	**131.088.050,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**174.000.200,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase pendidik yang memiliki kualifikasi sarjana (S1)*				95 Persen	95 Persen	173.335.150,00	98.584.650,00	131.088.050,00	-42.247.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh		174.000.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	1 Dokumen	173.335.150,00	98.584.650,00	131.088.050,00	-42.247.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			174.000.200,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN							**210.388.048.641,00**	**216.830.790.014,00**	**238.965.183.516,00**	**28.577.134.875,00**							**211.826.574.866,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**210.388.048.641,00**	**216.830.790.014,00**	**238.965.183.516,00**	**28.577.134.875,00**							**211.826.574.866,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**210.388.048.641,00**	**216.830.790.014,00**	**238.965.183.516,00**	**28.577.134.875,00**							**211.826.574.866,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**91 Indeks**	**91 Indeks**	**174.279.466.416,00**	**179.919.373.772,00**	**187.832.758.774,00**	**-1.395.545.867,00**							**172.883.920.549,00**	
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B**	**0**	**80.5**	**83**	-	-	**174.279.466.416,00**	**179.919.373.772,00**	**187.832.758.774,00**	-	-	-	-	-	-	**86**	**172.883.920.549,00**	-
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penggganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	207.100.975,00	108.224.975,00	107.424.975,00	-99.676.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	ASN		213.692.868,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	115.018.275,00	61.208.225,00	60.408.225,00	-54.610.050,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			135.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				40 Laporan	40 Laporan	77.567.700,00	39.394.250,00	39.394.250,00	-38.173.450,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			78.692.868,00	DINAS KESEHATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**174.279.466.416,00**	**179.919.373.772,00**	**187.832.758.774,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**172.883.920.549,00**	-
	1.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	6.415.000,00	6.415.000,00	6.415.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				12 Data	12 Data	8.100.000,00	1.207.500,00	1.207.500,00	-6.892.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B**	**0**	**80.5**	**83**	-	-	**174.279.466.416,00**	**179.919.373.772,00**	**187.832.758.774,00**	-	-	-	-	-	-	**86**	**172.883.920.549,00**	-
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	84.679.753.144,00	83.847.746.477,00	83.826.826.477,00	-852.926.667,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	ASN		76.941.995.759,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				786 Orang/ bulan	786 Orang/ bulan	83.966.273.294,00	83.183.986.977,00	83.183.986.977,00	-782.286.317,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			76.370.259.759,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	663.480.000,00	644.160.000,00	623.240.000,00	-40.240.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			506.736.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	49.999.850,00	19.599.500,00	19.599.500,00	-30.400.350,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	0 %	399.999.700,00	0,00	0,00	-399.999.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	ASN		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				500 Paket	0 Paket	399.999.700,00	0,00	0,00	-399.999.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks layanan administrasi perangkat daerah*				75 %	75 %	522.405.910,00	160.076.960,00	156.156.560,00	-366.249.350,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	ASN		675.790.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.999.750,00	2.425.500,00	2.425.500,00	-7.574.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**174.279.466.416,00**	**179.919.373.772,00**	**187.832.758.774,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**172.883.920.549,00**	-
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	2 Paket	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Tigo Koto Diate	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			200.000,00	DINAS KESEHATAN
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B**	**0**	**80.5**	**83**	-	-	**174.279.466.416,00**	**179.919.373.772,00**	**187.832.758.774,00**	-	-	-	-	-	-	**86**	**172.883.920.549,00**	-
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.200.000,00	0,00	200.000,00	-11.000.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Tigo Koto Diate	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49.999.610,00	23.225.460,00	23.225.460,00	-26.774.150,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	16.859.500,00	12.539.100,00	-27.460.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	9.999.250,00	4.025.000,00	4.025.000,00	-5.974.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan	500 Laporan	399.999.800,00	112.334.000,00	112.334.000,00	-287.665.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			510.590.000,00	DINAS KESEHATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**174.279.466.416,00**	**179.919.373.772,00**	**187.832.758.774,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**172.883.920.549,00**	-
	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.207.500,00	1.207.500,00	1.207.500,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B**	**0**	**80.5**	**83**	-	-	**174.279.466.416,00**	**179.919.373.772,00**	**187.832.758.774,00**	-	-	-	-	-	-	**86**	**172.883.920.549,00**	-
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan BMD*				80 %	80 %	1.265.650.000,00	0,00	400.000,00	-1.265.250.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	ASN		1.246.510.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	723.140.000,00	0,00	0,00	-723.140.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			654.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				70 Unit	60 Unit	392.510.000,00	0,00	200.000,00	-392.310.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Tigo Koto Diate	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			392.510.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	200.000,00	-149.800.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Tigo Koto Diate	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**174.279.466.416,00**	**179.919.373.772,00**	**187.832.758.774,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**172.883.920.549,00**	-
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah*				80 %	80 %	1.515.201.381,00	1.714.628.941,00	1.817.909.116,00	302.707.735,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	ASN		1.852.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	349.999.781,00	349.999.781,00	349.999.781,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.163.201.600,00	1.363.629.160,00	1.466.909.335,00	303.707.735,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*				80 %	80 %	517.950.000,00	410.670.000,00	406.910.000,00	-111.040.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	ASN		577.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	42.950.000,00	42.950.000,00	39.190.000,00	-3.760.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			42.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				67 Unit	67 Unit	450.000.000,00	343.050.000,00	343.050.000,00	-106.950.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	15.000.000,00	14.670.000,00	14.670.000,00	-330.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi Stunting berdasarkan E PPGBM Jumlah Kematian Ibu**				**16.48 41.00 % Per 100.000 kelahira**	**2.08 2 Persentase Orang**	**32.853.583.250,00**	**33.900.923.392,00**	**48.121.931.892,00**	**3.312.719.537,00**							**36.166.302.787,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana, prasarana, alat kesehatan dan penunjang fasilitas kesehatan yang disedikan sesuai standar*				8 Unit Kerja	8 Unit Kerja	11.480.108.350,00	5.205.418.722,00	19.426.427.222,00	7.946.318.872,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		11.353.980.370,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				3 Unit	3 Unit	3.179.999.850,00	0,00	463.255.750,00	-2.716.744.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			3.180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				5 Unit	5 Unit	999.999.950,00	244.158.300,00	2.013.367.050,00	1.013.367.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	2.000.000.000,00	687.124.800,00	687.124.800,00	-1.312.875.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				8 Unit	8 Unit	100.000.000,00	114.955.000,00	114.955.000,00	14.955.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				200 Keluarga	200 Keluarga	99.999.800,00	23.860.300,00	23.860.300,00	-76.139.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar*				100 %	100 %	21.263.475.950,00	28.534.793.020,00	28.534.793.020,00	7.271.317.070,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		24.546.372.417,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1952 Orang	1952 Orang	299.999.900,00	44.231.800,00	44.231.800,00	-255.768.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1886 Orang	1886 Orang	19.999.700,00	35.230.950,00	35.230.950,00	15.231.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1861 Orang	1861 Orang	299.999.800,00	370.416.700,00	370.416.700,00	70.416.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8318 Orang	8318 Orang	50.000.000,00	38.479.550,00	38.479.550,00	-11.520.450,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				22852 Orang	22852 Orang	50.000.000,00	19.046.700,00	19.046.700,00	-30.953.300,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				86775 Orang	86775 Orang	49.999.750,00	32.699.900,00	32.699.900,00	-17.299.850,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				18127 Orang	18127 Orang	124.999.850,00	107.388.650,00	107.388.650,00	-17.611.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13884 Orang	13884 Orang	29.999.700,00	20.095.000,00	20.095.000,00	-9.904.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1962 Orang	1962 Orang	29.999.700,00	20.771.000,00	20.771.000,00	-9.228.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				339 Orang	339 Orang	9.999.700,00	25.397.500,00	25.397.500,00	15.397.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3028 Orang	3028 Orang	499.999.900,00	1.373.269.000,00	1.373.269.000,00	873.269.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3312 Orang	3312 Orang	99.999.700,00	67.057.700,00	67.057.700,00	-32.942.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	49.999.900,00	13.906.850,00	13.906.850,00	-36.093.050,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	499.999.750,00	404.189.920,00	404.189.920,00	-95.809.830,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	49.999.700,00	33.765.200,00	33.765.200,00	-16.234.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.200,00	591.307.150,00	591.307.150,00	491.306.950,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	309.051.700,00	309.051.700,00	109.051.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	19.999.800,00	11.874.200,00	11.874.200,00	-8.125.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	119.301.600,00	119.301.600,00	69.301.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				340 Orang	340 Orang	49.999.950,00	22.400.000,00	22.400.000,00	-27.599.950,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	99.999.950,00	426.483.000,00	426.483.000,00	326.483.050,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	17.700.000.000,00	20.194.422.750,00	20.194.422.750,00	2.494.422.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			18.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	133.916.000,00	133.916.000,00	113.916.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				12 Dokumen	12 Dokumen	29.999.800,00	44.034.800,00	44.034.800,00	14.035.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	175.000.000,00	69.175.000,00	69.175.000,00	-105.825.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	5.735.000,00	5.735.000,00	735.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	329.229.750,00	329.229.750,00	229.229.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																		
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				7 Tatanan	7 Tatanan	19.999.800,00	13.442.300,00	13.442.300,00	-6.557.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	198.479.850,00	0,00	0,00	-198.479.850,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			198.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	156.722.400,00	156.722.400,00	156.722.400,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			156.720.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	12 Dokumen	299.999.850,00	87.108.750,00	87.108.750,00	-212.891.100,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji																		
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	1 Dokumen	29.999.700,00	31.690.200,00	31.690.200,00	1.690.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah dokumen pengelolaan Informasi Kesehatan yang tersedia*				3 Dokumen	3 Dokumen	9.999.800,00	46.911.800,00	46.911.800,00	36.912.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		115.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.999.800,00	46.911.800,00	46.911.800,00	36.912.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			115.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen perizinan Rumah Sakit kelas C,D dan Fasilitas pelayanan kesehatan yang di terbitkan*				12 Dokumen 16 Unit	12 Dokumen 16 Unit	99.999.150,00	113.799.850,00	113.799.850,00	13.800.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat,ASN		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				4 Unit	4 Unit	29.999.900,00	16.430.200,00	16.430.200,00	-13.569.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				4 Unit	0 Unit	9.999.850,00	0,00	0,00	-9.999.850,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				8 Unit	8 Unit	49.999.750,00	97.369.650,00	97.369.650,00	47.369.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				12 Dokumen	0 Dokumen	9.999.650,00	0,00	0,00	-9.999.650,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan**				**35 %**	**35 %**	**119.999.700,00**	**843.784.250,00**	**843.784.250,00**	**304.868.780,00**							**424.868.480,00**	
		[Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan]	**Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan**	**0**	**0**	**0**	-	-	**119.999.700,00**	**843.784.250,00**	**843.784.250,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**424.868.480,00**	-
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen SDM Kesehatan yang tersedia*				2 Dokumen	2 Dokumen	19.999.800,00	399.943.250,00	399.943.250,00	379.943.450,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	ASN		374.868.480,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				8 Orang	8 Orang	19.999.800,00	19.999.800,00	19.999.800,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**119.999.700,00**	**843.784.250,00**	**843.784.250,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**424.868.480,00**	-
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	379.943.450,00	379.943.450,00	379.943.450,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			354.868.480,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah SDM Kesehatan yang meningkat kompetensinya*				25 Orang	25 Orang	99.999.900,00	443.841.000,00	443.841.000,00	343.841.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				185 Orang	185 Orang	99.999.900,00	443.841.000,00	443.841.000,00	343.841.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Cakupan Sedian Farmasi,Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**				**94 %**	**94 %**	**104.999.550,00**	**330.580.800,00**	**330.580.800,00**	**-59.999.550,00**							**45.000.000,00**	
		[Persentase cakupan sediaan formasi alat kesehatan dan makanan minuman]	**Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman**	**0**	**0**	**0**	-	-	**104.999.550,00**	**330.580.800,00**	**330.580.800,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**45.000.000,00**	-
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah dokumen Izin fasilitas pelayanan kefarmasian yang di terbitkan*				12 Dokumen	0 Dokumen	49.999.850,00	0,00	0,00	-49.999.850,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				12 Dokumen	0 Dokumen	49.999.850,00	0,00	0,00	-49.999.850,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*jumlah dokumen Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan nomor P- IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga*				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	282.417.800,00	282.417.800,00	277.417.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	282.417.800,00	282.417.800,00	277.417.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Jumlah Dokumen sertifikat laik sehat yang tersedia*				12 Dokumen	12 Dokumen	49.999.700,00	48.163.000,00	48.163.000,00	-1.836.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				12 Dokumen	12 Dokumen	49.999.700,00	48.163.000,00	48.163.000,00	-1.836.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Diberdayakan**				**100 %**	**100 %**	**3.029.999.725,00**	**1.836.127.800,00**	**1.836.127.800,00**	**-723.516.675,00**							**2.306.483.050,00**	
		[Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan]	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**3.029.999.725,00**	**1.836.127.800,00**	**1.836.127.800,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**2.306.483.050,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen kegiatan advokasi dan kemitraan masyarakt yang tersedia*				12 Dokumen	12 Dokumen	2.829.999.975,00	1.442.104.550,00	1.442.104.550,00	-1.387.895.425,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		1.916.198.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	2.829.999.975,00	1.274.468.000,00	1.274.468.000,00	-1.555.531.975,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			1.750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Promkes yang tersedia*				12 Dokumen	12 Dokumen	99.999.950,00	57.262.400,00	57.262.400,00	-42.737.550,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				12 Dokumen	12 Dokumen	99.999.950,00	57.262.400,00	57.262.400,00	-42.737.550,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen pelaksanaan UKBM yang tersedia*				12 Dokumen	3 Dokumen	99.999.800,00	336.760.850,00	336.760.850,00	236.761.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		315.284.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	99.999.800,00	86.174.600,00	86.174.600,00	-13.825.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT RSUD DR ADNAAN WD							**210.388.048.641,00**	**216.830.790.014,00**	**238.965.183.516,00**	**28.577.134.875,00**							**211.826.574.866,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**210.388.048.641,00**	**216.830.790.014,00**	**238.965.183.516,00**	**28.577.134.875,00**							**211.826.574.866,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**210.388.048.641,00**	**216.830.790.014,00**	**238.965.183.516,00**	**28.577.134.875,00**							**211.826.574.866,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**91 Indeks**	**91 Indeks**	**174.279.466.416,00**	**179.919.373.772,00**	**187.832.758.774,00**	**-1.395.545.867,00**							**172.883.920.549,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**174.279.466.416,00**	**179.919.373.772,00**	**187.832.758.774,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**172.883.920.549,00**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				9 Unit Kerja	9 Unit Kerja	85.171.405.306,00	93.678.026.419,00	101.517.131.646,00	16.345.726.340,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat,ASN		90.875.981.922,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	76.000.000.000,00	84.132.406.716,00	91.505.313.432,00	15.505.313.432,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			81.420.373.616,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi Stunting berdasarkan E PPGBM Jumlah kematian ibu**				**-**	**2.08 2 % Orang**	**32.853.583.250,00**	**33.900.923.392,00**	**48.121.931.892,00**	**3.312.719.537,00**							**36.166.302.787,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana, prasarana, alat kesehatan dan penunjang fasilitas kesehatan yang disedikan sesuai standar*				-	11 Unit Kerja	11.480.108.350,00	5.205.418.722,00	19.426.427.222,00	7.946.318.872,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	ASN,Masyarakat		11.353.980.370,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				-	1 Unit	0,00	1.903.373.000,00	13.891.917.000,00	13.891.917.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			1.903.373.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS IBUH							**210.388.048.641,00**	**216.830.790.014,00**	**238.965.183.516,00**	**28.577.134.875,00**							**211.826.574.866,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**210.388.048.641,00**	**216.830.790.014,00**	**238.965.183.516,00**	**28.577.134.875,00**							**211.826.574.866,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**210.388.048.641,00**	**216.830.790.014,00**	**238.965.183.516,00**	**28.577.134.875,00**							**211.826.574.866,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**91 Indeks**	**91 Indeks**	**174.279.466.416,00**	**179.919.373.772,00**	**187.832.758.774,00**	**-1.395.545.867,00**							**172.883.920.549,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				9 Unit Kerja	9 Unit Kerja	85.171.405.306,00	93.678.026.419,00	101.517.131.646,00	16.345.726.340,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat,ASN		90.875.981.922,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.395.384.848,00	1.445.384.848,00	1.542.394.581,00	147.009.733,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			1.460.384.848,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah kematian ibu Prevalensi Stunting berdasarkan E PPGBM**				**100 %**	**2 2.08 Orang %**	**32.853.583.250,00**	**33.900.923.392,00**	**48.121.931.892,00**	**3.312.719.537,00**							**36.166.302.787,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar*				100 %	100 %	21.263.475.950,00	28.534.793.020,00	28.534.793.020,00	7.271.317.070,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		24.546.372.417,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	90 Orang	0,00	22.496.000,00	22.496.000,00	22.496.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			22.496.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	6881 Orang	0,00	21.250.000,00	21.250.000,00	21.250.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			21.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	45 Orang	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			3.060.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	605 Orang	0,00	6.460.000,00	6.460.000,00	6.460.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			6.460.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	7 Dokumen	0,00	119.874.750,00	119.874.750,00	119.874.750,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			119.874.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	4 Dokumen	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			10.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	11.433.000,00	11.433.000,00	11.433.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			11.433.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	505 Orang	0,00	7.845.000,00	7.845.000,00	7.845.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			7.845.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 0	0,00	36.890.000,00	36.890.000,00	36.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			36.890.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 0	0,00	136.743.800,00	136.743.800,00	136.743.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			136.744.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	5 Dokumen	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			510.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	12 Dokumen	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			25.500.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang diberdayakan**				**-**	**100 %**	**3.029.999.725,00**	**1.836.127.800,00**	**1.836.127.800,00**	**-723.516.675,00**							**2.306.483.050,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen kegiatan advokasi dan kemitraan masyarakt yang tersedia*				-	3 Dokumen	2.829.999.975,00	1.442.104.550,00	1.442.104.550,00	-1.387.895.425,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	ASN,Masyarakat		1.916.198.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	9.733.000,00	9.733.000,00	9.733.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			9.733.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen pelaksanaan UKBM yang tersedia*				3 Dokumen	3 Dokumen	99.999.800,00	336.760.850,00	336.760.850,00	236.761.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		315.284.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	2 0	0,00	38.640.000,00	38.640.000,00	38.640.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			38.640.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PARIT RANTANG							**210.388.048.641,00**	**216.830.790.014,00**	**238.965.183.516,00**	**28.577.134.875,00**							**211.826.574.866,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**210.388.048.641,00**	**216.830.790.014,00**	**238.965.183.516,00**	**28.577.134.875,00**							**211.826.574.866,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**210.388.048.641,00**	**216.830.790.014,00**	**238.965.183.516,00**	**28.577.134.875,00**							**211.826.574.866,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**91 Indeks**	**91 Indeks**	**174.279.466.416,00**	**179.919.373.772,00**	**187.832.758.774,00**	**-1.395.545.867,00**							**172.883.920.549,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				9 Unit Kerja	9 Unit Kerja	85.171.405.306,00	93.678.026.419,00	101.517.131.646,00	16.345.726.340,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat,ASN		90.875.981.922,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.003.051.463,00	1.058.393.965,00	1.098.039.515,00	94.988.052,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			1.003.051.463,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi Stunting berdasarkan E PPGBM Jumlah kematian ibu**				**100 %**	**2.08 2 % Orang**	**32.853.583.250,00**	**33.900.923.392,00**	**48.121.931.892,00**	**3.312.719.537,00**							**36.166.302.787,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar*				100 %	100 %	21.263.475.950,00	28.534.793.020,00	28.534.793.020,00	7.271.317.070,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		24.546.372.417,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	238 0	0,00	13.687.500,00	13.687.500,00	13.687.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	3140 Orang	0,00	27.455.000,00	27.455.000,00	27.455.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			27.455.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	33 Orang	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			6.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	358 Orang	0,00	3.315.000,00	3.315.000,00	3.315.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			3.315.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	7 Dokumen	0,00	44.122.650,00	44.122.650,00	44.122.650,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			44.122.650,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	3 Dokumen	0,00	7.140.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			7.140.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	13 Dokumen	0,00	14.178.200,00	14.178.200,00	14.178.200,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			14.178.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	200 Orang	0,00	12.899.000,00	12.899.000,00	12.899.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			12.899.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	32.395.800,00	32.395.800,00	32.395.800,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			32.395.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	160.727.600,00	160.727.600,00	160.727.600,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			32.395.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	2 Dokumen	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			510.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	12 Dokumen	0,00	49.980.000,00	49.980.000,00	49.980.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			49.980.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Diberdayakan**				**-**	**100 %**	**3.029.999.725,00**	**1.836.127.800,00**	**1.836.127.800,00**	**-723.516.675,00**							**2.306.483.050,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen kegiatan advokasi dan kemitraan masyarakt yang tersedia*				-	3 Dokumen	2.829.999.975,00	1.442.104.550,00	1.442.104.550,00	-1.387.895.425,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	ASN,Masyarakat		1.916.198.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	7 Dokumen	0,00	21.093.750,00	21.093.750,00	21.093.750,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			21.093.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen pelaksanaan UKBM yang tersedia*				3 Dokumen	3 Dokumen	99.999.800,00	336.760.850,00	336.760.850,00	236.761.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		315.284.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	7 Dokumen	0,00	27.809.000,00	27.809.000,00	27.809.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Parik Rantang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			27.809.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAYOLANSEK							**210.388.048.641,00**	**216.830.790.014,00**	**238.965.183.516,00**	**28.577.134.875,00**							**211.826.574.866,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**210.388.048.641,00**	**216.830.790.014,00**	**238.965.183.516,00**	**28.577.134.875,00**							**211.826.574.866,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**210.388.048.641,00**	**216.830.790.014,00**	**238.965.183.516,00**	**28.577.134.875,00**							**211.826.574.866,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**91 Indeks**	**91 Indeks**	**174.279.466.416,00**	**179.919.373.772,00**	**187.832.758.774,00**	**-1.395.545.867,00**							**172.883.920.549,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				9 Unit Kerja	9 Unit Kerja	85.171.405.306,00	93.678.026.419,00	101.517.131.646,00	16.345.726.340,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat,ASN		90.875.981.922,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	991.607.995,00	1.053.926.890,00	1.147.778.782,00	156.170.787,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			1.036.607.995,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah kematian ibu Prevalensi Stunting berdasarkan E PPGBM**				**100 %**	**2 2.08 Orang %**	**32.853.583.250,00**	**33.900.923.392,00**	**48.121.931.892,00**	**3.312.719.537,00**							**36.166.302.787,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar*				100 %	100 %	21.263.475.950,00	28.534.793.020,00	28.534.793.020,00	7.271.317.070,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		24.546.372.417,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	349 Orang	0,00	19.737.000,00	19.737.000,00	19.737.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			19.737.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2917 Orang	0,00	27.540.000,00	27.540.000,00	27.540.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			27.540.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	8 Orang	0,00	9.180.000,00	9.180.000,00	9.180.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			9.180.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	428 Orang	0,00	10.370.000,00	10.370.000,00	10.370.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			10.370.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	7 Dokumen	0,00	83.357.050,00	83.357.050,00	83.357.050,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			83.357.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	3 Dokumen	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			8.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	14.508.800,00	14.508.800,00	14.508.800,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			14.508.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	44 Orang	0,00	31.005.000,00	31.005.000,00	31.005.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			31.005.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	43.945.000,00	43.945.000,00	43.945.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			43.945.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	133.900.000,00	133.900.000,00	133.900.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			133.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 0	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			1.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	12 Dokumen	0,00	53.635.000,00	53.635.000,00	53.635.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Diberdayakan**				**-**	**100 %**	**3.029.999.725,00**	**1.836.127.800,00**	**1.836.127.800,00**	**-723.516.675,00**							**2.306.483.050,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen kegiatan advokasi dan kemitraan masyarakt yang tersedia*				-	3 Dokumen	2.829.999.975,00	1.442.104.550,00	1.442.104.550,00	-1.387.895.425,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	ASN,Masyarakat		1.916.198.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	2 Dokumen	0,00	10.359.000,00	10.359.000,00	10.359.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			10.359.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen pelaksanaan UKBM yang tersedia*				3 Dokumen	3 Dokumen	99.999.800,00	336.760.850,00	336.760.850,00	236.761.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		315.284.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 0	0,00	40.950.000,00	40.950.000,00	40.950.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			40.950.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TIAKAR							**210.388.048.641,00**	**216.830.790.014,00**	**238.965.183.516,00**	**28.577.134.875,00**							**211.826.574.866,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**210.388.048.641,00**	**216.830.790.014,00**	**238.965.183.516,00**	**28.577.134.875,00**							**211.826.574.866,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**210.388.048.641,00**	**216.830.790.014,00**	**238.965.183.516,00**	**28.577.134.875,00**							**211.826.574.866,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**91 Indeks**	**91 Indeks**	**174.279.466.416,00**	**179.919.373.772,00**	**187.832.758.774,00**	**-1.395.545.867,00**							**172.883.920.549,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				9 Unit Kerja	9 Unit Kerja	85.171.405.306,00	93.678.026.419,00	101.517.131.646,00	16.345.726.340,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat,ASN		90.875.981.922,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.005.107.000,00	1.033.660.000,00	1.032.893.579,00	27.786.579,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			1.075.660.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi Stunting berdasarkan E PPGBM Jumlah Kematian Ibu**				**100 %**	**2.08 2 % Orang**	**32.853.583.250,00**	**33.900.923.392,00**	**48.121.931.892,00**	**3.312.719.537,00**							**36.166.302.787,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar*				100 %	100 %	21.263.475.950,00	28.534.793.020,00	28.534.793.020,00	7.271.317.070,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		24.546.372.417,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	84 Orang	0,00	19.568.000,00	19.568.000,00	19.568.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			19.568.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	5338 Orang	0,00	21.250.000,00	21.250.000,00	21.250.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			21.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	47 Orang	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			6.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	310 Orang	0,00	8.925.000,00	8.925.000,00	8.925.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			8.925.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	7 Dokumen	0,00	101.295.050,00	101.295.050,00	101.295.050,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			101.295.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	3 Dokumen	0,00	9.180.000,00	9.180.000,00	9.180.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			9.180.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	17.850.000,00	17.850.000,00	17.850.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			17.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	425 Orang	0,00	27.685.600,00	27.685.600,00	27.685.600,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			27.685.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	50.320.000,00	50.320.000,00	50.320.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			50.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	126.575.000,00	126.575.000,00	126.575.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			126.575.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	5 Dokumen	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			1.275.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	12 Dokumen	0,00	70.720.000,00	70.720.000,00	70.720.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			70.720.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Diberdayakan**				**-**	**100 %**	**3.029.999.725,00**	**1.836.127.800,00**	**1.836.127.800,00**	**-723.516.675,00**							**2.306.483.050,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen kegiatan advokasi dan kemitraan masyarakt yang tersedia*				-	3 Dokumen	2.829.999.975,00	1.442.104.550,00	1.442.104.550,00	-1.387.895.425,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	ASN,Masyarakat		1.916.198.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	31.995.450,00	31.995.450,00	31.995.450,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			31.995.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen pelaksanaan UKBM yang tersedia*				3 Dokumen	3 Dokumen	99.999.800,00	336.760.850,00	336.760.850,00	236.761.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		315.284.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	2 Dokumen	0,00	30.669.250,00	30.669.250,00	30.669.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			30.669.250,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS AIR TABIT							**210.388.048.641,00**	**216.830.790.014,00**	**238.965.183.516,00**	**28.577.134.875,00**							**211.826.574.866,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**210.388.048.641,00**	**216.830.790.014,00**	**238.965.183.516,00**	**28.577.134.875,00**							**211.826.574.866,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**210.388.048.641,00**	**216.830.790.014,00**	**238.965.183.516,00**	**28.577.134.875,00**							**211.826.574.866,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**91 Indeks**	**91 Indeks**	**174.279.466.416,00**	**179.919.373.772,00**	**187.832.758.774,00**	**-1.395.545.867,00**							**172.883.920.549,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				9 Unit Kerja	9 Unit Kerja	85.171.405.306,00	93.678.026.419,00	101.517.131.646,00	16.345.726.340,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat,ASN		90.875.981.922,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.140.605.000,00	1.154.605.000,00	1.146.762.087,00	6.157.087,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			1.157.105.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah kematian ibu Prevalensi Stunting berdasarkan E PPGBM**				**100 %**	**2 2.08 Orang %**	**32.853.583.250,00**	**33.900.923.392,00**	**48.121.931.892,00**	**3.312.719.537,00**							**36.166.302.787,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar*				100 %	100 %	21.263.475.950,00	28.534.793.020,00	28.534.793.020,00	7.271.317.070,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		24.546.372.417,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	180 Orang	0,00	15.663.000,00	15.663.000,00	15.663.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			15.663.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	3068 Orang	0,00	31.705.000,00	31.705.000,00	31.705.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			31.705.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	40 Orang	0,00	10.880.000,00	10.880.000,00	10.880.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			10.880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	24 Orang	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			4.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	5 Dokumen	0,00	77.865.000,00	77.865.000,00	77.865.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	3 Dokumen	0,00	8.330.000,00	8.330.000,00	8.330.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			8.330.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	17.814.050,00	17.814.050,00	17.814.050,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			17.814.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	3024 Orang	0,00	19.322.500,00	19.322.500,00	19.322.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			19.322.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	30.685.000,00	30.685.000,00	30.685.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			30.685.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	127.775.500,00	127.775.500,00	127.775.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			127.775.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	4 Dokumen	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			1.020.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	8 Dokumen	0,00	60.265.000,00	60.265.000,00	60.265.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			60.265.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Diberdayakan**				**-**	**100 %**	**3.029.999.725,00**	**1.836.127.800,00**	**1.836.127.800,00**	**-723.516.675,00**							**2.306.483.050,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen kegiatan advokasi dan kemitraan masyarakt yang tersedia*				-	3 Dokumen	2.829.999.975,00	1.442.104.550,00	1.442.104.550,00	-1.387.895.425,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	ASN,Masyarakat		1.916.198.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	23.665.950,00	23.665.950,00	23.665.950,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			23.665.950,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen pelaksanaan UKBM yang tersedia*				3 Dokumen	3 Dokumen	99.999.800,00	336.760.850,00	336.760.850,00	236.761.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		315.284.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	2 0	0,00	32.801.750,00	32.801.750,00	32.801.750,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			32.801.750,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TAROK							**210.388.048.641,00**	**216.830.790.014,00**	**238.965.183.516,00**	**28.577.134.875,00**							**211.826.574.866,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**210.388.048.641,00**	**216.830.790.014,00**	**238.965.183.516,00**	**28.577.134.875,00**							**211.826.574.866,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**210.388.048.641,00**	**216.830.790.014,00**	**238.965.183.516,00**	**28.577.134.875,00**							**211.826.574.866,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**91 Indeks**	**91 Indeks**	**174.279.466.416,00**	**179.919.373.772,00**	**187.832.758.774,00**	**-1.395.545.867,00**							**172.883.920.549,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				9 Unit Kerja	9 Unit Kerja	85.171.405.306,00	93.678.026.419,00	101.517.131.646,00	16.345.726.340,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat,ASN		90.875.981.922,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.432.027.000,00	1.491.027.000,00	1.672.252.908,00	240.225.908,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			1.489.177.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah kematian ibu Prevalensi Stunting berdasarkan E PPGBM**				**100 %**	**2 2.08 Orang %**	**32.853.583.250,00**	**33.900.923.392,00**	**48.121.931.892,00**	**3.312.719.537,00**							**36.166.302.787,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar*				100 %	100 %	21.263.475.950,00	28.534.793.020,00	28.534.793.020,00	7.271.317.070,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		24.546.372.417,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	408 Orang	0,00	21.534.000,00	21.534.000,00	21.534.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			21.534.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	3410 Orang	0,00	26.265.000,00	26.265.000,00	26.265.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			26.265.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	48 Orang	0,00	14.960.000,00	14.960.000,00	14.960.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			14.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	490 Orang	0,00	5.440.000,00	5.440.000,00	5.440.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			5.440.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	68.129.500,00	68.129.500,00	68.129.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			68.129.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	6.120.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			6.120.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	17.340.000,00	17.340.000,00	17.340.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			17.340.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	271 Orang	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			28.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	47.770.000,00	47.770.000,00	47.770.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			47.770.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	131.200.000,00	131.200.000,00	131.200.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			131.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	10 Dokumen	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			1.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	12 Dokumen	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			85.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Diberdayakan**				**-**	**100 %**	**3.029.999.725,00**	**1.836.127.800,00**	**1.836.127.800,00**	**-723.516.675,00**							**2.306.483.050,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen kegiatan advokasi dan kemitraan masyarakt yang tersedia*				-	3 Dokumen	2.829.999.975,00	1.442.104.550,00	1.442.104.550,00	-1.387.895.425,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	ASN,Masyarakat		1.916.198.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	8 Dokumen	0,00	27.376.500,00	27.376.500,00	27.376.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			27.376.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen pelaksanaan UKBM yang tersedia*				3 Dokumen	3 Dokumen	99.999.800,00	336.760.850,00	336.760.850,00	236.761.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		315.284.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	3 Dokumen	0,00	12.933.000,00	12.933.000,00	12.933.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			12.933.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS LAMPASI							**210.388.048.641,00**	**216.830.790.014,00**	**238.965.183.516,00**	**28.577.134.875,00**							**211.826.574.866,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**210.388.048.641,00**	**216.830.790.014,00**	**238.965.183.516,00**	**28.577.134.875,00**							**211.826.574.866,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**210.388.048.641,00**	**216.830.790.014,00**	**238.965.183.516,00**	**28.577.134.875,00**							**211.826.574.866,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**91 Indeks**	**91 Indeks**	**174.279.466.416,00**	**179.919.373.772,00**	**187.832.758.774,00**	**-1.395.545.867,00**							**172.883.920.549,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				9 Unit Kerja	9 Unit Kerja	85.171.405.306,00	93.678.026.419,00	101.517.131.646,00	16.345.726.340,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat,ASN		90.875.981.922,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.310.000.000,00	1.380.000.000,00	1.393.734.845,00	83.734.845,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			1.355.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi Stunting berdasarkan E PPGBM Jumlah kematian ibu**				**100 %**	**2.08 2 % Orang**	**32.853.583.250,00**	**33.900.923.392,00**	**48.121.931.892,00**	**3.312.719.537,00**							**36.166.302.787,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar*				100 %	100 %	21.263.475.950,00	28.534.793.020,00	28.534.793.020,00	7.271.317.070,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		24.546.372.417,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	270 Orang	0,00	26.316.000,00	26.316.000,00	26.316.000,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			26.316.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	3091 Orang	0,00	24.820.000,00	24.820.000,00	24.820.000,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			24.820.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	52 Orang	0,00	26.520.000,00	26.520.000,00	26.520.000,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			26.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	430 Orang	0,00	5.610.000,00	5.610.000,00	5.610.000,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			5.610.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 0	0,00	40.576.100,00	40.576.100,00	40.576.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			40.576.456,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	3 Dokumen	0,00	12.240.000,00	12.240.000,00	12.240.000,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			7.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	10.517.800,00	10.517.800,00	10.517.800,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			11.027.975,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	376 Orang	0,00	20.060.000,00	20.060.000,00	20.060.000,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			20.060.169,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	41.140.000,00	41.140.000,00	41.140.000,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			72.760.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	140.870.850,00	140.870.850,00	140.870.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			127.609.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			1.275.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	12 Dokumen	0,00	75.140.000,00	75.140.000,00	75.140.000,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			47.770.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Diberdayakan**				**-**	**100 %**	**3.029.999.725,00**	**1.836.127.800,00**	**1.836.127.800,00**	**-723.516.675,00**							**2.306.483.050,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen kegiatan advokasi dan kemitraan masyarakt yang tersedia*				-	3 Dokumen	2.829.999.975,00	1.442.104.550,00	1.442.104.550,00	-1.387.895.425,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	ASN,Masyarakat		1.916.198.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	22.347.400,00	22.347.400,00	22.347.400,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			20.909.150,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen pelaksanaan UKBM yang tersedia*				3 Dokumen	3 Dokumen	99.999.800,00	336.760.850,00	336.760.850,00	236.761.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		315.284.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	42.484.500,00	42.484.500,00	42.484.500,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			57.183.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PADANG KARAMBIA							**210.388.048.641,00**	**216.830.790.014,00**	**238.965.183.516,00**	**28.577.134.875,00**							**211.826.574.866,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**210.388.048.641,00**	**216.830.790.014,00**	**238.965.183.516,00**	**28.577.134.875,00**							**211.826.574.866,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**210.388.048.641,00**	**216.830.790.014,00**	**238.965.183.516,00**	**28.577.134.875,00**							**211.826.574.866,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**91 Indeks**	**91 Indeks**	**174.279.466.416,00**	**179.919.373.772,00**	**187.832.758.774,00**	**-1.395.545.867,00**							**172.883.920.549,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				9 Unit Kerja	9 Unit Kerja	85.171.405.306,00	93.678.026.419,00	101.517.131.646,00	16.345.726.340,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat,ASN		90.875.981.922,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	893.622.000,00	928.622.000,00	977.961.917,00	84.339.917,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			878.622.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah kematian ibu Prevalensi Stunting berdasarkan E PPGBM**				**100 %**	**2 2.08 Orang %**	**32.853.583.250,00**	**33.900.923.392,00**	**48.121.931.892,00**	**3.312.719.537,00**							**36.166.302.787,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar*				100 %	100 %	21.263.475.950,00	28.534.793.020,00	28.534.793.020,00	7.271.317.070,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		24.546.372.417,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	270 Orang	0,00	22.245.000,00	22.245.000,00	22.245.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			22.245.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2768 Orang	0,00	20.740.000,00	20.740.000,00	20.740.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Padang Karambia	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			20.740.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	32 Orang	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			7.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	310 Orang	0,00	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			4.590.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	7 Dokumen	0,00	93.733.050,00	93.733.050,00	93.733.050,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			93.733.367,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	3 Dokumen	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			3.060.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	10.949.600,00	10.949.600,00	10.949.600,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			10.949.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	24 Orang	0,00	6.647.000,00	6.647.000,00	6.647.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			6.647.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	15.130.000,00	15.130.000,00	15.130.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			15.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	182.343.250,00	182.343.250,00	182.343.250,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			182.343.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	5 Dokumen	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			1.275.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	12 Dokumen	0,00	55.675.000,00	55.675.000,00	55.675.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			55.675.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**				**-**	**100 %**	**3.029.999.725,00**	**1.836.127.800,00**	**1.836.127.800,00**	**-723.516.675,00**							**2.306.483.050,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen kegiatan advokasi dan kemitraan masyarakt yang tersedia*				-	3 Dokumen	2.829.999.975,00	1.442.104.550,00	1.442.104.550,00	-1.387.895.425,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	ASN,Masyarakat		1.916.198.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	3 Dokumen	0,00	21.065.500,00	21.065.500,00	21.065.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			21.065.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen pelaksanaan UKBM yang tersedia*				3 Dokumen	3 Dokumen	99.999.800,00	336.760.850,00	336.760.850,00	236.761.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		315.284.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	3 Dokumen	0,00	24.298.750,00	24.298.750,00	24.298.750,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			24.298.750,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD INSTALASI FARMASI							**210.388.048.641,00**	**216.830.790.014,00**	**238.965.183.516,00**	**28.577.134.875,00**							**211.826.574.866,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**210.388.048.641,00**	**216.830.790.014,00**	**238.965.183.516,00**	**28.577.134.875,00**							**211.826.574.866,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**210.388.048.641,00**	**216.830.790.014,00**	**238.965.183.516,00**	**28.577.134.875,00**							**211.826.574.866,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi Stunting berdasarkan E PPGBM Jumlah kematian ibu**				**16.48 41.00 % Per 100.000 kelahira**	**2.08 2 % Orang**	**32.853.583.250,00**	**33.900.923.392,00**	**48.121.931.892,00**	**3.312.719.537,00**							**36.166.302.787,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana, prasarana, alat kesehatan dan penunjang fasilitas kesehatan yang disedikan sesuai standar*				8 Unit Kerja	8 Unit Kerja	11.480.108.350,00	5.205.418.722,00	19.426.427.222,00	7.946.318.872,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		11.353.980.370,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	2 Paket	5.000.108.750,00	2.169.864.322,00	2.169.864.322,00	-2.830.244.428,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			3.035.607.370,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	62.083.000,00	62.083.000,00	-37.917.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			85.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**36.414.788.613,00**	**43.689.412.779,00**	**97.777.255.164,00**	**61.362.466.551,00**							**74.762.529.500,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**36.278.000.613,00**	**43.592.018.779,00**	**97.679.861.164,00**	**61.401.860.551,00**							**74.612.529.500,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**36.278.000.613,00**	**43.592.018.779,00**	**97.679.861.164,00**	**61.401.860.551,00**							**74.612.529.500,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**94,10 Nilai**	**94,10 Nilai**	**14.319.063.516,70**	**15.581.506.275,00**	**15.587.339.591,00**	**3.510.345.983,30**							**17.829.409.500,00**	
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**14.319.063.516,70**	**15.581.506.275,00**	**15.587.339.591,00**	-	-	-	-	-	-	-	**17.829.409.500,00**	-
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penggganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	331.852.150,00	250.612.325,00	250.612.325,00	-81.239.825,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas PUPR		452.599.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				16 Dokumen	19 Dokumen	70.906.850,00	37.910.350,00	37.910.350,00	-32.996.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			74.229.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				46 Laporan	54 Laporan	248.351.400,00	206.059.225,00	206.059.225,00	-42.292.175,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			366.370.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**14.319.063.516,70**	**15.581.506.275,00**	**15.587.339.591,00**	-	-	-	-	-	-	-	**17.829.409.500,00**	-
	1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				6 Dokumen	1 Dokumen	4.540.750,00	2.206.500,00	2.206.500,00	-2.334.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				11 Data	1 Data	8.053.150,00	4.436.250,00	4.436.250,00	-3.616.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**14.319.063.516,70**	**15.581.506.275,00**	**15.587.339.591,00**	-	-	-	-	-	-	-	**17.829.409.500,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	8.681.926.650,70	8.429.542.983,00	8.429.542.983,00	-252.383.667,70			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas PUPR		9.865.223.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				980 Orang/ bulan	980 Orang/ bulan	7.858.086.650,70	7.605.752.983,00	7.605.752.983,00	-252.333.667,70	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			9.203.723.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	823.840.000,00	823.790.000,00	823.790.000,00	-50.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			661.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	94.764.300,00	0,00	0,00	-94.764.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas PUPR		99.897.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	0 Paket	94.764.300,00	0,00	0,00	-94.764.300,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Tiakar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			99.897.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks layanan administrasi perangkat daerah*				75 %	93,00 %	587.597.350,00	476.228.700,00	476.228.700,00	-111.368.650,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas PUPR		1.055.680.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	113.191.450,00	74.208.450,00	74.208.450,00	-38.983.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			131.460.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	31.899.800,00	12.784.400,00	12.784.400,00	-19.115.400,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			42.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	15.499.000,00	15.840.000,00	15.840.000,00	341.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			16.275.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	19.992.750,00	7.992.500,00	7.992.500,00	-12.000.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			20.995.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	75 Laporan	399.989.000,00	358.378.000,00	358.378.000,00	-41.611.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			838.950.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**14.319.063.516,70**	**15.581.506.275,00**	**15.587.339.591,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**17.829.409.500,00**	-
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	7.025.350,00	7.025.350,00	7.025.350,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**14.319.063.516,70**	**15.581.506.275,00**	**15.587.339.591,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**17.829.409.500,00**	-
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan BMD*				80 %	88,34 %	95.931.650,00	162.778.000,00	162.778.000,00	66.846.350,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas PUPR		380.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Tiakar	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	19.836.250,00	101.418.000,00	101.418.000,00	81.581.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah*				80 %	100 %	3.312.321.466,00	5.049.775.283,00	5.053.108.603,00	1.740.787.137,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas PUPR		4.657.510.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.794.453.210,00	4.531.991.447,00	4.531.991.447,00	1.737.538.237,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			4.268.775.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	517.868.256,00	517.783.836,00	521.117.156,00	3.248.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			388.735.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*				80 %	88,73 %	1.214.669.950,00	1.212.568.984,00	1.215.068.980,00	399.030,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas PUPR		1.318.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			49.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				68 Unit	68 Unit	569.460.000,00	569.460.000,00	569.460.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			627.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	71.874.000,00	141.751.500,00	141.751.500,00	69.877.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			78.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				63 Unit	63 Unit	47.960.000,00	47.960.000,00	47.960.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			53.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Kapasitas Air Baku Persentase Sungai yang Berfungsi Baik Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik**				**70,90 75,33 77,98 % % %**	**6,67 77,98 75,33 m3/detik % %**	**6.716.049.100,00**	**8.864.992.590,00**	**18.149.364.200,00**	**6.731.825.900,00**							**13.447.875.000,00**	
		[Persentase Sungai yang Berfungsi Baik, Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik, Persentase Debit Air baku yang Dimanfaatkan]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**6.716.049.100,00**	**8.864.992.590,00**	**18.149.364.200,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**13.447.875.000,00**	-
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penataan Sungai*				27,95 %	27,95 %	2.180.888.700,00	4.246.049.940,00	7.561.623.655,00	5.380.734.955,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Payakumbuh		4.777.445.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				20.50 KM	20.50 KM	1.461.513.200,00	1.418.033.620,00	1.653.039.835,00	191.526.635,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			1.550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**6.716.049.100,00**	**8.864.992.590,00**	**18.149.364.200,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**13.447.875.000,00**	-
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan				0,15 KM	0,15 KM	719.375.500,00	2.828.016.320,00	5.908.583.820,00	5.189.208.320,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA DAU	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			3.227.445.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		[Persentase Sungai yang Berfungsi Baik, Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik, Persentase Debit Air baku yang Dimanfaatkan]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**6.716.049.100,00**	**8.864.992.590,00**	**18.149.364.200,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**13.447.875.000,00**	-
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Jaringan Irigasi dengan Kondisi Baik Persentase Kelompok P3A/GP3A yang Aktif*				84,00 % 85,00 %	84,00 % 85,00 %	4.535.160.400,00	4.618.942.650,00	10.587.740.545,00	6.052.580.145,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Payakumbuh		8.670.430.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0,5 KM	0,678 KM	1.104.402.500,00	863.418.250,00	863.418.250,00	-240.984.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			1.455.430.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				2 KM	1,181 KM	1.429.837.750,00	1.833.574.750,00	7.098.825.070,00	5.668.987.320,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA DAU	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			4.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				10 KM	116 KM	1.736.431.000,00	1.695.523.850,00	1.835.940.425,00	99.509.425,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			1.765.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0053	Rehabilitasi Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				2 UNIT	1 UNIT	264.489.150,00	226.425.800,00	789.556.800,00	525.067.650,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Pelayanan Air Minum**				**100 %**	**100 %**	**174.923.750,00**	**234.031.300,00**	**234.031.300,00**	**8.726.250,00**							**183.650.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**174.923.750,00**	**234.031.300,00**	**234.031.300,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**183.650.000,00**	-
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Akses rumah tangga terhadap air minum jaringan perpipaan*				90,61 %	90,61 %	174.923.750,00	234.031.300,00	234.031.300,00	59.107.550,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Payakumbuh		183.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				50 SR	50 SR	174.923.750,00	234.031.300,00	234.031.300,00	59.107.550,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			183.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Presentase sampah yang dikelola TPA/TPST/TPS3R**				**30,93 %**	**17,97 %**	**551.000.000,00**	**1.143.900,00**	**361.933.300,00**	**2.525.750.000,00**							**3.076.750.000,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Prasarana Pengolahan Sampah*				32,50 %	18,61 %	551.000.000,00	1.143.900,00	361.933.300,00	-189.066.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Payakumbuh		3.076.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi				1 Unit	0 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Tiakar	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			876.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		[Presentase Ketersedian Prasarana Pengolahan Persampahan]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**551.000.000,00**	**1.143.900,00**	**361.933.300,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**3.076.750.000,00**	-
	1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun				1 Ton/hari	1 Ton/hari	550.000.000,00	1.143.900,00	361.933.300,00	-188.066.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman**				**-**	**22,31 Per**	**315.300,00**	**315.300,00**	**315.300,00**	**-315.300,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**315.300,00**	**315.300,00**	**315.300,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah akses aman*				-	23,57 persen	315.300,00	315.300,00	315.300,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Payakumbuh		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja																		
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				1 Rumah Tangga	1 Rumah Tangga	105.100,00	105.100,00	105.100,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	105.100,00	105.100,00	105.100,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.				1 Rumah Tangga	1 Rumah Tangga	105.100,00	105.100,00	105.100,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Sistem Drainase Skala Kota**				**71,99 %**	**70,99 %**	**4.816.169.748,30**	**6.711.944.698,00**	**13.882.801.608,00**	**1.903.065.251,70**							**6.719.235.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Drainase dalam kondisi baik*				68.44 %	75,64 %	4.816.169.748,30	6.711.944.698,00	13.882.801.608,00	9.066.631.859,70			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Payakumbuh		6.719.235.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				5 Sistem Drainase Perkotaan	5 Sistem Drainase Perkotaan	1.073.999.303,30	1.786.848.174,00	5.513.452.774,00	4.439.453.470,70	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			1.169.235.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		[Persentase Jalan Kota yang Memiliki Drainase]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**4.816.169.748,30**	**6.711.944.698,00**	**13.882.801.608,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**6.719.235.000,00**	-
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				5 Sistem Drainase Perkotaan	5 Sistem Drainase Perkotaan	2.442.051.645,00	3.577.038.464,00	7.021.290.774,00	4.579.239.129,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			4.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**4.816.169.748,30**	**6.711.944.698,00**	**13.882.801.608,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**6.719.235.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Tiakar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		[Persentase Jalan Kota yang Memiliki Drainase]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**4.816.169.748,30**	**6.711.944.698,00**	**13.882.801.608,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**6.719.235.000,00**	-
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				5 Sistem Drainase Perkotaan	5 Sistem Drainase Perkotaan	1.299.118.800,00	1.348.058.060,00	1.348.058.060,00	48.939.260,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			1.350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase bangunan gedung dalam Kondisi Baik**				**35,68 %**	**35,68 %**	**758.481.175,00**	**204.236.538,00**	**6.421.434.728,00**	**14.728.928.825,00**							**15.487.410.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**758.481.175,00**	**204.236.538,00**	**6.421.434.728,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**15.487.410.000,00**	-
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Persentase bangunan gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik* *Rasio Kepatuhan PBG Kabupaten/ Kota*				35,68 % 85,04 %	35,68 % 85,40 %	758.481.175,00	204.236.538,00	6.421.434.728,00	5.662.953.553,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Payakumbuh		15.487.410.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	500.532.400,00	532.400,00	6.114.615.620,00	5.614.083.220,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		[Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Representatif, Presentase Pelaksanaan Pembangunan sarana Ibadah Skala Kota, Peresentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**758.481.175,00**	**204.236.538,00**	**6.421.434.728,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**15.487.410.000,00**	-
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				320 Dokumen	320 Dokumen	257.948.775,00	203.704.138,00	306.819.108,00	48.870.333,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			487.410.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Penataan bangunan dan Lingkungan**				**48,27 %**	**48,27 %**	**2.016.900.000,00**	**2.709.420.450,00**	**6.195.290.850,00**	**270.800.000,00**							**2.287.700.000,00**	
		[Persentase dokumen penataan kawasan yang ditata]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.016.900.000,00**	**2.709.420.450,00**	**6.195.290.850,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**2.287.700.000,00**	-
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kawasan Strategis yang ditata*				14,29 %	14,29 %	2.016.900.000,00	2.709.420.450,00	6.195.290.850,00	4.178.390.850,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Payakumbuh		2.287.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan				5 Kawasan	5 Kawasan	2.016.900.000,00	2.709.420.450,00	6.195.290.850,00	4.178.390.850,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			2.287.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota**				**83,60 %**	**82,80 %**	**5.728.409.238,00**	**8.653.793.796,00**	**36.216.716.355,00**	**8.752.090.762,00**							**14.480.500.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**5.728.409.238,00**	**8.653.793.796,00**	**36.216.716.355,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**14.480.500.000,00**	-
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Jalan Kota Memenuhi Standar Fungsi dan Kelas* *Persentase Jalan yang Dilayani Penerangan Jalan Umum (PJU)* *Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar* *Persentase Ketersediaan Jalan Kota sesuai kebutuhan* *Persentase Panjang jalan yang dipelihara*				31,29 % 51,40 % 53,33 % 7,08 % 98,48 %	26,58 % 51,60 % 53,83 % 7,16 % 99,46 %	5.728.409.238,00	8.653.793.796,00	36.216.716.355,00	30.488.307.117,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Payakumbuh		14.480.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		[Persentase Jalan Kota Memenuhi Standar Konstruksi dan Fungsi]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**5.728.409.238,00**	**8.653.793.796,00**	**36.216.716.355,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**14.480.500.000,00**	-
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				295,38 KM	295,38 KM	100.277.000,00	100.277.000,00	100.277.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			132.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				10 KM	12,7 KM	1.382.721.490,00	1.289.564.580,00	1.296.696.619,00	-86.024.871,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			1.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				0,14 KM	0,14 KM	1.009.013.600,00	2.050.129.000,00	6.928.108.000,00	5.919.094.400,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0,7 KM	0,215 KM	499.999.900,00	587.506.750,00	587.506.750,00	87.506.850,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				1 KM	1 KM	1.000.000,00	0,00	7.561.379.640,00	7.560.379.640,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				1 KM	1 KM	1.360.742.648,00	1.604.643.316,00	6.195.412.876,00	4.834.670.228,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			3.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**5.728.409.238,00**	**8.653.793.796,00**	**36.216.716.355,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**14.480.500.000,00**	-
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				4 Jembatan	4 Jembatan	110.000.000,00	108.417.200,00	108.417.200,00	-1.582.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		[Persentase Jalan Kota Memenuhi Standar Konstruksi dan Fungsi]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**5.728.409.238,00**	**8.653.793.796,00**	**36.216.716.355,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**14.480.500.000,00**	-
	1.03.10.2.01.0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar																		
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				0,55 KM	1,07 KM	1.262.654.600,00	2.457.462.450,00	12.834.250.770,00	11.571.596.170,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan																		
			Panjang jembatan yang dibangun				4 Meter	9,5 Meter	1.000.000,00	455.793.500,00	604.667.500,00	603.667.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			1.538.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Kualitas Pengelolaan Jasa Konstruksi**				**94,20 %**	**94,20 %**	**348.355.025,00**	**215.389.944,00**	**215.389.944,00**	**151.644.975,00**							**500.000.000,00**	
		[Persentase Pekerjaan Jasa Konstruksi Berkinerja Baik]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**348.355.025,00**	**215.389.944,00**	**215.389.944,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**500.000.000,00**	-
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi*				0.78 Indeks	0,78 Indeks	211.164.525,00	163.988.550,00	163.988.550,00	-47.175.975,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Payakumbuh		270.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				100 Orang	100 Orang	85.066.000,00	107.060.550,00	107.060.550,00	21.994.550,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				30 Lembaga	30 Lembaga	126.098.525,00	56.928.000,00	56.928.000,00	-69.170.525,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Ketersediaan Dokumen Standar Konstruksi*				100 %	100 %	78.937.750,00	37.911.394,00	37.911.394,00	-41.026.356,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Payakumbuh		125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	78.937.750,00	37.911.394,00	37.911.394,00	-41.026.356,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**348.355.025,00**	**215.389.944,00**	**215.389.944,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**500.000.000,00**	-
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Persentase Pekerjaan Jasa Konstruksi Berkinerja Baik Rasio proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasan tanpa Kecelakaan Konstruksi*				88,00 % 91,60 %	88,00 % 91,60 %	58.252.750,00	13.490.000,00	13.490.000,00	-44.762.750,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Payakumbuh		105.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				18 Badan Usaha	18 Badan Usaha	58.252.750,00	13.490.000,00	13.490.000,00	-44.762.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			105.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**				**74,65 %**	**74,65 %**	**848.333.760,00**	**415.243.988,00**	**415.243.988,00**	**-248.333.760,00**							**600.000.000,00**	
		[Persentase Kepatuhan Pelaku Pembangunan sesuai Rencana Tata Ruang]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**848.333.760,00**	**415.243.988,00**	**415.243.988,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**600.000.000,00**	-
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Persentase Dokumen Regulasi Tata Ruang yang Ditetapkan*				75 %	75,00 %	72.216.850,00	42.525.000,00	42.525.000,00	-29.691.850,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Payakumbuh		85.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang																		
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				2 Laporan	2 Laporan	72.216.850,00	42.525.000,00	42.525.000,00	-29.691.850,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			85.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**848.333.760,00**	**415.243.988,00**	**415.243.988,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**600.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang*				67,75 %	71,50 %	455.279.900,00	133.251.000,00	133.251.000,00	-322.028.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Payakumbuh		240.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				400 Layanan	400 Layanan	180.788.750,00	121.981.750,00	121.981.750,00	-58.807.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		[Persentase Kepatuhan Pelaku Pembangunan sesuai Rencana Tata Ruang]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**848.333.760,00**	**415.243.988,00**	**415.243.988,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**600.000.000,00**	-
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	274.491.150,00	11.269.250,00	11.269.250,00	-263.221.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			140.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pelanggaran Tata Ruang yang Ditangani*				93,00 %	93,00 %	320.837.010,00	239.467.988,00	239.467.988,00	-81.369.022,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Payakumbuh		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR																		
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif				300 Kasus	300 Kasus	204.534.610,00	131.523.588,00	131.523.588,00	-73.011.022,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			225.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK																		
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				500 Dokumen	500 Dokumen	116.302.400,00	107.944.400,00	107.944.400,00	-8.358.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**136.788.000,00**	**97.394.000,00**	**97.394.000,00**	**-39.394.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**136.788.000,00**	**97.394.000,00**	**97.394.000,00**	**-39.394.000,00**							**150.000.000,00**	
1.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum**				**100 %**	**100 %**	**136.788.000,00**	**97.394.000,00**	**97.394.000,00**	**13.212.000,00**							**150.000.000,00**	
		[Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**136.788.000,00**	**97.394.000,00**	**97.394.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**150.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Sertifikasi Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota*				70,30 %	70,30 %	136.788.000,00	97.394.000,00	97.394.000,00	-39.394.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	ASN Dinas PUPR		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	136.788.000,00	97.394.000,00	97.394.000,00	-39.394.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		UPTD ALAT BERAT							**36.414.788.613,00**	**43.689.412.779,00**	**97.777.255.164,00**	**61.362.466.551,00**							**74.762.529.500,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**36.278.000.613,00**	**43.592.018.779,00**	**97.679.861.164,00**	**61.401.860.551,00**							**74.612.529.500,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**36.278.000.613,00**	**43.592.018.779,00**	**97.679.861.164,00**	**61.401.860.551,00**							**74.612.529.500,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**94,10 Nilai**	**94,10 Nilai**	**14.319.063.516,70**	**15.581.506.275,00**	**15.587.339.591,00**	**3.510.345.983,30**							**17.829.409.500,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**14.319.063.516,70**	**15.581.506.275,00**	**15.587.339.591,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**17.829.409.500,00**	-
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Alat Berat/ Alat Besar/ Alat Perbengkelan Sesuai Kebutuhan Persentase ketersediaan BMD*				80 %	81,25 % 88,34 %	95.931.650,00	162.778.000,00	162.778.000,00	66.846.350,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat Kota Payakumbuh		380.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	995.550,00	0,00	0,00	-995.550,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Tiakar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Alat Berat/ Alat Besar Kondisi Baik Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*				80 %	88,73 % 92,31 %	1.214.669.950,00	1.212.568.984,00	1.215.068.980,00	399.030,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat Kota Payakumbuh		1.318.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				10 Unit	6 Unit	271.186.230,00	234.262.364,00	236.762.360,00	-34.423.870,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			285.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		UPTD LABORATORIUM KONSTRUKSI							**36.414.788.613,00**	**43.689.412.779,00**	**97.777.255.164,00**	**61.362.466.551,00**							**74.762.529.500,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**36.278.000.613,00**	**43.592.018.779,00**	**97.679.861.164,00**	**61.401.860.551,00**							**74.612.529.500,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**36.278.000.613,00**	**43.592.018.779,00**	**97.679.861.164,00**	**61.401.860.551,00**							**74.612.529.500,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**94,10 Nilai**	**94,10 Nilai**	**14.319.063.516,70**	**15.581.506.275,00**	**15.587.339.591,00**	**3.510.345.983,30**							**17.829.409.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan BMD* *Persentase Pemenuhan Layanan laboratorium Konstruksi yang Dilaksanakan*				80 %	74,29 % 88,34 %	95.931.650,00	162.778.000,00	162.778.000,00	66.846.350,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat Kota Payakumbuh		380.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	74.999.850,00	61.360.000,00	61.360.000,00	-13.639.850,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Alat Laboratorium Konstruksi Kondisi Baik* *Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*				80 %	88,73 % 95,92 %	1.214.669.950,00	1.212.568.984,00	1.215.068.980,00	399.030,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat Kota Payakumbuh		1.318.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	23 Unit	214.999.720,00	179.945.120,00	179.945.120,00	-35.054.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			225.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							**9.618.304.015,00**	**8.140.915.473,00**	**11.956.526.611,00**	**2.338.222.596,00**							**15.763.328.370,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.618.304.015,00**	**8.140.915.473,00**	**11.956.526.611,00**	**2.338.222.596,00**							**15.763.328.370,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.760.883.240,00**	**1.760.883.240,00**	**1.764.580.760,00**	**3.697.520,00**							**4.442.154.190,00**	
1.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Pengolahan Air Limbah Akses Aman**				**26,84 23,29 % %**	**23,57 %**	**1.760.883.240,00**	**1.760.883.240,00**	**1.764.580.760,00**	**2.681.270.950,00**							**4.442.154.190,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Rumah yang Memenuhi pengolahan air limbah akses aman*				30,11 %	30,11 %	1.760.883.240,00	1.760.883.240,00	1.764.580.760,00	3.697.520,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	masyarakat		4.442.154.190,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja																		
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				1000 Rumah Tangga	1000 Rumah Tangga	499.972.740,00	499.972.740,00	503.670.260,00	3.697.520,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			580.152.090,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	83.910.900,00	83.910.900,00	83.910.900,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			67.002.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.				100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	1.176.999.600,00	1.176.999.600,00	1.176.999.600,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			3.795.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**7.857.420.775,00**	**6.380.032.233,00**	**10.191.945.851,00**	**2.334.525.076,00**							**11.321.174.180,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**87 indeks**	**87 indeks**	**4.710.867.890,00**	**4.810.642.323,00**	**4.832.466.381,00**	**399.467.526,00**							**5.110.335.416,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penggganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	32.874.350,00	32.874.350,00	39.651.350,00	6.777.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	OPD		47.474.145,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	14.498.900,00	14.498.900,00	17.533.900,00	3.035.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			22.892.430,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	15.396.950,00	15.396.950,00	19.138.950,00	3.742.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			20.581.715,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.489.250,00	1.489.250,00	1.489.250,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			2.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	1.489.250,00	1.489.250,00	1.489.250,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			2.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	3.773.095.488,00	4.005.515.585,00	3.965.755.585,00	192.660.097,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	ASN		3.727.570.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	3.459.214.688,00	3.691.615.585,00	3.691.615.585,00	232.400.897,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			3.507.570.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	313.880.800,00	313.900.000,00	274.140.000,00	-39.740.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	0 %	34.350.200,00	0,00	0,00	-34.350.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	ASN		38.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				35 Paket	0 Paket	34.350.200,00	0,00	0,00	-34.350.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			38.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks layanan administrasi perangkat daerah*				75 %	75 %	262.660.635,00	210.689.135,00	219.892.235,00	-42.768.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	ASN		521.241.085,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.746.450,00	6.746.450,00	9.113.300,00	2.366.850,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			9.892.300,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.825.885,00	29.973.385,00	36.792.835,00	8.966.950,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			57.200.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.577.150,00	16.577.150,00	16.593.950,00	16.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			26.804.910,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.015.000,00	4.015.000,00	4.015.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			5.540.700,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	5.982.900,00	5.982.900,00	5.982.900,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			6.595.875,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.024.000,00	145.905.000,00	145.905.000,00	-54.119.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			413.207.300,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.489.250,00	1.489.250,00	1.489.250,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			2.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah*				80 %	80 %	141.153.217,00	141.153.253,00	149.647.211,00	8.493.994,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	OPD		200.613.186,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	54.636.937,00	54.636.937,00	55.681.715,00	1.044.778,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			60.613.186,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	86.516.280,00	86.516.316,00	93.965.496,00	7.449.216,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			140.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*				80 %	80 %	466.734.000,00	420.410.000,00	457.520.000,00	-9.214.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	OPD		574.937.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			47.245.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	27 Unit	364.700.000,00	364.700.000,00	401.810.000,00	37.110.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			406.010.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	16.520.000,00	16.520.000,00	16.520.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			22.682.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	46.324.000,00	0,00	0,00	-46.324.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			99.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kota**				**100 %**	**100 %**	**472.621.325,00**	**288.298.975,00**	**278.044.175,00**	**272.183.687,00**							**744.805.012,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Ketersediaan Data dan Regulasi terkait SPM Perumahan*				100 %	100 %	153.783.100,00	90.071.650,00	67.950.400,00	-85.832.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	masyarakat		389.314.557,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.101.200,00	2.599.550,00	2.599.550,00	-4.501.650,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			24.342.890,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	1 Dokumen	21.692.950,00	2.594.900,00	2.594.900,00	-19.098.050,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			24.181.520,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana																		
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	1 Dokumen	19.110.650,00	5.405.650,00	4.399.400,00	-14.711.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			21.345.300,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	28.715.200,00	28.714.650,00	34.887.150,00	6.171.950,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			27.091.625,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	40.780.800,00	27.569.150,00	10.794.150,00	-29.986.650,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			191.652.842,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	36.382.300,00	23.187.750,00	12.675.250,00	-23.707.050,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			100.700.380,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Meningkatya Pemahaman Terhadap Regulasi Terkait SPM Perumahan*				60,68 %	60,68 %	68.658.775,00	76.213.375,00	90.166.325,00	21.507.550,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	masyarakat		95.532.720,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																		
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	28.527.875,00	43.339.125,00	43.279.975,00	14.752.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			40.849.270,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan																		
			Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.653.075,00	5.753.075,00	4.746.825,00	-13.906.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			24.618.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				300 Orang	300 Orang	21.477.825,00	27.121.175,00	42.139.525,00	20.661.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			30.065.450,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Persentase Rumah Tidak Layak Huni korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang ditingkatkan Kualitasnya*				100 %	100 %	203.197.200,00	103.547.200,00	103.547.200,00	-99.650.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	masyarakat		223.812.435,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	203.197.200,00	103.547.200,00	103.547.200,00	-99.650.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			223.812.435,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*jumlah dokumen serah terima rumah kepada korban bencana kabupaten/kota yang terkena relokasi program kabupaten/kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	35.355.600,00	6.840.100,00	4.827.600,00	-30.528.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	masyarakat		22.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.04.0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	35.355.600,00	6.840.100,00	4.827.600,00	-30.528.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			22.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Rumah Swadaya*				86,54 %	86,54 %	11.626.650,00	11.626.650,00	11.552.650,00	-74.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	masyarakat		14.145.300,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	11.626.650,00	11.626.650,00	11.552.650,00	-74.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			14.145.300,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Peningkatan RTLH Untuk Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (sepuluh) Ha**				**100 97,80 % %**	**100 %**	**2.551.114.800,00**	**1.211.571.675,00**	**5.019.687.975,00**	**2.786.225.700,00**							**5.337.340.500,00**	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditingkatkan Kualitasnya*				13,02 %	86,54 %	2.551.114.800,00	1.211.571.675,00	5.019.687.975,00	2.468.573.175,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	masyarakat		5.337.340.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				100 Unit Rumah	100 Unit Rumah	2.518.540.125,00	1.173.617.225,00	4.981.733.525,00	2.463.193.400,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			5.300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU																		
			Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				1 Dokumen	1 Dokumen	32.574.675,00	37.954.450,00	37.954.450,00	5.379.775,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			37.340.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase PSU Perumahan Yang Dibagun Pengembang Yang Telah Dikelola Oleh Pemerintah Kota**				**27,58 %**	**27,59 %**	**122.816.760,00**	**69.519.260,00**	**61.747.320,00**	**5.876.492,00**							**128.693.252,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Jumlah dokumen persyaratan serah terima PSU yang selesai diverifikasi sesuai tahapan*				5 lokasi	5 lokasi	122.816.760,00	69.519.260,00	61.747.320,00	-61.069.440,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	opd dan developer		128.693.252,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	1 Laporan	122.816.760,00	69.519.260,00	61.747.320,00	-61.069.440,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			128.693.252,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							**13.701.264.452,00**	**13.987.983.069,00**	**18.438.945.779,00**	**4.737.681.327,00**							**17.018.795.125,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**13.701.264.452,00**	**13.987.983.069,00**	**18.438.945.779,00**	**4.737.681.327,00**							**17.018.795.125,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**13.701.264.452,00**	**13.987.983.069,00**	**18.438.945.779,00**	**4.737.681.327,00**							**17.018.795.125,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**91 Indeks**	**91 Indeks**	**6.520.599.992,00**	**8.069.366.049,00**	**8.075.660.849,00**	**1.616.195.133,00**							**8.136.795.125,00**	
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**Nilai IKM**	**90**	**90**	**90**	-	-	**6.520.599.992,00**	**8.069.366.049,00**	**8.075.660.849,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**8.136.795.125,00**	-
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	77.862.600,00	80.588.200,00	75.076.400,00	-2.786.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Aparatur		87.550.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	9.545.150,00	12.319.950,00	12.319.950,00	2.774.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			10.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	65.499.950,00	65.450.750,00	59.938.950,00	-5.561.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			72.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**6.520.599.992,00**	**8.069.366.049,00**	**8.075.660.849,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**8.136.795.125,00**	-
	1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.408.750,00	1.408.750,00	1.408.750,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				100 Data	100 Data	1.408.750,00	1.408.750,00	1.408.750,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**Nilai IKM**	**90**	**90**	**90**	-	-	**6.520.599.992,00**	**8.069.366.049,00**	**8.075.660.849,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**8.136.795.125,00**	-
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	5.759.313.529,00	7.024.922.553,00	6.870.232.553,00	1.110.919.024,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Aparatur		6.966.945.125,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	74 Orang/bulan	5.408.599.929,00	6.676.968.953,00	6.676.968.953,00	1.268.369.024,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Tigo Koto Diate	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			6.615.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	344.400.000,00	341.640.000,00	186.950.000,00	-157.450.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			345.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	14 Laporan	6.313.600,00	6.313.600,00	6.313.600,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Tigo Koto Diate	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			6.945.125,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks layanan administrasi perangkat daerah*				75 %	75 %	117.857.250,00	171.230.350,00	333.654.950,00	215.797.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Aparatur		249.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.647.650,00	1.647.650,00	8.247.650,00	6.600.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	29.579.500,00	29.554.150,00	185.378.750,00	155.799.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			38.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.081.150,00	3.775.600,00	3.775.600,00	1.694.450,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			3.850.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.058.200,00	3.058.200,00	3.058.200,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			4.950.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	80.082.000,00	131.786.000,00	131.786.000,00	51.704.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			185.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**6.520.599.992,00**	**8.069.366.049,00**	**8.075.660.849,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**8.136.795.125,00**	-
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	1 Dokumen	1.408.750,00	1.408.750,00	1.408.750,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**Nilai IKM**	**90**	**90**	**90**	-	-	**6.520.599.992,00**	**8.069.366.049,00**	**8.075.660.849,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**8.136.795.125,00**	-
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah*				80 %	80 %	104.546.613,00	256.554.946,00	260.626.946,00	156.080.333,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Aparatur		272.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			4.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14.996.613,00	16.914.250,00	16.914.250,00	1.917.637,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			18.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	86.100.000,00	236.190.696,00	240.262.696,00	154.162.696,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*				80 %	80 %	461.020.000,00	536.070.000,00	536.070.000,00	75.050.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Aparatur		560.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	25 Unit	413.670.000,00	486.610.000,00	486.610.000,00	72.940.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	8.160.000,00	10.270.000,00	10.270.000,00	2.110.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat, Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetisinya Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan, Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas**				**100,100 80,100 % %**	**80,100 100,100 % %**	**3.552.927.585,00**	**3.755.767.570,00**	**3.778.755.490,00**	**1.395.572.415,00**							**4.948.500.000,00**	
		[Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan]	**Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas** **Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**3.552.927.585,00**	**3.755.767.570,00**	**3.778.755.490,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**4.948.500.000,00**	-
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelanggaran perda yang ditindaklanjuti*				100 %	100 %	3.026.850.060,00	3.039.023.598,00	3.059.863.598,00	33.013.538,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat		3.760.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan *dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	36.003.000,00	97.708.000,00	97.708.000,00	61.705.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas																		
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				122 Orang	94 Orang	38.312.250,00	19.720.000,00	19.720.000,00	-18.592.250,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Tigo Koto Diate	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			85.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				12 laporan	12 laporan	2.952.534.810,00	2.921.595.598,00	2.942.435.598,00	-10.099.212,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			3.600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Persentase masyarakat yg memahami perda pekat*				80 %	80 %	526.077.525,00	716.743.972,00	718.891.892,00	192.814.367,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat		1.188.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2 Laporan	1 Laporan	21.246.750,00	6.481.750,00	6.481.750,00	-14.765.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Tigo Koto Diate	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			38.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	12 Laporan	504.830.775,00	710.262.222,00	712.410.142,00	207.579.367,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran**				**100 60 % %**	**100 60 % %**	**3.627.736.875,00**	**2.162.849.450,00**	**6.584.529.440,00**	**305.763.125,00**							**3.933.500.000,00**	
		[1. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 2. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran]	**Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**100**	**100**	**100**	-	-	**3.627.736.875,00**	**2.162.849.450,00**	**6.584.529.440,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**3.933.500.000,00**	-
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kasus kebakaran WMK yang tertangani dalam waktu tanggap*				100 %	100 %	3.458.916.075,00	2.056.952.325,00	6.478.632.315,00	3.019.716.240,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat		3.673.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	1 Dokumen	20.376.750,00	20.376.750,00	20.376.750,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			23.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	1.307.110.225,00	1.339.869.375,00	1.393.296.265,00	86.186.040,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				5 Unit	347 Unit	2.131.429.100,00	696.706.200,00	5.064.959.300,00	2.933.530.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			2.200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	*Persentase Investigasi kejadian kebakaran yang dilaksanakan*				100 %	100 %	16.059.650,00	16.059.650,00	16.059.650,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				1 Dokumen	1 Dokumen	16.059.650,00	16.059.650,00	16.059.650,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Persentase relawan yang bersetifikat*				100 %	100 %	110.677.850,00	23.754.475,00	23.754.475,00	-86.923.375,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat		150.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				94 Orang	94 Orang	110.677.850,00	23.754.475,00	23.754.475,00	-86.923.375,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			150.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	*Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang Dilaksanakan*				100 %	100 %	42.083.300,00	66.083.000,00	66.083.000,00	23.999.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat		85.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				12 Laporan	12 Laporan	42.083.300,00	66.083.000,00	66.083.000,00	23.999.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			85.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**4.893.272.180,00**	**5.043.354.531,00**	**5.995.375.495,00**	**1.102.103.315,00**							**5.064.167.199,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.893.272.180,00**	**5.043.354.531,00**	**5.995.375.495,00**	**1.102.103.315,00**							**5.064.167.199,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**4.893.272.180,00**	**5.043.354.531,00**	**5.995.375.495,00**	**1.102.103.315,00**							**5.064.167.199,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**93 indeks**	**93 indeks**	**4.619.629.630,00**	**4.539.722.731,00**	**4.540.005.425,00**	**-42.956.031,00**							**4.576.673.599,00**	
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**Nilai IKM**	**92**	**90**	**90**	-	-	**4.619.629.630,00**	**4.539.722.731,00**	**4.540.005.425,00**	-	-	-	-	-	-	**91**	**4.576.673.599,00**	-
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penggganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	31.535.850,00	26.572.900,00	26.571.600,00	-4.964.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Aparatur		84.936.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	22.001.750,00	21.448.300,00	22.574.300,00	572.550,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	6.716.600,00	3.997.600,00	3.997.300,00	-2.719.300,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			9.936.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**4.619.629.630,00**	**4.539.722.731,00**	**4.540.005.425,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**4.576.673.599,00**	-
	1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				12 Dokumen	0 Dokumen	1.408.750,00	563.500,00	0,00	-1.408.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				100 Data	0 Data	1.408.750,00	563.500,00	0,00	-1.408.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**Nilai IKM**	**92**	**90**	**90**	-	-	**4.619.629.630,00**	**4.539.722.731,00**	**4.540.005.425,00**	-	-	-	-	-	-	**91**	**4.576.673.599,00**	-
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	3.910.074.148,00	3.920.662.715,00	3.920.662.715,00	10.588.567,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Aparatur		3.840.894.025,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.721.096.448,00	3.730.845.015,00	3.730.845.015,00	9.748.567,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			3.683.187.025,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	188.977.700,00	189.817.700,00	189.817.700,00	840.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			157.707.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	99.900,00	0,00	0,00	-99.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Aparatur		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				34 Paket	34 Paket	99.900,00	0,00	0,00	-99.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks layanan administrasi perangkat daerah*				75 %	75 %	236.519.760,00	168.474.860,00	173.500.310,00	-63.019.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Aparatur		237.435.080,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.359.050,00	3.359.050,00	3.359.050,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			2.172.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	19.473.960,00	18.943.110,00	18.943.110,00	-530.850,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			17.612.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	13.680.900,00	0,00	0,00	-13.680.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	3 Paket	0,00	0,00	2.817.400,00	2.817.400,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Tigo Koto Diate	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	7.920.000,00	0,00	0,00	-7.920.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	6 Laporan	6.493.100,00	2.000.200,00	4.771.750,00	-1.721.350,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			6.495.080,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	45 Laporan	184.184.000,00	143.609.000,00	143.609.000,00	-40.575.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			186.156.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**4.619.629.630,00**	**4.539.722.731,00**	**4.540.005.425,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**4.576.673.599,00**	-
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	0 Dokumen	1.408.750,00	563.500,00	0,00	-1.408.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**Nilai IKM**	**92**	**90**	**90**	-	-	**4.619.629.630,00**	**4.539.722.731,00**	**4.540.005.425,00**	-	-	-	-	-	-	**91**	**4.576.673.599,00**	-
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan BMD*				80 %	80 %	199.800,00	0,00	0,00	-199.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Aparatur		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	99.900,00	0,00	0,00	-99.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	99.900,00	0,00	0,00	-99.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah*				80 %	80 %	206.640.172,00	187.532.256,00	181.570.800,00	-25.069.372,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Aparatur		163.297.744,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	52.001.012,00	52.001.012,00	52.001.012,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			65.299.384,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	153.139.160,00	134.031.244,00	128.069.788,00	-25.069.372,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			96.498.360,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*				80 %	80 %	234.560.000,00	236.480.000,00	237.700.000,00	3.140.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Aparatur		250.110.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			39.190.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	21 Unit	182.980.000,00	194.530.000,00	194.530.000,00	11.550.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			203.490.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				62 Unit	62 Unit	4.960.000,00	0,00	0,00	-4.960.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	7.430.000,00	2.760.000,00	3.980.000,00	-3.450.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			7.430.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana; Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana; Persentase Penanganan Pasca Bencana**				**100,100,100 Persentase**	**100; 100; 100 %; %; %**	**273.642.550,00**	**503.631.800,00**	**1.455.370.070,00**	**213.851.050,00**							**487.493.600,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**273.642.550,00**	**503.631.800,00**	**1.455.370.070,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**487.493.600,00**	-
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase warga kota payakumbuh yang menerima pelayanan informasi rawan bencana*				100 %	100 %	16.052.300,00	36.052.100,00	135.051.925,00	118.999.625,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat dan Aparatur		24.999.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				80 Orang	160 Orang	16.052.300,00	36.052.100,00	135.051.925,00	118.999.625,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			24.999.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Persentase warga kota payakumbuh yang menerima pelayanan penanggulangan bencana]	**Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana** **Persentase Penanganan Pasca Bencana** **Persentase penanganan tanggap bencana darurat**	**100**	**100**	**100**	-	-	**273.642.550,00**	**503.631.800,00**	**1.455.370.070,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**487.493.600,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase warga kota payakumbuh yang menerima pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*				100 %	100 %	200.297.100,00	340.279.475,00	808.017.920,00	607.720.820,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat dan Aparatur		320.499.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				8 Kegiatan	10 Kegiatan	9.999.800,00	69.799.500,00	69.799.500,00	59.799.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			22.999.850,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**273.642.550,00**	**503.631.800,00**	**1.455.370.070,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**487.493.600,00**	-
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				3 Unit	33 Unit	99.900,00	20.099.800,00	20.099.800,00	19.999.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				50 Orang	100 Orang	99.650,00	20.099.325,00	20.099.325,00	19.999.675,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			20.499.950,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Persentase warga kota payakumbuh yang menerima pelayanan penanggulangan bencana]	**Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana** **Persentase Penanganan Pasca Bencana** **Persentase penanganan tanggap bencana darurat**	**100**	**100**	**100**	-	-	**273.642.550,00**	**503.631.800,00**	**1.455.370.070,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**487.493.600,00**	-
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				120 Orang	180 Orang	98.000,00	35.093.000,00	85.098.250,00	85.000.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				50 laporan	50 laporan	164.999.950,00	164.989.350,00	381.768.070,00	216.768.120,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				5 Kawasan	5 Kawasan	24.999.800,00	30.198.500,00	231.152.975,00	206.153.175,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			72.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**273.642.550,00**	**503.631.800,00**	**1.455.370.070,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**487.493.600,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase warga kota payakumbuh yang menerima pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota*				100 %	100 %	42.293.150,00	107.300.425,00	492.300.425,00	450.007.275,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat dan Aparatur		121.993.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				50 Dokumen	50 Dokumen	41.999.150,00	62.100.925,00	62.100.925,00	20.101.775,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			61.993.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Persentase warga kota payakumbuh yang menerima pelayanan penanggulangan bencana]	**Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana** **Persentase Penanganan Pasca Bencana** **Persentase penanganan tanggap bencana darurat**	**100**	**100**	**100**	-	-	**273.642.550,00**	**503.631.800,00**	**1.455.370.070,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**487.493.600,00**	-
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				100 Orang	100 Orang	98.000,00	25.098.000,00	410.098.000,00	410.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) SISA DAU	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**273.642.550,00**	**503.631.800,00**	**1.455.370.070,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**487.493.600,00**	-
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang	100 Orang	98.000,00	15.070.250,00	15.070.250,00	14.972.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	98.000,00	5.031.250,00	5.031.250,00	4.933.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Persentase dokumen penanganan pasca bencana melalui jitupasna, rencana rehabilitasi, dan pasca rekonstruksi pasca bencana*				100 Persentase	100 Persentase	15.000.000,00	19.999.800,00	19.999.800,00	4.999.800,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat dan Aparatur		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				10 Kegiatan	10 Kegiatan	15.000.000,00	19.999.800,00	19.999.800,00	4.999.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL							**5.833.303.794,00**	**5.098.708.479,00**	**5.157.233.178,00**	**-676.070.616,00**							**6.958.846.200,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.833.303.794,00**	**5.098.708.479,00**	**5.157.233.178,00**	**-676.070.616,00**							**6.958.846.200,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**5.833.303.794,00**	**5.098.708.479,00**	**5.157.233.178,00**	**-676.070.616,00**							**6.958.846.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM (Indeks)**				**93 Indeks**	**93 Indeks**	**3.793.914.419,00**	**3.935.488.004,00**	**3.950.013.178,00**	**208.754.831,00**							**4.002.669.250,00**	
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat** **Nilai IKM**	**93** **AA**	**90** **AA**	**93** **AA**	-	-	**3.793.914.419,00**	**3.935.488.004,00**	**3.950.013.178,00**	-	-	-	-	-	-	**93** **AA**	**4.002.669.250,00**	-
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penggganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	57.593.600,00	44.184.550,00	44.221.750,00	-13.371.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Dinas Sosial		55.626.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	2.434.700,00	1.476.050,00	1.513.250,00	-921.450,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			2.207.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	51.133.900,00	38.683.500,00	38.683.500,00	-12.450.400,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			53.219.500,00	DINAS SOSIAL
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**3.793.914.419,00**	**3.935.488.004,00**	**3.950.013.178,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**4.002.669.250,00**	-
	1.06.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.012.500,00	2.012.500,00	2.012.500,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			100.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	2.012.500,00	2.012.500,00	2.012.500,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			100.000,00	DINAS SOSIAL
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat** **Nilai IKM**	**93** **AA**	**90** **AA**	**93** **AA**	-	-	**3.793.914.419,00**	**3.935.488.004,00**	**3.950.013.178,00**	-	-	-	-	-	-	**93** **AA**	**4.002.669.250,00**	-
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	3.029.705.909,00	3.249.815.969,00	3.258.215.969,00	228.510.060,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dokumen Keuangan Dinas Sosial		2.667.568.330,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.756.165.909,00	2.976.275.969,00	2.976.275.969,00	220.110.060,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			2.511.568.330,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	273.540.000,00	273.540.000,00	281.940.000,00	8.400.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			156.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	0 %	32.329.600,00	0,00	0,00	-32.329.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dokumen Kepegawaian Dinas Sosial		32.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				32 Paket	0 Paket	32.329.600,00	0,00	0,00	-32.329.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			32.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks layanan administrasi perangkat daerah*				75 %	75 %	152.659.890,00	120.056.065,00	111.096.315,00	-41.563.575,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kantor Dinas Sosial		365.438.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	3.755.850,00	3.755.850,00	3.755.850,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			3.884.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	0 Paket	97.000,00	0,00	0,00	-97.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			108.036.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	29.422.890,00	17.655.565,00	19.190.815,00	-10.232.075,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			33.585.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.334.500,00	9.121.650,00	9.121.650,00	-6.212.850,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			15.090.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	0 Dokumen	4.343.200,00	0,00	0,00	-4.343.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			4.343.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	4.553.950,00	2.571.500,00	4.331.500,00	-222.450,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			4.601.100,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	93.140.000,00	84.939.000,00	72.684.000,00	-20.456.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			195.798.000,00	DINAS SOSIAL
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**3.793.914.419,00**	**3.935.488.004,00**	**3.950.013.178,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**4.002.669.250,00**	-
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	2.012.500,00	2.012.500,00	2.012.500,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			100.000,00	DINAS SOSIAL
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat** **Nilai IKM**	**93** **AA**	**90** **AA**	**93** **AA**	-	-	**3.793.914.419,00**	**3.935.488.004,00**	**3.950.013.178,00**	-	-	-	-	-	-	**93** **AA**	**4.002.669.250,00**	-
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan BMD*				80 %	0 %	194.000,00	0,00	0,00	-194.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	BMD Dinas Sosial		251.541.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	97.000,00	0,00	0,00	-97.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			163.923.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	0 Unit	97.000,00	0,00	0,00	-97.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			87.618.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah*				80 %	80 %	309.977.060,00	309.977.060,00	325.024.784,00	15.047.724,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kantor Dinas Sosial		357.434.720,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.977.060,00	3.977.060,00	3.956.060,00	-21.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			3.688.560,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	306.000.000,00	306.000.000,00	321.068.724,00	15.068.724,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			353.746.160,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*				80 %	80 %	211.454.360,00	211.454.360,00	211.454.360,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	BMD Dinas Sosial		273.060.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			42.950.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	159.160.000,00	159.160.000,00	159.160.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			216.640.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	13.104.360,00	13.104.360,00	13.104.360,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			13.470.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)**				**100 %**	**100 %**	**476.882.225,00**	**210.793.575,00**	**210.793.200,00**	**113.275.275,00**							**590.157.500,00**	
		[Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**476.882.225,00**	**210.793.575,00**	**210.793.200,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**590.157.500,00**	-
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengumpulan Sumbangan yang berjalan sesuai aturan*				100 %	0 %	11.311.350,00	0,00	0,00	-11.311.350,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Pengumpul Sumbangan Kota Payakumbuh		11.311.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				1 Dokumen	0 Dokumen	11.311.350,00	0,00	0,00	-11.311.350,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			11.311.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya*				65 %	65 %	465.570.875,00	210.793.575,00	210.793.200,00	-254.777.675,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	PSKS Kota Payakumbuh		578.846.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Lembaga	11 Lembaga	55.709.650,00	35.530.100,00	35.529.725,00	-20.179.925,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			125.708.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Orang	6 Orang	10.057.000,00	5.729.800,00	5.729.800,00	-4.327.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			10.057.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya				155 Orang	155 Orang	399.705.425,00	169.533.675,00	169.533.675,00	-230.171.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			442.980.500,00	DINAS SOSIAL
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**476.882.225,00**	**210.793.575,00**	**210.793.200,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**590.157.500,00**	-
	1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi																		
			Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi				1 Orang	0 Orang	98.800,00	0,00	0,00	-98.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			100.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi (%)**				**100 %**	**100 %**	**507.688.425,00**	**494.672.450,00**	**491.251.200,00**	**36.997.275,00**							**544.685.700,00**	
		[Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**507.688.425,00**	**494.672.450,00**	**491.251.200,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**544.685.700,00**	-
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti*				80 %	80 %	477.700.650,00	468.997.100,00	466.984.600,00	-10.716.050,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti Kota Payakumbuh		534.685.700,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang	85 Orang	400.965.825,00	393.638.675,00	393.638.675,00	-7.327.150,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			440.984.750,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Orang	22 Orang	24.632.600,00	24.050.400,00	24.050.400,00	-582.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			24.667.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	52.003.425,00	51.308.025,00	49.295.525,00	-2.707.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			25.321.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				130 Orang	0 Orang	98.800,00	0,00	0,00	-98.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			43.712.150,00	DINAS SOSIAL
	-		**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**507.688.425,00**	**494.672.450,00**	**491.251.200,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**544.685.700,00**	-
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Persentase (%) penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial*				undefined undefined	80 %	29.987.775,00	25.675.350,00	24.266.600,00	-5.721.175,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Orang	20 Orang	29.987.775,00	25.675.350,00	24.266.600,00	-5.721.175,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)**				**90 %**	**90 %**	**890.977.750,00**	**316.692.050,00**	**321.174.100,00**	**704.482.950,00**							**1.595.460.700,00**	
		[Persentase keakuratan data kemiskinan (DTKS)]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**890.977.750,00**	**316.692.050,00**	**321.174.100,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**1.595.460.700,00**	-
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti*				100 %	100 %	890.977.750,00	316.692.050,00	321.174.100,00	-569.803.650,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	DTKS Kota Payakumbuh		1.595.460.700,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				40000 Orang	40000 Orang	206.847.250,00	200.596.200,00	227.440.000,00	20.592.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			239.667.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				70 Orang	0 Orang	335.589.650,00	0,00	0,00	-335.589.650,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			592.016.100,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				55 Orang	0 Orang	209.420.600,00	0,00	0,00	-209.420.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			592.016.100,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan				8200 Usulan	8200 Usulan	139.120.250,00	116.095.850,00	93.734.100,00	-45.386.150,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			171.761.500,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)**				**100 %**	**100 %**	**91.792.300,00**	**103.468.350,00**	**146.407.450,00**	**29.031.500,00**							**120.823.800,00**	
		[Persentase korban bencana yang tetangani]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**91.792.300,00**	**103.468.350,00**	**146.407.450,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**120.823.800,00**	-
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota*				100 %	100 %	71.692.000,00	83.466.850,00	126.405.950,00	54.713.950,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Korban Bencana Alam dan Sosial Kota Payakumbuh		100.687.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	69 Orang	34.945.750,00	47.445.750,00	90.384.850,00	55.439.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA SISA DAU	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			50.697.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Orang	25 Orang	26.433.100,00	25.707.950,00	25.707.950,00	-725.150,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			24.990.400,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																		
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	10.313.150,00	10.313.150,00	10.313.150,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			25.000.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase PMKS yang mendapat Pemberdayaan Masyarakat*				100 %	100 %	20.100.300,00	20.001.500,00	20.001.500,00	-98.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Masyarakat Kota Payakumbuh		20.136.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																		
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Kampung	0 Kampung	98.800,00	0,00	0,00	-98.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			99.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Orang	15 Orang	20.001.500,00	20.001.500,00	20.001.500,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			20.037.000,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)**				**100 %**	**100 %**	**72.048.675,00**	**37.594.050,00**	**37.594.050,00**	**33.000.575,00**							**105.049.250,00**	
		[Persentase keterlibatan kelompok masyarakat dalam peringatan hari Pahlawan]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**72.048.675,00**	**37.594.050,00**	**37.594.050,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**105.049.250,00**	-
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Persentase terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan Pejuang 45*				100 %	100 %	72.048.675,00	37.594.050,00	37.594.050,00	-34.454.625,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	TMP Kota Payakumbuh		105.049.250,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	48.591.475,00	28.253.650,00	28.253.650,00	-20.337.825,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			56.591.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				289 Makam	289 Makam	23.457.200,00	9.340.400,00	9.340.400,00	-14.116.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			48.457.750,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN							**6.731.191.261,00**	**5.967.891.118,00**	**5.967.890.818,00**	**-763.300.443,00**							**7.571.440.512,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.933.963.446,00**	**5.276.752.855,00**	**5.362.865.955,00**	**-571.097.491,00**							**6.694.488.117,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**5.933.963.446,00**	**5.276.752.855,00**	**5.362.865.955,00**	**-571.097.491,00**							**6.694.488.117,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**92.50 Indeks**	**92.50 Indeks**	**4.755.942.927,00**	**4.238.402.090,00**	**4.331.103.140,00**	**412.121.297,00**							**5.168.064.224,00**	
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**Nilai IKM** **Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90** **93.00**	**88.25** **90**	**90** **93.00**	-	-	**4.755.942.927,00**	**4.238.402.090,00**	**4.331.103.140,00**	-	-	-	-	-	-	**90** **93.00**	**5.168.064.224,00**	-
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penggganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	97.644.400,00	79.219.950,00	79.482.900,00	-18.161.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		110.984.830,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	24.822.800,00	15.109.650,00	15.372.600,00	-9.450.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			32.618.080,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	67.966.800,00	59.255.500,00	59.255.500,00	-8.711.300,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			74.824.750,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**4.755.942.927,00**	**4.238.402.090,00**	**4.331.103.140,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**5.168.064.224,00**	-
	2.07.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.244.800,00	3.244.800,00	3.244.800,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			1.771.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				104 Data	104 Data	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			1.771.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**Nilai IKM** **Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90** **93.00**	**88.25** **90**	**90** **93.00**	-	-	**4.755.942.927,00**	**4.238.402.090,00**	**4.331.103.140,00**	-	-	-	-	-	-	**90** **93.00**	**5.168.064.224,00**	-
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	3.318.260.087,00	3.153.760.700,00	3.139.000.700,00	-179.259.387,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		3.139.737.736,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.054.681.487,00	2.892.702.100,00	2.892.702.100,00	-161.979.387,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			3.017.945.736,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	263.578.600,00	261.058.600,00	246.298.600,00	-17.280.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			121.792.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	0 %	53.567.800,00	0,00	0,00	-53.567.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		28.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				26 Paket	0 Paket	53.567.800,00	0,00	0,00	-53.567.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			28.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks layanan administrasi perangkat daerah*				75 %	75 %	263.544.050,00	134.137.280,00	160.408.080,00	-103.135.970,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		367.298.920,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	6 Paket	5.088.500,00	5.088.500,00	5.088.500,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			5.599.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2 Paket	13.849.300,00	0,00	15.970.000,00	2.120.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			15.078.800,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				9 Paket	4 Paket	37.802.300,00	0,00	8.580.050,00	-29.222.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			42.229.440,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				58 Paket	53 Paket	43.632.000,00	28.469.480,00	28.469.480,00	-15.162.520,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			39.084.870,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	3 Paket	14.605.600,00	14.619.600,00	13.632.000,00	-973.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			23.493.910,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	2 Dokumen	5.966.300,00	5.966.300,00	5.966.300,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			93.684.480,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	6.159.050,00	2.464.400,00	4.332.750,00	-1.826.300,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			6.775.120,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	134.831.000,00	75.919.000,00	75.919.000,00	-58.912.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			139.582.300,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**4.755.942.927,00**	**4.238.402.090,00**	**4.331.103.140,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**5.168.064.224,00**	-
	2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.610.000,00	1.610.000,00	2.450.000,00	840.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			1.771.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**Nilai IKM** **Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90** **93.00** **88.25** **90**	**90** **93.00**	**90** **93.00**	-	-	**4.755.942.927,00**	**4.238.402.090,00**	**4.331.103.140,00**	-	-	-	-	-	-	**90** **93.00**	**5.168.064.224,00**	-
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan BMD*				80 %	80 %	117.679.950,00	0,00	192.027.600,00	74.347.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		96.891.300,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	3 Unit	64.438.000,00	0,00	96.657.000,00	32.219.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			38.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	8 Unit	53.241.950,00	0,00	95.370.600,00	42.128.650,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			58.391.300,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah*				80 %	80 %	682.837.480,00	683.215.000,00	561.924.700,00	-120.912.780,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		1.225.088.438,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	180.903.900,00	180.903.900,00	138.013.600,00	-42.890.300,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			198.750.257,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	501.933.580,00	502.311.100,00	423.911.100,00	-78.022.480,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.026.338.181,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*				80 %	80 %	222.409.160,00	188.069.160,00	198.259.160,00	-24.150.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		199.463.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			43.109.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	17 Unit	85.600.000,00	85.600.000,00	85.600.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			81.455.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	0 Unit	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			440.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	37 Unit	27.159.160,00	23.279.160,00	33.469.160,00	6.310.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			24.959.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	70.060.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-30.060.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			49.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersedia**				**25 %**	**25 %**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-98.900.000,00**							**1.100.000,00**	
		[Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun]	**Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja**	**4.80**	**4.80**	**4.80**	-	-	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**4.80**	**1.100.000,00**	-
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun*				-	0 persen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		1.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			1.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi**				**47,92 %**	**47,92 %**	**538.983.824,00**	**255.299.765,00**	**255.299.765,00**	**53.899.695,00**							**592.883.519,00**	
		[Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi]	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi**	**3.87**	**3.95**	**3.87**	-	-	**538.983.824,00**	**255.299.765,00**	**255.299.765,00**	-	-	-	-	-	-	**3.87**	**592.883.519,00**	-
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi*				80 persen	80 persen	507.350.299,00	253.229.465,00	253.229.465,00	-254.120.834,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat/ pencari kerja		558.085.349,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				96 Orang	48 Orang	507.350.299,00	253.229.465,00	253.229.465,00	-254.120.834,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			558.085.349,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Dibina*				80 persen	80 persen	31.633.525,00	2.070.300,00	2.070.300,00	-29.563.225,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat/ pencari kerja		34.798.170,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				12 Lembaga	12 Lembaga	31.633.525,00	2.070.300,00	2.070.300,00	-29.563.225,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			34.798.170,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan di Dalam Negeri**				**16,73 %**	**16,73 %**	**156.095.245,00**	**93.109.550,00**	**89.971.600,00**	**17.408.984,00**							**173.504.229,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Persentase Tenaga Kerja Yang Di Tempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui MekanismeLayanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota]	**Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.**	**46.50**	**46.45**	**46.50**	-	-	**156.095.245,00**	**93.109.550,00**	**89.971.600,00**	-	-	-	-	-	-	**46.50**	**173.504.229,00**	-
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan*				46,60 persen	46,60 persen	95.866.475,00	26.610.250,00	26.610.250,00	-69.256.225,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat/ pencari kerja		107.251.980,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				270 Orang	125 Orang	95.866.475,00	26.610.250,00	26.610.250,00	-69.256.225,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			107.251.980,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Persentase Penyebarluasan Informasi Kerja*				80 persen	80 persen	60.228.770,00	66.499.300,00	63.361.350,00	3.132.580,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat/ pencari kerja		66.252.249,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				250 Orang	150 Orang	60.228.770,00	66.499.300,00	63.361.350,00	3.132.580,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			66.252.249,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial**				**1444 Orang**	**1444 Orang**	**382.941.450,00**	**689.941.450,00**	**686.491.450,00**	**375.994.695,00**							**758.936.145,00**	
		[Persentase Perusahaan yang Menerapkan tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)]	**Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial**	**0**	**0**	**0**	-	-	**382.941.450,00**	**689.941.450,00**	**686.491.450,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**758.936.145,00**	-
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama*				75 persen	75 persen	382.941.450,00	689.941.450,00	686.491.450,00	303.550.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perusahaan dan pekerja		758.936.145,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				7 Perkara	7 Perkara	24.591.100,00	24.591.100,00	27.811.100,00	3.220.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			27.050.430,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				3 Perkara	3 Perkara	4.200.600,00	4.200.600,00	4.200.600,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			4.620.990,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**382.941.450,00**	**689.941.450,00**	**686.491.450,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**758.936.145,00**	-
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				1593 Orang	3156 Orang	354.149.750,00	661.149.750,00	654.479.750,00	300.330.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			727.264.725,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**797.227.815,00**	**691.138.263,00**	**605.024.863,00**	**-192.202.952,00**							**876.952.395,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**797.227.815,00**	**691.138.263,00**	**605.024.863,00**	**-192.202.952,00**							**876.952.395,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri**				**26.00 %**	**26.00 %**	**719.630.190,00**	**632.019.638,00**	**545.906.238,00**	**71.963.800,00**							**791.593.990,00**	
		[Persentase Peningkatan Nilai Produksi, Persentase Peningkatan Jumlah Unit Usaha Industri, Persentase Penggunaan Teknologi dalam Industri, Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Industri]	**Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial**	**0**	**0**	**0**	-	-	**719.630.190,00**	**632.019.638,00**	**545.906.238,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**791.593.990,00**	-
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri*				66,67 persen	66,67 persen	719.630.190,00	632.019.638,00	545.906.238,00	-173.723.952,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pelaku usaha/ IKM		791.593.990,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	25.647.025,00	8.581.100,00	8.581.100,00	-17.065.925,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			28.212.085,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	164.534.826,00	122.336.867,00	116.086.867,00	-48.447.959,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			180.988.390,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	309.693.639,00	317.134.349,00	267.382.399,00	-42.311.240,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			340.662.960,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**719.630.190,00**	**632.019.638,00**	**545.906.238,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**791.593.990,00**	-
	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota																		
			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.830.150,00	4.332.000,00	4.332.000,00	-6.498.150,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			11.913.330,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase izin usaha industri yang diterbitkan**				**100 %**	**100 %**	**60.657.325,00**	**52.342.225,00**	**52.342.225,00**	**6.066.310,00**							**66.723.635,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Persentase Perusahaan Industri yang memiliki NIB RBA, Persentase Perusahaan Industri yang menerapkan standardisasi mutu produk]	**Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri**	**0**	**0**	**0**	-	-	**60.657.325,00**	**52.342.225,00**	**52.342.225,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**66.723.635,00**	-
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaku Usaha Industri Yang Difasilitasi*				6 IKM	6 IKM	60.657.325,00	52.342.225,00	52.342.225,00	-8.315.100,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pelaku usaha/ IKM		66.723.635,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	11.725.950,00	7.263.950,00	7.263.950,00	-4.462.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			12.898.875,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	48.931.375,00	45.078.275,00	45.078.275,00	-3.853.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			53.824.760,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Jumlah data perusahaan IKM yang masuk ke dalam SIINAS Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)**				**1 61,67 75 perusahaan Nilai %**	**1 61,67 perusahaan Nilai**	**16.940.300,00**	**6.776.400,00**	**6.776.400,00**	**1.694.470,00**							**18.634.770,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**16.940.300,00**	**6.776.400,00**	**6.776.400,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**18.634.770,00**	-
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Penyediaan Informasi Industri*				66,67 persen	66,67 persen	16.940.300,00	6.776.400,00	6.776.400,00	-10.163.900,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pelaku usaha/ IKM		18.634.770,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	7.958.850,00	3.183.800,00	3.183.800,00	-4.775.050,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			8.755.065,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
		[Persentase Perusahaan Industri yang terdaftar di SIINas, Persentase Perusahaan Industri yang melaporkan perkembangan usaha di SIINas]	**Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan**	**0**	**0**	**0**	-	-	**16.940.300,00**	**6.776.400,00**	**6.776.400,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**18.634.770,00**	-
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	8.981.450,00	3.592.600,00	3.592.600,00	-5.388.850,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			9.879.705,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
		UPTD PUSAT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN RENDANG (P3R)							**6.731.191.261,00**	**5.967.891.118,00**	**5.967.890.818,00**	**-763.300.443,00**							**7.571.440.512,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**797.227.815,00**	**691.138.263,00**	**605.024.863,00**	**-192.202.952,00**							**876.952.395,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**797.227.815,00**	**691.138.263,00**	**605.024.863,00**	**-192.202.952,00**							**876.952.395,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentese realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri**				**100 %**	**100 %**	**719.630.190,00**	**632.019.638,00**	**545.906.238,00**	**71.963.800,00**							**791.593.990,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**719.630.190,00**	**632.019.638,00**	**545.906.238,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**791.593.990,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri*				66,67 persen	66,67 persen	719.630.190,00	632.019.638,00	545.906.238,00	-173.723.952,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pelaku usaha/ IKM		791.593.990,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	0 Dokumen	63.252.750,00	63.252.550,00	0,00	-63.252.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			69.578.214,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	145.671.800,00	116.382.772,00	149.523.872,00	3.852.072,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			160.239.011,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA							**6.385.764.449,00**	**7.702.273.773,00**	**7.698.273.773,00**	**1.312.509.324,00**							**8.213.440.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.385.764.449,00**	**7.702.273.773,00**	**7.698.273.773,00**	**1.312.509.324,00**							**8.213.440.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**5.592.433.749,00**	**6.331.701.773,00**	**6.327.701.773,00**	**735.268.024,00**							**6.334.500.000,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**90,70 Indeks**	**90,70 Indeks**	**5.532.433.599,00**	**5.201.155.023,00**	**5.197.155.023,00**	**-435.933.599,00**							**5.096.500.000,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penggganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	7.143.300,00	7.143.300,00	7.143.300,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	OPD		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.728.300,00	4.728.300,00	4.728.300,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			8.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.207.500,00	1.207.500,00	1.207.500,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			3.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	1.207.500,00	1.207.500,00	1.207.500,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			3.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	4.673.135.935,00	4.323.190.980,00	4.323.190.980,00	-349.944.955,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	OPD		3.640.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	4.304.929.935,00	3.954.984.980,00	3.954.984.980,00	-349.944.955,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			3.400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	368.206.000,00	368.206.000,00	368.206.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	0 %	30.309.000,00	0,00	0,00	-30.309.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Perangkat Daerah		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				24 Paket	0 Paket	30.309.000,00	0,00	0,00	-30.309.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks layanan administrasi perangkat daerah*				75 %	75 %	160.320.140,00	128.600.230,00	128.600.230,00	-31.719.910,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Perangkat Daerah		571.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	3.393.750,00	3.393.750,00	3.393.750,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	83.900,00	83.900,00	83.900,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	6 Paket	47.283.890,00	32.287.580,00	32.287.580,00	-14.996.310,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			43.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				23040 Paket	2 Paket	13.265.400,00	5.305.800,00	5.305.800,00	-7.959.600,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			13.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1.732.200,00	1.732.200,00	1.732.200,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				83 Laporan	30 Laporan	93.756.000,00	84.992.000,00	84.992.000,00	-8.764.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	805.000,00	805.000,00	805.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			3.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan BMD*				80 %	0 %	94.000,00	0,00	0,00	-94.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	OPD		49.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	94.000,00	0,00	0,00	-94.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			49.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah*				80 %	80 %	304.843.224,00	388.780.513,00	384.780.513,00	79.937.289,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	OPD		360.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	89.485.704,00	153.946.720,00	153.946.720,00	64.461.016,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	215.357.520,00	234.833.793,00	230.833.793,00	15.476.273,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*				80 %	80 %	356.588.000,00	353.440.000,00	353.440.000,00	-3.148.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	OPD		426.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			43.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	44 Unit	290.300.000,00	290.300.000,00	290.300.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			336.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	27.000.000,00	23.950.000,00	23.950.000,00	-3.050.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			46.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	98.000,00	0,00	0,00	-98.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			1.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan; tingkat kategori capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Persentase Anggaran renponsif Gender (ARG)**				**60.71 4.09 %**	**60.71;Utama 4.09 %**	**3.000.300,00**	**66.141.150,00**	**66.141.150,00**	**155.999.700,00**							**159.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga yang memahami konsep gender dan PPRG* *Persentase pemenuhan dokumen untuk evaluasi PUG*				100 % 40 lembaga	100 % 40 lembaga	1.000.100,00	6.843.000,00	6.843.000,00	5.842.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perangkat Daerah		7.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				1 Lembaga	1 Lembaga	1.000.100,00	6.843.000,00	6.843.000,00	5.842.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			7.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah pemberdayaan perempuan pada organisasi kemasyarakatan* *Jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam kaukus perempuan politik indonesia*				40 orang 53 kelompok	40 orang 53 kelompok	2.000.200,00	59.298.150,00	59.298.150,00	57.297.950,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		152.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				151 Lembaga	151 Lembaga	1.000.000,00	58.297.950,00	58.297.950,00	57.297.950,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			115.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan				31 Orang	31 Orang	1.000.200,00	1.000.200,00	1.000.200,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			37.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif** **Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**				**100** **0.0250 %** **%**	**100** **0.0250 %** **%**	**999.450,00**	**254.889.000,00**	**254.889.000,00**	**112.000.550,00**							**113.000.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah advokasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan*				5 advokasi	5 advokasi	999.450,00	80.253.800,00	80.253.800,00	79.254.350,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		58.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				31 Lembaga	31 Lembaga	999.450,00	80.253.800,00	80.253.800,00	79.254.350,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			58.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase layanan korban kekerasan perempuan yang dilayani melalui Mediko Legal*				100 %	100 %	0,00	131.530.000,00	131.530.000,00	131.530.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0003	&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&																		
			Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota				-	2 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota				-	1 Orang	0,00	6.332.500,00	6.332.500,00	6.332.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				-	30 orang	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				-	14 Orang	0,00	8.785.000,00	8.785.000,00	8.785.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota				-	6 orang	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				-	30 orang	0,00	74.412.500,00	74.412.500,00	74.412.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				-	10 orang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	DAK FISIK-BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah SDM lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendapatkan bimtek* *Persentase layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan*				-	100 % 1 orang	0,00	43.105.200,00	43.105.200,00	43.105.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	OPD DAN MASYARAKAT		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek				-	30 orang	0,00	43.105.200,00	43.105.200,00	43.105.200,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	DAK FISIK-BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar Jumlah organisasi perempuan yang aktif**				**1 21 Dokumen organisasi**	**1 21 Dokumen organisasi**	**51.000.400,00**	**434.631.800,00**	**434.631.800,00**	**458.999.600,00**							**510.000.000,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak*				53 kelompok	0 kelompok	1.000.400,00	0,00	0,00	-1.000.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perangkat Daerah dan Masyarakat		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.																		
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				31 Orang	0 Orang	1.000.400,00	0,00	0,00	-1.000.400,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga*				27 organisasi	27 organisasi	50.000.000,00	434.631.800,00	434.631.800,00	384.631.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas				1 Lembaga	21 Lembaga	50.000.000,00	434.631.800,00	434.631.800,00	384.631.800,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Tingkat Pemanfaatan Data dan Anak dalam Perencanaan,Evaluasi dan Penyusunan Kebijakan Jumlah perwako,himbauan,MOU terkait perlindungan anak**				**1 100 Dokumen %**	**100 1 % Dokumen**	**1.000.000,00**	**42.271.500,00**	**42.271.500,00**	**7.000.000,00**							**8.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah updating data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI-PPA) Persentase pemanfaatan data gender dan anak oleh satuan kerja terkait*				100 % 12 updating	100 % 12 updating	1.000.000,00	42.271.500,00	42.271.500,00	41.271.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perangkat Daerah		8.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	42.271.500,00	42.271.500,00	41.271.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			8.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Indeks Pemenuhan Hak Anak Jumlah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM); Tingkat Kategori Capaian Kota Layak Anak (KLA)**				**61,51 9 Indeks Jumlah**	**61,51 9; Madya Indeks Desa/Kel; Kategori**	**2.000.000,00**	**6.517.700,00**	**6.517.700,00**	**88.000.000,00**							**90.000.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah pelembagaan PHA*				50 lembaga	50 lembaga	2.000.000,00	6.517.700,00	6.517.700,00	4.517.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perangkat Daerah		90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Lembaga	0 Lembaga	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Lembaga	1 Lembaga	1.000.000,00	6.517.700,00	6.517.700,00	5.517.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA); persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprensif**				**85.67 100 Indeks %**	**85.67; 100 100 Indeks; % %**	**2.000.000,00**	**326.095.600,00**	**326.095.600,00**	**356.000.000,00**							**358.000.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan banyak pihak*				56 koordinasi	56 koordinasi	1.000.000,00	114.977.000,00	114.977.000,00	113.977.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.000.000,00	114.977.000,00	114.977.000,00	113.977.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PER LINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah koordinasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan banyak pihak*				47 koordinasi	47 koordinasi	1.000.000,00	168.033.600,00	168.033.600,00	167.033.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		248.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	1.000.000,00	80.916.100,00	80.916.100,00	79.916.100,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			208.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				-	10 Orang	0,00	52.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota				-	30 Orang	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				-	14 Orang	0,00	6.332.500,00	6.332.500,00	6.332.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				-	6 Orang	0,00	8.785.000,00	8.785.000,00	8.785.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	30 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota				-	10 Orang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus*				4 lembaga	4 lembaga	0,00	43.085.000,00	43.085.000,00	43.085.000,00			-	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perangkat Daerah		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai																		
			jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek				-	70 Orang	0,00	43.085.000,00	43.085.000,00	43.085.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**793.330.700,00**	**1.370.572.000,00**	**1.370.572.000,00**	**577.241.300,00**							**1.878.940.000,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (AgrSpesific Fertility Rate / ASFR 15-19 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun**				**5,5 85,0 Angka indeks**	**5,5 2,29 Angka kelahiran**	**1.000.000,00**	**51.000.000,00**	**51.000.000,00**	**45.940.000,00**							**46.940.000,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah perumusan dan pemukhtahiran data keluarga pada aplikasi SiGA*				12 pemukhtahiran	0 Pemutahiran	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perangkat Daerah		23.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal																		
			Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				14 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			23.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pemetaan sistem informasi keluarga*				12 kali	12 kali	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		23.940.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				-	1 Laporan	0,00	51.000.000,00	28.200.000,00	28.200.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				-	1 Dokumen	0,00	0,00	22.800.000,00	22.800.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			23.940.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Persentase pemakaian kontrasepsi Modren (Modren Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)**				**13.00 43,60 % %**	**14.1 13.00 43,60 Persentase % %**	**286.430.500,00**	**427.242.000,00**	**427.242.000,00**	**707.569.500,00**							**994.000.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Jumlah pembinnan KB sesuai dengan kearifan lokal*				2 momentum strategis	2 momentum strategis	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	1 Laporan	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB*				100 %	100 %	285.600.000,00	154.550.000,00	154.550.000,00	-131.050.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		680.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				280 Orang	280 Orang	285.600.000,00	154.550.000,00	154.550.000,00	-131.050.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			680.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Faskes KB yang mendapatkan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) Persentase pengadaan sarana-prasarana program KB lainnya sesuai perencanaan/ pedoman Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern*				100 % 14,1 % 30 Faskes KB 87,5 %	100 % 14,1 % 30 Faskes KB 87,5 %	830.500,00	197.692.000,00	197.692.000,00	196.861.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		234.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				-	1 Laporan	0,00	9.690.000,00	9.690.000,00	9.690.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				-	510 Orang	0,00	188.002.000,00	188.002.000,00	188.002.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	0 Laporan	830.500,00	0,00	0,00	-830.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			34.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**indeks Lansia Berdaya; Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja; Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri Median Usia Kawin Pertama (MUKP) wanita;Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga**				**23.3 72 Median %**	**60;90,4;100 23.3;72 indeks;indeks;persen Median; Persentase**	**505.900.200,00**	**892.330.000,00**	**892.330.000,00**	**332.099.800,00**							**838.000.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Indeks lansia Berdaya* *Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja* *Persentase kader yang mendapatkan pembinaan sebagai kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga*				58,5 indeks 80 % 88,6 indeks	58,5 indeks 80 % 88,6 indeks	505.900.200,00	285.130.000,00	285.130.000,00	-220.770.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		558.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				495 Orang	513 Orang	504.900.000,00	261.630.000,00	261.630.000,00	-243.270.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				-	47 Kelompok	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)																		
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				10 Kelompok	0 Kelompok	1.000.200,00	0,00	0,00	-1.000.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			8.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah organisai Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*				53 organisasi	53 organisasi	0,00	607.200.000,00	607.200.000,00	607.200.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		280.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	1 laporan	0,00	276.000.000,00	276.000.000,00	276.000.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			280.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				-	1 laporan	0,00	331.200.000,00	331.200.000,00	331.200.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
		DINAS KETAHANAN PANGAN							**3.157.251.426,00**	**3.218.895.255,00**	**3.695.788.193,00**	**538.536.767,00**							**3.749.123.908,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.157.251.426,00**	**3.218.895.255,00**	**3.695.788.193,00**	**538.536.767,00**							**3.749.123.908,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**3.157.251.426,00**	**3.218.895.255,00**	**3.695.788.193,00**	**538.536.767,00**							**3.749.123.908,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**86.5 Nilai**	**86.5 Nilai**	**2.688.902.606,00**	**2.840.088.447,00**	**2.850.821.391,00**	**333.854.002,00**							**3.022.756.608,00**	
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.688.902.606,00**	**2.840.088.447,00**	**2.850.821.391,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**3.022.756.608,00**	-
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi*				100 %	85 %	59.734.300,00	21.872.400,00	25.730.700,00	-34.003.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		97.856.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	21.877.250,00	10.749.650,00	4.661.950,00	-17.215.300,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			28.170.050,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	37.052.050,00	10.317.750,00	20.263.750,00	-16.788.300,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			67.685.950,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.688.902.606,00**	**2.840.088.447,00**	**2.850.821.391,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**3.022.756.608,00**	-
	2.09.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	402.500,00	402.500,00	402.500,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	402.500,00	402.500,00	402.500,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.688.902.606,00**	**2.840.088.447,00**	**2.850.821.391,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**3.022.756.608,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	85 %	2.239.712.950,00	2.468.197.707,00	2.472.597.875,00	232.884.925,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		2.293.851.116,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.034.632.950,00	2.285.557.707,00	2.285.557.875,00	250.924.925,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			2.157.155.116,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	205.080.000,00	182.640.000,00	187.040.000,00	-18.040.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			136.696.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	0 %	23.276.600,00	0,00	0,00	-23.276.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		60.550.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				22 Paket	0 Paket	22.226.600,00	0,00	0,00	-22.226.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	0 Dokumen	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			25.550.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks layanan administrasi perangkat daerah*				75 %	85 %	173.795.260,00	122.198.800,00	122.208.000,00	-51.587.260,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		241.680.550,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	0 Paket	1.649.000,00	0,00	0,00	-1.649.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.900.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				37 Paket	43 Paket	18.028.660,00	18.028.660,00	18.028.660,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			18.526.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	8.271.100,00	7.579.640,00	7.588.840,00	-682.260,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			9.862.150,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	8.070.000,00	8.070.000,00	8.070.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			8.392.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	2.415.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	-690.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			7.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	40 Laporan	134.959.000,00	84.783.000,00	84.783.000,00	-50.176.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			195.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.688.902.606,00**	**2.840.088.447,00**	**2.850.821.391,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**3.022.756.608,00**	-
	2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	402.500,00	2.012.500,00	2.012.500,00	1.610.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.688.902.606,00**	**2.840.088.447,00**	**2.850.821.391,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**3.022.756.608,00**	-
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah*				80 %	85 %	67.103.496,00	100.099.540,00	102.834.816,00	35.731.320,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		140.321.192,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	28.084.200,00	38.425.000,00	38.425.000,00	10.340.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	39.019.296,00	61.674.540,00	64.409.816,00	25.390.520,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			100.321.192,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*				80 %	85 %	125.280.000,00	127.720.000,00	127.450.000,00	2.170.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		188.497.750,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			39.190.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	78.800.000,00	78.800.000,00	78.800.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			140.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	14 Unit	7.290.000,00	9.730.000,00	9.460.000,00	2.170.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			9.307.750,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)**				**87.9 Nilai**	**87.9 Nilai**	**364.645.445,00**	**233.286.025,00**	**626.564.475,00**	**111.721.855,00**							**476.367.300,00**	
		[Skor Pola Pangan Harapan]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**364.645.445,00**	**233.286.025,00**	**626.564.475,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**476.367.300,00**	-
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*1. Persentase Pengembangan Usaha Kelembagaan Distribusi Pangan* *2. Persentase Informasi Harga yang Up to Date*				100 % 19 %	100 % 18 %	154.632.950,00	128.281.000,00	210.645.950,00	56.013.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				40 Keluarga	40 Keluarga	50.816.500,00	51.159.350,00	51.159.350,00	342.850,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			65.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				1 laporan	1 laporan	98.142.550,00	71.448.650,00	153.813.650,00	55.671.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	2.923.950,00	2.923.450,00	2.923.450,00	-500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota																		
			Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	2.749.950,00	2.749.550,00	2.749.500,00	-450,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**364.645.445,00**	**233.286.025,00**	**626.564.475,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**476.367.300,00**	-
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*1. Persentase Masyarakat yang Memahami Diversifikasi Konsumsi Pangan* *2. Persentase Masyarakat yang telah Terampil dalam Mengolah Pangan Lokal Non Beras Non Terigu* *Persentase konsumsi masyarakat sesuai AKE*				23 % 45 %	23 % 45 % 93,40 %	210.012.495,00	105.005.025,00	415.918.525,00	205.906.030,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh		256.367.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	4.255.450,00	4.255.450,00	3.450.450,00	-805.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			36.124.850,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	205.757.045,00	100.749.575,00	412.468.075,00	206.711.030,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			220.242.450,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan**				**11 %**	**11 %**	**52.714.900,00**	**40.112.900,00**	**109.538.650,00**	**97.285.100,00**							**150.000.000,00**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Instansi Terkait*				50 %	50 %	2.838.000,00	2.837.350,00	2.837.350,00	-650,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.838.000,00	2.837.350,00	2.837.350,00	-650,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase keluarga rentan pangan yang mendapat intervensi* *Persentase Peningkatan Hasil Pemanfaatan Pekarangan*				20 %	20 % 40 %	49.876.900,00	37.275.550,00	106.701.300,00	56.824.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		115.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	12.600.600,00	0,00	0,00	-12.600.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				1 Dokumen	1 Dokumen	33.205.250,00	33.204.950,00	102.630.700,00	69.425.450,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	4.071.050,00	4.070.600,00	4.070.600,00	-450,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan**				**82 %**	**85,1 %**	**50.988.475,00**	**105.407.883,00**	**108.863.677,00**	**49.011.525,00**							**100.000.000,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Masyarakat yang Memahami Zat Berbahaya bagi Pangan* *Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti*				20 %	50 % 70 %	50.988.475,00	105.407.883,00	108.863.677,00	57.875.202,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	21.022.600,00	0,00	0,00	-21.022.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	29.965.875,00	105.407.883,00	108.863.677,00	78.897.802,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							**19.986.211.470,00**	**16.340.705.725,00**	**26.117.013.646,00**	**6.130.802.176,00**							**21.508.060.809,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**19.986.211.470,00**	**16.340.705.725,00**	**26.117.013.646,00**	**6.130.802.176,00**							**21.508.060.809,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**19.986.211.470,00**	**16.340.705.725,00**	**26.117.013.646,00**	**6.130.802.176,00**							**21.508.060.809,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**89 Indeks**	**89 Indeks**	**5.818.187.930,00**	**5.034.920.088,00**	**5.043.209.768,00**	**-757.137.558,00**							**5.061.050.372,00**	
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**5.818.187.930,00**	**5.034.920.088,00**	**5.043.209.768,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**5.061.050.372,00**	-
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penggganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	129.630.900,00	125.577.850,00	125.577.850,00	-4.053.050,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	ASN Dinas LH		123.381.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	26.166.350,00	22.113.550,00	22.113.550,00	-4.052.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			26.166.350,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	97.215.050,00	97.215.500,00	97.215.500,00	450,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			97.215.350,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**5.818.187.930,00**	**5.034.920.088,00**	**5.043.209.768,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**5.061.050.372,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.249.700,00	3.249.450,00	3.249.450,00	-250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	2.999.800,00	2.999.350,00	2.999.350,00	-450,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**5.818.187.930,00**	**5.034.920.088,00**	**5.043.209.768,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**5.061.050.372,00**	-
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	3.829.604.580,00	4.036.222.508,00	4.036.222.508,00	206.617.928,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	ASN Dinas LH		3.558.454.335,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	3.461.204.580,00	3.686.332.508,00	3.686.332.508,00	225.127.928,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			3.332.326.335,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	368.400.000,00	349.890.000,00	349.890.000,00	-18.510.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			226.128.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	198.391.100,00	100.595.200,00	100.595.200,00	-97.795.900,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	ASN Dinas LH		198.924.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	1 Paket	198.391.100,00	100.595.200,00	100.595.200,00	-97.795.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			198.924.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks layanan administrasi perangkat daerah*				75 %	75 %	330.016.500,00	184.698.700,00	184.698.700,00	-145.317.800,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	ASN Dinas LH		181.438.573,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.493.900,00	3.831.050,00	3.831.050,00	-3.662.850,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			1.184.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				26 Paket	26 Paket	17.953.250,00	17.790.450,00	17.790.450,00	-162.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			17.958.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	17.928.200,00	17.247.000,00	17.247.000,00	-681.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			17.928.573,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0 Dokumen	3.150.000,00	0,00	0,00	-3.150.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	5.835.800,00	5.835.850,00	5.835.850,00	50,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			5.838.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	257.656.000,00	119.995.000,00	119.995.000,00	-137.661.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			138.530.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**5.818.187.930,00**	**5.034.920.088,00**	**5.043.209.768,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**5.061.050.372,00**	-
	2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	1 Dokumen	19.999.350,00	19.999.350,00	19.999.350,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**5.818.187.930,00**	**5.034.920.088,00**	**5.043.209.768,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**5.061.050.372,00**	-
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan BMD*				80 %	80 %	742.396.450,00	32.950.450,00	32.950.450,00	-709.446.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	ASN Dinas LH		450.314.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	332.438.000,00	0,00	0,00	-332.438.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			335.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	60.847.750,00	0,00	0,00	-60.847.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	2 Unit	113.627.050,00	32.950.450,00	32.950.450,00	-80.676.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			114.914.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	235.483.650,00	0,00	0,00	-235.483.650,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah*				80 %	80 %	323.704.900,00	338.895.380,00	347.185.060,00	23.480.160,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	ASN Dinas LH		338.317.764,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	1.040.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	500.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			1.040.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				122 Laporan	120 Laporan	84.471.160,00	89.981.640,00	89.981.640,00	5.510.480,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			84.471.524,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	227.693.740,00	236.873.740,00	245.163.420,00	17.469.680,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			242.806.240,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*				80 %	80 %	264.443.500,00	215.980.000,00	215.980.000,00	-48.463.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	ASN Dinas LH		210.220.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			42.950.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	161.450.000,00	165.300.000,00	165.300.000,00	3.850.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			163.210.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	11.490.000,00	11.490.000,00	11.490.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			4.060.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	52.313.500,00	0,00	0,00	-52.313.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti disusun**				**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**113.341.805,00**	**113.341.744,00**	**123.885.124,00**	**325,00**							**113.342.130,00**	
		[Jumlah Dokumen Informasi Lingkungan yang Disusun]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**113.341.805,00**	**113.341.744,00**	**123.885.124,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**113.342.130,00**	-
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Persentase dokumen sebagai komitmen pemenuhan RPPLH*				100 %	100 %	113.341.805,00	113.341.744,00	123.885.124,00	10.543.319,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Payakumbuh		113.342.130,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	113.341.805,00	113.341.744,00	123.885.124,00	10.543.319,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			113.342.130,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**2. Indeks Kualitas Udara 1. Indeks Kualitas Air**				**68,58 Indeks**	**82,97 68,58 Indeks Indeks**	**1.021.173.190,00**	**603.820.100,00**	**758.420.100,00**	**-200.000.030,00**							**821.173.160,00**	
		[Indeks Kualitas Lingkungan Hidup]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.021.173.190,00**	**603.820.100,00**	**758.420.100,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**821.173.160,00**	-
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase industri yang dipantau* *Persentase sungai yang dipantau*				100 % 80 %	100 % 80 %	1.021.173.190,00	603.820.100,00	758.420.100,00	-262.753.090,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Payakumbuh		821.173.160,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				3 Dokumen	3 Dokumen	381.162.300,00	163.809.400,00	163.809.400,00	-217.352.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			381.162.460,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase RTH (Persentase)**				**14,87 %**	**14,91 %**	**1.862.944.530,00**	**1.963.936.796,00**	**2.565.132.916,00**	**-328.222.010,00**							**1.534.722.520,00**	
		[Persentase RTH Publik]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.862.944.530,00**	**1.963.936.796,00**	**2.565.132.916,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**1.534.722.520,00**	-
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Persentase jenis spesies tanaman (flora) lokal yang dikelola* *Persentase RTH kota yang dipelihara dan ditata*				1 % 25 %	1 % 25 %	1.862.944.530,00	1.963.936.796,00	2.565.132.916,00	702.188.386,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Payakumbuh		1.534.722.520,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				5,67 Ha	5,67 Ha	1.862.944.530,00	1.963.936.796,00	2.565.132.916,00	702.188.386,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK AIR TANAH SISA DBH SAWIT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			1.534.722.520,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)**				**50 %**	**50 %**	**12.646.300,00**	**6.909.350,00**	**6.909.350,00**	**10,00**							**12.646.310,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**12.646.300,00**	**6.909.350,00**	**6.909.350,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**12.646.310,00**	-
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase rekomendasi teknis pengumpulan limbah B3 yang dikeluarkan terhadap usaha/ kegiatan yang mengajukan permohonan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah b3*				60 %	60 %	12.646.300,00	6.909.350,00	6.909.350,00	-5.736.950,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Payakumbuh		12.646.310,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota																		
			jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina				6 Usaha	6 Usaha	12.646.300,00	6.909.350,00	6.909.350,00	-5.736.950,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			12.646.310,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota (%)**				**76 %**	**76 %**	**14.848.750,00**	**14.848.750,00**	**14.848.750,00**	**250,00**							**14.849.000,00**	
		[Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**14.848.750,00**	**14.848.750,00**	**14.848.750,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**14.849.000,00**	-
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya kegiatan pengawasan dari usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* *Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya RPPLH*				65 usaha/kegiatan 6 kegiatan	65 usaha/kegiatan 6 kegiatan	14.848.750,00	14.848.750,00	14.848.750,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Payakumbuh		14.849.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				40 Badan Usaha	40 Badan Usaha	14.848.750,00	14.848.750,00	14.848.750,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			14.849.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya**				**20 %**	**20 %**	**779.755.260,00**	**500.255.272,00**	**1.082.851.442,00**	**51.557.680,00**							**831.312.940,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**779.755.260,00**	**500.255.272,00**	**1.082.851.442,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**831.312.940,00**	-
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah kelurahan yang dibina* *Persentase sekolah yang dibina dalam pengelolaan persampahan*				20 %	20 %	779.755.260,00	500.255.272,00	1.082.851.442,00	303.096.182,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Payakumbuh		831.312.940,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				15 Dokumen	15 Dokumen	188.610.260,00	188.610.272,00	284.815.442,00	96.205.182,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			240.167.940,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				200 Orang	200 Orang	591.145.000,00	311.645.000,00	798.036.000,00	206.891.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			591.145.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)**				**95,54 %**	**95,54 %**	**51.557.250,00**	**30.480.800,00**	**30.480.800,00**	**48.442.750,00**							**100.000.000,00**	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase sampah yang terkelola (penanganan dan pengurangan)*				50 %	50 %	51.557.250,00	30.480.800,00	30.480.800,00	-21.076.450,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Payakumbuh Inovatif dalam Pengelolaan Sampah		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				3 Entitas	3 Entitas	51.557.250,00	30.480.800,00	30.480.800,00	-21.076.450,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)**				**96,65 %**	**96,65 %**	**10.311.756.455,00**	**8.072.192.825,00**	**16.491.275.396,00**	**2.707.207.922,00**							**13.018.964.377,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase sarana dan prasarana persampahan dalam kondisi baik*				100 %	100 %	10.311.756.455,00	8.072.192.825,00	16.491.275.396,00	6.179.518.941,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Payakumbuh		13.018.964.377,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				3 Unit	9 Unit	3.657.564.575,00	486.809.575,00	8.215.592.721,00	4.558.028.146,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			4.022.566.662,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				27.375 Ton	27.375 Ton	6.654.191.880,00	7.585.383.250,00	8.275.682.675,00	1.621.490.795,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			8.996.397.715,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN							**19.986.211.470,00**	**16.340.705.725,00**	**26.117.013.646,00**	**6.130.802.176,00**							**21.508.060.809,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**19.986.211.470,00**	**16.340.705.725,00**	**26.117.013.646,00**	**6.130.802.176,00**							**21.508.060.809,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**19.986.211.470,00**	**16.340.705.725,00**	**26.117.013.646,00**	**6.130.802.176,00**							**21.508.060.809,00**	
1.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara**				**68,58 Indeks**	**68,58 Indeks**	**1.021.173.190,00**	**603.820.100,00**	**758.420.100,00**	**-200.000.030,00**							**821.173.160,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase industri yang dipantau* *Persentase sungai yang dipantau*				100 % 80 %	100 % 80 %	1.021.173.190,00	603.820.100,00	758.420.100,00	-262.753.090,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Payakumbuh		821.173.160,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				60 Dokumen	60 Dokumen	640.010.890,00	440.010.700,00	594.610.700,00	-45.400.190,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK AIR TANAH DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			440.010.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**4.617.745.532,00**	**4.959.570.931,00**	**5.017.636.080,00**	**399.890.548,00**							**5.057.237.350,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.617.745.532,00**	**4.959.570.931,00**	**5.017.636.080,00**	**399.890.548,00**							**5.057.237.350,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**4.617.745.532,00**	**4.959.570.931,00**	**5.017.636.080,00**	**399.890.548,00**							**5.057.237.350,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				**94.10 Indeks**	**94,10 indek**	**4.232.570.332,00**	**4.402.962.861,00**	**4.445.679.391,00**	**-340.376.622,00**							**3.892.193.710,00**	
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**Nilai IKM**	**96.60**	**96.34**	**96.40**	-	-	**4.232.570.332,00**	**4.402.962.861,00**	**4.445.679.391,00**	-	-	-	-	-	-	**96.45**	**3.892.193.710,00**	-
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	127.634.300,00	98.886.800,00	98.886.800,00	-28.747.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh		262.987.087,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	10.418.200,00	10.369.600,00	10.369.600,00	-48.600,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			160.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	101.116.100,00	82.077.200,00	82.077.200,00	-19.038.900,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			52.987.087,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	-	-	-	-	-	-	**4.232.570.332,00**	**4.402.962.861,00**	**4.445.679.391,00**	-	-	-	-	-	-	-	**3.892.193.710,00**	-
	2.12.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	8.050.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	-4.830.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	8.050.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	-4.830.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**Nilai IKM**	**96.60**	**96.34**	**96.40**	-	-	**4.232.570.332,00**	**4.402.962.861,00**	**4.445.679.391,00**	-	-	-	-	-	-	**96.45**	**3.892.193.710,00**	-
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	3.466.860.760,00	3.687.601.919,00	3.690.061.919,00	223.201.159,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh		2.800.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	3.207.660.760,00	3.431.881.919,00	3.431.881.919,00	224.221.159,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			2.600.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	259.200.000,00	255.720.000,00	258.180.000,00	-1.020.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	47.484.100,00	0,00	16.000.000,00	-31.484.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	40 Paket	47.484.100,00	0,00	16.000.000,00	-31.484.100,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks layanan administrasi perangkat daerah*				75 %	75 %	155.964.112,00	139.823.862,00	138.508.962,00	-17.455.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh		280.449.613,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.155.800,00	6.155.800,00	6.155.800,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			9.061.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	41.064.812,00	32.972.562,00	31.657.662,00	-9.407.150,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			37.648.423,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6.535.000,00	6.535.000,00	6.535.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			7.045.950,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.245.000,00	4.245.000,00	4.245.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			11.193.540,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.461.500,00	1.368.500,00	1.368.500,00	-2.093.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			10.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	86.452.000,00	85.327.000,00	85.327.000,00	-1.125.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			180.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**4.232.570.332,00**	**4.402.962.861,00**	**4.445.679.391,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**3.892.193.710,00**	-
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.050.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	-4.830.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**Nilai IKM**	**96.60**	**96.34**	**96.40**	-	-	**4.232.570.332,00**	**4.402.962.861,00**	**4.445.679.391,00**	-	-	-	-	-	-	**96.45**	**3.892.193.710,00**	-
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan BMD*				80 %	80 %	6.500.000,00	0,00	30.598.450,00	24.098.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh		96.434.130,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	15 Unit	0,00	0,00	20.298.450,00	20.298.450,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			28.434.130,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	6.500.000,00	0,00	10.300.000,00	3.800.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			68.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah*				80 %	80 %	251.697.060,00	309.720.280,00	292.143.260,00	40.446.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh		232.322.880,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100.497.060,00	114.004.000,00	96.275.260,00	-4.221.800,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			101.402.560,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	151.200.000,00	195.716.280,00	195.868.000,00	44.668.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			130.920.320,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*				80 %	80 %	176.430.000,00	166.930.000,00	179.480.000,00	3.050.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh		180.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			39.190.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	116.650.000,00	116.650.000,00	116.650.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			92.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	26 Unit	20.590.000,00	11.090.000,00	23.640.000,00	3.050.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			48.510.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)** **Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak**				**64** **10 %** **%**	**10** **64 %** **%**	**139.285.250,00**	**153.925.430,00**	**160.518.809,00**	**330.714.750,00**							**470.000.000,00**	
		[Persentase Kepemilikan dokumen Pendaftaran penduduk]	**Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)** **Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak**	**50** **90**	**62** **8**	**10** **70**	-	-	**139.285.250,00**	**153.925.430,00**	**160.518.809,00**	-	-	-	-	-	-	**20** **75**	**470.000.000,00**	-
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Cakupan kepemilikan KK* *Cakupan Kepemilikan KTP el* *Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA*				75 % 98,00 % 99,58 %	75 % 98,00 % 99,58 %	79.021.200,00	113.243.430,00	119.836.809,00	40.815.609,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh		350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	12 Laporan	68.402.900,00	102.625.130,00	109.218.509,00	40.815.609,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			312.267.324,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.618.300,00	10.618.300,00	10.618.300,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			37.732.676,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah laporan hasil pelaksanaan inovasi pelayanan dan sosialisasi*				3 laporan	3 laporan	60.264.050,00	40.682.000,00	40.682.000,00	-19.582.050,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh		120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				12 Dokumen	12 Dokumen	60.264.050,00	40.682.000,00	40.682.000,00	-19.582.050,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan; Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan; Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan; Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan**				**100; 100; 100; 100 %; %; %; %**	**100; 100; 100; 100 %; %; %; %**	**88.927.200,00**	**171.562.790,00**	**180.318.030,00**	**276.072.800,00**							**365.000.000,00**	
		[Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil]	**Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan** **Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan** **Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan** **Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**88.927.200,00**	**171.562.790,00**	**180.318.030,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**365.000.000,00**	-
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-17 tahun* *Cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan* *Cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua peritiwa yang perceraiannya dilaporkan* *Cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua peristiwa yang perkawinannya dilaporkan*				100 % 99,5 %	100 % 99,5 %	69.234.000,00	130.792.540,00	139.547.780,00	70.313.780,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh		300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				12 Dokumen	12 Dokumen	10.998.600,00	10.998.600,00	10.998.600,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			27.474.364,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				12 Layanan	3500 Layanan	58.235.400,00	119.793.940,00	128.549.180,00	70.313.780,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			272.525.636,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Jumlah laporan hasil pelaksanaan inovasi pelayanan dan sosialisasi*				3 laporan	3 laporan	19.693.200,00	40.770.250,00	40.770.250,00	21.077.050,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh		65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				12 Laporan	12 Laporan	19.693.200,00	40.770.250,00	40.770.250,00	21.077.050,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan**				**92 %**	**92 %**	**138.438.800,00**	**213.924.450,00**	**213.924.450,00**	**156.943.660,00**							**295.382.460,00**	
		[Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan]	**Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan**	**95**	**90**	**91**	-	-	**138.438.800,00**	**213.924.450,00**	**213.924.450,00**	-	-	-	-	-	-	**92**	**295.382.460,00**	-
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Terlaksananya pemutakhiran dan pemanfaatan database kependudukan*				3 dokumen	3 dokumen	12.954.250,00	12.954.200,00	12.954.200,00	-50,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh		45.382.460,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				3 Dokumen	3 Dokumen	12.954.250,00	12.954.200,00	12.954.200,00	-50,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			45.382.460,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Terlaksananya penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan melalui hak akses; Tersedianya standarisasi pelayanan dan media publikasi terkait adminduk*				30; 1; 6 OPD; dokumen SP; Media Publikasi	30; 1; 6 OPD; dokumen SP; Media Publikasi	25.484.900,00	95.934.850,00	95.934.850,00	70.449.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				2 Dokumen	2 Dokumen	13.485.300,00	13.935.250,00	13.935.250,00	449.950,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	11.999.600,00	81.999.600,00	81.999.600,00	70.000.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Tersusunnya laporan pembinaan dan pengawasan PIAK*				2 laporan	2 laporan	99.999.650,00	105.035.400,00	105.035.400,00	5.035.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	2 Laporan	99.999.650,00	105.035.400,00	105.035.400,00	5.035.750,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Cakupan pengelolaan profil kependudukan**				**3 Laporan**	**3 Laporan**	**18.523.950,00**	**17.195.400,00**	**17.195.400,00**	**16.137.230,00**							**34.661.180,00**	
		[Penyajian Data Kependudukan skala Kota dalam Satu Tahun]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**18.523.950,00**	**17.195.400,00**	**17.195.400,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**34.661.180,00**	-
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Tersedianya Penyajian data dan Profil Kependudukan*				3 dokumen	3 dokumen	18.523.950,00	17.195.400,00	17.195.400,00	-1.328.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		34.661.180,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	18.523.950,00	17.195.400,00	17.195.400,00	-1.328.550,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			34.661.180,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PERHUBUNGAN							**9.298.390.128,00**	**9.384.571.695,00**	**23.125.809.745,00**	**13.827.419.617,00**							**8.003.591.801,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.298.390.128,00**	**9.384.571.695,00**	**23.125.809.745,00**	**13.827.419.617,00**							**8.003.591.801,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**9.298.390.128,00**	**9.384.571.695,00**	**23.125.809.745,00**	**13.827.419.617,00**							**8.003.591.801,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**85 indeks**	**85 indeks**	**6.580.275.343,00**	**6.784.556.045,00**	**8.194.107.295,00**	**-238.452.582,00**							**6.341.822.761,00**	
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90**	**90**	**90**	-	-	**6.580.275.343,00**	**6.784.556.045,00**	**8.194.107.295,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**6.341.822.761,00**	-
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	98.896.900,00	77.662.325,00	79.568.925,00	-19.327.975,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Dinas Perhubungan		98.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	16.499.800,00	14.625.300,00	5.770.300,00	-10.729.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			16.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	3 Laporan	81.592.100,00	62.044.400,00	72.806.000,00	-8.786.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			82.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**6.580.275.343,00**	**6.784.556.045,00**	**8.194.107.295,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**6.341.822.761,00**	-
	2.15.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	402.500,00	495.475,00	495.475,00	92.975,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	402.500,00	497.150,00	497.150,00	94.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90**	**90**	**90**	-	-	**6.580.275.343,00**	**6.784.556.045,00**	**8.194.107.295,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**6.341.822.761,00**	-
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	5.537.556.345,00	5.771.400.528,00	5.771.400.528,00	233.844.183,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Dinas Perhubungan		5.156.332.624,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	5.144.076.345,00	5.464.170.528,00	5.464.170.528,00	320.094.183,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			4.910.505.424,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	2 Dokumen	393.480.000,00	307.230.000,00	307.230.000,00	-86.250.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			245.827.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	122.403.000,00	73.063.200,00	73.063.200,00	-49.339.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Dinas Perhubungan		110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	2 Paket	122.403.000,00	73.063.200,00	73.063.200,00	-49.339.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks layanan administrasi perangkat daerah*				75 %	75 %	259.078.900,00	130.423.125,00	151.571.325,00	-107.507.575,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Dinas Perhubungan		457.247.450,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	1.790.100,00	1.790.100,00	1.790.100,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			1.801.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	0 Paket	24.830.400,00	0,00	0,00	-24.830.400,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			50.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	29.040.650,00	24.850.125,00	24.850.125,00	-4.190.525,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			29.071.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	31.375.750,00	31.375.750,00	35.934.950,00	4.559.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			122.714.150,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0 Dokumen	2.601.500,00	0,00	0,00	-2.601.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			2.445.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	10 Laporan	169.038.000,00	71.910.000,00	88.499.000,00	-80.539.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			301.166.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**6.580.275.343,00**	**6.784.556.045,00**	**8.194.107.295,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**6.341.822.761,00**	-
	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	402.500,00	497.150,00	497.150,00	94.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90**	**90**	**90**	-	-	**6.580.275.343,00**	**6.784.556.045,00**	**8.194.107.295,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**6.341.822.761,00**	-
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan BMD*				80 %	80 %	18.788.100,00	0,00	1.019.890.750,00	1.001.102.650,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Dinas Perhubungan		150.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			50.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	1 Unit	18.738.100,00	0,00	557.136.750,00	538.398.650,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			50.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**6.580.275.343,00**	**6.784.556.045,00**	**8.194.107.295,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**6.341.822.761,00**	-
	2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	462.754.000,00	462.754.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			50.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90**	**90**	**90**	-	-	**6.580.275.343,00**	**6.784.556.045,00**	**8.194.107.295,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**6.341.822.761,00**	-
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah*				80 %	80 %	201.822.098,00	390.326.867,00	753.082.567,00	551.260.469,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Dinas Perhubungan		84.829.236,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			1.980.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				7 Laporan	3 Laporan	82.842.098,00	72.794.867,00	417.793.767,00	334.951.669,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			82.849.236,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	2 Laporan	117.000.000,00	315.552.000,00	333.308.800,00	216.308.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*				80 %	80 %	341.730.000,00	341.680.000,00	345.530.000,00	3.800.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Dinas Perhubungan		434.763.451,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			42.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	21 Unit	291.610.000,00	291.610.000,00	295.460.000,00	3.850.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			294.470.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	16 Unit	10.880.000,00	10.880.000,00	10.880.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			86.343.451,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase ketersediaan infrastruktur perhubungan yang ramah lingkungan**				**82 %**	**86 %**	**2.718.114.785,00**	**2.600.015.650,00**	**14.931.702.450,00**	**-1.056.345.745,00**							**1.661.769.040,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.718.114.785,00**	**2.600.015.650,00**	**14.931.702.450,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**1.661.769.040,00**	-
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan Infrastruktur Perhubungan yang ramah Lingkungan*				90 %	0 %	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Dinas Perhubungan		50.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			50.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas]	**Persentase ketersediaan infrastruktur perhubungan yang ramah lingkungan**	**90**	**84**	**86**	-	-	**2.718.114.785,00**	**2.600.015.650,00**	**14.931.702.450,00**	-	-	-	-	-	-	**82**	**1.661.769.040,00**	-
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase perlengkapan dan fasilitas pendukung jalan dalam kondisi baik*				90 %	90 %	886.251.050,00	1.327.677.400,00	3.232.379.400,00	2.346.128.350,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Dinas Perhubungan		55.791.040,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				3 Unit	7 Unit	555.803.050,00	759.653.050,00	1.978.667.050,00	1.422.864.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			55.741.040,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				5 Unit	5 Unit	330.448.000,00	568.024.350,00	1.253.712.350,00	923.264.350,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			50.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.718.114.785,00**	**2.600.015.650,00**	**14.931.702.450,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**1.661.769.040,00**	-
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas*				88 %	88 %	1.056.820.735,00	591.331.150,00	1.122.437.550,00	65.616.815,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Dinas Perhubungan		1.136.294.250,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				5 Laporan	1 Laporan	1.027.607.635,00	591.331.150,00	1.122.437.550,00	94.829.915,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			1.136.244.250,00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas]	**Persentase ketersediaan infrastruktur perhubungan yang ramah lingkungan**	**90**	**84**	**86**	-	-	**2.718.114.785,00**	**2.600.015.650,00**	**14.931.702.450,00**	-	-	-	-	-	-	**82**	**1.661.769.040,00**	-
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				3 Laporan	0 Laporan	29.213.100,00	0,00	0,00	-29.213.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			50.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.718.114.785,00**	**2.600.015.650,00**	**14.931.702.450,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**1.661.769.040,00**	-
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas*				88 %	88 %	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Dinas Perhubungan		50.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				1 Laporan	0 Laporan	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			50.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas]	**Persentase ketersediaan infrastruktur perhubungan yang ramah lingkungan**	**90**	**84**	**86**	-	-	**2.718.114.785,00**	**2.600.015.650,00**	**14.931.702.450,00**	-	-	-	-	-	-	**82**	**1.661.769.040,00**	-
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum*				76 %	76 %	50.000,00	0,00	9.887.000.000,00	9.886.950.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Dinas Perhubungan		50.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	0 Laporan	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			50.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.718.114.785,00**	**2.600.015.650,00**	**14.931.702.450,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**1.661.769.040,00**	-
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				-	13 Unit	0,00	0,00	9.887.000.000,00	9.887.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas]	**Persentase ketersediaan infrastruktur perhubungan yang ramah lingkungan**	**90**	**84**	**86**	-	-	**2.718.114.785,00**	**2.600.015.650,00**	**14.931.702.450,00**	-	-	-	-	-	-	**82**	**1.661.769.040,00**	-
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum*				76 %	0 %	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Dinas Perhubungan		50.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			50.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPTD TERMINAL							**9.298.390.128,00**	**9.384.571.695,00**	**23.125.809.745,00**	**13.827.419.617,00**							**8.003.591.801,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.298.390.128,00**	**9.384.571.695,00**	**23.125.809.745,00**	**13.827.419.617,00**							**8.003.591.801,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**9.298.390.128,00**	**9.384.571.695,00**	**23.125.809.745,00**	**13.827.419.617,00**							**8.003.591.801,00**	
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase ketersediaan infrastruktur perhubungan yang ramah lingkungan**				**82 %**	**86 %**	**2.718.114.785,00**	**2.600.015.650,00**	**14.931.702.450,00**	**-1.056.345.745,00**							**1.661.769.040,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.718.114.785,00**	**2.600.015.650,00**	**14.931.702.450,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**1.661.769.040,00**	-
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum*				76 %	0 %	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Dinas Perhubungan		150.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C																		
			Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			50.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C																		
			Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.				7 Orang	0 Orang	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			50.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	0 Unit	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			50.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPTD PARKIR							**9.298.390.128,00**	**9.384.571.695,00**	**23.125.809.745,00**	**13.827.419.617,00**							**8.003.591.801,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.298.390.128,00**	**9.384.571.695,00**	**23.125.809.745,00**	**13.827.419.617,00**							**8.003.591.801,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**9.298.390.128,00**	**9.384.571.695,00**	**23.125.809.745,00**	**13.827.419.617,00**							**8.003.591.801,00**	
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase ketersediaan infrastruktur perhubungan yang ramah lingkungan**				**82 %**	**86 %**	**2.718.114.785,00**	**2.600.015.650,00**	**14.931.702.450,00**	**-1.056.345.745,00**							**1.661.769.040,00**	
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Persentase Kenaikan Pengguna Jasa Parkir*				85 %	85 %	448.467.950,00	483.396.800,00	487.836.000,00	39.368.050,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Dinas Perhubungan		387.009.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				27 Laporan	27 Laporan	448.467.950,00	483.396.800,00	487.836.000,00	39.368.050,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			387.009.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR							**9.298.390.128,00**	**9.384.571.695,00**	**23.125.809.745,00**	**13.827.419.617,00**							**8.003.591.801,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.298.390.128,00**	**9.384.571.695,00**	**23.125.809.745,00**	**13.827.419.617,00**							**8.003.591.801,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**9.298.390.128,00**	**9.384.571.695,00**	**23.125.809.745,00**	**13.827.419.617,00**							**8.003.591.801,00**	
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase ketersediaan infrastruktur perhubungan yang ramah lingkungan**				**82 %**	**86 %**	**2.718.114.785,00**	**2.600.015.650,00**	**14.931.702.450,00**	**-1.056.345.745,00**							**1.661.769.040,00**	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Persentase Kenaikan Kendaraan yang Melakukan Pengujian*				88 %	88 %	146.325.050,00	197.610.300,00	202.049.500,00	55.724.450,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Dinas Perhubungan		82.324.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	7 Unit	12.085.050,00	63.420.300,00	67.859.500,00	55.774.450,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			12.084.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Orang	0 Orang	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			50.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1000 Dokumen	3000 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				8 Unit	7 Unit	59.190.000,00	59.190.000,00	59.190.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			20.190.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**10.210.472.296,00**	**9.406.047.068,00**	**10.891.523.379,00**	**681.051.083,00**							**12.423.870.340,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.210.472.296,00**	**9.406.047.068,00**	**10.891.523.379,00**	**681.051.083,00**							**12.423.870.340,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**9.690.860.266,00**	**9.012.541.946,00**	**10.495.622.961,00**	**804.762.695,00**							**12.192.724.020,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM Nilai IKM Dinas Kominfo Nilai evaluasi AKIP Diskominfo**				**87 Indeks**	**87 92 A Nilai indeks Kategori**	**4.975.798.846,00**	**4.588.525.050,00**	**4.637.967.461,00**	**193.329.264,00**							**5.169.128.110,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**Nilai IKM** **Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**89** **90**	**86.3** **90**	**86.3** **90**	-	-	**4.975.798.846,00**	**4.588.525.050,00**	**4.637.967.461,00**	-	-	-	-	-	-	**87** **90**	**5.169.128.110,00**	-
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penggganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	99.848.100,00	61.192.400,00	67.225.400,00	-32.622.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Masyarakat		71.926.150,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	39.278.500,00	23.580.500,00	23.580.500,00	-15.698.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			26.004.350,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	58.557.100,00	35.599.400,00	42.638.650,00	-15.918.450,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			43.909.300,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**4.975.798.846,00**	**4.588.525.050,00**	**4.637.967.461,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**5.169.128.110,00**	-
	2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				4 Dokumen	0 Dokumen	1.006.250,00	1.006.250,00	0,00	-1.006.250,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.006.250,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	63 Data	1.006.250,00	1.006.250,00	1.006.250,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.006.250,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**Nilai IKM** **Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**89** **90**	**86.3** **90**	**86.3** **90**	-	-	**4.975.798.846,00**	**4.588.525.050,00**	**4.637.967.461,00**	-	-	-	-	-	-	**87** **90**	**5.169.128.110,00**	-
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	4.118.290.476,00	4.040.314.676,00	4.040.085.087,00	-78.205.389,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Masyarakat		4.012.552.310,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	34 Orang/bulan	3.840.220.476,00	3.762.244.676,00	3.762.285.087,00	-77.935.389,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			3.832.356.310,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	278.070.000,00	278.070.000,00	277.800.000,00	-270.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			180.196.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Layanan Kepegawaian*				100 %	0 %	35.360.500,00	0,00	0,00	-35.360.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN		35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				35 Paket	0 Paket	35.360.500,00	0,00	0,00	-35.360.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks layanan administrasi perangkat daerah*				75 %	75 %	435.563.560,00	243.299.310,00	252.173.310,00	-183.390.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN		436.739.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.564.600,00	2.564.600,00	2.564.600,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			2.571.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				18 Paket	1 Paket	44.500,00	44.500,00	8.918.500,00	8.874.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			24.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	50.362.660,00	35.259.410,00	35.259.410,00	-15.103.250,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			31.435.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	16.762.800,00	16.762.800,00	16.762.800,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			20.271.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	8.747.750,00	8.747.750,00	8.747.750,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			7.256.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	70 Laporan	356.075.000,00	178.914.000,00	178.914.000,00	-177.161.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**4.975.798.846,00**	**4.588.525.050,00**	**4.637.967.461,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**5.169.128.110,00**	-
	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				50 Dokumen	150 Dokumen	1.006.250,00	1.006.250,00	1.006.250,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.006.250,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**Nilai IKM** **Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**89** **90**	**86.3** **90**	**86.3** **90**	-	-	**4.975.798.846,00**	**4.588.525.050,00**	**4.637.967.461,00**	-	-	-	-	-	-	**87** **90**	**5.169.128.110,00**	-
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan BMD*				80 %	80 %	43.018.890,00	0,00	30.000.000,00	-13.018.890,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN		299.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	115.440,00	0,00	0,00	-115.440,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	2 Unit	42.903.450,00	0,00	30.000.000,00	-12.903.450,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			99.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah*				80 %	80 %	62.287.320,00	62.288.664,00	67.053.664,00	4.766.344,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN		62.049.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.549.800,00	1.549.800,00	1.549.800,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.549.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60.737.520,00	60.738.864,00	65.503.864,00	4.766.344,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			60.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*				80 %	80 %	181.430.000,00	181.430.000,00	181.430.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Barang Milik Daerah		251.560.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			42.950.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	15 Unit	118.200.000,00	118.200.000,00	118.200.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			185.790.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	26 Unit	24.040.000,00	24.040.000,00	24.040.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			22.820.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah**				**78 %**	**78 %**	**1.088.933.820,00**	**1.150.757.096,00**	**1.941.684.100,00**	**1.173.850.540,00**							**2.262.784.360,00**	
		[Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.088.933.820,00**	**1.150.757.096,00**	**1.941.684.100,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**2.262.784.360,00**	-
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Perangkat Daerah yang mempublikasikan data dan informasi publik melalui PPID dan Persentase penyaluran pengaduan masyarakat melalui LAPOR SP4N ke Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.088.933.820,00	1.150.757.096,00	1.941.684.100,00	852.750.280,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Masyarakat		2.262.784.360,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				6 Permohonan	12 Permohonan	159.893.800,00	138.768.400,00	146.351.260,00	-13.542.540,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			287.481.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.088.933.820,00**	**1.150.757.096,00**	**1.941.684.100,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**2.262.784.360,00**	-
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				5 Media	5 Media	929.040.020,00	1.011.988.696,00	1.795.332.840,00	866.292.820,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.975.302.560,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**				**1.5 Indeks**	**3.84 Indeks**	**3.626.127.600,00**	**3.273.259.800,00**	**3.915.971.400,00**	**1.134.683.950,00**							**4.760.811.550,00**	
		[Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Kominfo, Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**3.626.127.600,00**	**3.273.259.800,00**	**3.915.971.400,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**4.760.811.550,00**	-
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*				80 %	80 %	3.626.127.600,00	3.273.259.800,00	3.915.971.400,00	289.843.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Masyarakat		4.760.811.550,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	3.364.260.650,00	3.109.080.600,00	3.500.590.600,00	136.329.950,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			4.280.944.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**3.626.127.600,00**	**3.273.259.800,00**	**3.915.971.400,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**4.760.811.550,00**	-
	2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE				3 Aplikasi	3 Aplikasi	219.000.000,00	164.179.200,00	415.380.800,00	196.380.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			164.958.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	42.782.050,00	0,00	0,00	-42.782.050,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			240.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																		
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas				6 Dokumen	0 Dokumen	84.900,00	0,00	0,00	-84.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			74.908.750,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**100.654.050,00**	**62.726.350,00**	**62.726.350,00**	**-37.927.700,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Indeks Pembangunan Statistik**				**2.85 Poin**	**2.71 Nilai**	**100.654.050,00**	**62.726.350,00**	**62.726.350,00**	**-654.050,00**							**100.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen statistik yang tersedia* *Persentase Perangkat Daerah terkait yang mengumpulkan data*				55 % 5 buku	4 buku 55 %	100.654.050,00	62.726.350,00	62.726.350,00	-37.927.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.				100 %	100 %	100.654.050,00	62.726.350,00	62.726.350,00	-37.927.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**418.957.980,00**	**330.778.772,00**	**333.174.068,00**	**-85.783.912,00**							**131.146.320,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**				**50 Angka**	**50 Angka**	**418.957.980,00**	**330.778.772,00**	**333.174.068,00**	**-287.811.660,00**							**131.146.320,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi*				90 %	90 %	418.957.980,00	330.778.772,00	333.174.068,00	-85.783.912,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD		131.146.320,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	418.957.980,00	330.778.772,00	333.174.068,00	-85.783.912,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			131.146.320,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH							**11.080.878.689,00**	**12.266.727.211,00**	**17.386.340.509,00**	**6.305.461.820,00**							**11.020.224.160,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.904.377.539,00**	**6.514.848.455,00**	**7.041.416.129,00**	**-862.961.410,00**							**7.403.472.421,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**7.904.377.539,00**	**6.514.848.455,00**	**7.041.416.129,00**	**-862.961.410,00**							**7.403.472.421,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**87,6 Indeks**	**87,6 Indeks**	**7.506.696.314,00**	**6.124.129.510,00**	**6.458.030.936,00**	**-430.906.553,00**							**7.075.789.761,00**	
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**7.506.696.314,00**	**6.124.129.510,00**	**6.458.030.936,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**7.075.789.761,00**	-
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penggganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	75.357.800,00	44.819.250,00	44.819.250,00	-30.538.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Koperasi dan UKM		71.735.650,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	11.383.450,00	3.680.000,00	3.680.000,00	-7.703.450,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			15.408.750,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	59.949.350,00	39.529.250,00	39.529.250,00	-20.420.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			56.326.900,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**7.506.696.314,00**	**6.124.129.510,00**	**6.458.030.936,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**7.075.789.761,00**	-
	2.17.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.012.500,00	805.000,00	805.000,00	-1.207.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**7.506.696.314,00**	**6.124.129.510,00**	**6.458.030.936,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**7.075.789.761,00**	-
	2.17.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	2.012.500,00	805.000,00	805.000,00	-1.207.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	5.118.020.936,00	5.121.273.867,00	5.144.293.867,00	26.272.931,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Koperasi dan UKM		4.792.886.923,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4.749.953.936,00	4.753.206.867,00	4.753.206.867,00	3.252.931,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			4.552.515.373,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	368.067.000,00	368.067.000,00	391.087.000,00	23.020.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			240.371.550,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	0 %	42.432.600,00	0,00	0,00	-42.432.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Koperasi dan UKM		40.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	0 Paket	42.432.600,00	0,00	0,00	-42.432.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			40.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks layanan administrasi perangkat daerah*				75 %	75 %	296.645.975,00	257.076.800,00	295.426.800,00	-1.219.175,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Koperasi dan UKM		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5.329.200,00	5.329.200,00	5.329.200,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	3 Paket	0,00	0,00	38.350.000,00	38.350.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.323.575,00	16.330.700,00	16.330.700,00	-5.992.875,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.381.650,00	23.711.400,00	23.711.400,00	-5.670.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.736.500,00	4.180.000,00	4.180.000,00	-1.556.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	12.959.550,00	6.724.500,00	6.724.500,00	-6.235.050,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	218.903.000,00	199.996.000,00	199.996.000,00	-18.907.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.012.500,00	805.000,00	805.000,00	-1.207.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan BMD*				80 %	80 %	139.639.650,00	0,00	242.552.150,00	102.912.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Koperasi dan UKM		77.110.750,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	64.438.000,00	0,00	32.219.000,00	-32.219.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	8 Unit	30.156.000,00	0,00	33.983.800,00	3.827.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			29.848.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	15 Unit	45.045.650,00	0,00	176.349.350,00	131.303.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			47.262.750,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah*				80 %	80 %	1.517.171.103,00	296.672.593,00	326.651.869,00	-1.190.519.234,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Koperasi dan UKM		1.661.247.348,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	89.841.963,00	92.350.763,00	101.858.861,00	12.016.898,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			87.380.468,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8.890.000,00	8.890.000,00	9.890.000,00	1.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.418.439.140,00	195.431.830,00	214.903.008,00	-1.203.536.132,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.573.866.880,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*				80 %	80 %	317.428.250,00	404.287.000,00	404.287.000,00	86.858.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Koperasi dan UKM		432.809.090,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			42.950.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	28 Unit	196.100.000,00	188.400.000,00	188.400.000,00	-7.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			188.400.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				17 Unit	17 Unit	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.360.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	80.858.250,00	175.417.000,00	175.417.000,00	94.558.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			200.099.090,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**				**40.56 %**	**60 36,84 % %**	**19.999.150,00**	**19.999.150,00**	**19.999.150,00**	**50,00**							**19.999.200,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**19.999.150,00**	**19.999.150,00**	**19.999.150,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**19.999.200,00**	-
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Koperasi yang diawasi kelembagaannya*				60 Koperasi	60 Koperasi	19.999.150,00	19.999.150,00	19.999.150,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	koperasi		19.999.200,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	19.999.150,00	19.999.150,00	19.999.150,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			19.999.200,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi Aktif**				**50 %**	**60,53 %**	**14.999.250,00**	**14.999.250,00**	**14.999.250,00**	**550,00**							**14.999.800,00**	
		[Persentase penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan willayah keanggotaan dalam daerah Kab/ Kota]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**14.999.250,00**	**14.999.250,00**	**14.999.250,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**14.999.800,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah KSP/USP yang diawasi dan dinilai kinerja simpan pinjamnya*				60 Koperasi	60 Koperasi	14.999.250,00	14.999.250,00	14.999.250,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	koperasi		14.999.800,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				52 Unit Usaha	52 Unit Usaha	14.999.250,00	14.999.250,00	14.999.250,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			14.999.800,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota**				**42 %**	**10,94 65 % %**	**129.999.200,00**	**216.374.220,00**	**230.785.610,00**	**-49.999.590,00**							**79.999.610,00**	
		[Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**129.999.200,00**	**216.374.220,00**	**230.785.610,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**79.999.610,00**	-
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang diperkuat SDM nya*				120 Pengelola Koperasi	120 Pengelola Koperasi	129.999.200,00	216.374.220,00	230.785.610,00	100.786.410,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Koperasi		79.999.610,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				50 Orang	50 Orang	129.999.200,00	216.374.220,00	230.785.610,00	100.786.410,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			79.999.610,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas**				**23,78 %**	**11,54 %**	**19.999.850,00**	**19.999.850,00**	**51.339.050,00**	**-19.999.850,00**							**0,00**	
		[Persentase koperasi yang aktif/ berdaya]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**19.999.850,00**	**19.999.850,00**	**51.339.050,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				30 Kelompok Masyarakat	-	19.999.850,00	19.999.850,00	51.339.050,00	31.339.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Kelompok Masyarakat		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi																		
			Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan				30 Kelompok Masyarakat	30 Kelompok Masyarakat	19.999.850,00	19.999.850,00	51.339.050,00	31.339.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Pertumbuhan Wirausaha Persentase Usaha Kecil yang Bertansformasi dari Informal ke Formal**				**23.78 12.35 % %**	**12.35 4,95 % %**	**113.336.775,00**	**19.999.475,00**	**19.999.475,00**	**125,00**							**113.336.900,00**	
		[Persentase usaha mikro yang meningkat statusnya dari non formal menjadi formal (legalitas usaha)]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**113.336.775,00**	**19.999.475,00**	**19.999.475,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**113.336.900,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi legalitas usaha*				0,20 %	0,20 %	113.336.775,00	19.999.475,00	19.999.475,00	-93.337.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	UMKM		113.336.900,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				25 Unit Usaha	0 Unit Usaha	93.337.300,00	0,00	0,00	-93.337.300,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			93.337.350,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	19.999.475,00	19.999.475,00	19.999.475,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			19.999.550,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Proporsi UKM menjalin Kemitraan dan Ekspor**				**1.99 %**	**1.99 %**	**99.347.000,00**	**99.347.000,00**	**246.262.658,00**	**150,00**							**99.347.150,00**	
		[Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**99.347.000,00**	**99.347.000,00**	**246.262.658,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**99.347.150,00**	-
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Persentase Usaha mikro yang difasilitasi perluasan jaringan pasarnya*				0,10 %	0,10 %	99.347.000,00	99.347.000,00	246.262.658,00	146.915.658,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	UMKM		99.347.150,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan																		
			Jumlah yang Difasilitasi				60 Orang	60 Orang	99.347.000,00	99.347.000,00	246.262.658,00	146.915.658,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			99.347.150,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**3.176.501.150,00**	**5.751.878.756,00**	**10.344.924.380,00**	**7.168.423.230,00**							**3.616.751.739,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**3.176.501.150,00**	**5.751.878.756,00**	**10.344.924.380,00**	**7.168.423.230,00**							**3.616.751.739,00**	
1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi**				**23.75 %**	**100 %**	**19.679.200,00**	**19.679.200,00**	**19.679.200,00**	**150,00**							**19.679.350,00**	
		[Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin usaha]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**19.679.200,00**	**19.679.200,00**	**19.679.200,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**19.679.350,00**	-
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)*				65 %	65 %	19.679.200,00	19.679.200,00	19.679.200,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pelaku Usaha		19.679.350,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				1 Laporan	1 Laporan	19.679.200,00	19.679.200,00	19.679.200,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			19.679.350,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan Kualitasnya**				**90 %**	**90 %**	**2.737.327.100,00**	**5.196.691.080,00**	**9.385.325.814,00**	**317.347.739,00**							**3.054.674.839,00**	
		[Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang mematuhi SOP, Persentase sarana dan prasarana pasar/pertokoan dalam kondisi baik]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.737.327.100,00**	**5.196.691.080,00**	**9.385.325.814,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**3.054.674.839,00**	-
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Sarana distribusi perdagangan yang disediakan*				4 unit	4 unit	1.671.757.850,00	4.110.584.940,00	8.208.458.244,00	6.536.700.394,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pelaku Usaha		1.321.437.989,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	2 Unit	1.437.573.100,00	3.010.773.560,00	6.503.635.560,00	5.066.062.460,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			844.643.337,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				4 Unit	4 Unit	234.184.750,00	1.099.811.380,00	1.704.822.684,00	1.470.637.934,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			476.794.652,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Persentase pelanggaran Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Pasar Persentase Pelanggaran Perda No. 13 Tahun 2016 tentang Pasar Tradisional Persentase Pelanggaran Perda No. 19 Tahun 2011 tenang Retribusi Jasa Usaha Persentase Pelanggaran Perda No. 9 Tahun 2010 tentang Pedagang Kaki Lima*				2 %	2 %	1.065.569.250,00	1.086.106.140,00	1.176.867.570,00	111.298.320,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pelaku Usaha		1.733.236.850,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.065.569.250,00	1.086.106.140,00	1.176.867.570,00	111.298.320,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			1.733.236.850,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**				**4.17 %**	**19,23 %**	**113.898.350,00**	**267.012.890,00**	**665.247.470,00**	**13.603.000,00**							**127.501.350,00**	
		[Persentase peningkatan jumlah komoditi yang diperdagangkan]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**113.898.350,00**	**267.012.890,00**	**665.247.470,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**127.501.350,00**	-
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok*				97 %	97 %	99.206.000,00	129.205.500,00	519.205.000,00	419.999.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pelaku Usaha		116.886.100,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	9.840.100,00	19.839.750,00	19.839.750,00	9.999.650,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			15.450.050,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				1 Laporan	1 Laporan	9.840.050,00	19.839.950,00	19.839.950,00	9.999.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			15.960.250,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	79.525.850,00	89.525.800,00	479.525.300,00	399.999.450,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			85.475.800,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kinerja realisasi pupuk*				90 %	90 %	14.692.350,00	137.807.390,00	146.042.470,00	131.350.120,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pelaku Usaha		10.615.250,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan																		
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.345.550,00	120.460.590,00	128.695.670,00	121.350.120,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			10.615.250,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 Laporan	1 Laporan	7.346.800,00	17.346.800,00	17.346.800,00	10.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen**				**56.15 %**	**100 %**	**52.586.700,00**	**66.799.156,00**	**66.799.156,00**	**6.500.000,00**							**59.086.700,00**	
		[Persentase pelaku usaha yang tertib niaga]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**52.586.700,00**	**66.799.156,00**	**66.799.156,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**59.086.700,00**	-
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah Potensi alat UTTP yang dilakukan tera ulang*				1800 unit	1800 unit	52.586.700,00	66.799.156,00	66.799.156,00	14.212.456,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pelaku Usaha		59.086.700,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				895 Unit	895 Unit	52.586.700,00	66.799.156,00	66.799.156,00	14.212.456,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			59.086.700,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Promosi Produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan**				**4 %**	**80 %**	**253.009.800,00**	**201.696.430,00**	**207.872.740,00**	**102.799.700,00**							**355.809.500,00**	
		[Jumlah kerjasama perdagangan]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**253.009.800,00**	**201.696.430,00**	**207.872.740,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**355.809.500,00**	-
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah Event yang dilaksanakan*				4 kali	4 kali	253.009.800,00	201.696.430,00	207.872.740,00	-45.137.060,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	UMKM		355.809.500,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				1 UMKM	1 UMKM	88.728.150,00	24.357.150,00	24.357.150,00	-64.371.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			88.728.150,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		UPTD PROMOSI PRODUK UMKM							**11.080.878.689,00**	**12.266.727.211,00**	**17.386.340.509,00**	**6.305.461.820,00**							**11.020.224.160,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**3.176.501.150,00**	**5.751.878.756,00**	**10.344.924.380,00**	**7.168.423.230,00**							**3.616.751.739,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**3.176.501.150,00**	**5.751.878.756,00**	**10.344.924.380,00**	**7.168.423.230,00**							**3.616.751.739,00**	
1.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Promosi Produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan**				**4 %**	**4 %**	**253.009.800,00**	**201.696.430,00**	**207.872.740,00**	**102.799.700,00**							**355.809.500,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**253.009.800,00**	**201.696.430,00**	**207.872.740,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**355.809.500,00**	-
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah Event yang dilaksanakan*				4 kali	4 kali	253.009.800,00	201.696.430,00	207.872.740,00	-45.137.060,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	UMKM		355.809.500,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				4 UMKM	4 UMKM	164.281.650,00	177.339.280,00	183.515.590,00	19.233.940,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			267.081.350,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**4.700.143.926,00**	**4.352.696.209,00**	**4.407.206.105,00**	**-292.937.821,00**							**4.902.436.740,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.700.143.926,00**	**4.352.696.209,00**	**4.407.206.105,00**	**-292.937.821,00**							**4.902.436.740,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**4.700.143.926,00**	**4.352.696.209,00**	**4.407.206.105,00**	**-292.937.821,00**							**4.902.436.740,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Evaluasi AKIP DPMPTSP oleh Inspektorat Nilai IKM DPMPTSP**				**3,74 Indeks**	**A 99,03 kategori Indeks**	**4.384.451.086,00**	**4.265.492.459,00**	**4.320.002.355,00**	**72.985.654,00**							**4.457.436.740,00**	
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90**	**90**	**90**	-	-	**4.384.451.086,00**	**4.265.492.459,00**	**4.320.002.355,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**4.457.436.740,00**	-
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelayanan publik*				100 %	100 %	26.162.000,00	14.050.800,00	17.659.700,00	-8.502.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN DPMPTSP		23.022.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	13.000.250,00	6.706.550,00	10.315.450,00	-2.684.800,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			10.022.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	10.183.250,00	6.539.250,00	6.539.250,00	-3.644.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**4.384.451.086,00**	**4.265.492.459,00**	**4.320.002.355,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**4.457.436.740,00**	-
	2.18.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.489.250,00	402.500,00	402.500,00	-1.086.750,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	1.489.250,00	402.500,00	402.500,00	-1.086.750,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90**	**90**	**90**	-	-	**4.384.451.086,00**	**4.265.492.459,00**	**4.320.002.355,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**4.457.436.740,00**	-
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	3.150.838.921,00	3.261.772.038,00	3.261.772.038,00	110.933.117,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN DPMPTSP		3.040.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.974.438.921,00	3.129.172.038,00	3.129.172.038,00	154.733.117,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			2.900.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	176.400.000,00	132.600.000,00	132.600.000,00	-43.800.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			140.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	0 %	74.504.700,00	0,00	0,00	-74.504.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN DPMPTSP		75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	0 Paket	49.504.700,00	0,00	0,00	-49.504.700,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	0 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks layanan administrasi perangkat daerah*				75 %	75 %	195.821.245,00	84.858.845,00	103.402.565,00	-92.418.680,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN DPMPTSP		159.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	8.001.300,00	5.571.850,00	5.571.850,00	-2.429.450,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	30.000.345,00	22.551.695,00	34.268.015,00	4.267.670,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	9.999.700,00	4.686.100,00	10.437.600,00	437.900,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	0 Dokumen	3.300.000,00	0,00	0,00	-3.300.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			3.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	4.445.650,00	3.495.700,00	4.571.600,00	125.950,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			4.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	138.585.000,00	48.151.000,00	48.151.000,00	-90.434.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**4.384.451.086,00**	**4.265.492.459,00**	**4.320.002.355,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**4.457.436.740,00**	-
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.489.250,00	402.500,00	402.500,00	-1.086.750,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90**	**90**	**90**	-	-	**4.384.451.086,00**	**4.265.492.459,00**	**4.320.002.355,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**4.457.436.740,00**	-
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah*				80 %	80 %	688.894.220,00	688.380.776,00	720.738.052,00	31.843.832,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN DPMPTSP		829.824.440,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	62.614.220,00	62.614.220,00	62.614.220,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	626.280.000,00	625.766.556,00	658.123.832,00	31.843.832,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			779.824.440,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*				80 %	80 %	248.230.000,00	216.430.000,00	216.430.000,00	-31.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN DPMPTSP		330.590.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			42.950.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	190.200.000,00	158.500.000,00	158.500.000,00	-31.700.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			238.900.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	18.740.000,00	18.740.000,00	18.740.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			18.740.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**4.384.451.086,00**	**4.265.492.459,00**	**4.320.002.355,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**4.457.436.740,00**	-
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Realisasi Total terhadap Target Investasi**				**100 %**	**0 Persentase**	**53.388.500,00**	**0,00**	**0,00**	**6.611.500,00**							**60.000.000,00**	
		[Persentase peningkatan informasi peluang investasi daerah]	**Realisasi Total terhadap Target Investasi**	**100**	**292.72**	**100**	-	-	**53.388.500,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**60.000.000,00**	-
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Persentase pembuatan peta potensi investasi yang telah divalidasi*				25 %	0 %	53.388.500,00	0,00	0,00	-53.388.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pelaku usaha		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	53.388.500,00	0,00	0,00	-53.388.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi**				**10 %**	**0 Persentase**	**40.707.810,00**	**0,00**	**0,00**	**14.292.190,00**							**55.000.000,00**	
		[Persentase peningkatan Jumlah Investor]	**Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi**	**10**	**0**	**10**	-	-	**40.707.810,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**10**	**55.000.000,00**	-
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal*				25 %	0 %	40.707.810,00	0,00	0,00	-40.707.810,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pelaku usaha		55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	40.707.810,00	0,00	0,00	-40.707.810,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan**				**100 %**	**100 Persentase**	**160.166.030,00**	**87.203.750,00**	**87.203.750,00**	**49.833.970,00**							**210.000.000,00**	
		[Persentase penerbitan dokumen perizinan berusaha dan non perizinan]	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**160.166.030,00**	**87.203.750,00**	**87.203.750,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**210.000.000,00**	-
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang sesuai dengan SOP*				100 %	100 %	160.166.030,00	87.203.750,00	87.203.750,00	-72.962.280,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pelaku usaha		210.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1000 Pelaku Usaha	1000 Pelaku Usaha	159.966.030,00	87.203.750,00	87.203.750,00	-72.762.280,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			160.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				20 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				75 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha**				**10 %**	**0 Persentase**	**21.430.600,00**	**0,00**	**0,00**	**58.569.400,00**							**80.000.000,00**	
		[Jumlah fasilitasi kepada pelaku usaha dalam meningkatan kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan investasi]	**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha**	**100**	**100**	**100**	-	-	**21.430.600,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**80.000.000,00**	-
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase perusahaan yang menyampaikan Laporan kegiatan Penanaman Modal*				60 %	0 %	21.430.600,00	0,00	0,00	-21.430.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pelaku usaha		80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				3 Kegiatan Usaha.	0 Kegiatan Usaha.	9.430.600,00	0,00	0,00	-9.430.600,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				3 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal**				**100 %**	**0 Persentase**	**39.999.900,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**							**40.000.000,00**	
		[Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan berusaha dan non perizinan]	**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**	**100**	**100**	**100**	-	-	**39.999.900,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**40.000.000,00**	-
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase capaian ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan*				100 %	0 %	39.999.900,00	0,00	0,00	-39.999.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat/ Pelaku Usaha		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	0 Dokumen	39.999.900,00	0,00	0,00	-39.999.900,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**3.825.897.419,00**	**4.619.084.981,00**	**4.627.274.930,00**	**801.377.511,00**							**4.522.213.490,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.825.897.419,00**	**4.619.084.981,00**	**4.627.274.930,00**	**801.377.511,00**							**4.522.213.490,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3.651.792.209,00**	**4.413.426.721,00**	**4.421.616.220,00**	**769.824.011,00**							**4.286.290.990,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**87,00 Indeks**	**87,00 Indeks**	**3.409.248.509,00**	**3.786.149.421,00**	**3.794.338.920,00**	**533.185.881,00**							**3.942.434.390,00**	
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**3.409.248.509,00**	**3.786.149.421,00**	**3.794.338.920,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**3.942.434.390,00**	-
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	9.325.600,00	9.325.600,00	8.727.600,00	-598.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		16.016.825,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.956.700,00	5.956.700,00	5.956.700,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			6.865.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	2.172.900,00	2.172.900,00	2.172.900,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			5.526.325,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**3.409.248.509,00**	**3.786.149.421,00**	**3.794.338.920,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**3.942.434.390,00**	-
	2.23.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	598.000,00	598.000,00	0,00	-598.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				23 Data	23 Data	598.000,00	598.000,00	598.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			3.625.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**3.409.248.509,00**	**3.786.149.421,00**	**3.794.338.920,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**3.942.434.390,00**	-
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	2.501.929.155,00	2.792.212.967,00	2.788.492.967,00	286.563.812,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN DPK dan Kota Payakumbuh		2.819.352.735,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.301.649.155,00	2.587.492.967,00	2.587.492.967,00	285.843.812,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			2.680.912.735,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	200.280.000,00	204.720.000,00	201.000.000,00	720.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			138.440.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				75 %	0,00 %	23.236.900,00	0,00	0,00	-23.236.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pegawai DPK		26.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				23 Paket	0 Paket	23.236.900,00	0,00	0,00	-23.236.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			26.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks layanan administrasi perangkat daerah*				75 %	75 %	170.041.600,00	150.495.600,00	150.721.400,00	-19.320.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Layanan Umum DPK		220.526.602,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.529.350,00	6.529.350,00	6.529.350,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			7.511.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.641.700,00	11.641.700,00	11.641.700,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			14.375.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	10 Paket	17.516.600,00	23.767.600,00	23.993.400,00	6.476.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			19.192.925,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	13.218.500,00	13.218.500,00	13.218.500,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			15.124.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	13.272.500,00	13.272.500,00	13.272.500,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			15.509.302,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	5.012.950,00	5.012.950,00	5.012.950,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			5.678.975,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	15 Laporan	101.426.000,00	57.352.000,00	57.352.000,00	-44.074.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			136.784.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**3.409.248.509,00**	**3.786.149.421,00**	**3.794.338.920,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**3.942.434.390,00**	-
	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.424.000,00	19.701.000,00	19.701.000,00	18.277.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			6.350.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**3.409.248.509,00**	**3.786.149.421,00**	**3.794.338.920,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**3.942.434.390,00**	-
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan BMD*				80 %	80 %	200.000,00	0,00	49.237.050,00	49.037.050,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sarana dan Prasarana Kantor		115.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	3 Unit	100.000,00	0,00	49.237.050,00	49.137.050,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			115.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah*				80 %	80 %	512.456.534,00	618.056.534,00	580.101.183,00	67.644.649,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Layanan Umum DPK		593.187.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	121.388.669,00	121.388.669,00	74.487.083,00	-46.901.586,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			139.597.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	391.067.865,00	496.667.865,00	505.614.100,00	114.546.235,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			453.589.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*				80 %	80 %	192.058.720,00	216.058.720,00	217.058.720,00	25.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sarana dan Prasarana Kantor		267.235.528,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			49.392.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	12 Unit	122.950.000,00	146.950.000,00	146.950.000,00	24.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			182.930.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				31 Unit	31 Unit	29.918.720,00	29.918.720,00	30.918.720,00	1.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			34.912.528,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat**				**66,30 Nilai**	**66,30 Nilai**	**230.140.650,00**	**604.678.000,00**	**604.678.000,00**	**99.573.850,00**							**329.714.500,00**	
		[Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**230.140.650,00**	**604.678.000,00**	**604.678.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**329.714.500,00**	-
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Anggota Perpustakaan* *Jumlah perpustakaan yang dibina*				2400 Orang 47 Pustaka	2900 Orang 38 Pustaka	175.249.250,00	366.380.000,00	366.380.000,00	191.130.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Kelurahan		251.457.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				120 Perpustakaan	120 Perpustakaan	113.978.650,00	105.158.650,00	105.158.650,00	-8.820.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			131.288.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	100.000,00	88.417.000,00	88.417.000,00	88.317.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			115.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				325 Eksemplar	325 Eksemplar	55.222.400,00	55.222.400,00	55.222.400,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			63.553.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**230.140.650,00**	**604.678.000,00**	**604.678.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**329.714.500,00**	-
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				-	20 Eksemplar	0,00	111.633.750,00	111.633.750,00	111.633.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			49.575.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		[Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**230.140.650,00**	**604.678.000,00**	**604.678.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**329.714.500,00**	-
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	5.948.200,00	5.948.200,00	5.948.200,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			6.925.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pengunjung perpustakaan Jumlah peserta lomba literasi*				120 Orang 9000 Orang	120 Orang 19000 Orang	54.891.400,00	238.298.000,00	238.298.000,00	183.406.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Kelurahan		78.257.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				40 Perpustakaan	0 Perpustakaan	29.513.700,00	0,00	0,00	-29.513.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			33.940.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**230.140.650,00**	**604.678.000,00**	**604.678.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**329.714.500,00**	-
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				-	6 Orang	0,00	172.195.000,00	172.195.000,00	172.195.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			15.124.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		[Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**230.140.650,00**	**604.678.000,00**	**604.678.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**329.714.500,00**	-
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				1 Lokus	1 Lokus	25.377.700,00	66.103.000,00	66.103.000,00	40.725.300,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			29.191.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki**				**-**	**2,05 %**	**12.403.050,00**	**22.599.300,00**	**22.599.300,00**	**1.739.050,00**							**14.142.100,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**12.403.050,00**	**22.599.300,00**	**22.599.300,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**14.142.100,00**	-
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	*Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan*				-	2,05 %	0,00	10.196.250,00	10.196.250,00	10.196.250,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota		115.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																		
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				-	1 Eksemplar	0,00	10.196.250,00	10.196.250,00	10.196.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			115.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		[Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**12.403.050,00**	**22.599.300,00**	**22.599.300,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**14.142.100,00**	-
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah koleksi budaya Etnis Nusantara yang ditemukan*				100 Eksemplar	100 Eksemplar	12.403.050,00	12.403.050,00	12.403.050,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Bahan Pustaka		14.027.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																		
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				100 Eksemplar	100 Eksemplar	12.403.050,00	12.403.050,00	12.403.050,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			14.027.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**174.105.210,00**	**205.658.260,00**	**205.658.710,00**	**31.553.500,00**							**235.922.500,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Tingkat ketersediaan arsip**				**70,30 %**	**70,30 %**	**174.105.210,00**	**205.658.260,00**	**205.658.710,00**	**61.817.290,00**							**235.922.500,00**	
		[Tingkat ketersediaan arsip]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**174.105.210,00**	**205.658.260,00**	**205.658.710,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**235.922.500,00**	-
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip dinamis sesuai standar kearsipan*				41,25 %	41,25 %	54.612.600,00	54.612.600,00	65.802.550,00	11.189.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Arsip Dinamis Kota Payakumbuh		91.504.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	54.612.600,00	54.612.600,00	47.802.550,00	-6.810.050,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			62.804.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis				-	2 Unit	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			28.700.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen/arsip statis yang diterima*				550 Arsip	550 Arsip	64.746.010,00	64.746.010,00	53.556.510,00	-11.189.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Asrip Statis Kota Payakumbuh		74.459.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				500 Arsip	500 Arsip	64.746.010,00	64.746.010,00	53.556.510,00	-11.189.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			74.459.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Persentase peserta sosialisasi yang meningkat pemahamannya dalam mengelola arsip*				20,00 %	20,00 %	54.746.600,00	86.299.650,00	86.299.650,00	31.553.050,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pengelola Arsip dan PD Kota Payakumbuh		69.958.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	2 Laporan	54.746.600,00	86.299.650,00	86.299.650,00	31.553.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			69.958.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA							**13.364.997.893,00**	**11.143.208.125,00**	**12.490.733.894,00**	**-874.263.999,00**							**17.046.411.720,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.643.706.471,00**	**4.314.618.570,00**	**5.641.978.640,00**	**-1.001.727.831,00**							**9.553.668.222,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**4.848.809.221,00**	**2.884.524.170,00**	**4.211.884.240,00**	**-636.924.981,00**							**6.340.251.478,00**	
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Rasio Wirausaha Pemuda**				**65 %**	**65 %**	**118.591.225,00**	**47.247.450,00**	**47.247.450,00**	**11.860.800,00**							**130.452.025,00**	
		[Persentase pemuda yang berwirausaha]	**Rasio Wirausaha Pemuda**	**75**	**65**	**65**	-	-	**118.591.225,00**	**47.247.450,00**	**47.247.450,00**	-	-	-	-	-	-	**65**	**130.452.025,00**	-
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan kader, pemuda pelopor dan wirausaha muda dan pelatihan paskibraka*				3 kegiatan	3 kegiatan	60.076.250,00	18.779.000,00	26.802.750,00	-33.273.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Organisasi Kepemudaan Kota Payakumbuh		66.085.525,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				1 Kegiatan	1 Kegiatan	31.815.900,00	18.779.000,00	26.802.750,00	-5.013.150,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			34.997.875,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				5 Orang	0 Orang	28.260.350,00	0,00	0,00	-28.260.350,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			31.087.650,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah organisasi yang diberdayakan dan dikembangkan*				30 OKP	30 OKP	58.514.975,00	28.468.450,00	20.444.700,00	-38.070.275,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Organisasi Kepemudaan Kota Payakumbuh		64.366.500,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				34 Orang	34 Orang	58.514.975,00	28.468.450,00	20.444.700,00	-38.070.275,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			64.366.500,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas Peningkatan prestasi olahraga (tingkat daerah**				**15 medali**	**15 55 % medali**	**4.287.752.896,00**	**2.501.743.220,00**	**3.829.103.290,00**	**1.435.333.957,00**							**5.723.086.853,00**	
		[Jumlah medali pada event olahraga tingkat daerah]	**Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas**	**19**	**14**	**14**	-	-	**4.287.752.896,00**	**2.501.743.220,00**	**3.829.103.290,00**	-	-	-	-	-	-	**15**	**5.723.086.853,00**	-
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase guru/pelatih yang aktif membina pelajar dalam cabang olahraga*				80 %	80 %	866.767.221,00	794.956.795,00	1.313.701.865,00	446.934.644,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh		1.401.215.013,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				2 Unit	5 Unit	805.103.871,00	759.677.845,00	1.278.422.915,00	473.319.044,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			1.333.385.328,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				1 Dokumen	1 Dokumen	61.663.350,00	35.278.950,00	35.278.950,00	-26.384.400,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			67.829.685,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah kompetisi / event olahraga yang diselenggarakan*				5 event	5 event	3.371.025.800,00	1.653.663.800,00	2.444.687.800,00	-926.338.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh		3.991.928.765,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	2 Kegiatan	3.213.049.450,00	1.563.831.800,00	2.354.855.800,00	-858.193.650,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH SISA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			3.488.154.505,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota																		
			Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan	94.999.150,00	58.605.200,00	58.605.200,00	-36.393.950,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			434.499.120,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				27 Orang	20 Orang	62.977.200,00	31.226.800,00	31.226.800,00	-31.750.400,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			69.275.140,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*jumlah olahraga rekreasi dan saran prasarana olahraga yang dikembangkan*				2 event / unit	2 event / unit	49.959.875,00	53.122.625,00	70.713.625,00	20.753.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh		329.943.075,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional																		
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				2 Lembaga	1 Lembaga	49.959.875,00	53.122.625,00	70.713.625,00	20.753.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			329.943.075,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan**				**65 peringkat**	**65 %**	**442.465.100,00**	**335.533.500,00**	**335.533.500,00**	**44.247.500,00**							**486.712.600,00**	
		[Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan]	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan**	**75**	**65**	**65**	-	-	**442.465.100,00**	**335.533.500,00**	**335.533.500,00**	-	-	-	-	-	-	**65**	**486.712.600,00**	-
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan*				1 organisasi kepramukaan	1 organisasi kepramukaan	442.465.100,00	335.533.500,00	335.533.500,00	-106.931.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	kwarcab kota payakumbuh		486.712.600,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	442.465.100,00	335.533.500,00	335.533.500,00	-106.931.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			486.712.600,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**1.794.897.250,00**	**1.430.094.400,00**	**1.430.094.400,00**	**-364.802.850,00**							**3.213.416.744,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan**				**75 %**	**75 %**	**1.544.908.250,00**	**1.363.331.050,00**	**1.374.557.850,00**	**1.411.395.660,00**							**2.956.303.910,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Persentase objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan]	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan**	**85**	**75**	**75**	-	-	**1.544.908.250,00**	**1.363.331.050,00**	**1.374.557.850,00**	-	-	-	-	-	-	**75**	**2.956.303.910,00**	-
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah cagar budaya yang dilestarikan*				3 karya budaya	3 karya budaya	67.550.100,00	61.330.350,00	61.330.350,00	-6.219.750,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Masyarakat Kota Payakumbuh		74.305.110,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				3 Objek	3 Objek	67.550.100,00	61.330.350,00	61.330.350,00	-6.219.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			74.305.110,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah event kesenian tradisional yang dilestarikan*				3 event	3 event	295.159.350,00	367.919.350,00	382.297.400,00	87.138.050,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Masyarakat Kota Payakumbuh		396.026.565,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				3 Objek	3 Objek	235.159.150,00	323.689.150,00	332.699.150,00	97.540.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			330.026.345,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				4 Laporan	1 Laporan	60.000.200,00	44.230.200,00	49.598.250,00	-10.401.950,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			66.000.220,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah lembaga adat yang dilakukan pembinaan*				22 lembaga	22 lembaga	1.182.198.800,00	934.081.350,00	930.930.100,00	-251.268.700,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Masyarakat Kota Payakumbuh		2.485.972.235,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat																		
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				22 Objek	22 Objek	125.000.200,00	91.646.550,00	91.646.550,00	-33.353.650,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			137.500.220,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				22 Orang	30 Orang	1.057.198.600,00	842.434.800,00	839.283.550,00	-217.915.050,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			2.348.472.015,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan**				**5 %**	**5 %**	**103.249.800,00**	**46.059.800,00**	**42.759.800,00**	**-7.550.020,00**							**95.699.780,00**	
		[Persentase Komunitas /pelaku seni yang ditingkatkan kapasitasnya]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**103.249.800,00**	**46.059.800,00**	**42.759.800,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**95.699.780,00**	-
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*telaksananya kegiatan diplomasi seni dan budaya*				2 kegiatan	2 kegiatan	103.249.800,00	46.059.800,00	42.759.800,00	-60.490.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Masyarakat Kota Payakumbuh		95.699.780,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Lembaga	2 Lembaga	103.249.800,00	46.059.800,00	42.759.800,00	-60.490.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			95.699.780,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan**				**10 cb**	**10 10 Persentase %**	**21.542.750,00**	**12.776.750,00**	**12.776.750,00**	**2.154.330,00**							**23.697.080,00**	
		[Persentasi cagar budaya yang dilestarikan]	**Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan**	**10**	**10**	**10**	-	-	**21.542.750,00**	**12.776.750,00**	**12.776.750,00**	-	-	-	-	-	-	**10**	**23.697.080,00**	-
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*jumlah benda cagar budaya yang dilindungi*				28 bcb	28 bcb	21.542.750,00	12.776.750,00	12.776.750,00	-8.766.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Masyarakat Kota Payakumbuh		23.697.080,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				12 Objek	5 Objek	21.542.750,00	12.776.750,00	12.776.750,00	-8.766.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			23.697.080,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan**				**2 10 % %**	**0 0 % 0**	**125.196.450,00**	**7.926.800,00**	**0,00**	**12.519.524,00**							**137.715.974,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**125.196.450,00**	**7.926.800,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**137.715.974,00**	-
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	*jumlah koleksi museum yang dikelola*				90 unit	0 unit	125.196.450,00	7.926.800,00	0,00	-125.196.450,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Masyarakat Kota Payakumbuh		137.715.974,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu				80 Unit	0 Unit	25.196.100,00	5.127.950,00	0,00	-25.196.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			27.715.600,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	0 Unit	100.000.350,00	2.798.850,00	0,00	-100.000.350,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah			110.000.374,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.721.291.422,00**	**6.828.589.555,00**	**6.848.755.254,00**	**127.463.832,00**							**7.492.743.498,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.721.291.422,00**	**6.828.589.555,00**	**6.848.755.254,00**	**127.463.832,00**							**7.492.743.498,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**90 indeks**	**90 indeks**	**5.791.365.742,00**	**5.919.310.115,00**	**5.928.404.034,00**	**270.594.919,00**							**6.061.960.661,00**	
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat** **Nilai IKM**	**90** **AA**	**86** **BB**	**89** **AA**	-	-	**5.791.365.742,00**	**5.919.310.115,00**	**5.928.404.034,00**	-	-	-	-	-	-	**90** **AA**	**6.061.960.661,00**	-
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penggganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	58.323.650,00	60.980.100,00	64.156.300,00	5.832.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga		63.850.345,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	5 Dokumen	38.041.300,00	38.041.300,00	38.041.700,00	400,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			40.039.650,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	10 Laporan	18.954.100,00	18.954.500,00	22.130.300,00	3.176.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			22.310.695,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**5.791.365.742,00**	**5.919.310.115,00**	**5.928.404.034,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**6.061.960.661,00**	-
	3.26.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	1.328.250,00	3.984.300,00	3.984.300,00	2.656.050,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.500.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat** **Nilai IKM**	**90** **AA**	**86** **BB**	**89** **AA**	-	-	**5.791.365.742,00**	**5.919.310.115,00**	**5.928.404.034,00**	-	-	-	-	-	-	**90** **AA**	**6.061.960.661,00**	-
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	4.569.288.632,00	4.564.259.935,00	4.562.059.935,00	-7.228.697,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga		4.683.583.760,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	4.162.368.632,00	4.130.819.935,00	4.130.819.935,00	-31.548.697,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			4.343.504.240,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				24 Dokumen	24 Dokumen	406.920.000,00	433.440.000,00	431.240.000,00	24.320.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			340.079.520,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	0 %	34.350.200,00	0,00	0,00	-34.350.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga		35.200.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	34.350.200,00	0,00	0,00	-34.350.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			35.200.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks layanan administrasi perangkat daerah*				75 %	75 %	245.971.950,00	221.769.900,00	183.768.900,00	-62.203.050,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga		270.574.480,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.268.300,00	4.268.300,00	4.268.300,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			4.688.200,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.875.300,00	9.891.500,00	14.450.900,00	4.575.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			10.864.700,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.227.800,00	15.227.800,00	18.257.400,00	3.029.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			16.750.580,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				24 Laporan	12 Laporan	6.027.550,00	7.436.300,00	7.436.300,00	1.408.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			6.640.700,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				136 Laporan	12 Laporan	210.573.000,00	184.946.000,00	139.356.000,00	-71.217.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			231.630.300,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan BMD*				80 %	80 %	32.564.200,00	29.315.100,00	69.080.750,00	36.516.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga		65.896.600,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	6 Unit	9.432.300,00	29.315.100,00	39.865.800,00	30.433.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			29.595.500,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	23.131.900,00	0,00	29.214.950,00	6.083.050,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			36.301.100,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah*				80 %	80 %	504.717.110,00	504.678.680,00	493.841.749,00	-10.875.361,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga		535.019.476,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			4.125.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	12 Laporan	280.910.540,00	280.888.300,00	257.286.369,00	-23.624.171,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			309.002.454,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	220.056.570,00	220.040.380,00	232.805.380,00	12.748.810,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			221.892.022,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik*				80 %	80 %	346.150.000,00	538.306.400,00	555.496.400,00	209.346.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga		407.836.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			47.245.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	21 Unit	248.850.000,00	200.850.000,00	210.850.000,00	-38.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			325.347.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	18 Unit	12.380.000,00	12.380.000,00	19.570.000,00	7.190.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			10.494.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	38.230.000,00	73.387.000,00	73.387.000,00	35.157.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			16.500.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	7.500.000,00	212.499.400,00	212.499.400,00	204.999.400,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			8.250.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan**				**50 %**	**50 %**	**498.600.130,00**	**489.939.440,00**	**501.011.320,00**	**-5.138.898,00**							**493.461.232,00**	
		[Persentase objek wisata unggulan dalam kondisi baik, Jumlah pengembangan destinasi pariwisata, Persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan]	**Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan**	**55**	**45**	**50**	-	-	**498.600.130,00**	**489.939.440,00**	**501.011.320,00**	-	-	-	-	-	-	**50**	**493.461.232,00**	-
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*jumlah objek wisata unggulan yang dikembangkan*				4 ow	4 ow	498.600.130,00	489.939.440,00	501.011.320,00	2.411.190,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh		493.461.232,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				3 Unit	3 Unit	498.600.130,00	489.939.440,00	501.011.320,00	2.411.190,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			493.461.232,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata**				**7 %**	**7 %**	**201.325.550,00**	**201.051.550,00**	**201.051.450,00**	**239.896.055,00**							**441.221.605,00**	
		[Jumlah kerjasama yang dilakukan dengan pelaku usaha jasa pariwisata, Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota, Jumlah media/ informasi yang disediakan dan disebarluaskan, Jumlah event yang dilaksanakan, difasilitasi dan diikuti]	**Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata**	**7**	**6**	**7**	-	-	**201.325.550,00**	**201.051.550,00**	**201.051.450,00**	-	-	-	-	-	-	**7**	**441.221.605,00**	-
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan*				81 %	60 %	201.325.550,00	201.051.550,00	201.051.450,00	-274.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		441.221.605,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	45.210.850,00	33.894.900,00	33.894.900,00	-11.315.950,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			60.495.600,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Kegiatan	3 Kegiatan	156.114.700,00	167.156.650,00	167.156.550,00	11.041.850,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			380.726.005,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual**				**50 %**	**21 %**	**55.000.000,00**	**51.025.150,00**	**46.929.250,00**	**5.500.000,00**							**60.500.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**55.000.000,00**	**51.025.150,00**	**46.929.250,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**60.500.000,00**	-
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah zona kreatif*				1 unit	1 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pelaku Ekonomi Kreatif, Komunitas Kreatif, Masyarakat Kota		33.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			33.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Persentase Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang berdaya saing*				50 %	50 %	25.000.000,00	21.025.150,00	16.929.250,00	-8.070.750,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pelaku Ekonomi Kreatif, Komunitas Kreatif		27.500.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				20 Produk	20 Produk	25.000.000,00	21.025.150,00	16.929.250,00	-8.070.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			27.500.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
5.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi**				**50 %**	**30 %**	**175.000.000,00**	**167.263.300,00**	**171.359.200,00**	**260.600.000,00**							**435.600.000,00**	
		[Jumlah Fasilitasi Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif]	**Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi**	**80**	**1**	**1**	-	-	**175.000.000,00**	**167.263.300,00**	**171.359.200,00**	-	-	-	-	-	-	**30**	**435.600.000,00**	-
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Persentase Fasilitasi Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*				50 %	50 %	175.000.000,00	167.263.300,00	171.359.200,00	-3.640.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		435.600.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	150.097.150,00	153.842.250,00	3.842.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			397.100.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				30 Orang	30 Orang	25.000.000,00	17.166.150,00	17.516.950,00	-7.483.050,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			38.500.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
		DINAS PERTANIAN							**21.738.040.565,00**	**15.864.205.870,00**	**16.758.161.393,00**	**-4.979.879.172,00**							**19.443.930.950,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**21.738.040.565,00**	**15.864.205.870,00**	**16.758.161.393,00**	**-4.979.879.172,00**							**19.443.930.950,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**1.049.470.362,00**	**691.370.764,00**	**1.740.728.709,00**	**691.258.347,00**							**1.134.443.511,00**	
1.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Persentase Pembudidaya Yang Tergabung Dalam Kelompok Yang Menerapkan Anjuran KKP (%)**				**560 50 ton %**	**565 50 Ton %**	**873.396.682,00**	**592.976.834,00**	**1.642.334.779,00**	**176.899.329,00**							**1.050.296.011,00**	
		[- Jumlah Produksi ikan konsumsi - Persentase Kelompok Pembudidaya Yang Menerapkan Teknologi Anjuran]	**Produksi Perikanan Budidaya**	**560**	**565.4**	**560**	-	-	**873.396.682,00**	**592.976.834,00**	**1.642.334.779,00**	-	-	-	-	-	-	**560**	**1.050.296.011,00**	-
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*1. Persentase pemanfaatan lahan budidaya 2. Jumlah pembudidya yang mendapat akses permodalan 3. Jumlah peningkatan kelas kelompok pembudidaya Angka Konsumsi Ikan Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan*				33,50 Kg/KAP/TH 65; 8; 1 %; orang; Kelompok 7,15 TON	33,50 Kg/KAP/TH 65; 8; 1 %; orang; Kelompok 7,15 TON	552.093.950,00	277.944.800,00	277.944.800,00	-274.149.150,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pokdakan		641.813.550,00	DINAS PERTANIAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				3 Kelompok	3 Kelompok	477.825.000,00	227.823.300,00	227.823.300,00	-250.001.700,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			522.069.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				10 Kelompok	10 Kelompok	74.268.950,00	50.121.500,00	50.121.500,00	-24.147.450,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			119.744.550,00	DINAS PERTANIAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*1. Persentase penggunaan benih ikan unggul yang digunakan pembudidaya 2. Persentase penurunan kematian ikan*				75; 10 % %	75; 10 % %	321.302.732,00	315.032.034,00	1.364.389.979,00	1.043.087.247,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pokdakan		408.482.461,00	DINAS PERTANIAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	1 Dokumen	23.414.100,00	23.464.830,00	23.464.830,00	50.730,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			23.416.250,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**JUmlah produksi olahan hasil perikanan Angka konsumsi ikan**				**7 33,50 ton kg/kapita/th**	**7,15 33,50 ton kg/kapita/th**	**176.073.680,00**	**98.393.930,00**	**98.393.930,00**	**-91.926.180,00**							**84.147.500,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**176.073.680,00**	**98.393.930,00**	**98.393.930,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**84.147.500,00**	-
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah peningkatan unit usaha pengolahan dan pemasaran perikanan*				1 unit	1 unit	176.073.680,00	98.393.930,00	98.393.930,00	-77.679.750,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pokdakan		84.147.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																		
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	176.073.680,00	98.393.930,00	98.393.930,00	-77.679.750,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			84.147.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**20.688.570.203,00**	**15.172.835.106,00**	**15.017.432.684,00**	**-5.671.137.519,00**							**18.309.487.439,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**89,00 indeks**	**89,00 indeks**	**14.508.384.943,00**	**12.515.545.004,00**	**10.937.601.608,00**	**-861.671.344,00**							**13.646.713.599,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penggganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	169.179.750,00	135.962.200,00	84.706.400,00	-84.473.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	ASN		103.306.550,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	23.363.500,00	10.079.900,00	10.079.900,00	-13.283.600,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			19.113.550,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	136.760.000,00	122.259.800,00	71.004.000,00	-65.756.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			84.193.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.025.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	-2.415.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	5.031.250,00	2.012.500,00	2.012.500,00	-3.018.750,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	11.749.117.285,00	10.109.305.910,00	8.423.470.714,00	-3.325.646.571,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	ASN		11.043.971.498,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/ bulan	100 Orang/ bulan	11.051.197.285,00	9.416.065.910,00	7.754.570.714,00	-3.296.626.571,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	PAJAK DAERAH RETRIBUSI JASA USAHA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			10.627.873.898,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	697.920.000,00	693.240.000,00	668.900.000,00	-29.020.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			416.097.600,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	0 %	95.978.500,00	0,00	0,00	-95.978.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	ASN		95.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	0 Paket	95.978.500,00	0,00	0,00	-95.978.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			95.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks layanan administrasi perangkat daerah*				75 %	75 %	660.556.250,00	357.195.020,00	395.130.520,00	-265.425.730,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	ASN		427.462.390,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.251.200,00	6.251.200,00	4.837.900,00	-1.413.300,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			6.252.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	55.946.450,00	22.378.220,00	34.878.220,00	-21.068.230,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			55.947.640,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	19.929.600,00	19.929.600,00	23.704.400,00	3.774.800,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			19.929.750,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				200 Laporan	200 Laporan	6.992.000,00	6.992.000,00	6.992.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			6.992.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	567.412.000,00	300.034.000,00	300.034.000,00	-267.378.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			338.341.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.025.000,00	1.610.000,00	24.684.000,00	20.659.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan BMD*				80 %	80 %	60.428.300,00	10.912.500,00	78.971.450,00	18.543.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	ASN		377.672.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			335.431.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	15 Unit	59.428.300,00	10.912.500,00	78.971.450,00	19.543.150,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			42.241.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah*				80 %	80 %	673.906.498,00	673.573.014,00	694.374.164,00	20.467.666,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	ASN		436.456.676,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	224.632.698,00	224.632.698,00	216.132.698,00	-8.500.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			242.940.856,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				96 Laporan	96 Laporan	449.273.800,00	448.940.316,00	478.241.466,00	28.967.666,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			193.515.820,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik*				80 %	80 %	862.612.360,00	678.596.360,00	710.948.360,00	-151.664.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	ASN		926.238.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				125 Unit	125 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			42.950.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				135 Unit	135 Unit	600.200.000,00	600.200.000,00	457.750.000,00	-142.450.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			852.940.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	23.334.360,00	23.334.360,00	25.082.360,00	1.748.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			20.460.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	199.888.000,00	15.872.000,00	188.926.000,00	-10.962.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			9.888.000,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produktivitas pertanian per hektar per tahun Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Peningkatan Produksi Hortikultura**				**0,73 2 2 Persentase Persentase %**	**5,61 0,73 2 % % %**	**1.132.388.415,00**	**906.584.637,00**	**2.373.705.491,00**	**-194.812.905,00**							**937.575.510,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*1. Persentase pupuk yang disalurkan 2. Jumlah alsintan yang di salurkan 3. Persentase pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian*				100; 2; 100 %; jenis; %	100; 2; 100 %; jenis; %	325.676.105,00	88.042.991,00	175.280.795,00	-150.395.310,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Kelompok Tani		247.240.570,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				5 Laporan	5 Laporan	252.656.045,00	21.156.045,00	86.156.045,00	-166.500.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			151.782.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	73.020.060,00	66.886.946,00	89.124.750,00	16.104.690,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			95.458.570,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*1. Persentase pemanfaatan SDG Padi Bersertifikat sesuai target tanam 2. Indeks Pertanaman 3. Persentase pemenuhan layanan sarana pendukung pertanian*				62; 2,8 ; 90 %; ; %	62; 2,8 ; 90 %; ; %	715.419.810,00	744.316.946,00	2.124.199.996,00	1.408.780.186,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Kelompok Tani		591.552.440,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				5 Dokumen	5 Dokumen	380.572.400,00	411.478.000,00	1.270.150.450,00	889.578.050,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH SISA DAU	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			178.866.750,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*1) tersedianya bibit ternak 2) pelatihan Budidaya ternak/pengolahan pakan 3) Tersedianya Pakan Ternak*				500;. 1 ; 20 dosis; kali; ton	500;. 1 ; 20 dosis; kali; ton	91.292.500,00	74.224.700,00	74.224.700,00	-17.067.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Kelompok Tani		98.782.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																		
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia				5 Laporan	5 Laporan	91.292.500,00	74.224.700,00	74.224.700,00	-17.067.800,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			98.782.500,00	DINAS PERTANIAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Pemenuhan Prasarana Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Ditetapkan Menjadi LP2B (RJIT) Persentase Pemenuhan Prasarana Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Ditetapkan Menjadi LP2B (JUT) Persentase Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) dalam kondisi baik**				**66,54 49,84 % %**	**66,54 49,84 60 % % %**	**3.551.393.000,00**	**673.617.150,00**	**673.617.150,00**	**-1.232.387.900,00**							**2.319.005.100,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Jumlah Rekomendasi Lahan Pertanian Berkelanjutan*				12 laporan	12 laporan	155.777.100,00	155.777.100,00	155.777.100,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Kelompok Tani		155.777.100,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																		
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	155.777.100,00	155.777.100,00	155.777.100,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			155.777.100,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah Prasarana yang dibangun*				5 unit	5 unit	3.395.615.900,00	517.840.050,00	517.840.050,00	-2.877.775.850,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Kelompok Tani		2.163.228.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				9 Unit	1 Unit	1.608.098.500,00	210.360.550,00	210.360.550,00	-1.397.737.950,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			925.873.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				10 Unit	1 Unit	1.786.518.500,00	208.281.500,00	208.281.500,00	-1.578.237.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			1.226.567.000,00	DINAS PERTANIAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)**				**90 1 Persentase Persentase**	**9 90 1 % % %**	**760.423.510,00**	**719.711.930,00**	**719.649.700,00**	**170.401.720,00**							**930.825.230,00**	
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*- Persentase pelayanan ternak di paster sesuai sop - Persentase fasilitasi pemotongan dan pendistribusian daging tepat waktu*				100; 100 %; %	100; 100 %; %	121.887.410,00	123.110.250,00	133.531.450,00	11.644.040,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Peternak		239.338.360,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				160 Laporan	160 Laporan	20.884.250,00	20.252.900,00	26.252.900,00	5.368.650,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			20.875.450,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan																		
			Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan				30 Orang	30 Orang	19.937.400,00	11.834.800,00	11.834.800,00	-8.102.600,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			19.937.650,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan																		
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik				90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	81.065.760,00	91.022.550,00	95.443.750,00	14.377.990,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			198.525.260,00	DINAS PERTANIAN
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Penanganan Bencana Pertanian Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian**				**100 60 Persentase Persentase**	**60 100 Persentase Persentase**	**49.999.385,00**	**43.060.735,00**	**43.060.735,00**	**-285,00**							**49.999.100,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Persentase luas lahan serangan OPT yang dikendalikan (Padi) 2. Persentase luas lahan serangan OPT yang dikendalikan (Kakao) 3. Jumlah Petani yang memanfaatkan Akses Permodalan Dan Pembiayaan 4. Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan yang memanfaatkan akses Permodalan*				50% 2. 40% 3. 2595 petani 4. 17 Pelaku Usaha %; %; Petani; Pelaku Usaha	50% 2. 40% 3. 2595 petani 4. 17 Pelaku Usaha %; %; Petani; Pelaku Usaha	49.999.385,00	43.060.735,00	43.060.735,00	-6.938.650,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Kelompok Tani		49.999.100,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				194 Ha	194 Ha	39.999.950,00	33.061.300,00	33.061.300,00	-6.938.650,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			39.999.400,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan																		
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				4 Laporan	4 Laporan	9.999.435,00	9.999.435,00	9.999.435,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			9.999.700,00	DINAS PERTANIAN
6.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan**				**100 Persentase**	**0 Persentase**	**1.000.100,00**	**0,00**	**0,00**	**19.748.650,00**							**20.748.750,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pemasaran hasil olahan pertanian*				6 UP3HP	0 UP3HP	1.000.100,00	0,00	0,00	-1.000.100,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Kelompok Tani		20.748.750,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				6 Laporan	0 Laporan	1.000.100,00	0,00	0,00	-1.000.100,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			20.748.750,00	DINAS PERTANIAN
7.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan Persentase Luas Tanam Yang Menerapkan Teknologi Pertanian**				**90 50 Persentase %**	**90 50 Persentase %**	**684.980.850,00**	**314.315.650,00**	**269.798.000,00**	**-280.360.700,00**							**404.620.150,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna*				50 %	50 %	684.980.850,00	314.315.650,00	269.798.000,00	-415.182.850,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Kelompok Tani		404.620.150,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Unit	5 Unit	69.198.000,00	27.636.550,00	27.636.550,00	-41.561.450,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			74.827.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Unit	10 Unit	222.522.300,00	165.155.650,00	120.638.000,00	-101.884.300,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			29.999.750,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				1 Unit	0 Unit	91.000.000,00	0,00	0,00	-91.000.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				1 Unit	3 Unit	302.260.550,00	121.523.450,00	121.523.450,00	-180.737.100,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			199.792.900,00	DINAS PERTANIAN
		UPTD PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK							**21.738.040.565,00**	**15.864.205.870,00**	**16.758.161.393,00**	**-4.979.879.172,00**							**19.443.930.950,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**21.738.040.565,00**	**15.864.205.870,00**	**16.758.161.393,00**	**-4.979.879.172,00**							**19.443.930.950,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**20.688.570.203,00**	**15.172.835.106,00**	**15.017.432.684,00**	**-5.671.137.519,00**							**18.309.487.439,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**89 indeks**	**89 indeks**	**14.508.384.943,00**	**12.515.545.004,00**	**10.937.601.608,00**	**-861.671.344,00**							**13.646.713.599,00**	
	3.27.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah populasi sapi yang dipelihara*				80 ekor	80 ekor	236.606.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	313.394.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Kelompok Tani		236.606.485,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				80 Unit Kerja	80 Unit Kerja	236.606.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	313.394.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	PENDAPATAN DARI BLUD PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			236.606.485,00	DINAS PERTANIAN
		UPTD PUSKESWAN							**21.738.040.565,00**	**15.864.205.870,00**	**16.758.161.393,00**	**-4.979.879.172,00**							**19.443.930.950,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**21.738.040.565,00**	**15.864.205.870,00**	**16.758.161.393,00**	**-4.979.879.172,00**							**19.443.930.950,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**20.688.570.203,00**	**15.172.835.106,00**	**15.017.432.684,00**	**-5.671.137.519,00**							**18.309.487.439,00**	
1.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis**				**0,30 35 % %**	**9 1 90 % % %**	**760.423.510,00**	**719.711.930,00**	**719.649.700,00**	**170.401.720,00**							**930.825.230,00**	
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pelayanan kesehatan hewan yang difasilitasi*				1 kegiatan	1 kegiatan	186.365.200,00	180.183.980,00	178.496.350,00	-7.868.850,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Peternak		221.093.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				250 Laporan	250 Laporan	186.365.200,00	180.183.980,00	178.496.350,00	-7.868.850,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			221.093.500,00	DINAS PERTANIAN
		UPTD PERBENIHAN DAN PELAYANAN JASA ALSINTAN							**21.738.040.565,00**	**15.864.205.870,00**	**16.758.161.393,00**	**-4.979.879.172,00**							**19.443.930.950,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**21.738.040.565,00**	**15.864.205.870,00**	**16.758.161.393,00**	**-4.979.879.172,00**							**19.443.930.950,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**20.688.570.203,00**	**15.172.835.106,00**	**15.017.432.684,00**	**-5.671.137.519,00**							**18.309.487.439,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Peningkatan Produksi Hortikultura Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana peternakan**				**90 2 0,73 % % %**	**2 0,73 5.61 90 % % % %**	**1.132.388.415,00**	**906.584.637,00**	**2.373.705.491,00**	**-194.812.905,00**							**937.575.510,00**	
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*1. Persentase pemanfaatan SDG Padi Bersertifikat sesuai target tanam 2. Indeks Pertanaman 3. Persentase pemenuhan layanan sarana pendukung pertanian*				62; 2,8 ; 90 %; ; %	62; 2,8 ; 90 %; ; %	715.419.810,00	744.316.946,00	2.124.199.996,00	1.408.780.186,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Kelompok Tani		591.552.440,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				6 Dokumen	6 Dokumen	334.847.410,00	332.838.946,00	854.049.546,00	519.202.136,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			412.685.690,00	DINAS PERTANIAN
		UPTD RPH DAN PASAR TERNAK							**21.738.040.565,00**	**15.864.205.870,00**	**16.758.161.393,00**	**-4.979.879.172,00**							**19.443.930.950,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**21.738.040.565,00**	**15.864.205.870,00**	**16.758.161.393,00**	**-4.979.879.172,00**							**19.443.930.950,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**20.688.570.203,00**	**15.172.835.106,00**	**15.017.432.684,00**	**-5.671.137.519,00**							**18.309.487.439,00**	
1.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) dalam kondisi baik Persentase Pemenuhan Prasarana Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Ditetapkan Menjadi LP2B (JUT) Persentase Pemenuhan Prasarana Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Ditetapkan Menjadi LP2B (RJIT)**				**66,54 49,64 % %**	**60 49,64 66,54 % % %**	**3.551.393.000,00**	**673.617.150,00**	**673.617.150,00**	**-1.232.387.900,00**							**2.319.005.100,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah Prasarana yang dibangun*				5 unit	5 unit	3.395.615.900,00	517.840.050,00	517.840.050,00	-2.877.775.850,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Kelompok Tani		2.163.228.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																		
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1 Unit	998.900,00	99.198.000,00	99.198.000,00	98.199.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			10.788.000,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)**				**90 1 % Persentase**	**90 9 1 % % Persentase**	**760.423.510,00**	**719.711.930,00**	**719.649.700,00**	**170.401.720,00**							**930.825.230,00**	
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase peningkatan Unit Usaha yang memiliki Sertifikasi NKV*				8 %	8 %	452.170.900,00	416.417.700,00	407.621.900,00	-44.549.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Peternak		470.393.370,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)																		
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				160 laporan	160 laporan	452.170.900,00	416.417.700,00	407.621.900,00	-44.549.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			470.393.370,00	DINAS PERTANIAN
		UPTD PERBENIHAN DAN PAKAN IKAN							**21.738.040.565,00**	**15.864.205.870,00**	**16.758.161.393,00**	**-4.979.879.172,00**							**19.443.930.950,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**21.738.040.565,00**	**15.864.205.870,00**	**16.758.161.393,00**	**-4.979.879.172,00**							**19.443.930.950,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**1.049.470.362,00**	**691.370.764,00**	**1.740.728.709,00**	**691.258.347,00**							**1.134.443.511,00**	
1.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah total produksi perikanan Persentase kelompok pembudidaya yang menerapkan tekhnologi anjuran**				**560 50 ton %**	**560 50 ton %**	**873.396.682,00**	**592.976.834,00**	**1.642.334.779,00**	**176.899.329,00**							**1.050.296.011,00**	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*1. Persentase penggunaan benih ikan unggul yang digunakan pembudidaya 2. Persentase penurunan kematian ikan*				75; 10 % %	75; 10 % %	321.302.732,00	315.032.034,00	1.364.389.979,00	1.043.087.247,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat		408.482.461,00	DINAS PERTANIAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	297.888.632,00	291.567.204,00	1.340.925.149,00	1.043.036.517,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			385.066.211,00	DINAS PERTANIAN
		SEKRETARIAT DAERAH							**32.913.423.435,00**	**31.740.309.260,00**	**33.465.502.675,00**	**552.079.240,00**							**30.858.397.693,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**32.913.423.435,00**	**31.740.309.260,00**	**33.465.502.675,00**	**552.079.240,00**							**30.858.397.693,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**32.913.423.435,00**	**31.740.309.260,00**	**33.465.502.675,00**	**552.079.240,00**							**30.858.397.693,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**88,80 Indeks**	**89,80 Indeks**	**26.922.122.285,00**	**27.426.581.910,00**	**29.099.081.625,00**	**-985.151.742,00**							**25.936.970.543,00**	
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**26.922.122.285,00**	**27.426.581.910,00**	**29.099.081.625,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**25.936.970.543,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penggganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	121.828.650,00	120.637.150,00	108.513.200,00	-13.315.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		117.394.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	16.812.300,00	13.765.500,00	13.765.500,00	-3.046.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			16.812.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	103.016.350,00	97.898.550,00	89.920.350,00	-13.096.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			98.582.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**26.922.122.285,00**	**27.426.581.910,00**	**29.099.081.625,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**25.936.970.543,00**	-
	4.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	4.781.350,00	2.648.100,00	1.648.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	1.000.000,00	4.191.750,00	2.179.250,00	1.179.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**26.922.122.285,00**	**27.426.581.910,00**	**29.099.081.625,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**25.936.970.543,00**	-
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	11.900.103.972,00	11.590.718.099,00	11.590.718.099,00	-309.385.873,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		11.495.957.303,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/bulan	83 Orang/bulan	11.123.583.972,00	10.838.598.099,00	10.838.598.099,00	-284.985.873,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			10.935.957.303,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	776.520.000,00	752.120.000,00	752.120.000,00	-24.400.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			560.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik*				100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	85.875.500,00	0,00	12.123.600,00	-73.751.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Sekretariat Daerah		85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				85 Paket	115 Paket	85.875.500,00	0,00	12.123.600,00	-73.751.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks layanan administrasi perangkat daerah*				75 %	75 %	1.743.375.650,00	2.548.770.300,00	2.762.763.900,00	1.019.388.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah		3.154.048.070,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	10 Paket	34.986.500,00	34.986.500,00	140.959.500,00	105.973.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			65.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	59.988.400,00	41.895.800,00	149.916.400,00	89.928.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	50 Paket	69.742.100,00	69.742.100,00	69.742.100,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			69.748.070,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	11 Paket	59.959.000,00	59.959.000,00	59.959.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	6 Dokumen	273.750.000,00	242.998.500,00	242.998.500,00	-30.751.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			424.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	543.991.650,00	943.997.650,00	943.997.650,00	400.006.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			994.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				144 Laporan	144 Laporan	699.958.000,00	1.145.191.000,00	1.145.191.000,00	445.233.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.390.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**26.922.122.285,00**	**27.426.581.910,00**	**29.099.081.625,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**25.936.970.543,00**	-
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	9.999.750,00	9.999.750,00	8.999.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**26.922.122.285,00**	**27.426.581.910,00**	**29.099.081.625,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**25.936.970.543,00**	-
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan BMD*				80 %	80 %	3.822.946.450,00	3.519.114.750,00	3.492.516.782,00	-330.429.668,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh		402.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	680.000.000,00	680.000.000,00	679.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	680.000.000,00	680.000.000,00	679.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	0 Unit	40.800.000,00	0,00	0,00	-40.800.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	1 Unit	30.554.150,00	13.500.000,00	13.500.000,00	-17.054.150,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	3.728.529.800,00	2.134.614.750,00	2.108.016.782,00	-1.620.513.018,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	1 Unit	21.062.500,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-10.062.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah*				80 %	80 %	3.493.064.392,00	3.319.844.488,00	3.353.963.288,00	-139.101.104,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh		3.013.940.850,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	4 Laporan	953.905.000,00	953.905.000,00	922.138.800,00	-31.766.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			991.040.850,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	339.409.000,00	339.407.500,00	339.407.500,00	-1.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			390.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.199.750.392,00	2.026.531.988,00	2.092.416.988,00	-107.333.404,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.632.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*				80 %	80 %	1.391.343.020,00	1.539.633.800,00	2.990.619.141,00	1.599.276.121,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh		1.753.530.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	601.400.000,00	592.470.000,00	592.470.000,00	-8.930.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			612.180.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				45 Unit	47 Unit	604.100.000,00	604.100.000,00	604.100.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			754.140.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	125 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	20 Unit	22.210.000,00	22.210.000,00	26.260.000,00	4.050.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			22.210.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	79.948.660,00	237.169.440,00	1.674.104.781,00	1.594.156.121,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			230.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	28.670.000,00	28.670.000,00	28.670.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	45.014.360,00	45.014.360,00	45.014.360,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan kepada KDH dan WKDH*				100 %	100 %	1.475.407.273,00	1.600.344.241,00	1.600.344.533,00	124.937.260,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kepala DAerah dan Wakil Kepala Daerah		1.421.649.520,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	808.224.623,00	926.298.441,00	926.298.733,00	118.074.110,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			754.140.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	65.792.650,00	64.045.800,00	64.045.800,00	-1.746.850,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			66.119.520,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				8 Orang	8 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	591.390.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	8.610.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			591.390.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Persentase pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan baik*				100 %	100 %	652.037.128,00	652.028.505,00	652.028.505,00	-8.623,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh		892.437.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				15 Paket	36 Paket	295.997.180,00	295.986.130,00	295.986.130,00	-11.050,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			476.300.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				15 Paket	34 Paket	270.840.648,00	270.847.370,00	270.847.370,00	6.722,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			321.242.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				15 Paket	31 Paket	85.199.300,00	85.195.005,00	85.195.005,00	-4.295,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			94.895.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Indeks Kelembagaan Perangkat Daerah*				39.09 %	39.09 %	201.238.900,00	105.075.450,00	105.075.450,00	-96.163.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh		735.480.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	1 Dokumen	74.300.650,00	28.213.400,00	28.213.400,00	-46.087.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			256.933.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	1 Laporan	56.273.750,00	39.571.750,00	39.571.750,00	-16.702.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			239.273.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	70.664.500,00	37.290.300,00	37.290.300,00	-33.374.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			239.273.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Persentase acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi dengan baik*				100 %	100 %	1.984.901.350,00	2.380.415.127,00	2.380.415.127,00	395.513.777,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh		2.815.531.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	100.000.250,00	96.315.750,00	96.315.750,00	-3.684.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	1.601.064.600,00	1.971.180.427,00	1.971.180.427,00	370.115.827,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			2.351.064.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	283.836.500,00	312.918.950,00	312.918.950,00	29.082.450,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			324.467.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**indeks reformasi hukum Nilai LPPD**				**3,4150 87 Nilai Indeks**	**87,60 3,4150 Indeks Nilai**	**5.654.335.950,00**	**4.039.763.500,00**	**4.077.457.400,00**	**-1.228.076.200,00**							**4.426.259.750,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**5.654.335.950,00**	**4.039.763.500,00**	**4.077.457.400,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**4.426.259.750,00**	-
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu*				100 %	100 %	513.547.600,00	450.231.750,00	450.231.750,00	-63.315.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		560.127.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				3 Dokumen	3 Dokumen	262.349.950,00	249.694.950,00	249.694.950,00	-12.655.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			432.350.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				3 Dokumen	2 Dokumen	63.888.950,00	52.656.200,00	52.656.200,00	-11.232.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			63.888.950,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				5 Dokumen	4 Dokumen	187.308.700,00	147.880.600,00	147.880.600,00	-39.428.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			63.888.950,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat*				100 %	100 %	4.654.788.300,00	2.986.544.900,00	2.986.544.900,00	-1.668.243.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		3.295.131.150,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				2 Dokumen	2 Dokumen	400.158.250,00	422.638.950,00	422.638.950,00	22.480.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA SISA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			800.158.450,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				3 Dokumen	3 Dokumen	2.887.525.450,00	1.748.068.750,00	1.748.068.750,00	-1.139.456.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.962.037.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				3 Dokumen	2 Dokumen	1.367.104.600,00	815.837.200,00	815.837.200,00	-551.267.400,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			532.935.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Persentase koordinasi hukum yang difasilitasi Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi*				100 %	100 %	473.000.650,00	587.869.500,00	625.563.400,00	152.562.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		558.000.850,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	89.091.200,00	48.266.750,00	62.048.150,00	-27.043.050,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			114.091.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				1 Kasus	3 Kasus	375.930.900,00	533.219.950,00	535.019.950,00	159.089.050,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			435.931.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				3 Dokumen	3 Dokumen	7.978.550,00	6.382.800,00	28.495.300,00	20.516.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			7.978.550,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Jumlah dokumen Kesepakatan Bersama/ Nota Kesepahaman yang difasilitasi*				5 MoU/PKS	5 MoU/PKS	12.999.400,00	15.117.350,00	15.117.350,00	2.117.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		12.999.850,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.850,00	15.117.350,00	15.117.350,00	5.117.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			9.999.950,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	0 Laporan	2.999.550,00	0,00	0,00	-2.999.550,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			2.999.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan jasa**				**91,58 Indeks**	**91,74 Indeks**	**336.965.200,00**	**273.963.850,00**	**288.963.650,00**	**158.202.200,00**							**495.167.400,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti*				100 %	100 %	97.846.700,00	69.388.750,00	69.388.750,00	-28.457.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		221.047.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	37.273.250,00	28.315.300,00	28.315.300,00	-8.957.950,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			94.673.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	60.573.450,00	41.073.450,00	41.073.450,00	-19.500.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			126.373.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Persentase hasil monitoring evaluasi yang ditindaklanjuti*				100 %	100 %	18.603.400,00	14.860.100,00	14.860.100,00	-3.743.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		18.603.650,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	18.603.400,00	14.860.100,00	14.860.100,00	-3.743.300,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			18.603.650,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah pembinaan dan pendampingan advokasi pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik*				100 % 4 kali	100 % 4 kali	207.152.050,00	181.941.400,00	181.941.400,00	-25.210.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		242.153.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	26.245.900,00	17.832.200,00	17.832.200,00	-8.413.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			26.246.150,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	150.887.150,00	140.852.700,00	140.852.700,00	-10.034.450,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			150.888.450,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				40 Orang	40 Orang	30.019.000,00	23.256.500,00	23.256.500,00	-6.762.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			65.019.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang disusun*				1 dokumen	1 dokumen	13.363.050,00	7.773.600,00	22.773.400,00	9.410.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		13.363.050,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	13.363.050,00	7.773.600,00	22.773.400,00	9.410.350,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			13.363.050,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**23.797.097.151,00**	**34.787.217.812,00**	**34.828.797.494,00**	**11.031.700.343,00**							**26.176.043.345,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**23.797.097.151,00**	**34.787.217.812,00**	**34.828.797.494,00**	**11.031.700.343,00**							**26.176.043.345,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**23.797.097.151,00**	**34.787.217.812,00**	**34.828.797.494,00**	**11.031.700.343,00**							**26.176.043.345,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**85 Indeks**	**85 Indeks**	**17.457.799.276,00**	**18.077.485.187,00**	**18.125.356.869,00**	**3.449.595.739,00**							**20.907.395.015,00**	
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**Nilai IKM** **Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**86** **90**	**85** **90**	**85** **90**	-	-	**17.457.799.276,00**	**18.077.485.187,00**	**18.125.356.869,00**	-	-	-	-	-	-	**85** **90**	**20.907.395.015,00**	-
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penggganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	68.778.750,00	34.385.000,00	34.385.000,00	-34.393.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD dan Stakeholder		75.661.850,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.412.750,00	5.175.000,00	5.175.000,00	-4.237.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			10.359.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	55.916.000,00	25.760.000,00	25.760.000,00	-30.156.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			61.507.600,00	SEKRETARIAT DPRD
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**17.457.799.276,00**	**18.077.485.187,00**	**18.125.356.869,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**20.907.395.015,00**	-
	4.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.897.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.897.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	3.413.976.836,00	3.654.737.765,00	3.654.737.765,00	240.760.929,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD dan Stakeholder		3.447.171.272,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.085.536.836,00	3.348.737.765,00	3.348.737.765,00	263.200.929,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			3.232.539.272,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	12 Dokumen	328.440.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00	-22.440.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			214.632.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase tertip administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	0 %	29.298.700,00	0,00	0,00	-29.298.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD dan Stakeholder		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	29.298.700,00	0,00	0,00	-29.298.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks layanan administrasi perangkat daerah*				75 %	100 %	1.401.966.825,00	1.773.033.355,00	1.773.037.355,00	371.070.530,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD dan Stakeholder		3.698.931.948,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	24.360.200,00	14.915.900,00	14.915.900,00	-9.444.300,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			26.806.230,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	82.343.600,00	338.660.055,00	338.660.055,00	256.316.455,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			2.014.261.150,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	79.089.275,00	88.385.550,00	88.385.550,00	9.296.275,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			76.970.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.948.200,00	31.448.800,00	31.452.800,00	504.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			33.278.803,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	54.600.000,00	27.300.000,00	27.300.000,00	-27.300.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			60.717.965,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	12 Laporan	129.514.550,00	321.928.050,00	321.928.050,00	192.413.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			385.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	999.386.000,00	948.670.000,00	948.670.000,00	-50.716.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.897.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan BMD*				80 %	80 %	48.785.250,00	80.322.000,00	80.322.000,00	31.536.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD dan Stakeholder		53.625.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	48.785.250,00	80.322.000,00	80.322.000,00	31.536.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			53.625.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah*				80 %	100 %	1.227.073.740,00	1.479.462.922,00	1.522.265.104,00	295.191.364,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD dan Stakeholder		1.466.900.037,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	245.544.900,00	255.146.320,00	255.146.320,00	9.601.420,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			270.100.037,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	981.528.840,00	1.224.316.602,00	1.267.118.784,00	285.589.944,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.196.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*				80 %	80 %	1.301.561.000,00	1.337.097.960,00	1.337.097.960,00	35.536.960,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD dan Stakeholder		1.448.687.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	217.600.000,00	217.600.000,00	217.600.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			255.948.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	20 Unit	375.390.000,00	307.240.000,00	307.240.000,00	-68.150.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			412.929.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				19 Unit	62 Unit	34.950.400,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-18.950.400,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			38.456.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	71 Unit	66.716.000,00	79.014.360,00	79.014.360,00	12.298.360,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			73.519.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	606.904.600,00	717.243.600,00	717.243.600,00	110.339.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			667.835.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Persentase terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD*				100 %	100 %	9.551.331.240,00	9.355.796.440,00	9.355.796.440,00	-195.534.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD dan Stakeholder		10.504.435.579,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	9.339.484.890,00	9.143.950.090,00	9.143.950.090,00	-195.534.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			10.273.433.379,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	180.596.350,00	180.596.350,00	180.596.350,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			196.627.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	25 Orang	31.250.000,00	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			34.375.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Persentase terlaksananya layanan administrasi DPRD*				100 %	100 %	415.026.935,00	362.649.745,00	367.715.245,00	-47.311.690,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD dan Stakeholder		211.981.429,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				4 Laporan	12 Laporan	121.977.725,00	121.977.725,00	128.266.925,00	6.289.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			134.179.694,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	293.049.210,00	240.672.020,00	239.448.320,00	-53.600.890,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			77.801.735,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**persentase ranperda yang ditetapkan**				**100 %**	**100 %**	**6.339.297.875,00**	**16.709.732.625,00**	**16.703.440.625,00**	**-1.070.649.545,00**							**5.268.648.330,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Persentase terlaksananya pembentukan Perda dan Peraturan DPRD*				100 %	100 %	181.016.425,00	535.240.575,00	527.590.575,00	346.574.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD dan Stakeholder		199.017.335,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				5 Dokumen	10 Dokumen	180.786.425,00	78.345.825,00	70.695.825,00	-110.090.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			199.017.335,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				5000 Orang	5000 Orang	230.000,00	456.894.750,00	456.894.750,00	456.664.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Persentase terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran*				100 %	100 %	433.631.800,00	481.079.400,00	481.079.400,00	47.447.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD dan Stakeholder		476.996.355,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	35.720.000,00	35.264.300,00	35.264.300,00	-455.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			39.292.385,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	15.276.850,00	21.725.000,00	21.725.000,00	6.448.150,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			16.804.590,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	189.022.200,00	197.755.000,00	197.755.000,00	8.732.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			207.925.025,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	163.195.250,00	190.843.250,00	190.843.250,00	27.648.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			179.515.050,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.417.500,00	35.491.850,00	35.491.850,00	5.074.350,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			33.459.305,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Persentase terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan*				100 %	100 %	51.088.850,00	136.827.850,00	136.827.850,00	85.739.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD dan Stakeholder		56.198.395,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1 Laporan	1 Laporan	14.099.600,00	36.534.150,00	36.534.150,00	22.434.550,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			15.509.945,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	11.590.000,00	32.895.100,00	32.895.100,00	21.305.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			12.749.055,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1 Laporan	1 Laporan	15.399.750,00	35.264.500,00	35.264.500,00	19.864.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			16.939.725,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	9.999.500,00	32.134.100,00	32.134.100,00	22.134.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			10.999.670,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas DPRD*				100 %	100 %	756.440.000,00	1.868.821.000,00	1.870.179.000,00	1.113.739.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD dan Stakeholder		832.134.050,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				4 Dokumen	2 Dokumen	31.000.000,00	1.230.679.000,00	1.231.787.000,00	1.200.787.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			34.099.450,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	7 Orang	294.000.000,00	420.000.000,00	294.000.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			323.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				4 Dokumen	12 Dokumen	431.440.000,00	218.142.000,00	344.392.000,00	-87.048.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			474.634.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Persentase terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat*				100 %	100 %	3.067.269.800,00	5.383.364.800,00	5.383.364.800,00	2.316.095.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD dan Stakeholder		3.374.302.195,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	299.730.000,00	2.683.359.000,00	2.683.359.000,00	2.383.629.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			330.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	2.767.539.800,00	2.700.005.800,00	2.700.005.800,00	-67.534.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			3.044.302.195,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Persentase terlaksananya fasilitasi tugas DPRD*				100 %	100 %	1.849.851.000,00	8.304.399.000,00	8.304.399.000,00	6.454.548.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD dan Stakeholder		330.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.849.851.000,00	8.304.399.000,00	8.304.399.000,00	6.454.548.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			330.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							**8.386.570.599,00**	**7.625.312.737,00**	**7.641.877.843,00**	**-744.692.756,00**							**8.712.999.114,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.386.570.599,00**	**7.625.312.737,00**	**7.641.877.843,00**	**-744.692.756,00**							**8.712.999.114,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.986.571.099,00**	**7.411.038.187,00**	**7.427.603.493,00**	**-558.967.606,00**							**8.287.999.444,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**91,70 indeks**	**91,70 indeks**	**7.000.537.499,00**	**6.512.811.587,00**	**6.544.958.343,00**	**158.196.657,00**							**7.158.734.156,00**	
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**7.000.537.499,00**	**6.512.811.587,00**	**6.544.958.343,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**7.158.734.156,00**	-
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penggganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	86.480.550,00	58.628.300,00	61.292.900,00	-25.187.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		98.275.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	2 Dokumen	14.069.050,00	9.378.900,00	12.043.500,00	-2.025.550,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			15.645.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	69.766.500,00	46.604.400,00	46.604.400,00	-23.162.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			80.430.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**7.000.537.499,00**	**6.512.811.587,00**	**6.544.958.343,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**7.158.734.156,00**	-
	5.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.322.500,00	1.322.500,00	1.322.500,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	2 Data	1.322.500,00	1.322.500,00	1.322.500,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**7.000.537.499,00**	**6.512.811.587,00**	**6.544.958.343,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**7.158.734.156,00**	-
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	5.814.390.193,00	5.720.793.405,00	5.719.001.103,00	-95.389.090,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		5.794.957.943,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	41 Orang/bulan	5.418.150.393,00	5.324.193.605,00	5.324.201.103,00	-93.949.290,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			5.505.241.943,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	396.239.800,00	396.599.800,00	394.800.000,00	-1.439.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			289.716.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	0 %	46.473.800,00	0,00	0,00	-46.473.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		49.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				46 Paket	0 Paket	46.473.800,00	0,00	0,00	-46.473.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			49.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks layanan administrasi perangkat daerah*				75 %	75 %	493.164.806,00	230.220.950,00	246.884.450,00	-246.280.356,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		664.364.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	4.793.400,00	2.389.000,00	2.389.000,00	-2.404.400,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			5.040.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	17.445.900,00	0,00	9.283.350,00	-8.162.550,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			58.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	29.993.656,00	14.985.900,00	18.555.650,00	-11.438.006,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			31.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	14.962.100,00	7.430.600,00	11.241.000,00	-3.721.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			15.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.866.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-7.766.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			4.284.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4.991.000,00	2.495.500,00	2.495.500,00	-2.495.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			5.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	397.609.000,00	190.043.000,00	190.043.000,00	-207.566.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			521.640.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.322.500,00	1.322.500,00	1.322.500,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13.181.250,00	10.454.450,00	10.454.450,00	-2.726.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			21.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan BMD*				80 %	80 %	52.052.950,00	0,00	1.000.000,00	-51.052.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		111.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	8.500.700,00	0,00	0,00	-8.500.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			63.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	0 Unit	43.552.250,00	0,00	0,00	-43.552.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			47.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah*				80 %	80 %	235.177.200,00	238.900.932,00	252.511.890,00	17.334.690,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		259.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	82.997.200,00	118.247.200,00	118.247.200,00	35.250.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			80.850.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	152.180.000,00	120.653.732,00	134.264.690,00	-17.915.310,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			178.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*				80 %	80 %	272.798.000,00	264.268.000,00	264.268.000,00	-8.530.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		181.187.213,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			45.097.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	27 Unit	204.700.000,00	204.700.000,00	204.700.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			52.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	13 Unit	17.260.000,00	8.730.000,00	8.730.000,00	-8.530.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			21.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	11.648.000,00	11.648.000,00	11.648.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			62.589.713,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD, Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD**				**100, 100 100 %, % %**	**100, 100 100 %, % %**	**545.303.825,00**	**382.679.325,00**	**355.322.425,00**	**120.071.463,00**							**665.375.288,00**	
		[1. Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**545.303.825,00**	**382.679.325,00**	**355.322.425,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**665.375.288,00**	-
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPD* *Persentase Pagu Belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat*				100 % 20.00 %	100 % 20.00 %	368.793.375,00	271.890.875,00	234.858.375,00	-133.935.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		480.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	29.999.775,00	19.645.475,00	19.645.475,00	-10.354.300,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			31.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	71.614.975,00	53.566.225,00	29.183.725,00	-42.431.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			63.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				235 Usulan	235 Usulan	17.999.950,00	17.980.100,00	17.980.100,00	-19.850,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			18.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				3 Dokumen	2 Dokumen	249.178.675,00	180.699.075,00	168.049.075,00	-81.129.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			367.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase tingkat ketersediaan data pembangunan daerah*				98,5 %	98,5 %	11.500.000,00	7.666.350,00	7.666.350,00	-3.833.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		12.075.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	11.500.000,00	7.666.350,00	7.666.350,00	-3.833.650,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			12.075.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase data capaian kinerja PD yang akuntabel* *Persentase PD yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90%*				93,55 % 97.75 %	93,55 % 97.75 %	27.190.200,00	7.999.600,00	13.473.600,00	-13.716.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		28.550.288,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	0 Laporan	15.190.450,00	0,00	0,00	-15.190.450,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			15.950.288,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	11.999.750,00	7.999.600,00	13.473.600,00	1.473.850,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			12.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*Persentase implementasi SIPD sesuai tahapan perencanaan* *Tingkat aksebilitas data*				100 % 71.43 %	100 % 71.43 %	137.820.250,00	95.122.500,00	99.324.100,00	-38.496.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		143.850.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	87.820.500,00	71.069.550,00	75.271.150,00	-12.549.350,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			91.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	49.999.750,00	24.052.950,00	24.052.950,00	-25.946.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			52.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**1. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, 2. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, 3. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA**				**100.100.100 %,%,%**	**100.100.100 %,%,%**	**440.729.775,00**	**515.547.275,00**	**527.322.725,00**	**23.160.225,00**							**463.890.000,00**	
		[1. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 3. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**440.729.775,00**	**515.547.275,00**	**527.322.725,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**463.890.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia*				100 %	100 %	204.899.825,00	239.565.425,00	239.516.725,00	34.616.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		215.145.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	2 Dokumen	86.788.150,00	58.751.350,00	40.207.650,00	-46.580.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			23.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				32 Laporan	32 Laporan	40.989.225,00	33.539.525,00	32.434.525,00	-8.554.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			136.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				32 Laporan	0 Laporan	25.230.050,00	0,00	0,00	-25.230.050,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			42.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				32 Laporan	2 Laporan	51.892.400,00	147.274.550,00	166.874.550,00	114.982.150,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			13.545.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang ekonomi* *Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang ekonomi*				100 %	100 %	29.979.950,00	15.985.250,00	27.809.650,00	-2.170.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		32.550.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	0 Dokumen	7.499.750,00	0,00	0,00	-7.499.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			8.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				14 Laporan	14 Laporan	7.493.350,00	5.142.500,00	5.142.500,00	-2.350.850,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			7.875.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				14 Laporan	14 Laporan	7.487.050,00	5.262.950,00	5.848.850,00	-1.638.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			8.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				14 Laporan	2 Laporan	7.499.800,00	5.579.800,00	16.818.300,00	9.318.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			7.875.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan* *Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*				100 %	100 %	205.850.000,00	259.996.600,00	259.996.350,00	54.146.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		216.195.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	2 Dokumen	9.253.100,00	6.461.100,00	6.461.100,00	-2.792.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			50.295.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				16 Laporan	16 Laporan	70.212.150,00	61.186.200,00	17.936.200,00	-52.275.950,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			29.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				16 Laporan	16 Laporan	37.248.650,00	30.348.100,00	30.348.100,00	-6.900.550,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			57.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				16 Laporan	2 Laporan	89.136.100,00	162.001.200,00	205.250.950,00	116.114.850,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			78.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**399.999.500,00**	**214.274.550,00**	**214.274.350,00**	**-185.725.150,00**							**424.999.670,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah**				**80,00 %**	**80,00 %**	**300.000.000,00**	**145.175.850,00**	**10.175.850,00**	**15.000.000,00**							**315.000.000,00**	
		[Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**300.000.000,00**	**145.175.850,00**	**10.175.850,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**315.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Jumlah dokumen penelitian bidang sosial dan kependudukan yang disusun*				1 dokumen	0 dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		157.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			157.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah*				1 dokumen 1 Dokumen	1 dokumen	150.000.000,00	145.175.850,00	10.175.850,00	-139.824.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		157.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	145.175.850,00	10.175.850,00	-139.824.150,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			157.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	**Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah**				**85 %**	**85 %**	**99.999.500,00**	**69.098.700,00**	**204.098.500,00**	**10.000.170,00**							**109.999.670,00**	
		[Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**99.999.500,00**	**69.098.700,00**	**204.098.500,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**109.999.670,00**	-
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	*Meningkatnya daya saing dan kinerja daerah melalui penerapan inovasi yang berkelanjutan*				-	100 %	99.999.500,00	69.098.700,00	204.098.500,00	104.099.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		109.999.670,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.03.2.02.0004	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah																		
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah				1 Laporan	1 Laporan	79.999.600,00	69.098.700,00	204.098.500,00	124.098.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			87.999.670,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.03.2.02.0007	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi																		
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi				1 Laporan	0 Laporan	19.999.900,00	0,00	0,00	-19.999.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			22.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAERAH							**17.927.219.274,00**	**19.055.966.696,00**	**22.060.165.096,00**	**4.132.945.822,00**							**18.985.728.690,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**17.927.219.274,00**	**19.055.966.696,00**	**22.060.165.096,00**	**4.132.945.822,00**							**18.985.728.690,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**17.927.219.274,00**	**19.055.966.696,00**	**22.060.165.096,00**	**4.132.945.822,00**							**18.985.728.690,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**85.00 Indeks**	**85.00 Indeks**	**12.787.171.344,00**	**13.318.150.696,00**	**13.388.055.746,00**	**-454.624.781,00**							**12.332.546.563,00**	
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90**	**90**	**90**	-	-	**12.787.171.344,00**	**13.318.150.696,00**	**13.388.055.746,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**12.332.546.563,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penggganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	52.738.500,00	52.739.450,00	52.739.450,00	950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Stakeholder		45.838.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	29.195.350,00	22.858.700,00	22.858.700,00	-6.336.650,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			22.834.900,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	21.542.150,00	21.542.150,00	21.542.150,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			21.003.600,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**12.787.171.344,00**	**13.318.150.696,00**	**13.388.055.746,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**12.332.546.563,00**	-
	5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.500,00	3.756.600,00	3.756.600,00	2.756.100,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	1.000.500,00	4.582.000,00	4.582.000,00	3.581.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90**	**90**	**90**	-	-	**12.787.171.344,00**	**13.318.150.696,00**	**13.388.055.746,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**12.332.546.563,00**	-
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	10.093.490.704,00	10.574.842.910,00	10.574.842.910,00	481.352.206,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Stakeholder		9.708.044.573,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/bulan	62 Orang/bulan	9.515.950.754,00	9.989.978.610,00	9.989.978.610,00	474.027.856,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			9.294.623.973,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	550.097.000,00	565.174.500,00	565.174.500,00	15.077.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			386.141.300,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	27.442.950,00	19.689.800,00	19.689.800,00	-7.753.150,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			27.279.300,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	65.669.500,00	0,00	48.655.050,00	-17.014.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Stakeholder		65.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				65 Paket	0 Paket	65.669.500,00	0,00	0,00	-65.669.500,00	-	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			65.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	65 Orang	0,00	0,00	48.655.050,00	48.655.050,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks layanan administrasi perangkat daerah*				75 %	75 %	650.150.440,00	469.741.536,00	469.741.536,00	-180.408.904,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Stakeholder		652.310.100,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	3.565.800,00	2.179.100,00	2.179.100,00	-1.386.700,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			3.630.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				41 Paket	41 Paket	42.620.240,00	23.763.586,00	23.763.586,00	-18.856.654,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			42.967.600,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	28.031.700,00	24.014.500,00	24.014.500,00	-4.017.200,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			28.773.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	59.383.200,00	59.790.500,00	59.790.500,00	407.300,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			53.119.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	515.549.000,00	356.223.000,00	356.223.000,00	-159.326.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH SISA DBH SAWIT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			522.820.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**12.787.171.344,00**	**13.318.150.696,00**	**13.388.055.746,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**12.332.546.563,00**	-
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.500,00	3.770.850,00	3.770.850,00	2.770.350,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90**	**90**	**90**	-	-	**12.787.171.344,00**	**13.318.150.696,00**	**13.388.055.746,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**12.332.546.563,00**	-
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan BMD*				80 %	80 %	133.062.200,00	0,00	21.250.000,00	-111.812.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Stakeholder		0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	18.099.000,00	0,00	0,00	-18.099.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	114.963.200,00	0,00	0,00	-114.963.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	21.250.000,00	21.250.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah*				80 %	80 %	306.740.000,00	304.706.800,00	304.706.800,00	-2.033.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Stakeholder		259.293.390,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	3.220.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	-1.710.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			6.095.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	303.520.000,00	303.196.800,00	303.196.800,00	-323.200,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			253.198.390,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*				80 %	80 %	385.320.000,00	416.120.000,00	416.120.000,00	30.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Stakeholder		502.060.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			42.950.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	35 Unit	312.250.000,00	343.050.000,00	343.050.000,00	30.800.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			439.110.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	33.880.000,00	33.880.000,00	33.880.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			20.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah diluar Tunjangan Guru** **Persentase Penurunan SILPA** **Opini BPK atas Laporan Keuangan**				**WTP** **11** **51.54 Nilai** **%** **%**	**51.54** **11** **WTP %** **%** **Nilai**	**3.097.918.280,00**	**4.155.087.150,00**	**7.085.182.100,00**	**624.405.197,00**							**3.722.323.477,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**3.097.918.280,00**	**4.155.087.150,00**	**7.085.182.100,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**3.722.323.477,00**	-
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*persentase dokumen penganggaran yang dihasilkan*				100 %	100 %	1.612.484.915,00	1.537.978.000,00	1.537.978.000,00	-74.506.915,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		1.616.157.800,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	28.371.015,00	26.181.800,00	26.181.800,00	-2.189.215,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			28.371.150,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	28.882.150,00	25.039.700,00	25.039.700,00	-3.842.450,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			29.074.700,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	19.460.000,00	15.657.650,00	15.657.650,00	-3.802.350,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			21.856.300,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	21.471.750,00	19.766.100,00	19.766.100,00	-1.705.650,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			22.240.150,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	3.144.300,00	1.643.150,00	1.643.150,00	-1.501.150,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			3.583.350,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	5.981.000,00	5.194.350,00	5.194.350,00	-786.650,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			5.536.950,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.398.034.250,00	1.357.836.950,00	1.357.836.950,00	-40.197.300,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.398.034.550,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	80.536.050,00	63.753.800,00	63.753.800,00	-16.782.250,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			80.536.300,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				3 Dokumen	3 Dokumen	26.604.400,00	22.904.500,00	22.904.500,00	-3.699.900,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			26.924.350,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase meningkatnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah*				100 %	100 %	479.435.150,00	279.868.550,00	209.963.500,00	-269.471.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		485.353.525,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	6.519.250,00	3.979.400,00	3.979.400,00	-2.539.850,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			6.525.200,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				124 Dokumen	124 Dokumen	118.142.900,00	105.490.000,00	35.584.950,00	-82.557.950,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			118.148.250,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				60 Dokumen	60 Dokumen	110.036.600,00	76.487.100,00	76.487.100,00	-33.549.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			110.057.475,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				750 Laporan	750 Laporan	36.388.800,00	14.885.000,00	14.885.000,00	-21.503.800,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			38.555.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				384 Dokumen	384 Dokumen	51.546.500,00	29.208.900,00	29.208.900,00	-22.337.600,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			54.342.550,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				2 Dokumen	2 Dokumen	10.607.000,00	4.458.800,00	4.458.800,00	-6.148.200,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			11.526.900,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				80 Orang	80 Orang	146.194.100,00	45.359.350,00	45.359.350,00	-100.834.750,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			146.198.150,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Persentase meningkatnya kualitas laporan keuangan PD*				100 %	100 %	469.243.950,00	235.780.200,00	235.780.200,00	-233.463.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		1.092.395.079,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				87 Dokumen	87 Dokumen	19.403.650,00	13.218.300,00	13.218.300,00	-6.185.350,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			390.203.750,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				21 Laporan	21 Laporan	54.681.950,00	51.717.350,00	51.717.350,00	-2.964.600,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			55.240.866,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				2 Laporan	2 Laporan	45.673.900,00	45.399.750,00	45.399.750,00	-274.150,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			316.874.250,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	65.088.700,00	64.995.000,00	64.995.000,00	-93.700,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			72.279.715,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.035.100,00	3.404.900,00	3.404.900,00	-3.630.200,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			31.396.054,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.074.950,00	3.312.000,00	3.312.000,00	-3.762.950,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			9.405.897,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	7.910.800,00	5.499.500,00	5.499.500,00	-2.411.300,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			8.702.397,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				154 Orang	154 Orang	262.374.900,00	48.233.400,00	48.233.400,00	-214.141.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			208.292.150,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Persentase pengelolaan urusan kewenangan daerah dan bantuan yang tersalurkan*				70 %	70 %	290.409.265,00	2.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4.709.590.735,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		334.149.765,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				-	1 Laporan	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	290.409.265,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.709.590.735,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			334.149.765,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Persentase pengelolaan dan implementasi sistem terhadap data keuangan daerah*				100 %	100 %	246.345.000,00	101.460.400,00	101.460.400,00	-144.884.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		194.267.308,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				45 Dokumen	45 Dokumen	10.070.300,00	7.923.300,00	7.923.300,00	-2.147.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			11.826.254,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	102.852.800,00	55.558.600,00	55.558.600,00	-47.294.200,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			82.874.800,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				32 Orang	32 Orang	133.421.900,00	37.978.500,00	37.978.500,00	-95.443.400,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			99.566.254,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap**				**5.00 %**	**5.00 %**	**915.159.650,00**	**685.372.550,00**	**685.372.550,00**	**623.242.000,00**							**1.538.401.650,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase BMD dan Aset Kota yang terkelola dengan baik*				100 %	100 %	915.159.650,00	685.372.550,00	685.372.550,00	-229.787.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		1.538.401.650,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	62.785.450,00	51.355.850,00	51.355.850,00	-11.429.600,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			58.444.150,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	41.268.700,00	36.057.200,00	36.057.200,00	-5.211.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			41.740.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				31 Laporan	31 Laporan	318.822.500,00	99.322.500,00	99.322.500,00	-219.500.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			320.871.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				31 Laporan	31 Laporan	341.660.300,00	326.808.200,00	326.808.200,00	-14.852.100,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				31 Dokumen	31 Dokumen	62.861.050,00	108.753.550,00	108.753.550,00	45.892.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			44.997.300,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				31 Laporan	31 Laporan	77.849.550,00	53.163.150,00	53.163.150,00	-24.686.400,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			693.891.200,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				31 Laporan	31 Laporan	9.912.100,00	9.912.100,00	9.912.100,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			78.457.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah**				**19 100 % %**	**100 20 % %**	**1.126.970.000,00**	**897.356.300,00**	**901.554.700,00**	**265.487.000,00**							**1.392.457.000,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah Nilai IKM*				5 % 87 Nilai	5 % 87 Nilai	1.126.970.000,00	897.356.300,00	901.554.700,00	-225.415.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD Terkait dan Stakeholder		1.392.457.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	72.894.150,00	50.614.650,00	50.614.650,00	-22.279.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			156.278.250,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				25 Unit	25 Unit	162.267.700,00	61.356.100,00	61.356.100,00	-100.911.600,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			311.070.050,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	133.066.650,00	127.587.200,00	127.587.200,00	-5.479.450,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			141.516.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	36.717.450,00	16.342.250,00	16.342.250,00	-20.375.200,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			36.566.350,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				2 Obyek Pajak	2 Obyek Pajak	72.679.100,00	78.680.050,00	78.680.050,00	6.000.950,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			34.969.750,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	71.740.950,00	37.524.350,00	37.524.350,00	-34.216.600,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			89.827.150,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				2 Layanan	2 Layanan	160.028.800,00	86.942.600,00	86.942.600,00	-73.086.200,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			247.540.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	33.295.500,00	62.530.200,00	62.530.200,00	29.234.700,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			31.741.250,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	124.666.800,00	78.476.200,00	78.476.200,00	-46.190.600,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			96.105.800,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	94.050.200,00	88.426.900,00	88.426.900,00	-5.623.300,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			91.888.200,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				12 Laporan	12 Laporan	165.562.700,00	208.875.800,00	213.074.200,00	47.511.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			154.954.200,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
		UPTD FASILITASI PEMBIAYAAN							**17.927.219.274,00**	**19.055.966.696,00**	**22.060.165.096,00**	**4.132.945.822,00**							**18.985.728.690,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**17.927.219.274,00**	**19.055.966.696,00**	**22.060.165.096,00**	**4.132.945.822,00**							**18.985.728.690,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**17.927.219.274,00**	**19.055.966.696,00**	**22.060.165.096,00**	**4.132.945.822,00**							**18.985.728.690,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**85.00 Indeks**	**85.00 Indeks**	**12.787.171.344,00**	**13.318.150.696,00**	**13.388.055.746,00**	**-454.624.781,00**							**12.332.546.563,00**	
	5.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase fasilitasi pembiayaan yang lancar dari total pembiayaan*				100 persen	100 persen	1.100.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	400.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	OPD dan Stakeholder		1.100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.100.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	400.000.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**18.695.028.948,00**	**9.557.634.013,00**	**9.553.114.301,00**	**-9.141.914.647,00**							**3.628.106.026,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**18.695.028.948,00**	**9.557.634.013,00**	**9.553.114.301,00**	**-9.141.914.647,00**							**3.628.106.026,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**18.679.947.398,00**	**8.948.963.463,00**	**8.944.443.751,00**	**-9.735.503.647,00**							**2.838.704.826,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**91.30 Indeks**	**91.30 Indeks**	**18.411.258.998,00**	**7.880.358.263,00**	**8.090.216.551,00**	**-16.557.057.772,00**							**1.854.201.226,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**Nilai IKM** **Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90** **94.55**	**90** **91.00**	**90** **92.00**	-	-	**18.411.258.998,00**	**7.880.358.263,00**	**8.090.216.551,00**	-	-	-	-	-	-	**90** **92.50**	**1.854.201.226,00**	-
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penggganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	274.570.150,00	234.755.000,00	201.470.000,00	-73.100.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN BKPSDM Kota Payakumbuh		295.999.150,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	5.246.650,00	4.205.000,00	4.205.000,00	-1.041.650,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			5.241.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	266.908.500,00	227.330.000,00	194.045.000,00	-72.863.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			270.757.350,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**18.411.258.998,00**	**7.880.358.263,00**	**8.090.216.551,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**1.854.201.226,00**	-
	5.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.207.500,00	1.610.000,00	1.610.000,00	402.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	1.207.500,00	1.610.000,00	1.610.000,00	402.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**Nilai IKM** **Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90** **94.55**	**90** **91.00**	**90** **92.00**	-	-	**18.411.258.998,00**	**7.880.358.263,00**	**8.090.216.551,00**	-	-	-	-	-	-	**90** **92.50**	**1.854.201.226,00**	-
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	17.425.453.498,00	7.118.817.737,00	7.098.127.737,00	-10.327.325.761,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN BKPSDM Kota Payakumbuh		436.741.350,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				333 Orang/ bulan	333 Orang/ bulan	17.131.693.498,00	6.825.127.737,00	6.825.127.737,00	-10.306.565.761,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			270.757.350,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	293.760.000,00	293.690.000,00	273.000.000,00	-20.760.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			165.984.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	0 %	51.400.400,00	0,00	0,00	-51.400.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN BKPSDM Kota Payakumbuh		51.081.850,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				74 Paket	0 Paket	51.400.400,00	0,00	0,00	-51.400.400,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			51.081.850,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks layanan administrasi perangkat daerah*				75 %	75 %	263.640.470,00	150.348.270,00	171.312.470,00	-92.328.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN BKPSDM Kota Payakumbuh		274.413.950,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.789.500,00	10.789.500,00	13.253.700,00	2.464.200,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			10.971.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	31.469.020,00	29.768.020,00	29.768.020,00	-1.701.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			33.279.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.985.200,00	12.200.000,00	12.200.000,00	-785.200,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			12.992.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.493.500,00	4.493.500,00	4.493.500,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			4.498.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	3 Laporan	2.673.750,00	1.489.250,00	1.489.250,00	-1.184.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			2.673.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	200.022.000,00	89.998.000,00	108.498.000,00	-91.524.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**18.411.258.998,00**	**7.880.358.263,00**	**8.090.216.551,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**1.854.201.226,00**	-
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.207.500,00	1.610.000,00	1.610.000,00	402.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**Nilai IKM** **Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90** **94.55**	**90** **91.00**	**90** **92.00**	-	-	**18.411.258.998,00**	**7.880.358.263,00**	**8.090.216.551,00**	-	-	-	-	-	-	**90** **92.50**	**1.854.201.226,00**	-
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan BMD*				80 %	80 %	1.500.000,00	0,00	332.438.000,00	330.938.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN BKPSDM Kota Payakumbuh		395.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	500.000,00	0,00	332.438.000,00	331.938.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			310.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	0 Unit	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah*				80 %	80 %	188.168.480,00	169.911.256,00	129.478.344,00	-58.690.136,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN BKPSDM Kota Payakumbuh		173.974.926,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	46.988.480,00	46.988.480,00	35.988.480,00	-11.000.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			46.994.926,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.980.000,00	3.980.000,00	7.960.000,00	3.980.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			3.980.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	137.200.000,00	118.942.776,00	85.529.864,00	-51.670.136,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			123.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*				80 %	80 %	206.526.000,00	206.526.000,00	157.390.000,00	-49.136.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	BKPSDM Kota Payakumbuh		226.990.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			42.950.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	118.200.000,00	118.200.000,00	118.200.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			134.040.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	49.136.000,00	49.136.000,00	0,00	-49.136.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya**				**12 Persentase**	**12 Persentase**	**268.688.400,00**	**1.068.605.200,00**	**854.227.200,00**	**715.815.200,00**							**984.503.600,00**	
		[Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya]	**Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya**	**12.00**	**11.64**	**12.00**	-	-	**268.688.400,00**	**1.068.605.200,00**	**854.227.200,00**	-	-	-	-	-	-	**12.00**	**984.503.600,00**	-
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Persentase penerimaan PNS sesuai dengan formasi yang dibutuhkan*				100 %	100 %	18.059.000,00	109.021.700,00	76.621.700,00	58.562.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kota Payakumbuh		314.739.450,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	5.059.600,00	5.059.600,00	5.059.600,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			5.059.950,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	1 Laporan	4.999.750,00	95.962.450,00	63.562.450,00	58.562.700,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			301.680.050,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.999.700,00	2.999.700,00	2.999.700,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			2.999.650,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	4.999.950,00	4.999.950,00	4.999.950,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			4.999.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Persentase penyusunan formasi yang sesuai dengan analisis jabatan*				100 %	100 %	14.999.350,00	479.594.550,00	320.006.550,00	305.007.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kota Payakumbuh		185.413.450,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	4.999.950,00	4.999.950,00	4.999.950,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			4.999.950,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	4.999.350,00	30.197.850,00	30.197.850,00	25.198.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			4.999.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.050,00	444.396.750,00	284.808.750,00	279.808.700,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			175.414.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Persentase PNS yang difasilitasi tugas belajar dan izin belajar untuk Pengembangan Kompetensi ASN*				100 %	100 %	220.000.050,00	292.270.450,00	268.270.450,00	48.270.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kota Payakumbuh		371.439.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				15 Orang	15 Orang	220.000.050,00	292.270.450,00	268.270.450,00	48.270.400,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			371.439.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*				100 %	100 %	15.630.000,00	187.718.500,00	189.328.500,00	173.698.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kota Payakumbuh		112.911.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	3.967.100,00	59.631.050,00	59.631.050,00	55.663.950,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			3.967.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				250 Orang	250 Orang	2.718.550,00	79.338.550,00	79.338.550,00	76.620.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				10 Orang	10 Orang	4.479.050,00	34.856.300,00	34.856.300,00	30.377.250,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			4.479.150,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				10 Dokumen	10 Dokumen	4.465.300,00	13.892.600,00	15.502.600,00	11.037.300,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			4.465.550,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**15.081.550,00**	**608.670.550,00**	**608.670.550,00**	**593.589.000,00**							**789.401.200,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis**				**12 Persentase**	**12 Persentase**	**15.081.550,00**	**608.670.550,00**	**608.670.550,00**	**774.319.650,00**							**789.401.200,00**	
		[Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional]	**Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis**	**12.00**	**11.64**	**12.00**	-	-	**15.081.550,00**	**608.670.550,00**	**608.670.550,00**	-	-	-	-	-	-	**12.00**	**789.401.200,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi*				64 %	64 %	5.081.450,00	256.347.050,00	256.347.050,00	251.265.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kota Payakumbuh		244.201.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				100 Orang	100 Orang	5.081.450,00	256.347.050,00	256.347.050,00	251.265.600,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			244.201.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Persentase ASN yang memiliki sertifikat Kompetensi Manajerial*				61.00 %	61.00 %	10.000.100,00	352.323.500,00	352.323.500,00	342.323.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kota Payakumbuh		545.199.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.050,00	145.570.100,00	145.570.100,00	140.570.050,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			276.335.450,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.050,00	206.753.400,00	206.753.400,00	201.753.350,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			268.864.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT							**10.534.402.272,00**	**10.001.033.141,00**	**9.998.119.071,00**	**-536.283.201,00**							**10.613.296.199,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.534.402.272,00**	**10.001.033.141,00**	**9.998.119.071,00**	**-536.283.201,00**							**10.613.296.199,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**10.534.402.272,00**	**10.001.033.141,00**	**9.998.119.071,00**	**-536.283.201,00**							**10.613.296.199,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**89.00 Indeks**	**89.00 Indeks**	**9.445.241.772,00**	**9.324.339.841,00**	**9.300.878.271,00**	**-136.190.323,00**							**9.309.051.449,00**	
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**9.445.241.772,00**	**9.324.339.841,00**	**9.300.878.271,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**9.309.051.449,00**	-
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	112.836.800,00	43.121.300,00	50.567.550,00	-62.269.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Inspektorat Kota Payakumbuh		69.934.250,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	8.969.300,00	2.995.050,00	2.995.050,00	-5.974.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			8.968.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	96.622.500,00	38.113.750,00	46.566.250,00	-50.056.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			60.965.750,00	INSPEKTORAT
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**9.445.241.772,00**	**9.324.339.841,00**	**9.300.878.271,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**9.309.051.449,00**	-
	6.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	3.622.500,00	1.006.250,00	0,00	-3.622.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	3.622.500,00	1.006.250,00	1.006.250,00	-2.616.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	INSPEKTORAT
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**9.445.241.772,00**	**9.324.339.841,00**	**9.300.878.271,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**9.309.051.449,00**	-
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	8.155.715.842,00	8.515.275.027,00	8.446.175.027,00	290.459.185,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Inspektorat Kota Payakumbuh		8.190.757.119,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	7.902.755.842,00	8.262.315.027,00	8.262.315.027,00	359.559.185,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			7.943.797.119,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	252.960.000,00	252.960.000,00	183.860.000,00	-69.100.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			246.960.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	302.834.100,00	197.218.000,00	197.218.000,00	-105.616.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Inspektorat Kota Payakumbuh		302.788.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	0 Paket	54.556.200,00	0,00	0,00	-54.556.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			55.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	12 Orang	238.240.250,00	197.218.000,00	197.218.000,00	-41.022.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			237.763.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	0 Orang	10.037.650,00	0,00	0,00	-10.037.650,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			10.025.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks layanan administrasi perangkat daerah*				75 %	75 %	394.569.010,00	153.745.060,00	188.902.460,00	-205.666.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Inspektorat Kota Payakumbuh		327.113.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.948.900,00	2.034.000,00	2.034.000,00	-1.914.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			3.973.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	9.970.000,00	0,00	10.080.900,00	110.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			100.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	0 Paket	22.220.500,00	0,00	0,00	-22.220.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			100.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	69.856.160,00	27.511.460,00	39.752.460,00	-30.103.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			69.923.750,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.469.000,00	4.061.600,00	13.013.100,00	2.544.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			10.470.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0 Dokumen	7.736.700,00	0,00	0,00	-7.736.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			7.746.900,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.436.250,00	4.002.000,00	7.886.000,00	-2.550.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			10.436.250,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48 Laporan	12 Laporan	252.929.000,00	115.021.000,00	115.021.000,00	-137.908.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			222.753.100,00	INSPEKTORAT
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**9.445.241.772,00**	**9.324.339.841,00**	**9.300.878.271,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**9.309.051.449,00**	-
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	7.002.500,00	1.115.000,00	1.115.000,00	-5.887.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.610.000,00	INSPEKTORAT
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**9.445.241.772,00**	**9.324.339.841,00**	**9.300.878.271,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**9.309.051.449,00**	-
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan BMD*				80 %	0 %	53.373.950,00	0,00	0,00	-53.373.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Inspektorat Kota Payakumbuh		200.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	40.451.200,00	0,00	0,00	-40.451.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			100.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	12.922.750,00	0,00	0,00	-12.922.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			100.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah*				80 %	80 %	123.032.070,00	130.860.454,00	128.785.234,00	5.753.164,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Inspektorat Kota Payakumbuh		109.899.080,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	123.032.070,00	130.860.454,00	128.785.234,00	5.753.164,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			109.899.080,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*				80 %	80 %	302.880.000,00	284.120.000,00	289.230.000,00	-13.650.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Inspektorat Kota Payakumbuh		308.360.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			42.950.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	236.400.000,00	236.400.000,00	236.400.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			247.400.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	27.290.000,00	8.530.000,00	13.640.000,00	-13.650.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			18.010.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**				**3 Level**	**3 Level**	**955.566.300,00**	**645.078.300,00**	**665.625.800,00**	**-91.634.800,00**							**863.931.500,00**	
		[Nilai Kapabilitas APIP]	**Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**	**Dikelola (Managed)**	**Terintegrasi (Integrated)**	**Terintegrasi (Integrated)**	-	-	**955.566.300,00**	**645.078.300,00**	**665.625.800,00**	-	-	-	-	-	-	**Terintegrasi (Integrated)**	**863.931.500,00**	-
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Persentase pelaksanaan pengawasan Internal*				100 %	100 %	762.844.250,00	498.059.550,00	518.607.050,00	-244.237.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Organisasi Perangkat Daerah		689.467.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				31 Laporan	31 Laporan	141.617.250,00	175.006.650,00	175.006.650,00	33.389.400,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			125.930.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				31 Laporan	31 Laporan	567.814.500,00	275.002.900,00	275.002.900,00	-292.811.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			534.558.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	4 Dokumen	53.412.500,00	48.050.000,00	68.597.500,00	15.185.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			28.979.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Persentase pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu*				100 %	100 %	192.722.050,00	147.018.750,00	147.018.750,00	-45.703.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Organisasi Perangkat Daerah		174.464.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				4 Laporan	4 Laporan	32.352.000,00	26.990.000,00	26.990.000,00	-5.362.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			22.152.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				10 Laporan	10 Laporan	160.370.050,00	120.028.750,00	120.028.750,00	-40.341.300,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			152.312.500,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**				**3 Level**	**3 Level**	**133.594.200,00**	**31.615.000,00**	**31.615.000,00**	**306.719.050,00**							**440.313.250,00**	
		[Nilai Maturitas SPIP]	**Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**	**Terkelola dan Terukur**	**Terdefinisi**	**Terdefinisi**	-	-	**133.594.200,00**	**31.615.000,00**	**31.615.000,00**	-	-	-	-	-	-	**Terdefinisi**	**440.313.250,00**	-
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan*				100 %	100 %	133.594.200,00	31.615.000,00	31.615.000,00	-101.979.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Organisasi Perangkat Daerah		440.313.250,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				31 perangkat daerah	31 perangkat daerah	53.363.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00	-23.358.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			53.372.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				12 Kegiatan	1 Kegiatan	80.231.200,00	1.610.000,00	1.610.000,00	-78.621.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			386.940.750,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM**				**91,00 Indeks**	**91,00 Indeks**	**13.855.281.865,00**	**14.714.753.852,00**	**14.775.210.232,00**	**621.605.272,00**							**14.476.887.137,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**Nilai IKM** **Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90** **91**	**90** **91**	**90** **91**	-	-	**13.855.281.865,00**	**14.714.753.852,00**	**14.775.210.232,00**	-	-	-	-	-	-	**90** **91**	**14.476.887.137,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penggganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	131.161.700,00	161.745.200,00	111.258.250,00	-19.903.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Barat		123.209.725,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	55.147.700,00	55.147.700,00	32.315.800,00	-22.831.900,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			28.599.725,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	74.001.500,00	104.182.500,00	77.734.950,00	3.733.450,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			82.610.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**13.855.281.865,00**	**14.714.753.852,00**	**14.775.210.232,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**14.476.887.137,00**	-
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	1.006.250,00	1.207.500,00	0,00	-1.006.250,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			6.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	1.006.250,00	1.207.500,00	1.207.500,00	201.250,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			6.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**Nilai IKM** **Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90** **91**	**90** **91**	**90** **91**	-	-	**13.855.281.865,00**	**14.714.753.852,00**	**14.775.210.232,00**	-	-	-	-	-	-	**90** **91**	**14.476.887.137,00**	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	12.125.139.485,00	12.600.365.076,00	12.600.365.076,00	475.225.591,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Barat		12.418.143.301,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	11.314.659.485,00	11.797.325.076,00	11.797.325.076,00	482.665.591,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			11.886.711.301,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	810.480.000,00	803.040.000,00	803.040.000,00	-7.440.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			531.432.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks layanan administrasi perangkat daerah*				75 %	75 %	187.732.720,00	121.445.140,00	148.367.920,00	-39.364.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Barat		339.427.655,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	5.179.650,00	3.668.250,00	3.668.250,00	-1.511.400,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			13.190.100,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	136.559.620,00	74.572.390,00	79.927.670,00	-56.631.950,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			203.501.155,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10.000.200,00	8.135.000,00	8.135.000,00	-1.865.200,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			20.900.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	34.987.000,00	33.862.000,00	56.637.000,00	21.650.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			95.836.400,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**13.855.281.865,00**	**14.714.753.852,00**	**14.775.210.232,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**14.476.887.137,00**	-
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	1.006.250,00	1.207.500,00	0,00	-1.006.250,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			6.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**Nilai IKM** **Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90** **91**	**90** **91**	**90** **91**	-	-	**13.855.281.865,00**	**14.714.753.852,00**	**14.775.210.232,00**	-	-	-	-	-	-	**90** **91**	**14.476.887.137,00**	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan BMD*				80 %	80 %	60.111.000,00	60.111.000,00	217.006.750,00	156.895.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Barat		65.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	60.111.000,00	60.111.000,00	217.006.750,00	156.895.750,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			65.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah*				80 %	80 %	1.005.597.400,00	1.425.095.736,00	1.352.220.536,00	346.623.136,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Barat		1.113.799.456,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	102.530.000,00	156.011.700,00	123.311.700,00	20.781.700,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			103.747.600,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	903.067.400,00	1.269.084.036,00	1.228.908.836,00	325.841.436,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.010.051.856,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*				80 %	80 %	345.539.560,00	345.991.700,00	345.991.700,00	452.140,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Barat		417.307.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				61 Unit	61 Unit	255.000.000,00	235.750.000,00	235.750.000,00	-19.250.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			310.750.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				37 Unit	37 Unit	39.674.360,00	30.760.000,00	30.760.000,00	-8.914.360,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			51.557.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	50.865.200,00	79.481.700,00	79.481.700,00	28.616.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			55.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu**				**75 85 % %**	**75 85 % %**	**40.102.150,00**	**42.338.800,00**	**40.408.550,00**	**4.200.350,00**							**44.302.500,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**40.102.150,00**	**42.338.800,00**	**40.408.550,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**44.302.500,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Usulan Musrenbang yang menjadi skala prioritas*				75 %	75 %	35.116.900,00	37.353.550,00	26.103.550,00	-9.013.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Barat		38.499.725,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	35.116.900,00	37.353.550,00	26.103.550,00	-9.013.350,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			38.499.725,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
		[Persentase Pelayanan Yang Diproses Tepat Waktu, Persentase Usulan Musrebang Kecamatan Payakumbuh Barat Yang Diterima Perangkat Daerah]	**Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu** **Persentase usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah**	**100** **75**	**100** **75**	**100** **75**	-	-	**40.102.150,00**	**42.338.800,00**	**40.408.550,00**	-	-	-	-	-	-	**100** **75**	**44.302.500,00**	-
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase ketersediaan Dokumen Pelayanan Publik*				100 %	100 %	4.985.250,00	4.985.250,00	14.305.000,00	9.319.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Barat		5.802.775,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	4.985.250,00	4.985.250,00	14.305.000,00	9.319.750,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			5.802.775,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai IKM** **Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif**				**91** **100 Indeks %**	**91** **100 Indeks %**	**3.704.195.535,00**	**3.479.918.823,00**	**3.650.910.253,00**	**459.619.741,00**							**4.163.815.276,00**	
		[1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif 2. IKM Kelurahan]	**Nilai IKM** **Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif**	**100** **91**	**100** **91**	**100** **91**	-	-	**3.704.195.535,00**	**3.479.918.823,00**	**3.650.910.253,00**	-	-	-	-	-	-	**100** **91**	**4.163.815.276,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 %	85 %	3.608.536.435,00	3.413.116.023,00	3.578.807.453,00	-29.728.982,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Barat		4.004.399.536,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	208.499.950,00	0,00	0,00	-208.499.950,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			229.349.890,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Kegiatan lingkup Pemberdayaan yang difasilitasi*				100 %	100 %	95.659.100,00	66.802.800,00	72.102.800,00	-23.556.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Barat		159.415.740,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	95.659.100,00	66.802.800,00	72.102.800,00	-23.556.300,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			159.415.740,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti**				**100 %**	**100 %**	**12.515.425,00**	**12.515.425,00**	**14.475.425,00**	**1.161.150,00**							**13.676.575,00**	
		[Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindak Lanjuti]	**Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti**	**100**	**100**	**100**	-	-	**12.515.425,00**	**12.515.425,00**	**14.475.425,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**13.676.575,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Kegiatan lingkup Trantib yang difasilitasi*				100 %	100 %	12.515.425,00	12.515.425,00	14.475.425,00	1.960.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Barat		13.676.575,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	12.515.425,00	12.515.425,00	14.475.425,00	1.960.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			13.676.575,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**106.963.600,00**	**187.608.200,00**	**229.821.875,00**	**5.266.637,00**							**112.230.237,00**	
		[Persentase Kegiatan Kemasyarakatan Yang Difasilitasi]	**Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi**	**100**	**100**	**100**	-	-	**106.963.600,00**	**187.608.200,00**	**229.821.875,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**112.230.237,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Pembinaan dan Monitoring, Evaluasi Lembaga Kemasyarakatan yang terlaksana*				85 %	85 %	106.963.600,00	187.608.200,00	229.821.875,00	122.858.275,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Barat		112.230.237,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				3 Dokumen	3 Dokumen	67.992.000,00	148.636.600,00	200.344.750,00	132.352.750,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			90.599.927,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	38.971.600,00	38.971.600,00	29.477.125,00	-9.494.475,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			21.630.310,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
		KELURAHAN BULAKAN BALAI KANDI							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif**				**91,00 100 indeks %**	**91,00 100 indeks %**	**3.704.195.535,00**	**3.479.918.823,00**	**3.650.910.253,00**	**459.619.741,00**							**4.163.815.276,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**3.704.195.535,00**	**3.479.918.823,00**	**3.650.910.253,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**4.163.815.276,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 %	85 %	3.608.536.435,00	3.413.116.023,00	3.578.807.453,00	-29.728.982,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kelurahan Bulakan Balai Kandi		4.004.399.536,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	65.975.160,00	65.975.160,00	65.975.160,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			72.578.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	134.024.805,00	134.052.835,00	148.140.335,00	14.115.530,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN SISA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			147.421.780,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
		KELURAHAN IBUH							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif**				**91,00 100 indeks %**	**91,00 100 indeks %**	**3.704.195.535,00**	**3.479.918.823,00**	**3.650.910.253,00**	**459.619.741,00**							**4.163.815.276,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 %	85 %	3.608.536.435,00	3.413.116.023,00	3.578.807.453,00	-29.728.982,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kelurahan Ibuh		4.004.399.536,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	106.645.710,00	76.045.160,00	76.045.160,00	-30.600.550,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			79.380.796,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	93.353.370,00	123.962.820,00	123.962.820,00	30.609.450,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			140.619.380,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
		KELURAHAN KOTO TANGAH							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan**				**100 91,00 % indeks**	**100 91,00 % indeks**	**3.704.195.535,00**	**3.479.918.823,00**	**3.650.910.253,00**	**459.619.741,00**							**4.163.815.276,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 %	85 %	3.608.536.435,00	3.413.116.023,00	3.578.807.453,00	-29.728.982,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kelurahan Koto Tangah		4.004.399.536,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	101.769.960,00	99.460.440,00	200.669.870,00	98.899.910,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Koto Tangah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN SISA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			149.607.865,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	98.230.050,00	100.770.400,00	101.450.400,00	3.220.350,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Koto Tangah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN SISA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			70.391.937,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
		KELURAHAN KUBU GADANG							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan**				**100 91,00 % indeks**	**100 91,00 % indeks**	**3.704.195.535,00**	**3.479.918.823,00**	**3.650.910.253,00**	**459.619.741,00**							**4.163.815.276,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 %	85 %	3.608.536.435,00	3.413.116.023,00	3.578.807.453,00	-29.728.982,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kelurahan Kubu Gadang		4.004.399.536,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	116.289.970,00	104.823.590,00	104.823.590,00	-11.466.380,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Kubu Gadang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			115.637.995,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	83.711.175,00	95.176.775,00	95.176.775,00	11.465.600,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Kubu Gadang	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			104.361.708,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
		KELURAHAN LABUAH BASILANG							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan**				**100 91,00 % indeks**	**100 91,00 % indeks**	**3.704.195.535,00**	**3.479.918.823,00**	**3.650.910.253,00**	**459.619.741,00**							**4.163.815.276,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 %	85 %	3.608.536.435,00	3.413.116.023,00	3.578.807.453,00	-29.728.982,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kelurahan Labuah Basilang		4.004.399.536,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	61.561.819,00	53.232.216,00	53.232.216,00	-8.329.603,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Labuah Basilang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			67.723.700,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	138.438.450,00	146.768.100,00	146.768.100,00	8.329.650,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Labuah Basilang	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			152.276.300,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
		KELURAHAN SUBARANG BATUANG							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif**				**91,00 100 indeks %**	**91,00 100 indeks %**	**3.704.195.535,00**	**3.479.918.823,00**	**3.650.910.253,00**	**459.619.741,00**							**4.163.815.276,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 %	85 %	3.608.536.435,00	3.413.116.023,00	3.578.807.453,00	-29.728.982,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kelurahan Subarang Batuang		4.004.399.536,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	74.225.260,00	51.977.810,00	51.977.810,00	-22.247.450,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Subarang Batuang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			139.416.200,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	125.773.700,00	148.021.150,00	169.420.750,00	43.647.050,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Subarang Batuang	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN SISA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			85.904.940,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
		KELURAHAN NUNANG DAYA BANGUN							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan**				**100 91,00 % indeks**	**100 91,00 % indeks**	**3.704.195.535,00**	**3.479.918.823,00**	**3.650.910.253,00**	**459.619.741,00**							**4.163.815.276,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 %	85 %	3.608.536.435,00	3.413.116.023,00	3.578.807.453,00	-29.728.982,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kelurahan Nunang Daya Bangun		4.004.399.536,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	83.005.650,00	76.785.510,00	76.785.510,00	-6.220.140,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Nunang Daya Bangun	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			157.302.915,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	116.994.600,00	123.214.550,00	123.214.550,00	6.219.950,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Nunang Daya Bangun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			62.967.261,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
		KELURAHAN PADANGDATA TANAHMATI							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**KECAMATAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan**				**100 91,00 % indeks**	**100 91,00 % indeks**	**3.704.195.535,00**	**3.479.918.823,00**	**3.650.910.253,00**	**459.619.741,00**							**4.163.815.276,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 %	85 %	3.608.536.435,00	3.413.116.023,00	3.578.807.453,00	-29.728.982,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kelurahan Padangdata Tanahmati		4.004.399.536,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	117.393.460,00	80.870.510,00	80.870.510,00	-36.522.950,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Padangdata Tanahmati	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			129.140.770,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	82.606.755,00	119.129.855,00	124.754.855,00	42.148.100,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Padangdata Tanahmati	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN SISA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			90.859.560,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
		KELURAHAN PADANG TINGGI PILIANG							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan**				**100 91,00 % indeks**	**100 91,00 % indeks**	**3.704.195.535,00**	**3.479.918.823,00**	**3.650.910.253,00**	**459.619.741,00**							**4.163.815.276,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 %	85 %	3.608.536.435,00	3.413.116.023,00	3.578.807.453,00	-29.728.982,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kelurahan Padang Tinggi Piliang		4.004.399.536,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	57.125.510,00	47.690.410,00	47.690.410,00	-9.435.100,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Padang Tinggi Piliang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			71.271.200,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	142.875.250,00	152.312.700,00	171.403.750,00	28.528.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Padang Tinggi Piliang	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN SISA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			148.729.900,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
		KELURAHAN PADANGTONGAH BALAINANDUO							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan**				**100 91,00 % indeks**	**100 91,00 % indeks**	**3.704.195.535,00**	**3.479.918.823,00**	**3.650.910.253,00**	**459.619.741,00**							**4.163.815.276,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 %	85 %	3.608.536.435,00	3.413.116.023,00	3.578.807.453,00	-29.728.982,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kelurahan Padangtongah Balainanduo		4.004.399.536,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	98.340.952,00	99.490.550,00	99.490.550,00	1.149.598,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Padangtongah Balainanduo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			107.903.840,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	101.660.175,00	100.509.800,00	100.509.800,00	-1.150.375,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Padangtongah Balainanduo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			112.096.479,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
		KELURAHAN PAKAN SINAYAN							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif**				**91,00 100 indeks %**	**91,00 100 indeks %**	**3.704.195.535,00**	**3.479.918.823,00**	**3.650.910.253,00**	**459.619.741,00**							**4.163.815.276,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 %	85 %	3.608.536.435,00	3.413.116.023,00	3.578.807.453,00	-29.728.982,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kelurahan Pakan Sinayan		4.004.399.536,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	73.740.960,00	57.762.810,00	57.762.810,00	-15.978.150,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Pakan Sinayan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			125.502.300,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	126.259.380,00	142.237.530,00	142.237.530,00	15.978.150,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Pakan Sinayan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			123.955.700,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
		KELURAHAN PARAK BATUANG							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan**				**100 91,00 % indeks**	**100 91,00 % indeks**	**3.704.195.535,00**	**3.479.918.823,00**	**3.650.910.253,00**	**459.619.741,00**							**4.163.815.276,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 %	85 %	3.608.536.435,00	3.413.116.023,00	3.578.807.453,00	-29.728.982,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kelurahan Parak Batuang		4.004.399.536,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	102.530.260,00	89.194.560,00	89.194.560,00	-13.335.700,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Parak Batuang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			116.652.800,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	97.471.595,00	110.805.495,00	110.805.495,00	13.333.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Parak Batuang	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			103.347.310,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
		KELURAHAN PARIT RANTANG							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif**				**91,00 100 indeks %**	**91,00 100 indeks %**	**3.704.195.535,00**	**3.479.918.823,00**	**3.650.910.253,00**	**459.619.741,00**							**4.163.815.276,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 %	85 %	3.608.536.435,00	3.413.116.023,00	3.578.807.453,00	-29.728.982,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kelurahan Parit Rantang		4.004.399.536,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	97.762.360,00	76.494.360,00	76.494.360,00	-21.268.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Parik Rantang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			114.059.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	102.237.975,00	123.505.795,00	123.505.795,00	21.267.820,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Parik Rantang	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			105.940.890,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
		KELURAHAN PAYOLANSEK							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan**				**100 91,00 % indeks**	**100 91,00 % indeks**	**3.704.195.535,00**	**3.479.918.823,00**	**3.650.910.253,00**	**459.619.741,00**							**4.163.815.276,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 %	85 %	3.608.536.435,00	3.413.116.023,00	3.578.807.453,00	-29.728.982,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kelurahan Payolansek		4.004.399.536,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	106.266.370,00	81.028.720,00	81.028.720,00	-25.237.650,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Payolansek	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			117.150.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	93.762.000,00	118.928.430,00	118.928.430,00	25.166.430,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Payolansek	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			102.850.066,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
		KELURAHAN TALANG							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan**				**100 91,00 % indeks**	**100 91,00 % indeks**	**3.704.195.535,00**	**3.479.918.823,00**	**3.650.910.253,00**	**459.619.741,00**							**4.163.815.276,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 %	85 %	3.608.536.435,00	3.413.116.023,00	3.578.807.453,00	-29.728.982,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kelurahan Talang		4.004.399.536,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	61.717.610,00	82.393.350,00	82.393.350,00	20.675.740,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Talang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			90.051.830,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	138.282.440,00	117.606.650,00	117.606.650,00	-20.675.790,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Talang	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			129.947.939,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
		KELURAHAN TANJUNG PAUH							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif**				**91,00 100 indeks %**	**91,00 100 indeks %**	**3.704.195.535,00**	**3.479.918.823,00**	**3.650.910.253,00**	**459.619.741,00**							**4.163.815.276,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 %	85 %	3.608.536.435,00	3.413.116.023,00	3.578.807.453,00	-29.728.982,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kelurahan Tanjung Pauh		4.004.399.536,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	77.392.360,00	96.285.510,00	98.084.360,00	20.692.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjung Pauh	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN SISA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			62.707.920,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	122.612.000,00	103.714.900,00	105.514.900,00	-17.097.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjung Pauh	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN SISA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			157.291.387,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
		KELURAHAN TANJUNGGODANG SUNGAIPINAGO							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**KECAMATAN**							**17.719.058.575,00**	**18.437.135.100,00**	**18.710.826.335,00**	**991.767.760,00**							**18.810.911.725,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan**				**100 91,00 % indeks**	**100 91,00 % indeks**	**3.704.195.535,00**	**3.479.918.823,00**	**3.650.910.253,00**	**459.619.741,00**							**4.163.815.276,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 %	85 %	3.608.536.435,00	3.413.116.023,00	3.578.807.453,00	-29.728.982,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kelurahan Tanjunggodang Sungaipinago		4.004.399.536,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	71.896.024,00	71.894.452,00	71.894.452,00	-1.572,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			85.318.442,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	128.103.370,00	140.993.120,00	140.993.120,00	12.889.750,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			134.681.536,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
		KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR							**11.508.003.483,00**	**11.430.080.373,00**	**11.663.656.078,00**	**155.652.595,00**							**12.160.454.550,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.508.003.483,00**	**11.430.080.373,00**	**11.663.656.078,00**	**155.652.595,00**							**12.160.454.550,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.508.003.483,00**	**11.430.080.373,00**	**11.663.656.078,00**	**155.652.595,00**							**12.160.454.550,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**91.00 Indeks**	**91.00 Indeks**	**9.330.016.133,00**	**9.411.184.673,00**	**9.504.025.677,00**	**589.872.958,00**							**9.919.889.091,00**	
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**Nilai IKM** **Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90** **91**	**90** **91**	**90** **91**	-	-	**9.330.016.133,00**	**9.411.184.673,00**	**9.504.025.677,00**	-	-	-	-	-	-	**90** **91**	**9.919.889.091,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	53.928.000,00	26.669.650,00	26.669.650,00	-27.258.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Timur		64.471.880,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	20.710.900,00	14.694.950,00	14.694.950,00	-6.015.950,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			22.782.210,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	29.997.100,00	11.764.500,00	11.764.500,00	-18.232.600,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			38.147.670,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**9.330.016.133,00**	**9.411.184.673,00**	**9.504.025.677,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**9.919.889.091,00**	-
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	1.610.000,00	105.100,00	105.100,00	-1.504.900,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.771.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				3 Data	3 Data	1.610.000,00	105.100,00	105.100,00	-1.504.900,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.771.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**Nilai IKM** **Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90** **91**	**90** **91**	**90** **91**	-	-	**9.330.016.133,00**	**9.411.184.673,00**	**9.504.025.677,00**	-	-	-	-	-	-	**90** **91**	**9.919.889.091,00**	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	7.769.670.374,00	8.232.618.085,00	8.232.618.085,00	462.947.711,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Timur		8.420.396.494,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	7.268.190.374,00	7.734.618.085,00	7.734.618.085,00	466.427.711,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			8.105.761.294,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Dokumen	10 Dokumen	501.480.000,00	498.000.000,00	498.000.000,00	-3.480.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			314.635.200,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	66.299.410,00	105.100,00	105.100,00	-66.194.310,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Timur		66.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	66.299.410,00	105.100,00	105.100,00	-66.194.310,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			66.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks layanan administrasi perangkat daerah*				75 %	75 %	157.559.185,00	99.135.255,00	93.933.124,00	-63.626.061,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Timur		158.601.617,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.354.800,00	4.469.600,00	4.469.600,00	3.114.800,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.377.585,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	34.908.585,00	31.975.355,00	26.773.224,00	-8.135.361,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			37.461.532,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.604.900,00	8.612.100,00	8.612.100,00	7.200,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			6.058.800,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				528 Dokumen	528 Dokumen	5.149.900,00	105.100,00	105.100,00	-5.044.800,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			5.662.800,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9 Laporan	9 Laporan	105.931.000,00	53.868.000,00	53.868.000,00	-52.063.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			106.269.900,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**9.330.016.133,00**	**9.411.184.673,00**	**9.504.025.677,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**9.919.889.091,00**	-
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.610.000,00	105.100,00	105.100,00	-1.504.900,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.771.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**Nilai IKM** **Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90** **91**	**90** **91**	**90** **91**	-	-	**9.330.016.133,00**	**9.411.184.673,00**	**9.504.025.677,00**	-	-	-	-	-	-	**90** **91**	**9.919.889.091,00**	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan BMD*				80 %	80 %	185.712.200,00	131.542.000,00	194.355.500,00	8.643.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Timur		205.483.300,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	59.974.200,00	6.750.000,00	69.563.500,00	9.589.300,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			74.211.500,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	125.738.000,00	124.792.000,00	124.792.000,00	-946.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			131.271.800,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah*				80 %	80 %	724.982.109,00	721.959.483,00	757.189.118,00	32.207.009,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Timur		785.353.404,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	77.599.579,00	56.503.800,00	56.503.800,00	-21.095.779,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			85.363.036,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	258.650,00	258.650,00	258.650,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			12.452.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				19 Laporan	19 Laporan	647.123.880,00	665.197.033,00	700.426.668,00	53.302.788,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			687.538.368,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor dalam Keadaan Baik*				80 %	80 %	371.864.855,00	199.155.100,00	199.155.100,00	-172.709.755,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Timur		219.582.396,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				43 Unit	43 Unit	189.550.000,00	189.550.000,00	189.550.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			208.505.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	20.194.360,00	9.500.000,00	9.500.000,00	-10.694.360,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			10.967.396,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	162.120.495,00	105.100,00	105.100,00	-162.015.395,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			110.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu**				**70 85,00 % %**	**70 85,00 % %**	**53.702.250,00**	**24.417.400,00**	**24.417.400,00**	**5.315.225,00**							**59.017.475,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**53.702.250,00**	**24.417.400,00**	**24.417.400,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**59.017.475,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan*				100 persen	100 persen	39.989.500,00	18.926.300,00	18.926.300,00	-21.063.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Timur		43.933.450,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	39.989.500,00	18.926.300,00	18.926.300,00	-21.063.200,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			43.933.450,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
		[1. Persentase usulan Musrenbang Kec. Payakumbuh Timur yang diterima Perangkat Daerah 2. Persentase pelayanan yang diproses tepat waktu]	**Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu Persentase usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah**	**70 85**	**70 85**	**70 85**	-	-	**53.702.250,00**	**24.417.400,00**	**24.417.400,00**	-	-	-	-	-	-	**70 85**	**59.017.475,00**	-
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Dokumen Pelayanan yang Diproses*				100 Persen	100 Persen	13.712.750,00	5.491.100,00	5.491.100,00	-8.221.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Timur		15.084.025,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	13.712.750,00	5.491.100,00	5.491.100,00	-8.221.650,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			15.084.025,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM**				**100 91.00 % Indeks**	**100 91.00 % Indeks**	**2.002.338.550,00**	**1.881.053.950,00**	**2.021.788.651,00**	**75.443.959,00**							**2.077.782.509,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.002.338.550,00**	**1.881.053.950,00**	**2.021.788.651,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**2.077.782.509,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 Persen	85 Persen	1.881.858.700,00	1.800.105.100,00	1.940.839.801,00	58.981.101,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Timur		1.945.254.674,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	81.858.700,00	105.100,00	105.100,00	-81.753.600,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			90.044.570,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Difasilitasi*				100 Persen	100 Persen	120.479.850,00	80.948.850,00	80.948.850,00	-39.531.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Timur		132.527.835,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	120.479.850,00	80.948.850,00	80.948.850,00	-39.531.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			132.527.835,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti**				**100 %**	**100 %**	**24.519.300,00**	**14.675.400,00**	**14.675.400,00**	**-24.519.300,00**							**0,00**	
		[Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti]	**Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti**	**100**	**100**	**100**	-	-	**24.519.300,00**	**14.675.400,00**	**14.675.400,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Kegiatan Trantibum yang Difasilitasi*				100 Persen	100 Persen	24.519.300,00	14.675.400,00	14.675.400,00	-9.843.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat Payakumbuh Timur		0,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	24.519.300,00	14.675.400,00	14.675.400,00	-9.843.900,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**97.427.250,00**	**98.748.950,00**	**98.748.950,00**	**6.338.225,00**							**103.765.475,00**	
		[Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi]	**Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi**	**100**	**100**	**100**	-	-	**97.427.250,00**	**98.748.950,00**	**98.748.950,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**103.765.475,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Peningkatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan*				100 Persen	100 Persen	97.427.250,00	98.748.950,00	98.748.950,00	1.321.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Timur		103.765.475,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				3 Dokumen	3 Dokumen	90.393.750,00	93.271.950,00	93.271.950,00	2.878.200,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			96.018.725,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.033.500,00	5.477.000,00	5.477.000,00	-1.556.500,00	-	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			7.746.750,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
		KELURAHAN BALAI JARIANG							**11.508.003.483,00**	**11.430.080.373,00**	**11.663.656.078,00**	**155.652.595,00**							**12.160.454.550,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.508.003.483,00**	**11.430.080.373,00**	**11.663.656.078,00**	**155.652.595,00**							**12.160.454.550,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.508.003.483,00**	**11.430.080.373,00**	**11.663.656.078,00**	**155.652.595,00**							**12.160.454.550,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM**				**100 91.00 % Indeks**	**100 91.00 % Indeks**	**2.002.338.550,00**	**1.881.053.950,00**	**2.021.788.651,00**	**75.443.959,00**							**2.077.782.509,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.002.338.550,00**	**1.881.053.950,00**	**2.021.788.651,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**2.077.782.509,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 Persen	85 Persen	1.881.858.700,00	1.800.105.100,00	1.940.839.801,00	58.981.101,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Timur		1.945.254.674,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	74.224.300,00	96.067.600,00	96.067.600,00	21.843.300,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Balai Jaring	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			81.344.560,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	125.775.700,00	103.932.400,00	103.932.400,00	-21.843.300,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Balai Jaring	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			13.865.544,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
		KELURAHAN KOTO BARU							**11.508.003.483,00**	**11.430.080.373,00**	**11.663.656.078,00**	**155.652.595,00**							**12.160.454.550,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.508.003.483,00**	**11.430.080.373,00**	**11.663.656.078,00**	**155.652.595,00**							**12.160.454.550,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.508.003.483,00**	**11.430.080.373,00**	**11.663.656.078,00**	**155.652.595,00**							**12.160.454.550,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai IKM Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif**				**91.00 100 Indeks %**	**91.00 100 Indeks %**	**2.002.338.550,00**	**1.881.053.950,00**	**2.021.788.651,00**	**75.443.959,00**							**2.077.782.509,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 Persen	85 Persen	1.881.858.700,00	1.800.105.100,00	1.940.839.801,00	58.981.101,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Timur		1.945.254.674,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	50.457.650,00	45.697.150,00	45.697.150,00	-4.760.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Baru	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			67.901.350,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	149.542.350,00	154.302.850,00	154.302.850,00	4.760.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Baru	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			152.098.650,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
		KELURAHAN KOTO PANJANG							**11.508.003.483,00**	**11.430.080.373,00**	**11.663.656.078,00**	**155.652.595,00**							**12.160.454.550,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.508.003.483,00**	**11.430.080.373,00**	**11.663.656.078,00**	**155.652.595,00**							**12.160.454.550,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.508.003.483,00**	**11.430.080.373,00**	**11.663.656.078,00**	**155.652.595,00**							**12.160.454.550,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM**				**100 91.00 % Indeks**	**100 91.00 % Indeks**	**2.002.338.550,00**	**1.881.053.950,00**	**2.021.788.651,00**	**75.443.959,00**							**2.077.782.509,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 Persen	85 Persen	1.881.858.700,00	1.800.105.100,00	1.940.839.801,00	58.981.101,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Timur		1.945.254.674,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	91.748.350,00	80.285.100,00	80.285.100,00	-11.463.250,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			102.886.685,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	108.251.650,00	119.714.900,00	119.714.900,00	11.463.250,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			117.113.315,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
		KELURAHAN PADANG ALAI BODI							**11.508.003.483,00**	**11.430.080.373,00**	**11.663.656.078,00**	**155.652.595,00**							**12.160.454.550,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.508.003.483,00**	**11.430.080.373,00**	**11.663.656.078,00**	**155.652.595,00**							**12.160.454.550,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.508.003.483,00**	**11.430.080.373,00**	**11.663.656.078,00**	**155.652.595,00**							**12.160.454.550,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM**				**100 91.00 % Indeks**	**100 91.00 % Indeks**	**2.002.338.550,00**	**1.881.053.950,00**	**2.021.788.651,00**	**75.443.959,00**							**2.077.782.509,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 Persen	85 Persen	1.881.858.700,00	1.800.105.100,00	1.940.839.801,00	58.981.101,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Timur		1.945.254.674,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	103.069.250,00	73.395.650,00	84.313.650,00	-18.755.600,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Padang Alai Bodi	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN SISA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			113.321.901,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	96.930.750,00	126.604.350,00	145.686.350,00	48.755.600,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Padang Alai Bodi	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN SISA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			106.678.099,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
		KELURAHAN PADANG TANGAH PAYOBADAR							**11.508.003.483,00**	**11.430.080.373,00**	**11.663.656.078,00**	**155.652.595,00**							**12.160.454.550,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.508.003.483,00**	**11.430.080.373,00**	**11.663.656.078,00**	**155.652.595,00**							**12.160.454.550,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.508.003.483,00**	**11.430.080.373,00**	**11.663.656.078,00**	**155.652.595,00**							**12.160.454.550,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM**				**100 91.00 % Indeks**	**100 91.00 % Indeks**	**2.002.338.550,00**	**1.881.053.950,00**	**2.021.788.651,00**	**75.443.959,00**							**2.077.782.509,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 Persen	85 Persen	1.881.858.700,00	1.800.105.100,00	1.940.839.801,00	58.981.101,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Timur		1.945.254.674,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	74.354.450,00	60.584.750,00	120.734.750,00	46.380.300,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Padang Tangah Payobadar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN SISA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			80.849.395,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	125.645.550,00	139.415.250,00	139.849.951,00	14.204.401,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Padang Tangah Payobadar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN SISA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			139.150.605,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
		KELURAHAN PADANG TIAKAR							**11.508.003.483,00**	**11.430.080.373,00**	**11.663.656.078,00**	**155.652.595,00**							**12.160.454.550,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.508.003.483,00**	**11.430.080.373,00**	**11.663.656.078,00**	**155.652.595,00**							**12.160.454.550,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.508.003.483,00**	**11.430.080.373,00**	**11.663.656.078,00**	**155.652.595,00**							**12.160.454.550,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai IKM Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif**				**91.00 100 Indeks %**	**91.00 100 Indeks %**	**2.002.338.550,00**	**1.881.053.950,00**	**2.021.788.651,00**	**75.443.959,00**							**2.077.782.509,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 Persen	85 Persen	1.881.858.700,00	1.800.105.100,00	1.940.839.801,00	58.981.101,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Timur		1.945.254.674,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	80.491.960,00	54.880.460,00	54.880.460,00	-25.611.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Padang Tiakar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			91.801.600,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	119.508.040,00	145.119.540,00	145.119.540,00	25.611.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Padang Tiakar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			128.198.400,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
		KELURAHAN PAYOBASUNG							**11.508.003.483,00**	**11.430.080.373,00**	**11.663.656.078,00**	**155.652.595,00**							**12.160.454.550,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.508.003.483,00**	**11.430.080.373,00**	**11.663.656.078,00**	**155.652.595,00**							**12.160.454.550,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.508.003.483,00**	**11.430.080.373,00**	**11.663.656.078,00**	**155.652.595,00**							**12.160.454.550,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM**				**100 91.00 % Indeks**	**100 91.00 % Indeks**	**2.002.338.550,00**	**1.881.053.950,00**	**2.021.788.651,00**	**75.443.959,00**							**2.077.782.509,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 Persen	85 Persen	1.881.858.700,00	1.800.105.100,00	1.940.839.801,00	58.981.101,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Timur		1.945.254.674,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	89.091.700,00	52.607.900,00	52.607.900,00	-36.483.800,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Payobasung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			98.000.870,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	110.908.300,00	147.392.100,00	147.392.100,00	36.483.800,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Payobasung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			121.999.130,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
		KELURAHAN SICINCIN							**11.508.003.483,00**	**11.430.080.373,00**	**11.663.656.078,00**	**155.652.595,00**							**12.160.454.550,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.508.003.483,00**	**11.430.080.373,00**	**11.663.656.078,00**	**155.652.595,00**							**12.160.454.550,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.508.003.483,00**	**11.430.080.373,00**	**11.663.656.078,00**	**155.652.595,00**							**12.160.454.550,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM**				**100 91.00 % Indeks**	**100 91.00 % Indeks**	**2.002.338.550,00**	**1.881.053.950,00**	**2.021.788.651,00**	**75.443.959,00**							**2.077.782.509,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 Persen	85 Persen	1.881.858.700,00	1.800.105.100,00	1.940.839.801,00	58.981.101,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Timur		1.945.254.674,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	90.464.200,00	63.455.420,00	63.455.420,00	-27.008.780,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Sicincin	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			99.510.620,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	109.535.800,00	136.544.580,00	136.544.580,00	27.008.780,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Sicincin	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			120.489.380,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
		KELURAHAN TIAKAR							**11.508.003.483,00**	**11.430.080.373,00**	**11.663.656.078,00**	**155.652.595,00**							**12.160.454.550,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.508.003.483,00**	**11.430.080.373,00**	**11.663.656.078,00**	**155.652.595,00**							**12.160.454.550,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.508.003.483,00**	**11.430.080.373,00**	**11.663.656.078,00**	**155.652.595,00**							**12.160.454.550,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai IKM Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif**				**91.00 100 Indeks %**	**91.00 100 Indeks %**	**2.002.338.550,00**	**1.881.053.950,00**	**2.021.788.651,00**	**75.443.959,00**							**2.077.782.509,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 Persen	85 Persen	1.881.858.700,00	1.800.105.100,00	1.940.839.801,00	58.981.101,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Timur		1.945.254.674,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	49.521.150,00	41.143.750,00	91.293.750,00	41.772.600,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Tiakar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN SISA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			54.444.896,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	150.478.850,00	158.856.250,00	158.856.250,00	8.377.400,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Tiakar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			165.555.104,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
		KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA							**11.186.600.777,00**	**10.800.670.234,00**	**11.083.578.104,00**	**-103.022.673,00**							**11.827.450.919,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.186.600.777,00**	**10.800.670.234,00**	**11.083.578.104,00**	**-103.022.673,00**							**11.827.450.919,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**KECAMATAN**							**11.186.600.777,00**	**10.800.670.234,00**	**11.083.578.104,00**	**-103.022.673,00**							**11.827.450.919,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**91 Indeks**	**91 Indeks**	**9.098.759.554,00**	**8.653.222.790,00**	**8.725.391.235,00**	**603.866.745,00**							**9.702.626.299,00**	
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**Nilai IKM** **Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90** **91**	**90** **91**	**90** **91**	-	-	**9.098.759.554,00**	**8.653.222.790,00**	**8.725.391.235,00**	-	-	-	-	-	-	**90** **91**	**9.702.626.299,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	24.803.250,00	17.343.450,00	17.343.450,00	-7.459.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Utara		23.591.280,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	14.418.650,00	11.426.000,00	11.426.000,00	-2.992.650,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			7.628.500,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	7.969.600,00	4.710.250,00	4.710.250,00	-3.259.350,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			15.962.780,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**9.098.759.554,00**	**8.653.222.790,00**	**8.725.391.235,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**9.702.626.299,00**	-
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.207.500,00	603.600,00	603.600,00	-603.900,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	1.207.500,00	603.600,00	603.600,00	-603.900,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**Nilai IKM** **Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90** **91**	**90** **91**	**90** **91**	-	-	**9.098.759.554,00**	**8.653.222.790,00**	**8.725.391.235,00**	-	-	-	-	-	-	**90** **91**	**9.702.626.299,00**	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	8.122.203.881,00	7.334.323.385,00	7.334.323.385,00	-787.880.496,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Utara		8.335.395.962,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	7.611.963.881,00	6.824.683.385,00	6.824.683.385,00	-787.280.496,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			8.009.514.362,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	510.240.000,00	509.640.000,00	509.640.000,00	-600.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			325.881.600,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	0 %	80.800,00	0,00	0,00	-80.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Utara		58.300.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				53 Paket	0 Paket	80.800,00	0,00	0,00	-80.800,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			58.300.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks layanan administrasi perangkat daerah*				75 %	75 %	107.534.030,00	95.130.850,00	133.182.850,00	25.648.820,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Kecamatan Payakumbuh Utara		200.940.125,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.854.000,00	1.255.250,00	1.255.250,00	-1.598.750,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			4.548.975,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	47.430.730,00	39.566.800,00	39.566.800,00	-7.863.930,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			75.849.800,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.989.800,00	5.611.800,00	5.611.800,00	-378.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			9.018.950,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	50.052.000,00	48.097.000,00	63.793.000,00	13.741.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			111.522.400,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**9.098.759.554,00**	**8.653.222.790,00**	**8.725.391.235,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**9.702.626.299,00**	-
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.207.500,00	600.000,00	22.956.000,00	21.748.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**Nilai IKM** **Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90** **91**	**90** **91**	**90** **91**	-	-	**9.098.759.554,00**	**8.653.222.790,00**	**8.725.391.235,00**	-	-	-	-	-	-	**90** **91**	**9.702.626.299,00**	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan BMD*				80 %	80 %	242.400,00	0,00	79.189.900,00	78.947.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Utara		242.550,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	13 Unit	80.800,00	0,00	79.189.900,00	79.109.100,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			80.850,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**9.098.759.554,00**	**8.653.222.790,00**	**8.725.391.235,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**9.702.626.299,00**	-
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	80.800,00	0,00	0,00	-80.800,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			80.850,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	80.800,00	0,00	0,00	-80.800,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			80.850,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**Nilai IKM** **Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90** **91**	**90** **91**	**90** **91**	-	-	**9.098.759.554,00**	**8.653.222.790,00**	**8.725.391.235,00**	-	-	-	-	-	-	**90** **91**	**9.702.626.299,00**	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah*				80 %	80 %	659.913.593,00	1.024.115.105,00	986.741.650,00	326.828.057,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Utara		825.827.682,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	3 Laporan	91.522.400,00	99.595.120,00	50.007.080,00	-41.515.320,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			100.674.902,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.400.000,00	574.650,00	574.650,00	-825.350,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			3.347.500,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	566.991.193,00	923.945.335,00	936.159.920,00	369.168.727,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			721.805.280,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*				80 %	80 %	183.981.600,00	182.310.000,00	174.610.000,00	-9.371.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Utara		258.328.700,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				41 Unit	40 Unit	170.300.000,00	174.150.000,00	166.450.000,00	-3.850.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			252.934.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	12 Unit	13.520.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00	-5.360.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			5.233.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	80.800,00	0,00	0,00	-80.800,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			80.850,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	80.800,00	0,00	0,00	-80.800,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			80.850,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase usulan musrenbang yang diterima Perangkat Daerah Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu**				**75 85 % %**	**75 85 % %**	**31.677.800,00**	**22.540.800,00**	**27.515.800,00**	**16.254.035,00**							**47.931.835,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**31.677.800,00**	**22.540.800,00**	**27.515.800,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**47.931.835,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan*				75 %	75 %	28.105.900,00	21.112.300,00	21.087.300,00	-7.018.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Utara		40.202.635,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	28.105.900,00	21.112.300,00	21.087.300,00	-7.018.600,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			40.202.635,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
		[Persentase usulan Musrenbang Kec. Payakumbuh Utara yang diterima Perangkat Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu]	**Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu** **Persentase usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah**	**75** **85**	**75** **85**	**75** **85**	-	-	**31.677.800,00**	**22.540.800,00**	**27.515.800,00**	-	-	-	-	-	-	**75** **85**	**47.931.835,00**	-
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Dokumen Pelayanan yang diproses*				100 %	100 %	3.571.900,00	1.428.500,00	6.428.500,00	2.856.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Utara		7.729.200,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	3.571.900,00	1.428.500,00	6.428.500,00	2.856.600,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			7.729.200,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif** **Nilai IKM**				**100** **91 %** **Indeks**	**100** **91 %** **Indeks**	**1.969.011.223,00**	**1.934.583.394,00**	**2.057.619.369,00**	**7.614.417,00**							**1.976.625.640,00**	
		[1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif 2. IKM Kelurahan]	**Nilai IKM** **Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif**	**100** **91**	**100** **91**	**100** **91**	-	-	**1.969.011.223,00**	**1.934.583.394,00**	**2.057.619.369,00**	-	-	-	-	-	-	**100** **91**	**1.976.625.640,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan*				85 %	0 %	1.920.128.373,00	1.897.665.144,00	2.010.701.469,00	90.573.096,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Utara		1.922.854.505,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				27 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	120.126.375,00	97.662.775,00	0,00	-120.126.375,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			122.853.225,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi*				100 %	100 %	48.882.850,00	36.918.250,00	46.917.900,00	-1.964.950,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Utara		53.771.135,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	48.882.850,00	36.918.250,00	46.917.900,00	-1.964.950,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			53.771.135,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti**				**100 %**	**100 %**	**3.270.000,00**	**1.307.350,00**	**11.786.150,00**	**6.327.000,00**							**9.597.000,00**	
		[Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti]	**Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti**	**100**	**100**	**100**	-	-	**3.270.000,00**	**1.307.350,00**	**11.786.150,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**9.597.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Kegiatan trantibum yang difasilitas*				100 %	100 %	3.270.000,00	1.307.350,00	11.786.150,00	8.516.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Utara		9.597.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	3.270.000,00	1.307.350,00	11.786.150,00	8.516.150,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			9.597.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**83.882.200,00**	**189.015.900,00**	**261.265.550,00**	**6.787.945,00**							**90.670.145,00**	
		[Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi]	**Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi**	**100**	**100**	**100**	-	-	**83.882.200,00**	**189.015.900,00**	**261.265.550,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**90.670.145,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Pembinaan dan monev lembaga kemasyarakatan yang terlaksana*				100 %	100 %	83.882.200,00	189.015.900,00	261.265.550,00	177.383.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Utara		90.670.145,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				2 Dokumen	2 Dokumen	80.258.200,00	186.666.800,00	253.916.450,00	173.658.250,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			81.683.745,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.624.000,00	2.349.100,00	7.349.100,00	3.725.100,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			8.986.400,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
		KELURAHAN BALAI TONGAH KOTO							**11.186.600.777,00**	**10.800.670.234,00**	**11.083.578.104,00**	**-103.022.673,00**							**11.827.450.919,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.186.600.777,00**	**10.800.670.234,00**	**11.083.578.104,00**	**-103.022.673,00**							**11.827.450.919,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.186.600.777,00**	**10.800.670.234,00**	**11.083.578.104,00**	**-103.022.673,00**							**11.827.450.919,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM**				**100 91 % Indeks**	**100 91 % Indeks**	**1.969.011.223,00**	**1.934.583.394,00**	**2.057.619.369,00**	**7.614.417,00**							**1.976.625.640,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.969.011.223,00**	**1.934.583.394,00**	**2.057.619.369,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**1.976.625.640,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan*				85 %	85 %	1.920.128.373,00	1.897.665.144,00	2.010.701.469,00	90.573.096,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kel.Balai Tangah Koto		1.922.854.505,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	9 Unit	98.161.400,00	74.112.140,00	74.112.140,00	-24.049.260,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Balai Tongah Koto	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			68.801.360,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	101.838.950,00	125.888.200,00	125.888.200,00	24.049.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Balai Tongah Koto	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			131.198.700,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
		KELURAHAN IKUA KOTO DIBALAI							**11.186.600.777,00**	**10.800.670.234,00**	**11.083.578.104,00**	**-103.022.673,00**							**11.827.450.919,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.186.600.777,00**	**10.800.670.234,00**	**11.083.578.104,00**	**-103.022.673,00**							**11.827.450.919,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.186.600.777,00**	**10.800.670.234,00**	**11.083.578.104,00**	**-103.022.673,00**							**11.827.450.919,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM**				**100 91 % Indeks**	**100 91 % Indeks**	**1.969.011.223,00**	**1.934.583.394,00**	**2.057.619.369,00**	**7.614.417,00**							**1.976.625.640,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan*				85 %	85 %	1.920.128.373,00	1.897.665.144,00	2.010.701.469,00	90.573.096,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kel.Ikua Koto Dibalai		1.922.854.505,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	9 Unit	71.979.208,00	39.746.324,00	59.776.574,00	-12.202.634,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Ikua Koto Dibalai	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN SISA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			52.619.860,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	128.020.750,00	160.254.050,00	160.254.050,00	32.233.300,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Ikua Koto Dibalai	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			147.380.400,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
		KELURAHAN KAPALO KOTO DIBALAI							**11.186.600.777,00**	**10.800.670.234,00**	**11.083.578.104,00**	**-103.022.673,00**							**11.827.450.919,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.186.600.777,00**	**10.800.670.234,00**	**11.083.578.104,00**	**-103.022.673,00**							**11.827.450.919,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.186.600.777,00**	**10.800.670.234,00**	**11.083.578.104,00**	**-103.022.673,00**							**11.827.450.919,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM**				**100 91 % Indeks**	**100 91 % Indeks**	**1.969.011.223,00**	**1.934.583.394,00**	**2.057.619.369,00**	**7.614.417,00**							**1.976.625.640,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan*				85 %	85 %	1.920.128.373,00	1.897.665.144,00	2.010.701.469,00	90.573.096,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kel.Kapalo Koto Dibalai		1.922.854.505,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	10 Unit	82.629.280,00	71.078.580,00	71.078.580,00	-11.550.700,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			47.308.360,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	117.372.700,00	128.921.600,00	128.921.600,00	11.548.900,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			152.691.750,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
		KELURAHAN KOTO KOCIAK KUBU TAPAKRAJO							**11.186.600.777,00**	**10.800.670.234,00**	**11.083.578.104,00**	**-103.022.673,00**							**11.827.450.919,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.186.600.777,00**	**10.800.670.234,00**	**11.083.578.104,00**	**-103.022.673,00**							**11.827.450.919,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**KECAMATAN**							**11.186.600.777,00**	**10.800.670.234,00**	**11.083.578.104,00**	**-103.022.673,00**							**11.827.450.919,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai IKM Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif**				**91 100 Indeks %**	**91 100 Indeks %**	**1.969.011.223,00**	**1.934.583.394,00**	**2.057.619.369,00**	**7.614.417,00**							**1.976.625.640,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan*				85 %	85 %	1.920.128.373,00	1.897.665.144,00	2.010.701.469,00	90.573.096,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kel.Koto Kociak Kubu Tapak Rajo		1.922.854.505,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	6 Unit	76.645.910,00	53.024.710,00	73.054.960,00	-3.590.950,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN SISA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			41.304.360,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	123.354.000,00	146.975.750,00	146.975.750,00	23.621.750,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			158.695.650,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
		KELURAHAN NAPAR							**11.186.600.777,00**	**10.800.670.234,00**	**11.083.578.104,00**	**-103.022.673,00**							**11.827.450.919,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.186.600.777,00**	**10.800.670.234,00**	**11.083.578.104,00**	**-103.022.673,00**							**11.827.450.919,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.186.600.777,00**	**10.800.670.234,00**	**11.083.578.104,00**	**-103.022.673,00**							**11.827.450.919,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM**				**100 91 % Indeks**	**100 91 % Indeks**	**1.969.011.223,00**	**1.934.583.394,00**	**2.057.619.369,00**	**7.614.417,00**							**1.976.625.640,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan*				85 %	85 %	1.920.128.373,00	1.897.665.144,00	2.010.701.469,00	90.573.096,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kel.Napar		1.922.854.505,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	14 Unit	104.784.450,00	78.583.840,00	98.614.090,00	-6.170.360,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Napar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN SISA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			79.150.360,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	95.215.650,00	121.416.550,00	121.573.750,00	26.358.100,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Napar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN SISA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			120.849.650,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
		KELURAHAN OMPANG TANAH SIRAH							**11.186.600.777,00**	**10.800.670.234,00**	**11.083.578.104,00**	**-103.022.673,00**							**11.827.450.919,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.186.600.777,00**	**10.800.670.234,00**	**11.083.578.104,00**	**-103.022.673,00**							**11.827.450.919,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.186.600.777,00**	**10.800.670.234,00**	**11.083.578.104,00**	**-103.022.673,00**							**11.827.450.919,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai IKM Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif**				**91 100 Indeks %**	**91 100 Indeks %**	**1.969.011.223,00**	**1.934.583.394,00**	**2.057.619.369,00**	**7.614.417,00**							**1.976.625.640,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan*				85 %	85 %	1.920.128.373,00	1.897.665.144,00	2.010.701.469,00	90.573.096,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kel.Ompang Tanah Sirah		1.922.854.505,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	5 Unit	68.748.310,00	60.544.510,00	60.544.510,00	-8.203.800,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Ompang Tanah Sirah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			37.667.360,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	131.251.750,00	139.455.650,00	139.455.650,00	8.203.900,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Ompang Tanah Sirah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			162.332.800,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
		KELURAHAN TIGO KOTO DIATE							**11.186.600.777,00**	**10.800.670.234,00**	**11.083.578.104,00**	**-103.022.673,00**							**11.827.450.919,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.186.600.777,00**	**10.800.670.234,00**	**11.083.578.104,00**	**-103.022.673,00**							**11.827.450.919,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.186.600.777,00**	**10.800.670.234,00**	**11.083.578.104,00**	**-103.022.673,00**							**11.827.450.919,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai IKM Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif**				**91 100 Indeks %**	**91 100 Indeks %**	**1.969.011.223,00**	**1.934.583.394,00**	**2.057.619.369,00**	**7.614.417,00**							**1.976.625.640,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan*				85 %	85 %	1.920.128.373,00	1.897.665.144,00	2.010.701.469,00	90.573.096,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kel.Tigo Koto Diateh		1.922.854.505,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	5 Unit	84.499.330,00	48.526.990,00	98.676.990,00	14.177.660,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Tigo Koto Diate	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN SISA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			38.429.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	115.500.275,00	151.473.275,00	151.473.275,00	35.973.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Tigo Koto Diate	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			161.571.050,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
		KELURAHAN TIGO KOTO DIBARUAH							**11.186.600.777,00**	**10.800.670.234,00**	**11.083.578.104,00**	**-103.022.673,00**							**11.827.450.919,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.186.600.777,00**	**10.800.670.234,00**	**11.083.578.104,00**	**-103.022.673,00**							**11.827.450.919,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.186.600.777,00**	**10.800.670.234,00**	**11.083.578.104,00**	**-103.022.673,00**							**11.827.450.919,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM**				**100 91 % Indeks**	**100 91 % Indeks**	**1.969.011.223,00**	**1.934.583.394,00**	**2.057.619.369,00**	**7.614.417,00**							**1.976.625.640,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan*				85 %	85 %	1.920.128.373,00	1.897.665.144,00	2.010.701.469,00	90.573.096,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kel.Tigo Koto Dibaruah		1.922.854.505,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	10 Unit	100.217.700,00	66.054.500,00	116.205.650,00	15.987.950,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Tigo Koto Dibaruah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN SISA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			98.355.220,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	99.782.325,00	133.945.500,00	133.945.500,00	34.163.175,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Tigo Koto Dibaruah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			101.645.100,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
		KELURAHAN TARATAK PADANG KAMPUANG							**11.186.600.777,00**	**10.800.670.234,00**	**11.083.578.104,00**	**-103.022.673,00**							**11.827.450.919,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.186.600.777,00**	**10.800.670.234,00**	**11.083.578.104,00**	**-103.022.673,00**							**11.827.450.919,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.186.600.777,00**	**10.800.670.234,00**	**11.083.578.104,00**	**-103.022.673,00**							**11.827.450.919,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai IKM Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif**				**91 100 Indeks %**	**91 100 Indeks %**	**1.969.011.223,00**	**1.934.583.394,00**	**2.057.619.369,00**	**7.614.417,00**							**1.976.625.640,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan*				85 %	85 %	1.920.128.373,00	1.897.665.144,00	2.010.701.469,00	90.573.096,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kel.Taratak Padang Kampuang		1.922.854.505,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	18 Unit	46.675.110,00	69.789.000,00	119.939.000,00	73.263.890,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Taratak Padang Kampuang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN SISA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			32.649.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	153.324.900,00	130.211.200,00	130.211.200,00	-23.113.700,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Taratak Padang Kampuang	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			167.351.300,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
		KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN							**7.897.355.020,00**	**8.090.367.059,00**	**8.198.264.079,00**	**300.909.059,00**							**8.688.260.461,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.897.355.020,00**	**8.090.367.059,00**	**8.198.264.079,00**	**300.909.059,00**							**8.688.260.461,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.897.355.020,00**	**8.090.367.059,00**	**8.198.264.079,00**	**300.909.059,00**							**8.688.260.461,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**90 Indeks**	**90 Indeks**	**6.475.476.445,00**	**6.697.846.754,00**	**6.755.931.424,00**	**527.955.970,00**							**7.003.432.415,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	27.052.400,00	17.921.400,00	17.921.400,00	-9.131.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Selatan		30.935.465,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	5.417.850,00	3.370.950,00	3.370.950,00	-2.046.900,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			4.480.520,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	20.024.550,00	12.940.450,00	12.940.450,00	-7.084.100,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			24.683.945,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	805.000,00	805.000,00	805.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			885.500,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	805.000,00	805.000,00	805.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			885.500,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	5.599.950.993,00	5.832.852.222,00	5.832.852.222,00	232.901.229,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Selatan		5.921.672.690,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	5.201.690.993,00	5.436.272.222,00	5.436.272.222,00	234.581.229,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			5.665.245.090,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	398.260.000,00	396.580.000,00	396.580.000,00	-1.680.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			256.427.600,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	0 %	39.401.700,00	0,00	0,00	-39.401.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Selatan		0,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				39 Paket	0 Paket	39.401.700,00	0,00	0,00	-39.401.700,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks layanan administrasi perangkat daerah*				75 %	75 %	141.662.810,00	107.336.630,00	107.336.630,00	-34.326.180,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Selatan		172.568.220,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	9.711.950,00	10.407.200,00	10.407.200,00	695.250,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			11.764.775,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	12.017.900,00	8.615.900,00	8.615.900,00	-3.402.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			23.119.690,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	43.848.860,00	28.672.480,00	28.672.480,00	-15.176.380,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			48.268.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	12.387.850,00	12.387.850,00	12.387.850,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			13.553.980,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				414 Dokumen	414 Dokumen	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			3.141.600,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	506.250,00	506.250,00	506.250,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			233.860,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	59.645.000,00	43.920.000,00	43.920.000,00	-15.725.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			71.600.815,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	805.000,00	186.950,00	186.950,00	-618.050,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			885.500,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan BMD*				80 %	80 %	20.876.800,00	0,00	42.000.000,00	21.123.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Selatan		46.200.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	7 Unit	20.676.800,00	0,00	42.000.000,00	21.323.200,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			46.200.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah*				80 %	80 %	488.231.742,00	581.536.502,00	597.621.172,00	109.389.430,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Selatan		657.068.040,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	53.808.242,00	53.808.242,00	53.808.242,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			59.189.990,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	632.500,00	632.500,00	632.500,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			379.500,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	433.791.000,00	527.095.760,00	543.180.430,00	109.389.430,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			597.498.550,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*				80 %	80 %	158.300.000,00	158.200.000,00	158.200.000,00	-100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Selatan		174.988.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	147.200.000,00	147.200.000,00	147.200.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			162.888.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			12.100.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase usulan musrenbang yang diterima perangkat daerah Persentase pelayanan yang diproses tepat waktu**				**75 85 % %**	**75 85 % %**	**31.181.600,00**	**24.456.600,00**	**24.447.600,00**	**15.595.735,00**							**46.777.335,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan*				75 %	75 %	28.797.350,00	22.072.350,00	22.063.350,00	-6.734.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Selatan		44.154.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	28.797.350,00	22.072.350,00	22.063.350,00	-6.734.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			44.154.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Ketersediaan Dokumen Pelayanan Publik*				100 %	100 %	2.384.250,00	2.384.250,00	2.384.250,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Selatan		2.623.335,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	1 Laporan	2.384.250,00	2.384.250,00	2.384.250,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			2.623.335,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM**				**100 90 % Indeks**	**100 90 % Indeks**	**1.323.559.325,00**	**1.250.926.155,00**	**1.300.738.455,00**	**163.444.281,00**							**1.487.003.606,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Telaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 %	0 %	1.272.201.225,00	1.200.003.105,00	1.249.815.405,00	-22.385.820,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Selatan		1.429.217.196,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	72.200.000,00	0,00	0,00	-72.200.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi*				100 %	100 %	51.358.100,00	50.923.050,00	50.923.050,00	-435.050,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Selatan		57.786.410,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	51.358.100,00	50.923.050,00	50.923.050,00	-435.050,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			57.786.410,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti**				**100 %**	**100 %**	**4.619.700,00**	**4.619.700,00**	**4.619.700,00**	**462.190,00**							**5.081.890,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Kegiatan trantibum yang difasilitasi*				100 %	100 %	4.619.700,00	4.619.700,00	4.619.700,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Selatan		5.081.890,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	4.619.700,00	4.619.700,00	4.619.700,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			5.081.890,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**62.517.950,00**	**112.517.850,00**	**112.526.900,00**	**83.447.265,00**							**145.965.215,00**	
		[Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi]	**Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi**	**100**	**100**	**100**	-	-	**62.517.950,00**	**112.517.850,00**	**112.526.900,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**145.965.215,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Pembinaan dan Monitoring Evaluasi kegiatan kemasyarakatan yang terlaksana*				100 %	100 %	62.517.950,00	112.517.850,00	112.526.900,00	50.008.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Payakumbuh Selatan		145.965.215,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dokumen	3 Dokumen	62.453.250,00	112.453.150,00	112.462.200,00	50.008.950,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			123.698.575,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	64.700,00	64.700,00	64.700,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			22.266.640,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
		KELURAHAN BALAI PANJANG							**7.897.355.020,00**	**8.090.367.059,00**	**8.198.264.079,00**	**300.909.059,00**							**8.688.260.461,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.897.355.020,00**	**8.090.367.059,00**	**8.198.264.079,00**	**300.909.059,00**							**8.688.260.461,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.897.355.020,00**	**8.090.367.059,00**	**8.198.264.079,00**	**300.909.059,00**							**8.688.260.461,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM**				**100 90 % Indeks**	**100 90 % Indeks**	**1.323.559.325,00**	**1.250.926.155,00**	**1.300.738.455,00**	**163.444.281,00**							**1.487.003.606,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.323.559.325,00**	**1.250.926.155,00**	**1.300.738.455,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**1.487.003.606,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Telaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 %	85 %	1.272.201.225,00	1.200.003.105,00	1.249.815.405,00	-22.385.820,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kelurahan Balai Panjang		1.429.217.196,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	93.485.810,00	46.657.360,00	46.657.360,00	-46.828.450,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Balai Panjang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			66.312.400,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	106.514.465,00	153.342.910,00	153.342.910,00	46.828.445,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Balai Panjang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			153.687.600,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
		KELURAHAN KOTO TUO LIMO KAMPUNG							**7.897.355.020,00**	**8.090.367.059,00**	**8.198.264.079,00**	**300.909.059,00**							**8.688.260.461,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.897.355.020,00**	**8.090.367.059,00**	**8.198.264.079,00**	**300.909.059,00**							**8.688.260.461,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.897.355.020,00**	**8.090.367.059,00**	**8.198.264.079,00**	**300.909.059,00**							**8.688.260.461,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM**				**100 90 % Indeks**	**100 90 % Indeks**	**1.323.559.325,00**	**1.250.926.155,00**	**1.300.738.455,00**	**163.444.281,00**							**1.487.003.606,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Telaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 %	85 %	1.272.201.225,00	1.200.003.105,00	1.249.815.405,00	-22.385.820,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang		1.429.217.196,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	90.309.610,00	75.894.360,00	75.894.360,00	-14.415.250,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Kototuo Limokampuang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			64.104.546,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	109.690.550,00	124.105.800,00	124.105.800,00	14.415.250,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Kototuo Limokampuang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			155.895.190,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
		KELURAHAN LIMBUKAN							**7.897.355.020,00**	**8.090.367.059,00**	**8.198.264.079,00**	**300.909.059,00**							**8.688.260.461,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.897.355.020,00**	**8.090.367.059,00**	**8.198.264.079,00**	**300.909.059,00**							**8.688.260.461,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.897.355.020,00**	**8.090.367.059,00**	**8.198.264.079,00**	**300.909.059,00**							**8.688.260.461,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM**				**100 90 % Indeks**	**100 90 % Indeks**	**1.323.559.325,00**	**1.250.926.155,00**	**1.300.738.455,00**	**163.444.281,00**							**1.487.003.606,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Telaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 %	85 %	1.272.201.225,00	1.200.003.105,00	1.249.815.405,00	-22.385.820,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kelurahan Limbukan		1.429.217.196,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	83.026.410,00	108.549.560,00	108.549.560,00	25.523.150,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Limbukan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			128.176.565,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	116.973.750,00	91.450.560,00	91.450.560,00	-25.523.190,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Limbukan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			91.823.380,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
		KELURAHAN PADANG KARAMBIA							**7.897.355.020,00**	**8.090.367.059,00**	**8.198.264.079,00**	**300.909.059,00**							**8.688.260.461,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.897.355.020,00**	**8.090.367.059,00**	**8.198.264.079,00**	**300.909.059,00**							**8.688.260.461,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.897.355.020,00**	**8.090.367.059,00**	**8.198.264.079,00**	**300.909.059,00**							**8.688.260.461,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM**				**100 90 % Indeks**	**100 90 % Indeks**	**1.323.559.325,00**	**1.250.926.155,00**	**1.300.738.455,00**	**163.444.281,00**							**1.487.003.606,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Telaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 %	85 %	1.272.201.225,00	1.200.003.105,00	1.249.815.405,00	-22.385.820,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kelurahan Padang Karambia		1.429.217.196,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	109.827.760,00	77.617.760,00	77.617.760,00	-32.210.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Padang Karambia	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			102.643.200,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	90.172.400,00	122.383.850,00	122.383.850,00	32.211.450,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Padang Karambia	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			117.356.635,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
		KELURAHAN SAWAH PADANG AUR KUNING							**7.897.355.020,00**	**8.090.367.059,00**	**8.198.264.079,00**	**300.909.059,00**							**8.688.260.461,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.897.355.020,00**	**8.090.367.059,00**	**8.198.264.079,00**	**300.909.059,00**							**8.688.260.461,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.897.355.020,00**	**8.090.367.059,00**	**8.198.264.079,00**	**300.909.059,00**							**8.688.260.461,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai IKM Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif**				**90 100 Indeks %**	**90 100 Indeks %**	**1.323.559.325,00**	**1.250.926.155,00**	**1.300.738.455,00**	**163.444.281,00**							**1.487.003.606,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Telaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 %	85 %	1.272.201.225,00	1.200.003.105,00	1.249.815.405,00	-22.385.820,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kelurahan Sawah Padang Aur Kuning		1.429.217.196,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	78.390.700,00	78.388.150,00	98.577.700,00	20.187.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Sawahpadang Aua Kuniang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN SISA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			130.996.470,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	121.609.550,00	121.612.150,00	151.234.900,00	29.625.350,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Sawahpadang Aua Kuniang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN SISA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			198.220.200,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
		KELURAHAN KAPALO KOTO AMPANGAN							**7.897.355.020,00**	**8.090.367.059,00**	**8.198.264.079,00**	**300.909.059,00**							**8.688.260.461,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.897.355.020,00**	**8.090.367.059,00**	**8.198.264.079,00**	**300.909.059,00**							**8.688.260.461,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.897.355.020,00**	**8.090.367.059,00**	**8.198.264.079,00**	**300.909.059,00**							**8.688.260.461,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai IKM Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif**				**90 100 Indeks %**	**90 100 Indeks %**	**1.323.559.325,00**	**1.250.926.155,00**	**1.300.738.455,00**	**163.444.281,00**							**1.487.003.606,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Telaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan*				85 %	85 %	1.272.201.225,00	1.200.003.105,00	1.249.815.405,00	-22.385.820,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kelurahan Kapalo Koto Ampangan		1.429.217.196,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	72.245.570,00	60.959.420,00	60.959.420,00	-11.286.150,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Kapalo Koto Ampangan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			85.329.200,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	127.754.650,00	139.041.225,00	139.041.225,00	11.286.575,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Kapalo Koto Ampangan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			134.671.790,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
		KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI							**7.748.705.459,00**	**7.796.745.199,00**	**8.096.500.489,00**	**347.795.030,00**							**8.676.035.225,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.748.705.459,00**	**7.796.745.199,00**	**8.096.500.489,00**	**347.795.030,00**							**8.676.035.225,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.748.705.459,00**	**7.796.745.199,00**	**8.096.500.489,00**	**347.795.030,00**							**8.676.035.225,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**90 indeks**	**91,37 indeks**	**6.400.038.291,00**	**6.432.072.671,00**	**6.483.923.311,00**	**671.196.934,00**							**7.071.235.225,00**	
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**Nilai IKM** **Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90**	**80** **90**	**90**	-	-	**6.400.038.291,00**	**6.432.072.671,00**	**6.483.923.311,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**7.071.235.225,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penggganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	72.715.750,00	40.160.000,00	40.160.000,00	-32.555.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori		85.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	14.087.500,00	9.257.500,00	9.257.500,00	-4.830.000,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			20.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	56.615.750,00	28.890.000,00	28.890.000,00	-27.725.750,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			65.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**6.400.038.291,00**	**6.432.072.671,00**	**6.483.923.311,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**7.071.235.225,00**	-
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.006.250,00	1.006.250,00	1.006.250,00	0,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	1.006.250,00	1.006.250,00	1.006.250,00	0,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**Nilai IKM** **Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90**	**80** **90**	**90**	-	-	**6.400.038.291,00**	**6.432.072.671,00**	**6.483.923.311,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**7.071.235.225,00**	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	5.688.914.177,00	5.652.975.733,00	5.652.975.733,00	-35.938.444,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori		5.240.541.650,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	5.312.114.177,00	5.273.295.733,00	5.273.295.733,00	-38.818.444,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			5.000.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	376.800.000,00	379.680.000,00	379.680.000,00	2.880.000,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			240.541.650,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	0 %	48.500,00	0,00	0,00	-48.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori		55.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				44 Paket	0 Paket	48.500,00	0,00	0,00	-48.500,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			55.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks layanan administrasi perangkat daerah*				75 %	75 %	117.082.875,00	64.767.850,00	64.767.850,00	-52.315.025,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori		195.693.575,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	6.775.000,00	2.710.950,00	2.710.950,00	-4.064.050,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			8.693.575,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	0 Paket	54.600,00	0,00	0,00	-54.600,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			35.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	36.642.825,00	19.532.650,00	19.532.650,00	-17.110.175,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			55.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	11.329.800,00	5.830.000,00	5.830.000,00	-5.499.800,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			12.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0 Dokumen	50.400,00	0,00	0,00	-50.400,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			5.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	61.224.000,00	35.688.000,00	35.688.000,00	-25.536.000,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			80.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**6.400.038.291,00**	**6.432.072.671,00**	**6.483.923.311,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**7.071.235.225,00**	-
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.006.250,00	1.006.250,00	1.006.250,00	0,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			0,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM] **Nilai IKM** **Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**Nilai IKM** **Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90** **80** **90**	**80** **90**	**90**	-	-	**6.400.038.291,00**	**6.432.072.671,00**	**6.483.923.311,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**7.071.235.225,00**	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan BMD*				80 %	80 %	6.845.900,00	0,00	42.000.000,00	35.154.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori		855.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				7 Unit	0 Unit	42.450,00	0,00	0,00	-42.450,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			250.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	0 Unit	52.550,00	0,00	0,00	-52.550,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			60.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	6.666.000,00	0,00	42.000.000,00	35.334.000,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			45.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	42.450,00	0,00	0,00	-42.450,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			250.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	0 Unit	42.450,00	0,00	0,00	-42.450,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			250.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah*				80 %	80 %	388.640.689,00	549.555.088,00	559.405.728,00	170.765.039,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori		432.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.040.000,00	30.040.000,00	30.040.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			32.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	358.600.689,00	519.515.088,00	529.365.728,00	170.765.039,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			400.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**6.400.038.291,00**	**6.432.072.671,00**	**6.483.923.311,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**7.071.235.225,00**	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*				80 %	80 %	125.790.400,00	124.614.000,00	124.614.000,00	-1.176.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori		208.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	24 Unit	112.550.000,00	112.550.000,00	112.550.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			160.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**Nilai IKM** **Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90**	**80** **90**	**90**	-	-	**6.400.038.291,00**	**6.432.072.671,00**	**6.483.923.311,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**7.071.235.225,00**	-
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				29 Unit	29 Unit	13.190.000,00	6.740.000,00	6.740.000,00	-6.450.000,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			18.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	50.400,00	5.324.000,00	5.324.000,00	5.273.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			30.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah Persentase pelayanan yang diproses tepat waktu**				**70 85,00 %**	**70 85,00 %**	**23.427.550,00**	**15.678.050,00**	**15.678.050,00**	**26.572.450,00**							**50.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**23.427.550,00**	**15.678.050,00**	**15.678.050,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**50.000.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan*				70 %	70 %	19.919.400,00	14.278.750,00	14.278.750,00	-5.640.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori		35.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	19.919.400,00	14.278.750,00	14.278.750,00	-5.640.650,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			35.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
		[1. Persentase usulan Musrenbang Kec. Latina yang diterima Perangkat Daerah 2. Persentase pelayanan yang diproses tepat waktu]	**Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu** **Persentase usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah**	**70** **85**	**70** **85**	**70** **85**	-	-	**23.427.550,00**	**15.678.050,00**	**15.678.050,00**	-	-	-	-	-	-	**70** **85**	**50.000.000,00**	-
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Ketersediaan Dokumen Pelayanan Publik*				100 %	100 %	3.508.150,00	1.399.300,00	1.399.300,00	-2.108.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori		15.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	3.508.150,00	1.399.300,00	1.399.300,00	-2.108.850,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			15.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM**				**100 90 % indeks**	**100 90 % indeks**	**1.276.999.518,00**	**1.272.019.678,00**	**1.519.924.328,00**	**163.000.482,00**							**1.440.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.276.999.518,00**	**1.272.019.678,00**	**1.519.924.328,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**1.440.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan*				85 %	85 %	1.246.019.468,00	1.247.223.178,00	1.495.127.828,00	249.108.360,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori		1.356.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	46.019.475,00	0,00	0,00	-46.019.475,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			52.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif 2. IKM Kelurahan]	**Nilai IKM** **Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif**	**100** **90**	**100** **90**	**100** **90**	-	-	**1.276.999.518,00**	**1.272.019.678,00**	**1.519.924.328,00**	-	-	-	-	-	-	**100** **90**	**1.440.000.000,00**	-
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi*				100 %	100 %	30.980.050,00	24.796.500,00	24.796.500,00	-6.183.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori		84.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	30.980.050,00	24.796.500,00	24.796.500,00	-6.183.550,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			84.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti**				**100 %**	**100 %**	**10.015.750,00**	**3.997.800,00**	**3.997.800,00**	**20.784.250,00**							**30.800.000,00**	
		[Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti kec latina]	**Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti**	**100**	**100**	**100**	-	-	**10.015.750,00**	**3.997.800,00**	**3.997.800,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**30.800.000,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Kegiatan lingkup trantibum yang difasilitasi*				100 %	100 %	10.015.750,00	3.997.800,00	3.997.800,00	-6.017.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori		30.800.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	10.015.750,00	3.997.800,00	3.997.800,00	-6.017.950,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			30.800.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**38.224.350,00**	**72.977.000,00**	**72.977.000,00**	**45.775.650,00**							**84.000.000,00**	
		[Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi di kec. Latina]	**Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi**	**100**	**100**	**100**	-	-	**38.224.350,00**	**72.977.000,00**	**72.977.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**84.000.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase pembinaan dan monitoring evaluasi kegiatan kemasyarakatan yang terlaksana*				100 %	100 %	38.224.350,00	72.977.000,00	72.977.000,00	34.752.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori		84.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				3 Dokumen	3 Dokumen	34.999.850,00	70.192.500,00	70.192.500,00	35.192.650,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			75.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.224.500,00	2.784.500,00	2.784.500,00	-440.000,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			9.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
		KELURAHAN KOTO PANJANG DALAM							**7.748.705.459,00**	**7.796.745.199,00**	**8.096.500.489,00**	**347.795.030,00**							**8.676.035.225,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.748.705.459,00**	**7.796.745.199,00**	**8.096.500.489,00**	**347.795.030,00**							**8.676.035.225,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.748.705.459,00**	**7.796.745.199,00**	**8.096.500.489,00**	**347.795.030,00**							**8.676.035.225,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai IKM Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif**				**100 90 % indeks**	**91,37 100 indeks %**	**1.276.999.518,00**	**1.272.019.678,00**	**1.519.924.328,00**	**163.000.482,00**							**1.440.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.276.999.518,00**	**1.272.019.678,00**	**1.519.924.328,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**1.440.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan*				85 %	85 %	1.246.019.468,00	1.247.223.178,00	1.495.127.828,00	249.108.360,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat Kelurahan Koto Panjang Dalam		1.356.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	66.581.420,00	83.943.470,00	107.206.220,00	40.624.800,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Koto Panjang Dalam	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN SISA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			50.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	133.418.250,00	123.779.550,00	123.779.550,00	-9.638.700,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Koto Panjang Dalam	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			165.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
		KELURAHAN KOTO PANJANG PADANG							**7.748.705.459,00**	**7.796.745.199,00**	**8.096.500.489,00**	**347.795.030,00**							**8.676.035.225,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.748.705.459,00**	**7.796.745.199,00**	**8.096.500.489,00**	**347.795.030,00**							**8.676.035.225,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.748.705.459,00**	**7.796.745.199,00**	**8.096.500.489,00**	**347.795.030,00**							**8.676.035.225,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM**				**100 90 % indeks**	**100 91,37 % indeks**	**1.276.999.518,00**	**1.272.019.678,00**	**1.519.924.328,00**	**163.000.482,00**							**1.440.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan*				85 %	85 %	1.246.019.468,00	1.247.223.178,00	1.495.127.828,00	249.108.360,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat Kelurahan Koto Panjang Padang		1.356.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	57.932.963,00	55.493.673,00	55.493.673,00	-2.439.290,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Koto Panjang Padang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			50.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	142.067.350,00	156.006.450,00	169.927.550,00	27.860.200,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Koto Panjang Padang	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN SISA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			154.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
		KELURAHAN PADANG SIKABU							**7.748.705.459,00**	**7.796.745.199,00**	**8.096.500.489,00**	**347.795.030,00**							**8.676.035.225,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.748.705.459,00**	**7.796.745.199,00**	**8.096.500.489,00**	**347.795.030,00**							**8.676.035.225,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.748.705.459,00**	**7.796.745.199,00**	**8.096.500.489,00**	**347.795.030,00**							**8.676.035.225,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM**				**100 90 % indeks**	**100 91,37 % indeks**	**1.276.999.518,00**	**1.272.019.678,00**	**1.519.924.328,00**	**163.000.482,00**							**1.440.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan*				85 %	85 %	1.246.019.468,00	1.247.223.178,00	1.495.127.828,00	249.108.360,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kelurahan Padang Sikabu		1.356.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	81.821.070,00	49.008.260,00	148.206.260,00	66.385.190,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Padang Sikabu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN SISA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			110.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	118.178.950,00	159.991.900,00	159.991.900,00	41.812.950,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Padang Sikabu	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			125.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
		KELURAHAN PARAMBAHAN							**7.748.705.459,00**	**7.796.745.199,00**	**8.096.500.489,00**	**347.795.030,00**							**8.676.035.225,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.748.705.459,00**	**7.796.745.199,00**	**8.096.500.489,00**	**347.795.030,00**							**8.676.035.225,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.748.705.459,00**	**7.796.745.199,00**	**8.096.500.489,00**	**347.795.030,00**							**8.676.035.225,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM**				**100 90 % indeks**	**100 91,37 % indeks**	**1.276.999.518,00**	**1.272.019.678,00**	**1.519.924.328,00**	**163.000.482,00**							**1.440.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan*				85 %	85 %	1.246.019.468,00	1.247.223.178,00	1.495.127.828,00	249.108.360,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kelurahan Parambahan		1.356.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	149.604.660,00	73.720.170,00	73.720.170,00	-75.884.490,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Parambahan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			50.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.395.300,00	135.279.600,00	150.302.900,00	99.907.600,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Parambahan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN SISA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			165.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
		KELURAHAN SUNGAI DURIAN							**7.748.705.459,00**	**7.796.745.199,00**	**8.096.500.489,00**	**347.795.030,00**							**8.676.035.225,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.748.705.459,00**	**7.796.745.199,00**	**8.096.500.489,00**	**347.795.030,00**							**8.676.035.225,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.748.705.459,00**	**7.796.745.199,00**	**8.096.500.489,00**	**347.795.030,00**							**8.676.035.225,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai IKM Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif**				**90 100 indeks %**	**91,37 100 indeks %**	**1.276.999.518,00**	**1.272.019.678,00**	**1.519.924.328,00**	**163.000.482,00**							**1.440.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan*				85 %	85 %	1.246.019.468,00	1.247.223.178,00	1.495.127.828,00	249.108.360,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat Kelurahan Sungai Durian		1.356.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	63.072.370,00	63.807.270,00	141.087.770,00	78.015.400,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Sungai Durian	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN SISA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			50.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	136.927.500,00	141.192.525,00	141.192.525,00	4.265.025,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Sungai Durian	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			170.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
		KELURAHAN PARIK MUKO AIA							**7.748.705.459,00**	**7.796.745.199,00**	**8.096.500.489,00**	**347.795.030,00**							**8.676.035.225,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.748.705.459,00**	**7.796.745.199,00**	**8.096.500.489,00**	**347.795.030,00**							**8.676.035.225,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.748.705.459,00**	**7.796.745.199,00**	**8.096.500.489,00**	**347.795.030,00**							**8.676.035.225,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai IKM Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif**				**90 100 indeks %**	**91,37 100 indeks %**	**1.276.999.518,00**	**1.272.019.678,00**	**1.519.924.328,00**	**163.000.482,00**							**1.440.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan*				85 %	85 %	1.246.019.468,00	1.247.223.178,00	1.495.127.828,00	249.108.360,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kelurahan Parik Muko Aia		1.356.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	53.559.960,00	82.853.910,00	82.853.910,00	29.293.950,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Parit Muko Aie	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			50.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	146.440.200,00	122.146.400,00	141.365.400,00	-5.074.800,00	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Parit Muko Aie	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN SISA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			165.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**4.045.472.162,00**	**3.685.704.286,00**	**3.683.557.120,00**	**-361.915.042,00**							**4.650.108.510,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**4.045.472.162,00**	**3.685.704.286,00**	**3.683.557.120,00**	**-361.915.042,00**							**4.650.108.510,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**4.045.472.162,00**	**3.685.704.286,00**	**3.683.557.120,00**	**-361.915.042,00**							**4.650.108.510,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**93 indeks**	**93 indeks**	**1.873.693.299,00**	**1.858.307.573,00**	**1.847.910.407,00**	**233.382.474,00**							**2.107.075.773,00**	
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**Nilai IKM Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90 95**	**80 92.69**	**90 93**	-	-	**1.873.693.299,00**	**1.858.307.573,00**	**1.847.910.407,00**	-	-	-	-	-	-	**90 93**	**2.107.075.773,00**	-
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	32.764.750,00	26.934.450,00	26.934.450,00	-5.830.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol		37.930.180,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	8.337.700,00	4.959.400,00	4.959.400,00	-3.378.300,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			9.171.800,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	11 Laporan	23.219.550,00	20.767.550,00	20.767.550,00	-2.452.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			27.550.880,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.873.693.299,00**	**1.858.307.573,00**	**1.847.910.407,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**2.107.075.773,00**	-
	8.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	603.750,00	603.750,00	603.750,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			603.750,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				10 Data	10 Data	603.750,00	603.750,00	603.750,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			603.750,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**Nilai IKM** **Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90** **95**	**80** **92.69**	**90** **93**	-	-	**1.873.693.299,00**	**1.858.307.573,00**	**1.847.910.407,00**	-	-	-	-	-	-	**90** **93**	**2.107.075.773,00**	-
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	1.418.313.249,00	1.543.766.707,00	1.547.166.707,00	128.853.458,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pegawai Kantor Kesbangpol		1.643.656.294,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.267.225.749,00	1.400.362.957,00	1.400.362.957,00	133.137.208,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.552.939.794,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	151.087.500,00	143.403.750,00	146.803.750,00	-4.283.750,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			90.716.500,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	0 %	16.164.800,00	0,00	0,00	-16.164.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pegawai Kantor Kesbangpol		16.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	16.164.800,00	0,00	0,00	-16.164.800,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			16.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks layanan administrasi perangkat daerah*				75 %	75 %	216.733.180,00	121.220.330,00	122.527.330,00	-94.205.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol		237.737.740,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.349.200,00	3.349.200,00	3.349.200,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			3.692.700,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	0 Paket	20.353.550,00	0,00	0,00	-20.353.550,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			19.663.850,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	17.030.380,00	17.030.380,00	17.030.380,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			18.791.850,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	8.746.800,00	8.713.000,00	9.367.000,00	620.200,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			9.621.590,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1056 Dokumen	792 Dokumen	5.544.000,00	4.092.000,00	4.745.000,00	-799.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			8.015.400,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6 Laporan	8.797.500,00	2.415.000,00	2.415.000,00	-6.382.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			9.719.600,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	36 Laporan	152.308.000,00	85.017.000,00	85.017.000,00	-67.291.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			167.629.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.873.693.299,00**	**1.858.307.573,00**	**1.847.910.407,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**2.107.075.773,00**	-
	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	603.750,00	603.750,00	603.750,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			603.750,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, Nilai IKM]	**Nilai IKM** **Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90** **95**	**80** **92.69**	**90** **93**	-	-	**1.873.693.299,00**	**1.858.307.573,00**	**1.847.910.407,00**	-	-	-	-	-	-	**90** **93**	**2.107.075.773,00**	-
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan BMD*				80 %	0 %	8.406.000,00	0,00	0,00	-8.406.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol		8.892.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	0 Unit	8.406.000,00	0,00	0,00	-8.406.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			8.892.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah*				80 %	80 %	111.631.320,00	111.586.086,00	96.481.920,00	-15.149.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol		67.652.559,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	32.351.320,00	32.351.320,00	19.504.320,00	-12.847.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			35.588.923,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			3.707.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	75.600.000,00	75.554.766,00	73.297.600,00	-2.302.400,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			28.356.636,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*				80 %	80 %	69.680.000,00	54.800.000,00	54.800.000,00	-14.880.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol		95.207.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			37.440.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	30.800.000,00	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			41.360.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	14.880.000,00	0,00	0,00	-14.880.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			16.407.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**				**90 %**	**90 %**	**684.197.225,00**	**756.277.300,00**	**756.277.300,00**	**162.945.610,00**							**847.142.835,00**	
		[Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan]	**Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**94**	**0**	**90**	-	-	**684.197.225,00**	**756.277.300,00**	**756.277.300,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**847.142.835,00**	-
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Jumlah masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan*				120 orang	100 orang	684.197.225,00	756.277.300,00	756.277.300,00	72.080.075,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Tokoh masyarakat, generasi muda dan pelajar		847.142.835,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				250 Orang	175 Orang	59.647.975,00	46.656.500,00	46.656.500,00	-12.991.475,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			268.561.425,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				54 Orang	54 Orang	624.549.250,00	709.620.800,00	709.620.800,00	85.071.550,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			578.581.410,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase pendidikan politik pada kader partai politik**				**100 %**	**100 %**	**881.046.463,00**	**787.140.463,00**	**787.140.463,00**	**49.802.907,00**							**930.849.370,00**	
		[Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik]	**Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik**	**100**	**100**	**100**	-	-	**881.046.463,00**	**787.140.463,00**	**787.140.463,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**930.849.370,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Jumlah kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan*				3 kegiatan	1 kegiatan	881.046.463,00	787.140.463,00	787.140.463,00	-93.906.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Tokoh masyarakat, tokoh agama, toko adat, generasi muda, pelajar danpengurus parpol		930.849.370,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				125 Orang	80 Orang	809.405.838,00	763.170.163,00	763.170.163,00	-46.235.675,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			865.877.820,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				60 Orang	60 Orang	64.784.775,00	19.747.800,00	19.747.800,00	-45.036.975,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			58.115.350,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				12 Laporan	6 Laporan	6.855.850,00	4.222.500,00	4.222.500,00	-2.633.350,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			6.856.200,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif**				**93 %**	**93 %**	**74.496.325,00**	**20.951.550,00**	**20.951.550,00**	**36.531.240,00**							**111.027.565,00**	
		[Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif]	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif**	**94**	**92.19**	**93**	-	-	**74.496.325,00**	**20.951.550,00**	**20.951.550,00**	-	-	-	-	-	-	**93**	**111.027.565,00**	-
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan*				1 rekomendasi	1 rekomendasi	74.496.325,00	20.951.550,00	20.951.550,00	-53.544.775,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Organisasi Kemasyarakatan		111.027.565,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				120 Orang	120 Orang	74.496.325,00	20.951.550,00	20.951.550,00	-53.544.775,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			111.027.565,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan**				**100 %**	**100 %**	**103.024.850,00**	**58.362.800,00**	**58.362.800,00**	**125.333.665,00**							**228.358.515,00**	
		[Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan]	**Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi**	**100**	**100**	**100**	-	-	**103.024.850,00**	**58.362.800,00**	**58.362.800,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**228.358.515,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Jumlah rekomendasi kebijakan terkait Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*				11 rekomendasi	11 rekomendasi	103.024.850,00	58.362.800,00	58.362.800,00	-44.662.050,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Tokoh agama, tokoh masyarakat dan generasi muda		228.358.515,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				150 Orang	150 Orang	103.024.850,00	58.362.800,00	58.362.800,00	-44.662.050,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			228.358.515,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase konflik sosial yang diselesaikan**				**100 %**	**100 %**	**429.014.000,00**	**204.664.600,00**	**212.914.600,00**	**-3.359.548,00**							**425.654.452,00**	
		[Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan]	**Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**429.014.000,00**	**204.664.600,00**	**212.914.600,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**425.654.452,00**	-
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Jumlah informasi konflik sosial yang ditindaklanjuti*				10 kasus	10 kasus	429.014.000,00	204.664.600,00	212.914.600,00	-216.099.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Tokoh masyarakat, Forkopimda dan Stakeholder terkait		425.654.452,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				40 Orang	100 Orang	265.952.150,00	82.687.600,00	85.687.600,00	-180.264.550,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			232.893.210,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				70 Orang	70 Orang	37.918.900,00	21.825.000,00	21.825.000,00	-16.093.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			44.364.705,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	125.142.950,00	100.152.000,00	105.402.000,00	-19.740.950,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			148.396.537,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**697.931.851.169,00**	**752.342.276.674,00**	**879.503.909.525,00**	**181.572.058.356,00**							**787.356.333.424,00**	

Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika Pembangunan daerah, perkembangan kondisi ekonomi makro, kebutuhan masyarakat serta hasil evaluasi pelaksanaaan program dan kegiatan sampai dengan semester pertama berjalan.

Perubahan RKPD Tahun 2026 diarahkan untuk menjaga konsistensi pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah serta mendukung prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi. Perubahan RKPD Tahun 2026 diarahlan untuk memastikan tercapainya target prioritas Pembangunan secara efektif, efisien, terukur dan berkelanjutan.

Fokus pelaksanaan program dan kegiata prioritas daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 tetap mengacu pada visi pembangunan daerah serta sasaran strategis pembangunan Kota Payakumbuh, dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan perekonomian masyarakat, peningkatan daya saing daerah, pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta penguatan tata Kelola pemerintahan yang baik.

Rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diusulkan dalam perubahan RKPD Tahun 2026 yang telah ditampilkan pada tabel V-1 kemudian direkapitulasi menurut urusan yang meliputi :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri dari :
   a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan,
   b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan,
   c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perangkat daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
   d. Urusan Pemeritnahan Bidang Perumahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
   e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perangkat daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
   f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial,
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri dari :
   a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian,
   b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
   c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan,
   d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
   e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup,
   f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
   g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
   h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
   i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan,
   j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika,
   k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah,

l. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga,
n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika,
o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika,
p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga,
q. Urusan Pemeirntahan Bidang Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,
r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,

3. Urusan Pemerintahan Pilihan yang terdiri dari :
   a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian,
   b. Urusan Pemeirntahan Bidang Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga,
   c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian,
   d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,
   e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian,
4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang terdiri dari :
   a. Sekretariat Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah,
   b. Sekretariat DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD
5. Unsur Penunjang yang terdiri dari :
   a. Perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
   b. Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah,
   c. Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
   d. Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
   e. Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah yang meliputi inspektorat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah
7. Unsur Kewilayahan meliputi kecamatan dimana Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan 5 (lima) daerah adminstratif kecamatan yaitu Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Utara, Payakumbuh Timur, Payakumbuh Selatan dan Lamposi Tigo Nagori,
8. Unsur Pemerintahan Umum yang meliputi Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Hasil rekapitulasi rencana program dan kegiatan prioritas daerah menurut urusan pada perubahan RKPD Tahun 2026 disandingkan dengan RKPD Tahun 2026 yang dituangkan pada tabel V-2.

Tabel V-1
Rekapitulasi Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Menurut Urusan pada Perubahan RKPD Tahun 2026

KODE	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	SETELAH PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	JUMLAH PERUBAHAN
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**410.339.140.960**	**562.238.904.375**	**151.899.763.415,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**129.626.947.265**	**184.045.778.632**	**54.418.831.367,00**
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	129.626.947.265	184.045.778.632	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**210.388.048.641**	**238.965.183.516**	**28.577.134.875,00**
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	210.388.048.641	238.965.183.516	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**38.038.883.853**	**99.444.441.924**	**61.405.558.071,00**
1.03.2.10.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	36.278.000.613	97.679.861.164	
1.04.1.03.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.760.883.240	1.764.580.760	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**7.857.420.775**	**10.191.945.851**	**2.334.525.076,00**
1.04.1.03.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7.857.420.775	10.191.945.851	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**18.594.536.632**	**24.434.321.274**	**5.839.784.642,00**
1.05.0.00.0.00.03.0000	SATUAN PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	13.701.264.452	18.438.945.779	
1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.893.272.180	5.995.375.495	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**5.833.303.794**	**5.157.233.178**	**-676.070.616,00**
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	5.833.303.794	5.157.233.178	

KODE	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	SETELAH PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	JUMLAH PERUBAHAN
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**83.235.581.652**	**103.724.180.575**	**20.488.598.923,00**
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**		**6.142.887.996**	**5.362.865.955**	**-780.022.041,00**
2.07.3.31.0.00.02.0000		DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	6.142.887.996	5.362.865.955	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		**5.592.433.749**	**6.327.701.773**	**735.268.024,00**
2.08.2.14.2.13.08.0000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA	5.592.433.749	6.327.701.773	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**		**3.157.251.426**	**3.695.788.193**	**538.536.767,00**
2.09.0.00.0.00.01.0000		DINAS KETAHANAN PANGAN	3.157.251.426	3.695.788.193	
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**		**136.788.000**	**97.394.000**	**-39.394.000,00**
1.03.2.10.0.00.01.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	136.788.000	97.394.000	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**		**19.986.211.470**	**26.117.013.646**	**6.130.802.176,00**
2.11.0.00.0.00.01.0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	19.986.211.470	26.117.013.646	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**		**4.617.745.532**	**5.017.636.080**	**399.890.548,00**
2.12.0.00.0.00.03.0000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.617.745.532	5.017.636.080	
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**		**0**	**0**	**0,00**

KODE	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	SETELAH PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	JUMLAH PERUBAHAN
2.08.2.14.2.13.08.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA	0	0	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**793.330.700**	**1.370.572.000**	**577.241.300,00**
2.08.2.14.2.13.08.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA	793.330.700	1.370.572.000	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**9.298.390.128**	**23.125.809.745**	**13.827.419.617,00**
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	9.298.390.128	23.125.809.745	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**9.690.860.266**	**10.495.622.961**	**804.762.695,00**
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.690.860.266	10.495.622.961	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**8.068.659.189**	**7.041.416.129**	**-1.027.243.060,00**
2.17.3.30.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	8.068.659.189	7.041.416.129	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**4.700.143.926**	**4.407.206.105**	**-292.937.821,00**
2.18.0.00.0.00.23.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.700.143.926	4.407.206.105	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**4.910.472.571**	**4.211.884.240**	**-698.588.331,00**

KODE	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	SETELAH PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	JUMLAH PERUBAHAN
3.26.2.19.2.22.02.0000	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.910.472.571	4.211.884.240	
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**100.654.050**	**62.726.350**	**-37.927.700,00**
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100.654.050	62.726.350	
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**418.957.980**	**333.174.068**	**-85.783.912,00**
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	418.957.980	333.174.068	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**1.794.897.250**	**1.430.094.400**	**-364.802.850,00**
3.26.2.19.2.22.02.0000	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.794.897.250	1.430.094.400	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**3.651.792.209**	**4.421.616.220**	**769.824.011,00**
2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.651.792.209	4.421.616.220	
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**174.105.210**	**205.658.710**	**31.553.500,00**
2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	174.105.210	205.658.710	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**31.998.191.402**	**34.556.865.890**	**2.558.674.488,00**
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**751.581.730**	**1.740.728.709**	**989.146.979,00**
3.27.3.25.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN	751.581.730	1.740.728.709	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**6.659.628.072**	**6.848.755.254**	**189.127.182,00**
3.26.2.19.2.22.02.0000	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	6.659.628.072	6.848.755.254	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**20.986.458.835**	**15.017.432.684**	**-5.969.026.151,00**
3.27.3.25.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN	20.986.458.835	15.017.432.684	

KODE	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	SETELAH PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	JUMLAH PERUBAHAN
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**		**3.012.219.500**	**10.344.924.380**	**7.332.704.880,00**
2.17.3.30.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		3.012.219.500	10.344.924.380	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**		**588.303.265**	**605.024.863**	**16.721.598,00**
2.07.3.31.0.00.02.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN		588.303.265	605.024.863	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**		**56.710.520.586**	**68.294.300.169**	**11.583.779.583,00**
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**		**32.913.423.435**	**33.465.502.675**	**552.079.240,00**
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH		32.913.423.435	33.465.502.675	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**		**23.797.097.151**	**34.828.797.494**	**11.031.700.343,00**
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD		23.797.097.151	34.828.797.494	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		**45.008.818.821**	**39.255.157.240**	**-5.753.661.581,00**
5.01	**PERENCANAAN**		**7.986.571.099**	**7.427.603.493**	**-558.967.606,00**
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		7.986.571.099	7.427.603.493	
5.02	**KEUANGAN**		**17.927.219.274**	**22.060.165.096**	**4.132.945.822,00**
5.02.0.00.0.00.10.0000	BADAN KEUANGAN DAERAH		17.927.219.274	22.060.165.096	
5.03	**KEPEGAWAIAN**		**18.679.947.398**	**8.944.443.751**	**-9.735.503.647,00**
5.03.5.04.0.00.02.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		18.679.947.398	8.944.443.751	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**		**15.081.550**	**608.670.550**	**593.589.000,00**
5.03.5.04.0.00.02.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		15.081.550	608.670.550	

KODE	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	SETELAH PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	JUMLAH PERUBAHAN
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**399.999.500**	**214.274.350**	**-185.725.150,00**
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	399.999.500	214.274.350	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**10.534.402.272**	**9.998.119.071**	**-536.283.201,00**
6.01	**INSPEKTORAT**	**10.534.402.272**	**9.998.119.071**	**-536.283.201,00**
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	10.534.402.272	9.998.119.071	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**56.059.723.314**	**57.752.825.085**	**1.693.101.771,00**
7.01	**KECAMATAN**	**56.059.723.314**	**57.752.825.085**	**1.693.101.771,00**
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT	17.719.058.575	18.710.826.335	
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	11.508.003.483	11.663.656.078	
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA	11.186.600.777	11.083.578.104	
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN	7.897.355.020	8.198.264.079	
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGARI	7.748.705.459	8.096.500.489	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**4.045.472.162**	**3.683.557.120**	**-361.915.042,00**
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**4.045.472.162**	**3.683.557.120**	**-361.915.042,00**
8.01.0.00.0.00.02.0000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.045.472.162	3.683.557.120	
TOTAL		**697.931.851.169**	**879.503.909.525**	**181.572.058.356,00**

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh, 2026

Rekapitulasi pagu perangkat daerah pada perubahan RKPD Tahun 2026 disusun sebagai bagian dari penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas program serta hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan. Penyesuaian pagu dilakukan mempertimbangkan

perkembangan kondisi ekonomi daerah, kemampuan keuangan daerah, kebutuhan pendanaan prioritas Pembangunan serta sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Secara umum perubahan pagu pada perangkat daerah terdiri atas penyesuaian anggaran untuk mendukung program prioritas, penguatan pelayanan dasar, pelaksanaan kegiatan strategis daerah, serta penyesuaian terhadap kebutuhan operasional dan *mandatory spending* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu perubahan pagu juga mempertimbangkan efisiensi belanja daerah, kemampuan keuangan daerah, dan optimnalisasi capaian indikator kinerja perangkat daerah.

Berdasarkah hasil pembahasan dan evaluasi terhadap pelaksaanaan program dan kegiatan perangkat daerah, terdapat perubahan alokasi pagu pada beberapa perangkat daerah, baik itu berupa penambahan maupun pengurangan anggaran. Perubahan ini diarahkan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah, optimalisasi pelayanan publik, penguatan reformasi birokrasi, percepatan Pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, pengendalian inflasi daerah, penanggulangan bencana dan kemiskinan serta penguatan ketahanan ekonomi masyarakat.

Berikut adalah tabel rekapitulasi pagu perubahan RKPD Tahun 2026 menurut perangkat daerah tertuang dalam tabel V-3

Tabel V-2
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Menurut Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026

No	KODE	PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	SETELAH PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	JUMLAH PERUBAHAN
1	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	129.626.947.265	184.045.778.632	54.418.831.367
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	210.388.048.641	238.965.183.516	28.577.134.875
3	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.414.788.613	97.777.255.164	61.362.466.551
4	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9.618.304.015	11.956.526.611	2.338.222.596
5	1.05.0.00.0.00.03.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	13.701.264.452	18.438.945.779	4.737.681.327
6	1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.893.272.180	5.995.375.495	1.102.103.315
7	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	5.833.303.794	5.157.233.178	-676.070.616
8	2.07.3.31.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	6.731.191.261	5.967.890.818	-763.300.443
9	2.08.2.14.2.13.08.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	6.385.764.449	7.698.273.773	1.312.509.324
10	2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan	3.157.251.426	3.695.788.193	538.536.767

No	KODE	PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	SETELAH PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	JUMLAH PERUBAHAN
11	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	19.986.211.470	26.117.013.646	6.130.802.176
12	2.12.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.617.745.532	5.017.636.080	399.890.548
13	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	9.298.390.128	23.125.809.745	13.827.419.617
14	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.210.472.296	10.891.523.379	12.915.337.449
15	2.17.3.30.0.00.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	11.080.878.689	17.386.340.509	-189.355.310
16	2.18.0.00.0.00.23.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.700.143.926	4.407.206.105	12.686.196.583
17	2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.825.897.419	4.627.274.930	581.308.686
18	3.26.2.19.2.22.02.0000	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	13.364.997.893	12.490.733.894	-874.263.999
19	3.27.3.25.0.00.01.0000	Dinas Pertanian	21.738.040.565	16.758.161.393	-4.979.879.172
20	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	32.913.423.435	33.465.502.675	552.079.240
21	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	23.797.097.151	34.828.797.494	11.031.700.343
22	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.386.570.599	7.641.877.843	-744.692.756
23	5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Keuangan Daerah	17.927.219.274	22.060.165.096	4.132.945.822
24	5.03.5.04.0.00.02.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.695.028.948	9.553.114.301	-9.141.914.647
25	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	10.534.402.272	9.998.119.071	-536.283.201
26	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Payakumbuh Barat	17.719.058.575	18.710.826.335	991.767.760
27	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Payakumbuh Timur	11.508.003.483	11.663.656.078	155.652.595
28	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Payakumbuh Utara	11.186.600.777	11.083.578.104	-103.022.673
29	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Payakumbuh Selatan	7.897.355.020	8.198.264.079	300.909.059
30	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	7.748.705.459	8.096.500.489	347.795.030
31	8.01.0.00.0.00.02.0000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	4.045.472.162	3.683.557.120	-361.915.042
TOTAL			**697.931.851.169**	**879.503.909.525**	**181.572.058.356**

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh, 2026

BAB VI
PENUTUP

VI. 1 KESIMPULAN

Perubahan RKPD Tahun 2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan, perkembangan kondisi ekonomi daerah, perubahan kebijakan nasional maupun provinsi, hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, serta kebutuhan percepatan pencapaian target pembangunan daerah Tahun 2026.

Berbagai perubahan yang tertuang dalam dokumen ini merupakan respon Pemerintah Kota Payakumbuh terhadap dinamika pembangunan yang terjadi sepanjang tahun berjalan, antara lain perubahan kondisi makro ekonomi daerah, perkembangan pendapatan daerah, efisiensi belanja daerah, kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, pelaksanaan program prioritas nasional, prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat, serta berbagai kebijakan strategis lainnya yang harus segera diakomodasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun dengan tetap menjaga konsistensi terhadap arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Tahun 2025–2045, RPJMD Tahun 2025–2029, serta berbagai dokumen perencanaan sektoral lainnya. Penyesuaian yang dilakukan tidak mengubah arah pembangunan daerah, namun lebih difokuskan pada penyempurnaan strategi, penajaman prioritas pembangunan, penyesuaian target indikator kinerja, perubahan program, kegiatan, sub kegiatan, serta penyelarasan alokasi pendanaan agar lebih efektif dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan yang berkembang.

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan KUPA dan PPAS Tahun Anggaran 2026, sekaligus menjadi dasar penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2026, Perubahan RKA, hingga penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) seluruh Perangkat Daerah. Dengan demikian, dokumen ini memiliki fungsi strategis sebagai instrumen sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Melalui Perubahan RKPD Tahun 2026 diharapkan seluruh sumber daya pembangunan dapat dialokasikan secara lebih optimal, tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel. Penyesuaian yang dilakukan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat penyelesaian berbagai isu strategis daerah, mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, meningkatkan daya saing daerah, memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi daerah, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga keberlanjutan pembangunan Kota Payakumbuh.

VI.2 KAEDAH PELAKSANAAN

Perubahan RKPD Tahun 2026 harus menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Seluruh program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja,

indikator, lokasi, kelompok sasaran, serta kebutuhan pendanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen ini harus diterjemahkan secara konsisten ke dalam Perubahan Renja PD, KUPA dan PPAS, RKA PD, hingga DPPA PD.

Setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab penuh terhadap ketercapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026. Oleh karena itu, setiap penyesuaian program dan anggaran harus dilaksanakan secara terukur, rasional, serta mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi, ekonomis, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Perubahan RKPD juga harus mengedepankan pendekatan manajemen kinerja melalui penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Seluruh Perangkat Daerah diharapkan mampu memastikan bahwa setiap belanja daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelesaian isu strategis pembangunan, serta pencapaian indikator kinerja daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026.

Dalam rangka menjaga kualitas implementasi, Pemerintah Kota Payakumbuh akan terus memperkuat mekanisme pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara berkala. Pengendalian pembangunan dilakukan melalui evaluasi capaian indikator kinerja, realisasi fisik dan keuangan, identifikasi berbagai hambatan pelaksanaan, serta penyusunan langkah-langkah percepatan apabila ditemukan potensi keterlambatan pencapaian target pembangunan. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut menjadi dasar bagi pengambilan keputusan strategis oleh Kepala Daerah dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan pembangunan hingga akhir tahun anggaran.

Selain itu, seluruh Perangkat Daerah harus memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kualitas data pembangunan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, DPRD, instansi vertikal, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya agar pelaksanaan pembangunan berjalan secara terpadu, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan berpedoman pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan Kota Payakumbuh selama sisa tahun anggaran dapat berlangsung lebih adaptif terhadap berbagai dinamika yang berkembang, mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah, menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, inovatif, dan akuntabel menuju terwujudnya Kota Payakumbuh yang maju, sejahtera, produktif, dan berkelanjutan

Keberhasilan implementasi Perubahan RKPD Tahun 2026 pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh komitmen seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, akademisi, media massa, organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat luas dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara kolaboratif, transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.

WALI KOTA PAYAKUMBUH

ZULMAETA

Bappeda
Kota Payakumbuh